



Meraih Peluang & Mengatasi Tantangan

untuk Mencapai #INTIBangkit

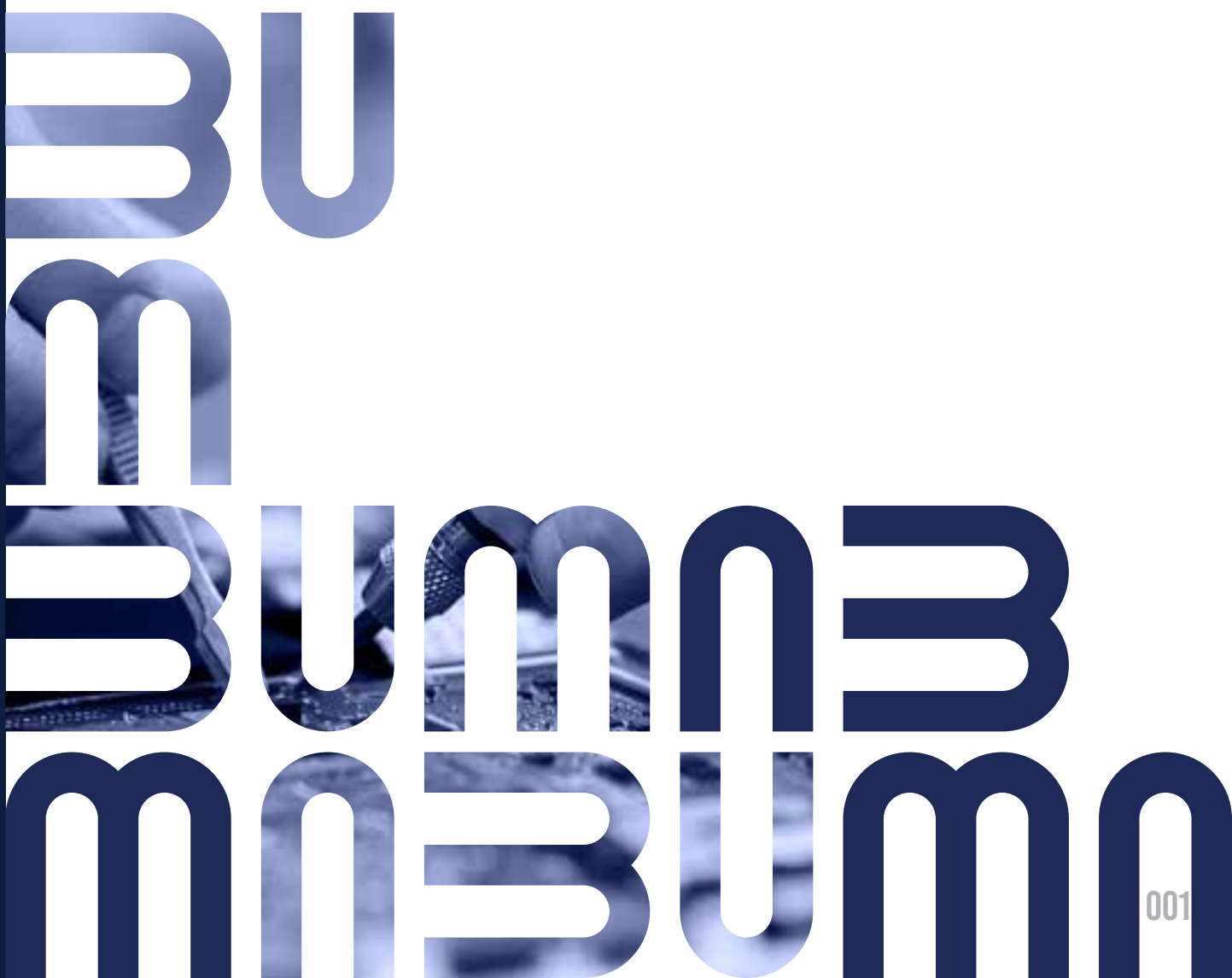
Seize Opportunities and Overcome Challenges to Achieve #INTIBangkit





Annual Report 2021

Laporan Tahunan





Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward-looking statements*) sehingga hasil-hasil nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan (*forward looking statements*) yang antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi dan politik baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga dan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman, serta perubahan-perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (*forward-looking statements*).

Beberapa foto yang ditampilkan dalam Laporan Tahunan 2021, diambil saat masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

* Dalam Laporan Tahunan ini nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia selanjutnya disingkat "PT INTI (Persero)" atau Perseroan.

This report contains certain statements that may be considered forward-looking statements, the Company's actual results, performance or achievements could differ materially from those projected in the forward-looking statements as a result, among other factors, of changes in general, national or regional economic and political conditions, changes in foreign exchange rates, changes in the prices and supply and demand on the commodity markets, changes in the size and nature of the Company's competition, changes in legislation or regulations and accounting principles, policies and guidelines and changes in the assumptions used in making such forward-looking statements.

Some of the photos featured in the 2021 Annual Report, were taken during the Covid-19 pandemic by implementing strict health protocols.

** In this Annual Report the name of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, hereinafter abbreviated as "PT INTI (Persero)" or the Company.*

Meraih Peluang & Mengatasi Tantangan

untuk Mencapai #INTIBangkit

Seize Opportunities and Overcome Challenges to Achieve #INTIBangkit

Dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan telekomunikasi dan transformasi digital bergerak lebih cepat. Hal ini menjadi peluang pada seluruh lini bisnis Perseroan sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dengan *value chain* yang *end-to-end* melalui portofolio *Manufacture & Assembly, System Integrator, Digital Service & Managed Service (MSDM)*, dan mengoptimalkan hasil-hasil inovasi Perseroan di berbagai bidang, baik inovasi produk, model bisnis, serta semua sumber daya yang dimiliki demi memberikan kontribusi yang tinggi bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan.

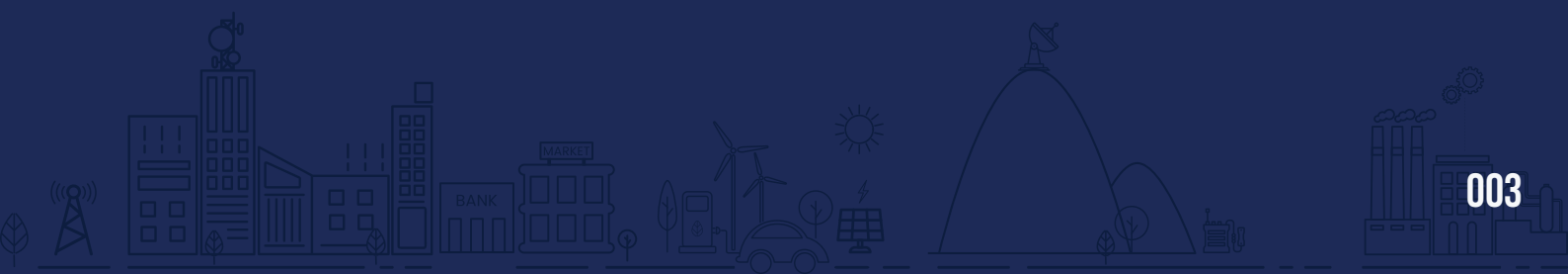
Perseroan menyadari bahwa PT INTI (Persero) berada di sektor industri yang lincah dan begitu banyak tantangan yang harus diatasi pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perubahan industri serta berkomitmen untuk terus menciptakan peluang pada seluruh lini bisnis dan akan terus berupaya mengatasi tantangan baik dari sisi bisnis, keuangan dan perencanaan strategi yang *agile* guna keberlangsungan usaha.

Secara umum, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan penjualan dengan tetap mempertimbangkan laba bersih, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran rutin, serta melakukan persiapan untuk perbaikan kinerja keuangan secara berkesinambungan dengan upaya-upaya penyelesaian dan restrukturisasi utang nonproduktif demi mewujudkan **INTI BANGKIT**.

With the Covid-19 pandemic, the development of telecommunications and digital transformation is moving faster. This is an opportunity for all of the Company's as the only state owned enterprise (SOE) engaged in the telecommunications industry with an end-to-end value chain through the Manufacture & Assembly, System Integrator, Digital Service, and Managed Service (MSDM) by optimizing the results of the Company's innovations in various fields, both product innovation, business models, and all available resources in order to make a high contribution to the achievement of the Company's strategic goals.

The Company realizes that PT INTI (Persero) is in an agile industrial sector and there are so many challenges that must be overcome during the Covid-19 pandemic. For this reason, the Company continues to strive to keep up with industry changes and is committed to continuing to create opportunities in all business lines and will continue to strive to overcome challenges in terms of agile business, finance and corporate strategic planning for business continuity.

*In general, the Company focuses on continuing to increase sales by considering net income, balancing routine income and expenses, as well as making preparations for continuous improvement of financial performance with efforts to settle and restructure non-productive debt in order to realize **INTI BANGKIT**.*





Kesinambungan Tema

Continuity of Theme

Meraih Peluang dan Mengatasi tantangan untuk mencapai #INTIBangkit

Seize Opportunities and Overcome challenges to achieve #INTIBangkit



2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan telekomunikasi dan transformasi digital bergerak lebih cepat. Hal ini menjadi peluang pada seluruh lini bisnis Perseroan sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dengan *value chain* yang *end-to-end* melalui portfolio *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service* (MSDM) dan mengoptimalkan hasil-hasil inovasi Perseroan di berbagai bidang, baik inovasi produk, model bisnis, serta semua sumber daya yang dimiliki demi memberikan kontribusi yang tinggi bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa PT INTI (Persero) berada di sektor industri yang lincah dan begitu banyak tantangan yang harus diatasi pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perubahan industri serta berkomitmen untuk terus menciptakan peluang pada seluruh lini bisnis dan akan terus berupaya mengatasi tantangan baik dari sisi bisnis, keuangan dan perencanaan strategi yang *agile* guna keberlangsungan usaha.

Secara umum, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan penjualan dengan tetap mempertimbangkan laba bersih, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran rutin, serta melakukan persiapan untuk perbaikan kinerja keuangan secara berkesinambungan dengan upaya-upaya penyelesaian dan restrukturisasi utang nonproduktif demi mewujudkan **INTI BANGKIT**.

With the Covid-19 pandemic, the development of telecommunications and digital transformation is moving faster. This is an opportunity for all of the Company's as the only state owned enterprise (SOE) engaged in the telecommunications industry with an end-to-end value chain through the portfolio Manufacture & Assembly, System Integrator, Digital Service, and Managed Service (MSDM) by optimizing the results of the Company's innovations in various fields, both product innovation, business models, and all available resources in order to make a high contribution to the achievement of the Company's strategic goals.

The Company realizes that PT INTI (Persero) is in an agile industrial sector and there are so many challenges that must be overcome during the Covid-19 pandemic. For this reason, the Company continues to strive to keep up with industry changes and is committed to continuing to create opportunities in all business lines and will continue to strive to overcome challenges in terms of agile business, finance and corporate strategic planning for business continuity.

*In general, the Company focuses on continuing to increase sales by considering net income, balancing routine income and expenses, as well as making preparations for continuous improvement of financial performance with efforts to settle and restructure non-productive debt in order to realize **INTI BANGKIT**.*

2020



Membentuk Kembali Masa Depan Melalui Restrukturisasi Perseroan

Reshaping the Future Through Corporate Restructuring

Tahun ini, PT INTI (Persero) membangun dan memperkuat pondasi bisnis untuk memanfaatkan kesempatan dengan mengoptimalkan hasil-hasil inovasi Perseroan di berbagai bidang, baik inovasi produk, proses, model bisnis, maupun pemasaran, serta semua sumber daya yang dimiliki demi memberikan kontribusi yang tinggi bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dengan meletakkan pondasi-pondasi manajemen bisnis yang ramping dan efisien, tentunya Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perubahan industri. Perseroan menyadari bahwa berada di sektor industri yang lincah, menunjukkan bahwa Perseroan harus terus berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Secara umum, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan penjualan dengan tetap mempertimbangkan laba bersih, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran rutin, serta melakukan persiapan untuk perbaikan kinerja keuangan secara berkesinambungan dengan upaya-upaya penyelesaian dan reprofiling utang nonproduktif demi mewujudkan **INTI BANGKIT**.

Within this year, PT INTI (Persero) builds and strengthens the business foundation to take advantage of opportunities by optimizing the Company's innovation results in various fields, both product innovation, process, business models, and marketing, as well as all available resources will provide a high contribution to the achievement of the Company's strategic objectives.

By laying the foundations for lean and efficient business management, it is important for the Company to keep up with the changes in the industry. The Company realizes that being in an agile industry, it means Companies must continue to innovate to continuously improve service to customers.

*In general, the Company is focusing on continuing to increase sales while taking into account net income and targeting to balance income and routine expenses, and also making preparations to continuously improve financial performance with efforts on unproductive debt reprofiling/settlements to achieve **INTI BANGKIT**.*



Membangun Kembali Pondasi yang Kuat untuk Keberlanjutan Jangka Panjang

Rebuilding Solid Foundations for Long Term Sustainability



2019

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2019, Perseroan dihadapkan pada kondisi sulit untuk akhirnya mengambil tindakan strategis dalam meningkatkan kualitas fundamental Perseroan. Dengan Empat Strategi Utama yang dijalankan selama tahun 2019 yaitu keseimbangan penerimaan dan pengeluaran rutin, pertumbuhan penjualan dan laba bersih, penyelesaian hutang nonproduktif, dan investasi selektif untuk pengembangan usaha, diharapkan Perseroan mencapai target yang ditetapkan.

Tahun ini, Perseroan telah dapat mencapai kesepakatan dengan Perbankan dan beberapa mitra utama untuk melakukan *reprofiling* hutang nonproduktif. Pencapaian ini menjadi pijakan untuk pengelolaan arus kas yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari, dan diharapkan secara bertahap menjadi generator bagi peningkatan kinerja Perseroan secara menyeluruh. Di sisi pengeluaran, Perseroan telah berhasil menerapkan efisiensi melalui penghematan biaya operasional dan biaya tenaga kerja.

Tahun 2019, ditutup dengan kontrak proyek *system integrator* dan *managed service* dengan Telkom dan PLN sebagai modal untuk penjualan tahun 2020.

With the various challenges faced in 2019, the Company faces challenging conditions to finally take strategic actions to improve the Company's fundamental quality. With Four Main Strategies implemented during 2019, i.e., the balance of routine revenue and expenditure, sales growth and net profit, non-productive debt settlement, and selective investment for business development, the Company is expected to achieve the target set.

This year, the Company has agreed with banks and several major partners to reprofile non-productive debt. This achievement is a foundation for managing cash flow more effectively and efficiently in the future and is expected to gradually become a generator to increase the Company's overall performance. On the expenditure side, the Company has succeeded in implementing efficiency by saving operating costs and labor costs.

In 2019, it was closed with a system integrator and managed a service contract with Telkom and PLN as saving for sales in 2020.

2018



Penguatan Struktur Keuangan Melalui Scaling-Up Bisnis Eksisting dan Pengembangan *New Revenue Stream*

Strengthening Financial Structure by Scaling-Up of Existing Business and Developing New Revenue Stream

Pada 2018 strategi yang dijalankan Perseroan adalah Penguatan Struktur Keuangan Melalui *Scaling-Up* Bisnis Eksisting dan Pengembangan *New Revenue Stream*, yang bermakna Perseroan berusaha untuk melalui prioritas peningkatan volume bisnis eksisting serta mengembangkan *new revenue stream* dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Perseroan.

Untuk mewujudkan target tahun 2018, Perseroan menjalankan sejumlah strategi bisnis melalui peningkatan bisnis eksisting seperti INTIPay, Instalasi Kabel Rumah/Migrasi, dan sebagainya. Di samping itu, pengembangan bisnis baru (*new revenue stream*) dan model bisnis baru, terutama di bidang *digital business*, peningkatan kontribusi *revenue* dari *recurring business*, serta kontrak dengan *contribution margin* yang lebih baik terus dilaksanakan.

Untuk mendukung strategi tersebut, PT INTI (Persero) pun melakukan pengembangan model pendanaan baru, di antaranya melalui kemitraan untuk mengembangkan *new revenue stream*. Lalu, revitalisasi manufaktur dengan model investasi baru, serta sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan *value creation*. Hal ini dibarengi pula dengan pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada manajemen proyek dan engineering.

Berbekal strategi ini, PT INTI (Persero) siap menghadapi tantangan industri dan mengamankan keberlanjutan bisnis Perseroan.

In 2018, the Company executed a Strengthening Financial Structure by Scaling-Up Existing Businesses and Developing New Revenue Streams, this means that Company strives to prioritize increasing the volume of existing businesses and developing new revenue streams to increase the Company's capacity and profitability.

To realize the target in 2018, the Company runs several business strategies by improving existing businesses such as INTIPay, Home Cable Installation/Migration, etc. In addition, with the development of new revenue streams and new business models, especially in the digital business field, enhancement of revenue contributions from recurring business and contracts with improved contribution margin continue to be implemented.

To support these strategies, PT INTI (Persero) developed a new funding model, including partnerships, to expand new revenue streams. Then, the revitalization of manufacturing with a new investment model and a synergy of state-owned enterprises to increase the value of creation. This is accompanied by human resource development that focuses on project management and engineering.

With these strategies, PT INTI (Persero) is ready to face the industry's challenges and secure the sustainability of our business.



Strategi Titik Balik : Bertahan Melalui Produktivitas

Turning Point Strategy: Surviving Through Productivity



2017

Tahun 2017 adalah periode titik balik PT INTI (Persero). Perseroan pun menjalankan Strategi Titik Balik : Bertahan Melalui Produktivitas, yang bermakna Perseroan berusaha untuk mempertahankan kondisi bisnis Perseroan melalui prioritas peningkatan produktivitas di segala bidang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampulabaan Perseroan.

Untuk mewujudkan target tahun 2017, Perseroan menjalankan sejumlah strategi bisnis melalui pengembangan bisnis baru (*new revenue stream*) dan model bisnis baru, terutama di bidang *digital business*, peningkatan kontribusi *revenue* dari *recurring business*, serta peningkatan kontrak dengan *contribution margin* yang lebih baik.

The year of 2017 was a turning point period for PT INTI (Persero). The Company also implements the Turnaround Strategy: Survival Through Productivity, which means that the Company strives to maintain the Company's business condition through priority to increase productivity in all fields to increase the Company's capacity and profitability.

To realize the target of 2017, the Company runs several business strategies by developing new business stream and new business models, especially in the digital business, increasing contribution from recurring revenue business and an increasing contract with the better contribution margin.

Ikhtisar Pencapaian Tahun 2021

Achievement Highlights in 2021

Selama tahun 2021, Perseroan mencatatkan sejumlah pencapaian sebagai berikut:

During 2021, Company recorded a number of achievements as follows:

Realisasi nilai Penjualan sebesar

Rp 371,73 miliar,

atau **52,60%** terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, turun sebesar

Rp 55,52 miliar atau minus **12,99%** terhadap periode yang sama tahun 2020.

Realized Sales value of Rp371.73 billion or 52.60% against Company Work Plan and Budget in 2021, decreased by Rp55.52 billion or minus 12.99% against the same period in 2020.

Realisasi Rugi tahun berjalan dan total kerugian komprehensif konsolidasian sebesar

Rp 89,73 miliar

atau **93,32%** dari tahun 2021 atau Rugi berkurang **50,38%** dari realisasi tahun 2020 sebesar Rugi

Rp 180,84 miliar.

Realized Loss for the year and a consolidated total comprehensive loss of Rp. 89.73 billion or 93.32% from 2021 or a Loss reduced by 50.38% from the realization in 2020 of a Loss of Rp180.84 billion.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

sebesar minus **Rp 50,54 miliar** atau tumbuh **37,67%** terhadap realisasi periode yang sama tahun 2020 sebesar minus **Rp 81,08 miliar** atau minus **145,39%** terhadap RKAP tahun 2021.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of minus Rp50.54 billion or growing 37.67% against the realization of the same period in 2020 of minus Rp81.08 billion or minus 145.39% of the 2021 Company Work Plan and Budget.

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19)

Dalam rangka mendukung langkah strategis Pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 maka PT INTI (Persero) membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KD.043/KP02.03/021100/2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang dipimpin oleh Direktur Bisnis PT INTI (Persero) selaku Ketua Satuan Tugas dan Direktur Keuangan PT INTI (Persero) yang bertindak sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas ini bertugas untuk merumuskan langkah-langkah aplikatif terkait pencegahan dan penanganan Virus Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Selain itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap implementasi protokol kesehatan Virus Covid-19 di lingkungan Perseroan, serta melakukan koordinasi dan penanganan Virus Covid-19 bagi karyawan, keluarga, mitra kerja, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan jika diperlukan.

Sebagai bentuk antisipasi dan implementasi bisnis berkelanjutan di era The New Normal sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario the New Normal BUMN, maka Perseroan pun merumuskan sejumlah aturan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang dituangkan melalui sejumlah kebijakan berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.015/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Direksi Nomor KN.009/2020 tentang Kebijakan Bekerja dari Rumah (Work from Home atau WFH).
2. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.014/2020 tentang Protokol Interaksi Pelanggan.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.015/2020 tentang Protokol Interaksi Pemasok.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2020 tentang Protokol Interaksi Mitra Usaha.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.017/2020 tentang Protokol Interaksi Stakeholders Lain.
6. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.018/2020 tentang Protokol Interaksi Karyawan.

In order to support the Government's strategic steps to deal with the Covid-19 pandemic, PT INTI (Persero) formed a Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) as stated in the Decree of the Board of Directors Number KD.043/KP02.03/021100/2020 concerning the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19).

The Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) led by the Business Director of PT INTI (Persero) as the Chair of the Task Force and the Finance Director of PT INTI (Persero) who acts as the Deputy Chair of the Task Force is tasked with formulating applicable steps related to the prevention and handling of the Covid-19 Virus in accordance with Government regulations.

In addition, the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) also has the responsibility to carry out strict supervision and evaluation of the implementation of the Covid-19 Virus health protocol within the Company, as well as to coordinate and handle the Covid-19 Virus for employees, families, work partners, and communities around the Company's operational areas if needed.

As a form of anticipation and implementation of sustainable business in The New Normal era in accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-336/MBU/05/2020 concerning Anticipation of the New Normal SOEs Scenario, the Company also formulated a number of rules for implementing habitual adaptation which is outlined through the following policy:

1. Decree of the Board of Directors Number KN.015/2021 concerning the Third Amendment to the Board of Directors Decree Number KN.009/2020 concerning Work from Home or WFH Policy.
2. Decree of the Board of Directors Number KN.014/2020 concerning Customer Interaction Protocol.
3. Decree of the Board of Directors Number KN.015/2020 concerning Supplier Interaction Protocol.
4. Decree of the Board of Directors Number KN.016/2020 concerning Business Partner Interaction Protocol.
5. Decree of the Board of Directors Number KN.017/2020 concerning Protocol for Interaction of Other Stakeholders.
6. Decree of the Board of Directors Number KN.018/2020 concerning Employee Interaction Protocol.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) juga dibantu oleh Covid Ranger INTI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KD.086/KP.09/021100/2020 tentang Covid Ranger INTI untuk mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi the New Normal sekaligus perilaku disiplin sesuai dengan Protokol Penanganan Virus Covid-19.

In carrying out its responsibilities, the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) is also assisted by the INTI Covid Ranger which was formed through the Decree of the Board of Directors Number KD.086/KP.09/021100/2020 concerning the INTI Covid Ranger to campaign for the optimism movement. in dealing with the New Normal as well as disciplinary behavior in accordance with the Covid-19 Virus Handling Protocol.

Kontrak Penjualan Konsolidasi

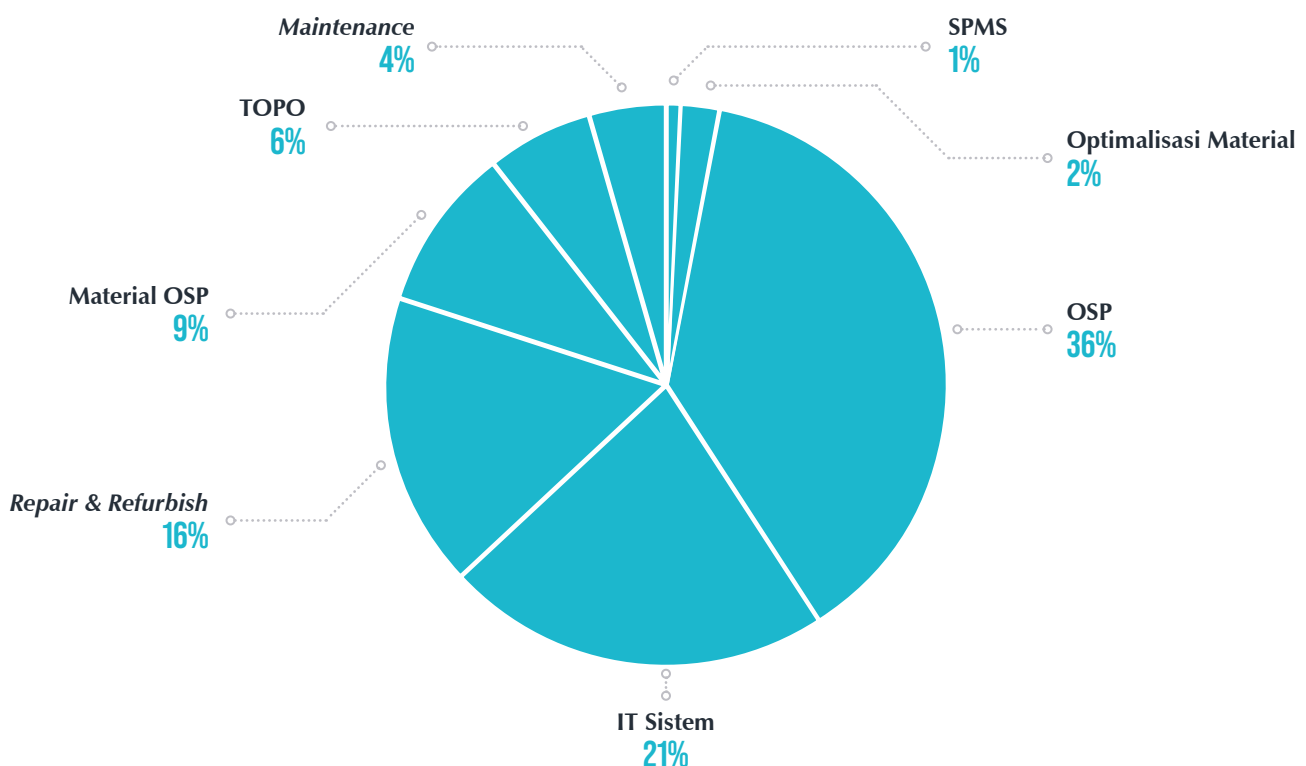
Consolidated Sales Contract

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp311,07 miliar, naik Rp11,71 miliar atau tumbuh 3,91% dari periode yang sama tahun 2020 atau 51,70% dari RKAP tahun 2021.

The acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2021 amounted to Rp311.07 billion, an increase of Rp11.71 billion or grew 3.91% from the same period in 2020 or 51.70% from the Company Work Plan and Budget in 2021

Realisasi perolehan kontrak tahun 2021 adalah sebesar Rp311,07 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plan* (OSP) sebesar Rp113,55 miliar, proyek *Information Technology* (IT) System Rp64,46 miliar, *Repair and Refurbish* Rp51,21 miliar, *Material OSP* Rp26,72 miliar, *Tower and Power* (TOPO) Rp19,56 miliar, *Maintenance* Rp11,63 miliar, *Optimalisasi Material* Rp5,81 miliar, *KTP-el Reader* Rp 4,34 miliar, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp2,95 miliar, *Plato* 1,88 miliar, proyek *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp1,61 miliar, proyek *e-Voting* Rp1,46 miliar, *Plastik* Rp1,29 miliar, proyek *Site Acquisition* (SITAC), *Civil, Mechanical & Electrical* (SACME) Rp1,08 miliar, *Metal* Rp1,04 miliar, *Sewa* Rp1,01 miliar, dan proyek-proyek lainnya senilai Rp1,41 miliar, sehingga total perolehan kontrak adalah Rp311,07 miliar.

Realization of contract acquisition in 2021 is Rp311.07 billion, mainly from Outside Plan (OSP) project of Rp113.55 billion, Information Technology (IT) System project of Rp64.46 billion, Repair and Refurbish Rp51.21 billion, Material OSP Rp26, 72 billion, Tower and Power (TOPO) Rp19.56 billion, Maintenance Rp11.63 billion, Material Optimization Rp5.81 billion, KTP-el Reader Rp4.34 billion, Spare Part Management System (SPMS) Rp2.95 billion, Plato project 1.88 billion, Rp1.61 billion Mobile Point of Sales (MPOS) project, Rp1.46 billion e-Voting project, Plastic project Rp1.29 billion, Site Acquisition (SITAC), Civil, Mechanical & Electrical (SACME) project Rp1.08 billion, metal projects Rp1.04 billion, Rental Rp1.01 billion, and other projects worth Rp1.47 billion, so the total contract acquisition is Rp311.07 billion.



Kontrak Penjualan Konsolidasi

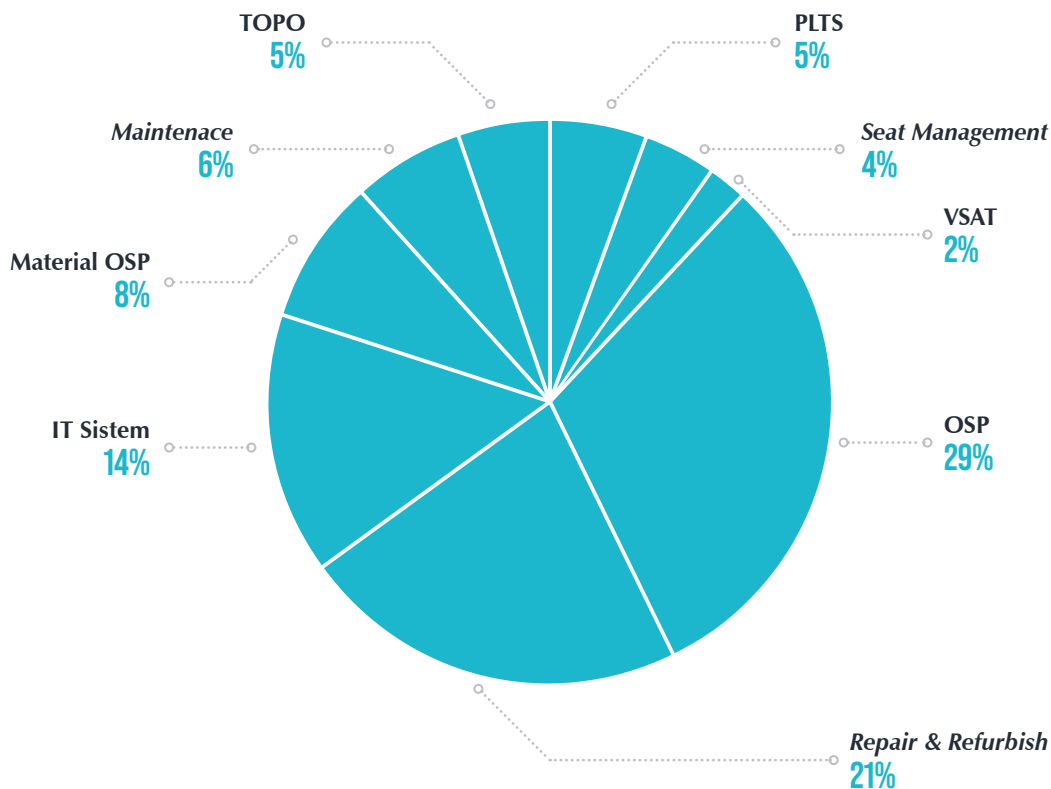
Consolidated Sales Contract

Penjualan Konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar, turun Rp55,52 miliar atau minus 12,99% dari periode yang sama tahun 2020 atau 52,60% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021.

Realisasi perolehan Penjualan tahun 2021 adalah sebesar Rp371,73 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plan (OSP)* Rp108,71 miliar, proyek *Repair and Refurbish* sebesar Rp79,12 miliar, *Information Technology (IT) System* Rp53,77 miliar, proyek *Material OSP* Rp29,23 miliar, *Maintenance* Rp22,87 miliar, *Tower and Power (TOPO)* Rp19,58 miliar, *Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)* Rp17,73 miliar, *Seat Management* Rp13,04 miliar, *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* Rp6,59 miliar, *Optimalisasi Material* Rp5,07 miliar, *Spare Part Management System (SPMS)* Rp2,93 miliar, proyek *Mobile Point of Sales (MPOS)* Rp1,59 miliar, proyek *Site Acquisition (SITAC), Civil, Mechanical & Electrical (SACME)* Rp 1,51 miliar, *e-Voting* Rp1,46 miliar, proyek *KTP-el Reader* Rp1,21 miliar, *Sewa* Rp1,15 miliar, *Bird Strike* Rp1,13 miliar, dan proyek-proyek lainnya senilai Rp5,04 miliar, sehingga perolehan total Penjualan adalah Rp371,73 miliar.

Consolidated Sales in 2021 amounted to Rp371.73 billion, decreased by Rp55.52 billion or minus 12.99% from the same period in 2020 or 52.60% of the 2021 Company Work Plan and Budget.

Realization of sales revenue in 2021 was Rp. 371.73 billion, mainly from the Outside Plan (OSP) project Rp108.71 billion, the Repair and Refurbish project Rp79.12 billion, the Information Technology (IT) System Rp53.77 billion, the OSP Material project of Rp29, 23 billion, Maintenance Rp22.87 billion, Tower and Power (TOPO) Rp 19.58 billion, Solar Cell Rp17.73 billion, Seat Management Rp13.04 billion, Very Small Aperture Terminal (VSAT) Rp6.59 billion, Material Optimization Rp5, 07 billion, Spare Part Management System (SPMS) Rp2.93 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp1.59 billion, Site Acquisition (SITAC), Civil, Mechanical & Electrical (SACME) project Rp1.51 billion, e-Voting Rp1.46 billion, KTP-el Reader Rp1.21 billion, Rental Rp1.15 billion, the Bird Strike Rp1.13 billion, and other projects Rp5.04 billion, bringing the total Sales revenue Rp371.73 billion.



Kinerja Keuangan Perusahaan Konsolidasi

Consolidated Company Financial Performance

Realisasi Penjualan tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar atau 52,60% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, turun sebesar Rp55,52 miliar atau minus 12,99% terhadap periode yang sama tahun 2020. Dengan total Beban Rp484,39 miliar (Beban Pokok Penjualan, Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, Beban Pengembangan, Beban Pendanaan, ditambah Pendapatan dan Beban Lain-Lain, dan Beban Pajak Final) Perusahaan mengalami Rugi Usaha setelah Beban Pendanaan sebesar Rp112,65 miliar, maka Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan dan total Kerugian Komprehensif Konsolidasian sebesar Rp89,73 miliar atau 93,32% dari tahun 2021 atau Rugi berkurang 50,38% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp180,84 miliar.

Meskipun demikian, Perseroan telah mampu melakukan upaya perbaikan profitabilitas di antaranya:

1. Perbaikan rasio beban pokok terhadap penjualan melalui pengetatan dan pengawasan proyek secara lebih intensif, hal ini terlihat dari menurunnya rasio beban pokok terhadap penjualan yang menurun 5,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.
2. Pada umumnya Penjualan membukukan margin positif baik dari laba kotor maupun margin kontribusi.
3. Realisasi *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) tahun 2021 adalah sebesar minus Rp53,99 miliar atau naik sebesar Rp27,10 miliar atau tumbuh 33,42% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2020.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Perusahaan telah menuju kepada perbaikan yang baik, untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas Perusahaan, ukuran proyek yang lebih besar menjadi salah satu solusi yang perlu dukungan Pemegang Saham.

The realization of Sales in 2021 was Rp 371.73 billion or 52.60% of the 2021 Company Work Plan and Budget, decreased by Rp55.52 billion or minus 12.99% against the same period in 2020. With a total expense of Rp. 484.39 billion (Cost of Goods Sold, Selling Expenses, General and Administrative Expenses, Development Expenses, Funding Expenses, plus Other Income and Expenses, and Final Tax Expense) the Company experienced an operating loss after financing expenses of Rp112.65 billion, the Company posted a Loss for the Year and a consolidated total Comprehensive Loss of Rp89.73 billion or 93.32% from 2021 or a Loss reduced by 50.38% from the realization in 2020 Rp180.84 billion.

However, the Company has been able to make efforts to improve profitability, including:

1. Improvements in the ratio of cost of goods to sales through tightening and more intensive project supervision, this can be seen from the decrease in the ratio of cost of goods to sales which decreased by 5.72% compared to the same period in 2020.
2. In general, Sales posted positive margins from both gross profit and contribution margin.
3. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) realization in 2021 is minus Rp53.99 billion or an increase of Rp27.10 billion or growing 33.42% compared to the realization of the same period in 2020.

Thus, it can be conveyed that the Company has made good progress, in order to further increase the profitability of the Company, a larger project size is one solution that needs shareholder support.

Realisasi Investasi Konsolidasi

Consolidated Sales Contract

Realisasi investasi konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp1,76 miliar atau 7,93% terhadap RKAP tahun 2021 dan minus 15,25% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Realisasi Investasi berasal dari Bangunan dan Emplasemen sebesar Rp192 juta, Alat Olah Data atau Sistem Informasi Rp205,73 juta, Aset Dalam Pembangunan Produk sebesar Rp377,76 juta, dan Software sebesar Rp983,83 juta.

The realization of consolidated investment in 2021 is Rp1.76 billion or 7.93% of the RKAP in 2021 and minus 15.25% when compared to the same period in 2020. Realization of Investment comes from Buildings and Emplacements of Rp192 million, Data Processing Tools or Information System 205.73 million, Assets Under Product Development of Rp377.76 million, and Software of Rp983.83 million.



Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan akan melakukan pengukuran maturity level dengan *self-assessment* risiko di tahun 2021 dari Divisi. Kegiatan sosialisasi Manajemen Risiko diadakan sejak awal tahun sampai dengan sekarang. Improvement untuk proses evaluasi sedang dilaksanakan yaitu berupa template evaluasi yang baru dan improvement dashboard asesmen manajemen risiko yang tengah ditindaklanjuti oleh tim Teknologi Informasi. Selain itu juga telah dilaksanakan evaluasi terhadap Kebijakan (Komitmen) Manajemen Risiko.

The Company will measure the maturity level with a risk self-assessment in 2021 from the Division. Risk Management socialization activities have been held since the beginning of the year until now. Improvements to the evaluation process are being implemented in the form of a new evaluation template and an improvement to the risk management assessment dashboard which is being followed-up by the Information Technology team. In addition, an evaluation of the Risk Management Policy (Commitment) has also been carried out.

Manajemen Kualitas

Quality Management

PT INTI (Persero) telah menindaklanjuti semua temuan audit eksternal sehingga masih berhak untuk menggunakan sertifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018.

Untuk mempertahankan sertifikat dan mengimplementasikan standar manajemen kualitas sehingga dapat mendorong kinerja Perusahaan, PT INTI (Persero) selalu melaksanakan audit internal, eksternal, dan evaluasi ketaatan terhadap perundangan yang relevan dengan perusahaan secara konsisten yaitu dua kali dalam setahun.

Dalam mendukung implementasi sistem manajemen terintegrasi, pihak manajemen kualitas selalu melaksanakan sosialisasi, monitoring implementasi, dan evaluasi.

PT INTI (Persero) has followed up on all external audit findings so that it is still entitled to use ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, and ISO 45001:2018 certificates.

To maintain the certificate and implement quality management standards so as to encourage the Company's performance, PT INTI (Persero) always carries out internal, external audits, and consistently evaluates compliance with laws and regulations relevant to the company, which is two times a year.

In supporting the implementation of an integrated management system, the quality management unit always carries out socialization, implementation monitoring, and evaluation.

Informasi Corporate Action

Corporate Action Information

Uraian Aksi Korporasi

Description of Corporate Action

PT INTI (Persero) telah melaksanakan berbagai upaya dan aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja 2021 sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan Opsi Restrukturisasi PT INTI (Persero), dengan status berikut:
 - a. PT INTI (Persero) telah menyelesaikan kajian Restrukturisasi Bisnis, Restrukturisasi Keuangan, dan Optimalisasi Aset.
 - b. Di dalam kajian restrukturisasi dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), diusulkan 5 (lima) opsi yaitu:
 - 1) Opsi *Business to Business* dengan Telkom Group serta tambahan Kredit Modal Kerja dan dana talangan dari perbankan atau pihak ketiga lainnya.
 - 2) Opsi *Business to Business* dengan Telkom Group serta usulan penjualan aset tanah dan bangunan di Jalan Moch. Toha Nomor 77 Bandung.
 - 3) Opsi menjadi anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. Penjualan Saham Mayoritas PT INTI (Persero) ke PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. (Konsolidasi PT INTI (Persero) ke dalam Telkom Group), dengan teknis sebagai berikut:

PT INTI (Persero) has carried out various efforts and corporate actions to improve performance 2021 as follows:

1. *Application for PT INTI (Persero) Restructuring Option Approval, with status as follow:*
 - a. *PT INTI (Persero) has completed the study of Business Restructuring, Financial Restructuring, and Asset Optimization.*
 - b. *In the restructuring study of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), 5 (five) options were proposed, namely:*
 - 1) *Business to Business options with Telkom Group and additional Working Capital Credit and bailouts from banks or other third parties.*
 - 2) *Business to Business option with Telkom Group and proposed sale of land and building assets on Moch. Toha Street Number 77 Bandung.*
 - 3) *Option to become a subsidiary of PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. Sale of Majority Shares of PT INTI (Persero) to PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. (Consolidation of INTI into Telkom Group), with the following technical procedures:*



- PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. melakukan penyertaan ke PT INTI (Persero) sebagai pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*).
 - *Consideration Transferred* yang diharapkan berupa *Debt to Equity Swap* utang usaha PT INTI (Persero) kepada PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. dan dana segar Rp406 miliar.
 - Pada saat ini saham PT INTI masih 100% milik Negara.
- 4) Opsi menjual saham kepada badan usaha milik negara (BUMN) lain sebesar 49% (saham pemerintah 51%). Penjualan Saham PT INTI (Persero) ke PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. dan BUMN lain, dengan teknis sebagai berikut:
- PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. bersama BUMN lain memberikan setoran modal tunai sebagai pemegang saham minoritas di PT INTI (Persero).
 - PT INTI (Persero) menyicil utang usaha kepada PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., pada tahun 2029.
 - BUMN lain memberikan tambahan modal kerja.
 - Pada saat ini saham PT INTI (Persero) masih 100% milik Negara.
2. Permohonan Fasilitas Kredit dan Dana Talangan, dengan status sebagai berikut:
- a. PT INTI (Persero) telah menyelesaikan kajian restrukturisasi bisnis, keuangan, dan optimalisasi aset dengan dibantu oleh konsultan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- b. Dalam skenario baseline yang disusun oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT INTI (Persero) harus mendapatkan kredit modal kerja dan dana talangan agar Perseroan going concern.
- c. PT INTI (Persero) tidak dapat memperoleh kredit modal kerja dari perbankan karena tingkat kolektibilitas Perseroan berada di kolektibilitas 5. Oleh karena itu, Perseroan berupaya mencari sumber-sumber pendanaan non perbankan, termasuk kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- d. Kredit modal kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek baik saat ini maupun ke depannya.
- e. Dalam skenario baseline yang disusun oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT INTI (Persero) harus mendapatkan dana talangan untuk menyelesaikan hutang-hutang masa lalu, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan proyek-proyek yang berjalan saat ini maupun ke depannya.
- PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. to invest in PT INTI (Persero) as the controlling shareholder.
 - The *Consideration Transferred* is expected to be in the form of *Debt to Equity Swap* of PT INTI (Persero)'s trade payables to PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. and fresh funds of Rp406 billion.
 - Currently, PT INTI (Persero)'s shares are still 100% owned by the State.
- 4) Option to sell shares to other state owned enterprises (SOEs) by 49% (government shares 51%). The sale of INTI's shares to Telkom and other SOEs, with the following technical procedures:
- PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. and other SOEs provide cash capital payments as minority shareholders in PT INTI (Persero).
 - PT INTI (Persero) pays off trade payables to PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., in 2029.
 - Other SOEs provide additional working capital.
 - Currently, PT INTI's shares are still 100% owned by the State.
2. Application for credit facilities and bailout funds, with status as follow:
- a. PT PT INTI (Persero) has completed a study on business restructuring, finance, and asset optimization with the assistance of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- b. In the baseline scenario prepared by the PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT INTI (Persero) must obtain working capital credit and bailout funds so that the Company to be going concern.
- c. PT INTI (Persero) cannot obtain working capital credit from the bank because the Company's collectibility level is at collectibility 5. Therefore, the Company seeks to seek non-banking funding sources, including PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- d. The Working Capital Credit is to meet the needs of projects both now and in the future.
- e. In the baseline scenario prepared by Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT INTI (Persero) must obtain bailout funds to settle past debts, so as not to interfere with the implementation of current and future projects.

- f. Sebagai informasi tambahan, modal disetor untuk PT INTI (Persero) baru disetorkan sebesar Rp350 miliar dari total Rp1 triliun (satu triliun rupiah).
3. Restrukturisasi utang bank menjadi 10 tahun dengan bunga pinjaman lunak. Di Oktober 2020, telah berhasil dilakukan restrukturisasi utang bank Mandiri menjadi 10 tahun, dengan bunga 7,5% dan deferred bunga 6,5%. Kemudian telah dilakukan negosiasi lanjutan dengan Bank BRI dan Bank Mandiri, dan disetujui bunga turun menjadi 6%, dengan *deferred* bunga 5%.
4. Restrukturisasi utang vendor
Telah dilakukan restrukturisasi utang vendor dengan opsi:
- Diangsur selama 4 tahun;
 - Diangsur melalui kerjasama kembali;
 - Dilakukan *haircut* hingga 50% dengan angsuran lebih cepat.
5. Restrukturisasi bisnis
Memperbesar proyek-proyek dengan Telkom Group dan kastamer yang bonafid, seperti grup BUMN (Pertamina, PLN, Icon+, Airnav, dan lain-lain), lembaga pemerintahan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lainnya), serta swasta (Indosat dan lainnya).
6. *Cost leadership*
Melakukan efisiensi biaya pada seluruh bidang operasional, termasuk melakukan pengadaan material-material dengan harga kompetitif.
7. Program penguatan *front liner*
Telah diimplementasikan program penguatan *front liner* berbanding *back office* dengan porsi 70:30 sehingga efektivitas pola kerja yang optimal.
8. Program pensiun dini dan program dirumahkan
Telah dirilis program pensiun dini dan program dirumahkan, sehingga dapat menekan *fixed cost* tenaga kerja.
9. *Redefine* visi, misi dan arah pengembangan jangka panjang
Telah disusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan visi, misi, dan arah pengembangan jangka panjang yang terstruktur.
10. Optimalisasi aset
Pendayagunaan aset telah dilakukan melalui penyewaan lahan dan bangunan yang *idle*, sehingga dapat menambah penerimaan lain-lain perusahaan.
11. Lelang atas aset non operasional
Dilakukan lelang atas aset yang sudah dinyatakan non operasional dan tidak akan digunakan kembali.
12. Peningkatan *recurring* bisnis
- f. For additional information, the paid-up capital for PT INTI (Persero) has only been paid up for Rp350 billion from a total of Rp1 trillion (one trillion rupiah).
3. Restructuring bank debt to 10 years with soft loan interest. In October 2020, Bank Mandiri's debt restructuring was successfully carried out to 10 years, with 7.5% interest and 6.5% deferred interest. After that, further negotiations were carried out with Bank BRI and Bank Mandiri and it was agreed that the interest rate would be reduced to 6%, with a deferred interest rate of 5%.
4. Vendor debt restructuring
Vendor debt restructuring has been carried out with options:
- Installments over 4 years.
 - Installments through re-cooperation.
 - The haircut of up to 50% is carried out with faster installments.
5. Business restructuring
Enlarging projects with the Telkom Group and bona fide customers, such as SOEs groups (Pertamina, PLN, Icon+, Airnav, etc.), government institutions (Ministry of Energy and Mineral Resources and others), and private companies (Indosat and others) other).
6. Cost leadership
Carry out cost efficiency in all operational areas, including procuring materials at competitive prices.
7. Frontliner strengthening program
The program has been implemented to strengthen the frontliner compared to the back office with a portion of 70:30 so that the effectiveness of the work pattern is optimal.
8. Early retirement and layoff programs
An early retirement program and a layoff program have been launched, so as to reduce the fixed cost of labor.
9. Redefine vision, mission and long-term development direction
The Company's Long Term Plan has been prepared with a structured vision, mission, and long-term development direction.
10. Asset optimization
Asset utilization has been carried out through the leasing of idle land and buildings, so as to increase the company's other revenues.
11. Auction for non-operational assets
An auction is conducted for assets that have been declared non-operational and will not be reused.
12. Peningkatan recurring bisnis



Memperbesar porsi recurring bisnis sehingga diperoleh pendapatan yang rutin setiap bulan, tidak lagi bergantung pada proyek-proyek non-rutin.

13. Fokus pada proyek-proyek margin besar
Telah dipilih proyek-proyek yang memiliki margin besar dan merenegosiasi atau menghentikan proyek-proyek margin negatif sehingga profitabilitas Perusahaan meningkat.
14. Melakukan pengajuan pelepasan aset
Salah satu opsi penyehatan kondisi PT INTI yang diberikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kuasa pemegang saham adalah melakukan penjualan aset. Saat ini, PT INTI (Persero) memiliki aset yang terdiri dari Kantor Pusat yang berada di Jalan Moch. Toha Nomor 77 Bandung dan Fasilitas Produksi di Jalan Moch. Toha Nomor 225 Bandung. Dengan disetujuinya opsi tersebut, diharapkan dari aset yang laku terjual dapat melunasi hutang-hutang PT INTI (Persero) dan kondisi PT INTI (Persero) menjadi lebih baik.
15. Rekrutasi karyawan kontrak
Demi menjaga keseimbangan antara beban pekerjaan dengan jumlah karyawan yang produktif, PT INTI (Persero) melakukan program rekrutmen karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
16. Reorganisasi perusahaan
Perusahaan melakukan perubahan pada struktur organisasi Direktorat Bisnis yang semula terdiri dari empat divisi (Divisi Pemasaran dan Penjualan, Divisi Produksi dan Layanan Terkelola, Divisi Pengembangan Produk dan Solusi, Divisi Manajemen Proyek dan Jaminan Kualitas) menjadi enam divisi (Divisi *Manufacture*, Divisi *System Integrator*, Divisi *Information Technology* dan *Digital Service*, Divisi *Managed Service*, Divisi Pemasaran dan Penjualan, serta Divisi Rekayasa dan Pengembangan Produk).

Enlarging the portion of recurring business so that regular income is obtained every month, no longer dependent on non-routine projects.

13. *Focus on big margin projects*
The projects with large margins have been selected and renegotiated or terminated the negative margin projects so that the Company's profitability increases.
14. *Propose for Asset Disposal*
One of the options to improve PT INTI's condition given by PT PPA as the shareholder's proxy is to sell assets. Currently PT INTI owns assets consisting of the Head Office located on Moch Toha Street Number 77 Bandung and Production Facilities on Moch Toha Street Number 225 Bandung. With the approval of the option, it is hoped that the sold assets can pay off PT INTI (Persero)'s debts and PT INTI (Persero)'s condition will be better.
15. *Recruitment of contract employees*
In order to maintain a balance between the workload and the number of productive employees, PT INTI (Persero) conducts an employee recruitment program with a certain time work agreement.
16. *Company reorganization*
The Company made changes to the organizational structure of the Business Directorate which originally consisted of four divisions (Marketing and Sales Division, Production and Managed Service Division, Product and Solution Development Division, Project Management and Quality Assurance Division) to six divisions (Manufacture Division, System Integrator Division), Information Technology and Digital Service Division, Managed Service Division, Marketing and Sales Division and Product Engineering and Development Division).

Halaman Sengaja Dikosongkan
Page Intentionally Left Empty



Ikhtisar Kinerja 2021

Performance Overview in 2021

Realisasi Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2021 per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

The realization of the Company's 2021 Work Plan per sector can be explained as follows:

Pemasaran dan Penjualan

Marketing and Sales

1. Merealisasikan kontrak penjualan tahun 2021 sebesar Rp311,07 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plan* (OSP) sebesar Rp113,55 miliar, *Information Technology* (IT) System Rp64,46 miliar, *Repair and Refurbish* Rp51,21 miliar, Material OSP Rp 26,72 miliar, Tower and Power (TOPO) Rp19,56 miliar, *Maintenance* Rp11,63 miliar, Optimalisasi Material Rp5,81 miliar, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp2,95 miliar, KTP-el Reader Rp3,34 miliar, Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) Rp1,88 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 1,61 miliar, e-Voting Rp 1,46 miliar, Plastik Rp1,29 miliar, *Site Acquisition* (SITAC), *Civil, Mechanical & Electrical* (SACME) Rp1,08 miliar, Metal Rp1,04 miliar, Sewa Rp1,01 miliar, dan proyek-proyek lainnya senilai Rp1,41 miliar, sehingga total perolehan kontrak adalah Rp311,07 miliar.
1. Realized sales contract in 2021 amounting to Rp311.07 billion, mainly from Outside Plan (OSP) project Rp113.55 billion, Information Technology (IT) System Rp64.46 billion, Repair and Refurbish Rp51.21 billion, Material OSP Rp26.72 billion, Tower and Power (TOPO) Rp19.56 billion, Maintenance project Rp11.63 billion, Material Optimization project Rp5.81 billion, Spare Part Management System Rp2.95 billion, KTP Reader Rp3.34 billion, Auto Traffic Counter (PLATO) Rp1.88 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp1.61 billion, e-Voting Rp1.46 billion, Plastic Rp1.29 billion, Site Acquisition (SITAC), Civil, Mechanical & Electrical (SACME) project Rp1.08 billion, Metal Rp1.04 billion, Rental Rp1.01 billion, and other projects worth Rp1.41 billion, so that the total contract acquisition is Rp311.07 billion.
2. Merealisasikan perolehan Penjualan tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar, terutama berasal dari proyek OSP Rp108,71 miliar, proyek *Repair and Refurbish* sebesar Rp79,12 miliar, IT System Rp53,77 miliar, Material OSP Rp29,23 miliar, *Maintenance* Rp22,87 miliar, TOPO Rp19,58 miliar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp17,73 miliar, Seat Management Rp13,04 miliar,
2. Realized sales in 2021 Rp 371.73 billion, mainly from the OSP Rp108.71 billion, the Repair and Refurbish Rp79.12 billion, the IT System Rp53.77 billion, the Material OSP Rp29.23 billion, Maintenance Rp22.87 billion, TOPO Rp19.58 billion, Solar Cell Rp17.73 billion, Seat Management Rp13.04 billion, Very Small Aperture Terminal (VSAT) Rp6.59 billion, Material

Very Small Aperture Terminal (VSAT) Rp6,59 miliar, Optimalisasi Material Rp5,07 miliar, SPMS Rp2,93 miliar, MPOS Rp1,59 miliar, SACME Rp1,51 miliar, e-Voting Rp1,46 miliar, KTP-el Reader Rp1,21 miliar, Sewa Rp1,15 miliar, Bird Strike Rp1,13 miliar, dan proyek-proyek lainnya senilai Rp5,05 miliar, sehingga total perolehan Penjualan adalah Rp371,73 miliar.

3. Merealisasikan kontrak sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya proyek MPOS dengan PT Telkomsel, serta OSP dan *Managed Service* dengan PT Telkom.
4. Berupaya meningkatkan pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat biaya sesuai dengan *Project Charter* yang diterima.
5. Merealisasikan kontrak dan penyelesaian pekerjaan dari pelanggan *Government* berbasis dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di antaranya proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan proyek TOPO dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
6. Melaksanakan pengelolaan risiko terkait pemasaran dan pengembangan usaha secara konsisten.
7. Memperoleh kontrak dengan margin plus. Adapun laba kotor terbesar yang diperoleh tahun 2021 adalah terutama dari proyek *Repair and Refurbished Network Terminal Equipment (NTE)*, Kontrak Harga Satuan (KHS) *Repair and Refurbished NTE*, Pengadaan dan Pemasangan OSP Fiber Optik Node-B, OSP *Fiber Optik Feeder* dan Node B, serta KHS Pengadaan Material PT Telkom Akses.
8. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghindari resiko denda.
9. Melakukan proses pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk pemasaran produk/jasa.

Optimization Rp5.07 billion, SPMS Rp2.93 billion, MPOS Rp1.59 billion, SACME Rp1.51 billion, e-Voting Rp1.46 billion, KTP-el Reader Rp1.21 billion, Rental Rp1.15 billion, Bird Strike Rp1.13 billion, and other projects worth Rp5.05 billion, bringing the total sales revenue to Rp 371.73 billion.

3. *Realizing State Owned Enterprises (SOEs) synergy contracts, including the MPOS project with PT Telkomsel, and also OSP and Managed Service with PT Telkom.*
4. *Strive to improve project implementation on time, on quality, and on cost in accordance with the accepted Project Charter.*
5. *Realizing contracts and completion of work from Government customers based on State Budget and Regional Budget in 2021 including the public street lighting project from the Ministry of Energy and Mineral Resources and the TOPO project from Telecommunication and Information Technology Center for Providers and Financing Managers.*
6. *Implement risk management related to marketing and business development consistently.*
7. *Obtain a contract with a margin plus. The largest gross profit obtained in 2021 is mainly from the Repair and Refurbished Network Terminal Equipment (NTE) project, Unit Price Contract Repair and Refurbished NTE, Procurement and Installation of OSP Fiber Optic Node-B, OSP Fiber Optic Feeder and Node B, as well as Unit Price Contract Material Procurement PT Telkom Access.*
8. *Increase customer satisfaction and avoid the risk of fines.*
9. *Carry out the testing and certification process required for the marketing of products or services.*

Pengadaan

Procurement

1. Memaksimalkan upaya proses pengadaan material dengan pola pembayaran yang mendukung perputaran modal kerja perusahaan yang baik (*back to back*).
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan registrasi dan pemeliharaan data vendor secara mandiri oleh vendor, serta pemeliharaan dan evaluasi katalog produk dan pemasok atau mitra dalam rangka meningkatkan kualitas pasokan barang dan/atau jasa.

1. *Maximizing the efforts of the material procurement process with a payment pattern that supports good company working capital turnover (back to back).*
2. *Utilize information technology in the registration and maintenance of vendor data independently by vendors, as well as maintenance and evaluation of product catalogs and suppliers or partners in order to improve the quality of supply of goods and/or services.*



3. Peningkatan kemampuan negosiasi dalam rangka menekan Biaya Pokok Penjualan dan/atau penghematan anggaran.
4. Mengatur ulang penataan material, monitoring transaksi material gudang dan inventarisasi material secara periodik, serta memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) jika diperlukan.
5. Pemanfaatan sinergi BUMN untuk penguatan *supply chain*. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pengadaan.
6. Membuat kontrak harga satuan untuk barang/jasa utama yang dibutuhkan rutin oleh Perusahaan.
7. Maintain rutin data persediaan di gudang kantor pusat dan gudang proyek dengan menggunakan aplikasi.
8. Menggunakan aplikasi e-procurement dalam semua transaksi pengadaan yang sudah terintegrasi dengan SAP yang didalamnya memuat *vendor management, contract management, product management, dan tender management*.

3. *Improved negotiation ability in order to reduce Cost of Goods Sold and/or budget savings.*
4. *Rearrange the arrangement of materials, monitoring of warehouse material transactions and periodic inventory of materials, as well as installing Closed-Circuit Television (CCTV) cameras if needed.*
5. *Utilization of the Synergy of State Owned Enterprises (SOEs) to strengthen supply chain. Carry out effective risk management related to procurement activities.*
6. *Make a unit price contract for the main goods or services that are needed routinely by the Company.*
7. *Maintain routine inventory data in the head office warehouse and project warehouse using the application.*
8. *Using e-procurement applications in all procurement transactions that have been integrated with System Application and Processing (SAP) which includes vendor management, contract management, product management, and tender management.*

Produksi dan Kualitas Produk

Production and Product Quality

1. Membangun kembali kompetensi manufakturing dalam rangka mendukung proses produksi produk-produk hasil inovasi atau *genuine products*, dengan di antaranya membangun fasilitas *Electronics Manufacturing Services* beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk Proses dan Sistem Kerja yang terkait.
2. Melaksanakan manajemen material dengan perencanaan dan pengelolaan material yang akurat.
3. Meningkatkan kualitas manajemen produksi melalui perbaikan Proses dan Sistem Kerja, penggunaan tools dan aplikasi pendukung produksi atau pergudangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercapai tingkat kecepatan produksi yang tinggi dengan tingkat kesalahan atau kerusakan (*defect*) yang rendah.
4. Melaksanakan kerja sama produksi dengan mitra-mitra strategis yang memiliki kompetensi manufaktur, penguasaan teknologi atau brand yang kuat.
5. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap resiko terkait kegiatan proses produksi.

1. *Rebuilding manufacturing competence in order to support the production process of innovative products or genuine products, by among others building electronics manufacturing services facilities and the required facilities and infrastructure, including related work processes and systems.*
2. *Implement material management with accurate material planning and management.*
3. *Improving the quality of production management through improvement of work processes and systems, the use of tools and applications to support production or warehousing, as well as improving the quality of human resources, so as to achieve a high level of production speed with a low level of error or damage.*
4. *Carry out production cooperation with strategic partners who have strong manufacturing competence, mastery of technology or brand.*
5. *Carry out risk studies to identify any risks related to production process activities.*

6. Melakukan kegiatan purna jual untuk produk yang masih dalam masa garansi dan mengembangkan layanan *Call Center*.
7. Menggunakan aplikasi *proline* yang salah satu fungsinya adalah monitoring dan material management untuk meningkatkan produktivitas produksi.

6. Carry out after-sales activities for products that are still within the warranty period and develop call center services.
7. Using the *proline* application, one of its functions is monitoring and material management to increase production productivity.

Teknik dan Teknologi

Engineering and Technology

1. Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan prinsipal atau pemilik teknologi dalam rangka membangun kompetensi.
2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pembangunan kemitraan dan investasi di bidang teknologi informasi.
3. Program keamanan data elektronik dengan merumuskan Kebijakan dan Prosedur terkait IT.
4. Pembangunan *Knowledge Management System* dengan berbasis pada Online Database.

1. Build and enhance strategic cooperation with principals or technology owners in order to build competence.
2. Implement effective risk management related to partnership development activities and investment in information technology.
3. Electronic data security program by formulating policies and procedures related to information technology.
4. Development of knowledge management system based on an online database.

Kuangan dan Akuntansi

Finance and Accounting

1. Perusahaan melakukan tindak lanjut terhadap kajian Kajian Restrukturisasi Utang, Bisnis, dan Optimalisasi Aset yang dibantu oleh Konsultan Restrukturisasi PT PPA (Persero) yang dilakukan pada tahun 2020, sehingga harapannya dapat memperbaiki rasio-rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* dan *financial covenant* lainnya, diantaranya:
 - a. Restrukturisasi/relaksasi utang bank non-produktif dan utang usaha non produktif serta kewajiban non produktif lainnya agar dapat diselesaikan secara bertahap;
 - b. Rencana untuk melakukan refinancing utang bank eksisting dengan menggunakan instrument keuangan lainnya;
 - c. Rencana untuk melakukan bridging finance untuk utang usaha dan utang kepada pihak lainnya.
2. Menyediakan modal kerja yang cukup untuk bisnis perusahaan baik yang bersifat *recurring* maupun project based dengan cara:
 - a. Mengembangkan model-model pendanaan baru seperti kerjasama pendanaan dengan mitra;
 - b. Tetap menjaga kerja sama pendanaan dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank, baik berupa kredit modal kerja maupun instrumen keuangan lainnya.

1. The Company is following up on the study of Debt Restructuring, Business, and Asset Optimization assisted by the Restructuring Consultant PT PPA (Persero) conducted in 2020, so that it hopes to improve financial ratios such as the *Debt to Equity Ratio* and other financial covenants, including :
 - a. Restructuring or relaxing non-productive bank loans and non-productive trade payables, and other non-productive liabilities so that they can be settled in stages.
 - b. Plans to refinance existing bank loans using other financial instruments.
 - c. Plans to carry out bridging finance for trade payables and payables to other parties.
2. Provide sufficient working capital for the company's business, both recurring and project based by:
 - a. Develop new funding models such as co-financing with partners.
 - b. Continue to maintain funding cooperation with banks or non-bank financial institutions, both in the form of working capital loans and other financial instruments.



3. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka rencana optimalisasi aset.
4. Pengendalian *cash flow* Perseroan secara ketat dengan melaksanakan koordinasi secara berkala kepada unit bisnis dan unit kerja lainnya terkait rencana *cash in*, *cash out*, dan pemanfaatan anggaran.
5. Pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan berisiko rendah.
6. Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Konsolidasi Perusahaan bulanan, triwulanan, dan tahunan secara akurat dan tepat waktu.

3. *Coordinate with related units in the framework of asset optimization plan.*
4. *Strict control of the Company's cash flow by conducting regular coordination with business units and other work units related to cash in, cash out, and budget utilization plans.*
5. *Timely tax reporting and deposit to maintain the credibility of low-risk companies.*
6. *Prepare monthly, quarterly, and annual Consolidated Financial Statements and Company Management Reports in an accurate and timely manner.*

Sistem dan Organisasi

System and Organization

1. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap risiko yang ada serta mengurangi atau meminimalkan dampak negatif untuk setiap proses bisnis.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk mempertahankan skor perusahaan dalam penilaian *Good Corporate Governance* (GCG), serta memperbaiki *opportunity for improvement* untuk mempertahankan skor Perseroan dalam Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).
3. Strategi komunikasi eksternal PT INTI (Persero) di semua media Perseroan untuk membangun image perusahaan sesuai dengan visi dan misi.
 - a. Optimalisasi website dan media sosial sebagai media komunikasi resmi Perseroan.
 - b. Optimalisasi marketing kit (*video profile*, *company profile*, brosur, banner, poster, backdrop, video, animasi, dan lainnya).
4. Melakukan dukungan hukum dalam perikatan, litigasi, dan kajian hukum dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

1. *Carry out a risk assessment to identify any existing risks and reduce or minimize the negative impact for each business process.*
2. *Implement good corporate governance to maintain the company's score in the Good Corporate Governance (GCG) Assessment, as well as improve opportunities for improvement to maintain the Company's score in the Superior Performance Assessment Criteria.*
3. *PT INTI (Persero) external communication strategy in all the Company's media to build the company's image in accordance with the vision and mission.*
 - a. *Optimization of website and social media as the Company's official communication media.*
 - b. *Optimization of marketing kit (video profile, company profile, brochure, banner, poster, backdrop, video/animation, and many more).*
4. *Provide legal support in engagement, litigation, and legal studies in every aspect of the company's activities.*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Development

1. Membangun *Integrated Talent Management System* (ITMS) dan mengirimkan talenta perusahaan ke dalam talent pool di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi, minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi.

1. *Build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company talents to the talent pool at the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), which consists of a minimum of 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for the Board of Directors, at least 3 (three) successors per position of the Board of Directors.*

2. Melakukan pengembangan kompetensi sesuai bisnis perusahaan terutama kepemimpinan engineering, manajemen proyek, dan account management.
3. Pengembangan kompetensi leadership, melalui pelatihan (directorship training, finance for non-finance manager, dan lainnya).
4. Pengembangan sumber daya manusia melalui:
 - a. Pelatihan dan Sertifikasi, terutama di bidang telekomunikasi dan energi, serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai pendukung.
 - b. Focus Group Discussion atau Sharing Session.
 - c. Mengintensifkan Knowledge Management System diantaranya melalui Sharing Session/ Webinar INTI (Internal).
5. Pemenuhan Tenaga Kerja (internal & eksternal) sesuai kebutuhan organisasi.

2. *Develop competencies according to the company's business, especially engineering leadership, project and account management.*
3. *Development of leadership competencies, through training (directorship training, finance for non-finance managers, and many more).*
4. *Human resource development through:*
 - a. *Training and Certification, especially in the field of Telecommunications and Energy as well as occupational health and safety as support.*
 - b. *Focus Group Discussion or Sharing Session.*
 - c. *Intensifying the knowledge Management System including through the INTI (Internal) Sharing Session/Webinars.*
5. *Fulfillment of Manpower (internal & external) according to the needs of the organization.*

Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

1. Pengembangan produk baru dan existing sesuai dengan kebutuhan pasar (*Market Driven*).
2. Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan pemilik teknologi ataupun lembaga penelitian dasar dan terapan, serta institusi pendidikan dalam rangka membangun sinergi inovasi untuk menghasilkan produk-produk hasil rekayasa dalam negeri.
3. Mengusulkan alternatif pengembangan bisnis baru (*new revenue stream*) untuk mempercepat perbaikan kondisi finansial perusahaan.
4. Melakukan kajian bisnis, termasuk kajian risiko untuk menguji kelayakan dan mengidentifikasi risiko untuk bisnis baru perusahaan.
5. Melakukan kegiatan-kegiatan pendukung pengembangan produk seperti:
 - a. Pendaftaran paten untuk hasil-hasil inovasi perusahaan.
 - b. Sertifikasi produk atau jasa yang diperlukan.
 - c. Uji coba lapangan.
6. Melakukan manajemen produk baik yang akan atau sedang dikembangkan maupun telah dirilis.

1. *Development of new and existing products according to market needs (Market Driven).*
2. *Build and enhance strategic cooperation with technology owners or basic and applied research institutions and, educational institutions in order to build innovation synergies to produce domestically engineered products.*
3. *Propose new business development alternatives (new revenue stream) to accelerate the improvement of the company's financial condition.*
4. *Conduct business studies, including risk assessments to test feasibility and identify risks for the company's new business.*
5. *Carry out supporting activities for product development such as:*
 - a. *Patent registration for the company's innovations.*
 - b. *Product or service certification required.*
 - c. *Field trials.*
6. *Perform product management both to be or under development and have been released.*

Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Pelestarian Lingkungan

Corporate Social Responsibility (CSR), Partnership and Community Development Program, and Environmental Preservation

Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta senantiasa menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mendukung program pemerintah secara efektif dan tepat sasaran.

Implement Corporate Social Responsibility (CSR) programs in accordance with applicable regulations and always implement Partnership and Community Development Programs that support government programs effectively and on target.

Investasi

Investment

1. Melaksanakan investasi pembangunan kompetensi Perusahaan di bidang manufaktur, termasuk:
 - a. Pembangunan fasilitas produksi elektronika (perbaikan gedung, mesin-mesin, dan sebagainya), khususnya *smart digital device*, secara bertahap sesuai pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan berbagai skema investasi yang menguntungkan perusahaan (*Built Operation Transfer* dan lainnya).
 - b. Sertifikasi, lisensi, dan hak cipta khususnya untuk *product genuine*.
 - c. Server, aplikasi piranti lunak, dan alat olah data lainnya untuk keperluan manufaktur.
 2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait seluruh kegiatan investasi.
 3. Kerja sama investasi industri manufaktur produk-produk telekomunikasi, elektronika, dan pendukungnya.
1. *Implementing the Company's competency development investment in manufacturing, including:*
 - a. *The construction of electronic production facilities (building repairs, machines, and so on), especially smart digital devices, is gradually being developed according to the company's business growth, with various investment schemes that benefit the company (Built Operation Transfer and many more).*
 - b. *Certifications, licenses, and copyrights, especially for genuine products.*
 - c. *Servers, software applications, and other data processing tools for manufacturing purposes.*
 2. *Implement effective risk management related to all investment activities.*
 3. *Investment cooperation in manufacturing telecommunications, electronics, and supporting products.*

Daftar Isi

Table of Content

Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer and Limitation of Liability</i>	002	041	Mekanisme Pengawasan dan Penasihatatan Dewan Komisaris atas Direksi 2021 <i>Mechanism of Supervision and Advice of the Board of Commissioners on the Board of Directors 2021</i>
Prolog Tema Tahunan <i>Annual Theme Prologue</i>	003		
Kesinambungan Tema <i>Sustainable Theme</i>	004	043	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2021 Berdasarkan Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi <i>Performance Assessment of the Board of Commissioners 2021 Based on the Performance of the Supporting Committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>
Ikhtisar Pencapaian Tahun 2021 <i>Achievement Highlights in 2021</i>	009		
Informasi Corporate Action <i>Corporate Action Information</i>	015		
Ikhtisar Kinerja 2021 <i>Performance Overview in 2021</i>	020	043	Aspek Pengembangan Usaha : Eksplorasi dan Penyelesaian Proyek Strategis <i>Business Development Aspect: Strategic Project Exploration and Completion</i>
Daftar Isi <i>Table of Content</i>	027	044	Penilaian Tata Kelola Perusahaan : Upaya Peningkatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai “On Going Strategy” <i>Corporate Governance Assessment: Efforts to Improve Corporate Governance Implementation as an “On Going Strategy”</i>
Ikhtisar Keuangan Penting <i>Summary of Key Financial Information</i>	032	045	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 <i>Company Work Plan and Budget in 2021</i>
Potret Kinerja Lima Tahun <i>Five Year Performance Portrait</i>	033	045	Pandangan atas Prospek 2022 <i>Outlook on the 2022 Prospects</i>
Informasi Saham & Obligasi <i>Stock and Bond Information</i>	038	046	Pandangan atas Penerapan Whistle-Blowing System <i>Overview on the Implementation of the Whistle-Blowing System</i>
Laporan Dewan Komisaris & Direksi <i>Board of Commissioners & Directors Report</i>	039	047	Perubahan Komposisi Dewan Komisaris <i>Changes in the Composition of the Board of Commissioners</i>
Laporan Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners’ Report</i>	040	048	Laporan Direksi <i>Board of Director Report</i>
Strategi Operasi Perusahaan di Tengah Pandemi Covid-19 selama tahun 2021 <i>Company Operations Strategy in the Midst of the Covid-19 Pandemic during 2021</i>	040	049	Tinjauan Makro Ekonomi Tahun 2021 <i>Macroeconomic Overview in 2021</i>
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2020 <i>Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2020</i>	041	050	Analisis atas Kinerja Perusahaan <i>Analysis of Company Performance</i>



Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai
Dengan yang Ditargetkan (Kinerja Perseroan)
*Comparison Between Achieved and Targeted
Results (Company Performance)*

049

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusahaan
dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya
*Constraints Faced By The Company and The
Solution Steps*

056

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek
Usaha
Overview and Analysis of Business Prospects

057

Perkembangan Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
*Development of Good Corporate
Governance Implementation*

054

Pengelolaan *Human Capital*
Human Capital Management

059

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan
Pengelolaan Lingkungan
*Corporate Social Responsibility and
Environmental Management*

060

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang
Berada di Bawah Direksi
*Assessment of The Performance of The
Committees Under The Board of Directors*

061

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan
Alasan Perubahannya
*Changes in The Composition of The Members
of The Board of Directors and The Reasons
for The Changes*

061

Ucapan Terima Kasih
Acknowledgements

061

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris dan Direksi Atas Laporan Tahunan
*Statement Letters of The Member of The
Board of Commissioners and Board of
Directors*

062

Profil Perusahaan *Company Profile*

064

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

065

Informasi Umum
General Information

067

Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

068

073

Kegiatan dan Bidang Usaha
Activities and Fields of Business

078

Struktur Organisasi
Organizational Structure

082

Visi, Misi & Strategi
Company Vision, Mission and Strategy

085

Budaya dan Nilai Perusahaan
Corporate Culture and Values

089

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

095

Profil Direksi
Board of Directors Profile

105

Profil Senior Leader
Senior Leader Profile

116

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management

130

Demografi Karyawan
Employee Demography

133

Program Pelatihan dan Pengembangan
Kompetensi Karyawan
*Employee Competency Training and
Development Program*

137

Informasi Pemegang Saham & Obligasi
*Information for Shareholders and
Bondholders*

139

Struktur Grup Perusahaan
Structure of Company Group

140

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
List of Subsidiaries and/or Associated Entities

144

Alamat Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
*Address of Subsidiaries and/or Associated
Entities*

145

Pemegang Saham Utama, Entitas Anak &
Entitas Asosiasi
Major Shareholder, Subsidiaries & Associates

146

Jejak Langkah
Milestones

149

Penghargaan, Sertifikasi, dan Lisensi
Awards, Certifications and Licenses

159

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company Websites

160

Transparansi Penyampaian Laporan
Transparency of Report Submission

Peristiwa Penting 2021 <i>Important Events in 2021</i>	161



Analisis dan Diskusi Manajemen *Management Analysis and Discussion*

163

Gambaran Umum <i>Overview</i>	164
Gambaran Kinerja Perseroan Dibandingkan Industri Global <i>Company Performance Overview Compared to Global Industry</i>	166
Kinerja Operasi Per Segmen Usaha <i>Operational Performance Per Business Segment</i>	168
Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Description of The Company's Financial Performance</i>	180
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian <i>Consolidated Statement of Comprehensive Income</i>	183
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	185
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>	188
Kemampuan Membayar Utang <i>Ability to Pay Debt</i>	190
Tingkat Kolektibilitas Piutang <i>Receivables Collectibility</i>	191
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal <i>Capital Structure and Capital Structure Policy</i>	192
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitment for Investments in Capital Goods</i>	193
Investasi Barang Modal <i>Investment In Capital Goods</i>	193
Target Perusahaan di Awal Tahun 2021 Dibandingkan Realisasi Tahun 2021 <i>Company Targets in Early 2021 Compared to Realization in 2021</i>	194
Target Tahun 2022 <i>Targets for 2022</i>	204
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information and Facts That Happened After The Accountant's Report Date</i>	206

207	Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan <i>Description of The Company's Business Prospects</i>
210	Uraian Tentang Aspek Pemasaran <i>Description of Marketing Aspect</i>
217	Kebijakan dan Pembayaran Dividen <i>Dividend Policy and Payment</i>
218	Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Health Level</i>
219	Pembelian Kembali Saham Perusahaan <i>Company Share Buyback</i>
219	Informasi Material Terkait Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal <i>Material Information Related to Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring</i>
219	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi <i>Material Transaction Information That Contains Conflict of Interest and/or Affiliated Transaction</i>
220	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan <i>Changes in Legislation That Has Significant Influence on The Company</i>
221	Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes in Accounting Policies</i>
223	Kelangsungan Usaha <i>Business Continuity</i>
224	Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi <i>Financial Information Which Has Been Reported Contains Extraordinary and Rare Events</i>
225	Peningkatan yang Material Dikaitkan Dengan Jumlah Barang yang Dijual atau Barang Baru <i>Material Increase Related to Sales Volume or New Products</i>
226	Profitabilitas <i>Profitability</i>
228	Informasi Mengenai Perpajakan <i>Information Regarding Taxation</i>
230	Investasi <i>Investment</i>
231	Proyek-Proyek Pengembangan <i>Development Projects</i>



Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

238

Pendahuluan <i>Preliminary</i>	239	327	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>
Capaian Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021 <i>Good Corporate Governance Assessment Achievements in 2021</i>	240	328	Uraian Tentang Sekretaris Perusahaan <i>Description on Corporate Secretary</i>
Jejak Langkah Implementasi Tata Kelola Perusahaan <i>Milestones of Corporate Governance Implementation</i>	245	333	Uraian Tentang Audit Internal <i>Description on Internal Audit</i>
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Objectives of Implementing Good Corporate Governance</i>	248	346	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> <i>Good Corporate Governance Implementation</i>	249	367	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication Technology Governance</i>
Struktur Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Structure</i>	250	369	Pengadaan Barang dan Jasa <i>Procurement of Goods and Services</i>
Dasar Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> <i>Good Corporate Governance Implementation Basis</i>	253	373	Akuntan Perseroan <i>Corporate Accountant</i>
Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan <i>Basic Principles of Corporate Governance</i>	253	374	Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditor <i>Policy on Fulfillment of Creditor's Rights</i>
Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Internalization of Good Corporate Governance</i>	255	376	Bahasan Mengenai Kode Etik <i>Discussion on Code of Conduct</i>
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	256	383	Independensi, Benturan Kepentingan, dan Pengungkapan Hubungan Afiliasi <i>Independency, Conflict of Interest, and Disclosure of Affiliation</i>
Uraian Tentang Dewan Komisaris <i>Description on Board of Commissioners</i>	259	385	Pencegahan Transaksi Orang Dalam <i>Insider Trading Prevention</i>
Uraian Tentang Direksi <i>Description on Board of Directors</i>	291	386	Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>
Pengungkapan Remunerasi <i>Disclosure of Remuneration</i>	317	388	Sistem Manajemen Anti Penyuapan <i>Anti-Bribery Management System</i>
Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama, dan/atau Pengendali <i>Affiliation Between Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, and Major and/or Controlling Shareholders</i>	326	391	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Management of State Administrators Wealth Reports</i>
		393	Pengungkapan Mengenai Whistle-Blowing System <i>Disclosure of Whistle-Blowing System</i>
		403	Perkara Penting yang Sedang Dihadapi <i>Important Matters That are Being Faced</i>



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

404

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Social and Environmental Responsibility</i>	405
Prosperity - Kinerja Operasional Untuk Keberlanjutan Manfaat Ekonomi yang Optimal <i>Prosperity - Operational Performance for Sustainable Economic Benefits</i>	408
People - Mendorong Insan INTI Untuk Berkembang <i>People - Encouraging Core People to Develop</i>	409
Planet - Komitmen Menjaga Lingkungan Untuk Masa Depan <i>Planet - Commitment to Protecting The Environment for The Future</i>	411
Partnership - Kerja Sama Saling Menguntungkan <i>Partnership - Mutual Benefit Cooperation</i>	412
Prudence - Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Prudence - Creating Good Corporate Governance</i>	413
Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia (HAM) <i>Social Responsibility Related to Human Rights</i>	414
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Praktik Operasi yang Adil <i>Corporate Social Responsibility Related to Fair Operating Practices</i>	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup <i>Corporate Social Responsibility Related to The Environment</i>	416
Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) <i>Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety</i>	417
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen <i>Corporate Social Responsibility to Consumers</i>	419
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Sosial dan Masyarakat <i>Social Responsibility to Social and Community</i>	422

423

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements



Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan <i>Statement of Responsibility for Annual Report</i>
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal & Entitas Anak <i>Statement of Directors regarding Responsibility for Risk Management and Internal Control & Subsidiaries</i>



Ikhtisar Keuangan Penting

Summary of Key Financial Information

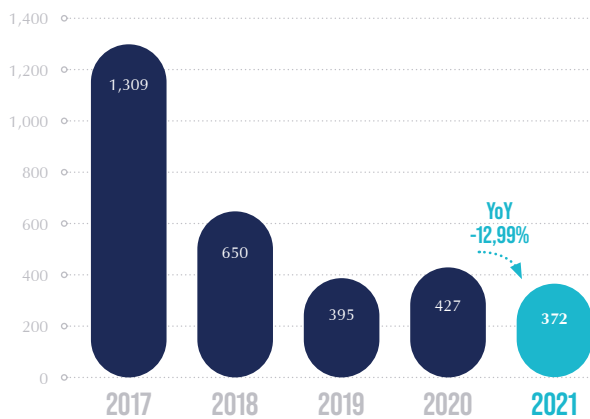
Potret Kinerja Lima Tahun

Five Year Performance Portrait

CAGR
-22,25%

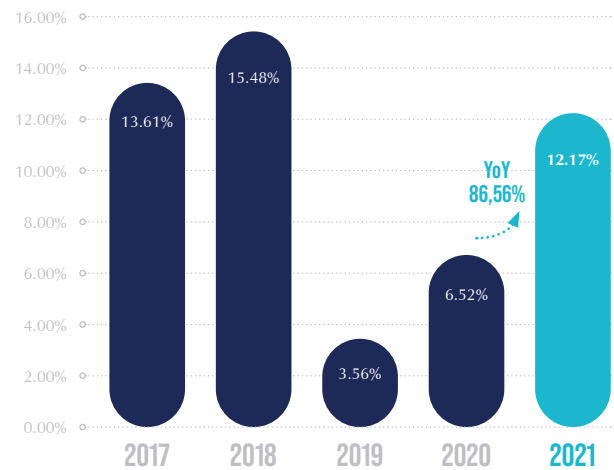
Pendapatan Sales

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah



Gross Profit Margin

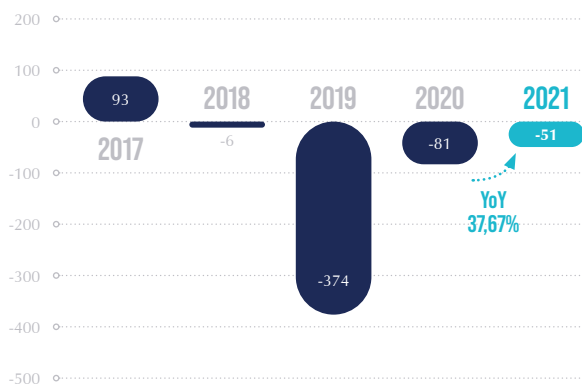
CAGR
-2,22%



CAGR
-188,56%

Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

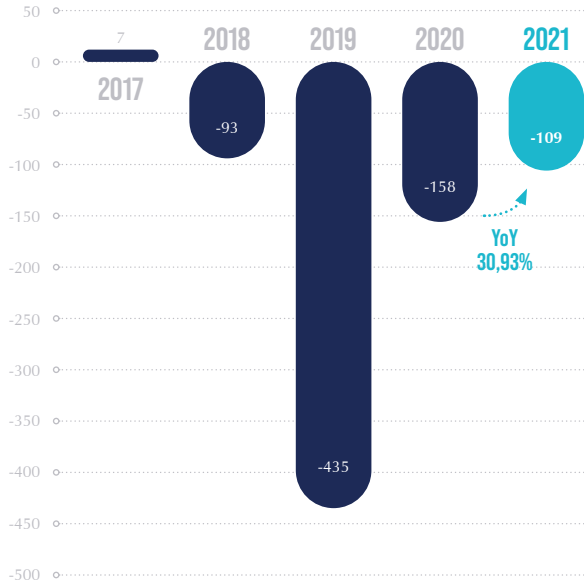


CAGR
-275,30%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Net Income (Loss) for The Year

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

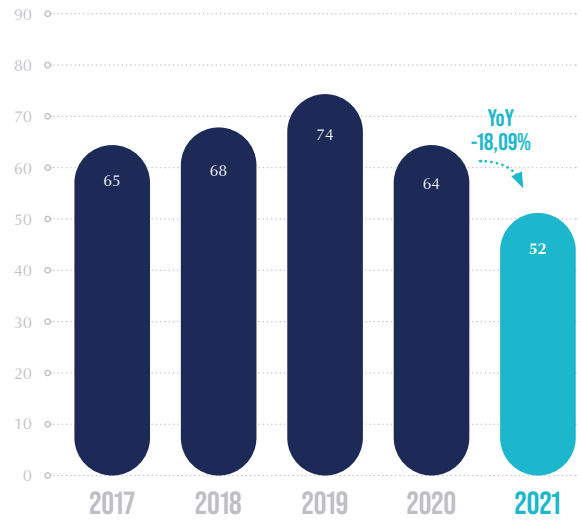


Beban Pendanaan

Finance Expenses

CAGR
-4,47%

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

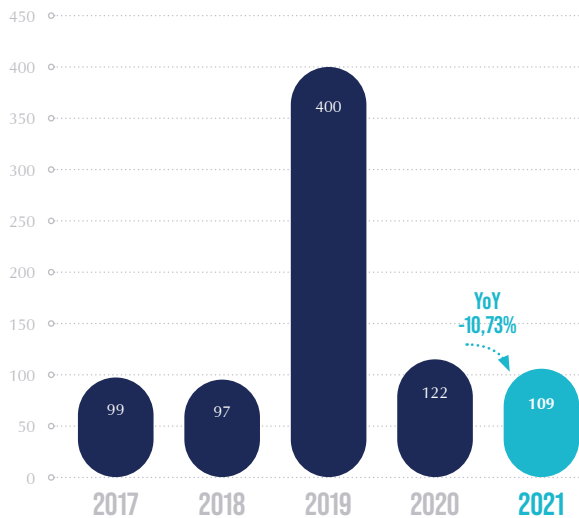


CAGR
-2,99%

Beban Usaha

Operating Expenses

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah



CAGR
-162,65%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

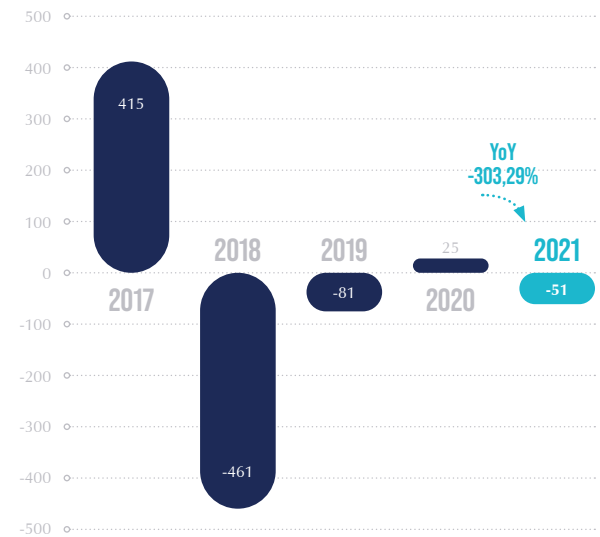


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

Cash Flows from Operating Activities

CAGR
-165,85%

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah



Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

Keterangan <i>Description</i>	2017	2018	2019	2020	2021	YoY	CAGR
Total Aset <i>Total Assets</i>	2.026.984	1.594.764	1.385.182	1.236.627	1.204.755	-2,58	-9,88%
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	1.158.603	743.630	473.548	328.568	300.159	-8,65	-23,67%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	868.381	851.134	911.635	908.059	904.596	-0,38	0,82%
Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1.812.701	1.465.635	1.653.820	1.686.104	1.743.754	3,42	-0,77%
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>	1.704.425	1.343.091	796.712	627.795	684.251	8,99	-16,68%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i>	108.276	122.545	857.108	1.058.309	1.059.503	0,11	57,80%
Ekuitas <i>Equity</i>	214.283	129.129	-268.637	-449.477	-538.999	-19,92	-220,26%
Pendapatan <i>Revenues</i>	1.308.680	649.756	395.378	427.247	371.731	-12,99	-22,25%
Beban Pokok Penjualan <i>Cost of Revenues</i>	1.130.519	549.178	381.287	399.379	326.497	-18,25	-22,00%
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	178.161	100.579	14.091	27.868	45.234	62,32	-23,98%
Beban Usaha <i>Operating Expense</i>	98.746	96.527	400.338	121.637	108.582	-10,73	1,92%
Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)</i>	92.759	-6.463	-373.911	-81.082	-50.538	37,67	-188,56%
Laba Sebelum Pajak <i>Loss Before Tax</i>	23.939	-77.820	-460.444	-157.339	-115.421	26,64	-236,97%
Laba Tahun Berjalan <i>Net Income (Loss) for The Year</i>	6.611	-92.882	-434.765	-158.434	-109.424	30,93	-275,30%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	414.716	-460.610	-81.052	25.251	-51.333	-303,29	-165,85%
<i>Cash Flows from Operating Activities</i>							
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-3.343	-1.907	2.385	-428	-1.248	-191,65	-17,89%
<i>Cash Flows from Investing Activities</i>							
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-25.176	73.877	101.345	-11.523	2.430	121,08	-162,65%
<i>Cash Flows from Financing Activities</i>							
Penambahan (Pengurangan) Kas	386.197	-388.639	22.678	13.300	-50.152	-477,08	-166,48%
<i>Increase (Decrease) in Cash on Hand and In Banks</i>							
Margin Laba Kotor (%)	13,61%	15,48%	3,56%	6,52%	12,17%	86,56	-2,22%
<i>Gross Profit Margin (%)</i>							
Margin Laba Bersih (%)	0,51%	-14,29%	-109,96%	-37,08%	-29,44%	20,62	-325,47%
<i>Net Income Margin (%)</i>							
EBITDA Margin (%)	7,09%	-0,99%	-94,57%	-18,98%	-13,60%	28,36	-213,91%
<i>EBITDA Margin (%)</i>							
Labas Bersih Terhadap Ekuitas (%)	3,09%	-71,93%	161,84%	35,25%	20,30%	-42,41	45,76%
<i>Net Profit (Loss) to Equity (%)</i>							
Labas Bersih Terhadap Aset (%)	0,33%	-5,82%	-31,39%	-12,81%	-9,08%	29,11	-294,52%
<i>Net Profit (Loss) to Assets (%)</i>							
Rasio Lancar (%)	67,98%	55,37%	59,44%	52,34%	43,87%	-16,18	-8,39%
<i>Current Ratio (%)</i>							
Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)	845,94%	1135,02%	-615,63%	-375,13%	-323,52%	13,76	-182,51%
<i>Liabilities to Equity (%)</i>							
Liabilitas Terhadap Aset (%)	89,43%	91,90%	119,39%	136,35%	144,74%	6,16	10,11%
<i>Liabilities to Assets (%)</i>							



Informasi Saham & Obligasi

Stock and Bond Information

Informasi Saham Stock Information

Perseroan **100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia** dan hingga akhir tahun 2021, tidak mendaftarkan diri di Bursa Efek, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

The Company is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia and until the end of 2021, it is not listed on the Stock Exchange, either in Indonesia or abroad.

Informasi Obligasi Bond Information

Perseroan hingga akhir tahun 2021 tidak menerbitkan obligasi di Bursa Efek manapun, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

The Company until the end of 2021 did not issue bonds on any Stock Exchange, both in Indonesia and abroad.





Laporan Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Directors Report



Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

Yth. Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

*Dear Stakeholders of PT Industri Telekomunikasi
Indonesia (Persero)*

Strategi Operasi Perusahaan di Tengah Pandemi Covid-19 selama tahun 2021

Company Operations Strategy in the Midst of the Covid-19 Pandemic during 2021

Pandemi Covid-19 yang dimulai di tahun 2020 terus menyebabkan gejolak pada perekonomian di seluruh dunia pada tahun 2021. Di Indonesia, yang menjadi salah satu epicentrum utama pandemi pada Juli 2021, pemerintah terus menerapkan pembatasan aktivitas secara ketat. Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan global, tetapi sudah berubah menjadi bencana ekonomi dunia karena banyak sekali sektor usaha yang terdampak akibat merebaknya wabah tersebut.

Di tengah tekanan pandemi Covid-19, pencapaian kinerja Perseroan sepanjang 2021 masih terbilang cukup baik, di mana dalam kondisi pandemi, Perseroan dapat menekan kerugian laba bersih tahun berjalan sebesar Rp109,42 miliar dari kerugian tahun lalu sebesar Rp158,43 miliar.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil Direksi untuk mengamankan pertumbuhan Perseroan di tengah pandemi dan untuk masa depan.

Tentunya hal tersebut menjadi keyakinan tersendiri bagi Perseroan untuk terus optimis di masa pandemi Covid-19 ini. Perseroan juga telah menetapkan kinerja di tahun 2021 akan meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

The Covid-19 pandemic that began in 2020 continues to cause fluctuation in economies worldwide in 2021. In Indonesia, which became one of the main epicenters of the pandemic in July 2021, the government continues to implement strict activity restrictions. As we know, the Covid-19 pandemic is not only a global health problem, but has turned into a world economic disaster because many business sectors have been affected by the outbreak.

In the midst of the pressure of the Covid-19 pandemic, the Company's performance achievement throughout 2021 is still quite good, where in a pandemic condition, the Company was able to reduce the current year's net profit loss of Rp109,42 billion from last year's loss of Rp158,43 billion.

The Board of Commissioners also appreciates the strategic steps taken by the Board of Directors to secure the Company's growth in the midst of the pandemic and for the future.

Of course, this is a belief in itself for the Company to continue to be optimistic during this Covid-19 pandemic. The company has also determined that performance in 2021 will increase compared to the previous year's realization.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2020

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2020

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor 322 tertanggal 30 Desember 1974 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 diselenggarakan pada 29 Juni 2021, dengan keputusan antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi, Jusuf, Mawar, dan Rekan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan PKBL.
3. Tidak ada penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan karena Perseroan mengalami Laba Minus (Rugi Bersih) Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tentang Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.

Based on the Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia based on the Notary Deed of Warda Sungkar Alurmei, S.H. Number 322 dated December 30, 1974 which has been amended several times, most recently with the Notary Deed of Muhammad Hanafi, S.H. Number 34 dated 28 February 2017, the implementation of the Annual GMS for the 2020 Financial Year was held on June 29, 2021, with the following decisions:

1. *Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Fiscal Year and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Financial Year which has been audited by Public Accountant Firm (KAP) Amir, Abadi, Jusuf, Mawar, and Partners.*
2. *Ratify the Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for the 2020 Fiscal Year including the Partnership and Community Development Program Financial Statements.*
3. *There is no determination on the use of the Company's Consolidated Net Profits because the Company had Net Loss for the 2020 Financial Year.*
4. *Determination of Salary or Honorarium, Allowances, and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in 2020.*
5. *Determination of the Public Accounting Firm that will audit the Consolidated Financial Statements and Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for the 2021 Financial Year.*

Mekanisme Pengawasan dan Penasihatannya Dewan Komisaris atas Direksi 2021

Mechanism of Supervision and Advice of the Board of Commissioners on the Board of Directors 2020

Pengawasan terhadap implementasi strategi Direksi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pengawasan yang dilakukan Komite di Bawah Dewan Komisaris, serta kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris lainnya melalui kunjungan kerja atau pertemuan dengan organ-organ pengelola lainnya yang dilakukan secara fisik maupun virtual dalam rangka upaya mengurangi penyebaran Covid-19 yang terjadi di tahun 2021.

Sampai dengan akhir tahun buku 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat seperti:

Supervision towards the implementation of the Board of Directors' strategy is carried out through meetings in the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, monitoring reports carried out by Committees under the Board of Commissioners, and other activities of the Board of Commissioners through work visits or meetings with other managing organs which are conducted virtually in an effort to reduce the spread of Covid-19 that occurred in 2021.

Until the end of 2021 fiscal year, the Board of Commissioners has carried out supervisory and advisory activities such as:



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meneliti dan menelaah RKAP yang disusun oleh Direksi kemudian menyampaikan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP tersebut serta memberikan pendapat dan saran pada RUPS.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi. Laporan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan pada RUPS, disertai Tanggapan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memberikan penjelasan, pendapat dan saran pada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
4. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di dalam Perseroan, serta memperhatikan dan mengadakan perbaikan sesuai rekomendasi atas hasil assessment penerapan GCG tahun sebelumnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan tahun 2021, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, memberikan berbagai masukan kebijakan kepada Direksi untuk pembenahan dan perbaikan kinerja Perseroan agar tetap bertahan dalam menghadapi kendala usaha dan modal kerja yang sangat berat. Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk memupuk budaya kekompakan tim dan profesionalisme di lingkungan Perseroan agar dapat terwujud tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.

Dewan Komisaris juga telah melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil temuan baik audit internal (Satuan Pengawas Intern atau SPI) maupun audit eksternal (Kantor Akuntan Publik atau KAP).

Untuk lebih mendapatkan gambaran atas kegiatan usaha Perseroan, Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 beberapa kali melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pabrik atau proyek, sehingga dapat memberikan arahan dan nasihat yang tepat saat diperlukan.

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company in accordance with the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget, as well as the provisions of the Articles of Association and the Decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and laws and regulations, especially in Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors.
2. Examining and studying the Company's Work Plan and Budget, prepared by the Board of Directors then submitting the Board of Commissioners' response to the Company's Work Plan and Budget, and providing opinions and suggestions at the GMS.
3. Examining and studying periodic reports (monthly, quarterly) and annual reports prepared by the Board of Directors. The annual report that has been audited by the Public Accounting Firm is submitted to the GMS, accompanied by the Response of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also provides explanations, opinions and suggestions at the GMS regarding the Annual Report.
4. Monitor and ensure that Good Corporate Governance (GCG) is implemented effectively and sustainably within the Company, as well as pay attention to and make improvements in accordance with recommendations on the results of the previous year's GCG implementation assessment.

In implementing the supervisory function of the Company's operations in 2021, the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has provided various recommendations policy to the Board of Directors for improvement of the Company's performance in order to survive in the face of very heavy business and working capital constraints. The Board of Commissioners also continues to encourage the Board of Directors to foster a culture of team cohesiveness and professionalism within the Company in order to realize better corporate governance in the future.

The Board of Commissioners has also monitored the follow-up on the findings of both the internal audit (Internal Supervisory Unit) and external audit (Public Accounting Firm).

To better get an overview of the Company's business activities, the Board of Commissioners throughout 2020 has made several site visits to the factory or project, therefore may provide appropriate direction and advice when needed.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2021 Berdasarkan Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners 2021 Based on the Performance of the Supporting Committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu melalui mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan atas tingkat pencapaian Perseroan dibandingkan dengan target (*Key Performance Indicator*) yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Evaluasi dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan kriteria antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta rapat dengan Komite-Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris.
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jajaran Manajemen.

Aspek Pengembangan Usaha : Eksplorasi dan Penyelesaian Proyek Strategis

Dewan Komisaris menilai prospek usaha Perseroan di masa mendatang sangat menjanjikan untuk segera dapat mewujudkan visi perusahaan yaitu “Menjadi Penyedia *Smart Products* Terbaik di Industri Telekomunikasi di Indonesia”, sehingga Perusahaan kembali pada kompetensi inti yaitu *Manufacture & Assembly* peralatan telekomunikasi, dilengkapi dengan *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service*, serta untuk memberikan layanan yang terintegrasi. Di samping itu, komposisi penjualan pada kastemer pun akan difokuskan kembali melalui resegmentasi kastemer Telco - Government - Enterprise - Defense.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan sejalan dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT INTI (Persero) secara konsisten, akan menerapkan budaya AKHLAK.

Untuk mencapai sasaran Perseroan tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui tema “Penguatan Struktur Bisnis yang Berfokus pada Peningkatan Pendapatan *Recurring* dan Peningkatan Profitabilitas”, dengan sasaran fokus pada penjualan yang bersifat *recurring* dan *repeat order*, perbaikan profitabilitas proyek (minimal 20% *contribution margin* dengan memperhatikan *term of payment* dari konsumen dan vendor serta kewajiban perpajakan), penyediaan modal kerja proyek dengan berbagai model pendanaan, penguatan sinergi BUMN dengan pola kemitraan strategis untuk memperbaiki struktur

The Company evaluates the performance of the Board of Commissioners both collegially and individually through an independent mechanism every year based on the level of achievement of the Company compared to the agreed target (Key Performance Indicator). The performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out by considering the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association of the Company.

Evaluation is carried out by each member of the Board of Commissioners, with criteria including:

1. *Attendance levels in each of the internal meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as meetings with the Supporting Committees under the Board of Commissioners.*
2. *Contribution in the process of monitoring and providing advice to the Management.*

Business Development Aspect: Strategic Project Exploration and Completion

The Board of Commissioners considers that the Company's business prospects in the future are very promising to immediately realize the company's vision, "To be the Best Smart Products Provider in the Telecommunications Industry in Indonesia", so that the Company returns to its core competencies, namely Manufacture & Assembly telecommunication equipment, equipped with System Integrator, Digital Service, and Managed Service to provide integrated services. In addition, the composition of sales to customers will also be refocused through the resegmentation of Telco - Government - Enterprise - Defense customers.

To support the success of achieving company goals and in line with the direction of the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), PT INTI (Persero) will gradually but consistently implement the AKHLAK culture.

To achieve the Company's 2021 targets which have been set through the theme "Strengthening Business Structure Focusing on Increasing Recurring Income and Increasing Profitability", with a target of focusing on sales that are recurring and repeat orders, improving project profitability (at least 20% contribution margin by paying attention to terms of payment from consumers and to vendors as well as tax obligations), provision of project working capital with various funding models, strengthening the synergy of SOEs with a strategic partnership pattern to improve the company's business structure, business development



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

bisnis perusahaan, pengembangan usaha dan new revenue stream melalui kerja sama dengan selective strategic partners, revitalisasi pabrik dengan fokus pada manufaktur produk-produk andalan yang akan menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan, perbaikan *cost behaviour* untuk efisiensi terutama dalam tiga kontributor utama beban pokok penjualan (material, jasa subkontraktor, sewa), dan penyelesaian hutang nonproduktif melalui restrukturisasi hutang dan optimalisasi aset.

Pengembangan usaha dilakukan dengan pola kerja sama operasi (KSO) maupun joint venture. Dewan Komisaris menyarankan agar hasil pengembangan produk harus mendukung *recurring business* secara *market-driven* dengan tetap fokus pada pengembangan kompetensi inti (*core competences*).

Prospek usaha yang luas di berbagai sektor usaha Perseroan tersebut agar disertai dengan semakin baiknya pengelolaan risiko sejak masih dalam tahap perencanaan perolehan kontrak hingga tahap penyelesaian proyek. Risiko yang mungkin terjadi sedapat mungkin telah dikenali, dikendalikan, dan bila perlu dimitigasi sehingga kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalisir dan/atau diantisipasi.

Dewan Komisaris menyambut baik rencana Perseroan untuk kembali merevitalisasi fasilitas manufaktur yang dimiliki, sehingga visi Perseroan sebagai penyedia perangkat cerdas digital dapat segera terwujud dan PT INTI (Persero) dapat kembali berperan sebagai penggerak utama bangkitnya industri dalam negeri dan dapat mengembalikan jati dirinya sebagai perusahaan industri manufaktur bidang telekomunikasi.

Terbangunnya kembali fasilitas manufaktur juga akan memastikan tercapainya target perolehan pendapatan pada tahun 2021 khususnya yang bersifat *recurring* untuk menutup biaya-biaya tetap Perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyarankan agar revitalisasi tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.

Merangkum berbagai prospek usaha di atas, dan sebagai pedoman kerja Perseroan di tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada 26 Januari 2022.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan : Upaya Peningkatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai “On Going Strategy”

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan Perseroan sepanjang 2021 telah berjalan dengan efektif dan internalisasi

and new revenue streams through cooperation with selective strategic partners, factory revitalization with a focus on manufacturing flagship products that will be the main contributor to company revenue, improving cost behavior for efficiency, especially in the three main contributors to cost of goods sold (materials, subcontractor services, rental) and settlement of nonproductive debt through debt restructuring and assets optimization.

Business development is carried out by means of a joint operation or joint venture pattern. The Board of Commissioners recommends that product development results support recurring business in a market-driven manner while remaining focused on developing core competencies.

The broad business prospects in various business sectors of the Company are intended to improve risk management from the time it is still in the planning stage for contract acquisition to the stage of project completion. As far as possible, risks that may occur have been identified, controlled and, if necessary, mitigated so that losses that may arise can be reduced and/or anticipated.

The Board of Commissioners welcomes the Company's plan to revitalize its manufacturing facilities, so that the Company's vision as a provider of digital smart devices can be realized immediately and PT INTI (Persero) can take a role as the main driving force for the rise of the domestic industry and can restore its identity as a manufacturing industry company. telecommunication sector.

The rebuilding of manufacturing facilities will also ensure the achievement of the revenue target in 2021, especially those that are recurring in nature to cover the Company's fixed costs. Therefore, the Board of Commissioners recommends that the revitalization be carried out according to the planned schedule.

Summarizing the various business prospects above, and as a guideline for the Company's work in 2021, the Board of Commissioners has approved the Company's 2022 Work Plan and Budget which was validated by the General Meeting of Shareholders on January 26, 2022.

Corporate Governance Assessment: Efforts to Improve Corporate Governance Implementation as an “On Going Strategy”

The Board of Commissioners considers that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company during 2021 has been effective and the internalization of existing GCG principles has been

atas prinsip-prinsip GCG yang ada telah dilakukan dengan menyeluruh. Hal ini terbukti dengan hasil *self-assessment* GCG di Perseroan yang menunjukkan skor 75,77% atau predikat “Baik”.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berkelanjutan, serta sesuai dengan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pemenuhan prinsip-prinsip GCG terus terjaga. Dewan Komisaris bersama Direksi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan hasil *self-assessment* agar penerapan GCG dapat menjadi budaya bagi seluruh insan Perseroan serta berdampak positif dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 merupakan pedoman bagi Manajemen dan Karyawan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Dalam menyusun rencana kerja ini tentunya Perseroan tidak terlepas dari rencana Pemerintah, khususnya yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Selain itu, penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Sejalan dengan RJPP, tema RKAP 2022 adalah Membangun Fundamental Bisnis yang Sehat dengan Meningkatkan *Recurring Business* untuk Mewujudkan #INTIBangkit. Pada tahun ini, Perusahaan masih tetap memfokuskan pada restrukturisasi bisnis dan finansial untuk membentuk kinerja Perusahaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan tantangan Perusahaan untuk meyakinkan seluruh mitra usaha atas upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan, dalam waktu bersamaan Perusahaan juga menghadapi pandemi global Covid-19, yang menyebabkan target-target Perusahaan belum dapat dicapai seluruhnya. Namun demikian, Perusahaan telah dapat menunjukkan perbaikan kinerja pada beberapa target baik yang terkait dengan bisnis, keuangan, sumber daya manusia, maupun teknologi informasi.

Pandangan atas Prospek 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022. Kondisi pandemi COVID-19

carried out thoroughly. This is proven by the results of the GCG self-assessment in the Company which shows a score of 75,77% or the predicate “Good”.

In order to realize professional, sustainable corporate governance, and in accordance with the fulfillment of GCG principles, the Board of Commissioners continues to supervise and provide recommendation so that compliance with GCG principles is maintained. The Board of Commissioners together with the Board of Directors continue to be committed to making improvements based on input from the results of self-assessment so that the implementation of GCG can become a culture for all employees of the Company and have a positive impact in realizing the Company’s vision and mission.

Company Work Plan and Budget in 2022

The Company Work Plan and Budget is a guideline for Management and employees in carrying out activities in 2022. In preparing this work plan, of course, the Company cannot be separated from the Government’s plans, especially those listed in the Government Work Plan for 2022, which is an annual development planning document compiled as an elaboration of the third year of implementation of the National Medium-Term Development Plan for 2020–2024.

Besides that, the preparation of the Government Work Plan is also carried out in order to fulfill the mandate of the Law Number 25 Year 2004 concerning National Development Planning System and Government Regulations Number 17 Year 2017 regarding Synchronization of National Development Planning and Budgeting Process. The Government’s 2022 Work Plan contains annual national policy directions to maintain sustainable development in a planned and systematic manner that is responsive to change.

In line with the Company’s Long Term Plan, the theme of the 2022 Corporate Work Plan and Budget is Building Healthy Business Fundamentals by Increasing Recurring Business to Realize #INTIBangkit. This year, the Company is still focusing on business and financial restructuring to shape the Company’s better performance in the future. With the Company’s challenge to convince all business partners of the improvement efforts that will be carried out, at the same time the Company is also facing the global Covid-19 pandemic, which causes the Company’s targets to not be fully achieved. However, the Company has been able to show improved performance on several targets, both related to business, finance, human resources, and information technology.

Outlook on the 2022 Prospects

The impact of the COVID-19 pandemic may still continue until 2022. The COVID-19 pandemic condition did



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

tidak menyurutkan upaya Perusahaan yang telah menemukan peran Perusahaan dalam perkembangan ekonomi antara lain peningkatan bauran energi baru terbarukan, peningkatan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri manufaktur, meningkatkan penetrasi fixed broadband, penuntasan infrastruktur TIK dalam rangka transformasi digital, serta peningkatan skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Perusahaan mendefinisikan ulang visinya yaitu “Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia”, sehingga Perusahaan kembali pada kompetensi inti yaitu *Manufacture & Assembly* peralatan telekomunikasi, dilengkapi dengan *System Integrator*, *Digital Service*, serta *Managed Service* untuk memberikan layanan yang terintegrasi. Di samping itu, komposisi penjualan pada kastemer pun akan difokuskan kembali melalui resegmentasi kastemer *Telco-Government-Enterprise-Defense*.

Strategi *business as usual* tidak mencukupi dalam menyelesaikan permasalahan utang non produktif. Kondisi aset kantor (Jalan Moch Toha Nomor 77 Bandung) dan pabrik (Jalan Moch Toha Nomor 225 Bandung) PT INTI (Persero) belum seluruhnya terutilisasi secara optimal (masih *idle*). Oleh karena itu, upaya-upaya optimalisasi aset melalui penyewaan atau kerja sama operasi (KSO) lahan dan bangunan tetap dilakukan secara simultan, berdasarkan kajian restrukturisasi PT INTI (Persero) dalam opsi kedua yang disusun oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), terdapat skenario penjualan aset Jalan Moch Toha Nomor 77 Bandung dalam rangka penyehatan PT INTI (Persero). PT INTI (Persero) akan menindaklanjuti rencana skema Penambahan Modal Kerja & Restrukturisasi Utang dalam rangka penyehatan Perusahaan, melalui *strategic action* antara lain Penjualan Aset Jalan Moch Toha Nomor 77 Bandung dengan dampak atau manfaat bagi PT INTI (Persero).

Dewan Komisaris mendukung strategi yang akan dijalankan oleh Direksi pada tahun 2022. Dengan dukungan dari Pemegang Saham dan pihak-pihak terkait lainnya (Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan atau Non-Perbankan, Vendor, dan para Pemangku Kepentingan Lainnya) diharapkan strategi tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat tercapai.

Pandangan atas Penerapan *Whistle-Blowing System*

Whistle-Blowing System (WBS) adalah saluran untuk menerima pelaporan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan, atau adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan Perseroan.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan atas sistem

not dampen the Company's efforts to recognize the Company's role in economic development, including increasing the new renewable energy mix, increasing the Domestic Component Level (TKDN) component of the manufacturing industry, increasing fixed broadband penetration, completing ICT infrastructure in the context of digital transformation, and an increase in Indonesia's score in the *Global Cybersecurity Index*.

The company redefines its vision, “Being the Best Smart Products Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia”, so that the Company returns to its core competence, namely *Manufacture & Assembly* of telecommunication equipment, equipped with *System Integrator*, *Digital Service*, and *Managed Service* to provide integrated services. In addition, the composition of sales to customers will also be refocused through the re-segmentation of *Telco-Government-Enterprise-Defense* customers.

The business as usual strategy is not sufficient in solving non-productive debt problems. The condition of PT INTI (Persero)'s office (Moch Toha Street Number 77 Bandung) and factory (Moch Toha Street Number 77 Bandung) assets has not been fully utilized optimally (still *idle*). Therefore, efforts to optimize assets through leasing or joint operation of land and buildings are still carried out simultaneously, based on the restructuring study of PT INTI (Persero) in the second option prepared by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), there is a scenario of selling Moch Toha Street Number 77 Bandung assets in the context of restructuring PT INTI (Persero). PT INTI (Persero) will follow up on the plan for the Additional Working Capital & Debt Restructuring scheme in the context of restructuring the Company, through strategic actions including the Assets Sale of Moch Toha Street Number 77 Bandung with impacts or benefits for PT INTI (Persero).

The Board of Commissioners supports the strategy that will be implemented by the Board of Directors in 2022. With the support of the Shareholders and other related parties (Government, Bank or Non-Bank Financial Institutions, Vendors, and Other stakeholders) it is hoped that the strategy can be implemented according to plan, so that the performance targets set by 2022 are achievable.

Overview on the Implementation of the *Whistle-Blowing System*

The *Whistle-Blowing System* (WBS) is a channel for receiving reporting, evaluating, and following up on allegations of violations and/or fraud, or the existence of practices that deviate and threaten the interests of the Company.

The Company has also set up a reporting system policy

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System, yang memuat prosedur kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan *Whistle-Blowing System* (WBS), jaminan perlindungan bagi *Whistle-Blower*, tim WBS, dan kerahasiaan. Selain itu, Perseroan telah menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS berupa Kotak WBS, email gcg_wbs@inti.co.id, nomor Whatsapp, dan SMS Center. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan telah dibuat sarana pelaporan melalui <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Pada tahun 2021 tidak terdapat laporan pengaduan melalui saluran WBS terkait adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero). Dewan Komisaris telah menelaah dan menyimpulkan bahwa nihilnya jumlah pengaduan yang masuk lebih disebabkan oleh tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi dari karyawan Perseroan dalam menjalankan kode etik kerja yang ditetapkan.

Sebagai kata penutup, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan pada Direksi dan seluruh Insan PT INTI (Persero) yang dengan sigap melakukan adaptasi di tengah tantangan untuk keberlanjutan bisnis PT INTI (Persero) yang lebih baik, walaupun banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Terima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh Insan PT INTI (Persero) yang mampu menghasilkan kinerja terbaik pada tahun 2021 ini.

Lembaran baru tahun 2022 sudah di depan mata, maka mari kita semua tetap fokus untuk Mewujudkan #INTIBANGKIT. Semoga Allah senantiasa memberkahi upaya kita ini.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris di PT INTI (Persero).

on alleged irregularities in the Decree of Board of Directors Number KN.006/2022 dated March 16, 2022 on Whistle-Blowing Policy System, containing the policy procedure, execution and reporting of Whistle-Blowing System (WBS), guarantees protection for Whistle-Blower, WBS team, and confidentiality. In addition, the Company has provided a means of communication to support the implementation of policies in the form of WBS Box, email gcg_wbs@inti.co.id, Whatsapp number, and SMS Center. The company has also collaborated with the Corruption Eradication Commission, and a reporting facility has been made via <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

In 2021, there were no reports of complaints through the WBS channel regarding suspected violations or fraud committed by PT INTI (Persero) employees. The Board of Commissioners has reviewed and concluded that the zero number of incoming complaints is due to the high level of compliance and discipline of the Company's employees in carrying out the established work code of ethics.

In closing, the Board of Commissioners expresses appreciation to the Board of Directors and all personnel of PT INTI (Persero) who swiftly adapt in the midst of challenges for a better business sustainability of PT INTI (Persero), despite the many challenges and difficulties faced. Thank you for the commitment and hard work of all PT INTI (Persero) personnel who were able to produce the best performance in 2021.

The new chapter of 2022 is in sight, so let's all stay focused on Realizing #INTIBANGKIT. May Allah always bless our efforts.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2021, there is no change in the composition of the Board of Commissioners at PT INTI (Persero).

30 Juni 2022,
Atas nama Dewan Komisaris,

Komisaris Utama,



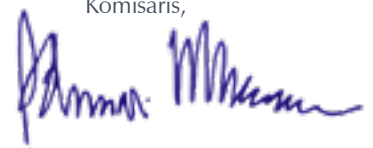
Unggul Priyanto

Komisaris,



Trisno Hendradi

Komisaris,



Rahmadi Murwanto



Laporan Direksi

Board of Director's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan seluruh Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama atas nama Direksi Perseroan, izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dapat melalui tahun 2021, meskipun bukanlah tahun yang mudah bagi PT INTI (Persero) khususnya dan para pelaku usaha di Indonesia pada umumnya di tengah tantangan pandemi global Covid-19 yang masih masih berlanjut.

Selain itu, dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan oleh seluruh insan Perseroan juga turut mendukung pencapaian Perseroan, di mana hal tersebut patut diberikan apresiasi tersendiri.

Pencapaian kinerja tahun 2021 yang lebih baik dari tahun sebelumnya, menjadi landasan Perseroan untuk dapat meningkatkan lagi kinerja pada tahun 2022 melalui upaya finalisasi kajian restrukturisasi bisnis dan optimalisasi aset, restrukturisasi utang bank menjadi 10 tahun dengan bunga pinjaman lunak, restrukturisasi utang vendor, restrukturisasi bisnis, *cost leadership*, program penguatan *frontliner*, program pensiun dini dan program dirumahkan, *redefine* visi, misi dan arah pengembangan jangka panjang, optimalisasi aset, lelang atas aset non operasional, peningkatan *recurring* bisnis, fokus pada proyek-proyek margin besar guna menciptakan nilai tambah yang positif bagi pemegang

Dear Shareholders, Board of Commissioners, and all Stakeholders,

First of all on behalf of the Board of Directors of the Company, allow me to express my praise and gratitude to God Almighty, for His mercy and grace, the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia can go through 2021, although it is not an easy year for PT INTI (Persero) in particular and business actors in Indonesia in general in the midst of the ongoing challenges of the global Covid-19 pandemic.

In addition, the dedication and loyalty shown by all of the Company's personnel also supports the Company's achievements, which should be given special appreciation.

The achievement of performance in 2021, which was better than the previous year, became the basis for the Company to be able to improve its performance again in 2022 through efforts to finalize the study of business restructuring and optimization of assets, Restructuring bank debt to 10 years with soft loan interest, restructuring vendor debt, restructuring business, cost leadership, frontliner strengthening program, early retirement program and laid off program, redefine vision, mission and long-term development direction, asset optimization, auction of non-operational assets, increase recurring business, focus on large margin projects to create added value positive for shareholders

saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan juga dapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan restrukturisasi bisnis tersebut, maka Perusahaan pun perlu melakukan perubahan model bisnis, antara lain perubahan fokus lini bisnis yang semula hanya pada *System Integrator* menjadi 4 (empat) lini bisnis, yaitu *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service (MSDM)*, perubahan orientasi proyek yang semula ditargetkan sebanyak-banyaknya menjadi memperbesar porsi proyek dengan pendapatan rutin bulanan (*Recurring Project*), diiringi dengan perubahan orientasi margin atau keuntungan yang semula mengejar nominal *revenue*, meskipun margin rendah, dan proyek-proyek margin negatif disubsidi dengan proyek-proyek margin positif, menjadi memilih proyek-proyek dengan margin besar dan menghentikan proyek-proyek dengan margin negatif, serta melakukan perubahan bisnis dengan melibatkan dunia pendidikan dengan mengimplementasikan *Teaching Factory* (melibatkan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK) pada proyek *Refurbish & Repair*.

and stakeholders.

The Company can also convey that in connection with the business restructuring, the Company also needs to make changes to its business model, including changing the focus of its business lines which were originally only on *System Integrator* to 4 (four) business lines, namely *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service (MSDM)*, change in project orientation which was originally targeted as much as possible to increase the portion of projects with recurring monthly income (*Recurring Projects*), accompanied by changes in margin or profit orientation which initially pursued nominal revenue, even though margins were low, and negative margin projects were subsidized by other projects positive margin, choosing projects with large margins and stopping projects with negative margins, as well as making business changes by involving the world of education by implementing *Teaching Factory* (involving Vocational High Schools or SMK) in the *Refurbish & Repair* project.

Tinjauan Makro Ekonomi Tahun 2021

Macroeconomic Overview in 2021

Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, di pertengahan tahun 2021 muncul varian baru Covid-19 yang menyebabkan terjadinya gelombang kedua pandemi di Indonesia yang berdampak pada semakin melemahnya kondisi ekonomi nasional. Namun, Pemerintah telah melakukan langkah cepat untuk memulihkan perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik, di mana ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%.

Dengan penanganan Covid-19 yang baik dan efektif, ekonomi mulai bergerak membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 berkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Natal dan Tahun Baru. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q2-2021 menguat 7,1% ketika kasus Covid-19 terkendali. Lalu, pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena adanya lonjakan kasus varian Delta. Meski melambat, tingkat pertumbuhan Q3-2021 Indonesia di tengah gelombang Delta terhitung cukup baik. Beberapa negara mitra seperti Thailand atau Malaysia bahkan kembali mengalami kontraksi masing-masing -0,3% dan -4,5% pada Q3-2021.

Sejalan dengan perekonomian nasional yang membaik dari tahun sebelumnya, Perseroan pun mencatatkan kinerja tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Perseroan menjadikan semua tantangan sebagai pemacu semangat, serta mengingatkan kami untuk tetap menjaga komitmen dalam menghadapi segala hal dengan memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

In 2021 the Covid-19 pandemic will continue, in the middle of 2021 a new variant of Covid-19 appears which causes a second wave of pandemics in Indonesia which has an impact on the weakening of national economic conditions. However, the Government has taken quick steps to restore the national economy. This can be seen from data from the Central Statistics Agency, where the Indonesian economy in 2021 grew by 3.69%, higher than the achievement in 2020 which experienced a growth contraction of 2.07%.

With a good and effective handling of Covid-19, the economy is starting to move better. Indonesia's economic growth in Q1-2021 contracted 0.7% as it was influenced by the increase in Covid-19 after the Christmas and New Year period. Then Q2-2021 economic growth strengthened 7.1% when the Covid-19 case was under control. Then, Q3-2021 growth again slowed to 3.5% due to a surge in cases of the Delta variant. Although slowing down, Indonesia's Q3-2021 growth rate amidst the Delta wave is quite good. Some of our partner countries such as Thailand or Malaysia even experienced contractions of -0.3% and -4.5% respectively in Q3-2021.

In line with the improving national economy from the previous year, the Company also recorded performance in 2021 which showed improvement from the previous year. The Company take all challenges as encouragement, and remind us to keep our commitment in facing everything by providing the best results for all stakeholders.

Analisis atas Kinerja Perusahaan

Analysis of Company Performance

Strategi dan Kebijakan Strategis

Berbagai upaya telah dan akan diambil oleh Manajemen untuk terus mengatasi masalah-masalah yang ada di Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan tentunya, proses penyehatan tersebut tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan. Seluruh insan Perseroan, termasuk dari entitas anak, telah dan akan terus berperan aktif dalam merealisasikan pencapaian kinerja Perseroan secara konsolidasian.

Strategi yang telah dilaksanakan di antaranya:

1. Strategi peningkatan kontribusi pendapatan dari recurring business menghasilkan proyek-proyek *Maintenance Outside Plant (OSP)*, *Seat Management*, *Spare Part Management System (SPMS)*, *Mobile Point of Sales (MPOS)*, dan *Sewa Tower Power (TOPO)* untuk *Base Tranceiver Station (BTS)*.
2. Strategi peningkatan kontrak proyek dengan *contribution margin* yang lebih baik.
3. Strategi pengembangan *new revenue stream* dan model bisnis baru, terutama di bidang *digital business* pada proyek Penerangan Jalan Umum, *Managed Service Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, dan *Sewa TOPO*.
4. Strategi pengembangan model pendanaan baru, di antaranya berupa *Equity and Loan Financing* pada anak perusahaan untuk pendanaan dengan bentuk kontrak yang sesuai.
5. Strategi investasi dengan memprioritaskan pengembalian yang cepat dan *cost of capital* rendah, direalisasikan dengan skema *Build-Operation-Transfer (BOT)* untuk revitalisasi pabrik
6. Strategi Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk meningkatkan penciptaan nilai, dicapai menggunakan model sinergi strategis. Misalnya, model sinergi maupun model transaksional seperti konsep sinergi dengan Telkom Group, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kepemimpinan, *engineering*, manajemen proyek, dan *account management*, dengan realisasi pencapaian.

Strategy and Strategic Policy

Various efforts have been and will be taken by the Management to continue to overcome the problems that exist in the Company. Management believes that with the ongoing efforts, the Company will be able to maintain its business continuity. And of course, the restructuring process is inseparable from the maximum efforts of the Board of Directors and all employees of the Company in carrying out their mandated duties and responsibilities. All of the Company's personnel, including from subsidiaries, have and will continue to play an active role in realizing the Company's performance achievements on a consolidated basis.

The strategies that have been implemented include:

1. Strategy Increasing revenue contribution from recurring business results in *Outside Plant (OSP) Maintenance*, *Seat Management*, *Spare Part Management System (SPMS)* projects, *Mobile Point of Sales (MPOS)* and *Tower Power Rental (TOPO)* for *Base Tranceiver Station (BTS)*.
2. Strategy to increase project contracts with a better *contribution margin*.
3. Strategy for the development of new revenue streams and new business models, especially in the *digital business* sector in the *Public Road Lighting*, *Managed Service Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, and *TOPO Rental* projects.
4. Strategy development of new funding models, including new forms of *Equity and Loan Financing* to subsidiaries for funding in the form of appropriate contracts.
5. Investment strategy by prioritizing fast returns and low cost of capital, realized with the *Build-Operation-Transfer (BOT)* scheme for factory revitalization
6. The Synergy Strategy of State-Owned Enterprises (SOEs) which is used to increase value creation, is achieved using a strategic synergy model. For example, the synergy model and transactional model such as the concept of synergy with the Telkom Group, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Human resources development strategy in the fields of leadership, engineering, project management, and account management, with the realization of achievements.

8. Strategi *cost behaviour* untuk efisiensi terutama dalam kontributor utama beban pokok penjualan.
9. Strategi penyelesaian hutang non-produktif, khususnya dengan perbankan, telah terealisasi melalui restrukturisasi utang Perseroan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan periode restrukturisasi selama 10 tahun. Adapun dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah dilakukan reprofiling selama 1 tahun, dan akan dilanjutkan restrukturisasi utang.
10. Perseroan telah melakukan kerja sama dengan konsultan PT Pengelola Aset (Persero) dalam menyusun kajian restrukturisasi Perseroan yang terdiri dari restrukturisasi bisnis, restrukturisasi utang dan optimalisasi aset.

Kebijakan Strategis

Kebijakan strategi restrukturisasi bisnis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu:

1. Aspek Pemasaran

Melakukan pengembangan portofolio pasar dan produk pada bisnis eksisting maupun bisnis baru, dan inovasi pemasaran untuk membangun image sebagai innovation leading company. Penciptaan pasar baru khususnya dilakukan pada sektor pemerintahan dan memanfaatkan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Aspek Produk

Mengembangkan produk-produk yang inovatif, memiliki kehandalan tinggi, dan *time to market* yang cepat dengan tidak melepaskan diri dari kompetensi Perseroan di bidang telekomunikasi dan elektronika.

3. Aspek Operasi

Pembangunan rantai pasokan yang baik, kemitraan strategis dengan pemilik teknologi, peningkatan kualitas pengelolaan proyek, dan pengendalian resiko operasi secara konsisten. Tahun ini, Perseroan juga meningkatkan porsi bisnis manufaktur sembari menerapkan proses-proses bisnis yang mendukung pengendalian operasi dan manajemen bahan baku yang lebih baik.

Landasan aspek efisiensi dan optimalisasi, aspek finansial dan aspek sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Aspek Efisiensi dan Optimalisasi

Efisiensi sumber daya dan optimalisasi semua sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidup perusahaan.

2. Restrukturisasi Finansial

Dilakukan dengan program efisiensi keuangan, percepatan perputaran modal kerja proyek, perbaikan struktur permodalan, menjaga aliran kas baik dari sisi perputaran payable maupun receivable, inovasi sumber pendanaan baru, serta pengendalian risiko keuangan secara konsisten.

8. *Cost behavior strategy for efficiency, especially in the main contributor to the cost of goods sold.*
9. *The strategy to settle non-earning debts, particularly with banks, has been realized through the restructuring of the Company's debt to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, with a restructuring period of 10 years. As for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, reprofiling has been carried out for 1 year, and debt restructuring will be continued.*
10. *The Company has collaborated with consultant PT Pengelola Aset (Persero) in compiling a study on the restructuring of the Company which consists of business restructuring, debt restructuring and asset optimization.*

Strategic Policy

The business restructuring strategy policy covers 3 (three) main aspects, namely:

1. Marketing Aspect

Developing market and product portfolios in existing and new businesses, and marketing innovations to build an image as an innovation leading company. The creation of new markets is especially carried out in the government sector and utilizing the Synergy Strategy of State-Owned Enterprises (SOEs).

2. Product Aspect

Develop innovative products, have high reliability and fast time to market without breaking away from the company's competence in the field of telecommunications and electronics.

3. Operational Aspect

Good supply chain development, strategic partnerships with technology owners, improving the quality of project management, and consistently controlling operational risks. This year, the Company also increased the portion of the manufacturing business while implementing business processes that support better operational control and raw material management.

The basis for efficiency and optimization aspects, financial aspects and human resources aspects are as follows:

1. Aspects of Efficiency and Optimization

Resource efficiency and optimization of all available resources for the survival of the company.

2. Financial Restructuring

It is carried out through financial efficiency programs, accelerating project working capital turnover, improving capital structure, maintaining cash flow both in terms of payable and receivable turnover, innovating new funding sources, and controlling financial risk consistently.

3. Transformasi Sumber Daya Manusia

Penguatan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja), membangun kesadaran akan manfaat dan risiko bisnis, serta budaya perusahaan. Strategi lain dari perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi cerdas bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik adalah dengan melakukan parenting strategy. Parenting strategy dikembangkan Perseroan untuk memberdayakan secara optimal sumber daya dan kapabilitas perusahaan bagi pembangunan nilai setiap lini bisnis Perseroan dan sekaligus pula menghasilkan sinergi di antara berbagai lini bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti perusahaan induk (*parent corporation*) dan pada nilai yang diciptakan melalui hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya. Langkah-langkah strategis untuk mendukung transformasi sumber daya manusia antara lain menguatkan kompetensi serta budaya berbagi pengetahuan di antara karyawan melalui sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*), yang diimplementasikan melalui Webinar INTI yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 27 episode, dengan peserta sebanyak 1336 orang. Selain memperkuat kompetensi dan pengetahuan karyawan melalui Webinar, Perusahaan juga berkomitmen dalam meningkatkan budaya inovasi melalui pelaksanaan Konvensi Inovasi INTI 2021 dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut didapatkan 4 pemenang pada kategori *technology breakthrough* dan *incremental innovation*.

3. Transformation of Human Resources

Strengthening competencies (knowledge, skills, and work attitudes), building awareness of the benefits and risks of business, as well as corporate culture. Another strategy from the company to realize sustainable growth through smart innovation for improving a better life is to carry out a parenting strategy. The parenting strategy was developed by the Company to optimally empower the company's resources and capabilities for the value development of each of the Company's business lines and at the same time generate synergies between the various business lines. This strategy focuses on the parent corporation's core competencies and on the value created through the relationships between the parent and its business units. Strategic steps to support the transformation of human resources include strengthening competence and a culture of sharing knowledge among employees through a knowledge management system, which is implemented through the INTI Webinar which has been held throughout 2021 for 27 episodes, with 1336 participants. In addition to strengthening employee competencies and knowledge through webinars, the Company is also committed to enhancing the culture of innovation through the implementation of the 2021 INTI Innovation Convention where 4 winners were won in the technology breakthrough and incremental innovation categories.

Secara garis besar strategi yang disusun Perseroan untuk tumbuh tertuang dalam akronim "TURNAROUND":
Broadly speaking, the strategy prepared by the Company to grow is stated in the acronym "TURNAROUND":



Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang Ditargetkan (Kinerja Perseroan)

Comparison Between Achieved and Targeted Results (Company Performance)

Pandemi Covid-19 yang belum usai hingga penghujung tahun 2021 membatasi pergerakan ekonomi dunia. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan senantiasa berusaha mencapai target kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

PT INTI (Persero) mencatat Rugi Konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp109,42 miliar atau minus 30,09 kali dari RKAP tahun 2021 atau naik 30,93% dari realisasi tahun 2020.

Secara umum dapat disampaikan, PT INTI (Persero) mencatatkan nilai Penjualan Konsolidasi Tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar, turun Rp55,52 miliar atau 12,99% dari tahun 2020 atau 52,60% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.

Namun, Laba Kotor meningkat menjadi sebesar Rp45,23 miliar atau 45,67% dari RKAP tahun 2021, tumbuh 62,32% dari tahun 2020. Realisasi rasio laba kotor terhadap penjualan tahun 2021 adalah 12,17%, naik 5,65% dari tahun lalu yang sebesar 6,52%.

Laba Kotor tersebut terutama berasal dari proyek *Repair & Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE), Kontrak Harga Satuan (KHS) *Repair & Refurbished NTE* Pengadaan & Pemasangan *Outside Plant* (OSP) Fiber Optic Node-B, *Outside Plan* (OSP) Fiber Optic Feeder dan Node-B, serta Kontrak Harga Satuan (KHS) Pengadaan Material-Telkom Akses.

Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) sebesar minus Rp50,54 miliar mengalami kenaikan sebesar 30,55 miliar dari realisasi tahun sebelumnya atau naik 37,67%, atau minus 145,39% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 sebesar Rp34,76 miliar.

Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp92,49 miliar atau 76,16% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021. Pendapatan Lain-lain Rp24,81 miliar atau 45,19% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, Beban Lain-lain Rp33,89 miliar, perusahaan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63,35 miliar atau naik sebesar Rp30,42 miliar atau 32,44%, lebih baik daripada tahun 2020.

Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp52,07 miliar atau 62,54% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp11,50 miliar atau 18,09% dari realisasi di tahun 2020, sebagai hasil dari program restrukturisasi utang Bank Mandiri, yang dimulai pada November 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah mampu melakukan program efisiensi, di mana perbaikan profitabilitas di sisi beban pokok dilakukan dengan

The Covid-19 pandemic, which has not ended until the end of 2021, has limited the movement of the world economy. Under these conditions, the company always strives to achieve performance targets based on the Company Work Plan and Budget.

PT INTI (Persero) recorded a Consolidated Loss in 2021 of Rp109,42 billion or minus 30.09 times the Company Work Plan and Budget in 2021, an increase of 30.93% from the realization in 2020.

In general it can be delivered, PT INTI (Persero) recorded the value of Consolidated Sales in 2021 of Rp371.73 billion, decrease Rp 55.52 billion or 12.99% from 2020 or 52.60% of the Company Work Plan and Budget 2021.

However, Gross Profit increased to Rp45.23 billion or 45.67% from the 2021 Company Work Plan and Budget, growing 62.32% from 2020. The realization of the gross profit to sales ratio in 2021 was 12.17%, increased 5.65% from last year's 6.52%.

The Gross Profit mainly from Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE) project, Unit Price Contract Repair & Refurbished NTE, Procurement & Installation Outside Plan Fiber Optic Node-B, Outside Plan Fiber Optic Feeder and Node-B, also Unit Price Contract Material Procurement-Telkom Akses.

The value of Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) minus Rp50.54 billion, an increase of 30.55 billion from the previous year's realization or an increase of 37.67%, or minus 145.39% from Company Work Plan and Budget target in 2021 of Rp34.76 billion.

Realization of Selling Expenses, General and Administrative Expenses, Development Expenses was Rp92.49 billion or 76.16% to Company Work Plan and Budget 2021. Other Income of Rp24.81 billion or 45.19% to Company Work Plan and Budget 2021, Other Expenses Rp33.89 billion, the company had Loss Before Financing Expenses Rp63.35 billion or increased Rp30.42 billion or 32.44%, better than 2020.

Finance Expenses realized Rp52,07 billion or 62,54% to Company Work Plan and Budget 2021. This figure has decreased Rp11,50 billion or 18,09% of the realization in 2020, as a result of Bank Mandiri's debt restructuring program, which began in November 2020.

This shows that the Company has been able to carry out efficiency programs, where the improvement in profitability on the cost side is carried out by improving the process



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

perbaikan proses monitoring dan evaluasi proyek secara lebih intensif. Hal ini terlihat dari menurunnya rasio beban pokok terhadap penjualan yang menurun 5,65% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan upaya manajemen untuk melakukan perbaikan sudah membuahkan hasil. Untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas, Perusahaan perlu meningkatkan ukuran pekerjaan yang diperoleh.

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Total Rugi Komprehensif sebesar Rp89.52 miliar atau 93.57% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp91.32 miliar atau tumbuh 50.50% dari realisasi Rugi tahun 2020 yaitu sebesar Rp180.84 miliar.

Dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi, tercatat per 31 Desember 2021, Total Aset sebesar Rp1,20 triliun, Liabilitas sebesar Rp1,74 triliun, dan Ekuitas sebesar negatif Rp539,00 miliar. Ekuitas turun sebesar Rp89,52 miliar atau negatif 19,92% dibandingkan realisasi tahun 2020, akibat kerugian yang dialami semenjak tahun 2019.

Realisasi Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp311,07 miliar dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Manufacture & Assembly** sebesar Rp42,48 miliar, terutama berasal dari proyek Material Outside Plant (OSP) Rp26,72 miliar, Optimalisasi Material Rp5,77 miliar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Reader Rp4,34 miliar, Outside Plant (OSP) Rp4.05 miliar, Plastik Rp1,29 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp203,27 juta.
2. **Managed Service** sebesar Rp97,62 miliar, terutama berasal dari proyek Repair & Refurbish Rp51,21 miliar, Tower and Power (TOPO) Rp19,56 miliar, Maintenance Rp11,63 miliar, Information Technology (IT) System Rp10,69 miliar, Spare Part Management System (SPMS) Rp2,95 miliar, Sewa Rp1,01 miliar, dan Mobile Point of Sales (MPOS) Rp564,76 juta.
3. **Digital Service** sebesar Rp56,71 miliar, terutama berasal dari proyek Information Technology (IT) System Rp53,33 miliar, proyek Penghitung Lalu Lintas Otomatis (Plato) Rp1,88 miliar, e-Voting Rp1,46 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp38,27 juta.
4. **System Integrator** sebesar Rp114,27 miliar, terutama berasal dari proyek Outside Plant (OSP) Rp109.50 miliar, Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical (SACME) Rp1,08 miliar, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp987,50 juta, Metal Rp925,74 juta, Niaga Rp695,21 juta, dan proyek lainnya senilai Rp1,07 miliar.

Realisasi Penjualan Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar dengan ringkasan sebagai berikut:

of monitoring and evaluating projects more intensively. This can be seen from the decrease in the ratio of cost of goods to sales which decreased by 5.65% compared to 2020. This shows that management's efforts to make improvements have paid off. To be able to further increase profitability, the company needs to increase the size of the work obtained.

In 2021, the Company recorded Total Comprehensive Loss of Rp89.52 billion or 93.57% to Company Work Plan and Budget 2021, decreased Rp91.32 billion or growth 50.50% from the realization of 2020 loss, which was Rp180.84 billion.

From Consolidated Statements of Financial Position, recorded as of December 31, 2021, Total Assets was Rp1.20 trillion, Liabilities was Rp1.74 trillion, and Equity was negative Rp539.00 billion. Equity decreased by Rp89.52 billion or negative 19.92% compared to the realization in 2020, due to losses since 2019.

Realization of Consolidated Sales Contracts in 2021 amounted to Rp311.07 billion with a summary as follows:

1. Manufacture & Assembly Rp42.48 billion, mainly from Outside Plant (OSP) Material projects Rp26.72 billion, Material Optimization Rp5.77 billion, Identity Card Electronic Reader Rp4.34 billion, Outside Plant (OSP) projects Rp 4.05 billion, Plastic projects Rp1.29 billion, other projects Rp203.27 million.
2. Managed Service Rp97.62 billion, mainly from Repair and Refurbish projects of Rp51.21 billion, Tower and Power (TOPO) Rp19.56 billion, Maintenance Rp11.63 billion, Information Technology (IT) System Rp10.69, Spare Part Management System (SPMS) Rp2.95 billion, Leasing Rp1.01 billion, and Mobile Point of Sales (MPOS) Rp 564.76 million,
3. Digital Service Rp56.71 billion, mainly from Information Technology (IT) System projects Rp53.33 billion, Automatic Calculation and Recording of Vehicle Rp1.88 billion, e-Voting Rp1.46 billion, and other projects Rp38.27 million.
4. System Integrator amounting to Rp114,27 billion, mainly from Outside Plant (OSP) Rp109.50 billion, Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical (SACME) Rp1.08 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp987.50 million, Metal Rp925.74 million, Commercial Rp695.21 million, and other projects amount Rp1.07 billion.

Consolidated Sales realization in 2021 amounted to Rp371.73 billion with a summary as follows:

1. **Manufacture & Assembly** sebesar Rp71,81 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plant* (OSP) Rp35,22 miliar, *Material Outside Plant* (OSP) Rp29,23 miliar, *Optimalisasi Material* Rp5,07 miliar, *Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Reader* Rp1,21 miliar, *Plastik* Rp471,16 juta, dan proyek lainnya senilai Rp603,68 juta.
2. **Managed Service** sebesar Rp145,84 miliar, terutama berasal dari proyek *Repair & Refurbish* Rp79,12 miliar, *Maintenance* Rp22,87 miliar, *Tower and Power* (TOPO) Rp19,58 miliar, *Seat Management* Rp13,04 miliar, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) Rp6,59 miliar, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp2,93 miliar, *Sewa* Rp1,15 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp556,06 juta.
3. **Digital Service** sebesar Rp56,31 miliar, terutama berasal dari proyek *Information Technology* (IT) System Rp53,33 miliar, *e-Voting* Rp1,46 miliar, *Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Reader* Rp930,49 juta, dan proyek lainnya Rp590,28 juta.
4. **System Integrator** sebesar Rp97,77 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plant* (OSP) Rp73,49 miliar, *Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya* (PLTS) Rp17,73 miliar, *Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical* (SACME) Rp1,51 miliar, *Bird Strike* Rp1,13 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp987,50 juta, *Information Technology* (IT) System Rp734,42 juta, *Radar* Rp695,30 juta, dan proyek lainnya senilai Rp1,50 miliar.

Realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT INTI (Persero) tahun 2021 sebesar Rp2.540.100.000 atau 127% dari anggaran tahun 2021 yang sejumlah Rp2.000.121.500.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT INTI (Persero), Perusahaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 berdasarkan (4) empat pilar. Pilar Pembangunan Ekonomi yang merupakan dana bergulir berhasil menyalurkan pendanaan kepada Unit Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp2.255.000.000 atau 136,67% dari dana Rp1.650.000.000 yang dianggarkan. Pilar Pembangunan Sosial menyusun anggaran untuk kegiatan sosial sebesar Rp30.000.000 dan merealisasikan dana tersebut sebesar Rp7.100.000 atau 33,67%.

Pilar Pembangunan Lingkungan merealisasikan dana sebesar Rp3.000.000 atau 30,00% untuk kegiatan penghijauan dan lingkungan sehat dari total anggaran Rp20.000.000. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Perusahaan merealisasikan dana Rp275.000.000 atau 91,63% dari anggaran sebesar Rp300.121.500.

1. *Manufacture & Assembly* Rp71.81 billion, mainly from *Outside Plant* (OSP) projects Rp35.22 billion, *Outside Plant Material* Rp29.23 billion, *Material Optimization* Rp5.07 billion, *Identity Card Electronic Reader* Rp1.21 billion, *Plastic* Rp471.16 million, and other projects Rp603.68 million.
2. *Managed Service* amounting Rp145.84 billion, mainly from *Repair & Refurbish* projects Rp79.12 billion, *Maintenance* Rp22.87 billion, *Tower and Power* (TOPO) Rp19.58 billion, *Seat Management* Rp13.04 billion, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) Rp6.59 billion, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp2.93 billion, *Leasing* Rp1.15 billion, and other projects Rp556.06 million.
3. *Digital Service* amounting to Rp56.31 billion, mainly from *Information Technology* (IT) System Rp53.33 billion, *e-Voting* Rp1.46 billion, *Identity Card Electronic Reader* Rp930.49 million, and other projects Rp590.28 million.
4. *System Integrator* amounting Rp97.77 billion, mainly from *Outside Plant* (OSP) projects Rp73.49 billion, *Solar Power Plant* Rp17.73 billion, *Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical* (SACME) Rp1.51 billion, *Bird Strike* Rp1.13 billion, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp987.50 million, *Information Technology* (IT) Systems Rp734.42 million, *Radar* Rp695.30 million, and other projects Rp1.50 billion.

The realization of PT INTI (Persero)'s 2021 Social and Environmental Responsibility program is Rp2,540,100,000 or 127% of the 2021 budget which is Rp2,000,121,500.

Based on PT INTI (Persero)'s Sustainable Development Goals Social and Environmental Responsibility, the Company prepares a Work Plan and Budget for 2021 based on (4) four pillars. Economic Development Pillar which is revolving fund successfully channeled funds to micro and small units Rp2,255,000,000 or 136,67% of the Rp1,650,000,000 budgeted funds. The Social Development Pillar prepares a budget for social activities in the amount of Rp30,000,000 and realizes the funds in the amount of Rp7,100,000 or 33,67%.

The Environmental Development Pillar realized a fund of Rp3,000,000 or 30,00% for reforestation activities and a healthy environment out of a total budget of Rp20,000,000. Legal Development and Corporate Governance Pillar realized Rp275,000,000 or 91.63% of the Rp300,121,500 budget.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusahaan dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya

Constraints Faced By The Company and The Solution Steps

Kasus COVID-19 kian meningkat setiap harinya mempengaruhi ekonomi global di segala sektor. Dampak ekonomi yang dirasakan diperkirakan akan lebih rumit dibandingkan dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menangani kasus COVID-19 agar dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia dapat dikendalikan. Salah satu upayanya yaitu dengan mengurangi program kerja pemerintah yang bersifat pembangunan fisik dan banyak mengalokasikan anggaran untuk ketahanan sosial.

Tertundanya beberapa proyek pada sektor government dikarenakan pandemi mempengaruhi INTI dalam mendapatkan kontrak dan penjualan baru. Potensi kontrak dan penjualan yang sebelumnya diproyeksikan optimis menjadi berkurang. Selain itu juga, kendala yang dialami perseroan dalam memperoleh proyek government yaitu perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan Saldo Kemampuan Nyata (SKN) yang berbanding lurus dengan nett equity. Namun, dikarenakan perusahaan memiliki strategi bisnis yang memfokuskan kepada proyek recurring sehingga hal tersebut tidak begitu berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pada tahun 2021, investasi perusahaan pada fasilitas manufaktur, research and development center, dan repair center masih rendah. Perusahaan kesulitan memproduksi produk genuine yang seharusnya memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan profitabilitas tinggi. Rendahnya kemampuan jasa manufaktur perangkat elektronik, baik sebagai *Original Equipment Manufacturer* (OEM) maupun *Original Design Manufacturer* (ODM). Selain itu rendahnya kemampuan penelitian dan pengembangan serta keterbatasan setup repair center yang memadai menjadi kendala yang dihadapi perusahaan. PT INTI (Persero) menjalankan kerja sama operasi dan proyek-proyek pengembangan baik dengan lembaga pemerintahan, sesama BUMN maupun lembaga swasta dalam negeri dan asing. Bentuk kerja sama operasi dan proyek-proyek pengembangan yang dilakukan diantaranya berupa uji coba inovasi, kerja sama produksi, perakitan, serta pengembangan peralatan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kerja sama riset dan beberapa kerja sama operasi lainnya.

Penggunaan modal kerja dengan pola bagi hasil dengan investor menyebabkan komponen *cost of capital* yang besar. Dampak dari kondisi tersebut yaitu mengurangi daya saing perusahaan dalam perolehan pekerjaan berbasis tender. Langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya menjalin kerjasama dengan mitra strategis dengan skema bisnis inovatif, menjalin kerjasama jangka panjang dengan mitra pendanaan,

Cases of COVID-19 are increasing every day affecting the global economy in all sectors. The perceived economic impact is expected to be more complicated than the global economic crisis in 2008. The Indonesian government has carried out various mitigation efforts in dealing with COVID-19 cases so that the negative impact on the Indonesian economy can be controlled. One of the efforts is to reduce government work programs that are physical development and allocate a lot of budget for social security.

The delay of several projects in the government sector due to the pandemic affected INTI in obtaining new contracts and sales. The potential for contracts and sales that were previously projected to be optimistic had decrease. In addition, the company's obstacle in obtaining government projects is that the company cannot meet the Saldo Kemampuan Nyata (SKN) requirements which are directly proportional to net equity. However, because the company has a business strategy that focuses on recurring projects, it does not have a significant impact on the company's performance.

In 2021, the company's investment in manufacturing facilities, research and development centers, and repair centers is still low. The company has difficulty producing genuine products that should have Domestic Component Level and high profitability. The low capability of electronic device manufacturing services, both as Original Equipment Manufacturer (OEM) and Original Design Manufacturer (ODM). In addition, the lack of research and development capabilities as well as the limitations of an adequate repair center setup are obstacles faced by the company. PT INTI (Persero) runs joint operations and development projects with government agencies, fellow SOEs and domestic and foreign private institutions. The forms of operational cooperation and development projects carried out include innovation trials, cooperation in production, assembly, and development of equipment to increase the Domestic Component Level, research collaborations and several other operational collaborations.

The use of working capital with a profit sharing pattern with investors causes a large cost of capital component. The impact of this condition is to reduce the company's competitiveness in obtaining tender-based jobs. The steps taken by the company include collaborating with strategic partners with innovative business schemes, establishing long-term cooperation with funding partners, and maintaining project performance to

serta menjaga performansi dari proyek untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Di bidang sumber daya manusia, Perseroan sejak dini juga telah menjaga keseimbangan komposisi demografi sumber daya manusia agar dapat mendukung strategi pengembangan bisnis Perseroan, terutama dengan adanya jumlah karyawan yang pensiun, karyawan yang mengikuti program dirumahkan, Cuti Luar Tanggungan Perusahaan (CLTP), ataupun mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS) di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

Perseroan mengambil langkah proses rekrutasi baik karyawan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun karyawan tetap, agar transfer pengetahuan terus berlangsung secara berkesinambungan. Proses rekrutasi karyawan tersebut menggunakan konsep *negative growth*, yaitu rekrutasi karyawan sejumlah maksimum hingga 30% dari jumlah karyawan yang pensiun maupun mengundurkan diri.

Pelaksanaan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar ternyata belum menunjukkan kontribusi yang signifikan, mengingat sinergi yang terbangun di tahun 2021 masih banyak yang bersifat transaksional. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, Sinergi BUMN dapat lebih bersifat kolaboratif yang mengarah pada *joint operation* atau *joint production*, *strategic alliance*, serta *joint venture*.

Selanjutnya, sejak pandemi Covid-19 meluas di Indonesia, PT INTI (Persero) memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten guna menjaga kesehatan karyawan dalam melakukan aktivitas pekerjaan bebas Covid-19.

Implementasi protokol kesehatan yang ketat sejalan dengan upaya PT INTI (Persero) dalam menjaga kesinambungan operasi produksi, penjualan, dan pengembangan Perseroan di tengah kondisi *the New Normal* pandemi Covid-19 saat ini.

increase the company's credibility.

In the field of human resources, the Company from an early age has also maintained a balance in the demographic composition of its human resources in order to support the Company's business development strategy, especially with the number of employees retiring, employees participating in the layoff program, Unpaid Leave, or Resigning Self-Request in 2021 and beyond.

The Company takes steps in the recruitment process for employees with certain time work agreements and permanent employees, so that knowledge transfer continues on an ongoing basis. The employee recruitment process uses the concept of negative growth, namely the recruitment of employees with a maximum number of up to 30% of the total number of employees who retire or resign.

The implementation of the Synergy of State-Owned Enterprises (SOEs) which is expected to provide greater opportunities has not shown a significant contribution, considering that many of the synergies built in 2021 are transactional. It is hoped that in the coming years, the Synergy of SOEs can be more collaborative in nature leading to joint operations or joint production, strategic alliances, and joint ventures.

Furthermore, since the Covid-19 pandemic has spread in Indonesia, PT INTI (Persero) has a strong commitment to implementing appropriate and consistent health protocols to maintain the health of employees in carrying out Covid-19-free work activities.

The implementation of strict health protocols is in line with PT INTI (Persero)'s efforts to maintain the continuity of the Company's production, sales, and development operations in the midst of the current condition of the New Normal Covid-19 pandemic.

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha

Overview and Analysis of Business Prospects

Pada tahun 2021, sektor telekomunikasi diproyeksikan akan tetap memperlihatkan prospek usaha dan pertumbuhan yang cukup baik. Proyeksi ini merujuk pada fakta pemberlakuan *work from home* yang masih tetap diberlakukan, pemberlakuan pembatasan mobilitas, menyusul belum selesainya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi menjadi semakin penting, sehingga Manajemen sepakat bahwa saat ini Perseroan berada dalam sektor yang tepat dan masih memiliki banyak potensi pengembangan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kemampuan bisnis secara terus-

In 2021, the telecommunications and digital sectors is projected to continue to show good business prospects and growth. This projection refers to the fact that work from home is still in effect, and the imposition of mobility restrictions, following the unfinished Covid-19 pandemic in Indonesia. This shows that telecommunication and digital services are becoming increasingly important, so Management agrees that the Company is currently in the right sector and still has a lot of potential for development

As a company engaged in telecommunications and digital, the Company is committed to continuously improving its business capabilities. The various challenges that come



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

menerus. Berbagai tantangan demi tantangan yang hadir terus Perseroan respons secara proaktif dengan memupuk semangat, kerja keras, serta optimisme kuat bahwa Perseroan mampu untuk terus maju di tengah berbagai dinamika dan tantangan melalui serangkaian terobosan bisnis baru.

Harus diakui bahwa Perseroan memerlukan beberapa perbaikan dan tantangan sehingga potensi bisnis yang luas ini dapat dikonversi menjadi penjualan dan margin yang menguntungkan. Perseroan juga telah memulai program restrukturisasi bisnis, finansial, serta optimalisasi aset, yang dapat mendukung seluruh pilar keberhasilan dalam mencapai perbaikan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan berkomitmen untuk terus menciptakan pertumbuhan peluang pada portofolio bisnis *Manufactured & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service* dan *Managed Service*, dengan target pengembangan pada *Digital Service* dan *Managed Service*.

Guna meningkatkan probabilitas pencapaian target Kontrak, Penjualan, maupun Margin, Perseroan akan tetap fokus kepada segmen kastemer Telco, *Enterprise*, *Government*, dan *Defense*, dengan porsi penjualan akan difokuskan pada segmen kastemer Telco. Hal ini mempertimbangkan kompetensi yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan, adanya program Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hubungan bisnis yang telah terbentuk selama 47 tahun Perseroan berdiri, serta Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Fasilitas manufaktur yang berlokasi di Jl. Moch. Toha Nomor 225, Dayeuhkolot, Bandung akan kembali dibangkitkan oleh Perseroan. Saat ini, aset tersebut dioptimalisasi dengan cara disewakan kepada tenant. Dan dengan dilakukannya revitalisasi terhadap fasilitas manufaktur tersebut, Perseroan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal atas aset tetap tersebut, serta Perseroan mampu mewujudkan visinya menjadi produsen *smart products* terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan melihat besarnya peluang pada portofolio *Manufactured & Assembly* untuk produk e-KTP Reader dan Set Top-Box (STB). Pada portofolio *System Integrator* adalah masih mengandalkan *Out Site Plant* (OSP). Pada portofolio *Managed Service* adalah *Repair & Refurbish* dan SPMS. Pada portofolio *Digital Service* adalah MPOS (*Mobile Point of Sales*).

Di sisi finansial, Perseroan telah mendapat kesepakatan dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi hutang unsustainable, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban cash flow jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, harapannya hal tersebut dapat mendukung perbaikan kinerja finansial melalui alokasi modal kerja yang efektif dan efisien.

up, the Company continues to respond proactively by fostering enthusiasm, hard work, and strong optimism that the Company is able to move forward amidst various dynamics and challenges through a series of new business breakthroughs.

It must be admitted that the Company needs several improvements and challenges so that this vast business potential can be converted into sales and profitable margins. The Company has also started a business restructuring program, financial, and asset optimization, which can support all pillars of success in achieving the Company's performance improvement in the future.

The Company will continue to create growth opportunities in its Manufactured & Assembly, System Integrator, Digital Service dan Managed Service business portfolio, with development targets on Digital Service and Managed Service

In order to increase the probability of achieving Contract, Sales, and Margin targets, the Company will continue to focus on the Telco, Enterprise, Government, and Defense customer segments, with the sales portion being focused on the Telco customer segment. This takes into account the competencies that the Company currently has, the Government's program in the National Medium-Term Development Plan 2020–2024, business relationships that have been established for 47 years of the Company's existence, and the Synergy of State-Owned Enterprises (SOEs).

The manufacturing facility is located on Jl. Moch. Toha Number 225, Dayeuhkolot, Bandung will be revived by the Company. Currently, these assets are optimized by renting them out to tenants. And by revitalizing these manufacturing facilities, the Company will get maximum results from these fixed assets, and the Company will be able to realize its vision to become the best smart product producer in the telecommunications sector in Indonesia.

The Company sees great opportunities in the Manufactured & Assembly portfolio for e-KTP Reader and Set Top-Box (STB) products. In the System Integrator portfolio is still relying on Out Site Plant (OSP). In the Managed Service portfolio are Repair & Refurbish and SPMS. In the Digital service portfolio is MPOS (Mobile Point of Sales).

On the financial side, the Company has obtained an agreement with creditors to restructure unsustainable debt, which is expected to reduce short-term and long-term cash flow expenses. In addition, it is hoped that this will support the improvement of financial performance through effective and efficient working capital allocation.

Perseroan juga telah melakukan program *cost management* yang akan meningkatkan kualitas struktur biaya Perseroan baik untuk komponen biaya proyek maupun biaya tenaga kerja.

Selain itu, Perseroan juga memiliki aset yang dapat dioptimalkan sehingga dapat menambah komponen pendapatan lain-lain dalam struktur laba rugi Perseroan.

The Company has also implemented a cost management program that will improve the quality of the Company's cost structure for both the project cost components and labor costs.

In addition, the Company also has assets that can be optimized so that it can add other income components in the Company's profit and loss structure.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Development of Good Corporate Governance Implementation

Perseroan selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di setiap aktivitas bisnis dan seluruh tingkatan organisasi dari tahun ke tahun. Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara maksimal dan konsisten dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Perseroan, komitmen terhadap penerapan instrumen GCG di lingkungan Perseroan tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang sangat diperlukan dalam memenangkan persaingan pasar.

Kinerja Perseroan pada tahun 2021 merupakan hasil dari penerapan GCG yang efektif. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan telah diterapkan dengan baik oleh Perseroan.

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan melalui berbagai mekanisme GCG seperti manajemen risiko, sistem pengendalian internal, *Whistle-Blowing System* (WBS), dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

The Company always strives to optimize the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all levels of the organization from year to year. The Company has a strong commitment to implement Corporate Governance optimally and consistently by referring to the applicable laws and regulations.

For the Company, the commitment to implementing the GCG instrument in the Company's environment does not only represent an obligation to comply with applicable regulations. However, it is believed to be the key to success in efforts to achieve effective, efficient, and sustainable business performance, which is indispensable in winning market competition.

The Company's performance in 2021 is the result of the effective implementation of GCG. The GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness have been well implemented by the Company.

These principles have been implemented through various GCG mechanisms such as risk management, internal control system, Whistle-Blowing System (WBS), and Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

Human Capital Management (HCM) merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Maka, walaupun pada tahun 2021, pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia, namun demikian, hampir seluruh karyawan PT INTI (Persero) sudah divaksinasi, sehingga PT INTI (Persero) mempercepat pergerakan bisnis dengan menetapkan 100% kebijakan bekerja di kantor dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Komitmen perusahaan dalam mendukung program vaksinasi pemerintah juga ditunjukkan dengan adanya "Penghargaan Atas Partisipasi dalam Penanggulangan Covid-19 Berupa Program Vaksinasi

Human Capital Management (HCM) is one of the factors that support the success and sustainability of the Company's business. So, even though in 2021, the Covid-19 pandemic will still occur in Indonesia, however, almost all employees of PT INTI (Persero) have been vaccinated, so PT INTI (Persero) accelerates business movements by establishing a 100% policy of working in the office by following health protocol. The company's commitment to supporting the government's vaccination program is also shown by the " Penghargaan Atas Partisipasi dalam Penanggulangan Covid-19 Berupa Program Vaksinasi untuk Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2021" given by the Bandung



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Report of the Board of Commissioners and Directors

untuk Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2021" yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada 12 November 2021.

Selain itu, pada tahun 2021, dalam aspek perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perusahaan telah berhasil merealisasikan *negative growth*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah karyawan yang mengikuti program pensiun dini sebanyak 61 karyawan, sejak program dibuka di tahun 2020. Walaupun demikian, PT INTI (Persero) juga tetap melakukan rekrutasi yang dilaksanakan secara online untuk berbagai posisi strategis, guna mempersiapkan suksesi di masa yang akan datang.

PT INTI (Persero) secara konsisten meningkatkan budaya berbagi pengetahuan antar karyawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dilaksanakannya 22 episode Webinar INTI selama tahun 2021, yang diisi oleh pemateri dari berbagai bidang, baik internal maupun eksternal.

Selain itu, PT INTI (Persero) juga konsisten menggelar ajang Konvensi Inovasi INTI 2021 untuk meningkatkan budaya inovasi di seluruh karyawan. Melalui ajang Konvensi Inovasi INTI 2021 tersebut, PT INTI (Persero) memperoleh inovasi karya Insan INTI Group di bidang *technology breakthrough business innovation, social innovation, dan incremental innovation*.

Regency Government, on November 12, 2021.

Besides that, in 2021, in manpower requirement planning, company has succeeded to realization negative growth, which is shown by the increasing number of early retirement employees with a total of 61 employees since the program was held in 2020. However, PT INTI (Persero) is still recruiting which is held by online for various strategic positions in order to prepare succession in the future.

PT INTI (Persero) consistently improve a knowledge sharing culture fellow employees. It is shown by 22 episodes Webinar INTI in year 2021, which is filled by speakers from various fields, both internal and external.

Furthermore, PT INTI (Persero) also consistently held the INTI Innovation Convention 2021 for improving innovation in entire employees. Through the INTI Innovation Convention 2021 event, PT INTI (Persero) obtained innovations made by INTI Group personnel in the fields of technology breakthrough, business innovation, social innovation, and incremental innovation.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan

Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan Perseroan dilakukan melalui penyaluran dana pinjaman untuk bantuan permodalan bagi usaha kecil dan dana pembinaan kemitraan berupa bantuan untuk promosi pasar dan pelatihan kepada Mitra Binaan.

Sejak awal tahun 2020, wabah virus Corona 19 (Covid-19) telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, wabah Covid-19 semakin meningkat serta adanya pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Bandung, sehingga berdampak terhadap kegiatan Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil di tahun 2021 yaitu beberapa mitra menunda pengajuan pinjaman.

Durasi dan tingkat dampak pandemi Covid-19 ini bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat dipastikan saat ini, sehingga dampak secara keseluruhan belum dapat diperkirakan pada tanggal ketika laporan keuangan ini disusun. Pengurus unit PKBL akan terus memantau perkembangan wabah Covid-19 dan terus mengevaluasi dampaknya di masa mendatang terhadap kegiatan penyaluran dana PKBL.

The implementation of the Company's social responsibility and environmental management is carried out through the distribution of loan funds for capital assistance for small businesses and partnership development funds in the form of assistance for market promotion and training for Foster Partners.

Since the beginning of 2020, the Corona 19 (Covid-19) virus outbreak has spread to various countries including Indonesia. Until 2021, the Covid-19 outbreak is increasing and the implementation of Enforcement of Community Activity Restrictions in the Bandung area, so that it has an impact on the activities of Disbursing Funds for the Micro Small Business Funding Program in 2021, namely several partners delaying loan applications.

The duration and extent of the impact of the Covid-19 pandemic depend on future developments which cannot be ascertained at this time, so the overall impact cannot be estimated at the date when these financial statements were prepared. The Partnership and Community Development Program unit management will continue to monitor the development of the Covid-19 outbreak and continue to evaluate its impact in the future on the Partnership and Community Development Program fund distribution activities.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Direksi

Assessment of The Performance of The Committees Under The Board of Directors

Pada tahun 2021, Perseroan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

In 2021, the Company did not have committees under the Board of Directors.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Members of The Board of Directors and The Reasons for The Changes

Pada tahun 2021, Perusahaan tidak mengalami perubahan komposisi anggota Direksi.

In 2021, the Company did not change the composition of the members of the Board of Directors.

Ucapan Terima Kasih

Acknowledgements

Mengakhiri laporan ini, perkenankan saya, mewakili jajaran Direksi Perseroan, untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Para Pelanggan, Mitra Bisnis, Media, serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya yang telah memberikan kepercayaan yang besar sehingga kami selalu bersemangat menjalankan amanah ini.

Concluding this report, allow me, on behalf of the Board of Directors of the Company, to express my highest gratitude and appreciation to the Shareholders, Board of Commissioners, Customers, Business Partners, Media, and all other Stakeholders who have given great trust so that we always excited to carry out this mandate.

Selain itu, kami juga ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Direksi, Senior Leaders, dan Karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dalam mendukung kegiatan bisnis Perseroan sehingga Perseroan mampu meraih beragam pencapaian strategis serta mempertahankan pertumbuhan yang sehat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

In addition, we would also like to extend our highest appreciation to the entire Board of Directors, Senior Leaders, and Employees of the Company who have worked hard in supporting the Company's business activities so that the Company was able to achieve various strategic achievements and maintain healthy growth compared to previous years.

Dengan komitmen dari seluruh Pemangku Kepentingan, untuk ke depannya, kami akan terus berupaya terus bertumbuh dan meningkatkan performa Perseroan serta mendukung komitmen Pemerintah dalam percepatan digitalisasi dengan mengusung semangat sinergi para pelaku industri telekomunikasi dan digital untuk memajukan Indonesia berdaulat digital.

With the commitment of all Stakeholders, in the future, we will continue to strive to continue to grow and improve the Company's performance as well as support the Government's commitment to accelerate digitization by carrying out the spirit of synergy among telecommunication and digital industry players to advance digital sovereign Indonesia.

30 Juni 2022,
Atas nama Direksi

Direktur Utama,

Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko,

Tri Hartono Rianto



Otong lip

Direktur Bisnis,



Teguh Adi Suryandono

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Atas Laporan Tahunan

Statement Letters of The Member of The Board of Commissioners and Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned declare that all the information included in the annual report 2021 of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the company's annual report. This is our declaration, which has been made truthfully.

Komisaris Utama,



Unggul Priyanto

Komisaris,



Trisno Hendradi

Komisaris,



Rahmadi Murwanto

Direktur Utama,



Otong lip

Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko,



Tri Hartono Rianto

Direktur Bisnis,



Teguh Adi Suryandono

Halaman Sengaja Dikosongkan
Page Intentionally Left Empty



Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan

Company Name and Domicile

Perusahaan Perseroan (Persero)
Limited Liability Company (Persero)

**PT Industri
Telekomunikasi
Indonesia**



Kantor Pusat

Headquarters

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Tlp : (+62-22) 5201501 (10 Saluran)

Fax : (+62-22) 5202444

E-mail : info@inti.co.id

[http : www.inti.co.id](http://www.inti.co.id)

Kantor Cabang Jakarta

Jakarta Branch Office

Gedung Graha Pratama Lantai 11

Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 15, Tebet

Jakarta Selatan 12810

Fasilitas Produksi

Production Facility

Jl. Moch. Toha No. 225 Bandung

Tlp : (+62-22) 5206510



Dasar Pendirian

Basic Establishment

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 34 of 1974 dated 23 September 1974 concerning the Capital Deposit of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Field of the Telecommunications Industry and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated 28 December 1974 concerning the Determination of Company's Capital.

Maksud dan Tujuan Pendirian

Purpose and Objectives of Establishment

Melakukan usaha di bidang industri telekomunikasi, elektronika, kelistrikan/energi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Conducting business in the telecommunications, electronics, electricity/energy industries, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and services to gain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
Authorized Capital : Rp. 1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah)

Modal Disetor : Rp. 350.000.000.00,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah)
Paid-up Capital : Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty billion rupiah)

Jumlah Karyawan

227 Orang

Number of Employees: 227 People

Informasi Umum

General Information

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel) pada tahun 1968.

Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Postel. Pendirian Perusahaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Industri Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

Anggaran Dasar Perusahaan dibuat oleh Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor 322 tertanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/273/10 tertanggal 1 Agustus 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor 34 tertanggal 28 Februari 2017, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0114165, tertanggal 07 Maret 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis. Pada 17 Januari 1998 diterbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai tindak lanjutnya, pembinaan PT INTI (Persero) beralih ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Pada tahun yang sama, Badan Pengelola Industri Strategis beralih status menjadi sebuah holding company dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS, dan sepuluh BUMN strategis di bawahnya menjadi anak perusahaan.

Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, saat PT BPIS (Persero) dibubarkan pada Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002. Selanjutnya, pengelolaan PT INTI (Persero) beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

The company was founded as the evolution of PN Telecommunications and Siemens AG cooperation in 1966. This cooperation continued with the formation Telephone and Telegraph Factory as part of the Post and Telecommunications Research and Development Institute in 1968.

In 1974, this part of the Post and Telecommunications Research and Development Institute separated into a Limited Liability Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. The company is based on the Indonesian Government Regulation Number 34 of 1974 dated 23 September 1974 on remittance of capital for the establishment of state-owned enterprise in telecommunications industry, and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 on the Determination of the Company's Capital.

The Articles of Association of the Company are made by a Substitute Notary Deed Warda Sungkar Alurmei, S.H., Number 322 dated December 30, 1974 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number Y.A.5/273/10 dated August 1, 1975, as amended several times, most recently by Deed Notary Muhammad Hanafi, S.H., Number 34 dated February 28, 2017, and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0114165, dated March 07, 2017.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises Number 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) is included in the Strategic Industry groups. On January 17, 1998 a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 was issued, which eliminated the role of the technical ministry in state-owned enterprises (SOEs) management. As a follow-up, coordination and nurture of PT INTI (Persero) was switched to the Ministry of SOE Empowerment.

In the same year, Strategic Industry Management Agency switched its status to a holding company under the name of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) or PT BPIS, and ten strategic SOEs became its subsidiaries.

This condition ended in 2002, where PT BPIS was dissolved in March 2002 according to Government Regulation Number 52 of 2002. Furthermore, PT INTI (Persero) nurture and coordination was reverted back to the Ministry of SOEs Empowerment.



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

1974 - 1984

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Bidang usaha PT INTI (Persero) meliputi produk-produk Radio Sonde, *radio High Frequency (HF)*, *radio Very High Frequency (VHF)*, pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Produk stasiun bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan PT INTI (Persero) dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar Rp 24,3 miliar pada tahun 1981.

Fasilitas produksi yang dimiliki PT INTI (Persero) pada periode ini antara lain:

- Pabrik Perakitan Telepon
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi
- Pabrik Mekanik dan Plastik
- Laboratorium *Software Komunikasi Data (PACKSATNET)* bekerjasama dengan Logitech.

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain dengan Siemens AG, BTM, PRX, dan JRC. Pada era tersebut, produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) PT INTI (Persero) menjadi standar Perum Telekomunikasi (sekarang Telkom).

PT INTI (Persero) was officially established on December 30, 1974. PT INTI (Persero) business line includes products Radio Sonde, Radio High Frequency (HF), Very High Frequency Radio (VHF), telephone, and satellite earth station for Domestic Satellite Communication System Palapa. This latter earth station product made history in the development of PT INTI (Persero) by contributing to the highest sales achievement in this period, amounting to Rp 24.3 billion in 1981.

Production facilities owned by PT INTI (Persero) in this period included:

- *Phone Assembly Plant*
- *Transmission Assembly Plant Equipment*
- *Mechanical and Plastic Factory*
- *Data Communications Software (PACKSATNET) in collaboration with Logitech.*

Technology collaboration undertaken in this era, among others, with Siemens AG, BTM, PRX, JRC. In this era products Coin Public Telephone PT INTI (Persero) became Perum Telekomunikasi (now Telkom) standard.

1985 - 1998

Diawali oleh rencana pemerintah untuk melakukan digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dan menunjuk PT INTI (Persero) sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) yang dilaksanakan berdasarkan *Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA)* dengan Siemens AG.

Fasilitas produksi terbaru yang dimiliki PT INTI (Persero) pada masa ini, di samping fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebelumnya, yaitu pabrik Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) pertama di Indonesia dengan teknologi produksi *Through Hole Technology (THT)*.

Pabrik STDI berkapasitas 150.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) ini dibangun pada tahun 1984 dan produksi pertamanya sebesar 10.000 SST diluncurkan pada tahun 1985. Di kemudian hari, kemampuan pabrik ini dilengkapi juga dengan teknologi produksi *Surface Mounting Technology (SMT)*. Produk STDI ini berkontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan

Initiated by government plans to undertake digitization of telecommunications infrastructure in Indonesia and appointed PT INTI (Persero) as sole supplier Digital Telephone Central Indonesia carried out by the Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) with Siemens AG.

Latest production facilities owned by PT INTI (Persero) at this time, in addition to the facilities already existing, namely Digital Telephone Central, the first factory in Indonesia with production technology Through Hole Technology (THT).

Digital Telephone Central Plant with a capacity of 150,000 Phone Line Unit was built in 1984 and first production of 10,000 Phone Line Unit was launched in 1985. Later the plant capability was also equipped with Surface Mounting Technology (SMT). These Digital Telephone Central products contributed significantly to PT INTI (Persero) growth in sales and profits.

penjualan dan laba PT INTI (Persero).

Walaupun pada tahun 1990 pemerintah membuka persaingan dengan mengizinkan dua pemasok sentral digital lainnya, yaitu AT&T dan NEC. Namun, sampai dengan tahun 1998, PT INTI (Persero) masih tetap menjadi market leader dalam hal pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi, yaitu sebesar 60% dari total pasar nasional.

Dengan memanfaatkan fasilitas pabrik ini pula, ruang lingkup produk PT INTI (Persero) dilengkapi oleh *Pulse Code Modulation* (PCM), *Private Automatic Branch Exchange* (PABX), dan pesawat telepon meja INTI 111 yang semuanya merupakan produk lisensi dari Siemens AG.

Di samping itu, PT INTI (Persero) juga memproduksi perangkat-perangkat hasil pengembangan sendiri seperti Stasiun Bumi Kecil (SBK), *High Frequency* (HF) Radio, *Digital Microwave Radio* (DMR), Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB), Pesawat Telepon Umum *Coin Box*, dan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS).

Sejak tahun 1989, produk PT INTI (Persero) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Produk Sentral
2. Produk Transmisi
3. Produk Terminal (*Customer Premises Equipment/CPE*)

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain:

- Bidang sentral dengan Siemens AG.
- Bidang transmisi dengan *Japan Radio Company*.
- Bidang CPE dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, dan Tatung TEL.

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan PT INTI (Persero) adalah produk sentral.

Pada era ini, PT INTI (Persero) memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu:

- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada periode ini, tepatnya pada 1988, berdasarkan KEPMEN 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) masuk ke dalam Industri Strategis. Bisnis terbesar pada periode ini adalah Sentral Telepon Digital Indonesia. Pada periode ini pula PT INTI (Persero) berhasil mengembangkan produk SBK 3 Kanal dan Sentral Telepon Digital Indonesia Kecil (STDI-K).

Although in 1990 the government opened the competition by permitting two other digital central supplier, namely AT&T and NEC. However, until 1998 the PT INTI (Persero) still remained the market leader in terms of market share of telecommunications infrastructure, amounting to 60% of the total national market.

By utilizing this same plant facility, the scope of PT INTI (Persero) products complemented by Pulse Code Modulation (PCM), Private Automatic Branch Exchange (PABX), and INTI 111 table telephones, which are all licensed product from Siemens AG.

Besides, PT INTI (Persero) also manufactured products of its own development such as Small Earth Stations, High Frequency (HF) Radio, Digital Microwave Radio (DMR), Telephone System Moving Vehicle, Coin Public Telephone Box, and Self Service Public Telephone.

Since 1989, PT INTI (Persero) products were grouped into three, namely:

- 1. Switching Products*
- 2. Transmission Products*
- 3. Terminal products (Customer Premises Equipment/CPE).*

Technology collaboration undertaken in this period include:

- Switching sector with Siemens AG.*
- Transmission sector with the Japan Radio Company.*
- CPE sector with Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, and Tatung TEL.*

Among the three product categories, the biggest contribution in PT INTI (Persero) sales as given by the switching products.

In this era, PT INTI (Persero) had significant reputation and achievements, namely:

- Being a pioneer in the digitization of telecommunication systems and networks in Indonesia.*
- Together with Telkom successfully completed telephone automation projects in almost all the district and sub-district capital throughout Indonesia.*

In this period, precisely in 1988, based on KEPMEN 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) was included into the Strategic Industries. The biggest business in this period was the Digital Telephone Central Indonesia. At this period PT INTI (Persero) also successfully developed 3-Channels Small Earth Station and Small Digital Telephone Central products.



Profil Perusahaan

Company Profile

1998 - 2002

Dengan berakhirnya *Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA)* dengan Siemens AG, PT INTI (Persero) mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi engineering, terutama sebagai sistem integrator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur telekomunikasi seluler. Tidak kurang dari 2.000 *base transceiver station (BTS)* telah dibangun oleh PT INTI (Persero) di seluruh penjuru Indonesia.

Pada periode ini aktivitas manufaktur dipersiapkan untuk dipindahkan kepada anak perusahaan PT INTI (Persero). Pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2002, dilakukan pembubaran PT Bahana Pakarya Industri Strategis dan PT INTI (Persero) kembali dibina oleh Kementerian Negara Penguasaan BUMN. Bisnis terbesar pada periode ini adalah pembangunan jaringan seluler.

By the end of Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) with Siemens AG, PT INTI (Persero) established its position as engineering solution provider, especially as system integrator for telecommunications infrastructure development in Indonesia, including mobile telecommunications infrastructure development. Not less than 2,000 base transceiver station (BTS) have been built by PT INTI (Persero) throughout Indonesia.

In this period, manufacturing activity was prepared to be transferred to PT INTI (Persero) subsidiary. In 2002, based on Government Regulation No. 52 of 2002, PT Bahana Pakarya Industri Strategis as strategic industry holding company was dissolved and PT INTI (Persero) was developed and nurtured again by the Ministry of SOE Empowerment. The largest business in this period was the development of cellular networks.

2003 - 2008

Pada era ini kerja sama teknologi tidak lagi terkonsentrasi pada Siemens, tetapi dilakukan secara berimbang (*multiprincipal*) dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh PT INTI (Persero), tetapi secara *spin-off* dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan, seperti:

- Bidang *Customer Premises Equipment (CPE)*, dibentuk anak perusahaan bernama PT Inti Pisma International yang bekerja sama dengan JItech International, bertempat di Cileungsi Bogor.
- Bidang mekanik dan plastik, dibentuk usaha patungan dengan PT PINDAD bernama PT Inti Pindad Mitra Sejati, berkedudukan di Bandung, yang resmi berdiri di Juli 2004.
- Bidang-bidang *switching*, akses dan transmisi, dirintis kerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional seperti SAGEM, Motorola, Alcatel, Ericsson, dan Samsung.

Bisnis terbesar pada periode ini adalah *Code Division Multiple Access (CDMA)*, *Regional Metro Junction (RMJ)*, jaringan akses serat optik, serta *Out Site Plant (OSP)*, *digital microwave link*, pembangunan tower nasional, CME dan *power supply*, serta *indoor coverage*.

In this era, technology cooperation is no longer concentrated on Siemens, but done in balanced (multiprincipal) with several multinational companies from Europe and Asia. Manufacturing activity was no longer handled by PT INTI (Persero), but through spin-off by setting up subsidiaries and joint ventures, such as:

- *Customer Premises Equipment (CPE) sector, formed a subsidiary named PT Inti Pisma Internasional with JItech International, located in Cileungsi, Bogor.*
- *Mechanics and plastic sector, formed a joint venture with PT Pindad named PT INTI Pindad Mitra Sejati, based in Bandung, which was officially established in July 2004.*
- *Switching, access and transmission sector, pioneered cooperations with some multinational companies such as SAGEM, Motorola, Alcatel, Ericsson, and Samsung.*

The largest business in this period were CDMA, Regional Metro Junction (RMJ) and fiber optic access network as well as Out Site Plant (OSP), digital microwave link, tower construction nationwide, CME and power supply, and indoor coverage.

2009 - 2013

PT INTI (Persero) menghidupkan kembali bisnis manufaktur untuk menopang keberlanjutan Perseroan. Pada periode ini, Perseroan melahirkan produk-produk genuine seperti Smart PBX, General Purpose Agent dengan produk-produk turunannya INTI Power Utilities Monitoring and Control (IPUMC), Flood Forecasting and Warning System (FFWS), I-Perisalah, KWh Meter, dan Multi Service Access Node (MSAN).

Sebagai sistem integrator, PT INTI (Persero) memfokuskan diri pada segmen pasar Telco, Celco, dan *Private Enterprise*. Untuk pasar Telco, PT INTI (Persero) menginisiasi ide modernisasi jaringan akses tembaga milik PT Telkom di seluruh Indonesia menjadi jaringan akses serat optik dengan menggunakan teknologi MSAN, *Gigabit Capable Passive Optical Network* (GPON), dan *Fiber to The Home* (FTTH) dengan pola *Trade in Trade off* atau lebih dikenal dengan nama proyek TITO. Proyek TITO ini telah memodernisasi jaringan akses lebih dari 400 ribu sambungan di delapan Sentral Telepon Otomat (STO) pada akhir tahun 2012.

Di sektor Celco, PT INTI (Persero) menginisiasi proyek Rural BTS untuk PT Indosat, membangun *Out Site Plant* (OSP) *fiber optic backbone* untuk BTS milik PT Telkomsel dan PT XL Axiata, serta menyediakan antenna untuk operator selular tersebut. Untuk pelanggan korporasi, PT INTI (Persero) menyediakan layanan pengelolaan perangkat teknologi informasi bagi PT Telkom dengan pola seat management yang berupa pengelolaan sekitar 35.000 seat (meliputi komputer, laptop, printer, maupun proyektor) dari mulai instalasi, *application management*, hingga *dismantling*. Selain itu, PT INTI (Persero) memiliki solusi *Smart Clinic* yang diperuntukkan bagi pengelola layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik.

PT INTI (Persero) revitalized its manufacturing business to accommodate the Company's sustainability. PT INTI (Persero) delivered genuine products such as Smart PBX, General Purpose Agent and its derivatives INTI Power Utilities Monitoring and Control (IPUMC), Flood Forecasting and Warning System (FFWS), I-Perisalah, KWh Meter, dan Multi Service Access Node (MSAN).

As system integrator, PT INTI (Persero) was focusing on market segments TELCO, CELCO, and Private Enterprise. For TELCO market, PT INTI (Persero) initiated the idea of modernising copper access network owned by PT Telkom, Tbk to become fiber optic access network using MSAN, Gigabit Capable Passive Optical Network (GPON), and Fiber to The Home (FTTH) technology and with Trade in Trade off business model, better known as TITO project. This TITO project has modernized access network by over 400 thousand connections at eight Automatic Telephone Central at the end of 2012.

In Celco sector, PT INTI (Persero) initiated Rural BTS project for PT Indosat, built Out Site Plant (OSP) fiber optic backbone for BTS of PT Telkomsel and PT XL Axiata, as well as providing antennas for the cellular operators. For private enterprise customers, PT INTI (Persero) provided information technology device managed service for PT Telkom with seat management model around 35,000 seats (including computers, laptops, printers, and projectors), from installation, application management, to dismantling. In addition, PT INTI (Persero) has a Smart Clinic solution that is intended for health service managers such as hospitals and clinics.

2014 - 2019

PT INTI (Persero) memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi *engineering*, sistem integrator dan pengembangan produk-produk genuine. Tidak hanya sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PT INTI (Persero) memperluas portofolionya ke sektor Energi, *Digital Service* dan *Internet of Things*, serta merintis bisnis baru dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, dengan tergabungnya Perseroan dalam *Cluster National Defence and Hightech Industry* (NDHI) hingga 2019.

Pengembangan produk-produk genuine PT INTI (Persero) lainnya masih berlanjut, seperti Converter Kit untuk bahan bakar minyak (BBM) ke Gas, Smart Meter untuk Gas dan Listrik, *Mobile Point of Sales*, Pembaca KTP Elektronik, dan sebagainya. PT INTI (Persero) juga bekerja sama dalam pengembangan dan produksi untuk sistem transportasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk produk *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B), serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

PT INTI (Persero) is stabilizing its steps to enter the business of engineering solutions, system integrators and development of genuine products. Not only in Information and Communication Technology (ICT) sector, PT INTI (Persero) is expanding its portfolio to Energy, Digital Service and Internet of Things, as well as pioneering new business in Defense sector by joining National Defence and Hightech Industry (NDHI) Cluster until 2019.

Development of PT INTI (Persero) genuine products continues, as Conversion Kit for Fuel to Gas, Smart Meters for gas and electricity, Mobile Point of Sales, Electronic ID Card Reader, etc. PT INTI (Persero) also works in cooperation for development and production of transport system with Agency for Assessment and Application of Technology for Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B), as well as with Ministry of Public Works and People Housing for Early Traffic Information System (SINDILA) and Structure



Profil Perusahaan

Company Profile

Perumahan Rakyat untuk Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA) dan *Structure Health Management System* (SIMBAGAS).

Dalam sektor Energi, PT INTI (Persero) menyediakan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada periode ini, PT INTI (Persero) juga merevitalisasi bisnis manufakturnya untuk mengakomodasi keberlanjutan perusahaan dan menstabilkan untuk memasuki bisnis solusi teknik, integrator sistem, pengembangan produk asli, dan manajemen kursi. Tidak hanya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PT INTI (Persero) memperluas portofolionya menjadi *Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service*, dan *System Integrator*.

Health Management System (SIMBAGAS).

In Energy sector, PT INTI (Persero) provides Solar Power Plants for PT PLN and Ministry of Energy and Mineral Resources.

In this period, PT INTI (Persero) also revitalized its manufacturing business to accommodate the company's sustainability and stabilize to enter the business of engineering solutions, system integrators, development of genuine products, and seat management. Not only in Information and Communication Technology (ICT) sector, PT INTI (Persero) is expanding its portfolio to Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, and System Integrator.

2020-2025

Akhir tahun 2020, Perusahaan melakukan redefinisi Visi dan Misi Perusahaan dalam rangka perbaikan kinerja secara holistik. Tahun 2020 Perusahaan melakukan rolling RJPP 2020 - 2024 dengan jargon *TURN AROUND* dengan target pada tahun 2024 Perusahaan dapat menjadi Perusahaan yang dikategorikan menjadi Perusahaan yang sehat dan berkinerja baik.

Hal ini dimulai dengan memfokuskan kembali bisnis perusahaan pada portfolio MSDM (Manufacture & Assembly - System Integrator - Digital Service - Managed Service) dan segmen bisnis TGED (Telco - Government - Enterprise - Defense). Perkembangan bisnis secara porsi penjualan maupun pengembangan produk akan mengacu pada fokus portfolio dan segmen bisnis.

PT INTI (Persero) memperkuat posisinya untuk fokus pada lini bisnis di bidang Industri dan Perakitan, Layanan yang Dikelola, Layanan Digital, dan Integrator Sistem. Untuk mendukung bisnisnya, PT INTI (Persero) juga mengoperasikan INTI Smart Industrial Park, fasilitas produksi seluas delapan hektar di Jalan Moch Toha No 225 yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan elektronik.

At the end of 2020, the Company redefined the Company's Vision and Mission in order to improve performance holistically. In 2020 the Company will roll out RJPP 2020 – 2024 with the jargon TURN AROUND with a target in 2024 the Company can become a company that is categorized as a healthy and well-performing company.

This started by refocusing the company's business on the MSDM portfolio (Manufacture & Assembly – System Integrator - Digital Service - Managed Service) and the TGED (Telco – Government – Enterprise – Defense) business segment. Business development in terms of sales and product development will refer to the focus of the portfolio and business segments.

PT INTI (Persero) strengthens its position to focus on business lines in the fields of Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, and System Integrator. To support its business, PT INTI (Persero) also operates INTI Smart Industrial Park, an eight hectares production facility on Jalan Moch Toha No 225 which produces telecommunications and electronic devices.

Kegiatan dan Bidang Usaha

Activities and Fields of Business

Tujuan Pendirian

Purpose of Establishment

Dalam Akta Pendirian Perusahaan dinyatakan bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan atau energi, pertahanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

In the Deed of Establishment it is stated that the purpose of establishing the company is to implement and support government policies and programs in the fields of economics and national development, particularly in the telecommunications industry, electronics, information technology, electrical or energy, defense and optimal use of company resources to make a profit by producing goods or services of high quality and strong competitiveness, in order to increase the company value by applying the principles of limited liability companies.

Profil Perusahaan

Company Profile

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT INTI (Persero) melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

To achieve these aims and objectives, PT INTI (Persero) carries out the following efforts:



Produksi alat atau perangkat bidang telekomunikasi, elektronika, informatika, termasuk piranti lunak yang berkaitan, juga untuk diaplikasikan dalam bidang energi, perhubungan, infrastruktur, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.



Perdagangan alat atau perangkat sebagaimana disebutkan di atas baik hasil produk sendiri maupun hasil produk pihak lain, juga melakukan pemasokan di bidang telematika, perhubungan, energi dan kelistrikan, serta melakukan perdagangan umum termasuk ekspor impor, distribusi, dan keagenan.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.



Penyediaan jasa yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan di atas, termasuk jasa desain dan rekayasa, perakitan, instalasi dan tes, pemborongan, konstruksi, pengangkutan, pemeliharaan, purnajual, *managed service*, penelitian dan pengembangan, konsultasi, manajemen proyek, pelatihan, dan sebagainya.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.

Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PT INTI (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha pendukung antara lain dalam bentuk kerja sama dan/atau penyewaan aset, lahan, gedung, gudang, ruang perkantoran, bengkel dan properti lainnya, serta kerja sama dan/atau penyewaan mesin-mesin, alat ukur, dan peralatan produksi lainnya.

In addition, in accordance with the Articles of Association, PT INTI (Persero) may conduct supporting business activities, among others in the form of cooperation and/or leasing of assets, land, buildings, warehouses, office spaces, workshops and other property, as well as cooperation and/or rental of machines, measuring instruments, and other production equipment.

PT INTI (Persero) telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam manufaktur dan penyelesaian proyek-proyek di bidang industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

PT INTI (Persero) has a long track record in manufacturing and completing projects in the telecommunications and information technology industries.

Layanan PT INTI (Persero) cukup luas mulai dari Instalasi Kabel Rumah (IKR), pengerjaan dan pemeliharaan Outside Plant (OSP), Spare Part Management System (SPMS), Bantuan Teknis, Site Acquisition, Repair & Maintenance, hingga pekerjaan konektivitas pita lebar dan digitalisasi penyiaran.

PT INTI (Persero) services range from Home Wiring Installation or New Installation, implementation and maintenance of Outside Plant (OSP), Spare Part Management System (SPMS), Technical Assistance, Site Acquisition, Repair & Maintenance broadband connectivity and broadcasting digitalization.

Sebagai penyedia perangkat cerdas untuk sektor telekomunikasi, PT INTI (Persero) menyediakan perangkat-perangkat jaringan serat optik (*Fiber to the Home* atau FTTH) seperti Optical Network Terminal

As a provider of smart device for telecommunication sector, PT INTI (Persero) provides network devices for Fiber to The Home (FTTH) such as the Optical Network Terminal (ONT), the Set Top Box (STB), as well as

(ONT), *Set Top Box* (STB), juga *Home Long Term Evolution* (LTE), dan Antenna untuk jaringan seluler.

Mendukung tantangan dunia atas perlunya alternatif penyediaan energi, sejak tahun 2011, PT INTI (Persero) telah berkontribusi sebagai *System Integrator* atau *Engineering Procurement Contractor* pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di berbagai pelosok Indonesia.

Sejak tahun 2017, PT INTI (Persero) pun mengembangkan produk-produk dengan perangkat cerdas untuk mendukung penghematan energi yaitu INTI GAS (Meter Gas Prabayar), *Converter Kit*, dan *Energy Limiter*.

Teknologi finansial adalah bisnis yang menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Dari berbagai subsektor teknologi finansial, pembayaran digital masih mendominasi transaksi teknologi finansial di dunia. PT INTI (Persero) menyediakan perangkat INTIPay yang merupakan *Mobile Point of Sales* (MPOS) dengan kemampuan membaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perangkat ini mendukung kemudahan transaksi finansial digital yang dilengkapi dengan verifikasi data pelaku transaksi, sehingga mendukung berbagai program pemerintah seperti transaksi dalam program subsidi komoditas tertentu seperti bahan bakar minyak (BBM), serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif.

Infrastruktur dan Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas yang berperan penting dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan. Menurut *World Economic Forum* (WEF), *Global Competitiveness Index* (CGI) Indonesia masih berada pada peringkat 34 dari 144 negara di dunia, di mana salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur.

Mengingat pentingnya infrastruktur dan transportasi bagi negara, PT INTI (Persero) memberikan kontribusi melalui salah satu lini bisnis yang memiliki produk unggulan seperti:

1. Radar Cuaca, yaitu radar untuk mencari curah hujan, menghitung gerakannya dan memperkirakan jenisnya.
2. Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA).
3. SIMBAGAS, yaitu perangkat untuk memonitor kesehatan struktur jembatan.
4. *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast* (ADS-B).

Kontribusi PT INTI (Persero) difokuskan pada bidang teknologi informasi, komunikasi dan elektronika, seperti alat komunikasi, aplikasi, *integrated communication system*, *encryption algorithm and system*, *cyber defense*, anti-jammer, dan radar.

PT INTI (Persero) menyediakan layanan dan perangkat seperti *Defense Information Technology System*, *Seat Management*, INTIPay, *Smart Health Management System* (SHMS) dan Sistem Informasi Dini Lalu Lintas "SINDILA", *Smart City*, *Building Energy Management System* (BEMS)

Home Long Term Evolution (LTE), and Antenna for cellular networks.

Supporting the world challenge for alternative energy resources, since 2011, PT INTI (Persero) has contributed as a System Integrator or Engineering Procurement Contractor of Solar Panel Plant and Micro Hydro Power Plant development in remote areas all over Indonesia.

Since 2017, PT INTI (Persero) also developed products with smart devices that promote energy savings such as INTI GAS (Prepaid Gas Meter), Converter Kit, and Energy Limiter.

Financial technology is a business that provides financial services by utilizing modern software and technology. Of the various subsectors of financial technology, digital payments still dominate the financial technology transactions in the world. PT INTI (Persero) provides INTIPay device which is Mobile Point of Sales (MPOS) with ability to read Electronic Identity Card. It supports the ease of digital financial transactions with data verification of transaction actor, to be able to support government programs such as transactions in certain commodity subsidy programs such as fuel, as well as Officeless Finance Services for Financial Inclusion.

Infrastructure and Transportation is one of the chain of goods distribution network and mobility that plays an important role in encouraging and supporting all aspects of life. According to the World Economic Forum (WEF), Indonesia's Global Competitiveness Index (CGI) is still ranked 34 out of 144 countries in the world, where one of the reasons for Indonesia's lack of competitiveness is the quality of infrastructure.

Given the importance of infrastructure and transportation for the country, PT INTI (Persero) contributes through one business line that has excellent products such as:

1. Weather Radar, a radar to find rainfall, calculate movement and estimate its type.
2. Traffic Information System (SINDILA).
3. SIMBAGAS, a device to monitor the health of the bridge structure.
4. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B).

PT INTI (Persero)'s contribution is focused on information technology, communication and electronics, such as communication tools, applications, integrated communication systems, encryption algorithms and systems, cyber defense, anti-jammer, and radar.

PT INTI (Persero) provides services and devices such as Defense IT System, Seat Management, INTI PAY, Smart Health Management System (SHMS) and Traffic Information System "SINDILA", Smart City, Building Energy Management System (BEMS) and Smart Light, i-Perisalah, BAP Electronics,



Profil Perusahaan

Company Profile

dan Smart Light, i-Perisalah, BAP Elektronik, dan sebagainya.

Untuk mendukung perwujudan visi Perseroan “Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia”, maka revitalisasi manufaktur menjadi salah satu strategi utama perusahaan yang dilakukan mulai tahun 2017. Revitalisasi Manufaktur merupakan revitalisasi fasilitas dan aktivitas produksi dari mulai desain produk, pengadaan material, inserting komponen sampai final assembly, dan pengetesan produk.

Fasilitas manufaktur yang akan kembali dibangkitkan oleh PT INTI (Persero) akan menggunakan aset berupa bangunan dan tanah milik perusahaan yang berlokasi di Jalan Moch. Toha Nomor 225, Dayeuhkolot, Bandung. Area tersebut sebelumnya merupakan fasilitas manufaktur yang beroperasi pada akhir dekade 1980-an sampai dengan awal dekade 2000-an.

Saat ini, aset tersebut dioptimalisasi dengan cara disewakan kepada tenant, dan dengan dilakukannya revitalisasi terhadap fasilitas manufaktur tersebut, Perseroan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal atas aset tetap tersebut. Dengan kembali beroperasinya fasilitas manufaktur sesuai dengan standar industri pada saat ini, diharapkan Perseroan akan mampu mewujudkan visinya menjadi produsen *smart products* terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025, pada tahun 2021 merupakan periode untuk semakin memperkuat terwujudnya visi perusahaan yaitu “Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia”.

Tahun 2020 telah dilalui Perseroan dengan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas fundamental Perseroan dimulai dari melakukan reprofiling utang Perseroan kepada perbankan dan mitra, memperbaiki pencatatan seluruh transaksi keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan upaya-upaya efisiensi. Upaya-upaya ini terus dilanjutkan di tahun 2021 untuk mencapai filosofi hadirnya INTI untuk Indonesia dan mencapai visi Perseroan untuk menjadi produsen *smart products* terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia.

Untuk itu, Annual Message tahun 2021 adalah “Meraih Peluang dan Mengatasi Tantangan untuk mencapai INTI Bangkit” yang bermakna bahwa dengan meraih peluang serta mengatasi tantangan yang dilakukan pada tahun ini, diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mencapai masa depan PT INTI (Persero) yang lebih baik sesuai dengan Horizon-1 dalam rencana lima tahunan Perseroan, menjadi INTI Bangkit. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 ini, Perseroan menargetkan penjualan sebesar

and so on.

To support the realization of the Company’s vision as the “To be the Best Smart Product Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia”, the revitalization of manufacturing has become one of the company’s main strategies starting from 2017. Revitalization of Manufacturing is a revitalization of production activities and facilities from product design, material procurement, component inserting to final assembly, and product testing.

Manufacturing facilities to be re-generated by PT INTI (Persero) will use the assets in the form of buildings and land owned by the company located at Moch. Toha Street Number 225, Dayeuhkolot, Bandung. The area was previously a manufacturing facility that operated in the late 1980s until the early decades of the 2000s.

Currently, the assets are optimized by leasing to tenants. And with the revitalization of the manufacturing facility, the Company will obtain maximum results on the fixed assets. With the re-operation of manufacturing facilities in accordance with current industry standards, it is hoped that the Company will be able to realize its vision of becoming the best smart product manufacturer in the telecommunications sector in Indonesia.

As stated in the Company Long Term Plan 2021-2025, 2021 is the year to further strengthen the realization of the company’s vision of “To Be the Best Smart Products Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia”.

The year 2020 has been passed by the Company by taking strategic steps to improve the fundamental quality of the Company starting from reprofiling the Company’s debt to banks and partners, improving the recording of all financial transactions using accountable accounting principles, and making efficiency efforts. These efforts will be continued in 2021 to achieve the philosophy of INTI’s presence for Indonesia and to achieve the Company’s vision to become the best smart product producer in the telecommunications sector in Indonesia.

For this reason, the 2021 Annual Message is “Seizing Opportunities and Overcoming Challenges to Achieve INTI Bangkit” which means that by seizing opportunities and overcoming the challenges carried out this year, it is hoped that this can be a strong basis for achieving a prosperous future for PT INTI (Persero) better in line with Horizon-1 in the Company’s five-year plan, becoming INTI Bangkit. In the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) 2021, the Company targets sales of Rp706.7 billion, taking into account various aspects, especially

Rp706,7 miliar, dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya pengaruh pandemi Covid-19 termasuk kemampuan penyelesaian proyek dan pendanaan.

Pada tahun 2021 Perseroan mencanangkan pencapaian kinerja dengan menetapkan sektor Telco, Enterprise, Government, dan Defense, sebagai kastemer utama Perseroan.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana jangka panjang perusahaan, PT INTI (Persero) menempuh berbagai upaya dalam mengembangkan bisnisnya. Dari bisnis eksisting, ada beberapa yang tetap dipertahankan (sustaining). Sementara itu, bisnis eksisting yang potensial akan dijalankan dalam skala yang lebih besar (scaling) dengan cara memperdalam penetrasi pada pasar eksisting, maupun mengembangkan pasar baru (market development). Perseroan pun terus melakukan pengembangan usaha maupun produk untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan trend pasar agar dapat menangkap potensi pasar baru (scoping).

Secara struktur organisasi, untuk dapat mencapai rencana jangka panjang tersebut, dilakukan pemisahan fungsi yaitu penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar serta pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha. Fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar merupakan fungsi lini pemasaran. Sementara itu, fungsi pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha merupakan fungsi lini pengembangan bisnis.

the impact of the Covid-19 pandemic, including the ability to complete projects and funding.

In 2021 the Company plans to achieve performance by establishing the Telco, Enterprise, Government and Defense sector, as the Company's main customers.

In order to implement the company's long-term plan, PT INTI (Persero) takes various efforts to develop its business. Of the existing businesses, there are some that are maintained (sustaining). Meanwhile, potential existing businesses will be carried out on a larger scale (scaling) by deepening penetration in the existing market, as well as developing new markets (market development). The Company also continues to develop business and products to keep abreast of technological developments and market trends in order to capture new market potential (scoping).

In terms of organizational structure, in order to achieve the long-term plan, the functions are separated, namely the function of penetrating the existing market and developing the market as well as developing a new portfolio and diversifying business. The existing market penetration and market development functions are functions of the marketing line. Meanwhile, the functions of developing new portfolios and business diversification are functions of business development lines.

Corporate Strategy

Directional Strategy	#INTIBangkit	#INTITumbuh	#INTIBangga
	2020 - 2022	2023 - 2024	2025 - Dst
Business Strategy	Market Penetration Product Development	Market Deelopment Product Innovation	Business Technology



Struktur Organisasi

Organizational Structure

Untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi serta untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal Perseroan, diperlukan perubahan yang bersifat strategis guna mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan jangka panjang Perseroan.

Struktur Organisasi Perseroan merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-56/MBU/2014 tertanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya guna mempersiapkan organisasi agar lebih lincah, maka melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KN-037/2020 tertanggal 30 Desember 2020, telah ditetapkan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang lebih *customer centric* yaitu sebagai berikut:

To face changes and increasingly fierce competition in the telecommunications industry as well as to adapt to the Company's internal and external environment, strategic changes are needed to support the achievement of the Company's long-term vision, mission and goals.

The Company's organizational structure refers to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number SK-56/MBU/2014 dated March 18, 2014 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Furthermore, in order to prepare the organization to be more agile, through the Decree of the Board of Directors Number KN-037/2020 dated December 30, 2020, a change in the organizational structure has been set to become a more customer centric organization, as follows:



Profil Perusahaan

Company Profile

Selanjutnya, merujuk kepada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor SK-299/MBU/09/2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, tertanggal 09 September 2021 yang berisi sebagai berikut :

Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia :

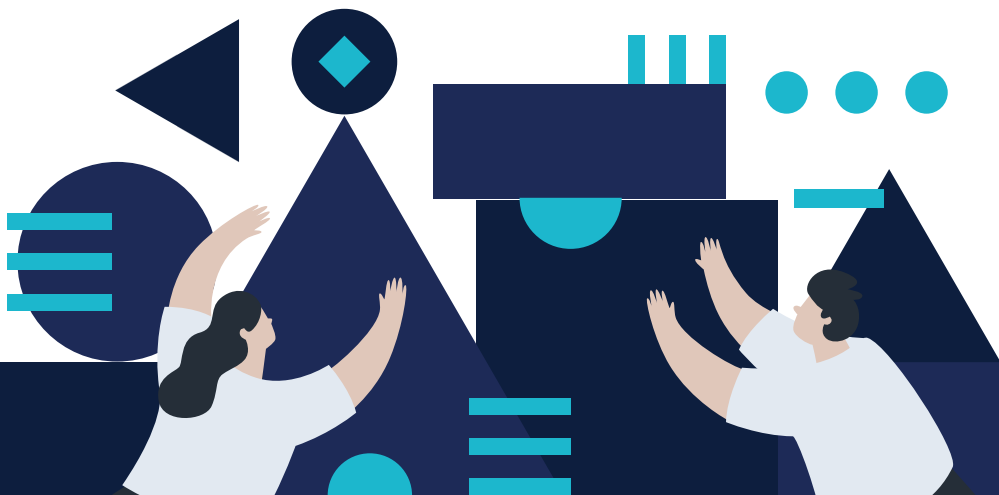
Furthermore, referring to the decision of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Number SK-299/MBU/09/2021 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dated September 09, 2021 which contains the following:

Change the nomenclature of the position of members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia:

Semula Originally	Menjadi Be
Direktur Keuangan Director of Finance	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management

Mengalihkan penugasan Tri Hartono Rianto yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK-161/MBU/07/2019 tertanggal 24 Juli 2019 semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut. Sehingga tertanggal 09 September 2021 struktur organisasi PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

Transferring the assignment of Tri Hartono Rianto who was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-161/MBU/07/2019 dated July 24, 2019 originally as Director of Finance to become Director of Finance and Risk Management of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia with a term of office continuing the rest term of office as stipulated in the Decree of the Minister of the State Legal Entity. So as of September 9, 2021, the organizational structure of PT INTI (Persero) is as follows:







Visi, Misi & Strategi

Company Vision, Mission and Strategy

Sebagai landasan dan tujuan utama PT INTI (Persero) untuk pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan di tahun-tahun berikutnya, Visi dan Misi Perseroan telah mengalami aktualisasi pada kuartal IV tahun 2019.

Visi dan Misi baru ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris.

As the foundation and main goal of PT INTI (Persero) for sustainable performance growth in the following years, the Company's Vision and Mission were actualized in the fourth quarter of 2019.

This new vision and mission has been approved by the Board of Commissioners at the Joint Meeting of the Board of Directors and Commissioners.

Visi Perusahaan *Company Vision*

Menjadi **Produsen *Smart Product*** Terbaik di Sektor
Sektor Telekomunikasi di Indonesia

To be the Best Smart Product Manufacturer in the Telecommunication Sector in Indonesia

Visi Perusahaan

Company Vision

Perwujudan Visi Perseroan sebagaimana dituangkan di atas akan dicapai melalui upaya-upaya yang terkandung dalam Misi Perseroan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan.
2. Menciptakan solusi produk-produk yang smart dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan efektif dan efisien, serta memaksimalkan kandungan TKDN.
3. Meningkatkan *business operational excellence* perusahaan melalui pengembangan kompetensi *Human Capital*.
4. Menjadi mitra pemerintah dan sinergi sesama BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

The manifestation of the Company's Vision as outlined above will be achieved through the means contained in the Company's Mission as follows:

1. *Increase stakeholder values.*
2. *Creating smart and innovative product solutions that suit market needs and are able to solve customer problems effectively and efficiently, and maximize domestic content level.*
3. *Improve the company's business operational excellence through developing Human Capital competencies.*
4. *Become a government partner and synergize with fellow SOEs in encouraging economic growth.*

Tujuan Jangka Panjang Perusahaan

Long-Term Company Objectives

Tujuan perusahaan jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, ditinjau dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal maupun organisasi dan SDM.
2. Menjadi perusahaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Memberikan nilai yang tinggi untuk produk dan jasa kepada pelanggan.
4. Memberikan nilai kembali yang memadai atas saham.
5. Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang industri telekomunikasi, pertahanan, elektronika dan informatika dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.

Long-term company objectives which elaborate the vision and mission of the company are as follows:

1. *To become a company with good performance, viewed from financial, customer, internal process, organizational and human resource perspectives.*
2. *To become a company which is able to improve the welfare of employees.*
3. *To deliver high values of products and services to the customers.*
4. *To provide adequate return value on shares.*
5. *To implement and support government policies and programs in the fields of economics and national development in general, particularly in the telecommunications industry, defense, electronics, information technology, electrical or energy by applying the principles of limited liability companies.*



Profil Perusahaan

Company Profile

Visi Perusahaan

Company Vision

Strategi Perseroan dalam jangka panjang guna mencapai target kinerja yang berkelanjutan dijabarkan dalam Rolling Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025 dengan rumusan sebagai berikut:

The long-term strategy of the Company in order to achieve sustainable performance targets is outlined in the Company's Long Term Plan 2020-2024 with the following formula:



Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Values

PT INTI (Persero) menetapkan tata nilai sebagai panduan perilaku dalam bekerja bagi seluruh karyawan Perseroan. Tata nilai tersebut merupakan salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan Perseroan, sekaligus identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tata nilai yang dirumuskan melalui akronim INTI itu telah diimplementasikan oleh Perseroan sejak Desember 2009, yang tertuang dalam buku Pedoman Perilaku Budaya Perusahaan HARMONY. Komponen nilai-nilai utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Konsisten dalam tindakan maupun ucapan dengan berdasarkan pada norma-norma, nilai moral, etika profesi dan bisnis yang berlaku, selalu jujur dan terbuka.

2. Network

Membangun, memelihara dan memanfaatkan jaringan kerja yang luas dan mendayagunakan kontak bisnis yang luas demi kepentingan organisasi.

3. Trust

Kemampuan untuk bisa mempercayai orang lain termasuk kepercayaan pada prosedur dan aturan main.

4. Teamwork

Bekerja dengan kooperatif dan menempatkan diri dan kelompok secara sinergi sebagai bagian perusahaan.

5. Inovatif

Menemukan atau menciptakan ide, pemikiran, dan cara baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Tata nilai INTI ini mengalami perubahan setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan Surat Edaran No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN pada 1 Juli 2020.

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai panduan agar setiap BUMN dapat mengimplementasi dan menginternalisasi Core Values tersebut secara konsekuen dan berkelanjutan sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya perusahaan (corporate culture) yang menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.

PT INTI (Persero) establishes values as a behavior guide in working for all employees of the Company. These values are one of the aspects that support the successful achievement of the Company's goals, as well as identity and work culture adhesive that supports continuous performance improvement.

The values formulated through the acronym INTI have been implemented by the Company since December 2009, which are contained in the HARMONY Code of Conduct for Corporate Culture. The components of the main values are as follows:

1. Integrity

Consistent in action and speech based on the norms, moral values, professional ethics and applicable business, always honest and open.

2. Network

Build, maintain and utilize the extensive network and business contacts empowerment in the interests of the organization.

3. Trust

The ability to be able to trust others, including reliance on the procedures and rules of action.

4. Teamwork

Working with cooperative where put yourself and the group in synergy as part of the company.

5. Innovative

Finding or creating ideas, new ways of thinking, and better than ever.

This INTI values has changed after the Ministry of BUMN issued Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of SOEs Human Resources on July 1, 2020.

This Circular Letter is issued as a guide so that each SOE can implement and internalize these Core Values in a consistent and sustainable manner so as to give birth to daily behavior and form a corporate culture which forms the basis for shaping the character of human resources in the SOEs, Subsidiaries, and Consolidated Affiliate Companies.



Profil Perusahaan

Company Profile

Oleh karena itu, mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN itu, PT INTI (Persero) pun menerbitkan Keputusan Direksi Nomor KN.029/2020 tentang Budaya Perusahaan dengan Core Values AKHLAK tertanggal 29 September 2020. Keputusan Direksi ini merupakan komitmen Perseroan untuk menyelaraskan budaya perusahaan dengan Core Values AKHLAK.

Dengan demikian, sejak 29 September 2020, tata nilai Perseroan yang semula mengimplementasikan "INTI" berubah menjadi AKHLAK, dengan uraian sebagai berikut:

Therefore, referring to the Circular Letter of the Ministry of BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 No. SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of SOE Human Resources, PT INTI (Persero) also issued Directors Decree Number KN.029/2020 concerning Corporate Culture with Core Values AKHLAK dated September 29, 2020. This Board of Directors' decision is the Company's commitment to aligning the corporate culture with AKHLAK's Core Values.

Thus, since 29 September 2020, the Company's values that originally implemented "INTI" have changed to AKHLAK, with the following description:

AKHLAK

Kompetensi	Loyal
Harmonis	Adaptif
Amanah	Kolaborasi

Dengan demikian, sejak 29 September 2020, tata nilai Perseroan yang semula mengimplementasikan "INTI" berubah menjadi AKHLAK, dengan uraian sebagai berikut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku :

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompetensi

Terus belajar dan meningkatkan kapabilitas.

Panduan Perilaku :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan Perilaku :

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku :

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

6. Kolaborasi

Senantiasa membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku :

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Thus, since 29 September 2020, the Company's values that originally implemented "INTI" have changed to AKHLAK, with the following description:

1. Amanah (Trust)

Uphold the trust given.

Behavioral Guidelines :

- *Keep promises and commitments.*
- *Responsible for the tasks, decisions, and actions taken.*
- *Stick to moral and ethical values.*

2. Kompeten (Competence)

Continue to learn and improve capabilities.

Behavioral Guidelines :

- *Increase self-competence to respond to ever-changing challenges.*
- *Help others learn.*
- *Complete tasks of the highest quality.*

3. Harmoni (Harmonious)

Caring for each other and respecting differences.

Behavioral Guidelines :

- *Respect everyone regardless of their background.*
- *Helpful to others.*
- *Build a conducive work environment.*

4. Loyal

Dedicated to prioritizing the interests of the nation and state.

Behavioral Guidelines :

- *Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State.*
- *Willing to sacrifice to achieve a greater goal.*
- *Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.*

5. Adaptif (Adaptive)

Continue to innovate and be enthusiastic in facing change.

Behavioral Guidelines :

- *Quickly adjust to being better.*
- *Continuously making improvements by following technological developments.*
- *Be proactive.*

6. Kolaboratif (Collaboration)

Always build synergistic cooperation.

Behavioral Guidelines :

- *Provide opportunities for various parties to contribute.*
- *Be open to working together to generate added values.*
- *Mobilizing the use of various resources for common goals.*



Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai AKHLAK

Socialization and Internalization of AKHLAK Values

Sosialisasi dan internalisasi tata nilai AKHLAK di lingkungan PT INTI (Persero) pun dilakukan secara berkesinambungan sejak Perseroan menetapkan AKHLAK sebagai tata nilai baru. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan melalui kanal media sosial, portal perusahaan, website, *video conference*, konvensi inovasi, *sharing session*, pemasangan poster, video sosialisasi, hingga internalisasi secara langsung.

Proses internalisasi AKHLAK dimulai pada 6 Juli 2020, yang diawali dengan tahap Awareness yaitu mengetahui nilai-nilai “AKHLAK” BUMN serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kecintaan terhadap nilai-nilai unggul dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Selanjutnya, tahap Understanding, yaitu memahami lebih dalam makna dan tujuan nilai-nilai AKHLAK dalam organisasi dan penjabarannya ke dalam perilaku kerja dan mulai menyelaraskan dengan kegiatan operasional di unit kerja. Pada tahapan ini, seluruh Insan INTI Group telah menyatakan Ikrar *Core Value* AKHLAK.

Berikutnya, tahap *Buy-in*, yaitu setiap individu memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai AKHLAK, juga pemimpin menjadi panutan dan acuan utama bagi terwujudnya bisnis yang berkelanjutan. Lalu, pada tahap terakhir yaitu *Ownership* yang berarti setiap individu memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai AKHLAK, juga pemimpin menjadi panutan dan acuan utama bagi terwujudnya bisnis yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021, dilaksanakan survei AKHLAK yang berlangsung dari 1 September-31 Oktober 2021. Hasil survei menunjukkan rata-rata skor AKHLAK untuk seluruh karyawan sebesar 4,39 (Tinggi), yang artinya seluruh karyawan telah mengetahui nilai-nilai AKHLAK, memahami lebih dalam makna dan tujuan nilai-nilai AKHLAK, menerapkan nilai-nilai AKHLAK dalam semua kegiatan operasional sehari-hari, mengintegrasikannya dalam program kerja, dan proses bisnis perusahaan, serta memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai AKHLAK.

The socialization and internalization of the AKHLAK values within PT INTI (Persero) have also been carried out continuously since the Company established AKHLAK as the new values. Socialization and internalization activities are carried out through social media channels, company portals, websites, video conferences, innovation conventions, sharing sessions, poster installation, video socialization, and direct internalization.

The process of internalizing AKHLAK began on July 6, 2020, which began with the Awareness stage, namely knowing the values of SOE's “AKHLAK” and growing self-confidence and love for superior values in order to realize the Company's vision and mission. Next, the Understanding stage, which is to understand more deeply the meaning and purpose of AKHLAK values in the organization and their translation into work behavior and begin to align with operational activities in the work unit. At this stage, all INTI Group personnel have declared the Core Value Pledge of AKHLAK.

Next, the Buy-in stage, where each individual has behavior that is in accordance with AKHLAK values, also the leader becomes a role model and main reference for the realization of a sustainable business. Then, at the last stage, namely Ownership, which means that each individual has behavior that is in accordance with the values of AKHLAK, also the leader becomes a role model and the main reference for the realization of a sustainable business.

In 2021, the AKHLAK survey was carried out which took place from September 1 to October 31, 2021. The results of the survey showed that the average AKHLAK score for all employees was 4.39 (High), which means that all employees already know the values of AKHLAK, understand more deeply the meaning and purpose of AKHLAK values, applying AKHLAK values in all daily operational activities, integrating them into work programs and company business processes, and having behavior that is in accordance with AKHLAK values.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Komisaris Utama
President Commissioner

Unggul Priyanto

Warga Negara Indonesia, domisili di Depok.
Indonesian citizen, domiciled in Depok.

Profil Perusahaan

Company Profile

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Malang, 30 September 1958

Malang, September 30, 1958

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-99/MBU/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor 13 tertanggal 14 Juni 2017, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.03-0146488 tertanggal 15 Juni 2017.

He was appointed as President Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since May 23, 2017 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-99/MBU/05/2017 dated May 23, 2017, as stated in the Deed of Notary Iwan Yusuf Anwari, S.H. Number 13 dated June 14 2017, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHUAH.01.03-0146488 dated June 15, 2017.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Sarjana S1 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1985
- Master of Science di bidang Chemical Engineering dari Leeds University, Inggris, 1991
- Doktor di bidang Electronic & Material dari Kyushu University, Jepang, 2001

- Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology, Bandung, 1985
- Master of Science in Chemical Engineering from Leeds University, England, 1991
- Doctorate in Electronics & Materials from Kyushu University, Japan, 2001

Riwayat Karir

Career History

- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2014-2019
- Deputy Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, 2010 -2014
- Kuasa Pengguna Anggaran, 2009
- Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi, 2006-2010

- Head of the Agency for the Assessment and Application of Technology, 2014-2019
- Deputy for Information Technology, Energy, and Materials, 2010 -2014
- Budget User Authority, 2009
- Director of Center for Energy Resources Technology, 2006-2010

Selain berkarier profesional, Unggul Priyanto juga berpartisipasi aktif di berbagai pelatihan regional maupun internasional, antara lain Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat 1 di LAN Jakarta (2011), Financial Analysis of Energy Project di Colorado, USA (1995).

In addition to his professional career, Unggul Priyanto has also actively participated in various regional and international trainings, including Level 1 Leadership Education and Training at LAN Jakarta (2011), Financial Analysis of Energy Project in Colorado, USA (1995).

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 23 Mei 2017 hingga saat ini.

Effective from May 23, 2017 until now.



Komisaris
Commissioner

Trisno Hendradi

Warga Negara Indonesia, domisili di Bogor.
Indonesian citizen, domiciled in Bogor.



Profil Perusahaan

Company Profile

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Magelang, 14 Oktober 1961

Magelang, October 14, 1961

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 8 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0401230 tertanggal 23 Oktober 2020.

He was appointed as Commissioner of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since October 8, 2020 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-318/MBU/10/2020 dated October 8, 2020, as stated in the Deed of Notary Muhammad Hanafi, S.H. Number 41 dated October 20, 2020, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Number AHU-AH.01.03-0401230 dated October 23, 2020.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Akademi Angkatan Udara, 1986

Air Force Academy, 1986

Riwayat Karir

Career History

- Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) (2019)
- Kepala Sekretariat Militer Presiden (2016-2019)
- Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) (2016)

- *Commander of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Staff and Command School (2019)*
- *Head of the Presidential Military Secretariat (2016-2019)*
- *Deputy Commander of the Air Force Doctrine, Education, and Training Development Command (2016)*

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 8 Oktober 2020 hingga saat ini.

Effective from October 8, 2020 until now.



Komisaris
Commissioner

Rahmadi Murwanto

Warga Negara Indonesia, domisili di Tangerang Selatan.
Indonesian citizen, domiciled in Tangerang Selatan.

Profil Perusahaan

Company Profile

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Metro, 13 Maret 1970

Metro, March 13, 1970

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 8 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-AH.01.03-0401230 tertanggal 23 Oktober 2020.

He was appointed as Commissioner of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since October 8, 2020 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-318/MBU/10/2020 dated October 8, 2020, as stated in the Deed of Notary Muhammad Hanafi, S.H. Number 41 dated October 20, 2020, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0401230 dated October 23, 2020.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- DIII & DIV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- S2 Akuntansi, Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, Amerika Serikat
- S3 Akuntansi, School of Business and Commercial Law, Victoria University of Wellington, New Zealand
- DIII & DIV Accounting, State Accounting College
- Master of Accounting, Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, United State of America
- PhD in Accounting, School of Business and Commercial Law, Victoria University of Wellington, New Zealand

Riwayat Karir

Career History

- Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 2016-2020
- Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, 2014
- Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 2011
- Kepala Subbagian Organisasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, 2003
- Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) Kementerian Keuangan, 1991
- Director of the State Accounting College, 2016-2020
- Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency Ministry of Finance, 2014
- Head of Performance Evaluation and Reporting of the Customs and Excise Education and Training Center Ministry of Finance, 2011
- Head of Organizational Subdivision of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency (BPPK) Ministry of Finance, 2003
- Finance Education and Training Agency Ministry of Finance, 1991

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 8 Oktober 2020 hingga saat ini.

Effective from October 8, 2020 until now.



Profil Direksi

Board of Directors Profile



Direktur Utama
President Director

Otong lip

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, domisili di Bekasi.
Indonesian citizen, 56 years old, domiciled in Bekasi.



Profil Perusahaan

Company Profile

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Kuningan, 20 Januari 1965

Kuningan, January 20, 1965

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Otong lip menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 17 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-223/MBU/10/2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Otong lip has served as the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of October 17, 2019, based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stated in the Decree Number SK-223/MBU/10/2019 concerning the Appointment of the President Director of a Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Magister Management dari Universitas Borobudur, Jakarta (2002)
- Sarjana Ekonomi dari STIE Panca Bhakti, Palu (1992)
- Diploma-3 Ekonomi, PAAP Telkom Universitas Padjajaran, Bandung (1988)
- Master of Management from Borobudur University, Jakarta (2002)
- Bachelor of Economics from STIE Panca Bhakti, Palu (1992)
- Diploma of Economics, PAAP Telkom Padjajaran University, Bandung (1988)

Penghargaan

Appreciation

- Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia (2020)
- Satyalancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia (2013)
- Satyalancana Pembangunan from the President of the Republic of Indonesia (2020)
- Satyalancana Wirakarya from the President of the Republic of Indonesia (2013)

Riwayat Karir

Career History

Otong lip memulai karir profesionalnya di Telkom Group sejak tahun 1989 sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Utama di PT INTI (Persero). Selama masa karirnya beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain :

Otong lip started his professional career at the Telkom Group since 1989 before finally working as the President Director at PT INTI (Persero). During his career he held several important positions, including:

- Direktur Utama PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), (2015 - 2019)
- Komisaris Utama PT PINS Indonesia (2016 - 2019)
- Komisaris Utama PT Administrasi Medika (2015 - 2017)
- President Director of PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), (2015 - 2019)
- President Commissioner of PT PINS Indonesia (2016 - 2019)
- President Commissioner of PT Administrasi Medika (2015 - 2017)

- Komisaris Utama PT Metra Digital Investama (2015)
- Direktur Utama PT Finnet Indonesia (2013 - 2015)
- Komisaris PT Finnet Indonesia (2013)
- Senior General Manager *Finance-Billing & Collection* Centre Telkom (2010 - 2013)
- Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (2009 - 2010)
- Deputy Senior General Manager *Finance Centre* (2007 - 2009)
- Office Senior Manager *Finance* Divisi Regional II Jakarta (2006 - 2007)
- *President Commissioner of PT Metra Digital Investama* (2015)
- *President Director of PT Finnet Indonesia* (2013 - 2015)
- *Commissioner of PT Finnet Indonesia* (2013)
- *Telkom Senior General Manager Finance-Billing & Collection Center* (2010 - 2013)
- *Finance Director of PT Telekomunikasi Indonesia Internasional* (2009 - 2010)
- *Deputy Senior General Manager Finance Center* (2007 - 2009)
- *Senior Manager Regional Finance Division II Jakarta Office* (2006 - 2007)

Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

(Education or Training to Improve Competence)

Selain berkarier profesional, Otong lip juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya sebagai berikut:

- *Directorship Development*, NUS Singapura
- *International Leadership* INSEAD Batch 1, Jakarta-Perancis-Abu Dhabi
- *Chief Financial Officer Leadership*, Telkom
- *CFO Learning*, Telkom
- *Kursus Pimpinan Band Posisi I*, Telkom
- *Negotiation Dynamic*, INSEAD France
- *Mastering People Management*, Amsterdam
- *Tune in Transformation*, Bandung
- *Advance Financial Analysis & Valuation*, Bandung
- *Development Board of Directors*, NUS Singapore
- *INSEAD International Leadership Batch 1*, Jakarta-France-Abu Dhabi
- *Chief Financial Officer Leadership*, Telkom
- *CFO Learning*, Telkom
- *Position I Band Leadership Course*, Telkom
- *Negotiation Dynamic*, INSEAD France
- *Mastering People Management*, Amsterdam
- *Tune in Transformation*, Bandung
- *Advanced Financial Analysis & Valuation*, Bandung

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Komisaris Utama PT INTI Konten Indonesia

President Commissioner of PT INTI Content Indonesia

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.
Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 17 Oktober 2019

Effective from October 17, 2019



Direktur Bisnis
Business Director

Teguh A. Suryandono

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, domisili di Bandung.
Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in Bandung.

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Malang, 28 Januari 1969

Malang, January 28, 1969

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Teguh Adi Suryandono menjabat sebagai Direktur Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 28 Desember 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-292/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Teguh Adi Suryandono has served as the Business Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of December 28, 2017, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stated in the Decree Number SK-292/MBU/12/2019 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1993)

Bachelor of Electrical Engineering, Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya (1993)

Penghargaan

Appreciation

- Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia (2019)
- Satyalancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia (2016)
- Juara Pertama *IT Governance Award* Kategori BUMN Industri Pengolahan (2011)

- *Satyalancana Pembangunan from the President of the Republic of Indonesia (2019)*
- *Satyalancana Wirakarya from the President of the Republic of Indonesia (2016)*
- *First Winner of the IT Governance Award in the BUMN Manufacturing Industry Category (2011)*

Riwayat Karir

Career History

Beliau memulai karir profesionalnya di PT INTI Persero sejak tahun 1993 sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Bisnis PT INTI (Persero). Selama masa karirnya beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain sebagai berikut:

He started his professional career at PT INTI Persero in 1993 before finally becoming a Business Director of PT INTI (Persero). During his career, he succeeded in holding several important positions, including the following:

- Kepala Divisi *Corporate Services*, PT INTI (Persero), (2017)
- Komisaris Utama PT INTI Konten Indonesia (2017 - 2020)
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Umum PT INTI (Persero), (2016 - 2017)
- Komisaris Utama PT Mitra Graha Inti Utama (2015 -

- *Head of the Corporate Services Division PT INTI (Persero), (2017)*
- *President Commissioner of PT INTI Konten Indonesia (2017 - 2020)*
- *Head of Information Technology and General Affairs PT INTI (Persero), (2016 - 2017)*
- *President Commissioner of PT Mitra Graha Inti Utama*

Profil Perusahaan

Company Profile

- 2017)
- Kepala Divisi Akuntansi PT INTI (Persero), (2015 - 2016)
- Kepala Divisi Corporate Planning PT INTI (Persero), (2014 - 2015)
- Direktur Utama PT INTI Konten Indonesia (2013 - 2014)
- Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi PT INTI (Persero), (2009 - 2013)
- Komisaris Utama PT INTI Konten Indonesia (2012 - 2013)
- Komisaris PT INTI Konten Indonesia (2011 - 2012)
- (2015 - 2017)
- Head of the Accounting Division PT INTI (Persero), (2015 - 2016)
- Head of the Corporate Planning Division, PT INTI (Persero), (2014 - 2015)
- President Director of PT INTI Konten Indonesia (2013 - 2014)
- Head of Information Technology Systems Division of PT INTI (Persero), (2009 - 2013)
- President Commissioner of PT INTI Konten Indonesia (2012 - 2013)
- Komisaris PT INTI Konten Indonesia (2011 - 2012)

Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

(Education or Training to Improve Competence)

Selain berkariyer profesional, Teguh Adi Suryandono juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya sebagai berikut:

- SUSPIM I, Telkom Corporate University
- Pelatihan INTI Academy, MarkPlus Institute
- Leadership Training for Manager, Widya Bhakti INTI
- Managing People, LPPM
- Fundamental Leadership Training, Dale Carnegie
- SAP01 SAP Overview, SAP Education Service Indonesia
- Oracle Application Server 10G, Lindcom
- Malcom Baldrige - Criteria for Performance Excellence, Widya Bhakti INTI
- SUSPIM I, Telkom Corporate University
- INTI Academy training, MarkPlus Institute
- Leadership Training for Manager, Widya Bhakti INTI
- Managing People, LPPM
- Fundamental Leadership Training, Dale Carnegie
- SAP01 SAP Overview, SAP Education Service Indonesia
- Oracle Application Server 10G, Lindcom
- Malcom Baldrige - Criteria for Performance Excellence, Widya Bhakti INTI

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Komisaris Utama PT INTI Pindad Mitra Sejati
President Commissioner of PT INTI Pindad Mitra Sejati

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.
Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 28 Desember 2017.
Effective from December 28, 2017.



Direktur Keuangan
Finance Director

Tri Hartono Rianto

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, domisili di Jakarta.
Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta.

Profil Perusahaan

Company Profile

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Jayapura, 4 September 1971

Jayapura, September 4, 1971

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Tri Hartono Rianto menjabat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 24 Juli 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-167/MBU/07/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Tri Hartono Rianto has served as Director of Corporate Finance at PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of July 24, 2019, based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stipulated in Decree Number SK-167/MBU/07/2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Master of Business (MBus) di bidang Keuangan dan Akuntansi, University of Technology Sydney, Australia (2002)
- Profesi Akuntan Negara (Ak), Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant (CPMA), ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA).
- Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Akuntansi, Universitas Surabaya (1994)
- Master of Business (MBus) in Finance and Accounting, University of Technology Sydney, Australia (2002)
- State Accountant Profession (Ak), Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant (CPMA), ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA).
- Bachelor of Economics majoring in Accounting, University of Surabaya (1994)

Penghargaan

Appreciation

- Padmamitra Awards, Corporate Social Responsibility kategori Bidang Kemiskinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (2018)
- Perusahaan Platinum Pemberi Kerja Terbaik kategori Kepatuhan dan Dukungan K3 dari BPJS Ketenagakerjaan (2018)
- Wajib Pajak Badan dengan Pembayaran Pajak Terbesar di KPP Pratama Padang Dua oleh DJP Wilayah Sumatera Barat dan Jambi (2018)
- Wajib Pajak Badan Terbaik atas Pembayaran Pajak Terbesar dan Tepat Waktu oleh Dispenda Kota Padang (2016)
- Beasiswa AUSAid dari Pemerintah Australia (2001 - 2002)
- Padmamitra Awards, Corporate Social Responsibility in the Poverty Sector Category from the Social Ministry of the Republic Indonesia (2018)
- Best Employer Platinum Company for OHS Compliance and Support category from BPJS Ketenagakerjaan (2018)
- Corporate Taxpayer Award with the Largest Tax Payment at KPP Pratama Padang Dua by the DGT for West Sumatra and Jambi Regions (2018)
- Best Corporate Taxpayer Award for the Largest and Timely Tax Payment by the Padang City Dispenda (2016)
- AUSAid Scholarship from Australian Government (2001 - 2002)

Riwayat Karir

Career History

Tri Hartono Rianto memulai karir profesionalnya di PT Semen Gresik (Persero) Tbk sejak tahun 1995, sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Keuangan PT INTI (Persero). Selama masa karirnya, beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain :

- Direktur Keuangan PT Semen Padang (2014 - 2019)
- Komisaris Utama PT Sepatim Batamtama (2018 - 2019)
- Pembina Yayasan Semen Padang (Rumah Sakit Semen Padang), (2016 - 2018)
- Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Semen Padang (2015 - 2019)
- CEO of An Phu Cement Company, Vietnam (2014)
- Strategic Planning & Procurement Director, Thang Long Cement Company, Vietnam (2013 - 2014)
- Marketing & HCM Branch Director Thang Long Cement Company, Vietnam (2014)
- General Manager, Office of The CEO Bidang Visi & Strategi PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2011-2013)
- Komisaris Utama PT Industri Kemasan Semen Gresik (2011 - 2013)

Tri Hartono Rianto started his professional career at PT Semen Gresik (Persero) Tbk since 1995, before finally working as Finance Director of PT INTI (Persero). During his career, he managed to occupy several important positions, including:

- Finance Director of PT Semen Padang (2014 - 2019)
- President Commissioner of PT Sepatim Batamtama (2018 - 2019)
- Trustees of the Semen Padang Foundation (Semen Padang Hospital), (2016 - 2018)
- Chairman of the Supervisory Board of the Semen Padang Pension Fund (2015 - 2019)
- CEO of An Phu Cement Company, Vietnam (2014)
- Strategic Planning & Procurement Director of Thang Long Cement Company, Vietnam (2013 - 2014)
- Marketing & HCM Branch Director of Thang Long Cement Company, Vietnam (2014)
- General Manager, Office of The CEO for Vision & Strategy of PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2011-2013)
- President Commissioner of PT Semen Gresik Packaging Industry (2011 - 2013)

Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

(Education or Training to Improve Competence)

Selain berkarier profesional, Tri Hartono Rianto juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya sebagai berikut:

- ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA), Ikatan Akuntan Indonesia
- Executive Leadership Program, Kementerian BUMN
- Dialog Kebangsaan, Lembaga Ketahanan Nasional
- Global Leadership, Jakarta
- Board of Directors Preparation for Talent Program, Jakarta
- Executive Development Program, Yogyakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Terkini (Konvergensi International Financial Reporting Standards), Ikatan Akuntan Indonesia
- Lokakarya Akuntansi - Audit, Ikatan Akuntan Indonesia
- Corporate Treasury Masterclass, Euromoney Training, Singapore
- Integrated Financial Management Programme, Euromoney Training, London
- Manajemen Pengawasan Dana Pensiun, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
- Manajemen Umum Dana Pensiun, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
- Manajemen Risiko Dana Pensiun, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

In addition to a professional career, Tri Hartono Rianto also actively participates in a number of education or training to improve competence, including the following:

- ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA), Indonesian Institute of Accountants
- Executive Leadership Program, Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs)
- National Dialogue, National Defense Institute
- Global Leadership, Jakarta
- Board of Directors Preparation for Talent Program, Jakarta
- Executive Development Program, Yogyakarta
- Latest Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) (Convergence of International Financial Reporting Standards), Indonesian Institute of Accountants
- Accounting Workshop - Audit, Indonesian Institute of Accountants
- Corporate Treasury Masterclass, Euromoney Training, Singapore
- Integrated Financial Management Program, Euromoney Training, London
- Pension Fund Supervision Management, Indonesian Pension Fund Association
- General Management of Pension Funds, Indonesian Pension Fund Association
- Pension Fund Risk Management, Indonesian Pension Fund Association



Profil Perusahaan

Company Profile

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Komisaris PT INTI Global Optical Communication Indonesia dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun INTI
Chairman of PT INTI Global Optical Communication Indonesia, and Head of INTI Pension Fund Supervisory Board.

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.
Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 24 Juli 2019.
Effective July 24, 2019.

Profil Senior Leader

Senior Leader Profile



Rizqi Ayunda Pratama

Vice President Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis
Vice President Corporate Secretary and Strategic Planning

Tempat dan Tanggal Lahir

Aceh Barat Daya, 08 Februari 1989

Place and Date of Birth

Aceh Barat Daya, February 08, 1989

Pendidikan

Strata-1 Informatika, Universitas Sriwijaya

Education

Bachelor Degree in Informatika, Sriwijaya University

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.066/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Juli 2021

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.066/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective July 1, 2021



Lisda Noor Rachmawati

Vice President Satuan Pengawasan Intern
Vice President of Internal Audit Unit

Tempat dan Tanggal Lahir
Bandung, 27 Maret 1970

Place and Date of Birth
Bandung, March 27, 1970

Pendidikan
Strata-1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran

Education
Bachelor Degree in Accounting, Padjadjaran University

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi Nomor KD.096/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 September 2021

Legal Basis of Appointment
Decree of the Board of Directors Number KD.096/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective September 1, 2021



Didik Pebrianto

Vice President Hukum dan Manajemen Risiko
Vice President of Law and Risk Management

Tempat dan Tanggal Lahir

Semarang, 12 Februari 1966

Place and Date of Birth

Semarang, February 12, 1966

Pendidikan

Strata-1 Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada

Education

Bachelor Degree in Civil Law, Gadjah Mada University

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.257/KP.09/021100/2020 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2021

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.257/KP.09/021100/2020 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2021



Dadang Achmad Haedar

Vice President Satuan Pengawasan Intern
Vice President of Internal Audit Unit

Tempat dan Tanggal Lahir
Garut, 19 Desember 1970

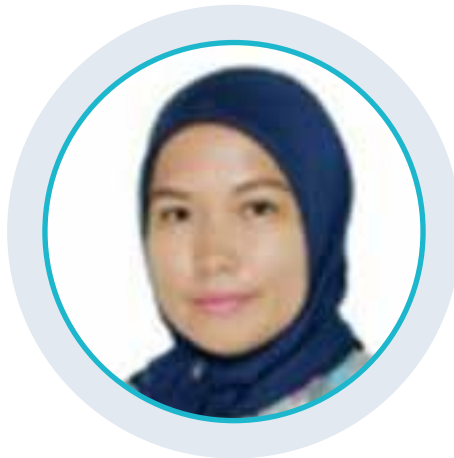
Place and Date of Birth
Garut, December 19, 1970

Pendidikan
Strata-1 Teknik Mesin, Institut Teknologi
Bandung

Education
Bachelor Degree in Mechanical Engineering,
Bandung Institute of Technology

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi Nomor KD.257/
KP.09/021100/2020 tentang Penempatan
Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai
berlaku tertanggal 01 Januari 2021

Legal Basis of Appointment
Decree of the Board of Directors Number
KD.257/KP.09/021100/2020 concerning
Employee Placement in the Company
Environment, effective January 1, 2021



Wieka Dzurriyyah Nur

Vice President Keuangan & Akuntansi
Vice President of Finance & Accounting

Tempat dan Tanggal Lahir

Majalengka, 12 Maret 1982

Place and Date of Birth

Majalengka, March 12, 1982

Pendidikan

Strata-1 Teknik Perencanaan Kota dan Wilayah,
Institut Teknologi Bandung

Education

*Bachelor Degree Urban and Regional Planning
Engineering, Bandung Institute of Technology*

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.066/
KP.09/020800/2021 tentang Penempatan
Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai
berlaku tertanggal 1 Juli 2021

Legal Basis of Appointment

*Decree of the Board of Directors Number
KD.066/KP.09/020800/2021 concerning
Employee Placement in the Company
Environment, effective July 1, 2021*



Yahman Mulyana

Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha
Vice President of Procurement and Business Partners

Tempat dan Tanggal Lahir
Garut, 18 Juli 1966

Place and Date of Birth
Garut, July 18, 1966

Pendidikan
STM Angkasa Bandung

Education
STM Angkasa Bandung

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi Nomor KD.071/KP.09/021100/2020 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan, mulai berlaku tertanggal 1 April 2021

Legal Basis of Appointment
Decree of the Board of Directors Number KD.071/KP.09/021100/2020 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective April 1, 2021



Andriyanto

Vice President Pemasaran dan Penjualan
Vice President of Marketing and Sales

Tempat dan Tanggal Lahir

Cirebon, November 3, 1981

Place and Date of Birth

Cirebon, November 3, 1981

Pendidikan

Strata-1 Elektro Kuat, Institut Teknologi Nasional

Education

Bachelor Degree in Strong Electrical, National Institute of Technology

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.254/KP.09/020800/2019 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2021

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.254/KP.09/020800/2019 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2021



I Made Gelgel

Vice President Manajemen Proyek dan Jaminan Kualitas
Vice President of Project Management and Quality Assurance

Tempat dan Tanggal Lahir
Klungkung, 13 September 1969

Place and Date of Birth
Klungkung, September 13, 1969

Pendidikan
Strata-1 Teknik Telekomunikasi, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember

Education
Bachelor Degree in Telecommunication
Engineering, Sepuluh Nopember Institute of
Technology

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi Nomor KD.257/
KP.09/021100/2020 tentang Penempatan
Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai
berlaku tertanggal 1 Januari 2021

Legal Basis of Appointment
Decree of the Board of Directors Number
KD.257/KP.09/021100/2020 concerning
Employee Placement in the Company
Environment, effective January 1, 2021



Dadang Mukti

Vice President Manajemen Proyek dan Jaminan Kualitas
Vice President of Project Management and Quality Assurance

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 10 April 1969

Place and Date of Birth

Bandung, April 10, 1969

Pendidikan

D3 Telekomunikasi, Politeknik ITB

Education

D3 Telecommunication, ITB Polytechnic

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor KD.099/
KP.10/020800/2021 tentang Penempatan
Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai
berlaku tertanggal 1 Oktober 2021

Legal Basis of Appointment

*Decree of the Board of Directors Number
KD.099/KP.10/020800/2021 concerning
Employee Placement in the Company
Environment, effective October 1, 2021*



Darma Nugraha

Vice President Pengembangan Produk dan Solusi
Vice President of Product and Solution Management

Tempat dan Tanggal Lahir
Semarang, 16 Januari 1980

Place and Date of Birth
Semarang, January 16, 1980

Pendidikan
S1 Teknik Telekomunikasi

Education
Bachelor Degree in Telecommunications Engineering

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi Nomor KD.099/KP.10/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Oktober 2021

Legal Basis of Appointment
Decree of the Board of Directors Number KD.099/KP.10/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective October 1, 2021



Itot Wiharto

Vice President Produksi dan Layanan Terkelola
Vice President of Production and Managed Service

Tempat dan Tanggal Lahir
 Cirebon, 21 Oktober 1966

Place and Date of Birth
Cirebon, October 21, 1966

Pendidikan
 D3 Informatika, Akademi Manajemen
 Informatika dan Komputer

Education
*D3 Informatics, Academy of Information and
 Computer Management*

Dasar Hukum Pengangkatan
 Surat Keputusan Direksi Nomor KD.096/
 KP.09/020800/2021 t e n t a n g
 Penempatan Karyawan di Lingkungan
 Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1
 September 2021

Legal Basis of Appointment
*Decree of the Board of Directors Number
 KD.096/KP.09/020800/2021 concerning
 Employee Placement in the Company
 Environment, effective September 1, 2021*



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital merupakan salah satu faktor untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2021, strategi dan pengembangan human capital PT INTI (Persero) diselaraskan dengan kebutuhan bisnis Perseroan yaitu melatih dan mengembangkan karyawan sejalan dengan kebutuhan dan pembenahan sistem manajemen human capital untuk menunjang terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Pada 28 April 2021, dilakukan Ikrar Core Values AKHLAK sesi Anak Perusahaan, yang dilakukan oleh jajaran Direksi dan karyawan Anak Perusahaan. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan INTI dapat mengimplementasikan Core Values AKHLAK secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada 29 Juli 2021, PT INTI (Persero) menyelenggarakan Refleksi Satu Tahun Perjalanan AKHLAK BUMN yang dilakukan secara virtual. Acara ini diselenggarakan untuk merefleksikan implementasi AKHLAK selama 1 tahun, baik di PT INTI (Persero) maupun di Anak Perusahaan.

Human capital is one of the factors to support company's continuity. In 2021, PT INTI (Persero) strategy and human capital development aligned with the company's business needs which is training and developing employees in line with needs and improvement human capital management systems that support conducive working vibes to improving productivity.

Subsidiaries's core Values AKHLAK Pledge was held in April 28, 2021, by Board of Directors and subsidiaries employees. This purpose is for entire INTI employees could implementing overall Core Values AKHLAK.

Furthermore, in July 29, 2021, PT INTI (Persero) held Reflection of One Year Journey AKHLAK BUMN Reflection, virtually. This event aims to reflect AKHLAK implementation in one year, either in PT INTI (Persero) or subsidiaries.

Kesetaraan Gender Dan Kesempatan Bekerja

Gender Equality And Employment Opportunity

Prinsip Kesetaraan

PT INTI (Persero) percaya bahwa keragaman Insan PT INTI (Persero) merupakan faktor penting bagi keberhasilan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk memperoleh, membina, dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kompetensi. Promosi jabatan di Perseroan pun didasarkan pada kemampuan dan kinerja.

Perseroan berkomitmen sepenuhnya untuk memberikan kesempatan kerja yang sama serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik ketenagakerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Kesetaraan Gender

Kebijakan non-diskriminasi menjadi Insan PT INTI (Persero) yang memiliki kesempatan sama dan setara dalam berkarir. Pada tahun 2021, 72% Insan PT INTI (Persero) terdiri atas karyawan pria, yang menunjukkan peningkatan porsi jumlah karyawan wanita dari tahun sebelumnya.

Equality Principle

PT INTI believes that human diversity PT INTI (Persero) is important factors for Company's success. Therefore, Company try to obtain, guiding, and maintain people that have competencies. Promotion in Company is based on ability and performance.

Company fully committed to providing equal employment opportunity and complying with laws and regulations related to fair employment practice and non-discrimination.

Gender Equality

Non-discrimination policy to become PT INTI (Persero) employees that have same opportunities and equal in carrier. In 2021, 72% PT INTI (Persero) employees consists of male employees, that shows an increase in the share of the number of employees from the previous year.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender



Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia
Table of Employee Composition by Age Range

Rentang Usia Age Range	2021			2020		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
21-25	6	8	14	1	1	2
26-30	18	15	33	18	16	34
31-35	33	25	58	35	27	62
36-40	16	6	22	16	4	20
41-45	4	0	4	2	0	2
46-50	3	1	4	15	3	18
>50	83	9	92	146	21	167
Total	163	64	227	233	72	305

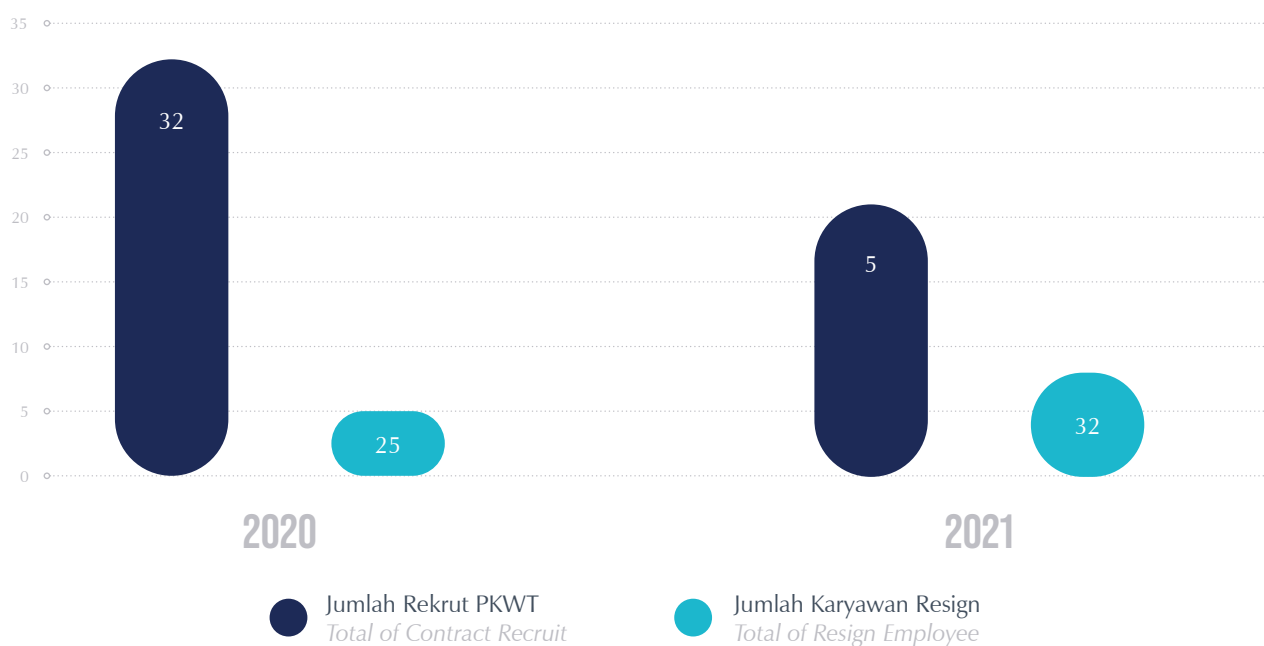
Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

Job Opportunities and Employee Turnover

Rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan. Pada tahun 2021, Perseroan menerapkan strategi *negative growth* sehingga perputaran karyawan sangat mempertimbangkan faktor produktivitas dan posisi kunci yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Recruitment is carried out openly according to the needs and qualifications required. In 2021, the Company implemented a *negative growth* strategy so that employee turnover takes into account productivity factors and key positions needed by the Company.

Rekrutmen dan Turn Over Karyawan
Recruitment and Employee Turn Over



Pada tahun 2021, terdapat peningkatan turn over karyawan. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 52 orang karyawan yang mengikuti program Pensiun Dini, sehingga total jumlah karyawan yang mengikuti program pensiun dini sebesar 61 orang. Meskipun terdapat peningkatan karyawan yang terminasi, Perusahaan berhasil merekrut 21 karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menjadi suksesi di masa yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah berusaha untuk menambah kapasitas karyawan melalui metode negative growth, yang sangat mempertimbangkan aspek produktivitas karyawan.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah berhasil menyelenggarakan 22 episode Webinar INTI yang diisi oleh narasumber internal dan eksternal.

Karyawan PT INTI (Persero) juga memperoleh Pengakuan dan Penghargaan, melalui berbagai pengakuan yang didapat secara individu, maupun penghargaan yang didapatkan oleh Perseroan atas kinerja Karyawan.

Selain itu, Karyawan PT INTI (Persero) mendapatkan kesempatan belajar di PT INTI (Persero), melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu, Karyawan PT INTI (Persero) juga memiliki kesempatan pengembangan karir melalui jalur fast track, di mana seluruh karyawan, baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk terlibat dalam jalur pengembangan karir tersebut.

In 2021, there was an increase in employee turnover. Besides that, in 2021 there were 52 employees take early retirement, so that the total amount of employees that had been take early retirement program was 61 employees. Although, there was an increase in termination of employees, the company has succeeded in recruiting 21 employees with the status of a Specific Time Work Agreement to become succession in the future.

This shows that the company has been trying to increase employee capacity through negative growth method, which really considers aspects of employee productivity.

During 2021, the company has successfully held 22 episodes of INTI Webinar which was filled by internal and external speakers.

Employees of PT INTI (Persero) can obtain Recognition and Awards, through various recognitions obtained individually, as well as awards obtained by the Company for employee performance.

In addition, employees of PT INTI (Persero) have the opportunity to study at PT INTI (Persero), through training, certification, and further education, both at home and abroad. Then, PT INTI (Persero) employees also have career development opportunities through the fast track, where all employees, both male and female, have broad and equal opportunities to be involved in the career development path.





Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Serta Layanan Medis

Occupational Safety, Health and Environment, and Medical Services

Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), maka PT INTI (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam setiap proses bisnis Perseroan.

Sejak tahun 2010, PT INTI sudah menjalankan SMK3 dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif. Bagi PT INTI (Persero), partisipasi semua pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif serta berusaha menekan terjadinya kecelakaan kerja (*Zero Accident*) dan penyakit akibat kerja (PAK).

Implementasi SMK3 di PT INTI (Persero) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 dan ISO 45001:2018. Terkait pelaksanaannya, PT INTI (Persero) telah menjalani serangkaian audit oleh auditor eksternal yaitu PT Sucofindo (Persero) yang memberikan hasil penilaian bahwa SMK3 PT INTI (Persero) Berpredikat Kategori Bendera Emas.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen dan konsistensi PT INTI (Persero) dalam menerapkan SMK3 itu, PT INTI (Persero) pun telah meraih Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2021.

Beberapa program kerja yang telah dijalankan antara lain:

1. Pembekalan K3 pada karyawan baru untuk menyiapkan mental dan kompetensi dasar kesehatan dan keselamatan kerja di Perseroan.
2. Pelatihan bagi karyawan dan karyawan anggota Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tim Tanggap Darurat Bencana (TDB) mengenai K3 dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) secara periodik.
3. Simulasi Tanggap Darurat Bencana setiap tahun untuk membekali seluruh penghuni gedung agar siap dan tanggap terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
4. Inspeksi K3 secara periodik untuk memastikan kondisi aman dalam bekerja
5. Pertemuan rutin Tim P2K3 untuk membahas dan mengevaluasi program kerja SMK3 yang telah direncanakan.

In line with the prevailing laws and regulations and compliance with government regulations, related to Occupational Health and Safety (OHS), PT INTI (Persero) is committed to implementing the Occupational Health and Safety (OHS) Management System in every business process of the Company.

*Since 2010, PT INTI has implemented an OHS Management System with the aim of creating a safe, comfortable, healthy and productive work environment. For PT INTI (Persero), the participation of all parties in optimizing the implementation of the OHS culture is the key to creating a safe, comfortable, healthy and productive work environment as well as trying to reduce the occurrence of work accidents (*Zero Accident*) and occupational diseases.*

The implementation of OHS Management System at PT INTI (Persero) refers to Government Regulation Number 50 of 2012 and ISO 45001:2018. Regarding its implementation, PT INTI (Persero) has undergone a series of audits by an external auditor, namely PT Sucofindo (Persero) which resulted in an assessment that PT INTI (Persero)'s OHS Management System has the Gold Flag Category.

*Furthermore, as a form of commitment and consistency of PT INTI (Persero) in implementing the OHS Management System, PT INTI (Persero) has also won the *Zero Accident* Award from the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia from 2010 to 2021.*

Several of the work programs that have been carried out include:

1. *Provision of OHS for new employees to prepare mental and basic competencies for occupational health and safety in the Company.*
2. *Periodic training for employees and members of the Occupational Safety and Health Committee and Disaster Emergency Response Team regarding OHS and First Aid in Accidents.*
3. *Disaster Emergency Response Simulation every year to equip all building occupants to be ready and responsive to disasters that can occur at any time.*
4. *Periodic OHS inspections to ensure safe working conditions*
5. *Regular meeting of the the Occupational Safety and Health Committee Team to discuss and evaluate the planned work program of OHS Management System.*

Terkait Pandemi Covid-19

PT INTI (Persero) telah menyusun strategi dan langkah-langkah pengelolaan Perseroan yang adaptif terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran virus Covid-19 yang dilakukan di segala lini operasi bisnis Perseroan antara lain:

1. Membentuk Satuan Tugas Covid-19 tingkat perusahaan.
2. Menerbitkan kebijakan bekerja yang adaptif terhadap pandemi Covid-19, yakni adaptasi kebiasaan baru pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Membuat program kerja penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19, antara lain edukasi karyawan, sosialisasi pencegahan, penanganan korban terkonfirmasi positif Covid-19, serta monitoring dan evaluasi program kerja tersebut secara periodik.
4. Patuh terhadap peraturan Satuan Tugas Covid-19 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kesehatan.
5. Program vaksinasi karyawan secara menyeluruh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.
6. Monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada tim Satuan Tugas Covid-19 Kota Bandung terkait kejadian terkonfirmasi positif Covid-19, untuk segera mendapatkan penanganan dari pihak yang berwenang, dan khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Upaya-upaya adaptasi kebiasaan baru yang ditempuh bertujuan untuk tetap mempertahankan produktivitas Perseroan yang maksimal dalam rangka mencapai target Perseroan yang telah direncanakan.

Dari strategi dan program kerja Perseroan yang adaptif terhadap Covid-19 itu membantu Perseroan untuk mampu menjaga dan mempertahankan produktivitas karyawan, namun tetap menekan penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan Perseroan. Artinya, produktivitas karyawan tetap terjaga, dan risiko terpapar Covid-19 bagi karyawan dapat dikendalikan.

Keikutsertaan dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

PT INTI (Persero) telah mengikuti program asuransi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

GenRegarding the Covid-19 Pandemic

PT INTI (Persero) has developed strategies and steps for managing the Company that are adaptive to the Covid-19 pandemic that has occurred since the beginning of 2020. Anticipatory measures against the spread of the Covid-19 virus carried out in all lines of the Company's business operations include:

1. Establish a company-level Covid-19 Task Force.
2. Issuing work policies that are adaptive to the Covid-19 pandemic, namely the adaptation of new habits to the company's operational activities.
3. Create a work program to control the spread and transmission of Covid-19, including employee education, socialization of prevention, handling of victims confirmed positive for Covid-19, as well as monitoring and evaluating the work program periodically.
4. Comply with the regulations of the Covid-19 Task Force of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and the Ministry of Health.
5. A comprehensive employee vaccination program as an effort to prevent the spread and transmission of Covid-19.
6. Monitoring and evaluation, as well as reporting to the Bandung City Covid-19 Task Force team regarding positive confirmed cases of Covid-19, to immediately get treatment from the authorities, and in particular the Bandung City Health Office.

Efforts to adapt new habits are aimed at maintaining the maximum productivity of the Company in order to achieve the Company's planned targets.

The Company's strategies and work programs that are adaptive to Covid-19 help the Company to be able to maintain and maintain employee productivity, but still suppress the spread and transmission of Covid-19 in the Company's environment. This means that employee productivity is maintained, and the risk of exposure to Covid-19 for employees can be controlled.

Participation in the Social Security Administration Health Program

PT INTI (Persero) has participated in the insurance of the Social Security Administration Health Program since January 1, 2014 in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body.



Profil Perusahaan

Company Profile

PT INTI (Persero) telah mengikutsertakan Direksi dan Karyawan Perseroan, termasuk keluarganya pada Program BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan PT INTI (Persero) Tahun 2021

PT INTI (Persero) has included the Board of Directors and Employees of the Company, including their families in the Social Security Administration Health Program.

PT INTI (Persero)'s the Social Security Administration Health Program Participant in 2021

Peserta Participant	Jumlah Amount	Total Iuran Tahun 2021 Total Dues for 2021 (Rp)
Direksi The Board of Directors	3	21.600.000
Keluarga Direksi Family of the Board of Directors	5	
Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak Permanent Employees and Contract Employees	239	1.463.650.729
Keluarga Karyawan Employee Family	320	

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

Tantangan bisnis dan perkembangan teknologi menuntut penyesuaian dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sehingga karyawan harus selalu dikembangkan agar memiliki kompetensi unggul di bidang kepemimpinan ataupun teknis sesuai arah bisnis Perseroan.

Perseroan juga memastikan bahwa kompetensi kunci perlu dipelajari dan dimiliki oleh karyawan agar hasil pembelajaran dapat membawa kontribusi bagi Perseroan.

Pada tahun 2021, Perseroan mengalokasikan biaya seminar dan pelatihan sebesar Rp450.380.000, dan dikarenakan terdapat pandemi Covid-19 maka Perseroan mengadakan pengembangan kompetensi karyawan melalui media daring maupun in house dalam jumlah terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, pada tahun 2021 juga terdapat peningkatan pada partisipasi karyawan, hal ini dikarenakan Perusahaan sangat berfokus pada berbagi pengetahuan melalui webinar.

Berikut merupakan pengembangan karyawan selama tahun 2021 berdasarkan Jenis Pengembangan.

Business challenges and technological developments require continuous adjustment and improvement of competence so that employees must always be developed so that they have superior competencies in leadership or technical fields according to the Company's business direction.

The Company also ensures that key competencies need to be learned and possessed by employees so that learning outcomes can contribute to the Company.

In 2021, the Company budgeted the cost of seminars and training of Rp450,380,000, and due to the Covid-19 pandemic, the Company conducted employee competency development through online and in-house media in limited quantities with strict health protocols.

In 2021, there was an increase in employee participation, this is because the company this is because the Company is very focused on sharing knowledge through webinars.

The following is employee development during 2021 by Type of Development.

No.	Jenis Pengembangan SDM <i>Types of HR Development</i>	2020	2021
1	Knowledge Sharing	61	1.336
2	Pelatihan <i>Training (Inhouse & Public)</i>	25	101
3	Seminar	106	13
4	Sertifikasi <i>Certification</i>	13	7
5	Workshop	36	57
Jumlah <i>Total</i>		241	1.514

Selanjutnya, pada tahun 2021, Perseroan berfokus pada peningkatan kompetensi bidang-bidang kunci yang dapat mendukung peningkatan performansi Perseroan, salah satunya bidang *marketing management, engineering, business, kepemimpinan, dan quality management*.

Furthermore, in 2021, the Company will focus on improving the competence of key areas that can support improving the Company's performance, one of which is in the areas of *marketing management, engineering, business, leadership, and quality management*.

No.	Nama Pengembangan <i>Development Name</i>	Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Types of Human Resource Development</i>	Jenis Kompetensi <i>Type Competence</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	BUMN Digital Behavior & Mindset	Workshop	Innovation & Process Improvement	4
2	FEB Business Analytics	Workshop	Business Awareness	3
3	FEB Digital Disruption	Workshop	Business Awareness	3
4	Peran SPI dalam Mendukung Perusahaan	Knowledge Sharing	Internal Audit	49
5	Penyusunan Strategy untuk Corporation	Workshop	Strategic Orientation	1
6	Certified Professional in Log Man	Sertifikasi <i>Certification</i>	Logistic	1
7	Pengenalan IoT	Knowledge Sharing	Information System	59
8	Business Model Canvas	Knowledge Sharing	Business Awareness	69
9	Marketing Fundamental	Workshop	Marketing Management	25
10	Intrapreneur Fundamental	Workshop	Innovation & Process Improvement	5
11	Business Analytics Insights	Knowledge Sharing	Business Awareness	58
12	BUMN Digital Academy Insights	Knowledge Sharing	Innovation & Process Improvement	56
13	Hubungan Industrial	Pelatihan <i>Training</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia	1
14	Skema Pengelolaan HC	Pelatihan <i>Training</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
15	Metode Penyusunan Maps	Knowledge Sharing	Marketing & Sales	51

Profil Perusahaan

Company Profile

16	Data Science	Seminar	Information System	1
17	Maksimal Peran Media dalam Crisis Communication	Seminar	Corporate Communication	4
18	Digital Disruption Insights	Knowledge Sharing	Business Awareness	61
19	Calibration & Maintenance for The Ats	Workshop	Maintenance	5
20	PCBA Testing & Fault Diagnostics (Ats)	Workshop	Maintenance	5
21	Qualified Risk Management Officer	Sertifikasi Certification	Risk Management	2
22	Membedah Peluang Pemasaran Produk INTI	Knowledge Sharing	Marketing Management	75
23	Pengenalan Produk INTI	Knowledge Sharing	Product Knowledge	55
24	Vaksinasi dan Pandemi Covid-19	Knowledge Sharing	Corporate Communication	48
25	PR Trends & Outlook 2021	Seminar	Corporate Communication	1
26	Jurus Anti Halu, Generasi Digital	Seminar	Corporate Communication	1
27	Mewujudkan Protokol Zaman Now	Seminar	Corporate Communication	1
28	Keterbukaan Info Daan Barang & Jasa	Seminar	Corporate Communication	1
29	Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan	Seminar	Corporate Communication	1
30	Perlukah Sertifikasi Profesi PPID?	Seminar	Corporate Communication	1
31	Menyiapkan Badan Publik Monev KIP	Seminar	Corporate Communication	1
32	Transfer Teknologi Oerlikon Skyshiled	Knowledge Sharing	Maintenance	73
33	Maintenance & Repair Cap Oerlikon	Workshop	Maintenance	5
34	FGD KS Logistik, Transport, & Gudang	Seminar	Logistic	1
35	K3 Penunjang Produktivitas Karyawan	Knowledge Sharing	K3	66
36	Ahli Teknik Jembatan Madya	Sertifikasi Certification	Konstruksi & Sipil	1
37	Finance for Non Finance Manager	Knowledge Sharing	Finance	81
38	Peluang Implementasi IoT di Indonesia	Knowledge Sharing	Information System	81
39	5G Use Case Solution	Knowledge Sharing	Telecommunication	62
40	Indonesia Capital Market Introduction	Knowledge Sharing	Finance	68
41	Pelatihan Antikorupsi	Workshop	GCG Knowledge	1
42	Ahli Sistem Manajemen Mutu Madya	Sertifikasi Certification	Manajemen Mutu	1
43	Ahli Teknik Jalan Rel Madya	Sertifikasi Certification	Konstruksi dan Sipil	1
44	Cyber Security Awareness	Knowledge Sharing	Information System	72
45	Orientasi Karyawan	Pelatihan Training	Leadership of Change	16

46	<i>Logistics Management Insights</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Logistic</i>	87
47	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Sertifikasi <i>Certification</i>	K3	1
48	<i>Public Relation Insights</i>	Pelatihan <i>Training</i>	<i>Corporate Communication</i>	82
49	Sertifikasi TKDN Sebagai Bagian dari Strategi Perusahaan	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Product Knowledge</i>	55
50	Risk Management in Sharia Banking & Produk BSI	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Risk Management</i>	51
51	Sosialisasi Aplikasi WBS KPK	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>GCG Knowledge</i>	59
Total				1.514

Manajemen Pengetahuan

Knowledge Management

Pada tahun 2021, PT INTI (Persero) telah berhasil menyelenggarakan 22 episode Webinar INTI yang diisi oleh pemateri internal dan eksternal. Hal ini sangat mendukung proses pengembangan kompetensi karyawan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah karyawan yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

In 2021, PT INTI (Persero) has successfully held 22 episodes of INTI Webinars filled by internal and external speakers. This is strongly supports the employee competency development process as indicated by an increase in the number of employees involved in human resources development.

Sistem Manajemen Unjuk Kerja

Performance Management System

PT INTI (Persero) sangat mengapresiasi karyawan yang memiliki kinerja tinggi, maka PT INTI (Persero) menerapkan kebijakan *pay for performance*, selain *pay for position* dan *pay for person*. Selain itu, PT INTI (Persero) juga memberikan apresiasi pada karyawan melalui penghargaan *best of the year* yang diberikan pada Hari Ulang Tahun PT INTI (Persero) pada 30 Desember 2021.

PT INTI (Persero) really appreciates employees who have high performance, so PT INTI (Persero) implements a pay for performance policy, in addition to pay for position and pay for person. In addition, PT INTI (Persero) also gave appreciation to employees through the best of the year award given on PT INTI (Persero)'s Birthday on December 30, 2021.

Kompetensi Pegawai

Employee Competence

PT INTI (Persero) menjadikan kompetensi sebagai salah satu pertimbangan dalam melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Perseroan juga memastikan strategi bisnis Perseroan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, melalui tersedianya talenta-talenta yang menjadi suksesi posisi kunci Perseroan.

Untuk memastikan hal tersebut, Perseroan melakukan metode pengukuran kompetensi melalui metode *assessment center*, khususnya untuk posisi Direksi Anak Perusahaan, *Vice President*, dan *Manager*.

PT INTI (Persero) makes competence one of the considerations in implementing Human Resources (HR) development programs. In addition, the Company also ensures that the Company's business strategy can be implemented in accordance with the target, through the availability of talents who become the successor of key positions of the Company.

To ensure this, the Company conducts a competency measurement method through the assessment center method, especially for the positions of the Board of Directors of Subsidiaries, Vice Presidents, and Managers.



Profil Perusahaan

Company Profile

Remunerasi

Remuneration

Perseroan memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada 3P yaitu Person sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan dalam klasifikasi masing-masing Band, Position sesuai dengan jabatan yang disandangnya, dan Performance yaitu kontribusi atau kinerja yang dicapai dalam tahun berjalan.

Dalam menetapkan kebijakan remunerasi, PT INTI (Persero) menggunakan pertimbangan internal dan eksternal perusahaan seperti kondisi Perseroan, rencana jangka panjang perusahaan, dan lingkungan bisnis. Remunerasi yang diberikan berupa kompensasi bulanan, kompensasi tahunan, dan fasilitas bagi karyawan sesuai band dan jabatan masing-masing.

The Company provides compensation for the work done by all employees. The remuneration given to employees is based on the 3Ps, namely Person in accordance with the competence of each employee in their Band, Position according to the position they hold, and Performance, namely the contribution or performance achieved in the current year.

In setting of the remuneration policy, PT INTI (Persero) uses the company's internal and external considerations such as the Company's condition, the company's long-term plans, and the business environment. The remuneration provided is in the form of monthly compensation, annual compensation, and facilities for employees according to their respective bands and positions.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Perseroan berkomitmen untuk memelihara Hubungan Industrial sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang baik, dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya dan terpenuhinya perlindungan terhadap kepentingan, hak, serta kewajiban semua pihak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan maupun antar sesama karyawan, Perseroan bersama dengan Serikat Pekerja INTI (SEJATI) telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditinjau setiap 2 (dua) tahun.

Perusahaan bersama Serikat Pekerja secara berkala melakukan pertemuan baik formal maupun informal dalam upaya membangun dan menjaga komunikasi yang lebih baik. Sepanjang tahun 2021, Perseroan dan Serikat Pekerja telah melakukan beberapa kali pertemuan formal. Melalui serangkaian pertemuan tersebut, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat terbangun lingkungan kerja yang sehat dan konstruktif.

The Company is committed to maintaining Industrial Relations as a good working relationship system, with the aim of ensuring the realization and fulfillment of the protection of the interests, rights, and obligations of all parties in accordance with the applicable laws and regulations.

The Company always places the Labor Union as a partner in building and maintaining harmonious industrial relations in the work environment through regular and continuous communication.

In order to establish a harmonious relationship between management and employees as well as among employees, the Company together with the INTI Workers Union or Serikat Pekerja INTI (SEJATI) have agreed on a Collective Labor Agreement in accordance with the mandate of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is reviewed every 2 (two) years.

The Company and the Labor Union regularly hold formal and informal meetings in an effort to build and maintain better communication. Throughout 2021, the Company and the Labor Union have held several formal meetings. Through this series of meetings, it is hoped that harmonious industrial relations will be created so that a healthy and constructive work environment can be developed.

Sinergi Manajemen dan Serikat Pekerja

Synergy of Management and Labor Union

PT INTI (Persero) menempatkan karyawan sebagai mitra strategis bagi keberlanjutan usaha. PT INTI (Persero) menjamin kebebasan karyawan untuk berserikat, yang merefleksikan kepatuhan Perseroan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh serta *International Labour Organization Convention* 87 yang menjamin kebebasan semua pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar Pekerja dan Perusahaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan semua pihak.

PT INTI (Persero) memiliki 1 (satu) Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja INTI (SEJATI). Untuk menjembatani kepentingan Perseroan dan kepentingan Karyawan, terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan dan SEJATI menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setiap dua tahun dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. PKB berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan karyawan yang mengikat pada kedua belah pihak.

Perseroan menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM. Perseroan memiliki kebijakan rekrutasi, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karir yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Selain itu, pada 30 Desember 2021 telah ditandatangani PKB INTI-SEJATI 2021-2023, yang menunjukkan adanya sinergi yang semakin baik antara manajemen dan Serikat Pekerja.

PT INTI (Persero) places employees as strategic partners for business sustainability. PT INTI (Persero) guarantees the freedom of employees to associate, which reflects the Company's compliance with Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions or Labor Unions and the International Labor Organization Convention 87 which guarantees the freedom of all workers to join professionally managed worker organizations as a means of liaison between Employees and the Company to create harmonious industrial relations and mutually beneficial to all parties.

PT INTI (Persero) has 1 (one) Labor Union named the INTI Workers Union or Serikat Pekerja INTI (SEJATI). To bridge the interests of the Company and the interests of the Employees, especially regarding Human Resources, the Company and SEJATI draw up the Collective Labor Agreement every two years and register it with the Manpower and Transmigration Office. Collective Labor Agreement contains matters related to employee welfare that are binding on both parties.

The Company applies strict and consistent principles of non-discrimination in Human Resource management. The company has a policy of recruitment, performance appraisal, remuneration, and professional career development regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

In addition, in Desember 30, 2021, has been signed Collective Labour Agreement between INTI and SEJATI for 2021-2023, which is shown that there is a better synergy between management and labor unions.

Keterikatan dan Kepuasan Pegawai

Employee Engagement and Satisfaction

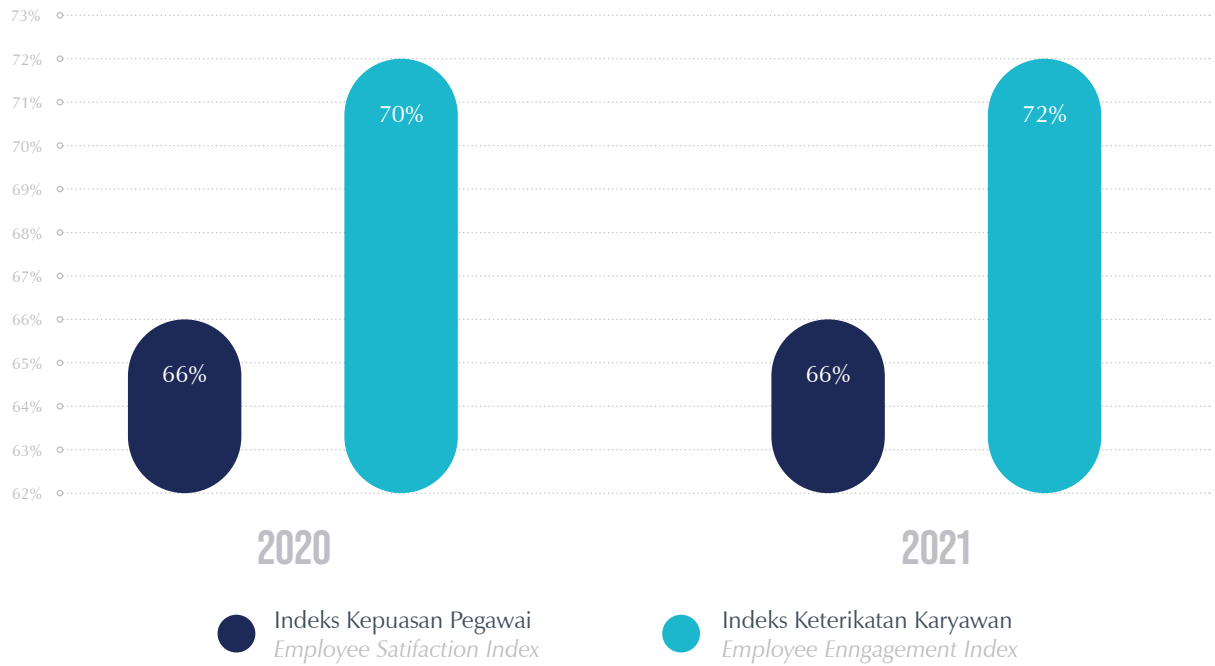
Pada tahun 2021, indeks kepuasan dan keterikatan karyawan menunjukkan stabilitas dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 66% dan 72%.

In 2021, employee satisfaction showed stability from the previous year, which was 66% and 72%.



Profil Perusahaan Company Profile

Indeks Kepuasan dan Keterikatan Pegawai Employee Satisfaction and Engagement Index

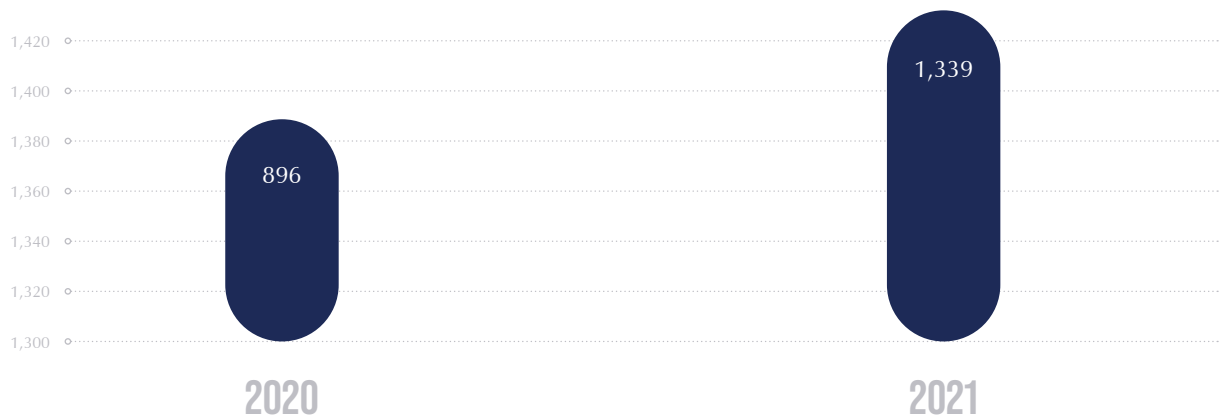


Produktivitas Pegawai Employee Productivity

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis di dalam organisasi, maka peningkatan produktivitas kerja merupakan fokus bagi Perseroan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PT INTI (Persero) mengalami peningkatan produktivitas karyawan, dari Rp1.339 juta per karyawan, menjadi Rp1.404 miliar per karyawan.

Human resources are the most strategic element in the organization, so increasing work productivity is a focus for the Company every year. In 2021, PT INTI (Persero) experienced an increase in employee productivity, from Rp1,339 million per employee, to Rp1,404 billion per employee.

Produktivitas Karyawan (Rp. juta) Employee Productivity (Rp. million)



Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Employment Problem Complaint Mechanism

Apabila terdapat keluhan kesah yang dialami oleh karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan PT INTI (Persero) berhak mengajukan keluhan kesahnya secara berjenjang kepada Atasan Langsung, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama 2019-2020.

Karyawan dapat menyampaikan keluhan kesah atau pernyataan ketidakpuasan terhadap setiap tindakan dan/atau kebijakan Perseroan yang terkait dengan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/atau peraturan kerja.

Setiap atasan atau wakil Perseroan harus memperhatikan secara penuh atas pengaduan karyawan atau bawahannya dan berupaya untuk menyelesaikan secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Keluh Kesah dapat dilakukan secara berjenjang, dengan mekanisme berikut:

1. Penyelesaian keluhan kesah karyawan dibicarakan dan diselesaikan secara lisan atau tulisan dengan Atasan Langsung karyawan.
2. Atasan Langsung harus merespon dan memberikan jawaban tertulis atas penyelesaian keluhan kesah yang disampaikan, jika keluhan kesah tersebut didapatkan penyelesaian, maka para pihak harus segera melaksanakan hasil penyelesaian tersebut.
3. Apabila penyelesaian belum memuaskan, karyawan dapat menyampaikan keluhan kesahnya secara tertulis ke Atasan Lebih Tinggi.
4. Atasan yang Lebih Tinggi harus menjawab secara tertulis atas penyelesaian keluhan kesah disampaikan, jika atas keluhan kesah tersebut didapatkan penyelesaian, maka para pihak harus melaksanakan hasil penyelesaian tersebut.
5. Apabila penyelesaian belum juga memuaskan, karyawan dapat menyampaikan keluhan kesahnya secara tertulis kepada Serikat Pekerja dengan melampirkan bukti penyampaian keluhan kesah untuk diselesaikan secara musyawarah dengan perusahaan.
6. Jika musyawarah dicapai suatu kesepakatan, maka sejak tercapainya kesepakatan para pihak harus melaksanakan keputusan yang telah disepakati.
7. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan keluhan kesah, maka selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PT INTI (Persero) membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal ketenagakerjaan di Perseroan yang pembentukannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

If there are complaints raised by employees in carrying out their work, PT INTI (Persero) employees have the right to submit their complaints in stages to their Direct Superiors, in accordance with the 2019-2020 Collective Labor Agreement.

Employees can submit complaints or statements of dissatisfaction with any actions and/or Company policies related to employment relations, working conditions and/or work regulations.

Every supervisor or representative of the Company must pay full attention to complaints from employees/subordinates and try to resolve them completely in accordance with applicable regulations.

The Procedure for Complaints and Complaints Resolution can be carried out in stages, with the following mechanisms:

1. *Settlement of employee complaints is discussed and resolved orally or in writing with the employee's Direct Supervisor.*
2. *The Direct Supervisor must respond and provide a written answer to the settlement of the complaint submitted, if the complaint is resolved, then the parties must immediately implement the results of the settlement.*
3. *If the settlement is not satisfactory, the employee can submit his complaint in writing to the Higher Superior.*
4. *The Higher Superior must answer in writing for the settlement of the complaint submitted, if the complaint is resolved, then the parties must carry out the results of the settlement.*
5. *If the settlement is not yet satisfactory, the employee can submit his complaint in writing to the Labor Union by attaching proof of the submission of the complaint to be resolved by deliberation with the Company.*
6. *If an agreement is reached by deliberation, then since the agreement is reached, the parties must implement the agreed decision.*
7. *If the deliberation cannot resolve the complaint, then it can then be resolved in accordance with the applicable provisions in the settlement of industrial relations disputes.*

PT INTI (Persero) established a Bipartite Cooperation Institution which serves as a forum for communication, consultation and deliberation on labor matters in the Company whose establishment is based on the prevailing laws and regulations.

Demografi Karyawan

Employee Demography

Sumber daya manusia diyakini merupakan aset utama yang dibutuhkan untuk menjabarkan strategi dan melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Perseroan. Dengan visi Perseroan untuk berperan Menjadi Produsen *Smart Product* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi dan motivasi berprestasi yang tinggi.

Dalam upaya penyediaan sumber daya manusia terhadap kebutuhan bisnis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, Perseroan terus melanjutkan program pengembangan sumber daya manusia secara efektif baik bagi peningkatan *hard competences* maupun *soft competence* yang pada akhirnya dapat berujung pada peningkatan produktivitas setiap individu karyawan.

Pengembangan kompetensi menuju peningkatan produktivitas ini juga didorong secara bersamaan dengan implementasi sistem remunerasi berbasis kinerja atau *Pay for Performances* yang merupakan satu komponen remunerasi karyawan di samping *Pay for Person* dan *Pay for Position*.

Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja Perseroan tercatat sebanyak 236 orang atau berkurang 23% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri atas karyawan tetap, karyawan yang dikontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karyawan entitas anak.

Human resources are believed to be the main assets needed to outline strategies and carry out missions in order to realize the Company's vision. With the Company's vision to play a role the To be the Best Smart Product Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia, the Company requires a workforce with a high level of competence and achievement motivation.

In an effort to provide human resources for business needs, as stated in the Company Work Plan and Budget 2021, the Company continues to develop human resource development programs effectively, both to increase hard competences and soft competencies which in the end can lead to an increase in the productivity of each individual employee.

Competency development towards increasing productivity is also driven simultaneously with the implementation of a performance-based remuneration system or Pay for Performances, which is a component of employee remuneration in addition to Pay for Person and Pay for Position.

In 2021, the Company's workforce was recorded at 236 people or a decrease of 23% compared to the previous year, which consisted of permanent employees, employees who are contracted through a Specific Time Work Agreement, and employees of subsidiaries.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	2021			2020		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Karyawan Tetap <i>Permanent Employees</i>	141	51	192	220	70	290
Karyawan Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>	22	13	35	5	1	6
Direksi, Dewan Komisaris, dan Staff Dewan Komisaris <i>Temporary Employees Board of Directors, Board of Commissioners, and Staff of Board of Commissioners</i>	8	1	9	8	1	9
Total	171	65	236	233	72	305

Sementara itu, berdasarkan usia karyawan, Perseroan terus memperbanyak karyawan di rentang usia di bawah usia 40 tahun, yang memiliki etos kerja tinggi, inovatif, dan produktif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah karyawan di bawah usia 40 tahun, dari 40% pada tahun 2020, menjadi 87% pada tahun 2021. Komposisi karyawan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Meanwhile, based on the age of the employees, the Company continues to increase the number of employees under the age of 40 years, who have a high work ethic, innovative, and productive. This is shown by increasing the number of employees under the age of 40 years, from 40% in 2020, to 87% in 2021. The composition of employees based on age is as follows:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Table of Employee Composition by Age Range

Rentang Usia <i>Age Range</i>	2021			2020		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
21-25	83	9	92	1	1	2
26-30	6	8	14	18	16	34
31-35	18	15	33	35	26	61
36-40	33	25	58	16	4	20
41-45	16	6	22	2		2
46-50	4	-	4	12	3	15
>50	3	1	4	141	21	162
Total	163	64	227	225	71	296

Berikut merupakan sebaran tingkat pendidikan pada tahun 2021, yang menunjukkan ada penurunan pada hampir seluruh tingkat pendidikan.

The following is the distribution of education levels in 2021, which shows a decline in almost all levels of education.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table of Employee Composition by Education Level

Pendidikan <i>Education</i>	2021			2020		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
SLTA	43	7	50	87	16	103
DIPLOMA	17	4	21	18	7	25
S1/D4	85	49	134	100	43	143
S2	16	4	20	18	5	23
S3	2		2	2		2
Total	163	64	227	225	71	296

Profil Perusahaan

Company Profile

Berikut merupakan komposisi Karyawan berdasarkan level jabatan pada tahun 2021, yang menunjukkan ada penurunan jumlah pada hampir seluruh level jabatan.

The following is the composition of employees based on position level in 2021, which shows a decrease in the number of employees at almost all levels.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Table of Employee Composition by Position Level

Level Jabatan <i>Position Level</i>	2021			2020		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Band 5	15	3	18	18	2	20
Band 4	56	17	73	70	18	88
Band 3	40	18	58	69	25	94
Band 2	52	25	77	68	26	94
Band 1	0	1	1	0	0	0
Total	163	64	227	225	71	296

Berikut merupakan komposisi karyawan berdasarkan jabatan pada tahun 2021, yang menunjukkan ada penurunan jumlah karyawan pada jabatan keahlian dan staf.

The following is the composition of employees based on position in 2021, which shows a decrease in the number of employees in expertise and staff positions

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Table of Employee Composition by Position

Jabatan <i>Position</i>	2021			2020		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Vice President	8	2	10	9	1	10
Manager	26	13	39	27	13	40
Keahlian	30	6	36	48	6	54
Proyek	14	3	17	0	0	0
Staf	71	35	106	112	47	159
Tidak Aktif*	14	5	19	29	4	33
Total	163	64	227	225	71	296

***Tidak Aktif:** Karyawan berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP), Karyawan berstatus Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan (CLTP), dan Karyawan yang mengikuti Program Dirumahkan.

*Inactive: Employees with Retirement Preparation Period (MPP) status, Employees with Non-Company Leave (CLTP) status, and Employees participating in the Dismissed Program.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Training and Development Program

Dalam menunjang pencapaian target-target Perseroan serta meningkatkan kesesuaian kapasitas dan kapabilitas karyawan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan dan kompetensi karyawan, Perseroan menyelenggarakan beberapa program pelatihan *inhouse* dan *public training*, serta sertifikasi yang telah dan sedang dilaksanakan.

Tantangan bisnis dan perkembangan teknologi menuntut penyesuaian dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sehingga karyawan harus selalu dikembangkan agar memiliki kompetensi unggul di bidang kepemimpinan ataupun teknis sesuai arah bisnis Perseroan.

Perseroan juga memastikan bahwa kompetensi kunci dipelajari dan dimiliki oleh karyawan agar hasil pembelajaran dapat membawa kontribusi bagi Perseroan. Pada tahun 2021, Perseroan mengalokasikan biaya seminar dan pelatihan sebesar Rp. 450.380.000 dan dikarenakan terdapat pandemi Covid-19, maka Perseroan mengadakan pengembangan kompetensi karyawan melalui media online maupun *in house* terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.

Berikut merupakan pengembangan karyawan selama tahun 2021 berdasarkan Jenis Pengembangan:

In supporting the achievement of the Company's targets and increasing the suitability of employee capacity and capability with the Company's business needs and employee competence, the Company organizes several in-house and public training programs, as well as certifications that have been and are being implemented.

Business challenges and technological developments require continuous adjustment and improvement of competencies so that employees must always be developed so that they have superior competencies in leadership or technical fields according to the Company's business direction.

The Company also ensures that key competencies are learned and possessed by employees so that learning outcomes can bring positive contributions to the Company. In 2021, the Company budgeted seminar and training costs of Rp450,380,000 and due to the pandemic of Covid-19, the Company conducted employee competency development through limited online and in-house media with strict health protocols.

The following is employee development during 2021 by Type of Development:

No.	Jenis Pengembangan <i>Type of Development</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
1	Knowledge Sharing	1336
2	Pelatihan <i>Training</i>	101
3	Seminar	13
4	Sertifikasi <i>Certification</i>	7
5	Workshop	57
Total		1514

Profil Perusahaan

Company Profile

Berikut merupakan daftar pengembangan sumber daya manusia selama tahun 2021 berdasarkan Jenis Kompetensi:

The following is a list of human resource development during 2021 by Type of Competence:

No.	Nama Pengembangan <i>Development Name</i>	Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Types of Human Resource Development</i>	Jenis Kompetensi <i>Type Competence</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	<i>BUMN Digital Behavior & Mindset</i>	Workshop	<i>Innovation & Process Improvement</i>	4
2	Forum Ekselen BUMN <i>Business Analytics</i>	Workshop	<i>Business Awareness</i>	3
3	Forum Ekselen BUMN <i>Digital Disruption</i>	Workshop	<i>Business Awareness</i>	3
4	Peran SPI dalam Mendukung Perusahaan	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Internal Audit</i>	49
5	Penyusunan <i>Strategy</i> untuk <i>Corporation</i>	Workshop	<i>Strategic Orientation</i>	1
6	<i>Certified Professional in Log Man</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	<i>Logistic</i>	1
7	Pengenalan <i>Internet of Things</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Information System</i>	59
8	<i>Business Model Canvas</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Business Awareness</i>	69
9	<i>Marketing Fundamental</i>	Workshop	<i>Marketing Management</i>	25
10	<i>Intrapreneur Fundamental</i>	Workshop	<i>Innovation & Process Improvement</i>	5
11	<i>Business Analytics Insights</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Business Awareness</i>	58
12	<i>BUMN Digital Academy Insights</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Innovation & Process Improvement</i>	56
13	Hubungan Industrial	Pelatihan <i>Training</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia	1
14	Skema Pengelolaan <i>Human Capital</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
15	Metode Penyusunan Maps	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Marketing & Sales</i>	51
16	<i>Data Science</i>	Seminar	<i>Information System</i>	1
17	Maksimal Peran Media dalam <i>Crisis Communication</i>	Seminar	<i>Corporate Communication</i>	4
18	<i>Digital Disruption Insights</i>	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Business Awareness</i>	61
19	<i>Calibration & Maintenance for The Ats</i>	Workshop	<i>Maintenance</i>	5
20	<i>PCBA Testing & Fault Diagnostics (Ats)</i>	Workshop	<i>Maintenance</i>	5
21	<i>Qualified Risk Management Officer</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	<i>Risk Management</i>	2
22	Membedah Peluang Pemasaran Produk INTI	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Marketing Management</i>	75
23	Pengenalan Produk INTI	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Product Knowledge</i>	55
24	Vaksinasi dan Pandemi Covid-19	<i>Knowledge Sharing</i>	<i>Corporate Communication</i>	48

25	PR Trends & Outlook 2021	Seminar	Corporate Communication	1
26	Jurus Anti Halu, Generasi Digital	Seminar	Corporate Communication	1
27	Mewujudkan Protokol Zaman Now	Seminar	Corporate Communication	1
28	Keterbukaan Info Daan Barang & Jasa	Seminar	Corporate Communication	1
29	Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan	Seminar	Corporate Communication	1
30	Perlukah Sertifikasi Profesi PPID?	Seminar	Corporate Communication	1
31	Menyiapkan Badan Publik Monev KIP	Seminar	Corporate Communication	1
32	Transfer Teknologi Oerlikon Skyshiled	Knowledge Sharing	Maintenance	73
33	Maintenance & Repair Cap Oerlikon	Workshop	Maintenance	5
34	FGD KS Logistik, Transport, & Gudang	Seminar	Logistic	1
35	K3 Penunjang Produktivitas Karyawan	Knowledge Sharing	K3	66
36	Ahli Teknik Jembatan Madya	Sertifikasi Certification	Konstruksi & Sipil	1
37	Finance for Non Finance Manager	Knowledge Sharing	Finance	81
38	Peluang Implementasi IoT di Indonesia	Knowledge Sharing	Information System	81
39	5G Use Case Solution	Knowledge Sharing	Telecommunication	62
40	Indonesia Capital Market Introduction	Knowledge Sharing	Finance	68
41	Pelatihan Antikorupsi	Workshop	GCG Knowledge	1
42	Ahli Sistem Manajemen Mutu Madya	Sertifikasi Certification	Manajemen Mutu	1
43	Ahli Teknik Jalan Rel Madya	Sertifikasi Certification	Konstruksi dan Sipil	1
44	Cyber Security Awareness	Knowledge Sharing	Information System	72
45	Orientasi Karyawan	Pelatihan Training	Leadership of Change	16
46	Logistics Management Insights	Knowledge Sharing	Logistic	87
47	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Sertifikasi Certification	K3	1
48	Public Relation Insights	Pelatihan Training	Corporate Communication	82
49	Sertifikasi TKDN Sebagai Bagian dari Strategi Perusahaan	Knowledge Sharing	Product Knowledge	55
50	Risk Management in Sharia Banking & Produk BSI	Knowledge Sharing	Risk Management	51
51	Sosialisasi Aplikasi WBS KPK	Knowledge Sharing	GCG Knowledge	59
Total				1.514

**Profil Perusahaan***Company Profile*

Pada tahun 2022, Perusahaan merencanakan untuk melakukan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

In 2022, the Company plans to develop the following competencies

Fungsi Bisnis <i>Business Function</i>	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Deployment	X	X	X	
Human Capital Management		X	X	X
Information Technology	X	X	X	X
Internal Audit	X		X	
Leadership			X	
Operation	X			
Production		X		
Quality Management		X		X
Sales & Marketing		X		

Rencana pengembangan kompetensi tersebut akan dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, seminar, maupun melalui online platform yang dimiliki oleh Perusahaan.
The competency development plan will be carried out through training, certification, seminars, as well as through the Company's online platform.

Rencana pengembangan kompetensi tersebut akan dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, seminar, maupun melalui online platform yang dimiliki oleh Perusahaan.

The competency development plan will be carried out through training, certification, seminars, as well as through the online platform owned by the Company

Informasi Pemegang Saham & Obligasi

Information for Shareholders and Bondholders

Komposisi Kepemilikan Saham

Composition of Share Ownership

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara dengan saham 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia is a State-Owned Enterprise with 100% shares owned by the Republic of Indonesia.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Share Listing

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak mencatatkan efek lainnya pada Bursa Efek Indonesia. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan efek lainnya, tingkat bunga atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, serta jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya tidak tersedia.

Until December 31, 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is not listed at The Indonesia Stock Exchange. Therefore, the chronological information on share listing, interest rates of other share listing, other maturity date other share listing, and the type of corporate actions which cause any changes to the number of other shares is not available. Nor on suspension and delisting of corporate shares.

Kronologis Pencatatan Saham dan Aksi Korporasi

Chronology of Share Listing and Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan *Non-Listed* sehingga belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan tidak menjual sahamnya kepada publik.

Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi mengenai nama bursa saham, jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham, volume perdagangan saham, dan aksi korporasi yang terkait saham. Selain itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham juga tidak tersedia.

Until 31 December 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) constitutes a Non-Listed Company so that it has yet been listed on the Stock Exchange and does not sell its shares to public.

Therefore, there is no information on the stock exchange name, the number of shares outstanding, market capitalization, stock price, and trading volume as well as corporate action regarding shares. The chronological information on share listing and the type of corporate actions which cause any changes to the number of shares is not available.



Profil Perusahaan

Company Profile

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

*Action of Temporary Suspension of Stock
Trading (Suspension) and/or Delisting of
Shares*

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Until December 31, 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) has never been subject to sanctions for temporary suspension of stock trading and/or delisting of shares.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/ atau Obligasi Konversi

*Information regarding to Bonds, Sukuk,
and/or Convertible Bonds*

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi, sukuk, atau obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga atau imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi atau sukuk.

Until December 31, 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) does not issue bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, there is no information regarding to bonds, sukuk, or convertible bonds outstanding, coupon, due dates, and ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

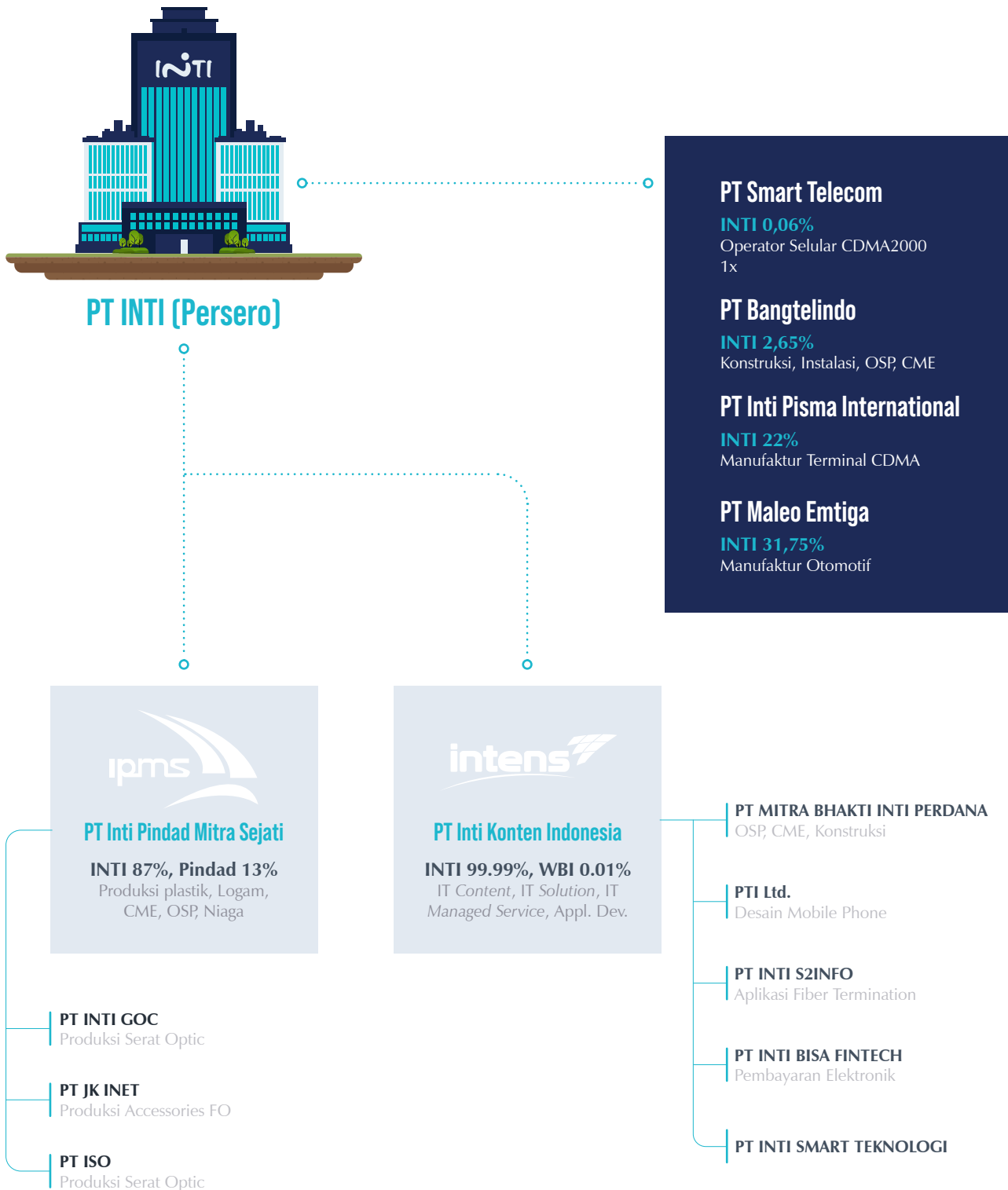
Information on Other Source of Funding

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak memiliki pendanaan lainnya yang bersumber dari publik.

Until December 31, 2021, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) does not collect other source of public funding.

Struktur Grup Perusahaan

Structure of Company Group





Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and/or Associated Entities



PT INTI Pindad Mitra Sejati (PT IPMS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTI Pindad Mitra Sejati Nomor 20 tertanggal 21 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21806.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 5 Agustus 2005, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tertanggal 20 Maret 2007.

Based on the Deed of Company Limited PT INTI Pindad Mitra Sejati Number 20, dated March 21, 2005 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number C-21806.HT.01.01.TH.2005, dated August 5, 2005 as publicly notified in State News of Republic of Indonesia Number 23 dated March 20, 2007.

Bidang Usaha *Line of Business*

Produksi Plastik, Produksi Logam, SITAC, Civil Mechanical Electrical (CME), dan Out Site Plan.
Production of Plastic, Metal Production, SITAC, Civil Mechanical Electrical (CME) and Out Site Plan.

Kondisi Perusahaan : Beroperasi
Company Condition: Operating

Komposisi Saham *Composition of Shares*

- PT INTI (Persero) 86,15% = Rp. 16.800.582.000,-
- PT Pindad (Persero) 13,85% = Rp. 2.700.000.000,-
Jumlah 100% = Rp. 19.500.582.000,-
- PT INTI (Persero) 86.15% = Rp. 16,800,582,000.-
- PT Pindad (Persero) 13.85% = Rp. 2,700,000,000.-
Total 100% = Rp. 19,500,582,000.-



PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTI Konten Indonesia dengan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., MKn Nomor 52 tertanggal 11 Mei 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010, tertanggal 9 Pebruari 2010.

Based on the Deed of Company Limited PT INTI Konten Indonesia by Notary Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Number 52, dated May 11, 2010 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-10.AH.02.02-Year 2010, dated February 9, 2010.

Bidang Usaha *Line of Business*

Jasa Pelaksana Teknologi

- Out Site Plan
- Civil Mechanical Electrical (CME)
- Jasa Instalasi Perangkat
- Maintenance dan Manage Service
- Software Development
- Content Management

Technology Implementation Services

- Out Site Plan
- Civil Mechanical Electrical (CME)
- Hardware Installation Services
- Maintenance and Manage Service
- Software Development
- Content Management

Kondisi Perusahaan : Beroperasi

Company Condition: Operating

Komposisi Saham *Composition of Shares*

Modal dasar Perseroan sebesar Rp20 miliar, terbagi atas 20 juta lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu rupiah), dengan komposisi :

- PT INTI (Persero) = **Rp. 19.999.999.000,- (Modal disetor Rp. 10M)**

- PT Widya Bhakti INTI = Rp. 1.000,-
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% atau sejumlah Rp10 miliar.

Company's authorized capital of Rp20 billion, divided into 20 million shares, each share has a nominal value of Rp1,000.- (one thousand rupiah), with the composition:

- PT INTI (Persero) = **Rp. 19,999,999,000.- (Paid-in capital Rp. 10M)**

- PT Widya Bhakti INTI = Rp. 1,000,-
Of the authorized capital has been subscribed and paid up by 50% or Rp10 billion.

Profil Perusahaan

Company Profile

Perusahaan Patungan

Joint Venture

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (BANGTELINDO)

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) berdiri sejak tahun 1995 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah. Kepemilikan saham PT INTI (Persero) pada Bangtelindo adalah senilai 2,65% sejak Juli 2007.

Kondisi Perusahaan

Beroperasi

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom (sebelumnya bernama PT Indoprima Mikroselindo atau Primasel) didirikan pada tahun 1996, merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah. Keikutsertaan PT INTI (Persero) dilatarbelakangi oleh keberhasilan Perseroan dalam menguasai dan mengembangkan sistem telekomunikasi cordless dengan teknologi *Personal Handyphone System* (PHS). Kepemilikan Perseroan pada PT Smart Telecom saat ini sebesar 0,19%.

Kondisi Perusahaan

Beroperasi

PT INTI Pisma Indonesia

Pada tahun 2007 Perseroan berinvestasi pada saham PT INTI Pisma International (IPI), suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi pesawat telepon tanpa kabel dan perdagangan umum, dengan kepemilikan saham sebesar 22%.

Kondisi Perusahaan

Tidak Beroperasi

PT Maleo Emtiga

PT Maleo Emtiga merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur otomotif, dengan kepemilikan saham sebesar 31,75%.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-83/MK.016/1997 tertanggal 6 Februari 1997, jumlah penyertaan Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

1. RUPS pada 18 April 1996 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1995, penyertaan Perusahaan adalah sebesar Rp10.000.000.000.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (BANGTELINDO)

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) was founded in 1995 and is engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system. PT INTI (Persero)'s shares on Bangtelindo is valued at 2.65% since July 2007.

Company Condition

Operating

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom (formerly PT Indoprima Mikroselindo or Primasel) was founded in 1996, is a company engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network systems. PT INTI (Persero)'s participation was motivated by the Company's success in mastering and developing a cordless telecommunications system with *Personal Handyphone System* (PHS) technology. The Company's current ownership in PT Smart Telecom is 0,19%.

Company Condition

Operating

PT INTI Pisma Indonesia

In 2007, the Company invested in PT INTI Pisma International (IPI), a company engaged the production of perangkat Code Division Multiple Access (CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), and other devices, with 22% share ownership.

Company Condition

Not Operating

PT Maleo Emtiga

PT Maleo Emtiga is a company engaged in automotive manufacturing, with a share ownership of 31.75%.

Based on the letter of the Minister of Finance Number S-83/MK.016/1997 dated February 6, 1997, the Company's total investment is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) as follows:

1. GMS dated April 18, 1996 concerning the Ratification of Results of Business Activities in 1995, the Company's investment is Rp10,000,000,000.

2. RUPS pada 7 November 1996 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 1997, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp15.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp25.000.000.000.
3. RUPS pada 4 Maret 1997 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1996, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp5.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp30.000.000.000.

Kondisi Perusahaan

Tidak Beroperasi

2. *GMS dated November 7, 1996 concerning the Ratification of the Company's 1997 Work Plan and Budget, the Company added an investment in shares of Rp15,000,000,000, so that the value of the investment in the Company's shares became Rp25,000,000,000.*
3. *GMS dated March 4, 1997 concerning the Ratification of Results of Business Activities in 1996, the Company added an investment in shares of Rp5,000,000,000, so that the value of the investment in shares of the Company became Rp30,000,000,000.*

Company Condition

Not Operating



Alamat Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Address of Subsidiaries and/or Associated Entities

PT INTI Pindad Mitra Sejati (PT IPMS)

Alamat

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero) Lantai 4
Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Address

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero) 4th Floor
Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Website

<http://www.ipms.co.id>



PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS)

Alamat

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), lantai 2
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung 40253

Address

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), 2nd floor
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung 40253

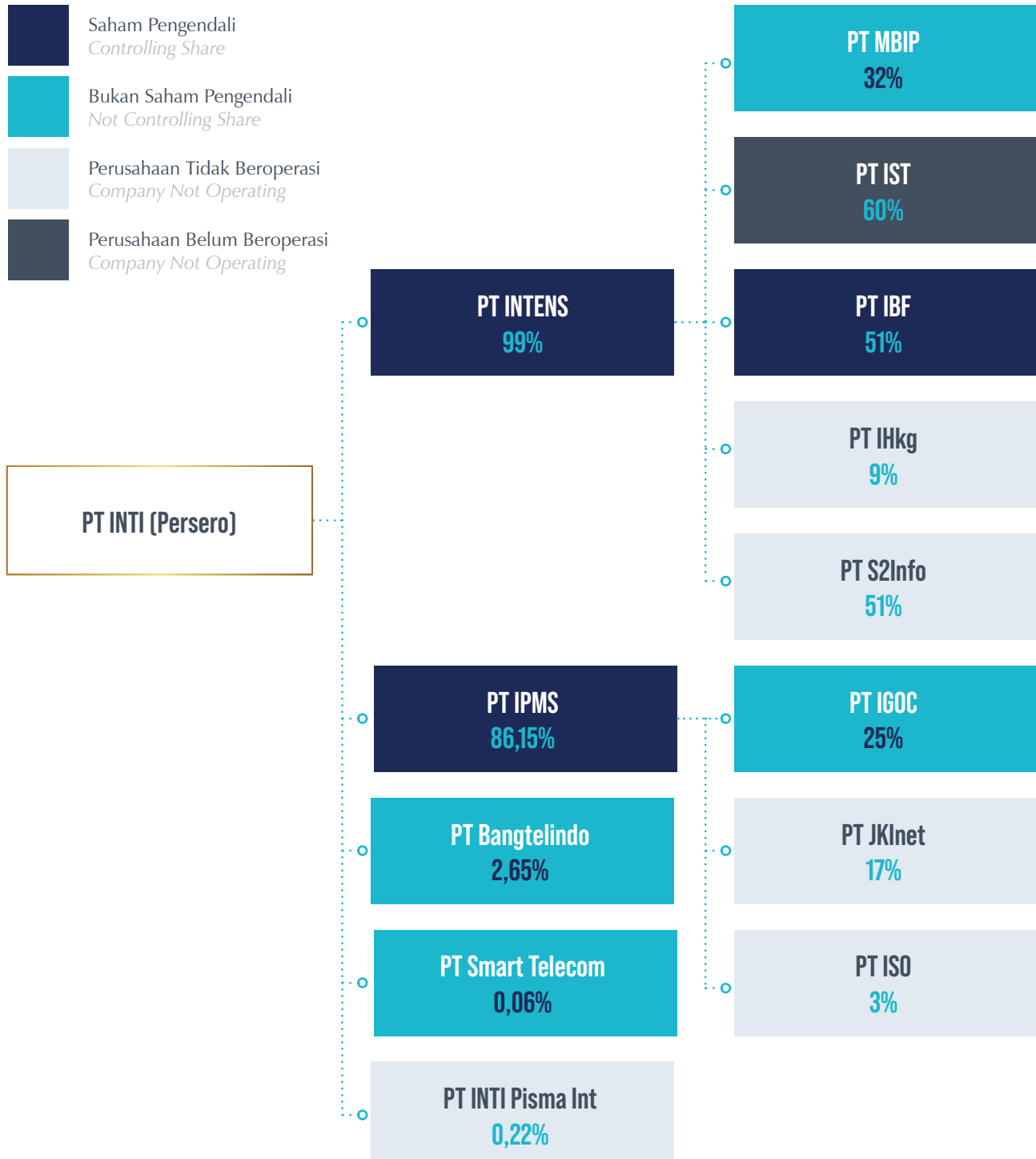
Website

<http://www.intens.co.id>



Pemegang Saham Utama, Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Major Shareholder, Subsidiaries & Associates





Jejak Langkah

Milestones



2020-2025

Fokus Portfolio MSDM

- *Manufacture & Assembly*
- *System Integrator*
- *Digital Service*
- *Managed Service*

Portfolio Focus MSDM

- *Manufacture & Assembly*
- *System Integrator*
- *Digital Service*
- *Managed Service*

2002-2019

Fokus sebagai Sistem Integrator

- *Jasa instalasi, pengujian, dan commissioning jaringan telekomunikasi seluler.*
- *Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal.*
- *Layanan Outside Plant (OSP).*
- *Jaringan Telekomunikasi Swasta sebagai alat komunikasi industri pertahanan.*

Focus as System Integrator

- *Installation services, test, and commissioning of cellular telecommunications networks.*
- *Civil, Mechanical, and Electrical (CME).*
- *Outside Plant (OSP) Service.*
- *Private Telecommunications Network as a defence industry communication tools.*

1989-2002

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis, di bawah pengelolaan Badan Pengelola Industri Strategis berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.

Lalu, pada 17 Januari 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola BUMN.

Pada tahun yang sama, Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) beralih status menjadi sebuah holding company dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS, dan sepuluh BUMN strategis, termasuk PT INTI (Persero) berada di bawahnya menjadi anak perusahaan.

Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, saat PT BPIS dibubarkan pada Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan PT Len Industri, serta Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Selanjutnya pengelolaan PT INTI (Persero) beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Based on the Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises (SOEs) Number 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) was included in the Strategic Industry group, under the management of the Strategic Industry Management Agency based on Presidential Decree Number 44 of 1989 concerning the Strategic Industry Management Agency.

Then, on January 17, 1998, a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 was issued concerning Limited Liability Companies (Persero) which eliminated the role of the technical department in managing SOEs.

In the same year, the Strategic Industry Management Agency (BPIS) changed its status to a holding company under the name PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) or PT BPIS, and ten strategic SOEs, including PT INTI (Persero) under it became subsidiaries.

This condition ended in 2002, when PT BPIS was dissolved in March 2002 pursuant to Government Regulation Number 52 of 2002 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, and PT Len Industri, as well as the Dissolution of the Company (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Furthermore, the management of PT INTI (Persero) shifted back to the State Ministry for the Utilization of SOEs.

1966-1989

Fokus sebagai Perusahaan Manufaktur

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel) pada tahun 1968.

Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pendirian Perseroan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Bidang usaha PT INTI (Persero) kala itu meliputi produk-produk Radio Sonde, radio High Frequency (HF), radio Very High Frequency (VHF), pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa.

Produk stasiun bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan PT INTI (Persero) dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar Rp24,3 milyar pada tahun 1981. Fasilitas produksi yang dimiliki PT INTI (Persero) pada periode itu antara lain:

- Pabrik Perakitan Telepon
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi
- Pabrik Mekanik dan Plastik
- Laboratorium Software Komunikasi Data (PACKSATNET) bekerja sama dengan Logitech.

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain:

- Bidang Sentral dengan Siemens AG.
- Bidang Transmisi dengan Japan Radio Company.
- Bidang Civil, Mechanical, and Electrical (CME) dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, dan Tatung TEL.

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan PT INTI (Persero) adalah Produk Sentral.

Pada era ini, PT INTI (Persero) memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu:

- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Focus as Manufacture Company

The company was founded as an evolution of the cooperation between PN Telekomunikasi and Siemens AG in 1966. This cooperation continued in the establishment of the Telephone and Telegraph Factory as part of the Research and Development Institute for Post and Telecommunications in 1968.

In 1974, this section was separated from the Research and Development Institute for Post and Telecommunications into a Limited Liability Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. Establishment of the Company based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 1974 dated September 23, 1974 concerning Deposit of State Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Telecommunications Industry and Financial Decree of the Republic of Indonesia Number KEP-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 concerning Determination of the Company's Company Capital.

PT INTI (Persero) was officially established on December 30, 1974. PT INTI (Persero)'s line of business at that time includes radio sonde products, High Frequency (HF) radios, Very High Frequency (VHF) radios, telephone sets, and earth stations for communication systems. Domestic Satellite (SKSD) Palapa.

This last-named earth station product made history in the development of PT INTI (Persero) by contributing to the highest sales achievement in this period, which amounted to Rp24.3 billion in 1981. Production facilities owned by PT INTI (Persero) in this period included other:

- Phone Assembly Factory
- Transmission Equipment Assembly Plant
- Mechanical and Plastic Factory
- Data Communication Software Laboratory in collaboration with Logitech.

Some of technology collaborations that took place during this period were as follows:

- Switching sector with Siemens AG.
- Transmission sector with Japan Radio Company.
- Civil, Mechanical, and Electrical (CME) sector with Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, and Tatung TEL.

Among the three product categories, Switching made the biggest contribution to PT INTI (Persero)'s sales.

During this period, PT INTI (Persero) acquired a considerable reputation and reached several major achievements, including:

- Pioneering the digitisation of telecommunications systems and networks in Indonesia.
- Succeeding in the telephone automation project across all Indonesian regency capitals and sub-district capitals (together with Telkom).

Penghargaan, Sertifikasi, dan Lisensi

Awards, Certifications and Licenses

Sertifikasi

Certification

ISO 9001:2015



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Mutu

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 sebagai pengganti ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

1. **Manufacture and Assembly**
Serat Optik, perangkat Smart Energy, tabung Liquid Petroleum Gas Composite, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.
2. **Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, dan Share Service Operation.
3. **Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. **System Integrator**
Fiber to the Home (FTTH), Outside Plant (OSP) Penerangan Jalan Umum (PJU), Building Energy Management System atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services
Nomor sertifikat QSC 01480
Mulai berlaku 16 Agustus 2017
Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Quality Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 9001:2015 requirements as replacement to ISO 9001:2015 with the scope of certification as follow:

1. **Manufacture and Assembly**
Fibre Optic, Smart Energy Device, Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.
2. **Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, and Share Service Operation.
3. **Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, and Electronic Based Governance System.
4. **System Integrator**
FTTH (Fiber to the Home), Outside Plant (OSP) Public Street Lighting, Building Energy Management System or Solar Power Plant, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Awarder Sucofindo International Certification Services
Certificate number QSC 01480
Valid from August 16, 2017
Valid through August 15, 2023



ISO 45001:2018

Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Mutu

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

1. **Manufacture and Assembly**
Serat Optik, perangkat Smart Energy, tabung Liquid Petroleum Gas Composite, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.
2. **Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, dan Share Service Operation.
3. **Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. **System Integrator**
Fiber to the Home (FTTH), Outside Plant (OSP) Penerangan Jalan Umum (PJU), Building Energy Management System atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services
Nomor sertifikat QSC 01480
Mulai berlaku 16 Agustus 2017
Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Quality Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 45001:2018 with the scope of certification as follow:

1. **Manufacture and Assembly**
Fibre Optic, Smart Energy Device, Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.
2. **Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, and Share Service Operation.
3. **Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, and Electronic Based Governance System.
4. **System Integrator**
FTTH (Fiber to the Home), Outside Plant (OSP) Public Street Lighting, Building Energy Management System or Solar Power Plant, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Awarder Sucofindo International Certification Services
Certificate number QSC 01480
Valid from August 16, 2017
Valid through August 15, 2023

ISO 14001:2015



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Lingkungan

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 14001:2015 sebagai pengganti ISO 14001:2004 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

- 1. Manufacture and Assembly**
Serat Optik, perangkat Smart Energy, tabung Liquid Petroleum Gas Composite, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.
- 2. Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, dan Share Service Operation.
- 3. Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 4. System Integrator**
Fiber to the Home (FTTH), Outside Plant (OSP) Penerangan Jalan Umum (PJU), Building Energy Management System atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services
Nomor sertifikat EMS 00270
Mulai berlaku 24 September 2020
Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Environment Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 14001:2015 requirements as replacement to ISO 14001:2004 with the scope of certification as follow:

- 1. Manufacture and Assembly**
Fibre Optic, Smart Energy Device, Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), Electronic Data Capture (EDC), Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), Over the Top (OTT) Box, e-KTP Reader, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.
- 2. Manage Service**
Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, Spare Part Management System, Seat Management, and Share Service Operation.
- 3. Digital Service**
E-Commerce SIPLah, Smart Hospital Management System, Big Data Analytic, Internet of Things, Cyber Defence, and Electronic Based Governance System.
- 4. System Integrator**
FTTH (Fiber to the Home), Outside Plant (OSP) Public Street Lighting, Building Energy Management System or Solar Power Plant, Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Awarder Sucofindo International Certification Services
Certificate number EMS 00270
Valid from September 24, 2020
Valid through August 15, 2023



Profil Perusahaan

Company Profile



CIQS 2000:2018

Pengertian Sertifikasi: Jaringan Akses Telekomunikasi

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah mengimplementasikan standar sistem mutu jaringan akses telekomunikasi yang memenuhi *Cable Implementation Quality System 2000:2018* sebagai pelaksana bidang pabrikaan, distributor, dan kontrak (Jaringan Lokal Akses Tembaga, Jaringan Lokal Akses Fiber Optik, dan Jaringan Lokal Akses Radio).

Badan pemberi Telkom Professional Certification Center

Nomor sertifikat TCIQS99191

Mulai berlaku 4 September 2017

Berlaku sampai dengan 25 November 2023

Certification Definition: Telecommunication Access Network

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented telecommunication access network quality system that complies with Cable Implementation Quality System 2000:2018 as an implementor of the field of manufacturers, distributors, and contracts (Copper Local Access Network, Fiber Optic Local Access Network, and Radio Local Access Network).

Awarder Telkom Professional Certification Center

Certificate number TCIQS99191

Valid from September 4, 2017

Valid through November 25, 2023

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bendera Emas



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 85,00% untuk kategori Tingkat Lanjutan.

Badan pemberi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

Mulai berlaku 17 September 2020

Berlaku sampai dengan 17 September 2023

Certification Definition: Occupational Health and Safety Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Occupational Health and Safety Management System with audit result of 85% for Advanced Level category.

Awarder Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Valid from September 17, 2020

Valid through September 17, 2023

Profil Perusahaan

Company Profile



ISO 37001:2016

Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Badan pemberi Garuda Sertifikasi Indonesia
Nomor sertifikat G.05-ID0190-XII-2020
Mulai berlaku 22 Desember 2020
Berlaku sampai dengan 21 Desember 2023

Certification Definition: Anti-Bribery Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented an Anti-Bribery Management System that complies with the requirements of SNI ISO 37001:2016. The implementation of the Anti-Bribery Management System is an effort to prevent and eradicate corruption within the company, as a follow-up to Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Corruption Prevention and Eradication Actions.

Awarder Garuda Sertifikasi Indonesia
Certificate number G.05-ID0190-XII-2020
Valid from December 22, 2020
Valid through December 21, 2023

Penghargaan

Awards

Zero Accident Award



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Kecelakaan Nihil

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 21.060.125 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2020.

Badan pemberi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Tanggal penganugerahan 22 April 2021

Award Definition: Zero Accident Award

The award to PT INTI (Persero) for its achievement in implementing the occupational health and safety (K3) program so as to reach 21.060.125 man hours without any work accident, from Januari 01, 2010 to December 31, 2020.

Awarder Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Award date April 22, 2021



Satyalancana Wira Karya

Pengertian Penghargaan: Satyalancana Wira Karya

Penghargaan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Vice President Sekretaris Perusahaan & Perencanaan Strategis Rizqi Ayunda Pratama. Dikutip dari salinan Keputusan Presiden Nomor 101/TK/TAHUN 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, para penerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ini dianggap telah berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Hingga tahun 2021, telah ada sejumlah 56 pegawai PT INTI (Persero) yang menerima penghargaan ini.

Badan pemberi Presiden Republik Indonesia
Tanggal penganugerahan 20 September 2021

Award Definition: Satyalancana Wira Karya

The Satyalancana Wira Karya award was given to the Vice President Corporate Secretary & Strategic Planning Rizqi Ayunda Pratama. Quoted from a copy of Presidential Decree Number 101 / TK / YEAR 2021 concerning the Awarding of the Satyalancana Wira Karya Award, the recipients of this award from the President of the Republic of Indonesia are considered to have contributed to the state and society in providing great service to the state and nation of Indonesia so that they can be used as role models. for others.

Until 2021, there have been a number of 56 employees of PT INTI (Persero) who have received this award.

Awarder President of the Republic of Indonesia
Award date September 20, 2021

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik



Pengertian Penghargaan: Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Berkualifikasi “Informatif” dengan skor sebesar 93,51 diberikan kepada PT INTI (Persero) setelah serangkaian proses *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) 2021 oleh Komisi Informasi Pusat selama tiga bulan, *Self-Assessment* Kuesioner melalui aplikasi online, dan Pendalaman Materi melalui Presentasi Video Inovasi Pelayanan Publik yang digelar secara virtual.

Selain tahapan tersebut, PT INTI (Persero) pun melakukan berbagai pembenahan secara menyeluruh pada semua kanal informasi yang menjadi akses pelayanan secara offline dan online, serta melakukan inovasi, improvisasi, dan kolaborasi digital yang diperlukan saat pandemi.

Badan pemberi Komisi Informasi Pusat
Tanggal penganugerahan 26 Oktober 2021

Award Definition: Public Information Disclosure Award

The Public Information Disclosure Award as a Qualified Public Agency “Towards Informative” with a score of 93,51 was given to PT INTI (Persero) after a series of 2021 Monitoring and Evaluation (Monev) processes by the Central Information Commission for three months, Self-Assessment Questionnaires through the application online, and material deepening through a virtual public service innovation video presentation.

In addition to these stages, PT INTI (Persero) also carried out various comprehensive improvements to all information channels that became access to offline and online services, as well as made innovations, improvisations, and digital collaborations needed during the pandemic.

Awarder Central Information Commission
Award date October 26, 2021



Profil Perusahaan

Company Profile



Penghargaan Atas Partisipasi dalam Penanggulangan Covid-19

Pengertian Penghargaan: Penghargaan Atas Partisipasi dalam Penanggulangan Covid-19 Berupa Program Vaksinasi untuk Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Piagam Penghargaan Bupati Bandung diberikan kepada PT INTI (Persero) karena PT INTI (Persero) sebagai salah satu BUMN di Kota Bandung yang ikut berpartisipasi dalam Penanggulangan Covid-19 Berupa Program Vaksinasi untuk Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Badan pemberi Bupati Bandung
Tanggal penganugerahan 12 November 2021

Award Definition: Award for Participation in Covid-19 Response in the form of a Vaccination Program for the Community in Bandung Regency in 2021.

The Bandung Regent Award Charter was given to PT INTI (Persero) because PT INTI (Persero) as one of the SOEs in the City of Bandung participated in the Covid-19 Response in the form of a Vaccination Program for the Community in Bandung Regency in 2021.

Awarder Bandung Regent
Award date November 12, 2021

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on Company Websites

Sebagai bentuk implementasi Perseroan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek bisnis dan operasional terutama dalam hal transparansi informasi, Perseroan telah menyediakan situs web resmi yaitu

As a form of the Company's implementation of the principles of good corporate governance in all aspects of business and operations, especially in terms of information transparency, the Company has provided an official website, namely



Website PT INTI (Persero) telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

The PT INTI (Persero)'s website has fulfilled the information that must be published in accordance with Law Nomor 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Central Information Commission Regulation Nomor 1 of 2021 concerning Public Information Service Standards.

Melalui situs web tersebut, Perseroan mempublikasikan sejumlah informasi umum seputar Perseroan, seperti Visi & Misi, Lini Bisnis, Produk dan Jasa yang Ditawarkan, Sejarah, Tim Manajemen, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hingga Kontak Perseroan.

Through this website, the Company publishes a number of general information about the Company, such as Vision & Mission, Business Lines, Products and Services Offered, History, Management Team, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Company Contacts.

Website tersebut menjadi salah satu media komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Melalui website www.inti.co.id, PT INTI (Persero) berkomitmen untuk memberikan informasi terkini secara tepat, akurat, dan mudah untuk diakses oleh publik.

The website is one of the effective communication media between the Company with shareholders and stakeholders. Through the website www.inti.co.id, PT INTI (Persero) is committed to providing the latest information that is accurate, accurate and easily accessible to the public.

Selain melalui website, keterbukaan informasi Perseroan pun disampaikan melalui kanal informasi media sosial resmi sebagai berikut:

Apart from the website, the Company's information disclosure is also conveyed through the official social media information channels as follows:



Website dan media sosial Perseroan itu dikelola oleh Bagian Hubungan Masyarakat Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis.

The website and social media of the Company are managed by the Public Relations Section Corporate Secretary and Strategic Planning Division.



Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency of Report Submission

Perseroan menetapkan pedoman dalam penyusunan Laporan Manajemen agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku baik bulanan, triwulan, dan tahunan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti Upload ke Portal Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) "Silaba".
2. Laporan Manajemen PT INTI (Persero).
3. Kajian *Debt to Equity Swap* (DES) atau Penanaman Modal Negara (PMN).
4. Laporan Keuangan Konsolidasi Triwulanan.
5. Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Unaudit.
6. Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Audited.
7. Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan.
8. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Unaudit.
9. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Audited.
10. Proyeksi Laporan Keuangan untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
11. Proyeksi Laporan Keuangan untuk RKAP setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
12. Proyeksi Laporan Keuangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

The Company establishes guidelines in the preparation of Management Reports to comply with applicable standards and regulations, both monthly, quarterly and annually. The details are as follows :

1. *Upload evidence to the "Silaba" Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Performance Portal.*
2. *PT INTI (Persero) Management Report.*
3. *Study of Debt to Equity Swap (DES) or State Investment.*
4. *Quarterly Consolidated Financial Report.*
5. *Unaudited Annual Consolidated Financial Statements.*
6. *Audited Annual Consolidated Financial Statements.*
7. *Quarterly Company Management Report.*
8. *Unaudited Annual Company Management Report.*
9. *Audited Annual Company Management Report.*
10. *Projection of Financial Statements for the Company Work Plan and Budget .*
11. *Projection of Financial Statements for Company Work Plan and Budget after the General Meeting of Shareholders (GMS).*
12. *Projection of the Company Long Term Financial Plan.*



22-01-2021

Sosialisasi Wistle Blowing
System dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi

*Wistle Blowing System
Socialization with the
Corruption Eradication
Commission*

01-02-2021

Kontrak Harga Satuan
TREG 4

*Unit Price Contract
TREG 4*

Peristiwa Penting 2021

Important Events in 2021

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KE

**PENANGANAN PENGADUAN
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK
ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN K-R**

03-03-2021

Perjanjian Kerja Sama
Pemberantasan Korupsi
(KPK)

*Cooperation Agreement of
Corruption Eradication*

18-02-2021

Pengenalan produk
di Kasdam Siliwangi
Bandung

*Product introduction at
Kasdam Siliwangi Bandung*

29-03-2021

Pelaksanaan Vaksinasi
Direksi dan Dewan
Komisaris

*Board of Directors and
Board of Commissioners
Vaccination*

26-04-2021

Penandatanganan KSO
INTI-PINS

*Signing of the INTI-PINS
KSO*

11-06-2021

Kick Off KSO INTI -
Pindad

*Kick Off KSO INTI -
Pindad*



29-07-2021

1 Tahun Implementasi
AKHLAK

1 Year of AKHLAK
Implementation



24-09-2021

Penandatanganan MoU
antara INTI - KAI (TCMS)

*Signing of the MOU INTI-KAI
(TCMS)*



26-10-2021

Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik 2021

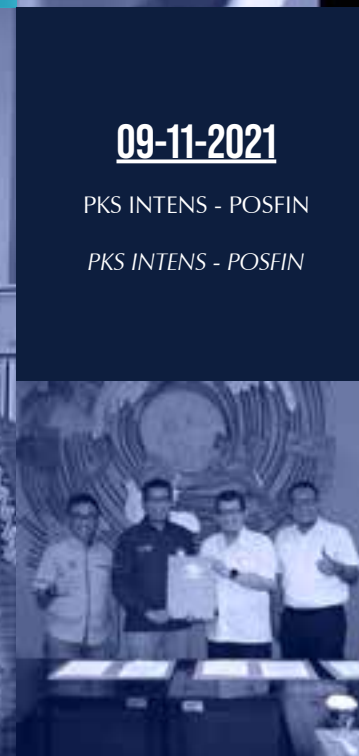
*2021 Public Information
Disclosure Award*



03-12-2021

Kunjungan Kerja Komisi VI
DPR RI

*Work Visit of Commission VI
DPR RI*



09-11-2021

PKS INTENS - POSFIN

PKS INTENS - POSFIN



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Analysis and Discussion





Gambaran Umum

Overview

Pada tahun 2021, PT INTI (Persero) mencatatkan pertumbuhan kinerja Perseroan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Capaian pertumbuhan kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya PT INTI (Persero) untuk terus melakukan inovasi dalam bidang produksi dan penjualan dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi dan penjualan, serta implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan biaya yang tepat dan efisien.

Analisis dan diskusi manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan memperoleh Pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material.

Selain itu, analisis dan diskusi manajemen juga diperoleh dari posisi keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In 2021, PT INTI (Persero) recorded a better growth in the Company's performance than last year. The achievement of this performance growth is inseparable from the efforts of PT INTI (Persero) to continue to innovate in the field of production and sales with a focus on increasing product added value, optimizing production and sales levels, as well as implementing strategic policies related to appropriate and efficient cost management.

This management analysis and discussion is based on information obtained from the Consolidated Financial Statements of the Limited Liability PT Industri Telekomunikasi Indonesia and Subsidiaries for the period December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, and obtained a Fair Opinion All Material Things.

In addition, management analysis and discussion was also obtained from the consolidated financial position of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of December 31, 2021, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Sementara itu, di waktu yang bersamaan, pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan mobilitas pada Februari 2021 sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 serta ditemukannya varian baru yang telah masuk ke Indonesia. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 3,50 persen.

Pada April 2021, peningkatan kasus Covid-19 yang tajam tidak hanya terjadi di India, tetapi juga meluas ke hampir seluruh negara berkembang. Laos, Thailand, Bhutan, Nepal, Fiji, Trinidad, dan Tobago mengalami lonjakan kasus yang sebagian besar disebabkan oleh virus varian baru yang lebih cepat menular. Jepang juga mengumumkan keadaan darurat di beberapa prefektur seiring kasus infeksi yang kembali meningkat. Kondisi tersebut mendorong pemberlakuan restriksi kembali di berbagai negara. Situasi ini menjadi ancaman bagi kecepatan pemulihan ekonomi global.

Kinerja manufaktur Indonesia pada Juni 2021 menunjukkan perlambatan ekspansi dengan nilai Purchasing Managers' Index (PMI) yang lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni sebesar 53,5. Ekspansi sektor manufaktur yang tertahan dipengaruhi oleh munculnya gelombang kedua Covid-19 di dalam negeri, sehingga aktivitas produksi menjadi terbatas. Hal tersebut tercermin dari tingkat output yang menurun. Permintaan baru dan permintaan luar negeri juga menurun pada bulan Juni. Lonjakan kasus Covid-19 juga menyebabkan keterlambatan pada pasokan bahan baku yang kemudian berimbas pada naiknya harga input produksi.

Dengan vaksinasi yang terus meningkat, perekonomian negara-negara di dunia terbuka kembali. Industri dan perdagangan berkembang meskipun masih terdampak pandemi. Sebagian besar indikator aktivitas ekonomi global menunjukkan momentum positif. PMI global misalnya, naik tipis menjadi 54,3 untuk PMI Manufaktur, sementara PMI Jasa meningkat menjadi 55,6. Keduanya mencatat pertumbuhan output di mana sektor jasa mengungguli manufaktur. Kendala pasokan yang melanda sektor manufaktur kembali terlihat terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Penundaan pasokan dan *back logged of works* masih terus meningkat.

Ekonomi global terus pulih seiring dengan membaiknya arus perdagangan, lapangan kerja, serta pendapatan. Namun, pemulihan ekonomi tidak berjalan merata di seluruh negara dan sektor usaha. Perbaikan ekonomi juga berdampak pada perubahan struktural, yang berarti bahwa beberapa sektor, pekerjaan, teknologi, dan perilaku tidak akan kembali ke tren sebelum pandemi. Perkembangan kedepannya bergantung pada kondisi ekonomi setempat.

Meanwhile, at the same time, the Covid-19 pandemic continues. The government again imposed mobility restrictions in February 2021 in line with the increase in Covid-19 cases and the discovery of new variants that have entered Indonesia. To promote economic recovery, Bank Indonesia decided to lower the BI7DRR interest rate by 25 bps to 3.50 percent.

In April 2021, a sharp increase in Covid-19 cases occurred not only in India, but also spread to almost all developing countries. Laos, Thailand, Bhutan, Nepal, Fiji, Trinidad, and Tobago have seen spikes in cases, most of which are caused by a new, faster-transmitting variant of the virus. Japan has also declared a state of emergency in several prefectures as the number of infections has increased again. This condition prompted the reintroduction of restrictions in various countries. This situation poses a threat to the speed of global economic recovery.

Indonesia's manufacturing performance in June 2021 showed a slowdown in expansion with the Purchasing Managers' Index (PMI) value lower than the previous month at 53.5. The stalled expansion of the manufacturing sector was influenced by the emergence of the second wave of Covid-19 in the country, so that production activity was limited. This is reflected in the declining level of output. New demand and overseas demand also declined in June. The spike in Covid-19 cases also caused delays in the supply of raw materials, which in turn resulted in rising production input prices.

With vaccinations that continue to increase, the economies of countries in the world are opening up again. Industry and trade are growing even though they are still affected by the pandemic. Most indicators of global economic activity show positive momentum. The global PMI, for example, edged up to 54.3 for the Manufacturing PMI, while the Services PMI increased to 55.6. Both recorded output growth where the services sector outperformed manufacturing. Supply constraints that hit the manufacturing sector were seen again, especially in the United States and Europe. Supply delays and backlogged of works are still increasing.

The global economy continues to recover as trade flows, employment and income improve. However, economic recovery has not been evenly distributed across countries and business sectors. Economic improvements also have an impact on structural changes, meaning that some sectors, jobs, technologies and behaviors will not return to their pre-pandemic trends. Future developments depend on local economic conditions.

Gambaran Kinerja Perseroan Dibandingkan Industri Global

Company Performance Overview Compared to Global Industry

Tahun 2021 merupakan periode yang penuh tantangan bagi PT INTI (Persero) sama seperti tahun sebelumnya di mana pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Menghadapi tantangan global yang ada, Perseroan fokus untuk mempertahankan kinerja operasi dan keuangan pada tahun 2021, dengan mengedepankan strategi penjualan melalui penguatan basis pelanggan, terutama untuk segmen *Telco* dan *Digital Service*.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing usaha, PT INTI (Persero) juga fokus pada upaya penurunan biaya dalam bidang operasi guna mempertahankan posisi biaya yang rendah serta mengambil kebijakan strategis untuk melakukan usaha-usaha efisiensi biaya yang tepat dan optimal di tengah era *the New Normal* pandemi Covid-19.

Realisasi Penjualan konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar atau 52,60% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, turun sebesar Rp55,52 miliar atau minus 12,99% terhadap periode yang sama di tahun 2020. Namun, Laba Kotor meningkat menjadi sebesar Rp45,23 miliar atau 45,67% dari RKAP tahun 2021, tumbuh 62,32% dari periode yang sama pada tahun 2020. Realisasi rasio Laba Kotor terhadap penjualan tahun 2021 adalah sebesar 12,17%, naik 5,65% dari periode yang sama tahun lalu yaitu 6,52%. Laba Kotor tersebut terutama berasal dari proyek *Repair and Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE), Kontrak Harga Satuan (KHS) *Repair and Refurbished NTE*, Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant* (OSP) *Fiber Optik Node-B*, *OSP FO Feeder* dan *Node B*, serta KHS Pengadaan Material Telkom Akses.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) tercatat sebesar minus Rp50,54 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp30,55 miliar dari realisasi tahun sebelumnya atau naik 37,67%, atau minus 145,39% dari target RKAP tahun 2021 sebesar Rp34,76 miliar.

Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp92,49 miliar atau 76,16% terhadap RKAP tahun 2021, Pendapatan Lain-Lain Rp24,81 miliar atau 45,19% terhadap RKAP tahun 2021, Beban Lain-Lain Rp33,89 miliar, maka Perusahaan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63,35 miliar atau naik sebesar Rp30,42 miliar atau 32,44% year

The year 2021 is a period full of challenges for PT INTI (Persero) just like the previous year where the Covid-19 pandemic still continues. Facing the existing global challenges, the Company focuses on maintaining its operating and financial performance in 2021, by prioritizing a sales strategy through strengthening the customer base, especially for the Telco and Digital Services segments.

In addition, to improve business competitiveness, PT INTI (Persero) also focuses on efforts to reduce costs in the field of operations in order to maintain a low cost position and take strategic policies to carry out appropriate and optimal cost efficiency efforts in the midst of the New Normal era of the Covid-19 pandemic.

The realization of consolidated Sales in 2021 was Rp371.73 billion or 52.60% of the 2021 Company Work Plan and Budget, decreased by Rp55.52 billion or minus 12.99% against the same period in 2020. However, Gross Profit increased to Rp45.23 billion or 45.67% of the 2021 Company Work Plan and Budget, grew 62.32% from the same period in 2020. The realization of the Gross Profit to sales ratio in 2021 was 12.17%, up 5.65% from the period the same as last year, which was 6.52%. The gross profit mainly came from the Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE), Unit Price Contract Repair and Refurbished NTE, Procurement and Installation of Outside Plant Fiber Optic Node-B, OSP FO Feeder and Node B, and Unit Price Contract Material Procurement Telkom Access.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) was recorded at minus Rp50.54 billion, an increase of Rp30.55 billion from the previous year's realization or an increase of 37.67%, or minus 145.39% of the 2021 Company Work Plan and Budget target amounting to Rp34.76 billion.

Selling Expenses, General and Administrative Expenses, and Development Expenses realized Rp92.49 billion or 76.16% of the 2021 Company Work Plan and Budget, Other Income Rp24.81 billion or 45.19% of the 2021 Company Work Plan and Budget, Other Expenses Rp33.89 billion, then the Company experienced an Operating Loss Before Financing Expense of Rp63.35 billion or an increase of Rp30.42 billion or 32.44% year

on year, lebih baik daripada periode yang sama di tahun 2020.

Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp52,07 miliar atau 62,54% terhadap RKAP tahun 2021. Mengalami penurunan sebesar Rp11,50 miliar atau 18,09% dari realisasi periode yang sama di tahun 2020, sebagai hasil dari program restrukturisasi utang Bank Mandiri, yang dimulai pada November 2020.

Namun, dengan kondisi tersebut belum mampu membawa PT INTI (Persero) pada posisi yang lebih menguntungkan di tengah industri global saat ini. Sebab, secara volume masih terlalu jauh dari target.

Meskipun demikian, Perseroan telah mampu melakukan program efisiensi, di mana perbaikan profitabilitas di sisi beban pokok dilakukan dengan perbaikan proses monitoring dan evaluasi proyek secara lebih intensif. Hal ini terlihat dari menurunnya rasio beban pokok terhadap penjualan yang menurun 5,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan upaya manajemen untuk melakukan perbaikan sudah membuahkan hasil. Untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas, Perusahaan perlu meningkatkan ukuran pekerjaan yang diperoleh.

Selain itu, Perseroan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63,35 miliar atau naik sebesar Rp30,42 miliar atau 32,44% year on year, lebih baik daripada periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp52,07 miliar atau 62,54% terhadap RKAP tahun 2021. Mengalami penurunan sebesar Rp11,50 miliar atau 18,09% dari realisasi periode yang sama di tahun 2020, sebagai hasil dari program restrukturisasi utang Bank Mandiri, yang dimulai pada November 2020.

Laba Kotor belum cukup untuk menutup Beban Usaha dan Beban Pendanaan, sehingga Perseroan mengalami Rugi Usaha Setelah Beban Pendanaan sebesar Rp112,65 miliar, maka Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan dan Total Kerugian Komprehensif Konsolidasian sebesar Rp89,73 miliar atau 93,32% dari tahun 2021 atau Rugi berkurang 50,38% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rugi Rp180,84 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari total Rugi Komprehensif Periode Berjalan Induk Perusahaan sebesar Rp87,62 miliar dan dari Entitas Anak PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) membukukan Rugi sebesar Rp3,49 miliar serta PT INTI Konten Indonesia (INTENS) Laba sebesar Rp1,60 miliar.

on year, better than the same period in 2020.

Realized Financing Expenses Rp52.07 billion or 62.54% of the 2021 Company Work Plan and Budget. A decrease of Rp11.50 billion or 18.09% from the realization of the same period in 2020, as a result of Bank Mandiri's debt restructuring program, which started in November 2020.

However, these conditions have not been able to bring PT INTI (Persero) to a more profitable position in the midst of today's global industry. Because, the volume is still too far from the target.

Nevertheless, the Company has been able to carry out an efficiency program, in which the improvement in profitability in terms of cost of goods is carried out by improving the process of monitoring and evaluating projects more intensively. This can be seen from the decrease in the ratio of cost of goods to sales which decreased by 5.65% compared to the same period in 2020. This shows that management's efforts to make improvements have paid off. To be able to further increase profitability, the Company needs to increase the size of the work obtained.

In addition, the Company experienced an Operating Loss Before Financing Expenses Rp63.35 billion, an increase Rp30.42 billion or 32.44% year on year, better than the same period in 2020 Rp52.07 billion or 62.54% of the 2021 Company Work Plan and Budget. A decrease of Rp11.50 billion or 18.09% from the realization of the same period in 2020, as a result of Bank Mandiri's debt restructuring program, which began in November 2020.

Gross Profit was not sufficient to cover Operating Expenses and Funding Expenses, so the Company suffered an Operating Loss After Financing Expenses Rp112.65 billion, the Company posted a Loss for the Year and a Consolidated Total Comprehensive Loss Rp89.73 billion or 93.32% of in 2021 or a Loss reduced by 50.38% from the realization in 2020 of a Loss of Rp180.84 billion.

The Loss came from the Parent Company's Total Comprehensive Loss for the current period Rp87.62 billion and from the subsidiary PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) which posted a loss of Rp3.49 billion and PT INTI Konten Indonesia (INTENS) a profit Rp1.60 billion.



Kinerja Operasi Per Segmen Usaha

Operational Performance Per Business Segment

Pada tahun 2021, Perseroan mencanangkan pencapaian kinerja dengan menetapkan sektor *Telco*, *Enterprise*, *Government*, dan *Defense*, sebagai kastamer utama Perseroan.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), PT INTI (Persero) pun menempuh berbagai upaya dalam mengembangkan bisnisnya. Dari bisnis eksisting ada beberapa yang tetap dipertahankan (*sustaining*), sedangkan bisnis eksisting yang potensial akan dijalankan dalam skala yang lebih besar (*scaling*) dengan cara memperdalam penetrasi pada pasar eksisting, maupun mengembangkan pasar baru (*market development*).

Perseroan pun terus melakukan pengembangan usaha dan produk untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar agar dapat menangkap potensi pasar baru (*scoping*).

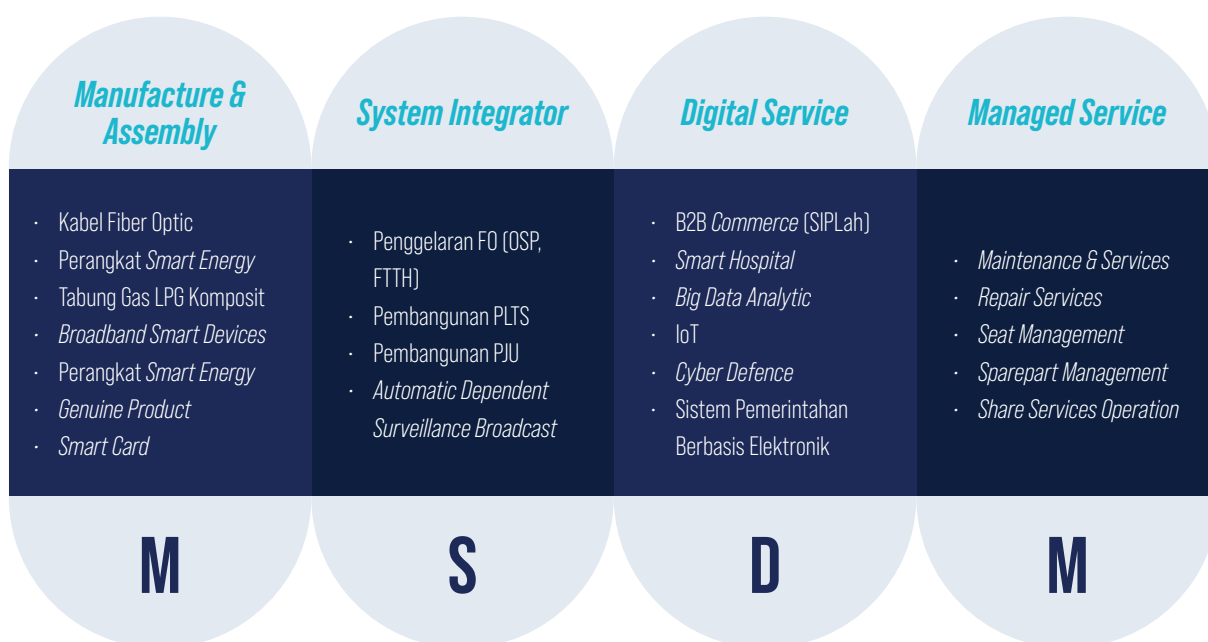
Secara struktur organisasi, untuk dapat mencapai rencana jangka panjang tersebut, Perseroan melakukan pemisahan fungsi yaitu fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar, serta pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha. Fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar merupakan fungsi lini pemasaran. Sementara itu, fungsi pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha merupakan fungsi lini pengembangan bisnis.

In 2021, the Company plans to achieve performance by establishing the Telco, Enterprise, Government, and Defense sectors, as the Company's main customer.

In order to implement the Company Long Term Plan, PT INTI (Persero) has taken various efforts to develop its business. Of the existing businesses, there are some that are still being maintained (sustaining), while the potential existing businesses will be carried out on a larger scale (scaling) by deepening penetration in the existing market, as well as developing new markets (market development).

The Company also continues to develop its business and products to keep abreast of technological developments and market trends in order to capture new market potential (scoping).

In terms of organizational structure, in order to achieve this long-term plan, the Company separates functions, namely the functions of penetrating existing markets and developing markets, as well as developing new portfolios and diversifying businesses. The existing market penetration and market development functions are functions of the marketing line. Meanwhile, the functions of developing new portfolios and business diversification are functions of the line of business development.



Perseroan juga berupaya memperoleh target penjualan dengan strategi *Business Continuance* yaitu proyek-proyek yang selama ini dilakukan oleh Perseroan dengan pendanaan proyek menggunakan pola pendanaan dari perbankan, lembaga keuangan lainnya, atau mitra investasi.

Adapun penjualan untuk *Business Continuance* berasal dari kontrak *carry over* 2020 maupun kontrak baru 2021 dengan total realisasi Penjualan sebesar Rp371,73 miliar atau 52,60% dari target Penjualan tahun 2021. Berikut rincian *Business Continuance* yang dibagi berdasarkan portfolio bisnis.

Manufacture & Assembly

Manufacture & Assembly

Sebagai Perseroan yang beranjak dari perusahaan manufaktur peralatan telekomunikasi, PT INTI (Persero) tetap berupaya pada *core business* yang sangat dikuasai Perseroan dengan membangun INTI Smart Industrial Park.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mendukung peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 menjadi program Prioritas Nasional (PN 3), diharapkan upaya ini dapat memberikan hasil yang signifikan pada perbaikan margin keuntungan Perseroan.

INTI Smart Industrial Park adalah kawasan industri modern yang dirancang sebagai penggerak utama (*prime mover*) tumbuhnya kapasitas dan kapabilitas manufaktur nasional. INTI Smart Industrial Park direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan manufaktur secara terintegrasi terdiri dari produksi mekanik, plastik, elektronik dan optikal, baik *product genuine* PT INTI (Persero) maupun produk alih teknologi dari mitra.

Hingga saat ini, PT INTI (Persero) telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memproduksi barang yang sejalan dengan kebutuhan PT INTI (Persero), antara lain sebagai berikut:

1. PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS)
Menghasilkan produk antara lain Railpad dan Insulator untuk kebutuhan rel kereta api, Pistol Grib, dan komponen senjata untuk PT Pindad (Persero), serta Tower dan Tiang untuk kebutuhan sektor telekomunikasi.
2. PT INTI Global Optical Communication (IGOC)
Merupakan perusahaan *joint venture* antara PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) dengan Global Optical Communication Co., Ltd. (GOC) dari Korea Selatan yang menghasilkan produk Kabel Fiber Optik dan aksesorisnya.
3. PT INTI Smart Teknologi (ISTEK)
Merupakan perusahaan *joint venture* antara PT INTI Konten Indonesia (INTENS), yang merupakan anak

The Company also seeks to obtain sales targets with a Business Continuance strategy, namely projects that have been carried out by the Company with project funding using funding patterns from banks, other financial institutions, or investment partners.

The sales for Business Continuance come from 2020 carry over contracts as well as new 2021 contract with a total realization of sales of Rp371,73 billion or 52,60% of the 2021 Sales target. The following are details of Business Continuance divided by business portfolio.

As the Company that has moved from a telecommunications equipment manufacturing company, PT INTI (Persero) continues to strive for the core business which is controlled by the Company by building the INTI Smart Industrial Park.

With the Government's policy to support the increase in the Domestic Content Level (TKDN) which in the Government Work Plan (RKP) 2021 became a National Priority program (PN 3), it is hoped that this effort can provide significant results in improving the Company's profit margin.

INTI Smart Industrial Park is a modern industrial area designed as a prime mover for the growth of national manufacturing capacity and capability. INTI Smart Industrial Park is planned to facilitate integrated manufacturing activities consisting of mechanical, plastic, electronic and optical production, both product genuine of PT INTI (Persero) and technology transfer products from partners.

Until now, PT INTI (Persero) has collaborated with various partners to produce goods that are in line with the needs of PT INTI (Persero), including the following:

1. PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS)
Producing products, including Railpads and Insulators for the needs of railroads, Pistol Gribs, and weapons components for PT Pindad (Persero), as well as Towers and Poles for the needs of the telecommunications sector.
2. PT INTI Global Optical Communication (IGOC)
It is a joint venture company between PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) and Global Optical Communication Co., Ltd. (GOC) from South Korea which produces Fiber Optic Cable products and accessories.
3. PT INTI Smart Teknologi (ISTEK)
Is a joint venture company between PT INTI Konten Indonesia (INTENS), which is a subsidiary of PT INTI



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

perusahaan PT INTI (Persero), dengan *Linyang Energy Co. Ltd.* dari China. PT ISTEK menghasilkan produk kWh Meter Prabayar.

Realisasi Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2021 untuk portofolio bisnis *Manufacture & Assembly* tercatat sebesar Rp42,48 miliar, terutama berasal dari proyek *Material Outside Plant (OSP)* Rp26,72 miliar, *Optimalisasi Material* Rp5,77 miliar, *KTP-el Reader* Rp4,34 miliar, *OSP* Rp4,05 miliar, *Plastik* Rp1,29 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp203,27 juta.

Realisasi Penjualan *Manufacture & Assembly* sebesar Rp59,98 miliar, terutama berasal dari *OSP* Rp 35,22 miliar, *Material* *OSP* Rp29,23 miliar, *Optimalisasi Material* Rp5,07 miliar, *KTP-el Reader* Rp1,21 miliar, *Plastik* Rp471,16 juta, dan proyek lainnya senilai Rp603,68 juta.

System Integrator

System Integrator

Perseroan telah bergelut dalam lini bisnis *System Integrator* khususnya sebagai *Engineering Procurement Construction Contractor* sektor telekomunikasi sejak tahun 1994. Lingkup *System Integrator* kemudian berkembang ke sektor energi terbarukan sejak 2013 sehingga komposisi penjualan yang berasal dari lini bisnis *System Integrator* mencapai >50% pada tahun 2019.

Pekerjaan *System Integrator* yang dilakukan oleh Perseroan antara lain proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pemilik modal alias *bouwheer* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero), serta pembangunan fasilitas Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan *bouwheer* Kementerian ESDM.

Realisasi Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2021 untuk portofolio *System Integrator* tercatat sebesar Rp114,27 miliar, terutama berasal dari proyek *Outside Plant (OSP)* Rp109,50 miliar, *Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical (SACME)* Rp1,08 miliar, *Mobile Point of Sales (MPOS)* Rp987,50 juta, *Metal* Rp925,74 juta, *Niaga* Rp695,21 juta, dan proyek lainnya senilai Rp1,07 miliar.

Realisasi Penjualan *System Integrator* sebesar Rp97,77 miliar, terutama berasal dari proyek *OSP* Rp73,49 miliar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp17,73 miliar, proyek *SACME* Rp1,51 miliar, *Bird Strike* Rp1,13 miliar, proyek *MPOS* Rp987,50 juta, *Information Technology (IT) System* Rp734,42 juta, *Radar* Rp695,30 juta, dan proyek lainnya senilai Rp1,50 miliar.

(Persero), and *Linyang Energy Co. Ltd.* from China. PT ISTEK produces *Prepaid kWh Meter* products.

The realization of the Consolidated Sales Contract in 2021 for the *Manufacturing & Assembly* business portfolio was recorded at Rp42.48 billion, mainly from *Material Outside Plant (OSP)* project Rp26.72 billion, *Material Optimization* Rp5.77 billion, *KTP-el Reader* Rp4.34 billion, *OSP* Rp4.05 billion, *Plastic* Rp1.29 billion, and other projects worth Rp203.27 million.

Realization of *Manufacture & Assembly Sales* of Rp59.98 billion, mainly from the *OSP* Rp35.22 billion, the *OSP Material* Rp29.23 billion, the *Material Optimization* Rp5.07 billion, the *KTP-el Reader* Rp1.21 billion, *Plastic* Rp471.16 million, and other projects worth Rp603.68 million.

The Company has been involved in the *System Integrator* business line, especially as an *Engineering Procurement Construction contractor* in the telecommunications sector since 1994. The scope of the *System Integrator* has then expanded to the renewable energy sector since 2013 so that the composition of sales originating from the *System Integrator* business line reached >50% in 2019.

The *System Integrator* work carried out by the Company includes the construction of a *Solar Power Plant* with capital owners alias *bouwheer* the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT PLN (Persero), as well as the construction of *Solar Street Lighting* facilities with the *bouwheer* of the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Realization of Consolidated Sales Contract in 2021 for *System Integrator* business portfolio was recorded at Rp114.27 billion, mainly from the *Outside Plant (OSP)* project of Rp109.50 billion, *Site Acquisition, Civil, Mechanical & Electrical (SACME)* Rp1.08 billion, the *Mobile Point of Sales (MPOS)* Rp987.50 million, the *Metal* project of Rp925.74 million, the *Commercial* project Rp695.21 million, and other projects worth Rp1.07 billion.

Realization of *System Integrator Sales* Rp97.77 billion, mainly from the *OSP* Rp73.49 billion, the *Solar Power Plant* Rp17.73 billion, the *SACME* Rp1.51 billion, the *Bird Strike* Rp1.13 billion, the *MPOS* Rp987.50 million, *Information Technology (IT) System* Rp734.42 million, *Radar* Rp695.30 million, and other projects worth Rp1.50 billion.

Digital Service

Digital Service

Bisnis digital erat dengan perubahan lansekap bisnis telekomunikasi. Industri telekomunikasi telah mengalami dekade yang sangat menantang dengan sejumlah disrupsi yang terjadi. Revolusi smartphone telah menyebabkan ledakan dalam permintaan data, diikuti dengan pertumbuhan aplikasi seluler dengan konsep *sharing economy* dan *frictionless marketplace*. Di sinilah pemain industri disruptif menghasilkan pendapatan melalui aplikasi yang memberikan *customer experience* yang baru.

Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan sektor digital, PT INTI (Persero) terus mengembangkan produk dan jasa yang terkait di sektor digital terutama pada layanan teknologi informasi *enterprise* dan *digital payments*. Selain itu, PT INTI (Persero) juga mengembangkan jasa konten melalui anak perusahaan PT INTI Konten Indonesia (INTENS), dengan target buyer dari sektor perbankan, badan usaha milik negara (BUMN), dan instansi pemerintah, antara lain melalui produk dan jasa layanan *Mobile Point of Sales* (MPOS) INTIPay, e-Voting, KTP-el Reader, platform *Business to Business commerce* SIPLah, *cyber defense*, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Realisasi Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2021 untuk portofolio *Digital Service* tercatat sebesar Rp56,71 miliar, terutama berasal dari proyek *Information Technology* (IT) System Rp53,33 miliar, Penghitung Lalu Lintas Otomatis (Plato) Rp1,88 miliar, e-Voting Rp1,46 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp38,27 juta.

Realisasi Penjualan *Digital Service* sebesar Rp56,31 miliar, terutama berasal dari proyek IT System Rp53,33 miliar, e-Voting Rp1,46 miliar, KTP-el Reader Rp930,49 juta, dan proyek lainnya Rp590,28 juta.

Digital business is closely related to the changing landscape of the telecommunications business. The telecommunications industry has experienced a very challenging decade with a number of disruptions occurring. The smartphone revolution has led to an explosion in data demand, followed by the growth of mobile apps with the concept of sharing economy and frictionless marketplace. This is where disruptive industry players generate revenue through applications that provide new customer experiences.

In an effort to keep up with the development of the digital sector, PT INTI (Persero) continues to develop products and services related to the digital sector, especially in enterprise information technology services and digital payments. In addition, PT INTI (Persero) has also developed content services through its subsidiary PT INTI Konten Indonesia (INTENS), with a target buyer from the banking sector, state-owned enterprises (SOEs), and government agencies, among others through INTIPay Mobile Point of Sales (MPOS) products and services, E-Voting, KTP-el Reader, SIPLah Business to Business commerce platform, cyber defense, and Electronic-Based Government System.

Realization of Consolidated Sales Contract in 2021 for Digital Service business portfolio was recorded at Rp56.71 billion, mainly from the Information Technology (IT) System Rp 53.33 billion, Auto Traffic Counter Rp1.88 billion, e-Voting Rp1.46 billion, and other projects worth Rp38.27 million.

Realization of Digital Service Sales amounted to Rp56.31 billion, mainly from IT Systems Rp53.33 billion, e-Voting Rp1.46 billion, KTP-el Reader Rp930.49 million, and other projects Rp590.28 million.

Managed Service

Managed Service

Perseroan juga melakukan pekerjaan *Managed Service* atau layanan *outsourced* di sektor telekomunikasi dan digital, termasuk aktivitas *Repair and Maintenance* untuk produk dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kegiatan *Managed Service* yang telah dilakukan oleh Perseroan dan ditargetkan untuk terus dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain *Managed Service Radio Microwave* untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Managed Service Network Telecommunication Equipment* (NTE), *Site Maintenance* untuk Telkom Group, serta layanan *Information Technology System* berupa peningkatan dan kelengkapan infrastruktur teknologi informasi.

PT INTI (Persero) saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek peningkatan infrastruktur teknologi informasi antara

The Company also performs Managed Service or outsourced services in the telecommunications and digital sectors, including Repair and Maintenance activities for information and communication technology (ICT) products and infrastructure.

Managed Service activities that have been carried out by the Company and are targeted to continue to be implemented in 2021 include Managed Service Radio Microwave for the Ministry of Communication and Information Technology, Managed Service Network Telecommunication Equipment (NTE), Site Maintenance for the Telkom Group, as well as Information Technology System service in the form of upgrading and completeness of information technology infrastructure.

PT INTI (Persero) is currently working on several projects to improve information technology infrastructure, including

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

lain proyek PMS-LAN, BRIBox, dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Visual Docking Guidance System di Bandara Soekarno-Hatta, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) di Kepolisian Republik Indonesia, dan Smart Clinic.

Realisasi Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2021 untuk portofolio bisnis *Managed Service* tercatat sebesar Rp97,62 miliar, terutama berasal dari proyek Repair & Refurbish Rp51,21 miliar, Tower and Power (TOPO) Rp19,56 miliar, Maintenance Rp11,63 miliar, Information Technology (IT) System Rp10,69 miliar, Spare Part Management System (SPMS) Rp2,95 miliar, Sewa Rp1,01 miliar, dan Mobile Point of Sales (MPOS) Rp564,76 juta.

Realisasi Penjualan *Managed Service* sebesar Rp145,84 miliar, terutama berasal dari proyek Repair & Refurbish Rp79,12 miliar, proyek Maintenance Rp22,87 miliar, TOPO Rp19,58 miliar, Seat Management Rp13,04 miliar, VSAT Rp6,59 miliar, SPMS Rp2,93 miliar, Sewa Rp1,15 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp556,06 juta.

Berikut adalah rincian realisasi perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp311,07 miliar dengan rincian sebagai berikut:

the PMS-LAN, BRIBox, and Very Small Aperture Terminal (VSAT) at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Visual Docking Guidance System at Soekarno-Hatta Airport, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) in the Indonesian National Police, and Smart Clinic.

Realization of Consolidated Sales Contract in 2021 for Managed Service business portfolio was recorded at Rp97.62 billion, mainly from Repair & Refurbish project Rp51.21 billion, Tower and Power (TOPO) Rp19.56 billion, Maintenance Rp11.63 billion, Information Technology (IT) System Rp10.69 billion, Spare Part Management System (SPMS) Rp2.95 billion, Rent Rp1.01 billion, and Mobile Point of Sales (MPOS) Rp564.76 million.

Realization of Managed Service Sales amounted to Rp145.84 billion, mainly from Repair & Refurbish Rp79.12 billion, Maintenance Rp22.87 billion, TOPO Rp19.58 billion, Seat Management Rp13.04 billion, VSAT Rp6.59 billion, SPMS Rp2.93 billion, Rent Rp1.15 billion, and other projects worth Rp556.06 million.

The following are the details of the realization of the acquisition of the Consolidated Sales Contract in 2021 amounting to Rp311.07 billion with the following details:

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

Lini Bisnis <i>Business Line</i>	RKAP <i>Company Work Plan and Budget</i> 2021	Realisasi <i>Realization</i> 2021 Audited	Realisasi <i>Realization</i> 2020 Audited	% <i>Pencapaian</i> <i>Achievement</i>	% <i>Pertumbuhan</i> <i>Growth</i>
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Manufacture & Assembly	175.629,19	42.481,20	45.169,34	24,19	(5,95)
Defense	3.000,00	-	-	-	-
ISE-R	3.000,00	-	-	-	-
Enterprise	33.008,00	21.715,83	1.917,90	65,79	1.032,27
AFIS	2.500,00	-	-	-	-
Kiosk	4.680,00	-	-	-	-
Qr Edc	5.126,00	-	-	-	-
KTP-El Reader	9.947,00	4.301,95	142,10	43,25	2.927,41
Lampu Led	-	-	9,14	-	(100,00)
Metal	-	-	428,58	-	(100,00)
Mpos	10.755,00	56,89	934,50	0,53	(93,91)
Optimalisasi Material	-	5.754,46	24,18	-	23.696,66
Plastik	-	-	361,35	-	(100,00)
Repair & Refurbish	-	-	18,05	-	(100,00)
Radio Trunking	-	9,09	-	-	-
Material OSP	-	11.593,44	-	-	-
Enterprise Non-Telco	21.131,00	1.461,67	154,32	38,03	(281,21)
Samcard	-	-	13,30	-	(100,00)
Metal	17.684,00	110,00	92,60	0,62	18,79
Plastik	3.447,00	1.289,59	-	37,41	-
KTP Reader	-	-	47,32	-	(100,00)

Repair & Refurbish	-	-	1,10		(100,00)
Niaga	-	62,09	-		
Government	4.500,00	42,50	24,29	0,94	74,97
I-SLC	4.500,00	-	-	-	
KTP-El Reader	-	42,50	-		
Samcard	-	-	24,29		(100,00)
Telco (Telkom Group)	113.990,19	15.190,81	-	13,27	-
Material OSP	113.990,19	15.124,61	-	13,27	
Mini UPS	-	66,20	-		
Telco	-	4.070,38	43.058,01		(90,55)
Mpos	-	-	3.184,00		(100,00)
Optimalisasi Material	-	14,40	39.874,01		(99,96)
Radio Trunking	-	9,00	-		
OSP	-	4.046,53	-		
KTP-El Reader	-	0,45	-		
Government Non-Defense	-	-	14,82		(100,00)
I-Perisalah	-	-	14,82		(100,00)
Managed Services	100.470,31	97.619,20	76.167,62	97,16	28,16
Defense	1.134,00	-	-	-	
Radio Trunking	1.134,00	-	-	-	
Enterprise	20.490,40	14.725,79	3.389,82	71,87	334,41
Smart Device	2.400,00	-	-	-	
IT System	-	10.690,36	306,54		3.387,45
Maintenance	-	128,94	413,57		(68,82)
Mpos	2.875,00	531,76	-	18,50	
Sewa	95,40	423,46	490,33	443,89	(13,64)
SPMS	-	2.951,26	2.179,39		35,42
Vsat	15.120,00	-	-	-	
Enterprise Non-Telco	750,00	33,00	4.782,72	-	(400,00)
Sewa	-	-	238,17		(100,00)
SPMS	-	-	143,95		(100,00)
IT Sistem	-	-	18,21		(100,00)
SIMRS	750,00	-	-	-	
Mpos	-	33,00	-		
Topo	-	-	4.382,39		(100,00)
Government	19.630,91	19.697,71	14.688,47	99,62	(9,99)
Sewa	-	142,00	92,00		54,35
STM	-	-	181,81		(100,00)
Topo	19.630,91	19.555,71	14.414,66	99,62	35,67
Telco (Telkom Group)	54.512,00	9.649,67	-	17,70	
Repair & Refurbish	42.100,00	408,37	-	0,97	
Maintenance	8.812,00	8.793,12	-	99,79	
Sewa	3.600,00	448,19	-	12,45	
Telco	-	53.513,02	53.048,61		0,88
Maintenance	-	2.711,89	9.221,89		(70,59)
Managed Service	-	-	591,15		(100,00)
Repair & Refurbish	-	50.801,13	42.100,00		20,67

Sewa	-	-	1.135,57		(100,00)
Government Non-Defense	3.953,00	-	258,00	-	(100,00)
SIMRS	3.953,00	-	-	-	
Sewa	-	-	258,00		(100,00)
Digital Services	37.096,00	56.706,11	24.209,17	152,86	134,23
Enterprise	3.780,00	7,38	6.944,47	0,20	(99,89)
IT System	-	-	1.771,59		(100,00)
E-Voting	-	-	1.531,00		(100,00)
Mpos	-	-	857,50		(100,00)
Plato	-	-	518,50		(100,00)
SID	-	-	2.265,88		(100,00)
Smart Clinic	3.780,00	7,38	-	0,20	
Enterprise Non Telco	150,00	3.383,14	900,00	21,33	(98,53)
KTP-EI Reader	-	13,21	900,00		(98,53)
It Sistem	150,00	31,99	-	21,33	
E-Voting	-	1.456,12	-		
Plato	-	1.881,82	-		
Government	-	0,40	16.036,51		(100,00)
E-Voting	-	-	337,58		(100,00)
IT System	-	-	11.142,94		(100,00)
IT Software	-	-	2.588,18		(100,00)
SIMRS	-	-	1.786,00		(100,00)
STM	-	-	181,81		(100,00)
Siplah	-	0,40	-		
Government Non-Defense	33.166,00	53.315,19	-	352,97	-
IT System	15.100,00	53.297,92	-	352,97	
KTP-EI Reader	-	17,27	-		
E-Voting	7.140,00	-	-	-	
Telco	-	-	328,18		(100,00)
IT System	-	-	328,18		(100,00)
System Integrator	288.481,09	114.265,33	153.815,54	39,61	(25,71)
Defense	3.500,00	-	-	-	
Antenna	3.500,00	-	-	-	
Enterprise	21.250,00	665,02	69.860,67	3,13	(99,05)
Aktivasi Pelanggan	-	-	82,81		(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	811,82		(100,00)
Jasa Lain	-	446,23	830,94		(46,30)
Konverter Kit	-	-	43.808,36		(100,00)
NI TI	-	145,24	223,63		(35,05)
Optimalisasi Material	-	39,24	574,82		(93,17)
OSP	11.250,00	34,29	4.208,69	0,30	(99,19)
Pelolosan	10.000,00	-	-	-	
PLTS	-	-	17.961,60		(100,00)
Sacme	-	-	1.358,01		(100,00)

Enterprise Non Telco	18.722,00	6.219,38	530,83		(100,00)
NI TI	-	-	36,75		(100,00)
IT Solution	2.000,00	-	-	-	
IT System	-	443,44	-		
Relocation Server	900,00	-	-	-	
OSP	3.000,00	3.072,13	367,83	102,40	735,20
Sacme	4.992,00	1.082,86	-	21,69	
Niaga	-	695,21	-		
Metal	-	925,74	8,72		10.512,00
Jasa Lain	7.830,00	-	117,52	-	(100,00)
Government	47.509,09	-	336,67	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	25,50		(100,00)
PLTS	47.509,09	-	-	-	
Topo	-	-	311,17		(100,00)
Government Non Defense	1.000,00	-	-	-	-
Infrastruktur IT	1.000,00	-	-	-	
Telco (Telkom Group)	196.500,00	107.342,48	-	54,63	
FOC	5.000,00	-	-	-	
OSP	160.000,00	106.354,98	-	66,47	
Mpos	1.500,00	987,50	-	65,83	
Tower & Power Solution	30.000,00	-	-	-	
Telco	-	38,47	83.087,37		(99,95)
Aktivasi Pelanggan	-	-	55,08		(100,00)
OSP	-	38,47	53.167,97		(99,93)
Optimalisasi Material	-	-	748,34		(100,00)
Pelolosan	-	-	29.115,98		(100,00)
Grand Total	601.676,59	311.071,84	299.361,67	51,70	3,91

Berikut adalah rincian realisasi penjualan konsolidasi Tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar dengan rincian sebagai berikut:

The following are the details of the realization of consolidated sales in 2021 amounting to Rp.371.73 billion with the following details:

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2021 Audited	Realisasi Realization 2020 Audited	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture & Assembly	185.137	71.810	59.843	38,79	20,00
Defense	3.000,00	-	-	-	-
ISE-R	3.000,00	-	-	-	-
Enterprise	51.018	17.585	18.244	34,47	(3,61)
AFIS	2.500	-	-	-	
Kiosk	4.680	-	-	-	
Qr EDC	5.126	-	-	-	
Antenna	-	-	274		(100,00)
E-Kiosk	-	-	23		(100,00)

Genset	-	-	1.349		(100,00)
KTP El_Reader	27.611	1.202	12.638	4,35	(90,49)
Lampu Led	-	-	9		(100,00)
Metal	-	-	831		(100,00)
Mpos	10.755	44	540	0,41	(91,78)
Optimalisasi Material	346	5.067	370	1.464,19	1.268,56
Plastik	-	-	2.191		(100,00)
Repair & Refurbish	-	-	18		(100,00)
Material OSP	-	11.272	-		
Enterprise Non-Telco	20.608	955	68	15	2.266
Samcard	-	-	13		(100,00)
Metal	17.161	195	8	1,14	2.465,79
Plastik	3.447	471	-	13,67	
KTP-El Reader	-	-	47		(100,00)
Niaga	-	289	-		
Government	4.500	16	24	0,36	(34,13)
I-SLC	4.500	-	-	-	
KTP El_Reader	-	16	-		
Samcard	-	-	24		(100,00)
Telco (Telkom Group)	106.011	25.977	-	17	-
Material OSP	105.990	17.957	-	16,94	
OSP	-	7.955	-		
Mini UPS	-	66	-		
Mpos	21	-	-	-	
Telco	-	27.277	41.492		(34,26)
Mpos	-	-	4.450		(100,00)
Optimalisasi Material	-	-	37.042		(100,00)
Radio Trunking	-	9	-		
OSP	-	27.268	-		
Government Non-Defense	-	-	15		(100)
I-Perisalah	-	-	15		(100,00)
Managed Services	145.175	145.845	128.414	100,46	13,57
Defense	662	-	-	-	
Radio Trunking	662	-	-	-	
Enterprise	31.332	33.595	52.727	107,22	(36,28)
Smart Device	700	-	-	-	
IT System	-	-	307		(100,00)
Maintenance	8.984	10.059	11.826	111,97	(14,94)
Mpos	2.875	522	-	18,16	
Sewa	72	449	466	627,73	(3,72)
Seat Management	9.709	13.043	27.396	134,34	(52,39)
SPMS	-	2.926	2.179		34,27
Vsat	8.992	6.595	10.553	73,34	(37,51)
KTP-El Reader	-	1	-		
Enterprise Non-Telco	750	33	4.759	-	(400)

Sewa	-	-	214		(100,00)
Spms	-	-	144		(100,00)
IT System	-	-	18		(100,00)
SIMRS	750	-	-	-	
Mpos	-	33	-		
Topo	-	-	4.382		(100,00)
Government	19.631	19.838	14.781	100	(54)
Sewa	-	257	234		9,62
STM	-	-	182		(100,00)
Topo	19.631	19.582	14.365	99,75	36,32
Telco (Telkom Group)	88.848	46.694	-	52,56	
Repair & Refurbish	76.697	36.420	-	47,49	
Maintenance	8.551	9.826	-	114,91	
Sewa	3.600	448	-	12,45	
Telco	-	45.684	56.147		(18,64)
Maintenance	-	2.986	9.122		(67,27)
Managed Service	-	-	35.269		(100,00)
Repair & Refurbish	-	42.698	10.630		301,66
Sewa	-	-	1.126		(100,00)
Government Non-Defense	3.953	-	-	-	-
SIMRS	3.953	-	-	-	
Digital Services	34.740	56.307	23.845	162,08	136,14
Enterprise	3.780	208	7.837	5,51	(97,34)
IT Sistem	-	-	1.772		(100,00)
E-Voting	-	-	1.531		(100,00)
MPOS	-	-	858		(100,00)
Plato	-	-	1.411		(100,00)
SID	-	-	2.266		(100,00)
Smart Clinic	3.780	208	-	5,51	
Enterprise Non-Telco	150	2.783	55	21	(100)
e-KTP	-	913	-		
IT sistem	150	32	-	21,33	
e-voting	-	1.456	-		
Plato	-	382	-		
Smart Clinic	-	-	55		(100,00)
Government	-	-	15.625		(100,00)
E-Voting	-	-	337,58		(100,00)
IT Sistem	-	-	11.142,94		(100,00)
IT Software	-	-	2.588,18		(100,00)
SIMRS	-	-	1.174,73		(100,00)
STM	-	-	181,81		(100,00)
Smart Clinic	-	-	200,00		(100,00)
Government Non-Defense	30.810	53.315	-	416	-

Plato	3.356	-	-	-	
ALP Kominfo	3.000	-	-	-	
SPBE Kominfo	4.500	-	-	-	
IT System	12.814	53.298	-	415,94	
KTP-EI Reader	-	17	-		
E-Voting	7.140	-	-	-	
Telco	-	-	328		(100,00)
IT System	-	-	328		(100,00)
System Integrator	341.652	97.770	215.146	28,62	(54,56)
Defense	3.500	-	-	-	
Antenna	3.500	-	-	-	
Enterprise	26.381	25.669	110.857	97,30	(76,84)
Aktivasi Pelanggan	66	-	122	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	812		(100,00)
Bird Strike	1.129	1.129	21.449	100,00	(94,74)
IT System	387	734	3.333	189,96	(77,97)
Jasa Lain	-	176	767		(77,02)
Konverter Kit	-	-	43.808		(100,00)
Mini Pop	-	-	491		(100,00)
NI TI	126	271	510	215,22	(46,83)
Niaga	-	-	26		(100,00)
Optimalisasi Material	-	-	575		(100,00)
OSP	13.080	4.884	1.597	37,34	205,92
Pelolosan	10.000	-	-	-	
PLTS	898	17.730	1.406	1.974,25	1.160,74
Radar	695	695	13.324	100,00	(94,78)
Radio	-	49	21.513		(99,77)
Sacme	-	-	888		(100,00)
Sindila	-	-	235		(100,00)
Enterprise Non-Telco	19.115	3.103	335		(100)
NI TI	-	-	58		(100,00)
IT Solution	2.000	-	-	-	
IT System	-	443	-		
Relocation Server	900	-	-	-	
OSP	3.148	1.151	-	36,56	
Sacme	5.157	1.505	-	29,19	
Niaga	-	4	-		
Metal	-	-	9		(100,00)
Jasa Lain	7.910	-	268	-	(100,00)
Government	47.509	-	15.850	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	26		(100,00)
PJU	-	-	15.513		(100,00)
PLTS	47.509	-	-	-	
Topo	-	-	311		(100,00)
Government Non-Defense	1.000	-	-		

Infrastruktur IT	1.000	-	-	-	
Telco (Telkom Group)	244.147	68.772	-	28,17	
FOC	5.929	556	-	9,38	
OSP	205.843	67.229	-	32,66	
Mpos	2.375	988	-	41,58	
<i>Tower & Power Solution</i>	30.000	-	-	-	
Telco	-	225	88.105	(99,74)	
Aktivasi Pelanggan	-	-	29	(100,00)	
FOC	-	-	5.856	(100,00)	
OSP	-	225	52.355	(99,57)	
Optimalisasi Material	-	-	748	(100,00)	
Pelolosan	-	-	29.116	(100,00)	
Grand Total	706.704	371.731	427.247	52,60	(12,99)



Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan

Description of The Company's Financial Performance

Realisasi Penjualan tahun 2021 tercatat sebesar Rp371.73 miliar atau 52.60% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Revisi tahun 2021, turun sebesar Rp55.52 miliar atau negatif 12.99% terhadap periode yang sama tahun 2020. Lalu, Laba Kotor tercatat sebesar Rp45.23 miliar atau 12.17% dari Penjualan, tidak mencapai target di mana persentase Laba Kotor terhadap RKAP Revisi Tahun 2021 sebesar 45.67%, tapi realisasi tersebut tercatat lebih baik dari pencapaian tahun lalu sebesar 19.65%.

Laba Kotor tersebut terutama berasal dari proyek *Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE)*, Kontrak Harga Satuan (KHS) *Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE)*, Pengadaan & Pemasangan *Outsite Plan (OSP) Fiber Optic Node-B*, *Outsite Plan (OSP) Fiber Optic Feeder* dan *Node B*, serta Kontrak Harga Satuan (KHS) Pengadaan Material-Telkom Akses.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) tercatat sebesar negatif Rp50.54 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp30.54 miliar dari tahun sebelumnya yang setara dengan kenaikan 37.67%. Namun, angka tersebut tidak mencapai target RKAP Revisi Tahun 2021 sebesar Rp34.76 miliar atau negatif 145.39%.

Beban Penjualan, Beban Administrasi & Umum, dan Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp92.49 miliar atau 302.13% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Revisi tahun 2021, maka Perseroan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63.35 miliar atau turun sebesar Rp30.42 miliar atau 32.44% dari tahun 2020.

Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp24.81 miliar atau naik 45.99% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Revisi tahun 2021, di mana Pendapatan Lain-Lain tersebut berasal dari Optimalisasi Aset Rp5.43 miliar atau realisasi 79.44% terhadap RKAP Revisi 2021, Selisih Pembayaran Utang Piutang Rp2.11 miliar atau 16.58% terhadap RKAP Revisi 2021.

Beban Lain-Lain sebesar Rp33.89 miliar, dimana Beban Lain-Lain terdiri dari Penurunan Nilai Persediaan Rp12.41 miliar, Denda Keterlambatan Rp4.57 miliar, dan Penyisihan 100% Investasi baik di PT INTI Konten Indonesia (INTENS) maupun PT INTI Pindad Mitra

Sales realization in 2021 was recorded at Rp371,73 billion or 52,60% of the Revised Company Work Plan and Budget 2021, a decrease of Rp55,52 billion or negative 12,99% against the same period in 2020. Then, Gross Profit was recorded at Rp45.23 billion or 12.17% of Sales, did not reach the target where the percentage of Gross Profit to the 2021 Revised RKAP was 45.67%, but the realization was recorded better than last year's achievement of 19.65%.

The Gross Profit mainly from Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE) project, Unit Price Contract Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE), Procurement & Installation Outsite Plan Fiber Optic Node-B, Outsite Plan Fiber Optic Feeder and Node B, also Unit Price Contract Material Procurement-Telkom Akses.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) was recorded at negative Rp50,54 billion, an increase of Rp30,54 billion from the previous year which was equivalent to an increase of 37,67%. However, this figure did not reach the Revised Company Work Plan and Budget 2021 target of Rp34,76 billion or negative 145,39%.

Marketing Expenses, General Affair & Administrative Expenses, and Development Expenses were realized at Rp92,49 billion or 302,13% of the Revised Company Work Plan and Budget 2021, so the Company had an Operating Loss Before Funding Expenses of Rp63,35 billion or an increase of Rp30,42 billion which is equivalent to with 32,44% from 2020.

Other Income amounted to Rp24,81 billion, an increase of 45,99% against the Revised Company Work Plan and Budget 2021, where the Other Income from Asset Optimization of Rp5,43 billion or 79,44% realization of the Revised Company Work Plan and Budget 2021, Difference in Payment of Payable and Receivables Rp2,11 billion or 16,58% of the Revised Company Work Plan and Budget 2021.

Other Expenses amounted to Rp33,89 billion, which is Other Expenses consist of Impairment of Inventories Rp12,41 billion, Late Penalty Rp4,57 billion, and Allowance for 100% Investment in both PT INTI Konten Indonesia (INTENS) and PT INTI Pindad Mitra Sejati

Sejati (IPMS).

Perusahaan telah mampu melakukan program efisiensi, di mana perbaikan profitabilitas di sisi beban pokok dilakukan dengan perbaikan proses monitoring dan evaluasi proyek secara lebih intensif. Hal ini terlihat dari menurunnya Rasio Beban Pokok terhadap Penjualan yang menurun 18.25% dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Manajemen untuk melakukan perbaikan sudah membuahkan hasil, terutama untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas, Perusahaan perlu meningkatkan ukuran pekerjaan yang diperoleh.

Selain itu, Perseroan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63.35 miliar atau turun sebesar Rp30.42 miliar yang setara dengan 32.44% dari realisasi tahun 2020. Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp52.07 miliar atau 62.54% terhadap RKAP Revisi 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.50 miliar atau 18.09% dari realisasi tahun 2020.

Laba Kotor belum cukup untuk menutup Beban Usaha dan Beban Pendanaan, sehingga Perseroan mengalami Rugi Usaha Setelah Beban Pendanaan sebesar Rp115.42 miliar, ditambah Pendapatan Pajak Penghasilan, maka Perseroan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp109.42 miliar atau negatif 229 kali terhadap RKAP Revisi 2020, atau mengalami penurunan kerugian sebesar Rp49.01 miliar yang setara dengan 30.93% dari realisasi kerugian di tahun 2020 sebesar Rp158.43 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan dari Induk Perusahaan sebesar Rp107.52 miliar serta Entitas Anak PT IPMS sebesar Rp4.73 miliar.

Per 31 Desember 2021, Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi menunjukkan Total Aset sebesar Rp1.20 triliun, turun sebesar 2.58% dari tahun 2020. Total Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp300.16 miliar atau 8.65% dari tahun 2020, dikarenakan adanya penurunan secara saldo akumulatif Kas dan Bank, Pajak Dibayar Dimuka, Persediaan, dan Piutang Lainnya. Total Aset Tidak Lancar juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp3.46 miliar atau 0.38%, dikarenakan adanya penurunan pada Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Hak Guna.

Total Liabilitas per 31 Desember 2021 menunjukkan Rp1.74 triliun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp57.65 miliar atau 3.42% di mana Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp684.25 yang mengalami kenaikan sebesar Rp56.46 miliar atau 8.99% dari tahun 2020 miliar dan Total Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.06 triliun yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.19 miliar atau 0.11% dari tahun 2020.

Total Ekuitas sebesar negatif Rp449.48 miliar. Ekuitas turun sebesar Rp539.00 miliar atau negatif 19.92% dibandingkan realisasi tahun 2020, akibat kerugian pada tahun 2020 ditambah dengan Rugi Tahun Berjalan.

(IPMS).

The company has been able to carry out an efficiency program, where improvement in profitability in terms of cost of goods is carried out by improving the process of monitoring and evaluating projects more intensively. This can be seen from the decrease in the Cost of Goods to Sales Ratio which decreased by 18,25% compared to 2020. This shows that the Management's efforts to make improvements have paid off, especially to be able to further increase profitability, the Company needs to increase the size of the work obtained.

In addition, the Company had an Operating Loss Before Funding Expenses of Rp63,35 billion or a decrease of Rp30,42 billion which is equivalent to 32,44% of the realization in 2020. Realized Financing Expenses amounted to Rp52,07 billion or 62,54% of the Revised Company Work Plan and Budget 2021 or decreased by Rp11,50 billion or 18,09% from the realization in 2020.

Gross Profit was not sufficient to cover Operating Expenses and Funding Expenses, so the Company experienced an Operating Loss After Funding Expenses of Rp115,42 billion, plus Income Tax Expense, The Company recorded a Loss for the Year of Rp109,42 billion or negative 229 times against the Revised Company Work Plan and Budget 2020, or experienced a decrease in losses of Rp49,01 billion, which is equivalent to 30,93% of the realization in 2020 of Rp158,43 billion.

The loss were from the Total Comprehensive Loss for the Year from the Parent Company of Rp107.52 billion and Subsidiaries PT IPMS of Rp4,73 billion.

As of December 31, 2021, the Consolidated Statements of Financial Position shows Total Assets was Rp1,20 trillion, a decrease of 2,58% from 2020. Total Current Assets decreased by Rp300,16 billion or 8,65% from 2020, due to a decrease in the cumulative balance of Cash on Hand and in Banks, Prepaid Taxes, Inventories, and Other Receivables. Total Non-Current Assets also decreased from 2020 of Rp3,46 billion or 0,38% due to a decrease in Fixed Assets, Investment Properties, Intangible Assets, and Right of Use Assets.

Total Liabilities as of December 31, 2021 showed an increase of Rp1,74 trillion from the previous year of Rp57,65 billion or 3,42% of which Total Current Liabilities amounted to Rp684,25 which increased by Rp56,46 billion or 8,99% from 2020 billion and Total Non-Current Liabilities of Rp1,06 trillion which also increased by Rp1,19 billion or 0,11% from 2020.

Total Equity was negative Rp449,48 billion. Equity decreased by Rp539,00 billion or negative 19,92% compared to the realization in 2020, due to losses in 2020 plus Current Year's Loss.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar negatif Rp53.79 miliar terutama akibat defisit dari Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional, Pembayaran kepada Karyawan, Pembayaran Pajak Penghasilan, serta Beban Pendanaan di mana sumber dananya berasal dari Saldo Kas Awal Tahun 2021, Penerimaan dari Pelanggan, Penerimaan Bunga Jasa Giro, serta Penerimaan Lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp1.25 miliar karena pengeluaran untuk Perolehan Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap melebihi penerimaan kas dari aktivitas investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp4.89 miliar, pemasukan kas aktivitas pendanaan berupa Penerimaan Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank sedangkan pengeluarannya berupa Pembayaran Pinjaman kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, sehingga Kas dan Bank Akhir Periode sebesar Rp37.86 miliar.

Berdasarkan analisis atas laporan keuangan tersebut di atas yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002, rasio-rasio keuangan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Cash Flow from Operating Activities is negative Rp53,79 billion, mainly due to deficits from Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses, Cash Paid for Employees, Corporate Income Tax Paid, and Cash Paid for Financing Expenses where the source of funds comes from Cash Balance at the beginning of 2021, Cash Receipts from Customers, Interest Income from Current Account, and Other Receipts.

Cash Flow from Investing Activities deficit of Rp1,25 billion due to expenditure on Purchase of Intangible Assets and Fixed Assets exceed cash received from investing activities.

Cash Flow from Financing Activities in 2021 amounted to Rp4,89 billion, cash received from financing were Acceptance of Loans from Banks and Non-Bank Financial Institutions while the expenditure were Payment for Bank Loan and Financial Institution Loan, so that Cash on Hand and in Banks at Ending of Year were Rp37,86 billion.

Based on the analysis of the financial statements above referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number KEP-100/MBU/2002, the financial ratios can be described in the table below:

Uraian Description			Realisasi Realization 2021	RKAP Revisi Revised CPB 2021	Realisasi Realization 2020
Likuiditas					
Liquidity					
1	Cash Ratio	(%)	5,5	6,3	9,1
2	Current Ratio	(%)	43,9	64,2	58,9
Solvabilitas					
Solvability					
1	Asset to Debt Ratio	(%)	69,1	0,8	83,8
2	Debt to Equity Ratio	(%)	(323,5)	(637,9)	(618,7)
Rentabilitas					
Rentability					
1	Return on Equity (ROE)	(%)	24,8	(0,3)	(279,9)
2	Return in Interest (ROI)	(%)	(4,2)	6,3	(27,1)
3	Operating Margin	(%)	(31,0)	(2,9)	(40,7)
4	Earning per Share (EPS)	Rp.	(312.641,2)	2.248,7	(1.242.187,1)
Aktivitas					
Activity					
1	Collection Periods	(Hari/Days)	101	81,0	70
2	Inventory Turnover	(Hari/Days)	143	55,7	233
3	Working Capital Turnover	(Kali/Time)	(1,0)	(3,6)	(1,2)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Statement of Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for 2021 are as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian <i>Description</i>	RKAP <i>Corporate Work Plan and Budget 2021</i>	Realisasi Audited <i>Realization Audited 2021</i>	Realisasi Audited <i>Realization Audited 2020</i>	% Pencapaian Terhadap RKAP Tahun 2021 <i>Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2021</i>	% Pertumbuhan <i>Growth (YoY)</i>
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
1	3	4	6	7 = 4/3	9 = (4-5)/5
1	8	9	11	13 = 9/8	12 = (9-10)/10
Pendapatan <i>Revenues</i>	706.704,33	371.731,42	427.246,89	52,60	(12,99)
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenues</i>	(607.659,73)	(326.497,33)	(399.379,20)	53,73	18,25
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	99.044,61	45.234,08	27.867,68	45,67	62,32
<i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)</i>	34.759,09	(50.537,56)	(81.082,06)	(145,39)	37,67
Beban Penjualan <i>Selling Expenses</i>	(17.532,74)	(22.983,36)	(16.139,31)	131,09	(42,41)
Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expenses</i>	(97.675,64)	(62.861,21)	(61.912,30)	64,36	(1,53)
Beban Pengembangan <i>Development Expenses</i>	(6.229,61)	(6.646,01)	(6.561,05)	106,68	(1,29)
Pendapatan Lain-lain <i>Other Income</i>	53.941,99	24.805,73	23.093,46	45,99	7,41
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	(31.615,44)	(7.008,75)	(3.852,23)	22,17	(81,94)
Beban Lain-lain <i>Other Expenses</i>	(566,20)	(33.888,58)	(56.265,32)	5.985,29	39,77
Beban Usaha (Termasuk Pendapatan (Beban) Lain-Lain dan Pajak Final) <i>Operating Expenses (Including Other Income & Expense and Final Tax)</i>	(99.677,64)	(108.582,18)	(121.636,75)	108,93	10,73
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Beban Pendanaan <i>Operating Profit (Loss) Before Financing Expenses</i>	(633,04)	(63.348,09)	(93.769,07)	(9.807,04)	32,44
Beban Pendanaan <i>Funding Expense</i>	(83.258,60)	(52.073,13)	(63.569,92)	62,54	18,09
Laba (Rugi) Usaha Setelah Beban Pendanaan <i>Profit (Loss) After Financing Expenses</i>	(83.891,64)	(115.421,22)	(157.338,99)	62,42	26,64
Laba Entitas Asosiasi <i>Income of an Associate</i>	109,58	-	-	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	83.782,06	(115.421,22)	(157.338,99)	62,24	26,64
Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan <i>Income (Expense) Income Tax</i>	(330,39)	5.996,82	(1.095,22)	(1.815,10)	647,55

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Profit (Loss) Current Year</i>	(84.112,45)	(109.424,40)	(158.434,21)	69,91	30,93
Penghasilan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i>					
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: <i>Items that Will not be Reclassified:</i>					
Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti <i>Actuarial Loss of Defined Benefit Plan</i>	-	24.816,38	(27.274,79)	-	190,99
Pajak Penghasilan Terkait <i>Impact of Deferred Tax</i>	-	(4.914,11)	4.869,42	-	(200,92)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak <i>Total Other Comprehensive Income after Tax</i>	-	19.902,27	(22.405,37)	-	188,83
Total Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain <i>Total Other Comprehensive Income (Loss)</i>	(84.112,45)	(89.522,13)	(180.839,59)	93,57	50,50
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: <i>Profit (Loss) for the Year Attributable to:</i>					
Pemilik Entitas Induk <i>Owner of the Parent Entity</i>	(83.986,76)	(108.964,32)	(153.899,42)	70,26	29,20
Kepentingan Non-Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	(125,69)	(460,08)	(4.534,79)	(166,06)	89,85
Jumlah <i>Total</i>	(84.112,45)	(109.424,40)	(158.434,21)	69,91	30,93
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: <i>Total Comprehensive Profit (Loss) that Can be Attributable to:</i>					
Pemilik Entitas Induk <i>Owner of the Parent Company</i>	(83.986,76)	(89.062,05)	(176.304,79)	93,96	49,48
Kepentingan Non- Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	(125,69)	(460,08)	(4.534,79)	(166,06)	89,85
Jumlah <i>Total</i>	(84.112,45)	(89.522,13)	(180.839,59)	93,57	50,50

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

Posisi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas PT INTI (Persero) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The position of PT INTI (Persero) Assets, Liabilities and Equity in 2021 is as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	RKAP Corporate Work Plan and Budget 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2020	% Pencapaian terhadap RKAP Tahun 2021 Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2021	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
ASET Asset					
I Aset Lancar Current Assets					
1 Kas dan bank Cash on hand and in banks	33.615,33	37.861,41	88.012,27	112,63	(56,98)
2 Piutang usaha Accounts receivable	173.640,84	103.056,00	31.475,26	59,35	227,42
3 Piutang lain-lain Other receivables	-	2.810,42	3.456,44	-	(18,69)
4 Persediaan Inventories	149.149,85	145.385,17	156.618,59	97,48	(7,17)
5 Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	91.171,36	8.501,62	47.495,47	9,32	(82,10)
5 Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expense and advance	4.819,41	2.543,98	1.510,03	52,79	68,47
7 Other current financial assets Other Current Financial Assets	3.785,04	-	-	-	-
Total Aset Lancar Total Current Assets	456.181,83	300.158,60	328.568,06	65,80	(8,65)
II Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
1 Aset Tetap Fixed assets	9.109,00	771.110,63	773.942,42	8.465,37	(0,37)
2 Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	8.152,15	-	-	-	-
3 Investasi pada instrument keuangan Investment in financial instrument	-	-	-	-	-
4 Properti investasi Investment properties	-	58.873,13	58.897,45	-	-
5 Aset tidak berwujud Intangible assets	2.408,69	12.920,66	13.427,95	536,42	(3,78)
6 Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	69.596,37	60.869,30	59.786,59	87,46	1,81
7 Aset hak guna Right of use assets	-	632,89	1.898,66	-	(66,67)
8 Aset lain-lain Other assets	18.463,48	189,55	106,08	1,03	78,69

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Total Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>		107.729,70	904.596,15	908.059,15	839,69	(0,38)
Total Aset <i>Total Assets</i>		563.911,53	1.204.754,75	1.236.627,21	213,64	(2,58)
LIABILITAS DAN EKUITAS <i>Liabilities and Equity</i>						
I Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-Term Liabilities</i>						
1	Utang usaha <i>Accounts payables</i>	148.829,76	345.066,89	420.153,06	231,85	(17,87)
2	Beban akrual <i>Accrued Expenses</i>	56.569,42	163.052,24	69.095,36	288,23	135,98
3	Utang bank <i>Bank loans</i>	1.469,20	42.930,92	15.513,36	2.922,06	176,74
4	Utang lembaga keuangan non-bank <i>Financial institutions loans</i>	118.194,72	7.779,98	5.269,74	6,58	47,64
5	Utang pajak <i>Tax payables</i>	33.235,23	29.480,17	19.212,51	88,70	53,44
6	Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek <i>Short term post employment benefit plans</i>	13.441,40	-	-	-	-
7	Liabilitas sewa <i>Lease liabilities</i>	-	3.061,03	2.401,15	-	27,48
8	Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya <i>Other current financial liabilities</i>	53.151,88	92.879,83	96.150,23	174,74	(3,40)
Total Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Short-Term Liabilities</i>		424.891,61	684.251,07	627.795,41	161,04	8,99
II Liabilitas Jangka Panjang <i>Long-Term Liabilities</i>						
1	Utang usaha <i>Accounts payable</i>	13.957,75	-	-	-	-
2	Utang bank <i>Bank loans</i>	88.017,82	818.560,57	843.560,71	929,99	(2,96)
3	Utang lembaga keuangan non-bank <i>Financial institutions loans</i>	186.590,00	-	-	-	-
4	Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefit liabilities</i>	122.035,50	131.408,95	145.641,15	107,68	(9,77)
5	Liabilitas sewa <i>Lease liability</i>	-	-	659,88	-	(100,00)
6	Utang bunga bank <i>Accrued interest payable</i>	52.583,44	109.533,12	68.446,88	208,30	60,03
Total Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Long-Term Liabilities</i>		463.184,51	1.059.502,64	1.058.308,63	228,74	0,11
Total Liabilitas <i>Total Liability</i>		888.076,12	1.743.753,71	1.686.104,04	196,35	3,42
III Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan: <i>Equity attributable to owner of the parent entity:</i>						
1	Modal dasar <i>Authorized capital</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2	Modal belum ditempatkan <i>Unpaid capital</i>	(650.000,00)	(650.000,00)	(650.000,00)	100,00	-
	Modal saham <i>Capital stock</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	-
3	Tambahan modal disetor <i>Additional paid in capital</i>	1.229,19	1.229,19	1.229,19	100,00	-
4	Tambahan modal debt to equity swap <i>Debt to equity swap</i>	146.883,85	-	-	-	-
	Saldo laba <i>Retained earnings</i>					
	Telah ditentukan penggunaannya: <i>Appropriated:</i>					

5	Cadangan umum <i>General reserves</i>	76.951,54	76.951,54	76.951,54	100,00	-
6	Cadangan tujuan <i>Specific reserves</i>	11.542,72	11.542,72	11.542,72	100,00	-
	Belum ditentukan penggunaannya: <i>Unappropriated:</i>					
7	Saldo laba (rugi) tahun lalu <i>Last year's profit (loss)</i>	(1.562.314,60)	(1.614.495,35)	(1.460.595,93)	96,66	(10,54)
8	Saldo laba (rugi) tahun berjalan <i>Profit (loss) for the year</i>	(83.986,76)	(108.964,32)	(153.899,42)	70,26	29,20
	Jumlah saldo laba <i>Total retained earnings</i>	(1.557.807,11)	(1.634.965,41)	(1.526.001,09)	95,05	(7,14)
	Modal saham dan saldo laba <i>Capital stock and retained earnings</i>	(1.059.694,07)	(1.283.736,23)	(1.174.771,91)	78,86	(9,28)
9	Komponen Ekuitas lainnya : <i>Other equity components :</i>					
	• Selisih revaluasi aset <i>Asset revaluation difference</i>	802.524,61	802.524,61	802.524,61	100,00	-
	• Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pensiun <i>Gain (loss) of pension benefit program actuary</i>	(65.480,61)	(53.385,13)	(73.287,40)	118,47	27,16
	Jumlah Ekuitas lainnya <i>Total other equity</i>	737.044,00	749.139,48	729.237,21	101,64	2,73
	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan <i>Equity attributable to owner of the parent entity</i>	(322.650,07)	(534.596,74)	(445.534,70)	34,31	(19,99)
	Kepentingan non pengendali <i>Non-controlling interests</i>	(1.514,52)	(4.402,21)	(3.942,13)	(90,67)	(11,67)
	Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	(324.164,59)	(538.998,96)	(449.476,83)	33,73	(19,92)
	Total Liabilitas Dan Ekuitas <i>Total of Liabilities and Equities</i>	563.911,53	1.204.754,75	1.236.627,21	213,64	(2,58)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

Arus Kas Konsolidasi tahun 2021 positif sebesar Rp 37,86 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Consolidated Cash Flow in 2021 was positive at Rp 37,86 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	RKAP Revisi Revised Corporate Work Plan and Budget 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2020	% Pencapaian Terhadap RKAP Tahun 2021 Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2021	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	7 = (3-4)/4
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities					
Penerimaan dari Pelanggan Receipt from Customers	712.277,26	344.248,45	445.144,11	48,33	(22,67)
Penerimaan Bunga Jasa Giro Interest Income from Current Account	21,67	264,80	226,96	1.221,85	16,67
Penerimaan Lainnya Other Receipts	-	34.151,74	22.104,44	-	-
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses	(693.982,23)	(330.511,95)	(341.069,53)	47,63	3,10
Pembayaran kepada Karyawan Cash Paid for Employees	(180.082,53)	(58.981,67)	(52.795,68)	32,75	(11,72)
Pembayaran Beban Pendanaan Cash Paid for Financing Expenses	(42.359,80)	(9.238,25)	(11.482,70)	21,81	19,55
Pembayaran Pajak Penghasilan Corporate Income Tax Paid	(186.646,98)	(31.266,60)	(36.876,33)	16,75	15,21
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Operating Activities	(390.772,61)	(51.333,49)	25.251,25	186,86	(303,29)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities					
Perolehan Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	(15.001,56)	(530,91)	(229,35)	3,54	(131,49)
Perolehan Aset Tak Berwujud Purchase of Intangible Assets	(3.886,41)	(1.084,02)	(316,53)	27,89	(242,47)
Penjualan Aset Tetap Sales of Fixed Assets	938.817,22	367,00	118,00	0,04	211,02
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Investing Activities	919.929,25	(1.247,93)	(427,88)	(0,14)	(191,65)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities					
Penerimaan Utang Bank Cash Received from Bank Loan	-	460,84	25.611,80	-	(98,20)
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank Cash Received from Financial Institution Loan	457.382,61	4.355,00	-	0,95	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liability	-	-	(103,41)	-	100,00

Pembayaran Utang Bank <i>Payment for Bank Loan</i>	(822.206,69)	(500,76)	(13.830,72)	0,06	96,38
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank <i>Payment for Financial Institution Loan</i>	(178.376,86)	(1.885,47)	(23.200,91)	1,06	91,87
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Financing Activities</i>	(543.200,94)	2.429,61	(11.523,24)	200,45	121,08
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank <i>Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks</i>	(14.044,30)	(50.151,80)	13.300,13	(157,10)	(477,08)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi <i>Unrealized Gain (Loss) from Foreign Exchange</i>	-	0,94	1,21	-	(22,32)
Kas dan Bank pada Awal Tahun <i>Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year</i>	47.659,63	88.012,27	74.710,93	184,67	17,80
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun <i>Cash on Hand And in Banks at Ending of Year</i>	33.615,33	37.861,41	88.012,27	112,63	(56,98)

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

PT INTI (Persero) melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan. Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman terefleksikan dalam Rasio Likuiditas dan Solvabilitas.

Perusahaan senantiasa berusaha agar kemampuan membayar hutang jangka pendek dan jangka panjangnya bernilai positif. Rasio Likuiditas digunakan Perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam melunasi hutang jangka pendeknya.

Sementara itu, Rasio Solvabilitas digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam melunasi hutang jangka panjang. Rasio Solvabilitas PT INTI (Persero) di tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebijakan restrukturisasi hutang yang diambil oleh Perusahaan dan performansi PT INTI (Persero) yang kian membaik.

PT INTI (Persero) manages liquidity risk by monitoring loan maturity profiles and funding sources. The ratio of the ability to repay loans is reflected in the Liquidity and Solvency Ratio.

The company always strives to ensure that its short-term and long-term debt repayment capabilities are positive. Liquidity ratio is used by the Company to measure its ability to pay off its short-term debt.

Meanwhile, the Solvency Ratio is used by the company to measure its ability to pay off long-term debt. The Solvency Ratio of PT INTI (Persero) in 2021 showed a better achievement than the previous year. This is due to the debt restructuring policy taken by the Company and the PT INTI (Persero)'s performance is getting better.

Uraian Description	Realisasi Realization 2021	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2020
LIKUIDITAS			
Cash Ratio (%)	5,5	7,9	9,1
Current Ratio (%)	43,9	107,4	58,9
SOLVABILITAS			
Asset to Debt Ratio (%)	69,1	0,8	83,8
Debt to Equity Ratio (%)	(323,5)	(637,9)	(618,7)

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility

Kolektibilitas Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, selalu terus diupayakan penagihannya sampai kepada langkah-langkah yang diperlukan.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit, melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar, atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Collectibility of Accounts Receivable and Other Receivables is reviewed periodically. Receivables that are known to be uncollectible, always strive for collection to the required steps.

Significant financial difficulties experienced by the debtor, the possibility of the debtor being declared bankrupt, carrying out financial reorganization and defaulting, or arrears in payments is an indicator that is considered to indicate a decrease in the value of receivables.

Uraian Description	Realisasi Realization 2021	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2020
Collection Periods (Hari/Days)	101,2	89,7	26,9



Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Struktur Modal

Capital Structure

Berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Rapat Perseroan dengan Akta Nomor 13 tertanggal 08 April 2021, Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHU-0067300.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 13 April 2021, dijelaskan bahwa modal dasar Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp999.999.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 35% atau sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terbagi dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan 349.999 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp349.999.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure Policy

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif.

Dalam rangka mengelola struktur modal, Perseroan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru, menambah atau mengurangi jumlah utang.

Based on the latest amendment to the Resolution of the Company's Meeting with Deed Number 13 dated April 08, 2021, Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., in Jakarta and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0067300.AH.01.02.TAHUN 2021 dated April 13, 2021, it is explained that the authorized capital of the Company is Rp. 1,000,000,000 (one trillion rupiah) which is divided into 1,000,000 (one million) shares, consisting of 1 (one) Series A Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000,- (one million rupiah); and 999,999 (nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000,- (one million rupiah) or in total with a total nominal value of Rp 999,999,000,000,- (nine hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

From the authorized capital, 35% have been issued and paid up or 350,000 (three hundred fifty thousand) shares with a total nominal value of Rp350,000,000,000,- (three hundred and fifty billion rupiah), which is divided into 1 (one) Series A Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000,- (one million rupiah); and 349,999 (three hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series B shares, with a total nominal value of Rp 349,999,000,000 (three hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability to continue as a going concern, so that the entity can continue to provide returns for Shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively.

In order to manage the capital structure, the Perseroan may adjust the amount of dividends, issue new shares, increase or decrease the amount of debt.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Investments in Capital Goods

Selama tahun 2021 tidak ada ikatan yang material atas investasi barang modal.

There were no material commitments for investments in capital goods throughout 2021.

Investasi Barang Modal

Investment In Capital Goods

Di tengah kondisi pandemi global Covid-19 yang mempengaruhi kondisi industri dan pertumbuhan perekonomian global, PT INTI (Persero) tetap berupaya melakukan langkah-langkah strategis dan seksama guna mendukung daya tahan finansial Perseroan dengan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan.

In the midst of the global Covid-19 pandemic that affects industrial conditions and global economic growth, PT INTI (Persero) continues to take strategic and careful steps to support the Company's financial resilience by continuing to strive to increase growth.

Realisasi investasi konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp1,76 miliar atau 7,93% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 dan minus 15,25% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Realisasi Investasi berasal dari Bangunan dan Emplasemen sebesar Rp192 juta, Alat Olah Data atau Sistem Informasi Rp205,73 juta, Aset Dalam Pembangunan Produk sebesar Rp377,76 juta, dan Software sebesar Rp983,83 juta.

The realization of consolidated investment in 2021 is Rp1.76 billion or 7.93% of the Company Work Plan and Budget in 2021 and minus 15.25% when compared to the same period in 2020. Realization of Investment comes from Buildings and Emplacements of Rp. 192 million, Data Processing Tools or Information System Rp205.73 million, Assets Under Product Development Rp377.76 million, and Software Rp983.83 million.

Target Perusahaan di Awal Tahun 2021 Dibandingkan Realisasi Tahun 2021

Company Targets in Early 2021 Compared to Realization in 2021

Pemasaran

Marketing

Kontrak Penjualan

Perolehan kontrak konsolidasi tahun 2021 adalah sebesar Rp311,07 miliar dengan rincian sebagai berikut:

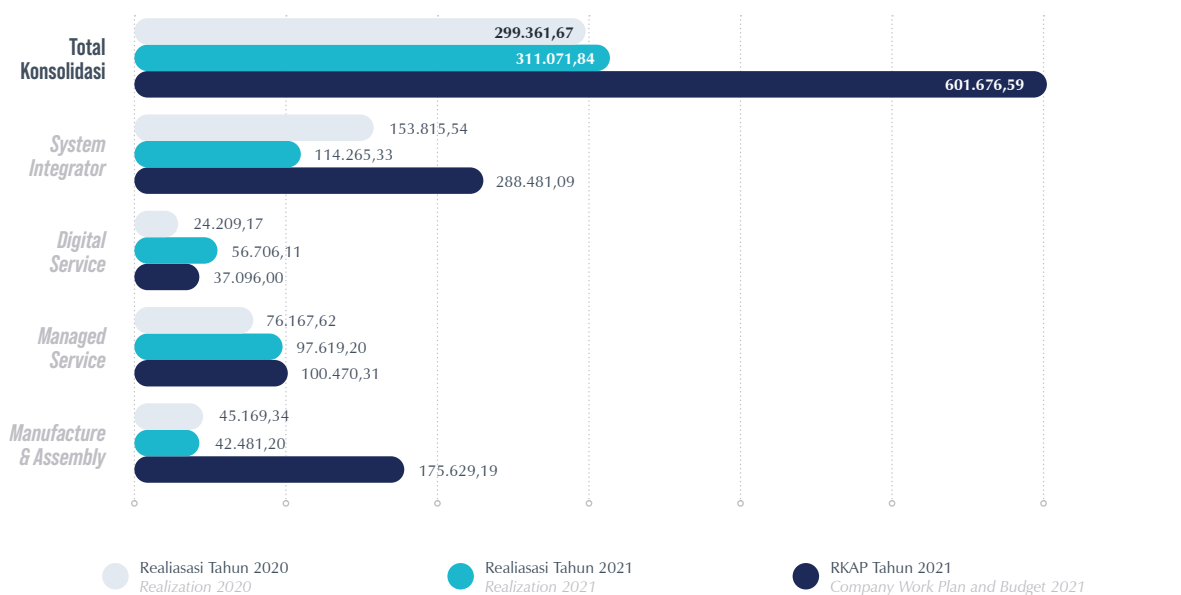
Sales Contract

Various efforts have been and will be taken by the Management to continue to overcome the problems that exist in the Compa

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2021	Realisasi Realization 2020	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture & Assembly	175.629,19	42.481,20	45.169,34	24,19	(5,95)
Managed Services	100.470,31	97.619,20	76.167,62	97,16	28,16
Digital Services	37.096,00	56.706,11	24.209,17	152,86	134,23
System Integrator	288.481,09	114.265,33	153.815,54	39,61	(25,71)
Total Konsolidasi	601.676,59	311.071,84	299.361,67	51,70	3,91

Kontrak Tahun 2021



Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi Perusahaan

Berikut adalah rincian realisasi perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2021:

Acquisition of the Company's Consolidated Sales Contract

The following are the details of the realization of the acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2021:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2021 Audited	Realisasi Realization 2020 Audited	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Manufacture & Assembly	175.629,19	42.481,20	45.169,34	24,19	(5,95)
Defense	3.000,00	-	-	-	-
ISE-R	3.000,00	-	-	-	-
Enterprise	33.008,00	21.715,83	1.917,90	65,79	1.032,27
AFIS	2.500,00	-	-	-	-
Kiosk	4.680,00	-	-	-	-
Qr Edc	5.126,00	-	-	-	-
KTP-EI Reader	9.947,00	4.301,95	142,10	43,25	2.927,41
Lampu Led	-	-	9,14	-	(100,00)
Metal	-	-	428,58	-	(100,00)
Mpos	10.755,00	56,89	934,50	0,53	(93,91)
Optimalisasi Material	-	5.754,46	24,18	-	23.696,66
Plastik	-	-	361,35	-	(100,00)
Repair & Refurbish	-	-	18,05	-	(100,00)
Radio Trunking	-	9,09	-	-	-
Material OSP	-	11.593,44	-	-	-
Enterprise Non-Telco	21.131,00	1.461,67	154,32	38,03	(281,21)
Samcard	-	-	13,30	-	(100,00)
Metal	17.684,00	110,00	92,60	0,62	18,79
Plastik	3.447,00	1.289,59	-	37,41	-
KTP Reader	-	-	47,32	-	(100,00)
Repair & Refurbish	-	-	1,10	-	(100,00)
Niaga	-	62,09	-	-	-
Government	4.500,00	42,50	24,29	0,94	74,97
I-SLC	4.500,00	-	-	-	-
KTP-EI Reader	-	42,50	-	-	-
Samcard	-	-	24,29	-	(100,00)
Telco (Telkom Group)	113.990,19	15.190,81	-	13,27	-
Material OSP	113.990,19	15.124,61	-	13,27	-
Mini UPS	-	66,20	-	-	-
Telco	-	4.070,38	43.058,01	-	(90,55)
Mpos	-	-	3.184,00	-	(100,00)
Optimalisasi Material	-	14,40	39.874,01	-	(99,96)
Radio Trunking	-	9,00	-	-	-
OSP	-	4.046,53	-	-	-

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

KTP-EI Reader	-	0,45	-		
Government Non-Defense	-	-	14,82		(100,00)
I-Perisalah	-	-	14,82		(100,00)
Managed Services	100.470,31	97.619,20	76.167,62	97,16	28,16
Defense	1.134,00	-	-	-	
Radio Trunking	1.134,00	-	-	-	
Enterprise	20.490,40	14.725,79	3.389,82	71,87	334,41
Smart Device	2.400,00	-	-	-	
IT System	-	10.690,36	306,54		3.387,45
Maintenance	-	128,94	413,57		(68,82)
Mpos	2.875,00	531,76	-	18,50	
Sewa	95,40	423,46	490,33	443,89	(13,64)
SPMS	-	2.951,26	2.179,39		35,42
Vsat	15.120,00	-	-	-	
Enterprise Non-Telco	750,00	33,00	4.782,72	-	(400,00)
Sewa	-	-	238,17		(100,00)
SPMS	-	-	143,95		(100,00)
IT Sistem	-	-	18,21		(100,00)
SIMRS	750,00	-	-	-	
Mpos	-	33,00	-		
Topo	-	-	4.382,39		(100,00)
Government	19.630,91	19.697,71	14.688,47	99,62	(9,99)
Sewa	-	142,00	92,00		54,35
STM	-	-	181,81		(100,00)
Topo	19.630,91	19.555,71	14.414,66	99,62	35,67
Telco (Telkom Group)	54.512,00	9.649,67	-	17,70	
Repair & Refurbish	42.100,00	408,37	-	0,97	
Maintenance	8.812,00	8.793,12	-	99,79	
Sewa	3.600,00	448,19	-	12,45	
Telco	-	53.513,02	53.048,61		0,88
Maintenance	-	2.711,89	9.221,89		(70,59)
Managed Service	-	-	591,15		(100,00)
Repair & Refurbish	-	50.801,13	42.100,00		20,67
Sewa	-	-	1.135,57		(100,00)
Government Non-Defense	3.953,00	-	258,00	-	(100,00)
SIMRS	3.953,00	-	-	-	
Sewa	-	-	258,00		(100,00)
Digital Services	37.096,00	56.706,11	24.209,17	152,86	134,23
Enterprise	3.780,00	7,38	6.944,47	0,20	(99,89)
IT System	-	-	1.771,59		(100,00)
E-Voting	-	-	1.531,00		(100,00)
Mpos	-	-	857,50		(100,00)
Plato	-	-	518,50		(100,00)
SID	-	-	2.265,88		(100,00)
Smart Clinic	3.780,00	7,38	-	0,20	

Enterprise Non Telco	150,00	3.383,14	900,00	21,33	(98,53)
KTP-EI Reader	-	13,21	900,00		(98,53)
IT Sistem	150,00	31,99	-	21,33	
E-Voting	-	1.456,12	-		
Plato	-	1.881,82	-		
Government	-	0,40	16.036,51		(100,00)
E-Voting	-	-	337,58		(100,00)
IT System	-	-	11.142,94		(100,00)
IT Software	-	-	2.588,18		(100,00)
SIMRS	-	-	1.786,00		(100,00)
STM	-	-	181,81		(100,00)
Siplah	-	0,40	-		
Government Non-Defense	33.166,00	53.315,19	-	352,97	-
IT System	15.100,00	53.297,92	-	352,97	
KTP-EI Reader	-	17,27	-		
E-Voting	7.140,00	-	-	-	
Telco	-	-	328,18		(100,00)
IT System	-	-	328,18		(100,00)
System Integrator	288.481,09	114.265,33	153.815,54	39,61	(25,71)
Defense	3.500,00	-	-	-	
Antenna	3.500,00	-	-	-	
Enterprise	21.250,00	665,02	69.860,67	3,13	(99,05)
Aktivasi Pelanggan	-	-	82,81		(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	811,82		(100,00)
Jasa Lain	-	446,23	830,94		(46,30)
Konverter Kit	-	-	43.808,36		(100,00)
NI TI	-	145,24	223,63		(35,05)
Optimalisasi Material	-	39,24	574,82		(93,17)
OSP	11.250,00	34,29	4.208,69	0,30	(99,19)
Pelolosan	10.000,00	-	-	-	
PLTS	-	-	17.961,60		(100,00)
Sacme	-	-	1.358,01		(100,00)
Enterprise Non Telco	18.722,00	6.219,38	530,83		(100,00)
NI TI	-	-	36,75		(100,00)
IT Solution	2.000,00	-	-	-	
IT System	-	443,44	-		
Relocation Server	900,00	-	-	-	
OSP	3.000,00	3.072,13	367,83	102,40	735,20
Sacme	4.992,00	1.082,86	-	21,69	
Niaga	-	695,21	-		
Metal	-	925,74	8,72		10.512,00
Jasa Lain	7.830,00	-	117,52	-	(100,00)
Government	47.509,09	-	336,67	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	25,50		(100,00)
PLTS	47.509,09	-	-	-	
Topo	-	-	311,17		(100,00)

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Government Non Defense	1.000,00	-	-	-	-
Infrastruktur IT	1.000,00	-	-	-	
Telco (Telkom Group)	196.500,00	107.342,48	-	54,63	
FOC	5.000,00	-	-	-	
OSP	160.000,00	106.354,98	-	66,47	
Mpos	1.500,00	987,50	-	65,83	
Tower & Power Solution	30.000,00	-	-	-	
Telco	-	38,47	83.087,37		(99,95)
Aktivasi Pelanggan	-	-	55,08		(100,00)
OSP	-	38,47	53.167,97		(99,93)
Optimalisasi Material	-	-	748,34		(100,00)
Pelolosan	-	-	29.115,98		(100,00)
Grand Total	601.676,59	311.071,84	299.361,67	51,70	3,91

Penjualan

Realisasi Penjualan Konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp371,73 miliar dengan rincian sebagai berikut:

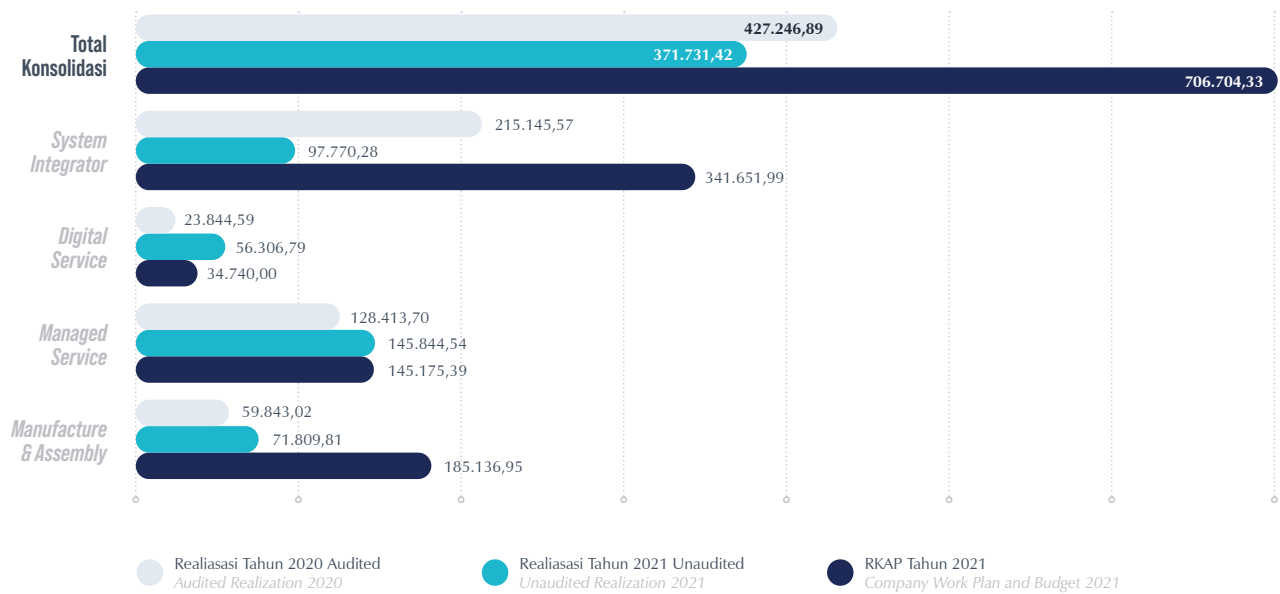
Sales

Realization of Consolidated Sales in 2021 amounted to Rp371,73 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis <i>Business Line</i>	RKAP <i>Company Work Plan and Budget</i> 2021	Realisasi <i>Realization</i> 2021 Audited	Realisasi <i>Realization</i> 2020 Audited	% Pencapaian <i>Achievement</i>	% Pertumbuhan <i>Growth</i>
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Manufacture & Assembly	185.136,95	71.809,81	59.843,02	38,79	20,00
Managed Services	145.175,39	145.844,54	128.413,70	100,46	13,57
Digital Services	34.740,00	56.306,79	23.844,59	162,08	136,14
System Integrator	341.651,99	97.770,28	215.145,57	28,62	(54,56)
Total Konsolidasi	706.704,33	371.731,42	427.246,89	52,60	(12,99)

Penjualan Tahun 2021



Penjualan Konsolidasi Perusahaan

Berikut adalah rincian Penjualan Konsolidasi Tahun 2021:

Company Consolidated Sales

Here are the details of the Consolidated Sales 2021:

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2021	Realisasi Realization 2021 Audited	Realisasi Realization 2020 Audited	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Manufacture & Assembly	185.137	71.810	59.843	38,79	20,00
Defense	3.000,00	-	-	-	-
ISE-R	3.000,00	-	-	-	-
Enterprise	51.018	17.585	18.244	34,47	(3,61)
AFIS	2.500	-	-	-	-
Kiosk	4.680	-	-	-	-
Qr EDC	5.126	-	-	-	-
Antenna	-	-	274	-	(100,00)
E-Kiosk	-	-	23	-	(100,00)
Genset	-	-	1.349	-	(100,00)
KTP El_Reader	27.611	1.202	12.638	4,35	(90,49)
Lampu Led	-	-	9	-	(100,00)
Metal	-	-	831	-	(100,00)
Mpos	10.755	44	540	0,41	(91,78)
Optimalisasi Material	346	5.067	370	1.464,19	1.268,56
Plastik	-	-	2.191	-	(100,00)
Repair & Refurbish	-	-	18	-	(100,00)
Material OSP	-	11.272	-	-	-

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Enterprise Non-Telco	20.608	955	68	15	2.266
Samcard	-	-	13		(100,00)
Metal	17.161	195	8	1,14	2.465,79
Plastik	3.447	471	-	13,67	
KTP-EI Reader	-	-	47		(100,00)
Niaga	-	289	-		
Government	4.500	16	24	0,36	(34,13)
I-SLC	4.500	-	-	-	
KTP EI Reader	-	16	-		
Samcard	-	-	24		(100,00)
Telco (Telkom Group)	106.011	25.977	-	17	-
Material OSP	105.990	17.957	-	16,94	
OSP	-	7.955	-		
Mini UPS	-	66	-		
Mpos	21	-	-	-	
Telco	-	27.277	41.492		(34,26)
Mpos	-	-	4.450		(100,00)
Optimalisasi Material	-	-	37.042		(100,00)
Radio Trunking	-	9	-		
OSP	-	27.268	-		
Government Non-Defense	-	-	15		(100)
I-Perisalah	-	-	15		(100,00)
Managed Services	145.175	145.845	128.414	100,46	13,57
Defense	662	-	-	-	
Radio Trunking	662	-	-	-	
Enterprise	31.332	33.595	52.727	107,22	(36,28)
Smart Device	700	-	-	-	
IT System	-	-	307		(100,00)
Maintenance	8.984	10.059	11.826	111,97	(14,94)
Mpos	2.875	522	-	18,16	
Sewa	72	449	466	627,73	(3,72)
Seat Management	9.709	13.043	27.396	134,34	(52,39)
SPMS	-	2.926	2.179		34,27
Vsat	8.992	6.595	10.553	73,34	(37,51)
KTP-EI Reader	-	1	-		
Enterprise Non-Telco	750	33	4.759	-	(400)
Sewa	-	-	214		(100,00)
Spms	-	-	144		(100,00)
IT System	-	-	18		(100,00)
SIMRS	750	-	-	-	
Mpos	-	33	-		
Topo	-	-	4.382		(100,00)
Government	19.631	19.838	14.781	100	(54)
Sewa	-	257	234		9,62
STM	-	-	182		(100,00)
Topo	19.631	19.582	14.365	99,75	36,32

Telco (Telkom Group)	88.848	46.694	-	52,56	
Repair & Refurbish	76.697	36.420	-	47,49	
Maintenance	8.551	9.826	-	114,91	
Sewa	3.600	448	-	12,45	
Telco	-	45.684	56.147		(18,64)
Maintenance	-	2.986	9.122		(67,27)
Managed Service	-	-	35.269		(100,00)
Repair & Refurbish	-	42.698	10.630		301,66
Sewa	-	-	1.126		(100,00)
Government Non-Defense	3.953	-	-	-	-
SIMRS	3.953	-	-	-	
Digital Services	34.740	56.307	23.845	162,08	136,14
Enterprise	3.780	208	7.837	5,51	(97,34)
IT Sistem	-	-	1.772		(100,00)
E-Voting	-	-	1.531		(100,00)
MPOS	-	-	858		(100,00)
Plato	-	-	1.411		(100,00)
SID	-	-	2.266		(100,00)
Smart Clinic	3.780	208	-	5,51	
Enterprise Non-Telco	150	2.783	55	21	(100)
e-KTP	-	913	-		
IT sistem	150	32	-	21,33	
e-voting	-	1.456	-		
Plato	-	382	-		
Smart Clinic	-	-	55		(100,00)
Government	-	-	15.625		(100,00)
E-Voting	-	-	337,58		(100,00)
IT Sistem	-	-	11.142,94		(100,00)
IT Software	-	-	2.588,18		(100,00)
SIMRS	-	-	1.174,73		(100,00)
STM	-	-	181,81		(100,00)
Smart Clinic	-	-	200,00		(100,00)
Government Non-Defense	30.810	53.315	-	416	-
Plato	3.356	-	-	-	
ALP Kominfo	3.000	-	-	-	
SPBE Kominfo	4.500	-	-	-	
IT System	12.814	53.298	-	415,94	
KTP-EI Reader	-	17	-		
E-Voting	7.140	-	-	-	
Telco	-	-	328		(100,00)
IT System	-	-	328		(100,00)
System Integrator	341.652	97.770	215.146	28,62	(54,56)
Defense	3.500	-	-	-	
Antenna	3.500	-	-	-	
Enterprise	26.381	25.669	110.857	97,30	(76,84)

Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Aktivasi Pelanggan	66	-	122	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	812		(100,00)
Bird Strike	1.129	1.129	21.449	100,00	(94,74)
IT System	387	734	3.333	189,96	(77,97)
Jasa Lain	-	176	767		(77,02)
Konverter Kit	-	-	43.808		(100,00)
Mini Pop	-	-	491		(100,00)
NI TI	126	271	510	215,22	(46,83)
Niaga	-	-	26		(100,00)
Optimalisasi Material	-	-	575		(100,00)
OSP	13.080	4.884	1.597	37,34	205,92
Pelolosan	10.000	-	-	-	
PLTS	898	17.730	1.406	1.974,25	1.160,74
Radar	695	695	13.324	100,00	(94,78)
Radio	-	49	21.513		(99,77)
Sacme	-	-	888		(100,00)
Sindila	-	-	235		(100,00)
Enterprise Non-Telco	19.115	3.103	335		(100)
NI TI	-	-	58		(100,00)
IT Solution	2.000	-	-	-	
IT System	-	443	-		
Relocation Server	900	-	-	-	
OSP	3.148	1.151	-	36,56	
Sacme	5.157	1.505	-	29,19	
Niaga	-	4	-		
Metal	-	-	9		(100,00)
Jasa Lain	7.910	-	268	-	(100,00)
Government	47.509	-	15.850	-	(100,00)
KTP-EI Reader	-	-	26		(100,00)
PJU	-	-	15.513		(100,00)
PLTS	47.509	-	-	-	
Topo	-	-	311		(100,00)
Government Non-Defense	1.000	-	-		
Infrastruktur IT	1.000	-	-	-	
Telco (Telkom Group)	244.147	68.772	-	28,17	
FOC	5.929	556	-	9,38	
OSP	205.843	67.229	-	32,66	
Mpos	2.375	988	-	41,58	
Tower & Power Solution	30.000	-	-	-	
Telco	-	225	88.105		(99,74)
Aktivasi Pelanggan	-	-	29		(100,00)
FOC	-	-	5.856		(100,00)
OSP	-	225	52.355		(99,57)
Optimalisasi Material	-	-	748		(100,00)
Pelolosan	-	-	29.116		(100,00)
Grand Total	706.704	371.731	427.247	52,60	(12,99)

Saldo Kontrak Penjualan

Saldo Kontrak Penjualan tahun 2021 adalah sebesar Rp495,76 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Sales Contract Balance

The Balance of the Sales Contract for 2021 is Rp495,76 billion, with details as follows:

	Uraian <i>Description</i>	Konsolidasi <i>Consolidation</i>
A	Carry Over Tahun 2020 setelah Amandemen	556.424,31
B	Kontrak 2021 Audited	311.071,84
	Jumlah Kontrak	867.496,15
C	Penjualan Tahun 2021 Audited	371.896,92
D	Penjualan Tahun 2021 setelah Eliminasi Audited	371.731,42
E	Sisa Kontrak s.d. 31-12-2021	495.764,73



Target Tahun 2022

Targets for 2022



Sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024, pada tahun 2021 merupakan tahun untuk melanjutkan mewujudkan visi Perseroan yaitu "Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia". Pada tahun 2022, Perseroan mengembangkan Lini Bisnis *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service* (MSDM).

Pada tahun 2022, Pendapatan *Recurring* ditargetkan mencapai 41% dari Total Penjualan, dengan didominasi oleh proyek *Maintenance*, *Mobile Point of Sales* (MPOS), *Repair & Refurbished*, *Seat Management*, *Sewa*, *Smart Clinic*, *Spare Part Management System* (SPMS), *Tower and Power* (TOPO), dan *Very Small Aperture Terminal* (VSAT).

Sementara itu, berbicara pada sisi segmen dan fokus portofolio, pada tahun 2022, Penjualan berdasarkan portofolio Perseroan sebagian besar disumbang oleh proyek *Manufacture & Assembly* senilai Rp141 Miliar, *System Integrator* senilai Rp240 miliar, *Digital Service* senilai Rp105 miliar dan *Managed Service* senilai Rp215 miliar. Sementara itu, segmen kastemer didominasi oleh segmen *Telco*.

As stated in the Company's Long-Term Plan 2020-2024, 2021 is the year to continue realizing the Company's vision "To Be the Best Smart Products Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia". In 2022, the Company will develop *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, and *Managed Service* (MSDM) Business Lines.

In 2022, *Recurring Revenue* is targeted to attain 41% of Total Sales, dominated by *Maintenance*, *Mobile Point of Sales* (MPOS), *Repair & Refurbished*, *Seat Management*, *Rental*, *Smart Clinic*, *Spare Part Management System* (SPMS), *Tower and Power* (TOPO), and *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) projects.

Meanwhile, on the segment and portfolio focus, in 2022, Sales based on the Company's portfolio were mostly contributed by the *Manufacture & Assembly* projects worth Rp141 billion, *System Integrator* worth Rp240 billion, *Digital Services* worth Rp105 billion, and *Managed Services* worth Rp215 billion. Meanwhile, the customer segment is dominated by the *Telco* segment.

Anggaran perolehan Kontrak Penjualan tahun 2022 sebesar Rp770,4 miliar atau tumbuh 133,7% dibandingkan Prognosa 2021. Sementara itu, anggaran Penjualan tahun 2022 adalah sebesar Rp701,3 miliar atau tumbuh 50%.

Saldo Kontrak akhir tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp500 miliar, sedangkan profitabilitas ditargetkan lebih baik dengan *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) positif Rp69,3 miliar atau tumbuh 302% year on year. Untuk Laba Tahun Berjalan masih ditargetkan negatif Rp48,3 miliar atau lebih baik 49,21% jika dibandingkan dengan Prognosa tahun 2021.

Pada Laporan Posisi Keuangan, nilai Aset ditargetkan sebesar Rp781,9 miliar atau menurun 37,1% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021. Nilai Kewajiban ditargetkan sebesar Rp698,3 miliar dan Ekuitas negatif Rp83,6 miliar.

Tingkat Kesehatan Perusahaan ditargetkan meningkat menjadi skor 60,0 atau "KURANG SEHAT BBB", dengan adanya upaya perbaikan pada rasio-rasio keuangan.

The Sales Contract budget for 2022 is Rp770,4 billion, growth 133,7% compared to 2021 Prognosis. Meanwhile, the Sales budget for 2022 is Rp701.3 billion or growth 50%.

Contract Balance at the end of 2022 is projected become Rp500 billion, while profitability is targeted to be better with a positive Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of Rp69,3 billion or growth 302% year on year. Profit for the Year is still targeted at negative Rp48,3 billion or 49,21% better than the 2021 prognosis.

In the Statement of Financial Position, Total Asset is targeted at Rp781,9 billion, decrease 37,1% towards the Company's Work Plan and Budget 2021. Liabilities are targeted at Rp698,3 billion and negative Equity at Rp83,6 billion.

The Company's Health Level score is targeted increase to 60,0 or "KURANG SEHAT BBB", by means of company's efforts to improve financial ratios.





Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Fact After Accountant Reporting Date

Pada tahun 2021 tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

In 2021 there is no material information and fact after accountant reporting date.

Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan

Description of The Company's Business Prospects

Bercermin dari evaluasi kinerja tahun 2021, dengan tagline INTI Bangkit, diharapkan tahun 2022 menjadi titik balik kinerja Perseroan ke arah yang lebih baik, melalui 10 Strategi Inisiatif sebagai berikut :

Reflecting on the performance evaluation in 2021, with the tagline INTI Bangkit, it is hoped that 2022 will be a turning point for the Company's performance towards a better direction, through 10 Initiative Strategies as follows:

Strategic Initiatives	Breakdown	Target 2022
		Sales (Miliar Rp)
SI - 1	• Portfolio Focus	
	Manufactured & Assembly	140,62
	Managed Service	240,12
	Digital Service	105,19
	System Integrator	215,37
	Total Sales Consolidate	701,30
	• Market Segment	Sales (Miliar Rp)
	Telco	328,21
	Government	206,27
	Enterprise	119,93
	Defense	46,90
	Total Sales Consolidate	701,30
	• Portfolio Focus	Sales (Miliar Rp)
	Manufactured & Assembly	181,07
	Managed Service	286,39
	Digital Service	124,75
	System Integrator	178,27
	Total Sales Consolidate	770,48
	• Market Segment	Sales (Miliar Rp)
	Telco	375,64
	Government	220,01
	Enterprise	127,93

The Portfolio Focus - Market Segment Focus

		<i>Defense</i>	46,90
		<i>Total Sales Consolidate</i>	770,48
		• <i>Recurring Revenue</i>	41,00%
SI - 2	Ultimate Customer Development	• <i>Net Promotor Score</i>	30%
		• <i>Pertumbuhan market share</i> <i>Market share growth</i>	10%
SI - 3	Resilience for Strategic Partnership	<i>Jumlah Kerja Sama Operasi</i> <i>Number of Joint Operations</i>	1
		• <i>Kesepakatan penyelesaian Hutang Bank</i> <i>Bank Debt Settlement Agreement</i>	1
		• <i>Pendapatan lain-lain dari optimalisasi aset</i> <i>Other income from asset optimization</i>	6,84
		• <i>Pembayaran hutang jatuh tempo Bank</i> <i>Payment of debt due Bank</i>	100%
		• <i>Pembayaran atas tunggakan bunga (Bank Mandiri)</i> <i>Payment of interest arrears (Bank Mandiri)</i>	100%
SI - 4	Notice for Debt Restructuring & Asset Optimalization	• <i>Pembayaran cicilan hutang usaha & hutang lain-lain</i> <i>Payment of accounts payable installments & other debts</i>	1
		• <i>Pinjaman baru untuk modal kerja proyek baru</i> <i>New loan for new project working capital</i>	373,85
		• <i>Debt to Equity Ratio</i>	835,0
		• <i>Dana Talangan</i> <i>Bailout</i>	211,42
		• <i>% Harga Pokok Penjualan per Penjualan</i> <i>% Cost of Goods Sold per Sales</i>	-84,82
		• <i>% Biaya Usaha per Penjualan</i> <i>% Operating Cost per Sales</i>	-11,99
SI - 5	Agile Cost Management	• <i>% EBITDA Margin</i>	9,88
		• <i>% Biaya Bunga</i> <i>% Interest Fee</i>	-10,85
		• <i>% Laba Bersih per Penjualan</i> <i>% Net Profit per Sales</i>	-6,85
		• <i>Entropi Culture Perusahaan (AKHLAK) 26,3%</i>	23%
		• <i>Employee Engagement skor > 70</i>	75
SI - 6	Rebuild Competency and Corporate Culture	• <i>Keterlibatan Karyawan dalam capability academy</i> <i>Employee involvement in capability academy</i>	100%

		Investasi pelatihan per karyawan <i>Training investment per employee</i>	2%
SI - 7	Optimal Parenting Strategy	Share penjualan dari Anak Perusahaan <i>Share sales from Subsidiaries</i>	10,81%
		Zero Fraud	100%
		Tidak ada restatement laporan keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan <i>There is no restatement of financial statements caused by recording errors</i>	100%
SI - 8	Upgrade Business Process Improvement through Business Technology	Technology Innovation Initiative	1
		Kepuasan stakeholder terhadap Technology Innovation <i>Stakeholder satisfaction with Technology Innovation</i>	80
		Readiness Index Zero Fraud	3,5
		IT Maturity Level	3
SI - 9	Nurturing Integrated ERM	Maturity Level	2,5
		GCG Index > 80	80
		Laporan kerugian proyek menuju 0 <i>Project loss report heading to 0</i>	1
		Skor KPKU > 506	506
		Sertifikasi <i>Certification</i>	100%
SI - 10	Drive Nimble Structure and Business Transformation	Transformasi struktur organisasi <i>Organizational structure transformation</i>	1



Uraian Tentang Aspek Pemasaran

Description of Marketing Aspect

Program Kegiatan Perusahaan Tahun 2022 dapat dituangkan secara ringkas sebagaimana tercantum dalam sub-sub bab berikut:

The Company Activities Program for 2022 can be stated briefly as stated in the following sub-chapters:

Pemasaran dan Penjualan

Marketing and Sales

1. Memperoleh kontrak penjualan dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. Porsi portfolio *Manufacture and Assembly, System Integrator, Digital Service*, dan *Managed Service*, (MSDM).
 - b. Penjualan yang bersifat *recurring* sehingga cukup untuk kebutuhan operasional Perusahaan.
 - c. Produk genuine PT INTI (Persero) yang memiliki margin tinggi, terutama untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui e-katalog.
 - d. Kontrak yang bersifat tahun jamak agar terdapat bekal *carry over* yang cukup di tahun mendatang.
 2. Mengamankan pendapatan Perusahaan melalui pengembangan portofolio bisnis Perusahaan dengan memperhatikan fokus portofolio bisnis dan fokus segmen untuk peningkatan profitabilitas dan manajemen risiko.
 3. Pemanfaatan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan khususnya kastemer BUMN dan Segmen Telco.
 4. Mengupayakan pengembangan pasar baru pada Segmen *Telco* dan Pemerintahan.
 5. Meminta umpan balik dari kastemer atas produk dan layanan yang diberikan serta secara konsisten menjadi trigger untuk *continuous business improvement* kepada unit pendukung bisnis sehingga dapat meningkatkan kualitas serta memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
 6. Pemanfaatan model bisnis baru seperti *Managed Service, Repair & Maintenance*, dan kerja sama operasi.
1. Obtain a sales contract with the following priorities:
 - a. Portfolio portion of *Manufacture and Assembly, System Integrator, Digital Service*, and *Managed Service* (MSDM).
 - b. *Recurring Sales*, so that it is sufficient for the Company's operational needs.
 - c. PT INTI (Persero) genuine products with high margins, especially to absorb
 - d. State Budget or Regional Revenue and Expenditure Budget, including through e-catalogs.
 - e. Contracts that are multi-years in nature, so that there is sufficient carry-over provision in the coming year.
 2. Securing the Company's revenue through the development of the Company's business portfolio by paying attention to the focus of the business portfolio and segment focus to increase profitability and risk management.
 3. Utilization of Synergy of State Owned Enterprises (SOEs) to achieve the targets that have been set, especially the SOEs Customers and the Telco Segment.
 4. Striving for the development of new markets in the Telco and Government Segments.
 5. Request feedback from customers on the products and services provided and consistently become a trigger for continuous business improvement to business support units so that they can improve quality and provide products and services that meet customer needs.
 6. Utilization of new business models such as *Managed Service, Repair & Maintenance*, and joint operations.

7. Melakukan analisis risiko dan memonitor progresnya sejak proses perolehan kontrak sampai dengan penyelesaian kontrak. 8. Melakukan kegiatan pendukung pemasaran dari sisi komersial seperti: a. Review harga material dan jasa serta melakukan upaya <i>cost down</i>. b. Membuat dan memonitor progres <i>pipeline</i> kontrak dari para <i>Account Manager</i>. c. Melakukan survey <i>Customer Satisfaction</i> pada setiap akhir kontrak. 9. Melakukan kegiatan pendukung pemasaran dari sisi <i>engineering</i> seperti: a. Menyiapkan tools (demo unit, bahan presentasi, brosur, dan lainnya) untuk kegiatan pemasaran. b. Mengikuti pameran yang cocok untuk memasarkan produk Perusahaan. c. Membuat proposal dan mengembangkan solusi untuk kastemer atau calon kastemer. d. Melakukan proses pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk pemasaran produk dan jasa. e. Melakukan survei lapangan dan membuat desain solusi bagi kebutuhan kastemer. 10. Menerapkan <i>operational excellence</i> dalam pelaksanaan manajemen proyek, yaitu: a. Melaksanakan proyek tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya sesuai dengan <i>Project Charter</i> yang diterima. b. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghindari resiko denda. c. Melakukan kegiatan purnajual untuk proyek sampai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II. d. Melakukan <i>monitoring & review</i> progress proyek dan penyerapan anggaran proyek secara berkala.	7. <i>Conduct risk analysis and monitor its progress from the contract acquisition process to contract completion.</i> 8. <i>Carry out marketing support activities from the commercial side, such as:</i> a. <i>Review the prices of materials and services and make cost down efforts</i> b. <i>Create and monitor contract pipeline progress from Account Manager.</i> c. <i>Conduct a Customer Satisfaction survey at the end of each contract.</i> 9. <i>Carry out marketing support activities from the engineering side, such as:</i> a. <i>Prepare tools (demo units, presentation materials, brochures, and many more) for marketing activities.</i> b. <i>Participate in appropriate exhibitions to market the Company's products.</i> c. <i>Make proposals and develop solutions for customers or prospective customers.</i> d. <i>Carry out the necessary testing and certification processes for the marketing of products and services.</i> e. <i>Conduct field surveys and design solutions for customer needs</i> 10. <i>Implementing operational excellence in the implementation of project management, namely:</i> a. <i>Implement the project on time, with the right quality and at the right cost in accordance with the accepted Project Charter.</i> b. <i>Increase customer satisfaction and avoid the risk of fines</i> c. <i>Carry out after-sales activities for projects up to Minutes of Hand Over II.</i> d. <i>Monitoring & reviewing project progress and project budget absorption on a regular basis.</i>

Pengadaan

Procurement

1. Memaksimalkan upaya proses pengadaan material dengan pola pembayaran yang mendukung perputaran modal kerja Perseroan yang baik (<i>back to back</i>). 2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan registrasi dan pemeliharaan data vendor secara mandiri oleh vendor, serta pemeliharaan dan evaluasi katalog produk dan pemasok atau mitra dalam rangka meningkatkan kualitas pasokan barang dan/atau jasa. 3. Peningkatan kemampuan negosiasi dalam rangka menekan Biaya Pokok Penjualan dan/atau penghematan anggaran.	1. <i>Maximizing the efforts of the material procurement process with a payment pattern that supports the Company's good working capital turnover (back to back).</i> 2. <i>Utilize information technology in the registration and maintenance of vendor data independently by vendors, as well as maintenance and evaluation of product catalogs and suppliers/partners in order to improve the quality of supply of goods and/or services.</i> 3. <i>Improved negotiation ability in order to reduce Cost of Goods Sold and/or budget savings.</i>



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

4. Mengatur ulang penataan material, monitoring transaksi material gudang dan inventarisasi material secara periodik, serta memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) jika diperlukan.
 5. Pemanfaatan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan supply chain.
 6. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pengadaan.
4. *Rearrange the arrangement of materials, monitoring of warehouse material transactions and periodic inventory of materials as well as installing Closed Circuit Television (CCTV) if needed.*
 5. *Utilization of Synergy of State Owned Enterprises (SOEs) to strengthen supply chain.*
 6. *Carry out effective risk management related to procurement activities.*

Produksi dan Kualitas Produk

Production and Product Quality

1. Membangun kembali kompetensi manufaktur dalam rangka mendukung proses produksi produk-produk hasil inovasi atau *genuine products*, dengan di antaranya membangun fasilitas *Electronics Manufacturing Services* beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk Proses dan Sistem Kerja yang terkait.
 2. Melaksanakan manajemen material dengan perencanaan dan pengelolaan material yang akurat.
 3. Meningkatkan kualitas manajemen produksi melalui perbaikan Proses dan Sistem Kerja, penggunaan tools dan aplikasi pendukung produksi atau pergudangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercapai tingkat kecepatan produksi yang tinggi dengan tingkat kesalahan/kerusakan (*defect*) yang rendah.
 4. Melaksanakan kerjasama produksi dengan mitra-mitra strategis yang memiliki kompetensi manufaktur, penguasaan teknologi atau brand yang kuat.
 5. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap risiko terkait kegiatan proses produksi.
 6. Melakukan kegiatan purna jual untuk produk yang masih dalam masa garansi dan mengembangkan layanan *Call Center*.
1. *Rebuilding manufacturing competence in order to support the production process of innovative products or genuine products, by among others building Electronics Manufacturing Services facilities and the required facilities and infrastructure, including related Work Processes and Systems.*
 2. *Carry out material management with accurate material planning and management.*
 3. *Improving the quality of production management through improvement of Work Processes and Systems, use of production or warehousing supporting tools and applications, as well as improving the quality of human resources, so as to achieve a high level of production speed with a low level of error/damage.*
 4. *Carry out production cooperation with strategic partners who have strong manufacturing competence, mastery of technology or brand.*
 5. *Carry out risk studies to identify any risks related to production process activities.*
 6. *Carry out after-sales activities for products that are still within the warranty period and develop Call Center services.*

Teknik dan Teknologi

Engineering and Technology

1. Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan prinsipal atau pemilik teknologi dalam rangka membangun kompetensi.
 2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pembangunan kemitraan dan investasi di bidang teknologi informasi.
1. *Build and enhance strategic cooperation with principals or technology owners in order to build competence.*
 2. *Carry out effective risk management related to partnership development activities and investment in information technology.*

3. Program keamanan data elektronik dengan merumuskan Kebijakan dan Prosedur terkait teknologi informasi.
4. Penyusunan *Information Technology Master Plan*.
5. Pembangunan aplikasi *Executive Sales & Project Dashboard*.
6. Pembangunan aplikasi *Integrated Enterprise Risk Management*.
7. Pengembangan *Learning X-perience Platform*.
8. Pengembangan *Information Technology Service Dashboard* Pengembangan Aplikasi *Enterprise Architecture*.

3. *Electronic data security program by formulating information technology related Policies and Procedures.*
4. *Preparation of Information Technology Master Plan.*
5. *Executive Sales & Project Dashboard application development*
6. *Integrated Enterprise Risk Management application development.*
7. *Development of Learning X-perience Platform.*
8. *Information Technology Service Dashboard Development Enterprise Architecture Application Development.*

Keuangan dan Akuntansi

Finance and Accounting

1. Penyelesaian hutang non produktif
 - a. Melakukan *Debt Equity Swap* atas sebagian/ seluruh hutang bank BRI, hutang bank Mandiri dan hutang PT Telkom sehingga ekuitas Perusahaan menjadi positif.
 - b. Melanjutkan negosiasi penyelesaian hutang non produktif lainnya kepada seluruh pihak yang terkait.
 - c. Mendapatkan bridging finance atau dana talangan untuk menyelesaikan hutang usaha non-produktif dan hutang non-produktif kepada pihak lainnya (pajak, pegawai dan pihak ketiga lainnya).
2. Menyediakan modal kerja yang cukup untuk bisnis perusahaan baik yang bersifat *recurring* maupun *project-based* dengan cara:
 - a. Mengembangkan model-model pendanaan baru seperti kerja sama pendanaan dengan mitra usaha.
 - b. Tetap menjaga kerjasama pendanaan dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank, baik berupa Kredit Modal Kerja maupun instrument keuangan lainnya, dengan jaminan sisa nilai jaminan aset Jalan Moch. Toha Nomor 225.
3. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk melakukan optimalisasi asset.
4. Pengendalian *cash flow* Perseroan secara ketat dengan melaksanakan koordinasi secara berkala kepada unit bisnis dan unit kerja lainnya terkait rencana *cash-in*, *cash-out*, dan pemanfaatan anggaran.
5. Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Konsolidasi Perusahaan bulanan, triwulanan dan tahunan secara akurat dan tepat

1. *Non-productive debt settlement*
 - a. *Debt to Equity Swap partially or entire upon BRI's bank, Mandiri's bank and PT Telkom debt so that The Company's equity positive.*
 - b. *Continuing negotiations on the settlement of other non-productive debts to all related parties.*
 - c. *Obtain bridging finance or bailouts to solve non-productive accounts payable to other parties (tax, employees, and other third parties).*
2. *Provide sufficient working capital for the company's business, both recurring and project-based by:*
 - a. *Develop new funding models such as co-financing with partners.*
 - b. *Keep maintain funding cooperation with banks or non-bank financial institutions, either in the form of Working Capital Loans or other financial instruments, with a guaranteed residual value of Moch. Toha Street Number 225 Asset.*
3. *Coordinate with related units to optimize assets.*
4. *Strict control of the company's cash flow by conducting regular coordination with business units and other work units regarding cash-in, cash-out, and budget utilization plans.*
5. *Prepare monthly, quarterly and annual Consolidated Financial Statements and Company Management Reports in an accurate and timely manner.*



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

waktu.

6. Pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan berisiko rendah.
7. Melakukan proses Penjualan sebagian atau seluruhnya atas Asset Jalan Moch. Toha Nomor 77 setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dalam rangka restrukturisasi atau penyehatan Perusahaan.
6. *Timely tax reporting and depositing to maintain the credibility of low-risk companies.*
7. *Processing the sales of partially or entirely Moch. Toha Street Number 77 assets after gain an approval from Shareholder or the Proxy of Shareholder, in order to company restructuring or recovery.*

Sistem dan Organisasi

System and Organization

1. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap risiko yang ada serta mengurangi atau meminimalkan dampak negatif untuk setiap proses bisnis.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk mempertahankan skor perusahaan dalam *Assessment Good Corporate Governance (GCG)*, serta memperbaiki *Opportunity for Improvement* untuk mempertahankan skor perusahaan dalam Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).
3. Strategi komunikasi eksternal PT INTI (Persero) di semua media Perseroan untuk membangun citra perusahaan sesuai dengan visi dan misi:
 - a. Optimalisasi website dan media sosial PT INTI (Persero) sebagai media komunikasi resmi perusahaan.
 - b. Optimalisasi *Marketing Kit* (Video Profile, Company Profile, Brosur, Banner, Poster, Backdrop, video atau animasi, dan lainnya).
4. Melakukan dukungan hukum dalam perikatan, litigasi dan kajian hukum dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
1. *Carry out risk studies to identify any existing risks and reduce/minimize negative impacts for each business process.*
2. *Implement good corporate governance to maintain the company's score in the Good Corporate Governance (GCG) Assessment, as well as improve the Opportunity for Improvement to maintain the company's score in the Superior Performance Assessment Criteria.*
3. *PT INTI (Persero) external communication strategy in all Company's media to build the company's image in accordance with the vision and mission:*
 - a. *Optimization of the PT INTI (Persero) website and social media as the company's official communication media.*
 - b. *Optimization of Marketing Kit (Video Profile, Company Profile, Brochure, Banner, Poster, Backdrop, video or animation, and many more).*
4. *Provide legal support in engagements, litigation and legal studies in every aspect of the company's activities.*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development

1. Membangun *Integrated Talent Management System (ITMS)* dan mengirimkan talenta Perseroan ke dalam talent pool di Kementerian BUMN, yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi, minimal 3 orang suksesor per posisi Direksi.
2. Melakukan pengembangan kompetensi sesuai bisnis Perseroan terutama kepemimpinan *engineering*, manajemen proyek, dan *account management*.
1. *Build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company talents to the talent pool at the Ministry of SOEs, which consists of a minimum of 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for the Board of Directors, at least 3 successors per position of the Board of Directors.*
2. *Conduct competency development according to the company's business, especially engineering leadership, project management, and account management.*

3. Pengembangan kompetensi *Leadership*, melalui pelatihan (*directorship training, finance for non-finance manager, dll*),
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui:
 - a. Pelatihan dan Sertifikasi, terutama di bidang Telekomunikasi dan Energi serta K3 sebagai pendukung.
 - b. *Focus Group Discussion* atau *Sharing Session*.
 - c. Pembangunan Knowledge Management.
5. Pemenuhan Tenaga Kerja (internal dan eksternal) sesuai kebutuhan organisasi.

3. *Leadership competency development, through training (directorship training, finance for non-finance managers, etc.),*
4. *Human Resource development through:*
 - a. *Training and Certification, especially in the field of Telecommunications and Energy as well as K3 as support;*
 - b. *Focus Group Discussion or Sharing Session.*
 - c. *Development of Knowledge Management.*
5. *Fulfillment of Manpower (internal & external) according to the needs of the organization.*

Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

1. Pengembangan produk baru dan existing sesuai dengan kebutuhan pasar (*Market Driven*).
2. Membangun dan meningkatkan kerjasama strategis dengan pemilik teknologi ataupun lembaga penelitian dasar dan terapan serta institusi pendidikan dalam rangka membangun sinergi inovasi untuk menghasilkan produk-produk hasil rekayasa dalam negeri.
3. Pengembangan bisnis baru (*New Revenue Stream*) untuk mempercepat perbaikan kondisi finansial perusahaan.
4. Melakukan kajian bisnis termasuk kajian risiko untuk menguji kelayakan dan mengidentifikasi risiko untuk bisnis baru perusahaan.
5. Melakukan kegiatan-kegiatan pendukung pengembangan produk seperti:
 - a. Pendaftaran paten untuk hasil-hasil inovasi Perseroan.
 - b. Sertifikasi produk atau jasa yang diperlukan.
 - c. Uji coba lapangan.
6. Melakukan manajemen produk baik yang akan atau sedang dikembangkan maupun telah dirilis.
7. Melakukan Sertifikasi Pengujian pada perangkat ADSB AGS- 320.

1. *Development of new and existing products according to market needs (Market Driven).*
2. *Build and enhance strategic cooperation with technology owners or basic and applied research institutions and educational institutions in order to build innovation synergies to produce products engineered domestically.*
3. *New business development (New Revenue Stream) to accelerate the improvement of the company's financial condition.*
4. *Conduct business studies including risk assessments, to test feasibility and identify risks for the company's new business.*
5. *Carry out supporting activities for product development such as:*
 - a. *Patent registration for the company's innovations.*
 - b. *Required product or service certification.*
 - c. *Field trial.*
6. *Carry out product management, both those that will be or are being developed or have been released.*
7. *Perform Test Certification on ADSB AGS-320 equipment.*

Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Pelestarian Lingkungan

Corporate Social Responsibility (CSR), Social and Environmental Responsibility, and Environmental Preservation

Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta senantiasa menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

Implementing the Corporate Social Responsibility program in accordance with applicable regulations and continuously implementing the Social and Environmental Responsibility



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

mendukung program Pemerintah secara efektif dan tepat sasaran.

that supports Government programs effectively and on target.

Investasi

Investment

1. Melaksanakan investasi pembangunan kompetensi Perseroan di bidang manufaktur, termasuk:
 - a. Pembangunan fasilitas produksi elektronika (perbaikan gedung, mesin-mesin, dan sebagainya), khususnya smart digital device, secara bertahap sesuai pertumbuhan bisnis Perseroan, dengan berbagai opsi skema investasi yang menguntungkan Perseroan.
 - b. Sertifikasi, lisensi, dan hak cipta khususnya untuk *product genuine*.
 - c. Server, aplikasi piranti lunak, dan alat olah data lainnya untuk keperluan manufaktur.
2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait seluruh kegiatan investasi
3. Kerja sama investasi industri manufaktur produk-produk telekomunikasi, elektronika, dan pendukungnya.
4. Melakukan pengadaan barang-barang investasi (bersama unit pengadaan) yang berupa peralatan produksi untuk mendukung pencapaian penjualan.

1. *Implementing the Company's competency development investments in manufacturing, including:*
 - a. *Construction of electronics production facilities (building repairs, machines, etc.), especially smart digital devices, in stages according to the Company's business growth, with various investment scheme options that benefit the Company.*
 - b. *Certifications, licenses, and copyrights, especially for genuine products,*
 - c. *Servers, software applications and other data processing tools for manufacturing purposes.*
2. *Carry out effective risk management related to all investment activities.*
3. *Investment cooperation in manufacturing telecommunications, electronics and supporting products.*
4. *Procurement of investment goods (with procurement units) in the form of production equipment to support sales achievement.*

Optimalisasi Aset

Asset Optimization

1. Perolehan kontrak dan pendapatan sewa lahan atau gedung dalam jumlah yang optimal.
2. Kerja sama optimalisasi lahan dan bangunan dengan investor.
3. Optimalisasi aset tetap perusahaan berupa lahan atau gedung sesuai bisnis perusahaan sehingga memberikan hasil usaha yang maksimal.
4. Renovasi bangunan fasilitas produksi untuk membangun INTI Smart Industrial Park.

1. *Obtaining the optimal amount of land or building rental income and contracts.*
2. *Cooperation in optimizing land and buildings with investors.*
3. *Optimizing the company's fixed assets in the form of land / buildings according to the company's business so as to provide maximum business results.*
4. *Renovation of the production facility building to build the INTI Smart Industrial Park.*

Produksi

Production

1. Menyiapkan dokumen produksi seperti Petunjuk Kerja, Prosedur Kerja, <i>Operating Process Chart</i>, dan Perhitungan Waktu Standar. 2. Melakukan proses produksi atau perbaikan atas produk yang dipasarkan oleh Divisi Pemasaran dan Penjualan. 3. Mendukung sertifikasi produk seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Metrologi, Standar PLN, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan STEL-Q. 4. Mendukung Uji Coba Lapangan dan Sertifikasi produk-produk seperti <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADSB), <i>Base Transceiver Station Universal Service Obligation</i> (BTS USO), <i>Internet of Things</i>, <i>Virtual Trunking</i>, <i>All Terrain Vehicle</i> (ATV), dan <i>Set Top Box</i> (STB).	1. <i>Prepare production documents such as, Work Instructions, Work Procedures, Operating Process Chart, and Standard Time Calculation.</i> 2. <i>Carry out production or repair processes for products marketed by Marketing and Sales division.</i> 3. <i>Support product certification such as, Indonesian National Standard, Metrology, PLN Standard, Domestic Content Level, and STEL-Q.</i> 4. <i>Supports Field Trial and Certification of products such as Automatic Dependent Surveillance- Broadcast (ADSB), Base Transceiver Station Universal Service Obligation (BTS USO), Internet of Things, Virtual Trunking, All Terrain Vehicle (ATV), and Set Top Box (STB).</i>

Kebijakan dan Pembayaran Dividen

Dividend Policy and Payment

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen pada tahun 2021 karena Perseroan masih memiliki saldo kerugian dari rugi bersih.

As stipulated in Article 26 of the Company's Articles of Association, the Company did not distribute dividends in 2021 because the Company still has a balance of losses from net losses.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan indikator kinerja Perseroan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002 tertanggal 4 Desember 2020, dilaporkan sebagai berikut:

Assessment of the Company's Health Level based on the Company's performance indicators referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number KEP-100/MBU/2002 dated December 4, 2020, reported as follows:

Uraian Description	RKAP 2021 Corporate Work Plan and Budget 2021		Realisasi 2021 Realization 2021		Realisasi 2020 Realization 2020	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
Aspek Keuangan (Financial Aspect)						
1 Return on Equity (%)	32,6	0,0	24,8	-	54,1	-
2 Return on Interest (%)	6,4	5,0	(4,2)	1,0	(6,6)	1,0
3 Cash Ratio (%)	7,9	1,0	5,5	1,0	14,0	2,0
4 Current Ratio (%)	107,4	3,0	43,9	-	52,3	-
5 Collection Periods (Hari/Days)	89,7	4,5	101	4,0	26,9	5,0
6 Perputaran Persediaan (Hari) Inventory Turnover (Days)	77,0	4,5	143	3,5	133,8	3,5
7 Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	139,3	5,0	31,2	2,0	34,6	2,0
8 Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%)	(45,7)	0,0	(44,7)	-	(36,3)	-
Jumlah Aspek Keuangan Number of Financial Aspects		23,0		11,5		13,5
Aspek Operasional (Operational Aspects)						
1 Increasing Order/Contract Booked (%)	92,1	5,0	3,9	0,2	(54,2)	-
2 Percentage of Government Contract (%)	24,2	5,0	23,6	4,9	13,6	5,0
3 Order Fulfillment Rate (%)	82,3	5,0	72,5	4,4	59,1	5,0
Jumlah Skor Aspek Operasional Total Operational Aspect Scores		15,0		9,5		10,0
Skor Aspek Administrasi (Administrative Aspect Scores)						
1 Laporan Keuangan Tahun Buku Annual Report	Maret 2022	3,0	Maret 2022	3,0	Maret 2020	3,00
2 RKAP Company Work Plan And Budget	Oktober 2021	3,0	Oktober 2021	3,0	Oktober 2020	3,00
3 Keterlambatan Laporan Manajemen Per Triwulan Delay Quarterly Management Reports	0 Hari/Day	3,0	0 hari	3,0	0 Hari/Day	3,00
4 Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Performance of Partnership Program and Environment Development						
• Efektivitas Penyaluran Dana Fund Distribution Effectiveness	100%	3,0	87,5%	2,6	93,93%	2,8
• Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Dana Collectibility Level of Fund Distribution	73%	3,0	71,86%	3,0	70,64%	2,9
Jumlah Skor Aspek Operasional Total Operational Aspect Scores		15,0		14,6		14,7
Total Skor		53,0		35,6		38,2

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kurang Sehat BBB

Kurang Sehat B

Kurang Sehat B

Pembelian Kembali Saham Perusahaan

Company Share Buyback

Pada tahun 2021, tidak terdapat informasi pembelian kembali saham perusahaan.

In 2021, there is no information on the company's share repurchase.

Informasi Material Terkait Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal

Material Information Related to Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2021, tidak terdapat informasi Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal.

In 2021, there is no information on Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi

Material Transaction Information That Contains Conflict of Interest and/or Affiliated Transaction

Pada tahun 2021, tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi.

In 2021, there was no material information that contained interests and/or affiliated transactions.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Changes in Legislation That Has Significant Influence on The Company

Perseroan memastikan bahwa selama tahun 2021, tidak ada perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

The Company ensures that during 2020, there are no changes to the Laws and Regulations that have a significant effect on the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Pernyataan Kepatuhan

Statement of Compliance

Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

The Consolidated Financial Statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards and Interpretation of Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant.

Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Basis of Presentation and Preparation of The Consolidated Financial Statement

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas Konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the Consolidated Statements of Cash Flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The Consolidated Statements of Cash Flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas di dalam Perseroan menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Company determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in The Current Year

Berikut adalah revisi, amandemen, dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta Interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

The following are revisions, amendments, and adjustments to Financial Accounting Standards as well as interpretations of Financial Accounting Standards effective for the financial year starting on or after January 1, 2021, namely:



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk.
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd.
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf.
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan.
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi.
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset.
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama.
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.
- *Statement of Financial Accounting Standards 22 (Amendment 2019): Business Combination on Definition of Business.*
- *Amendment to Statement of Financial Accounting Standards 71, Amendment to Statement of Financial Accounting Standards 55, Amendment to Statement of Financial Accounting Standards 60, Amendment to Statement of Financial Accounting Standards 62 and Amendment to Statement of Financial Accounting Standards 73 concerning Reform of Interest Rate Reference - Phase 2.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 110 (Adjustment 2020): Accounting for Sukuk.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 111 (Adjustment 2020): Wa'd Accounting.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 112: Accounting for Waqf.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 1 (Annual Adjustment 2021): Presentation of Financial Statements.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 13 (Annual Adjustment 2021): Investment Properties.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 48 (Annual Adjustment 2021): Impairment of Asset Value.*
- *Statement of Financial Accounting Standards 66 (Annual Adjustment 2021): Joint Arrangements.*
- *Interpretation of Financial Accounting Standards 16 (Annual Adjustment 2021): Service Concession Agreement.*

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of these standards did not result in a substantial change in the Company's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

Kelangsungan Usaha

Business Continuity

Dengan memperhatikan kinerja Perseroan hingga akhir tahun 2021, faktor utama belum tercapainya kinerja Penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 yaitu antara lain pandemi Covid-19 dengan pembatasan mobilitas sedikit banyak berpengaruh kepada realisasi bisnis, baik dari peluang keikutsertaan tender berkurang akibat dari laporan kinerja Perusahaan, kastemer yang menunda sebagian proyek yang ditargetkan, maupun dari sisi manajemen proyek terkait biaya dan waktu implementasi.

Seiring dengan perkembangan strategi jangka panjang di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengacu kepada Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-43/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020, PT INTI (Persero) secara resmi ditunjuk bersama-sama dengan 35 perusahaan BUMN lain, sebagai salah satu anggota dari program restrukturisasi atau optimasi aspek bisnis dan scale-up di bawah naungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Danareksa (Persero) yang masih berlanjut sampai tahun 2021.

Dalam hal ini, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) diberikan kuasa khusus oleh Kementerian BUMN untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi wewenang dan/atau hak Pemegang Saham. Adapun yang menjadi fokus utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terhadap BUMN yang berada di bawah naungannya adalah restrukturisasi dan optimisasi aspek bisnis perusahaan.

Perseroan tetap menginisiasi 6 (enam) skema bisnis dengan memaksimalkan potensi sinergi BUMN, antara lain dengan PT Telkom, PT Pindad, dan BUMN potensial lainnya, yang diharapkan dapat mendongkrak bisnis Perusahaan dengan skema kerja sama yang bersifat recurring.

Perseroan akan mengembangkan lini bisnis *Manufacture & Assembly, System Integrator, Digital Service*, dan *Managed Service* (MSDM). Perusahaan akan mendorong terlaksananya inisiatif kerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., PT Pindad (Persero), PT Jalin, serta pihak-pihak potensial lainnya, di mana PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang bertindak sebagai *standby* pendanaan bagi PT INTI (Persero).

Perseroan memfokuskan bisnis Perusahaan pada segmen Telkom Group sebagai kastemer utama, sehingga total perolehan kontrak dari Telkom Group ditargetkan mencapai 55%, 33% dari segmen kastemer *Enterprise* dan sisanya berasal dari segmen *Government*. Kemudian menargetkan pendapatan *Recurring* mencapai 41% dari total Penjualan.

Taking into account the Company's performance until the end of 2021, the main factor is that the sales performance has not been achieved in accordance with the targets set in the Revised Work Plan and Corporate Budget 2021, namely, among others, the Covid-19 pandemic with mobility restrictions has more or less affected business realization, both from reduced tender participation opportunities as a result of the Company's performance reports, customers delaying some of the targeted projects, as well as from the project management side regarding costs and implementation time.

Along with the development of the long-term strategy at the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and referring to the Special Power of Attorney Number SKK-43/MBU/09/2020 dated September 30, 2020, PT INTI (Persero) was officially appointed together with 35 companies other SOEs, as a member of the restructuring program or optimization of business aspects and scale-up under the auspices of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and PT Danareksa (Persero) which will continue until 2021.

In this case, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) is given special powers by the Ministry of SOEs to take actions that are the authority and/or rights of the Shareholders. The main focus of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for the SOEs under its auspices is the restructuring and optimization of the company's business aspects.

The Company continues to initiate 6 (six) business schemes by maximizing the potential for SOEs synergies, including with PT Telkom, PT Pindad, and other potential SOEs, which are expected to boost the Company's business with recurring cooperation schemes.

The company will develop the Manufacturing & Assembly, System Integrator, Digital Service, and Managed Service (MSDM) business lines. The company will encourage the implementation of cooperation initiatives with PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., PT Pindad (Persero), PT Jalin, as well as other potential parties, where PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) which acts as a funding standby for PT INTI (Persero).

The Company focuses its business on the Telkom Group segment as the main customer, so that the total contract acquisition from the Telkom Group is targeted to reach 55%, 33% from the Enterprise customer segment and the rest from the Government segment. Then target Recurring income to reach 41 percent of total sales.



Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis

Saat ini, Perseroan telah mengupayakan peningkatan Pendapatan Lain-Lain melalui Optimalisasi Aset yang ada. Perseroan akan lebih mengoptimalkan lahan yang tidak terpakai di area kantor pusat. Adapun lokasi Fasilitas Produksi di Jalan Moch Toha Nomor 225 Bandung sedang dalam proses renovasi dan akan direvitalisasi untuk mendukung produksi yang diharapkan berasal dari Kontrak Penjualan Produk tahun 2021 melalui kerja sama strategis dengan beberapa pihak.

Perseroan akan melakukan penyelesaian utang Bank melalui strategi *Debt to Asset Settlement* dan *Debt to Equity Swap*.

Currently, the Company has been trying to increase Other Income through Optimizing existing Assets. The company will further optimize unused land in the head office area. The location for the Production Facility at Moch Toha Street Number 225 Bandung is in the process of being renovated and will be revitalized to support production which is expected to come from the 2021 Product Sales Contract through strategic collaborations with several parties.

The Company will settle the Bank's debt through the Debt to Asset Settlement and Debt to Equity Swap strategies.

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Which Has Been Reported Contains Extraordinary and Rare Events

Terdapat rencana penjualan atau pelepasan atas aset signifikan oleh Perseroan, berupa Persediaan Usang atau *Deadstock* sebesar Rp15.881.071.386 (harga perolehan) yang direncanakan akan diproses pada tahun 2022.

There is a plan to sell or dispose of significant assets by the Company, in the form of Outdated Supplies or Deadstock amounting to Rp15,881,071,386 (acquisition price) which is planned to be processed in 2022.

Peningkatan yang Material Dikaitkan Dengan Jumlah Barang yang Dijual atau Barang Baru

Material Increase Related to Sales Volume or New Products

Pada tahun 2021, PT INTI (Persero) mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan. Capaian pertumbuhan kinerja positif tersebut tidak terlepas dari upaya PT INTI (Persero) untuk terus melakukan inovasi dalam bidang produksi dan penjualan dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi dan penjualan, serta implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan biaya yang tepat dan efisien.

PT INTI (Persero) mencatatkan volume produksi sebagai berikut:

In 2021, PT INTI (Persero) recorded growth in financial performance. This positive growth achievement is inseparable from PT INTI (Persero)'s efforts to continue to innovate in the field of production and sales with a focus on increasing product value added, optimizing production and sales levels, as well as implementing strategic policies related to appropriate and efficient cost management.

PT INTI (Persero) recorded production volumes as follows:

Uraian <i>Description</i>		Satuan <i>Unit</i>	Realisasi Hingga Desember <i>Realization until December</i> 2021
Produksi Product Genuine <i>Genuine Product Production</i>			
1	Mobile Point of Sales (MPOS)	Unit	10
2	KTP-el Reader (Identik)	Unit	115
3	KTP-el Modular (ISRM)	Unit	22



Profitabilitas

Profitability

Dengan kondisi perusahaan yang berusaha untuk bangkit saat pandemi Covid-19 yang masih belum usai, performa *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)* pada 2021 sebesar negatif Rp50,54 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp30,54 miliar dari tahun sebelumnya atau naik 37,67% namun tidak mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 sebesar Rp34,76 miliar atau negatif 145,39%.

Pertumbuhan Profitabilitas PT INTI (Persero) pada 2021 tercermin pada capaian Laba Kotor sebesar Rp45,23 miliar atau setara dengan 12,17% dari Penjualan, tidak mencapai target prosentase laba kotor RKAP Tahun 2021 sebesar 14,44%, tapi lebih baik dari tahun lalu yaitu 62,32%.

Laba Kotor tersebut terutama berasal dari proyek *Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE)*, Kontrak Harga Satuan (KHS) *Repair & Refurbished NTE*, Pengadaan & Pemasangan *Outside Plan (OSP)* Fiber Optic Node-B, *Outside Plan (OSP)* Fiber Optic Feeder dan Node B, serta Kontrak Harga Satuan (KHS) Pengadaan Material-Telkom Akses.

Pencapaian Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp63,35 miliar atau turun sebesar Rp30,42 miliar atau 32,44% dari realisasi tahun 2020. Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp52,07 miliar yang setara dengan 62,54% terhadap RKAP Tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp11,50 miliar atau 18,09% dari realisasi tahun 2020.

Laba Kotor belum cukup untuk menutup Beban Usaha dan Beban Pendanaan, sehingga Perseroan mengalami Rugi Usaha Setelah Beban Pendanaan sebesar Rp115,42 miliar, ditambah Beban Pajak Penghasilan, maka Perseroan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp109,42 miliar atau 69,91 persen terhadap RKAP tahun 2021 yang setara dengan penurunan kerugian sebesar Rp49,01 miliar atau 30,93% dari realisasi di tahun 2020 yang sebesar Rp158,43 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar negatif Rp53,79 miliar terutama akibat defisit dari Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional, Pembayaran kepada Karyawan, Pembayaran Pajak Penghasilan, serta Beban Pendanaan di mana sumber dananya berasal dari Saldo Kas Awal Tahun 2021, Penerimaan dari Pelanggan, Penerimaan Bunga Jasa Giro, serta Penerimaan Lainnya.

With the condition of the company trying to rise during the Covid-19 pandemic which is still not over, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) performance in 2021 was negative Rp50.54 billion.

This amount increased Rp30.54 billion from the previous year or an increase of 37.67% but did not achieve the Company Work Plan and Budget 2021 target of Rp34.76 billion or negative 145.39%.

Profitability growth of PT INTI (Persero) in 2021 was reflected in the achievement of Gross Profit of Rp45.23 billion or equivalent to 12.17% of Sales, not achieving the target percentage of gross profit of the Company Work Plan and Budget 2021 14.44%, but better than in then that is 62.32%.

The Gross Profit mainly came from the Repair & Refurbished Network Terminal Equipment (NTE) project, Unit Price Contract Repair & Refurbished NTE, Procurement & Installation of Fiber Optic Node-B Outside Plant (OSP), Outside Plant (OSP) Fiber Optic Feeder and Node B, as well as Unit Price Contract for Material Procurement-Telkom Access.

The achievement of Operating Loss Before Finance Expenses of Rp63.35 billion or a decrease of Rp30.42 billion or 32.44% from the realization in 2020. Realized Finance Expenses amounted to Rp52.07 billion which is equivalent to 62.54% of the Company Work Plan and Budget 2021 or decreased by Rp11.50 billion or 18.09% from the realization in 2020.

Gross Profit was not sufficient to cover Operating Expenses and Funding Expenses, so the Company had Operating Loss After Funding Expenses of Rp115.42 billion, plus Income Tax Expense, the Company recorded a Loss for the Year of Rp109.42 or 69.91 percent against the the Company Work Plan and Budget 2021 which is equivalent to a decrease in losses of Rp49.01 billion or 30.93% of the realization in 2020 which was Rp158.43 billion.

Cash Flow from Operating Activities is negative Rp53.79 billion, mainly due to deficits from Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses, Cash Paid for Employees, Corporate Income Tax Paid, and Cash Paid for Financing Expenses where the source of funds comes from Cash Balance at the beginning of 2021, Cash Receipts from Customers, Interest Income from Current Account, and Other Receipts.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp1,25 miliar karena pengeluaran untuk Perolehan Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap melebihi penerimaan kas dari aktivitas investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp4,89 miliar, pemasukan kas aktivitas pendanaan berupa Penerimaan Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, sedangkan pengeluarannya berupa Pembayaran Pinjaman kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, sehingga Kas dan Bank Akhir Periode sebesar Rp37,86 miliar.

Cash Flow from Investing Activities deficit of Rp1.25 billion due to expenditure on Purchase of Intangible Assets and Fixed Assets exceed cash received from Investing Activities.

Cash Flow from Financing Activities in 2021 amounted to Rp4.89 billion, cash received from financing were Cash Received from Bank Loan and Financial Institution Loan, while the expenditure were Payment for Bank Loan and Financial Institution Loan, so that Cash on Hand and in Banks at Ending of Year were Rp37.86 billion.

Informasi Mengenai Perpajakan

Information Regarding Taxation

Penerimaan negara yang berasal dari kegiatan operasional PT INTI (Persero) berupa pajak dan retribusi. Besarnya kontribusi pajak kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

State revenues originating from PT INTI (Persero)'s operational activities are in the form of taxes and retribution. The amount of tax contributions to the Central and Regional Governments in 2021 is as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

	Uraian Description	Nilai Score
I	Penerimaan Pusat Central Reception	
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Income Tax Article 21	600,90
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan Income Tax Corporate Taxpayer	
	• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor Income Tax Article 22 Import	138,86
	• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Dalam Negeri Income Tax Article 22 Domestic	107,03
	• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Wajib Bayar (WABA) Income Tax Article 23 Must Pay	3.228,67
	• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) Wajib Bayar (WABA) Income Tax Article 4 (2) Must Pay	792,03
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Wajib Pungut (WAPU) Income Tax Article 22 Must Collect	515,85
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Wajib Pungut (WAPU) Income Tax Article 23 Must Collect	654,72
5.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 (WAPU) Income Tax Article 4 (2) Must Collect	408,47
6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Output Value Added Tax (VAT)	20.635,86
7.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan Input Value Added Tax (VAT)	0,29
8.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Income Tax Article 25	0
Jumlah I Amount I		27.082,40

II	Penerimaan Daerah <i>Regional Receipt</i>	
	Pajak Bumi dan Bangunan <i>Property Tax</i>	
	• Tegallega	776,63
	• Palasari	192,02
	Jumlah II <i>Amout II</i>	968,65
	Jumlah <i>Amount</i> (I + II)	28.051,05

Investasi

Investment

Realisasi Investasi Konsolidasi Perseroan Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 2,60 miliar atau 9,66% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Revisi tahun 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

The realization of the Company's Consolidated Investment in 2020 was recorded at Rp 2.60 billion or 9.66% of the Revised Company Work Plan and Budget 2020, with a summary as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	RKAP Corporate Work Plan and Budget 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2021	Realisasi Audited Realization Audited 2020	% Pencapaian Terhadap RKAP Achievement of Corporate Work Plan and Budget	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Aset Tetap Fixed Assets					
1 Bangunan dan Emplasemen Buildings and Emplacements	5.940,00	192,00	93,50	3,23	105,34
2 Mesin dan Instalasi Machinery and Installation	8.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Alat Ukur & Perkakas Kerja Measuring Tools & Work Tools	1.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Alat Olah Data/Sistem informasi Data Processing Tools/Information systems	691,00	205,73	0,00	29,77	0,00
5 Inventaris Kantor & Gudang Office & Warehouse Inventory	0,00	0,00	9,45	0,00	(100,00)
6 Alat Angkut atau Kendaraan Transport Equipment or Vehicles	645,20	0,00	447,21	0,00	(100,00)
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	17.233,82	397,73	550,16	2,31	(27,71)
Aset Tak Berwujud Intangible Assets					
1 Aset Dalam Pembangunan Pengembangan Produk Assets Under Construction Product Development	3.861,54	377,76	541,91	9,78	(30,29)
2 Software (SAP) Lisensi, Merk, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Software (SAP) License, Brand, Intellectual Property Rights (IPR)	1.158,92	983,83	983,92	84,89	(0,01)
3 Lisensi, Merk, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) License, Brand, Intellectual Property Rights (IPR)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Total Intangible Assets	5.020,46	1.361,59	1.525,83	27,12	(10,76)
Total	22.254,28	1.759,32	2.075,99	7,91	(15,25)

Realisasi Investasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp316,67 juta atau minus 15,25% dibandingkan dengan tahun 2020.

Investment realization in 2021 decreased by Rp316.67 million or minus 15.25% compared to 2020.

Realisasi Investasi terbesar berasal dari Aset Tak Berwujud berupa Software (SAP) Lisensi, Merk, HAKI sebesar Rp983,83 juta. Sedangkan realisasi Investasi terkecil yaitu pada Aset Tetap berupa Bangunan dan Emplasemen sebesar Rp192 juta.

The largest investment realization came from Intangible Assets in the form of Software (SAP) Licenses, Brands, Intellectual Property Rights amounting to Rp983.83 million. Meanwhile, the smallest Investment realization was in Fixed Assets in the form of Buildings and Emplacements amounting to Rp192 million.

Proyek-Proyek Pengembangan

Development Projects

Kerja Sama Sesama Badan Usaha Milik Negara

Cooperation With State Owned Enterprises (SOEs)

1. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

- a. Perjanjian Kerahasiaan mengenai Kerja sama Riset dan Manufakturing di bidang Virtual Terminal dengan Nomor 179/HK.03/010600/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 dengan masa berlaku hingga 23 Agustus 2021.
- b. Perjanjian Kerja Sama Produksi Uji Coba Inovasi N10B dengan Nomor K.TEL.004153/HK.810/TCU-05000000/2021 tertanggal 12 Juli 2021 dan berlaku hingga 3 September 2021.
- c. Perjanjian Pengadaan *Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE) Indihome Segmen Consumer dengan Nomor K.TEL.028/HK.810/OPS-10000000/2021 tertanggal 3 November 2021.
- d. Perjanjian Kerahasiaan Informasi Pengadaan Jasa *Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE) Indihome Segmen Consumer tertanggal 3 November 2021 dan berlaku hingga 2 November 2026.
- e. Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optik* (OSP-FO) Telkom Regional V Batch 2 Tahun 2021 Nomor: K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021.

2. PT Len Telekomunikasi Indonesia

Perjanjian Kerahasiaan mengenai Pekerjaan Penyediaan Jasa *Managed Services* pada Pemeliharaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Proyek 4 dan Proyek 5 dengan Nomor 103/NDA/LTI/VII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 dan berlaku sampai dengan 3 Agustus 2023.

3. Perusahaan Perseroan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Nota Kesepahaman tentang kerja sama Implementasi *Train Control Monitoring System* (TCMS) pada rangkaian kereta milik KAI berlaku sejak 28 September 2021 hingga 27 September 2022.

1. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

- a. Confidentiality Agreement regarding Research and Manufacturing Cooperation in the field of Virtual Terminal Number 179/HK.03/010600/2018 dated August 24, 2018 with a validity period until August 23, 2021.
- b. Innovation Trial Production Cooperation Agreement with Number K.TEL.004153/HK.810/TCU-05000000/2021 dated July 12, 2021 and valid until September 3, 2021.
- c. Procurement Agreement for Refurbished NTE Indihome Consumer Segment with Number K.TEL.028/HK.810/OPS-10000000/2021 dated November 3, 2021.
- d. Confidentiality Agreement Service Procurement Information Network Terminal Equipment (NTE) Indihome Consumer Segment on November 3, 2021 and valid until November 2, 2026.
- e. Procurement and Installation Agreement for Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO) Telkom Regional V Batch 2 Year 2021 Number: K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021.

2. PT Len Telekomunikasi Indonesia

Confidentiality Agreement regarding Managed Services Provision Jobs Maintenance of Palapa Ring Fiber Optic Backbone Network Middle Package Project 4 and Project 5 with Number 103/NDA/LTI/VII/2021 dated August 4, 2021 and valid until August 3, 2023.

3. Perusahaan Perseroan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Memorandum of Understanding regarding cooperation in the Implementation of Train Control Monitoring System (TCMS) on a series of trains belonging to KAI is valid from September 28, 2021 to September 27, 2022.

Kerja Sama Luar Negeri

Foreign Cooperation

Kerja sama mitra luar negeri yang sedang berjalan antara lain:

Ongoing cooperation with foreign partners includes:

1. IDS Ingegneria Dei Sistemi S.P.A

Mutual Non-Disclosure Agreement (NDA) Pembahasan Peluang dan Potensial Kemitraan di bidang Offset dan Lokal Konten, relevan program Airbus Satelit Satkomhan tertanggal 30 November 2016 hingga 29 November 2023.

2. Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)-Yalong

- a. Perjanjian Nomor 75/HK.02/010600/2018 tertanggal 16 Maret 2018 tentang Kerja Sama Produksi, Perakitan, dan Pengembangan Peralatan untuk Meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Alat Peraga atau Praktikum. Tujuan produk tersebut untuk mengembangkan standar kompetensi, perangkat pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi dengan masa berlaku hingga 15 Maret 2023.
- b. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan - Universitas Pendidikan Indonesia (FPTK UPI) Nota Kesepahaman mengenai dukungan program prioritas nasional pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru di Indonesia dengan Nomor 151/HK.02/010600/2018 berlaku mulai 2 Agustus 2018 hingga 1 Agustus 2023.

3. Wavetrack, Inc.

Nota Kesepahaman mengenai kerja sama ODU Repair Center di Indonesia, dengan Nomor 252/HK.03/010600/2018 tertanggal 12 November 2018 hingga 11 November 2021.

4. Wavetrack Co.,Ltd

Nota Kesepahaman Nomor 13/HK.03/010600/2020 tertanggal 6 Mei 2020 perihal Perancangan, Manufaktur, Instalasi, Perakitan, Pemeliharaan, Penjualan, Pemasaran, serta Pengembangan Perangkat Ka-Band dan Ku-Band VSAT *End-User*. Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun.

5. HID Global Corporation

Perjanjian Kerahasiaan Nomor 75/HK.03/010600/2020 tertanggal 14 Mei 2020 perihal kerja sama bisnis tentang manajemen identitas yang aman termasuk namun tidak terbatas pada hardware, software dan service untuk subsistem Tag, Beacon, Gateway, SDK, API Management, dan Keamanan. Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun.

6. Sirius Asia Holding

Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam menyediakan perangkat *cyber security* dari BULL SAS ATOS di Kementerian Luar Negeri Nomor 211/HK.03/010500/2021 tertanggal 17 November 2021 dan berlaku hingga 16 November 2022.

7. Hengli Digital Industrial Co., Ltd

Nota Kesepahaman mengenai kerja sama di Perangkat DVB-T2 di Indonesia dengan Nomor:

1. IDS Ingegneria Dei System S.P.A

Mutual Non-Disclosure Agreement (NDA) Discussion on Opportunities and Potential Partnerships in the field of Offset and Local Content relevant to the Satkomhan Airbus Satellite program from November 30, 2016 to November 29, 2023.

2. Habibie Program Alumni Association-Yalong

- a. Agreement Number 75/HK.02/010600/2018 dated March 16, 2018 concerning Cooperation in Production, Assembly, and Equipment Development to Increase Domestic Content of Teaching Aid or Practicum Products.. The purpose of the product is to develop competency standards, learning tools and assessments for vocational education with a validity period of March 15, 2023.
- b. Faculty of Technology and Vocational Education - Indonesian Education University The Memorandum of Understanding regarding support for national priority programs for vocational education and improving the quality of teachers in Indonesia under Number 151/HK.02/010600/2018 is valid from 2 August 2018 to 1 August 2023.

3. Wavetrack, Inc.

Memorandum of Understanding regarding cooperation with ODU Repair Center in Indonesia, Number 252/HK.03/010600/2018 dated November 12, 2018 to November 11, 2021.

4. Wavetrack Co.,Ltd

Memorandum of Understanding Number 13/HK.03/010600/2020 dated May 6, 2020 regarding the Design, Manufacture, Installation, Assembly, Maintenance, Sales, Marketing, and Development of End-User Ka-Band and Ku-Band VSAT devices. This agreement is valid for 1 year.

5. HID Global Corporation

Confidentiality Agreement Number 75/HK.03/010600/2020 dated May 14, 2020 regarding business cooperation on secure identity management including but not limited to hardware, software and services for the Tag, Beacon, Gateway, SDK, subsystem API Management, and Security. This agreement is valid for 1 year.

6. Sirius Asia Holding

Memorandum of Understanding on cooperation in providing *cyber security* devices from BULL SAS ATOS at Ministry of Foreign Affairs Number 211/HK.03/010500/2021 dated November 17, 2021 and valid until November 16, 2022.

7. Hengli Digital Industrial Co., Ltd

Memorandum of Understanding regarding cooperation in DVB-T2 Devices in Indonesia

217/HK.03/031100/2021 tertanggal 23 November 2021 dan berlaku sampai dengan 22 November 2022.

Number 217/HK.03/031100/2021 dated November 23, 2021 and valid until November 22, 2022.

8. Vanstone Electronic (Beijing) Co.,Ltd

Perjanjian Kerahasiaan perihal kerja sama yang berkaitan dengan potensi bisnis Solusi Teknologi Keuangan di Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 1 Tahun.

8. Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd

Confidentiality Agreement regarding cooperation related to the business potential of Financial Technology Solutions in Indonesia. This agreement is valid for 1 year.

Kerja Sama Lainnya

Other Cooperation

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

- a. Perjanjian Kerahasiaan PT INTI (Persero) dan LAPAN Nomor 2623/HK.02/010600/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 dengan masa berlaku 6 (enam) tahun hingga 18 Oktober 2023.
- b. Perjanjian Lisensi Komersialisasi Sistem Pemantau Hujan dengan Nomor 4727/HK.03/010600/2019 tertanggal 13 Desember 2019 berlaku hingga 13 Desember 2024.

1. National Institute of Aeronautics and Space

- a. PT INTI (Persero) and National Institute of Aeronautics and Space Confidentiality Agreement Nomor 2623/HK.02/010600/2017 dated 19 October 2017 with a validity period of 6 (six) years until October 18, 2023.
- b. Rain Monitoring System Commercialization License Agreement Number 4727/HK.03/010600/2019 dated December 13, 2019 is valid until December 13, 2024.

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- a. Melakukan perpanjangan hak lisensi penjualan produk i-Perisalah, selama 5 Triwulan (31 Desember 2020), kerja sama pengembangan KTP-el Reader untuk e-Voting Pemilihan Kepala Desa dan pengembangan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B) untuk monitoring pesawat terbang.
- b. Perjanjian Lisensi Teknologi Sistem Perisalah Nomor 0049/HK.02/021100/2016 tertanggal 24 Februari 2016 tentang Perjanjian dalam Pengembangan, Produksi, dan Pemasaran Produk Komersial dalam rangka Kerja Sama Bisnis yang Menguntungkan Kedua Belah Pihak dengan jangka waktu hingga 23 Februari 2021.
- c. Perjanjian kerahasiaan tentang Audit Teknologi Produk INTI *Smart Level Crossing* (i-SLC) Nomor 607/HK.03/010600/2019 dengan jangka waktu hingga 4 Maret 2021.
- d. Perjanjian Lisensi Produksi dan Komersialisasi *Elang Flight Tracker* dan *Kasuari Report Assembler* dengan Nomor 3547/HK.03/010600/2019 tertanggal 31 Oktober 2019. Lisensi berlaku mulai 9 Mei 2019 hingga 9 Mei 2023.
- e. Naskah Kesepahaman tentang pengkajian penerapan teknologi dalam rangka mendukung industri telekomunikasi, elektronika, dan teknologi informasi Nomor 009/HK.03/010500/2021 tertanggal 26 Januari 2021 hingga 26 Januari 2022.

2. Agency for the Assessment and Application of Technology

- a. Extending the license rights for the sale of the i-perisalah product, for 5 Quarters (December 31, 2020), cooperation in developing the KTP-el Reader for e-Voting Village Head Election and developing the *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B) system for aircraft monitoring.
- b. System Technology License Agreement Number 0049/HK.02/021100/2016 dated February 24, 2016 concerning Agreements for the Development, Production, and Marketing of Commercial Products in the context of Business Cooperation that benefits both parties with a period of time until February 23, 2021.
- c. Confidentiality agreement regarding the i-SLC Product Technology Audit Number 607/HK.03/010600/2019 with a term until March 4, 2021.
- d. Production and Commercialization License Agreement of *Eagle Flight Tracker* and *Cassowary Report Assembler* with Number 3547/HK.03/010600/2019 dated 31 October 2019. License valid from 9 May 2019 until 9 May 2023.
- e. Memorandum of Understanding regarding the study of the application of technology in order to support the telecommunications, electronics, and information technology industries Number 009/HK.03/010500/2021 dated January 26, 2021.to January 26, 2022.

3. PT Fusi Global Teknologi

Nota Kesepahaman Nomor 144/HK.02/010600/2018 bersama Institut Teknologi Bandung mengenai Kerja Sama dalam Pengembangan, Penerapan, Produksi,

3. PT Fusi Global Teknologi

Memorandum of Understanding Number 144/HK.02/010600/2018 with the Bandung Institute of Technology regarding cooperation in the

dan Komersialisasi Produk Base Station LTE e-Node B *Small-Cell* tertanggal 23 April 2018 dengan masa berlaku hingga 22 April 2021.

4. Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB)

Nota Kesepahaman bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PT INTI (Persero), dan PT CMI Teknologi Nomor 170/HK.02/010503/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Industri Radar Cuaca Nasional, dengan masa berlaku hingga 9 Agustus 2022.

5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Nota Kesepahaman bersama PT INTI (Persero), PT CMI Teknologi, dan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 170/HK.02/010503/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Industri Radar Cuaca Nasional, dengan masa berlaku hingga 9 Agustus 2022.

6. PT Trinitan Global Pasifik

Kerjasama Operasi Industri Perakitan Lampu LED tertanggal 13 Oktober 2018 dengan masa laku 5 (lima) tahun hingga 12 Oktober 2022.

7. Universitas Hasanuddin

Naskah Kesepahaman mengenai Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Produk Inovatif Bidang Teknologi Informasi dan Elektronika dengan Nomor 3413/HK.03/010600/2018 tertanggal 2 Februari 2018 dengan masa berlaku hingga 1 Februari 2023.

8. PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)

Nota Kesepahaman mengenai Sinergi Bisnis dan Produk tertanggal 25 Oktober 2018 dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2021 dengan Nomor 3894/HK.03/010600/2018.

9. PT Telkom Satelit Indonesia

Perjanjian Induk mengenai Kerja Sama Pengembangan Bisnis dan Produk dengan Nomor 3715/HK.03/010600/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 dengan masa berlaku hingga 22 Oktober 2021.

10. Universitas Pendidikan Indonesia

Naskah Kesepahaman mengenai Kolaborasi Riset, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi Hasil Riset & *Resource Sharing*, dan Komersialisasi Produk tertanggal 20 Maret 2019 dengan masa berlaku hingga 19 Maret 2024 dengan Nomor 87/HK.03/010600/2019.

11. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

a. Perjanjian Kerahasiaan mengenai Uji Coba *Base Transceiver Station (BTS) Small Cell* 4G dengan Nomor 3497/HK.03/010600/2019

Development, Implementation, Production and Commercialization of LTE e-Node B Small-Cell Base Station Products dated 23 April 2018 with a validity period until April 22, 2021.

4. Research and Industry Affiliated Institute of Bandung Institute of Technology

Memorandum of Understanding with Meteorology Climatology and Geophysics Council, PT INTI (Persero), and PT CMI Teknologi Number 170/HK.02/010503/2017 dated August 10, 2017 regarding the National Weather Radar Industry, with a validity period until August 9, 2022.

5. Meteorology Climatology and Geophysics Council

Memorandum of Understanding PT INTI (Persero), PT CMI Teknologi, and Research and Industry Affiliated Institute of Bandung Institute of Technology Number 170/HK.02/010503/2017 dated August 10, 2017 regarding the National Weather Radar Industry, valid until August 9, 2022.

6. PT Trinitan Global Pacific

LED Lamp Assembly Industry Operation Cooperation dated 13 October 2018 with a validity period of 5 (five) years until 12 October 2022.

7. Hasanuddin University

Manuscript of Understanding on Cooperation in Research and Development of Innovative Products in the Information Technology and Electronics Sector Number 3413/HK.03/010600/2018 dated February 2, 2018 with a validity period of up to February 1, 2023.

8. PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)

Memorandum of Understanding regarding Business and Product Synergy dated October 25, 2018 with a validity period of October 24, 2021 under Number 3894/HK.03/010600/2018.

9. PT Telkom Satelit Indonesia

Master Agreement regarding Business and Product Development Cooperation Number 3715/HK.03/010600/2018 dated October 23, 2018 with validity period until October 22, 2021.

10. University of Education Indonesia

Script of Understanding on Research Collaboration, Human Resource Capacity Development, Community Service, Downstreaming of Research Results & Resource Sharing, and Product Commercialization dated March 20, 2019 with a validity period until March 19, 2024 with Number 87/HK.03/010600/2019.

11. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

a. *Confidentiality Agreement regarding 4G Small Cell Base Transceiver Station (BTS) Trial* with Number 3497/HK.03/010600/2019 dated

tertanggal 8 Juli 2019 dengan masa berlaku hingga 7 Juli 2024.

- b. *Trial Agreement* produk *Base Tranceiver Station (BTS) Small Cell 4G* dengan Nomor 3496/HK.03/010600/2019 tertanggal 8 Juli 2019 berlaku hingga 7 Juli 2024.
- c. Perjanjian Kerahasiaan dalam kerja sama tertanggal 20 April 2018 dengan masa berlaku hingga 19 April 2028.

12. Iran Electronics Industry

Naskah Kesepahaman mengenai Kerja Sama Riset, Pengembangan, Manufaktur dan Komersialisasi Perangkat Elektronik dengan Nomor 2712/HK.03/010600/2019 tertanggal 10 Juli 2019 dengan masa berlaku hingga 9 Juli 2021.

13. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Institut Teknologi Bandung (ITB)

Nota Kesepahaman Kerja Sama Penelitian dan Penyelenggaraan Uji Operasional dengan Pendampingan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan nomor 296/HK.03/010600/2019 tertanggal 12 Desember 2019 berlaku hingga 12 Desember 2024.

14. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kerja Sama Pabrikasi dan Komersialisasi Ventilator Nomor 61/HK.03/010600/2020 tertanggal 23 April 2020 berlaku selama 1 tahun.

15. PT Ekacitra Bumikarya

Mengenai Perangkat Terminal IP Radio *Push-to-Talk Over Cellular Data* Nomor 122/HK.03/010600/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.

16. Telkom University

- a. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Komersialisasi Produk Inovasi Nomor 209/HK.03/010600/2021 tertanggal 30 Desember 2020.
- b. Perjanjian Kerahasiaan Desain Produk N10B Nomor 008/HK.03/010500/2021 tertanggal 15 Januari 2021 hingga 15 Januari 2024.

17. PT Quanta Qoretech Indonesia

Naskah Kesepahaman antara PT INTI (Persero) dan PT Quanta Qoretech Indonesia Nomor 006/HK.03/010500/2021 tertanggal 18 Januari 2021.

18. Gorilla Technology

Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam menyediakan layanan digital berupa *Edge AI*, *Video Intelligence*, *Network Intelligence*, dan *Big Data* yang didukung oleh produk-produk *Gorilla Technology* Nomor 13/HK.03/010500/2021 tertanggal 2 Februari 2021.

19. BULL SAS - Sirius Asia Holding

Perjanjian kerahasiaan BULL SAS - Sirius Asia Holding untuk tujuan kerja sama dalam teknologi anti intersep di Kementerian Luar Negeri Nomor 28/

July 8, 2019 with a validity period until July 7, 2024.

- b. *Trial Agreement* for *Base Tranceiver Station (BTS) Small Cell 4G* product number 3496/HK.03/010600/2019 dated July 8, 2019 is valid until July 7, 2024.
- c. *Confidentiality Agreement* in cooperation dated April 20, 2018 with a validity period until April 19, 2028.

12. Iran Electronics Industry

Text of Understanding on Cooperation in Research, Development, Manufacturing and Commercialization of Electronic Devices Number 2712/HK.03/010600/2019 dated July 10, 2019 with a validity period until July 9, 2021.

13. Meteorology Climatology and Geophysics Council and Bandung Institute of Technology

Memorandum of Understanding for Research Cooperation and Operational Testing with Meteorology Climatology and Geophysics Council Assistance Number 296/HK.03/010600/2019 dated December 12, 2019 valid until December 12, 2024.

14. Sepuluh November Institute of Technology

Cooperation in Manufacturing and Commercialization of Ventilators Number 61/HK.03/010600/2020 dated April 23, 2020 regarding is valid for 1 year.

15. PT Ekacitra Bumikarya

Regarding *Push-to-Talk Over Cellular Data IP Radio Terminal Equipment* Number 122/HK.03/010600/2020 dated 24 August 2020.

16. Telkom University

- a. *Memorandum of Understanding on Cooperation in the Commercialization of Innovation Products* Number 209/HK.03/010600/2021 dated December 30, 2020.
- b. *N10B Product Design Confidentiality Agreement* Number 008/HK.03/010500/2021 dated January 15, 2021 to January 15, 2024.

17. PT Quanta Qoretech Indonesia

Memorandum of Understanding between PT INTI (Persero) dan PT Quanta Qoretech Indonesia Number 006/HK.03/010500/2021 dated January 18, 2021.

18. Gorilla Technology

Memorandum of Understanding regarding cooperation in providing digital services in the form of Edge AI, Video Intelligence, Network Intelligence, and Big Data supported by Gorilla Technology products Number 13/HK.03/010500/2021 dated February 2, 2021.

19. BULL SAS - Sirius Asia Holding

Confidentiality Agreement among INTI - BULL SAS - Sirius Asia Holding for the purpose of cooperation in anti-intercept technology at Ministry of Foreign Affairs

HK.03/010500/2021 tertanggal 22 Februari 2021.

20. PT Pins Indonesia

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai partner dalam kerja sama pengembangan dan solusi *Internet of Things* (IoT), *manufacture* atau *assembly* perangkat *Gigabit Capable Passive Optical Network* (GPON), *Network Terminal Equipment* (NTE), *Customer-Premise Equipment* (CPE), dan *Repair GPON, NTE, dan CPE* Nomor 051/HK.03/010500/2021 tertanggal 26 April 2021.

21. PT Mitra Nata Raharja

Nota Kesepahaman tentang kerja sama *assembling dan manufacturing* generator oksigen merk Noxeror dan kelengkapannya Nomor 214/HK.03/031002/2021 tertanggal 19 November 2021.

22. PT Cakra Inti Indonesia

Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan, Penerapan, Optimalisasi Penjualan, Pemasaran dan Distribusi Produk PT INTI (Persero) di Lingkungan Mabes TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Pemda dan Institusi Terkait Lainnya, Nomor 15/PM.02/031004/2021 tertanggal 8 Februari 2021.

23. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 26/HK.03/010600/2021 tertanggal 2 Maret 2021.

24. PT Tata Sarana Makmur

Perjanjian Kerahasiaan terkait jual beli perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) dengan Nomor 186/HK.03/031000/2021 - B.NDA-R.007/CLG. TSM/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 dan berlaku hingga 13 Oktober 2023.

25. PT Perkebunan Nusantara VIII

Nota Kesepahaman tentang kerja sama implementasi transformasi digital pada lingkup kerja di PT Perkebunan Nusantara VIII.

26. PT Mitra Nata Raharja

Naskah Kesepahaman mengenai Kerja Sama *Assembling & Manufacturing* Generator Oksigen dan Kelengkapannya dengan Nomor 214/HK.03/03100/2021 tanggal 19 November 2021 dan berlaku hingga 18 November 2024.

27. PT Bringin Gigantara

Perjanjian Kerahasiaan Informasi mengenai kerja sama yang terkait dengan penyediaan perangkat *INTI Smart Reader Modular* (ISRM) guna pemenuhan kebutuhan perangkat pembaca e-KTP modular.

Number 28/HK.03/010500/2021 dated February 22, 2021.

20. PT Pins Indonesia

Joint Venture (JV) as a partner in Internet of Things (IoT) development and solution cooperation, manufacture or assembly of Gigabit Capable Passive Optical Network (GPON), Network Terminal Equipment (NTE), Customer-Premise Equipment (CPE), and Repair GPON, NTE, and CPE devices Number 051/HK.03/010500/2021 dated April 26, 2021.

21. PT Mitra Nata Raharja

Memorandum of Understanding regarding the cooperation assembling and manufacturing of the Noxeror brand oxygen generator and its accessories Number 214/HK.03/031002/2021 dated November 19, 2021.

22. PT Cakra Inti Indonesia

Memorandum of Understanding on Development, Implementation, Optimization of Sales, Marketing and Distribution of PT INTI (Persero) Products in the Indonesian National Armed Forces, Indonesian Republic Police, Regional Government and Other Related Institutions, Number 15/PM.02/031004/2021 dated February 8, 2021.

23. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Cooperation Agreement for Handling Complaints in Efforts to Eradicating Criminal Acts of Corruption, Number 26/HK.03/010600/2021 dated March 2, 2021.

24. PT Tata Sarana Makmur

Confidentiality Agreement regarding the sale and purchase of Electronic Data Capture (EDC) equipment with Number: 186/HK.03/031000/2021 - B.NDA-R.007/CLG. TSM/X/2021 dated October 14, 2021 and valid until October 13, 2023.

25. PT Perkebunan Nusantara VIII

Memorandum of Understanding regarding cooperation in implementing digital transformation in the scope of work at PT Perkebunan Nusantara VIII.

26. PT Mitra Nata Raharja

The Memorandum of Understanding regarding the Oxygen Generator Assembling & Manufacturing Cooperation and its Completeness Number 214/HK.03/03100/2021 dated November 19, 2021 and is valid until November 18, 2024.

27. PT Bringin Gigantara

Information Confidentiality Agreement regarding cooperation related to the provision of INTI Smart Reader Modular (ISRM) devices to fulfill the need for modular e-KTP reader devices.

28. PT ABE Industri Teknologi

Perjanjian Kerahasiaan terkait Pengembangan Platform *Artificial Intelligence* (AI) atau *Internet of Things* (IoT) di Industri Manufaktur di Indonesia.

29. PT Sentuh Digital Teknologi

Perjanjian Kerahasiaan Nomor 197/HK.03/031002/2021-025/NDA-SDT-INTI/X/21 tertanggal 9 Desember 2021 perihal rencana kerja sama dalam rangka *proof of technology* (PoT) dan peminjaman e-KTP Reader, perjanjian berlaku selama 1 tahun.

28. PT ABE Industri Teknologi

Confidentiality Agreement related to AI/IoT Platform Development in Manufacturing Industry in Indonesia.

29. PT Sentuh Digital Teknologi

Confidentiality Agreement Number 197/HK.03/031002/2021-025/NDA-SDT-INTI/X/21 dated December 9, 2021 regarding the cooperation plan in the context of proof of technology (PoT) and e-KTP Reader lending, the agreement is valid for 1 year.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pendahuluan

Preliminary

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perseroan, mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional, transparan, dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi Perseroan adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Bagi PT INTI (Persero), komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tapi diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar.

The concept of the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Company's organization is based on the Company's commitment to creating a transparent, accountable and trustworthy through business management that can be justified.

Application of GCG practices is one important step for the Company to increase and maximize the value of the Company, the Company's management encourages professional, transparent and efficient by increasing the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible, and fair so that it can better fulfill its obligations to Shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and stakeholders.

Furthermore, the Board of Commissioners, Directors, and employees are committed to implementing GCG practices in the management of the Company's operations. Awareness of the importance of good corporate governance for the Company is due to the desire to uphold integrity in running the business healthy and sustainable.

For PT INTI (Persero), a commitment to the implementation of this instrument does not only represent an obligation to comply with regulations, but is believed to be the key to success in achieving business performance effective, efficient, and sustainable indispensable in winning market competition.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perseroan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari. Hal ini tidak hanya tercermin di tingkatan Dewan Komisaris dan Direksi, tapi hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

Perseroan juga mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan.

Its implementation even becomes part of a company culture that is reflected in the attitudes and behavior in every day. This is not only reflected at the level of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but to all levels of employees, in order to create harmony to achieve the vision, mission and objectives of the Company which will protect the interest so of shareholders and stakeholders of other interests in the long term.

Company also communicate and implement socialization and training, as well as map of accountability and responsibility to ensure that every employee understands and knows the duties, functions and responsibilities according to changes in the Company's businesses and organizations.

Capaian Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021

Good Corporate Governance Assessment Achievements in 2021

Penandatanganan Pakta Integritas

Signing of Integrity Pact

Sebagai bentuk komitmen atas Kebijakan Kode Etik Perusahaan, segenap Insan PT INTI (Persero) diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas secara tahunan.

1. Seluruh Insan PT INTI (Persero) wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Pakta Integritas bagi seluruh Insan PT INTI (Persero).
3. Setiap Insan PT INTI (Persero) menerima satu salinan Pakta Integritas dan menandatangani formulir Pakta Integritas bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan yang didokumentasikan oleh fungsi yang menangani *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan.
4. Kebijakan Kode Etik Perusahaan harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan PT INTI (Persero).
5. Seluruh atasan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan tersebut.

As a form of commitment to the Company's Code of Ethics, all PT INTI (Persero)'s employees are required to sign the Integrity Pact on an annual basis.

1. All PT INTI (Persero)'s employees must sign an Integrity Pact which is a commitment to implement the Company's Code of Ethics.
2. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Integrity Pact for all PT INTI (Persero)'s employees.
3. Each PT INTI (Persero)'s employees receive a copy of the Integrity Pact and signs an Integrity Pact form stating that the person has received, understands, and agrees to comply with the Company's Code of Ethics which is documented by the function that handles *Good Corporate Governance* (GCG) in the Company.
4. The Company's Code of Ethics policy must be socialized to and understood by all PT INTI (Persero)'s employees.
5. All superiors are responsible and exemplify their subordinates for the implementation of the Company's Code of Ethics.

Internal Assessment Penerapan GCG 2020

Internal Assessment of GCG Implementation 2020

Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) pada BUMN perlu dilakukan Assessment dan/atau evaluasi penerapan GCG.

Berdasarkan Assessment Internal yang dilakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada perusahaan mencapai predikat kategori “Baik” dengan skor 76,69 tahun buku 2020.

According to the provisions of Article 44 paragraph (1) letter (b) Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs necessary assessment and/or evaluation of the application GCG.

Based on Internal Assessment that was done on the application of corporate governance practices, it can be concluded that the conditions for the application of the company GCG predicate category of “Good” with a score of 76,69 for the 2020 fiscal year.

No.	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot	Capaian Tahun 2020	
			Skor	% Capaian
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7	6,198	88,54
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	7,645	84,95
III	Dewan Komisaris	35	28,054	80,15
IV	Direksi	35	26,731	76,37
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,068	89,64
Sub Total		95	76,695	
VI	Aspek Lainnya	5	0	
Total		100	76,695	
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG			Baik	

Beberapa Rekomendasi Assessment GCG, sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

- Bagi Pejabat wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan LHKPN harus diberikan teguran.
- Kebijakan terkait LHKPN belum menyatakan secara eksplisit tentang batasan waktu penyerahan laporan LHKPN.
- Perseroan telah memiliki pedoman atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (Whistle Blowing System atau WBS), tapi masih harus dimutakhirkan muatan terkait kewajiban setiap potensi pelanggaran untuk wajib dilaporkan, serta menetapkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan WBS.

GCG Assessment Recommendations, as follows:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Governance

- Officials obliged to report State Administrative Wealth Report who do not report or are late in reporting State Administrative Wealth Report must be given a warning.
- Policies related to State Administrative Wealth Report have not explicitly stated the time limit for submitting State Administrative Wealth Report reports.
- The company has a guideline for the reporting system for alleged irregularities in the company concerned (Whistle Blowing System or WBS), but the contents must be updated regarding the obligations of each potential violation to be reported, as well as establishing an Internal Audit Unit to evaluate the effectiveness of the implementation WBS policy.



2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- a. Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen dan secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan pengangkatannya.
- b. Pemegang Saham menetapkan pedoman penilaian Direksi secara individu.
- c. Pemegang Saham menetapkan mekanisme sistem penerimaan laporan gejala penurunan perusahaan.

3. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan. Namun, Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris belum terpisah dari Anggaran Pelatihan Karyawan dan Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris belum dibuatkan Laporan.
- b. Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan dan sistem teknologi informasi.
- c. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris.

4. Direksi

- a. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan. Namun, Anggaran Pelatihan Direksi belum dijabarkan dari Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai dan setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh anggota Direksi belum dibuat laporannya.
- b. Direksi melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan mengambil keputusan yang diperlukan, namun pengambilan keputusan program atau kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah yang signifikan belum terdapat kajian kelayakan serta analisis risiko.
- c. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan setiap unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. Pembahasan kinerja dilakukan bulanan dengan Dewan Komisaris, tapi analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja unit di bawah Direksi tidak terdokumentasikan.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

- a. Kebijakan Pengendalian Informasi Perseroan belum secara konsisten diimplementasikan sesuai dengan kebijakan sehingga persepsi karyawan atas tingkat kepatuhan

2. General Meeting of Shareholders (GMS)

- a. Shareholders have not yet determined the members of the Independent Board of Commissioners and are explicitly stated in their appointment decision.
- b. Shareholders determine the Board of Directors' individual appraisal guidelines.
- c. Shareholders determine the mechanism for receiving the company's decline symptoms.

3. Board of Commissioners

- a. The Board of Commissioners carries out training programs in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners as needed. However, the Board of Commissioners' Training Budget has not been separated from the Employee Training Budget and the Board of Commissioners' Training Implementation Report has not been prepared.
- b. The Board of Commissioners has not reviewed the policies and implementation of corporate risk management and information technology systems.
- c. The Board of Commissioners has not yet assessed the performance of the Board of Directors individually and reports it in the Board of Commissioners' Duties Implementation Report.

4. The Directors

- a. The Board of Directors carries out training programs in order to improve the competencies of members of the Board of Directors as needed. However, the Board of Directors' Training Budget has not been spelled out from the Employee HR Development Costs and every training activity carried out by members of the Board of Directors has not yet been prepared the report.
- b. The Board of Directors implements programs or activities in accordance with the Company Work Plan and Budget and takes the necessary decisions, but the decision making of programs or activities that require significant amounts of investment and debt has not yet been assessed for feasibility and risk analysis.
- c. The Board of Directors analyzes and evaluates the performance achievements for positions of each unit under the Directors and the company level. Performance discussions are conducted monthly with the Board of Commissioners, but the analysis and evaluation of the performance achievements of the units under the Directors is not documented.

5. Information Disclosure and Transparency

- a. Company Information Control Policies have not been consistently implemented in accordance with policies so that employees' perceptions of the level of compliance with

- pengendalian kebijakan informasi masih rendah.
- Perseroan belum melaksanakan pertemuan atau gathering dengan stakeholders dalam upaya pemasaran atau pengenalan produk perusahaan.
 - Perseroan belum mengikuti *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* dan sejenisnya.

- informational policy controls are still low.*
- The company has not yet held a meeting or gathering with stakeholders in marketing efforts or the introduction of company products.*
 - The Company has not participated in the Corporate Social Responsibility (CSR) Award and the like.*

Sosialisasi

Socialization

Pada tahun 2021, telah diadakan sosialisasi Pencegahan Korupsi di Perusahaan pada karyawan PT INTI (Persero) yang dilakukan pada Maret dan Desember 2021. Sosialisasi secara tertulis kepada masing-masing karyawan dengan mengirimkan tautan melalui surat elektronik untuk mengunduh e-book dan pada portal Perusahaan yang berisi kebijakan tentang:

- Benturan Kepentingan
- Kode Etik
- Larangan Pemberian Hadiah dan Penerimaan Hadiah Suap dan sejenisnya
- Pedoman *Good Corporate Governance*
- Whistle Blowing System*

In the year 2021, socialization on Corruption Prevention in Corporate has been held to PT INTI (Persero)'s employees conducted in March and December 2021. Written socialization was also performed to each employee by sending a link via email and on the Company portal to download e-book containing the policy about:

- Conflict of Interest*
- Code of Conduct*
- Prohibition on the Granting of Rewards and Receipt of Bribe Gifts and the like*
- Good Corporate Governance Guidelines*
- Whistle Blowing System*

Soft Structure

Soft Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terdapat lima dokumen *Soft Structure Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

- Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.**
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang dan/atau mencegah terjadinya gratifikasi yang dianggap suap.
- Surat Keputusan Direksi Nomor KN.017/2021 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan.**
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur perihal Benturan Kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- Surat Keputusan Direksi Nomor KN. 006/2022 tentang Whistle Blowing System.**
Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan dan mengikat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perseroan serta untuk menjamin pengelolaan Perseroan dilakukan

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in conjunction with Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/2012 on the Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 on the Application of Good Corporate Governance, there are five documents Soft Structure of Good Corporate Governance which, consisting of:

- Decree of Directors Number KN.016/2021 on Gratification Control.***
This policy is intended to prohibit and/or prevent gratification are considered bribery.
- Decree of Directors Number KN.017/2021 on Conflict of Interest Policy.***
This policy is intended to regulate the conflict of interest and procedures regarding disclosure of the possibility of conflict of interest in order to ensure the company's management based on the principles of Good Corporate Governance.
- Decree of Board of Directors Number KN.006/2022 on Whistle Blowing System.***
This policy aims to meet compliance standards that have been set and are binding in carrying out daily activities of the Company and to ensure the Company's



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

4. **Surat Keputusan Direksi Nomor KN.020/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG).**
Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pihak yang berkepentingan.
5. **Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.010/2019 tentang Kode Etik**
Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan nilai-nilai budaya Perusahaan dan sebagai pedoman bagi Perusahaan untuk memastikan kegiatan usaha Perusahaan dijalankan dengan penuh integritas serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain *Soft Structure* sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap *Board Manual* yang telah ada sebelumnya.

management based on the principles of good corporate governance.

4. ***Decree of Board of Directors Number KN.020/2018 on Code of Corporate Governance (GCG)***
This policy aims to maximize value for the Company's stakeholders.
5. ***Decree of Directors No: KN.010/2019 of the Code of Conduct.***
This policy aims to establish cultural values of the Company and as a guideline for the Company to ensure the Company's operations are run with integrity and in accordance with the provisions of the laws and regulations in force.

Besides Soft Structure as mentioned above, the Company also conducts evaluations and adjustments to the Board Manual that has been there before.

Survey Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Stakeholders Perception Survey on Implementation of Good Corporate Governance

Survei Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT INTI (Persero) yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan adalah salah satu cara untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan.

Secara keseluruhan dari hasil survei dimaksud dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat persepsi pemangku kepentingan terhadap materi survei yakni, Pengungkapan Informasi, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komitmen, Kebijakan GCG, serta Penerapan GCG yang dilakukan Perseroan mencapai nilai rata-rata 76,69 atau masuk dalam kategori "Baik".

Stakeholders Perception Survey on the Implementation of Good Corporate Governance in PT INTI (Persero) conducted by Legal and Compliance Division is one way to find out about the perception of stakeholders on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company.

Overall the results of the survey is to obtain information that the level of perception of stakeholders on the survey material, Disclosure, Rights and Responsibilities of Shareholders, Commitment, GCG Policy, and GCG Implementation of the Company reached an average value of 76,69 or in the category "Good".

Jejak Langkah Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Milestones of Corporate Governance Implementation

Kinerja Usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus menerus dari organ-organ perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menurunkan biaya (*cost*), meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik merupakan perangkat yang handal bagi perusahaan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sistem pengelola untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan yaitu:

1. Pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya perusahaan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
2. Pengelola kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas (*International Organization for Standardization* atau ISO) dengan membentuk Manajemen Representative, sebagai pedoman pengelola perusahaan dan menjadi panduan kerja untuk karyawan.
3. Pembentukan Bagian Kerjasama dan Kepatuhan Divisi dan Kepatuhan.
4. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada proses bisnis berupa *System Application and Processing* (SAP).
6. Pemantauan Kinerja Individu, berupa penandatanganan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan perusahaan yang pencapaiannya dievaluasi secara berkala.

The Company's Business Performance is a reflection of the continuous efforts of the company's organs to maintain and improve the quality of good corporate governance. The Company believes that good corporate governance will reduce costs, increase stakeholder trust and improve best business practices. Thus, good corporate governance is a reliable tool for companies in responding to changes in the business environment and increasingly competitive competition.

With a high commitment, the Company makes various efforts to improve business performance and long-term growth that can increase value for shareholders, and other stakeholders. The management system to support the above includes several things as the foundation for the solid implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the company, namely:

1. *Implementation of business ethics and code of conduct which includes corporate cultural values that have been communicated to employees and other stakeholders through socialization activities.*
2. *Management of policies and work procedures that are effective or in accordance with business demands through the implementation of quality management (International Organization for Standardization or ISO) by establishing a Management Representative, as a guide for company management and as a work guide for employees.*
3. *Establishment of the Division of Cooperation and Compliance Division and Compliance.*
4. *Internal control and implementation of internal control.*
5. *Utilization of Information Technology in business processes in the form of System Application and Processing (SAP).*
6. *Individual Performance Monitoring, in the form of signing an annual work plan for each company employee whose achievements are evaluated periodically.*

7. Kerjasama INTI dan KPK tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa web pengaduan melalui <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Hasil assessment yang dilakukan dari tahun 2012 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

7. The collaboration between INTI and the KPK regarding the Handling of Complaints in Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption is in the form of a web complaint via <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

The results of the assessment carried out from the year of 2012 to 2021 are as follows:

Tahun Buku <i>Year Book</i>	Pelaksanaan Assessment <i>Implementation of the Assessment</i>	Assessor	Skor	Keterangan <i>Information</i>
2012	2013	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	76,04	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2013	2014	Self Assessment	78,55	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2014	2015	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	82,02	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2015	2016	Self Assessment	84,09	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2016	2017	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	81,63	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-639/PW10/4/2017 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial Supervisory Agency and Representative Development of West Java Number S-639/PW10/4/2017</i>

2017	2018	Self Assessment	83,15	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2018	2019	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	81,48	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-823/PW10/4/2017 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial and Development Supervisory Agency for West Java Number S-823/PW10/4/2017</i>
2019	2020	Self Assessment	73,24	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2020	2021	Self Assessment	76,69	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2021	2022	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	75,77	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4.1/2022 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial and Development Supervisory Agency for West Java S-212/PW10/4.1/2022</i>



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Objectives of Implementing Good Corporate Governance

PT INTI (Persero) berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Kinerja usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus menerus dari organ-organ Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Perseroan meyakini bahwa tata kelola Perseroan yang baik akan dapat menurunkan biaya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (best practices).

Penerapan dan pengembangan GCG di PT INTI (Persero) bertujuan untuk:

1. Melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang optimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perseroan, serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya.
3. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan.
4. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan.
5. Tercapainya visi, misi, dan tujuan Perseroan.
6. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dengan memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil.
8. Memperbaiki budaya kerja Perseroan.
9. Menjadikan Perseroan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan PT INTI (Persero), berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perseroan.

PT INTI (Persero) is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably. The Company's business performance is a reflection of the continuous efforts of the Company's organs to maintain and improve the quality of governance.

The Company believes that good corporate governance will reduce costs, increase stakeholder trust, and improve best practices.

The implementation and development of GCG at PT INTI (Persero) aims to:

1. Carry out obligations to comply with applicable regulations.
2. Achieving optimal growth and returns so as to increase the prosperity of the Company, as well as realizing Shareholder value in the long term without neglecting the interests of other Stakeholders.
3. Controlling and directing good relations between the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all the Stakeholders of the Company.
4. Supporting the Company's internal control and development activities.
5. The achievement of the Company's vision, mission, and goals.
6. Manage resources more reliably.
7. Increase accountability to stakeholders by fulfilling the principles of openness, accountability, trustworthiness, responsibility, and fairness.
8. Improving the Company's work culture.
9. Making the Company value added, namely improving the welfare of all PT INTI (Persero) personnel, as well as increasing the benefits for the Company's stakeholders.

Implementasi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance Implementation

Kinerja usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus-menerus dari organ-organ Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Perseroan meyakini bahwa dengan tata kelola yang baik akan dapat menurunkan biaya (*cost*), meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Dengan demikian, GCG merupakan perangkat yang handal bagi Perseroan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi, Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para stakeholder lainnya. Sistem pengelolaan untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG di Perseroan yaitu:

1. Pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya Perseroan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
2. Pengelolaan kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai dengan tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas atau *International Organization for Standardization* (ISO) dengan membentuk Manajemen Representative, sebagai pedoman pengelolaan Perseroan dan menjadi panduan bekerja untuk karyawan.
3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko.
4. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
5. Pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis berupa *System Application and Processing* (SAP).
6. Pemantauan kinerja individu, berupa pembuatan sasaran kerja individu dan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan Perseroan.

Kinerja usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus-menerus dari organ-organ Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Perseroan meyakini bahwa dengan tata kelola yang baik akan dapat menurunkan biaya (*cost*), meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Dengan demikian, GCG merupakan perangkat yang handal bagi Perseroan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi, Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para stakeholder lainnya. Sistem pengelolaan untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG di Perseroan yaitu:

1. Pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya Perseroan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
2. Pengelolaan kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai dengan tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas atau *International Organization for Standardization* (ISO) dengan membentuk Manajemen Representative, sebagai pedoman pengelolaan Perseroan dan menjadi panduan bekerja untuk karyawan.
3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko.
4. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
5. Pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis berupa *System Application and Processing* (SAP).
6. Pemantauan kinerja individu, berupa pembuatan sasaran kerja individu dan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Organ pendukung dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris
5. Sekretaris Perusahaan

Adapun perincian lebih lanjut sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (RUPS)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan (RUPST) maupun RUPS Luar Biasa (RUPSLB) bertindak sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Perseroan.

RUPS Tahunan terdiri dari RUPS mengenai Persetujuan Laporan Keuangan dan RUPS mengenai Persetujuan RKAP, sedangkan RUPSLB dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Dalam RUPST dan RUPSLB, setiap pemegang saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang, terutama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis terkait dengan:

1. Perubahan Anggaran Dasar.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, RKAP, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penentuan dan persetujuan terhadap penggunaan laba perusahaan.
5. Hal-hal lain yang menjadi kewenangan RUPS.

Komisaris

Board of Commissioners

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-99/MBU/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-

Governance Structure consists of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. The Board of Commissioners
3. The Board of Directors
4. Supporting organs and Committees under the Board of Commissioners
5. Corporate Secretary

As for further details as follows:

Based on the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) both of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to act as the main forum for shareholders to exercise their rights and authority over the Company.

Annual General Meeting consists of GMS to Approval of the Financial Statements and the GMS on the agreement Corporate Work and Budget Plan (CBP), whereas the EGMS can held at any time if necessary. In the GMS and EGMS, each of shareholder are entitled to equal treatment and a balanced position, especially in voicing their opinions and contribute to the decision making process of strategic importance related to:

1. Amendments to the Articles of Association.
2. Approval of the Annual Report, CBP, and Company Long Term Plan (CTLP).
3. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Directors.
4. Determination and approval of the use of corporate profits.
5. Other things that the authority of the GMS.

Composition of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia based on the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia Number SK-99/MBU/05/2017 dated May 23, 2017 and

anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, maka susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) sebagai berikut:

Komisaris Utama : Unggul Priyanto
Komisaris : Rahmadi Murwanto
Komisaris : Trisno Hendradi

Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-318/MBU/10/2020 dated October 8, 2020 the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) are as follows:

President Commissioner : Unggul Priyanto
Commissioner : Rahmadi Murwanto
Commissioner : Trisno Hendradi

Direksi

Board of Directors

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-161-MBU/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-223/MBU/10/2019, tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka susunan Direksi PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Otong lip
Direktur Keuangan : Tri Hartono Rianto
Direktur Bisnis : Teguh Adi Suryandono

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number SK-161-MBU/07/2019, dated July 24, 2019 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the Decree of the Minister of SOEs Number SK-223/MBU/10/2019, dated October 17, 2019 on Appointment of President Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

President Director : Otong lip
Finance Director : Tri Hartono Rianto
Business Director : Teguh Adi Suryandono

Organ Pendukung dan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Supporting Organ and Committees Under The Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-12/MBU/2012, Dewan Komisaris dapat mengangkat organ pendukung dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu:

1. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan;
2. Komite Audit;
3. Satu komite lain, jika diperlukan.

Sekretaris Dewan Komisaris PT INTI (Persero) ditunjuk berdasarkan KEP-49/DK-INTI/VI/2017 tertanggal 1 November 2017 dijabat oleh Suripto.

Perusahaan juga telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan beranggotakan:

Ketua : Rahmadi Murwanto
Anggota : Endarjono

Selain Komite Audit, PT INTI (Persero) telah membentuk komite lain di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan

According to Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-12/MBU/2012, the Board of Commissioners can appoint supporting organ and committees under the Board of Commissioners as follows:

1. Secretary of Board of Commissioners, if necessary;
2. Audit Committee;
3. Another committee, if necessary.

Secretary of Board of Commissioners appointed by KEP-49/DK-INTI/VI/2017 dated November 1, 2017 is chaired by Suripto.

The Company has also established an Audit Committee by the Decree of BOC Nomor SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 dated October 21, 2020 on the Appointment of the Company's Audit Committee of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and consists of:

Chairman : Rahmadi Murwanto
Member : Endarjono

In addition to the Audit Committee, PT INTI (Persero) has formed other committees under the Board of Commissioners, namely the Nomination and Remuneration



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Dewan Komisaris Nomor SK-01/DEKOM/INTI/04/2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan beranggotakan:

Ketua : Unggul Priyanto
(Komisaris Utama)

Sekretaris : Trisno Hendradi
(Anggota Dewan Komisaris)

Anggota : Rahmadi Murwanto
(Anggota Dewan Komisaris)

Pembantu Sekretaris : Endarjono (Anggota Komite Audit)

Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK-01/DEKOM/INTI/04/2020 concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee for the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the members of:

Chairman : Unggul Priyanto (President Commissioners)

Secretary : Trisno Hendradi (Member of Board of Commissioners)

Member : Rahmadi Murwanto (Member of Board of Commissioners)

Secretary : Endarjono (Member of Audit Committee)

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan Organ Pendukung Direksi yang bertindak sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) serta bertugas menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perusahaan dan Risalah Rapat Direksi, Dewan Komisaris, maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

Corporate Secretary is supporting organ that acts as a liaison officer to administer and store the documents of the Company, but not limited to the Register of Shareholders, Special Register Company and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders (GMS). Corporate Secretary is run by structural organ level under the Board of Directors and is responsible to the Board of Directors of the Company.

Corporate Secretary shall ensure that the Company comply with the applicable disclosure requirements and shall provide all relevant information to the Board of Directors on a regular basis and to the Board of Directors upon request.

Dasar Penerapan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance Implementation Basis

Untuk mewujudkan tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di Perseroan, terdapat sejumlah acuan peraturan yang melandasi sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tertanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tertanggal 16 Agustus 2007.

To achieve the objectives of Good Corporate Governance (GCG) implementation in the Company, there are several reference regulations that underlie, as follows:

1. *Law Number 19 of 2003 on State Owned Enterprises (SOEs) (Article 5 paragraph 3).*
2. *SOE Minister's Regulation Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOEs subsequently amended with SOE Minister's Regulation Number PER-09/MBU/2012 dated 06 July 2012.*
3. *SOE Ministry Secretary's Decision Number SK-16/S.MBU/2012 dated 06 June 2012 on Indicators or Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance at SOEs.*
4. *Law Number 1 of 1995 on Limited Liability Company subsequently amended with Law Number 40 of 2007 dated 16 August 2007.*

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan

Basic Principles of Corporate Governance

Sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan tata kelola dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran."

As the main foundation in establishing governance policy and conducting business activities, the Company sets out the prevailing governance policy with reference to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-09/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOEs, which states that "SOEs are required to implement the Company's operations by adhering to Good Corporate Governance (GCG) principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness."



1. Transparansi (*transparency*)

Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perseroan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai jalur informasi, seperti melalui situs website Perseroan, siaran pers, dan laporan-laporan berkala.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki kejelasan fungsi, metode dan sistem pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang sistematis sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai tugas pokok, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Bentuk pertanggungjawaban Perseroan adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pengadaan, pembayaran pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) yang berkelanjutan.

4. Kemandirian (*independency*)

Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*)

Perseroan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Melalui prinsip ini, manajemen melakukan pengelolaan terhadap seluruh jalannya Perseroan dengan kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kewajaran sehingga memunculkan perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.

1. Transparency

The Company constantly implements disclosure in the process of decision-making and disclosure in disclosing material and relevant information about the company. The Company provides true and accurate information to all stakeholders through various information channels, such as through the Company's website, press releases, and periodic reports.

2. Accountability

All of the Company's governance organs have clear functions, methods and systems of execution, as well as systematic accountability so that the management of the company is implemented effectively. This can be seen through the management of the Company that separates duties and responsibilities and outlines clearly the main tasks, functions, rights, obligations and authority of each governance organ.

3. Responsibility

The Company's form of responsibility is the conformity of the Company's management to the laws and principles of a healthy corporation. This can be proven through the Company's compliance with applicable regulations, such as procurement, tax payment, occupational health and safety, industrial relations, environmental protection and sustainable corporate social responsibility (CSR) programs.

4. Independence

The Company's management is carried out professionally without any conflict of interest and the influence or pressure of any party that is inconsistent with legislation and sound corporate principles.

5. Fairness

The Company provides fair and equitable treatment in fulfilling the rights of all stakeholders arising under the applicable laws and regulations and regulations. Through this principle, management manages all the Company's operations with due care and observes norms of fairness so as to raise the protection of shareholders' interests honestly and fairly.

Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Internalization of Good Corporate Governance

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) serta sejauh mana implementasi GCG di PT INTI (Persero) telah dilaksanakan, maka pada tahun 2021 telah diadakan Sosialisasi Implementasi GCG, Standar Etika Perusahaan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Whistle-Blowing System, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan bagi karyawan PT INTI (Persero).

Penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui portal internal Perusahaan, sosialisasi melalui e-mail kepada seluruh karyawan, maupun publikasi melalui banner, media sosial, dan website Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh karyawan Perseroan maupun pemangku kepentingan, seperti link di bawah ini:

- <https://www.inti.co.id/?p=8495>
- https://www.instagram.com/tv/CIfU9qhHPUf/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/tv/CIfWN1-Hcy/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3391357624247311&id=108598265856613
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=183905573392791&id=113437613772921
- <https://bumn.go.id/post/inti-gelar-ikrar-pelaksanaan-sistem-manajemen-anti-penyuapan>

In order to provide and improve understanding of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the extent to which the implementation of GCG at PT INTI (Persero) has been implemented, in 2021 has been held a Socialization of GCG Implementation, Corporate Ethics Standards, Gratification Control, Management of State Administration Assets Report, Whistle-Blowing System, and Anti-Bribery Management System for PT INTI (Persero) employees.

The inculcation of GCG values is also carried out through the Company's internal portal, socialization via e-mail to all employees, as well as publications through banners, corporate social media, as well as the Company's website which can be viewed and downloaded easily by Company employees and stakeholders, such as the link below :

- <https://www.inti.co.id/?p=8495>
- https://www.instagram.com/tv/CIfU9qhHPUf/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/tv/CIfWN1-Hcy/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3391357624247311&id=108598265856613
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=183905573392791&id=113437613772921
- <https://bumn.go.id/post/inti-gelar-ikrar-pelaksanaan-sistem-manajemen-anti-penyuapan>



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi di Perseroan, sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya serta mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepemilikan saham di Perseroan.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup hal dalam mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta meminta pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara direksi, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS harus memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para pemangku kepentingan, serta hak-hak Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat dua jenis RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:
 - a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan, diadakan paling lama dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, di mana disampaikan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, usulan penggunaan laba bersih, dan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh RUPS.
 - b. RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan), di mana Direksi menyampaikan RKAP dan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh RUPS.
2. RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest organ in the Company, as the main forum for shareholders to exercise their rights and authority as well as taking vital decisions relating to the ownership of shares in the Company.

GMS has the authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits prescribed in the Articles of Association and regulations that apply. Such authorities include appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, setting the Corporate Work and Budget Plan (CBP) and asking for accountability regarding the management of the Company, revising the Articles of Association, deciding the division of roles and responsibilities among the Board of Directors, and others.

In exercising its authority, the GMS must consider the interests of the Company's development and health, the interests of stakeholders, and rights of the Company.

In accordance with the Articles of Association, there are two types of GMS, namely:

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
The AGMS is held each year include:
 - a. AGMS regarding the approval of the Annual Report, held at the latest in June after the close of the fiscal year concerned, which the Annual Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the proposed use of net profit, and other things that need to be decided by the AGMS are conveyed at the meeting.
 - b. AGMS regarding the approval of the Corporate Work and Budget Plan (CBP), held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the fiscal year concerned CBP), in which the Board of Directors to convey CBP and other things that need to be decided by the AGMS.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held at any time based on the needs for the benefit of the Company.

GMS can make a decision if the decision was approved unanimously.

Pada tahun 2021 PT INTI (Persero) melakukan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2022 pada 28 Januari 2021 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 pada 29 Juni 2021.

In year 2020 PT INTI (Persero) held two GMS, namely GMS on Ratification of CBP 2020 on January 28, 2021 and GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Fiscal Year 2019 on June 29, 2021.

RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Fiscal Year 2021

Sesuai undangan Direksi PT INTI (Persero) Nomor 1168/TU.01/010500/2021 tertanggal 10 Juni 2021 untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2021 melalui Media Aplikasi Zoom Meeting.

In accordance to invitation of Board of Directors of PT INTI (Persero) Number 1897/TU.01/010100/2020 dated 30 Juni 2020 to execute the General Meeting of Shareholders (GMS) on July 14, 2020 in Bandung.

Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah RUPS dengan uraian sebagai berikut:

The principal decisions of GMS contained in the Minutes of Meeting of the GMS with the following description:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00217/2.1030/AU.1/04/0645-1/1/1/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021.
3. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Nomor 00187/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tertanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Approve the Corporate Annual Report on the circumstances and the course of the Company, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the fiscal year 2020.
2. Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as contained in its report Number 00217/2.1030/AU.1/04/0645-1/1/1/III/2021 dated March 31, 2021.
3. Ratify the Annual Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2020 including the Partnership and Community Development Program Financial Report which has been audited by KAP Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) in accordance with Report Number 00187/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/III/2021 dated March 31, 2021 with a fair opinion, in all material respects, the financial position (balance sheet) of the Partnership and Community Development Program of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dated December 31, 2020, and activities, and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia while at the same time providing full settlement and release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions. that have been committed during the 2020 financial year, as long as the action is not a criminal act or violates the provisions and procedures applicable law and recorded in the Financial Statements of Partnership and Community Development Program and does not conflict with the provisions of the legislation



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

4. Tidak ada penetapan penggunaan Laba bersih Konsolidasian Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus atau rugi bersih Perseroan Tahun 2020. 5. Menetapkan tentang tantiem tahun buku 2020, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021 akan ditetapkan secara tersendiri. 6. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) tahun Buku 2021.	4. <i>There is no stipulation on the use of the Company's Consolidated Net Profits because the Company experienced a minus profit or net loss for 2020.</i> 5. <i>To stipulate the bonus for the financial year 2020, the salary for the Board of Directors and the honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2021 will be determined separately.</i> 6. <i>Determination of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (UMK) for the 2021 Financial Year.</i>

RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2021

GMS Concerning Approval of Corporate Work Plan and Budget and Key Performance Indicator (KPI) 2021

Sesuai undangan Direksi PT INTI (Persero) Nomor 177/TU.02.01/010500/2021 tertanggal 27 Januari 2021, telah diadakan rapat bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset yang mendapat kewenangan kuasa khusus sesuai Surat Kuasa Nomor SKK-43/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020 untuk melaksanakan RUPS pada 28 Januari 2021 melalui Media Aplikasi Zoom Meeting.

In accordance with the invitation of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number 177/TU.02.01/010500/2021 dated January 27, 2021, a joint meeting was held with the Company (Persero) PT Asset Management Company which received special power of attorney in accordance with Power of Attorney Number SKK-43/MBU /09/2020 dated 30 September 2020 to hold the GMS on 28 January 2021 through the Zoom Meeting Application Media.

Pokok-pokok Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertuang dalam Risalah RUPS dengan uraian sebagai berikut:

The principal decisions of General Meeting of Shareholders (GMS) contained in the Minutes of Meeting of the GMS with the following description:

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT INTI (Persero) Tahun 2021. 2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (RKA-TJSL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tahun 2021. 3. Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2021, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. 4. Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. 5. Menetapkan indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2021.	1. <i>Approve and ratify the Work Plan and Budget of the Company (Persero) PT INTI (Persero) 2021.</i> 2. <i>Approve and ratify the Work Plan and Budget of the Company's Corporate Social and Environmental Responsibility Program for the year 2021.</i> 3. <i>Establishing Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021, which is contained in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders.</i> 4. <i>Establish Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2021, which is contained in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i> 5. <i>Establish indicators of Operational Aspects for calculating the Health Level of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) in 2021.</i>

Uraian Tentang Dewan Komisaris

Description on Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi.

Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The Board of Commissioners is the corporate organ responsible collectively for supervising and giving advice to the Board of Directors and ensuring that the Company implements Good Corporate Governance (GCG) to all levels of the organization. In addition, the Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in terms of supervising the policies of the Board of Directors on the Company's operations in general, which refers to the business plan that the Board has approved of Commissioners and Shareholders, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

Every member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability, and commitment to providing time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners must enable effective, appropriate, and fast decision-makers. In addition, the Board of Commissioners also requires to act independently, in the sense of having no conflict of interest, which can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both with each other and the relationship with the directors.

The Board of Commissioners assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and the Audit Committee in supporting the implementation of their duties.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the laws and regulations. The appointment of the Board of Commissioners must meet the general and specific requirements set by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs).

Referensi Peraturan

Regulation Reference

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER09/MBU/2012 tertanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
1. *Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs).*
2. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendments to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-12/MBU/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of (Good Corporate Governance) in (State-Owned Enterprises) SOEs.

3. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02 / MBU / 02/2015 dated February 17, 2015, concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs).
4. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners or Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general management of both the Company and the Company's business as well as provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company Long Term Plan, Company Work Plan and Budget as well as provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

In carrying out its duties, each member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness.
2. Good-willed, prudent, and responsible in carrying out the supervisory duties and giving advice to the Board of Directors for the Company's interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Kewajiban Dewan Komisaris

Obligations of The Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan

In carrying out its duties the Board of Commissioners is obliged to:

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.
2. Research, review and sign the Company Long Term Plan and also the Company Work Plan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan oleh Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP serta menyampaikan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
6. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Terkait dengan **Rencana Jangka Panjang Perusahaan**
Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)**

1. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
2. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJPP.

Terkait dengan **Penyusunan Laporan Tahunan**

1. Dewan Komisaris melakukan telaahan atas Rancangan

and Budget prepared by the Board of Directors, and provide opinion and suggestion to GMS regarding the Company Long Term Plan and Company Work Plan and Budget and convey the reasons for the Board of Commissioners signing the the Company Long Term Plan and Company Work Plan and Budget.

3. *Keep abreast of developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company.*
4. *Report immediately to the GMS in the event of symptoms of a decline in the Company's performance.*
5. *Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report, as well as providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.*
6. *Prepare an annual work program and include it in the Company Work Plan and Budget.*
7. *Propose a Public Accountant to the GMS.*
8. *Make minutes of Board of Commissioners meetings and keep copies.*
9. *Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS.*
10. *Monitor and ensure that corporate governance is implemented effectively and sustainably.*
11. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association, and/or GMS decisions.*

*Related to the **Company Long-Term Plan***

The Board of Commissioners reviews and provides opinions on the Company Long-Term Plan prepared by the Board of Directors before being signed together.

*Related to the **Company Work Plan and Budget***

1. *The Board of Commissioners reviews and provides opinions on the Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors before being signed together.*
2. *The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies stated in the Company Work Plan and Budget which are the elaboration of the Company Long-Term Plan.*

*Related to **Annual Report Preparation***

1. *The Board of Commissioners reviews the Draft Annual*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham.

Terkait dengan **Pengelolaan Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

Terkait dengan **Sistem Pengendalian Internal**

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Terkait **Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perseroan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Report including financial statements audited by public accountants.

2. *The Board of Directors and the Board of Commissioners sign the Annual Report for the next by the Directors to be conveyed to the Shareholders.*

*Related to **Risk Management***

The Board of Commissioners has an obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of the application of risk management.

*Associated with the **Internal Control System***

The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system.

*Related to **Disclosure and Information Confidentiality***

1. *The Board of Commissioners must ensure that in the Company's Annual Report contains information about the identity, main works, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), and honorarium, facilities and/or other benefits received from the Company.*
2. *The Board of Commissioners must report to the Company regarding its share ownership and/or family to the Company and other companies, including any amendments thereto.*
3. *The Board of Commissioners is responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information.*
4. *Information, which is based on statutory provisions and/or Company provisions, is confidential information relating to the Company, must be kept confidential in accordance with the provisions of the laws and/or Company provisions.*
5. *Confidential information obtained while serving as a Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.*

Wewenang Dewan Komisaris

Authority of The Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:

In carrying out its duties the Board of Commissioners is authorized to:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* atau BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* atau BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate* atau BTO), dan kerja sama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyewakan asset: Direksi harus mendapat

1. *Look at books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other, securities, and check Company assets.*
2. *Enter the yard, building and office used by the Company.*
3. *Request an explanation from the Directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the Company.*
4. *Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.*
5. *Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.*
6. *Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.*
7. *Temporarily dismissing members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
8. *Establish other Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities.*
9. *Use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary.*
10. *Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*
11. *Attending Board of Directors meetings and giving views on matters discussed.*
12. *Carry out other oversight authorities insofar as they do not conflict with statutory regulations, Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS), in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.*

The Board of Commissioners is authorized to approve or reject in writing the Board of Directors' plans in terms of:

1. *Applying fixed assets for short-term credit withdrawals.*
2. *Organize cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Operational Cooperation (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with the following conditions:*
 - a. *Renting out assets : The Board of Directors must*

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perseroan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (revenue), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.

- b. Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha: Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perseroan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (revenue), atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) : Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerja Sama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai aset Perseroan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - d. Kontrak Manajemen dan Kerja Sama Lainnya: Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kontrak Manajemen dan Kerja Sama Lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perseroan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - e. Pelaksanaan tindakan tersebut di atas harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dari Perseroan, dengan ketentuan

obtain written approval from the Board of Commissioners to lease the Company's assets with a period of more than 3 (three) years up to 5 (five) years with more than 1% to 2.5% of rent/transaction value. (revenue), or more than 2% to 5% of the Company's equity, whichever is smaller.

- b. *Cooperation in Operations and Business Cooperation: The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to conduct Joint Operations and Business Cooperation with a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years with more than 2.5% to 5% of revenue (revenue), or more than 5% to 10% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - c. *Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) : The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to cooperate Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) with a period of more than 10 (ten) years up to 20 (twenty) years with the value of the Company's assets cooperation is more than 6% to 12.5% of income or more from 6.5% to 13% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - d. *Management Contracts and Other Cooperation: The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to conduct Management Contracts and Other Cooperation with a period of more than 10 (ten) years with the value of investments (Company assets cooperated) of more than 2.5% up to 5 % of income or more from 5% to 10% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - e. *The implementation of the aforementioned actions must be accompanied by an Integrity Pact which contains the statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that the implementation of these actions has been carefully considered and in good faith, without the influence of other parties and without Conflict of Interest, and with full care for the best interests Company with heed the applicable provisions and the principles of Good Corporate Governance (GCG).*
3. *Receiving or providing medium or long-term loans, except loans (debt or receivables) arising from business transactions and loans given to subsidiaries of the Company, with the terms of loans to subsidiaries of the Company reported to*

pinjaman kepada anak perusahaan dari Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern.
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

the Board of Commissioners.

4. *Eliminate from bookkeeping of bad debts and dead goods inventory.*
5. *Releasing movable fixed assets with an economic age that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years.*
6. *Establish the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.*
7. *Appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit.*
8. *Appoint and dismiss the Corporate Secretary.*

Within 30 (thirty) days of receipt of the application or explanation and documents in full from the Board of Directors, the Board of Commissioners must provide a decision at the request of the Board of Directors as referred to above.

Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Description of The Implementation of The Board of Commissioners' Duties

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik. Tugas yang dilaksanakan meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan dilakukan melalui evaluasi atas Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan serta informasi lainnya, baik melalui pembahasan internal Dewan Komisaris maupun pembahasan bersama Direksi Perseroan. Selain melalui pertemuan rutin, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan cara memberi penugasan khusus kepada Komite Audit untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan tertentu yang cukup penting. Hasil pendalaman Komite Audit tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Rapat Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan.

Secara lebih detail, aktivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan**

During 2021, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently by referring to the provisions of the Articles of Association of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and applicable laws and regulations, as well as good corporate governance. The duties carried out include supervising the policies and management of the Company by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, ensuring the implementation of the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations.

Supervision of the company's operational activities is carried out through evaluation of the Monthly and Quarterly Management Reports and other information, both through internal discussions of the Board of Commissioners and discussions with the Company's Directors. In addition to regular meetings, the Board of Commissioners carries out its supervisory function by giving special assignments to the Audit Committee to explore certain important issues. The exploration results of the Audit Committee will then be used as a basis for the Board of Commissioners Meeting to take the necessary decisions.

In more detail, the activities carried out by the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties of the Company are as follows:

1. **Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company***Every discussion*



Setiap pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Dewan Komisaris Internal maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditindaklanjuti dengan pemberian saran atau nasihat kepada Direksi. Selama tahun 2021, nasihat atau saran yang terpenting, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan dan operasional perusahaan:
 - 1) Dampak dari Covid 19, perusahaan mengalami penurunan pendapatan terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk itu agar dapat dicarikan solusi dalam memperoleh proyek-proyek yang bersumber di luar Pemerintah.
 - 2) Sehubungan dengan capaian kinerja tahun 2021 khususnya Pendapatan yang masih jauh dari target yang ditetapkan, maka Direksi diminta agar mengusulkan revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, sehingga dapat ditetapkan target yang realistis untuk dicapai pada akhir tahun 2021.
 - 3) Agar ditingkatkan secara terus menerus upaya penagihan piutang khususnya piutang yang lama tidak tertagih (macet) khususnya yang nilainya material, seperti piutang kepada PT Mitra Buana Komputindo (MBK) Group. Sekiranya dimungkinkan agar dilakukan langkah-langkah extra ordinary seperti tuntutan hukum dan/atau pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada yang bersangkutan.
 - 4) Dalam mengatasi kesulitan modal kerja, agar terus diupayakan memperoleh sumber-sumber pendanaan lain di luar perbankan, seperti dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan/atau mitra-mitra pendanaan yang lain.
 - 5) Agar program restrukturisasi perusahaan yang telah disusun dilaksanakan secara konsisten dengan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT PPA.
 - 6) Agar terus dilakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa-masa yang lalu dapat dihindari.
- b. Berkaitan dengan Pengembangan Perusahaan:
 - 1) Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi terkait rencana Direksi dalam melakukan Kerja Sama melalui sinergi BUMN maupun dengan pihak ketiga.

in the Board of Commissioners Meeting, both the Internal Board of Commissioners Meeting and the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is followed up with the provision of advice or advice to the Board of Directors. During 2021, the most important advice or suggestions, as follows:

- a. *In relation to the company's financial and operational performance reporting:*
 - 1) *The impact of Covid 19, the company had a decrease in revenue, especially on projects sourced from the State Budget, for this reason solutions can be found in obtaining projects sourced outside the Government.*
 - 2) *With regards to the 2021 performance achievements, especially the revenue which is still far from the set target, the Board of Directors is requested to propose a revision of the 2021 the Company Work Plan and Budget, so that realistic targets can be set to be achieved by the end of 2021.*
 - 3) *In order to continuously improve efforts to collect receivables, especially receivables that have not been collected for a long time (bad debt), especially those whose value is material, such as receivables from PT Mitra Buana Komputindo (MBK) Group. If it is possible to take extraordinary steps, such as lawsuits and/or submission of Suspension of Payment to the person concerned.*
 - 4) *In solving working capital difficulties, efforts should be made to obtain other sources of funding outside of banking, such as from PT Perusahaan Pengelola Aset and/or other funding partners.*
 - 5) *So that the company restructuring program that has been prepared is carried out consistently with assistance from the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) and PT PPA.*
 - 6) *In order to continue to implement Good Corporate Governance, so that problems that arose in the past can be avoided.*
- b. *Related to Company Development:*
 - 1) *The Board of Commissioners has discussed with the Board of Directors regarding the Board of Directors' plans in conducting Cooperation through SOEs synergies and with third parties.*

- 2) Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja INTI untuk mendapatkan informasi atas jalannya perusahaan.
- c. Berkaitan dengan pengembangan Anak Perusahaan:
- 1) Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat memacu kinerja Anak Perusahaan.
 - 2) Dewan Komisaris menyarankan agar jalannya pengelolaan dan pengembangan Anak Perusahaan dilakukan pengawasan yang baik.
- d. Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKAP Tahun 2022, Dewan Komisaris merekomendasikan hal-hal, berikut:
- 1) Agar diupayakan perolehan kontrak-kontrak dengan prioritas pada kontrak yang bersifat 'recurring' untuk menjamin perolehan pendapatan dapat tercapai dan 'merata' pada tahun 2022.
 - 2) Untuk mendukung pencapaian laba tahun 2021, agar diupayakan pendapatan yang berasal dari proyek dengan margin yang relatif tinggi, modal kerja yang mampu disediakan perusahaan dan/atau pengendalian biaya.
 - 3) Mencermati kondisi likuiditas perusahaan yang belum menggembirakan, dalam pembiayaan kegiatan perusahaan, agar terus diupayakan diversifikasi sumber pembiayaan, khususnya dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan/atau dari mitra usaha yang lain dengan cost of fund yang wajar.
 - 4) Agar ditingkatkan secara terus menerus upaya penagihan piutang khususnya piutang yang lama tidak tertagih (macet) yang nilainya material, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan.
 - 5) Restrukturisasi perusahaan berupa restrukturisasi bisnis, keuangan hutang dan optimalisasi aset atau serta divestasi saham anak perusahaan agar dilaksanakan secara cepat dan konsisten, sehingga turnaround perusahaan menjadi BUMN yang berkinerja baik dapat segera tercapai.
 - 6) Dengan adanya penurunan kinerja perusahaan saat ini, agar diantisipasi adanya pegawai usia produktif yang mengundurkan diri, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu operasional perusahaan.
 - 7) Agar ditingkatkan upaya mitigasi risiko dalam melaksanakan proyek atau kontrak, sehingga kerugian dan denda yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Kelemahan pengelolaan tender dan kontrak pada tahun-tahun sebelumnya agar dijadikan pelajaran untuk tidak diulang pada masa
- 2) The Board of Commissioners has held a meeting with the INTI Trade Union to obtain information on the running of the company.
- c. With regard to the development of Subsidiaries:
- 1) The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors can encourage the performance of Subsidiaries.
 - 2) The Board of Commissioners recommends that the management and development of Subsidiaries be carried out with good supervision.
- d. With regard to the implementation of the preparation of the 2022 Company Work Plan and Budget, the Board of Commissioners recommends the following:
- 1) In order to strive for the acquisition of contracts with priority on 'recurring' contracts to ensure that revenue generation can be achieved and 'equal' in 2022.
 - 2) To support the achievement of profit in 2021, efforts should be made for income from projects with relatively high margins, working capital that the company can provide and/or cost control.
 - 3) Observing the company's unsatisfactory liquidity conditions, in financing the company's activities, efforts should be made to diversify sources of financing, particularly from PT Perusahaan Pengelola Aset and/or from other business partners with reasonable cost of funds.
 - 4) In order to continuously improve the efforts to collect receivables, especially receivables that have not been collected for a long time (bad debt) whose value is material, so as to increase the company's liquidity.
 - 5) Company restructuring in the form of business restructuring, finance atau debt and asset optimization as well as divestment of subsidiary shares to be carried out quickly and consistently, so that the turnaround of the company into a well-performing SOEs can be achieved immediately.
 - 6) With the current decline in the company's performance, it is anticipated that there will be employees of productive age who resign, so it is feared that this could disrupt the company's operations.
 - 7) In order to improve risk mitigation efforts in implementing projects or contracts, so that losses and fines that may arise can be minimized. Weaknesses in managing tenders and contracts in previous years should be used as lessons not to be repeated in the future.



yang akan datang.

- 8) Agar selalu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam seluruh aspek pengelolaan bisnis perusahaan.
- 9) Agar dilakukan tindak lanjut terhadap Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta temuan hasil audit baik internal maupun eksternal.
- 10) Anak/cucu/perusahaan afiliasi yang sudah meningkat kinerjanya untuk dipertahankan, dan juga mencari potensi-potensi kontrak yang dapat meningkatkan kinerja, sedangkan bagi yang masih rendah kinerjanya untuk di ambil upaya-upaya/mitigasi dini agar tidak membebani induk.

2. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

a. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat-rapat untuk melakukan telaah atas Laporan Berkala dan Laporan Manajemen Tahunan dan sekaligus sebagai bahan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan perusahaan, serta pemberian nasihat kepada Direksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pelaksanaan telaah secara triwulanan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2021 pada 20 April 2021.
- 2) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan II/2021 pada 22 Juli 2021.
- 3) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2021 pada 22 Juli 2021.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Laporan Manajemen Berkala maupun Laporan Manajemen Tahunan, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan Pemegang Saham, melalui :

- 1) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-20/Dekom/INTI/IV/2020 tertanggal 26 April 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
- 2) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi

8) *To always apply the principles of good corporate governance in all aspects of the company's business management.*

9) *To follow up on the decisions and directions of the General Meeting of Shareholders and the findings of both internal and external audits.*

10) *Subsidiaries/ affiliated companies whose performance has improved to be maintained, and also look for potential contracts that can improve performance, while for those whose performance is still low, efforts/early mitigation should be taken so as not to burden the parent.*

2. *Researching and reviewing the Periodic Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report, as well as providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.*

a. *Researching and reviewing Periodic Reports and Annual Reports*

The Board of Commissioners holds meetings to review the Periodic Reports and Annual Management Reports as material for the Board of Commissioners to evaluate the management policies and implementation of the company's management, as well as provide advice to the Directors of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). The quarterly review is carried out as follows:

- 1) *Discussion on the Quarter I/2021 Management Report on April 20, 2021.*
- 2) *Discussion of Quarter II/2021 Management Report on July 22, 2021.*
- 3) *Discussion of Quarter III/2021 Management Report on July 22, 2021.*

Based on the results of a review of the Periodic Management Report and Annual Management Report, the Board of Commissioners has provided opinions and suggestions to the Board of Directors and Shareholders, through:

- 1) *Letter of the Board of Commissioners to the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) as the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-20/Dekom/INTI/IV/2020 dated April 26, 2021 regarding the Board of Commissioners' Response to the Consolidated Financial Statements of the First Quarter 2021 of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).*
- 2) *Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOE as the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi*

Indonesia (Persero) Nomor S-47/DEKOM/INTI/09/2021 tertanggal 15 September 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan II Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

- 3) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-56/DEKOM/INTI/11/2021 tertanggal 22 November 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
- b. Menandatangani Laporan Tahunan.
Sebagai pelaksanaan kewajiban Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 67 ayat (1), seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2021 (Audited).
- c. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
Dewan Komisaris telah memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan tahun 2020 sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-20/DEKOM/INTI/05/2021 tertanggal 31 Mei 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

3. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP

Untuk memandu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagai bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

4. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS

Dewan Komisaris mengusulkan RUPS agar menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" untuk melakukan General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022, dengan pertimbangan sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Nomor S-26/DEKOM/INTI/5/2022 tertanggal 26 Mei 2022 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) dan Anak Perusahaan serta Pengelolaan Program TJSL Tahun Buku 2022.

5. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya

Dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan

Indonesia (Persero) Number S-47/DEKOM/INTI/09/2021 dated September 15, 2021 regarding the Response of the Board of Commissioners to the Consolidated Financial Statements of the Second Quarter 2021 of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

- 3) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs as the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-56/DEKOM/INTI/11/2021 dated November 22, 2021 regarding the Board of Commissioners' Response to the Consolidated Financial Statements Quarter III of 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
- b. Signing the Annual Report
As the implementation of the obligations of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 67 Paragraph (1), all members of the Board of Commissioners have signed the 2021 Annual Management Report (Audited).
- c. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report.
The Board of Commissioners has provided explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the 2020 Annual Report in accordance with the Letter of the Board of Commissioners to the State Minister of BUMN as the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-20/DEKOM/INTI/05/2021 dated May 31, 2021 regarding the Board of Commissioners' Response to the Consolidated Financial Statements for the 2020 Fiscal Year of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

3. Prepare an annual work program and include it in the Company Work Plan and Budget

To guide the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has prepared the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners as an integral part of the Company Work Plan and Budget.

4. Propose a Public Accountant to the GMS

The Board of Commissioners proposes that the GMS re-appoint the Public Accounting Firm (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners" to conduct a General Audit of the Financial Statements for Financial Year 2022 and also Environmental and Social Responsibility Financial Statements for Financial Year 2022, taking into account the Board of Commissioners' letter to Shareholders Number S-26/DEKOM/INTI/5/2022 dated May 26, 2022 regarding the Proposal of a Public Accounting Firm as an Independent Auditor for the Consolidated Financial Statements of PT INTI (Persero) and its Subsidiaries and Management of the Environmental Social Responsibility Program for the 2022 Financial Year.

5. Prepare the minutes of the Board of Commissioners meeting and store the minutes

In the meeting of the Board of Directors and the

pembahasan atas kinerja berkala bulanan, berdasarkan laporan kinerja bulanan. Direksi memaparkan presentasi kinerja bulanan, beserta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris. Dalam rapat, Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan kepada Direksi. Direksi menjawab langsung pertanyaan tersebut dan menyajikan data pendukungnya. Terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, setelah dilakukan pembahasan dalam rapat, ditindaklanjuti dengan adanya surat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, dalam kondisi pandemi dan untuk menghindari penularan Covid-19 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat baik Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selain secara fisik juga melalui Zoom Teleconference. Selain itu, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN terkait RUPS Laporan Tahunan 2020, RKAP Tahun 2021 dan Monitoring Kinerja Keuangan BUMN, serta sosialisasi mengenai Peraturan Menteri BUMN.

Dalam kegiatan rapat rutinitas Dewan Komisaris, realisasi kehadiran selama Tahun 2021 secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

Board of Commissioners, there is a discussion on the monthly periodic performance, based on the monthly performance report. The Board of Directors presents monthly performance presentations, along with matters that need attention from the Board of Commissioners. In the meeting, the Board of Commissioners conveying questions, suggestions and perceptions to the Board of Directors. On matters that require the approval of the Board of Commissioners, after discussion in the meeting, it is followed up with a letter of approval from the Board of Commissioners.

During 2021, in a pandemic condition and to avoid the transmission of Covid-19, the Board of Commissioners held meetings both the Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners apart from physically as well as via Zoom Teleconference. In addition, the Board of Commissioners also attended a meeting with the Ministry of SOEs regarding the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, the 2021 Company Work Plan and Budget and Monitoring of SOEs' Financial Performance, as well as socialization of the Regulation of the Minister of SOEs.

In the routine meeting activities of the Board of Commissioners, the realization of attendance during 2021 can be described quantitatively as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage	Keterangan Description
Unggul Priyanto	Komisaris Utama President Commissioner	22	83%	Habis masa bakti pada Maret 2021 dan diperpanjang pada Juni 2021 End of duty in March 2021 and extended in June 2021
Trisno Hendradi	Komisaris Commissioner	24	100%	
Rahmadi Murwanto	Komisaris Commissioner	24	100%	

6. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

6. Monitor and ensure that corporate governance is implemented effectively and sustainably.

To ensure the implementation of GCG principles in every business activity of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) at all levels or levels of the organization, the Board of Commissioners carries

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi diantara anggota Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- b. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Secara internal, dalam pelaksanaan pengawasan kinerja manajemen, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan telaah atas laporan kinerja yang kemudian mengundang Komite Audit untuk membahas bersama berdasarkan hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja berkala, melakukan analisis, serta menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Dewan Komisaris juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, di mana salah satu tugasnya menetapkan kriteria pemilihan calon Direksi, mengusulkan nominated talent (*Board of Directors minus-1*) dan mengusulkan besaran remunerasi Direksi.

7. Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2021

Gambaran kinerja tahun 2021 setelah dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, adalah sebagai berikut:

out its duties and responsibilities, as follows:

- a. The Board of Commissioners is responsible for the effective and efficient implementation of the duties of the Board of Commissioners regulated in the Articles of Association as well as the maintenance of effective communication between members of the Board of Commissioners and between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- b. Conducting other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association, and/or GMS decisions.

Internally, in the implementation of management performance monitoring, the Board of Commissioners assigns the Audit Committee to review the performance report which then invites the Audit Committee to discuss together based on the results of the review submitted by the Audit Committee. The Audit Committee has conducted periodic performance evaluations, conducted analysis, and conveyed several matters that need attention and explanation from the Board of Directors.

The Board of Commissioners also formed the Nomination and Remuneration Committee, which one of its duties is to determine the criteria for selecting candidates for the Board of Directors, to propose nominated talents (*Board of Directors minus-1*) and to propose the amount of remuneration for the Board of Directors.

7. Company Performance for Fiscal Year 2021.

The description of performance in 2021 after an audit by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, is as follows:

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

Uraian Description	2020		2021		% Audit 2021 Terhadap % Audit 2021 Toward	
	Audited	RKAP Company Work Plan and Budget	Audited	Audited 2020	RKAP Company Work Plan and Budget	
Pendapatan Sales	427,25	706,70	371,73	(12,99)	52,60	
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(399,38)	(607,66)	(326,50)	18,25	53,73	
Pendapatan Laba/(Rugi) Kotor Gross Profit	27,87	99,04	45,23	62,32	45,67	
EBITDA	(81,08)	34,76	(50,54)	37,67	(145,39)	
Beban Usaha Operating Expenses	(121,64)	(99,68)	(108,58)	10,73	108,93	
Rugi Usaha Operating Loss	(93,77)	(0,63)	(63,35)	32,44	(9.807,04)	

Beban Pendanaan <i>Financing Expenses</i>	(63,57)	(83,26)	(52,07)	18,09	62,54
Laba/(Rugi) sebelum Pajak <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(157,34)	(83,89)	(115,42)	26,64	62,42
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan <i>Profit (Loss) Current Year</i>	(158,43)	(84,11)	(109,42)	30,93	69,91
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	328,57	456,18	300,16	(8,65)	65,80
Total Liabilitas <i>Total Liability</i>	1.686,10	888,08	1.743,75	3,42	196,35
Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	(449,48)	(324,16)	(539,00)	(19,92)	33,73
Total Aset <i>Total Asset</i>	1.236,63	563,91	1.204,75	(2,58)	213,64
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode <i>Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year</i>	74,71	47,66	88,01	17,80	184,67
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode <i>Cash on Hand and in Banks at Ending of Year</i>	88,01	33,62	37,86	(56,98)	112,63
Total Investasi <i>Total Investments</i>	2,08	22,25	1,76	(15,25)	7,91
Skor Tingkat Kesehatan <i>Health Level Score</i>	38,2	53,0	35,6		
	Kurang Sehat B	Kurang Sehat BBB	Kurang Sehat B		

- Secara umum realisasi kinerja tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP, namun lebih baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 khususnya dalam upaya mengurangi kerugian.
- Realisasi pendapatan tahun 2021 hanya mencapai 52,6% dari RKAP dan 87,0% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu, Beban Pokok Pendapatan mencapai 53,7% dari RKAP dan 81,8% dari realisasi tahun 2020.
- Realisasi Laba Kotor sebesar Rp45.23 miliar meningkat sangat tajam (62,3%) dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp27.87 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi pada tahun 2021 berhasil mendapatkan order dengan tingkat margin yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Total Aset per 31 Desember 2021 ditutup dengan saldo sebesar Rp1.204,76 miliar dengan total liabilitas sebesar Rp1.743,75 (144,74%) dan total ekuitas sebesar negatif Rp538.99 miliar (-44,74%). Total Aset menurun terus dari tahun-tahun sebelumnya dan negatif Ekuitas juga semakin besar diakibatkan Akumulasi Kerugian yang semakin meningkat.
- Modal Kerja Bersih (Aset Lancar - Liabilitas Jangka Pendek) perusahaan per 31 Desember 2021 negatif sebesar Rp384.09 miliar, menurun dibandingkan realisasi 31 Desember 2020 negatif sebesar Rp299.23 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan aktiva lancar dan peningkatan liabilitas jangka pendek.
- Keterbatasan likuiditas, khususnya saldo Kas dan Setara Kas saat ini berakibat kepada:

- In general, the realization of performance in 2021 has not reached the target set in the Company Work Plan and Budget, but it is better than the realization of performance in 2020, especially in an effort to reduce losses.
- The realization of revenue in 2021 only reached 52.6% of the Company Work Plan and Budget and 87.0% compared to the realization in 2020. Meanwhile, Cost of Revenue reached 53.7% of the Company Work Plan and Budget and 81.8% of the realization in 2020.
- Gross Profit realization of Rp45,23 billion increased very sharply (62,3%) compared to the realization in 2020 which was Rp27,87 billion. This shows that the Board of Directors in 2021 managed to get orders with a better margin rate than the previous year.
- Total Assets as of December 31, 2021 closed with a balance of Rp1,204.76 billion with total liabilities of Rp 1,743.75 (144.74%) and total equity of negative Rp538.99 billion (-44.74%). Total Aset terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan Ekuitas negatif juga semakin besar karena Akumulasi Kerugian yang meningkat.
- The company's Net Working Capital (Current Assets – Short Term Liabilities) as of December 31, 2021 was negative at Rp384,09 billion, a decrease compared to the realization on December 31, 2020, which was negative at Rp299,23 billion. This is due to a decrease in current assets and an increase in current liabilities.
- Limited liquidity, especially the current balance of Cash and Cash Equivalents results in:

- 1) Penundaan pembayaran kepada vendor yang cukup berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan.
 - 2) Pembayaran Gaji kepada karyawan.
 - 3) Penundaan pembayaran pajak.
- g. Realisasi Investasi tahun 2021 sebesar Rp1.76 miliar, mengalami penurunan 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Realisasi Investasi terdiri dari Bangunan dan Emplasemen Rp192 juta, alat olah data Rp205.73 juta, Aset Dalam Pembangunan sebesar Rp377.76 juta, serta Lisensi Software System Application and Processing (SAP), Merk, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Rp983.83 juta.
- h. Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2021 tercapai dengan nilai skor sebesar 47,52 atau terjadi penurunan terhadap target RKAP 2021. Hal ini terutama disebabkan penurunan yang sangat tajam pada indikator Nilai Sosial Ekonomi untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, dan Pengembangan Karyawan.

8. Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2021

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris tahun 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

- 1) Delays in payments to vendors are quite influential on the credibility of the company.
- 2) Salary payment to employees.
- 3) Delay in paying taxes.

- g. Investment realization in 2021 is Rp1,76 billion, a decrease of 15.3% compared to the same period in 2020. Investment realization consists of buildings and emplacements of Rp192 million, data processing equipment of Rp205.73 million, Assets Under Construction Rp377.76 million, and also Software System Application and Processing (SAP) License, Brand, and Intellectual Property Licenses Rp983.83 million.
- h. Key Performance Indicators (KPI) in 2021 were achieved with a score of 47.52 or a decline in the 2021 Company Work Plan and Budget target. This was mainly due to a very sharp decline in the indicators of Socio-Economic Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, and Employee Development.

8. Key Performance Indicators (KPI) in 2021

Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2021 are presented in the table below:

No.	Program Kerja Work Program	Keterangan Description	Rencana Plan		Realisasi Realization	
			KPI	Bobot Percentage [%]	KPI	Bobot Percentage [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	Aspek Pengawasan dan Pengarahan Supervision and Direction Aspects			50,00		50,00
1	Review atau Analisis Kinerja Perusahaan Company performance review/analysis		4 kali 4 times	10,00	4 kali 4 times	10,00
2	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting					
	• Jumlah Rapat Gabungan dengan Direksi Cost of Revenues	Tidak termasuk keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Rapat dengan Pemegang Saham Does not include the participation of the Board of Commissioners in meetings with Shareholders	12 kali 12 times	5,00	12 kali 12 times	5,00
	• Jumlah Rapat Internal Number of Internal Meetings		12 kali 12 times	5,00	12 kali 12 times	5,00
	• Kehadiran Rapat Meeting Attendance		100 %	5,00	100 %	5,00

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

3	Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern, kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, kebijakan tentang sistem teknologi informasi, kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan pelayanan, kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), penyampaian laporan kepada para pemegang saham beserta pelaksanaannya secara lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis.		4 Dokumen 4 Documents	7,50	4 Dokumen 4 Documents	7,50
	<i>Supervise and provide advice to the Board of Directors on policies or designs of internal control systems, policies and implementation of company risk management, policies on information technology systems, procurement policies, quality and service policies, Partnerships and Community Development Program and Corporate Social Responsibility (CSR) policies, submission of reports to shareholders and their implementation in a timely manner verbally contained in the minutes of the meeting or written suggestions.</i>					
4	Melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil atau temuan audit internal atau eksternal dan melakukan pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal	Komite Audit Audit Committee	2 kali 2 times	7,50	2 kali 2 times	7,50
	<i>Monitoring the follow-up to the results or findings of internal or external audits and supervising the effectiveness of the implementation of external audits and internal audits</i>					
5	Monitoring dan Evaluasi Pabrik	Prioritas sektor pemasaran Marketing sector priorities	2 kali 2 times	5,00	2 kali 2 times	5,00
	<i>Factory Monitoring and Evaluation</i>					
6	Melakukan pengawasan dan kajian atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga dan melakukan pemantauan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.		2 kali 2 times	5,00	2 kali 2 times	5,00
	<i>Supervise and review the Board of Directors' compliance with applicable laws and regulations and agreements with third parties and monitor the implementation of good corporate governance principles.</i>					
II Aspek Pelaporan Reporting Aspect				35,00		35,00
1	Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan	Akhir tahun End of year	1 kali 1 times	5,00	1 kali 1 times	5,00
	<i>Develop and deliver annual work programs</i>					
2	Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS		2 kali 2 times	20,00	2 kali 2 times	20,00
	<i>Conveying reports/opinions/suggestions to Shareholders/GMS.</i>					
3	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris		1 kali 1 times	10,00	1 kali 1 times	10,00
	<i>Submitting reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.</i>					

III	Aspek Dinamis <i>Dynamic Aspect</i>		15,00		10,00
1	Peningkatan kompetensi/kapabilitas/pelatihan <i>Enhancement of competence/capability/training</i>	1 kali <i>1 times</i>	5,00	0 kali <i>There is no realization</i>	-
2	Melakukan penunjukan/penentuan calon Kantor Akuntan Publik dan anggarannya <i>Appointing/determining Public Accounting Firm candidates and their budgets.</i>	1 kali <i>1 times</i>	5,00	1 kali <i>1 times</i>	5,00
3	Melakukan pembahasan transaksi atau tindakan yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai Anggaran Dasar <i>Discussing transactions or actions that are the authority of the Board of Commissioners or GMS in accordance with the Articles of Association.</i>	7 hari kerja <i>7 working days</i>	1,25	7 hari kerja <i>7 working days</i>	1,25
4	Melakukan telaah dan atau persetujuan atas rancangan KAP yang diajukan oleh Direksi dan/atau melakukan telaah dan/atau persetujuan atas rancangan Rencana Jangka Panjang (RJPP) <i>Reviewing and/or approving the draft of a public accounting firm submitted by the Board of Directors and/or reviewing and/or approving the draft of the Company's Long-Term Plan.</i>	1 kali <i>1 times</i>	1,25	1 kali <i>1 times</i>	1,25
5	Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris <i>Reviewing complaints related to the company received by the Board of Commissioners</i>	14 hari kerja <i>14 working days</i>	1,25	14 hari kerja <i>14 working days</i>	1,25
6	Melakukan telaah dan /atau pengusulan remunerasi Direksi <i>Reviewing and/or proposing the remuneration of the Board of Directors</i>	1 kali <i>1 times</i>	1,25	1 kali <i>1 times</i>	1,25
TOTAL (I-III)			100,00		95,00

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Criteria for Members of The Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN, Kriteria Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- Orang perseorangan.
- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, the Criteria for Members of the Board of Commissioners are as follows:

1. Formal Requirements

Formal requirements for members of the Board of Commissioners, namely:

- Individuals.*
- Can carry out legal actions.*
- Never been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination.*
- Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board which was found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination.*
- Never been convicted of committing a criminal offense that is detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.*

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu:

- Integritas
- Dedikasi
- Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
- Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

2. Material Requirements

The material requirements of the members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board are:

- Integrity
- Dedication
- Understand the company's management problems relating to one of the management functions.
- Have adequate knowledge in the business sector of the Perseroan or Perum where the relevant person is nominated.
- Can provide sufficient time to carry out their duties.

3. Other Requirements

Other requirements are members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board, namely:

- Not administrators of political parties and/or legislative candidates and/or legislators. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/members of the House of Representatives, Regional Representative Council, Level I Regional People's Representative Assembly, and Level II Regional People's Representative Assembly.
- Not a prospective Head/Deputy Regional Head and/or Head/Deputy Regional Head.
- Not serving as a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board in the relevant state owned enterprise (SOE) for 2 (two) consecutive periods.
- Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board), which is proven by a health certificate from the doctor.
- For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on the proposal letter and the relevant agency.



Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sebagai Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham BUMN.

Capability and Compliance Assessment was carried out by the Ministry of SOEs as a Government Representative as a SOEs Shareholder.



Komposisi Dewan Komisaris

Composition of The Board of Commissioners

Pada tahun 2021 komposisi Dewan Komisaris PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

In 2021 the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is as follows:

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Ratification</i>
1	Unggul Priyanto	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-99/MBU/05/2017 tanggal/ <i>dated</i> 23 Mei 2017
2	Rahmadi Murwanto	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-318/MBU/10/2020 tanggal/ <i>dated</i> 8 Oktober 2020
3	Trisno Hendradi	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-318/MBU/10/2020 tanggal/ <i>dated</i> 8 Oktober 2020
4	Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>	Keputusan Dewan Komisaris <i>Decree of Board of Commissioners</i> KEP-49/DK-/INTI/VI/2017 tanggal/ <i>dated</i> 1 November 2017
5	Dian Agustina	Staf Sekretaris Dewan Komisaris <i>Staff Secretary to the Board of Commissioners</i>	Keputusan Dewan Komisaris <i>Decree of Board of Commissioners</i> KEP-49/DK-/INTI/XI/2017 tanggal/ <i>dated</i> 1 November 2017

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Diversity of The Board of Commissioners Composition

Perusahaan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.

The Company believes that the diversity of expertise, experience, and educational background is indispensable for the effectiveness of the supervisory services of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors.

Dewan Komisaris dan Direksi PT INTI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian, serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 untuk Dewan Komisaris dan PER-03/MBU/02/2015 untuk Direksi yang menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan

The Board of Commissioners and the Board of Directors of PT INTI (Persero) appointed by the General Meeting of Shareholders' resolutions, taking into consideration the needs and complexities of the Company, has considerable composition based on age, educational background, expertise, and experience required in the performance of its duties and responsibilities. This is in line with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-02/MBU/02/2015 for the Board of Commissioners and PER-03/MBU/02/2015 for the Board of Directors stating that the source of the candidate members of the Board of



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

Susunan dan keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Commissioners and the Board of Directors may come from various institutions and the conditions.

The composition and diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners is reflected in education, work experience, and age, as can be seen in the table below:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Tempat Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Unggul Priyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Malang, 30 September 1958 Malang, September 30, 1958	Pria Male	• S1 Teknik Kimia <i>Bachelor of Chemical Engineering</i> • S2 Chemical Engineering <i>Master of Chemical Engineering</i> • S3 Electronic & Material <i>Doctorate in Electronics & Materials</i>	• Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) <i>Head of the Agency for the Assessment and Application of Technology</i> • Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material <i>Deputy for Information Technology, Energy and Materials</i> • Kuasa Pengguna Anggaran <i>Budget User Authority</i> • Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Energi <i>Director of the Center for Energy Resources Technology</i>
Rahmadi Murwanto	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>	Metro, 13 Maret 1970 Metro, March 13, 1970	Pria Male	• D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara <i>D3 of State Accounting College</i> • D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara <i>D4 of State Accounting College</i> • Master of Business Administration <i>Master of Accountancy</i> • PhD	• Pelaksana dan Asisten Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara <i>Executive and Assistant Lecturer of the State Accounting College</i> • Business Analyst di Amerika Serikat <i>Business Analyst in United State of America</i> • Direktur Departemen Keuangan <i>Director of the Ministry of Finance</i> • Kepala Bidang Menteri Keuangan <i>Head of the Ministry of Finance</i> • Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) <i>Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency</i> • Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara <i>Director of the State Accounting College</i>
Trisno Hendradi	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>	Magelang, 14 Oktober 1961 Magelang, October 14, 1961	Pria Male	• Akademi Angkatan Udara <i>Air Force Academy</i> • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara <i>Air Force Unit Command School</i> • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara <i>Air Force Command and Staff College</i> • Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia <i>Indonesian Armed Forces Command and Staff College</i> • Lembaga Ketahanan Nasional <i>National Defense Institute</i>	• Kepala Sekretariat Militer Presiden <i>Head of the Presidential Military Secretariat</i> • Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) <i>Deputy Commander of the Air Force Doctrine Development, Education and Training Command</i>

Rapat Dewan Komisaris

Meeting of The Board of Commissioners

Untuk mengambil segala keputusan yang dipandang perlu, Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, di mana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat.

To take any decisions deemed necessary, the Board of Commissioners holds the Meeting of Board of Commissioners. The decision can also be taken outside the Meetings of Board of Commissioners as long as the Board of Commissioners agrees on how and materials to be decided.

The Board of Commissioners shall hold a meeting at least once every month, at which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. Board of Commissioners can be convened at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, the Board of Directors request, or upon written at the demand of Shareholders mentioning the things that will be discussed.

All board meetings chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, the Meeting of Board of Commissioners chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

The Meeting of Board of Commissioners is valid and may take binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (a half) the number of members of the Board of Commissioners.

All decisions taken by the Meeting of Board of Commissioners are through consensus decision-making. If the consensus is not reached, then the decision of the Meeting of Board of Commissioners taken by a majority vote.

In each Meeting of the Board of Commissioners, minutes of meetings must be made, containing things that are discussed and decided. Minutes of the meeting signed by the Chairman of the Meeting and all Commissioners present in the meeting.

Organ Pendukung dan Komite-Komite di Bawah Komisaris

Supporting Organ and Committees Under The Board of Commissioners

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mempunyai 3 (tiga) Komite Penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Good Corporate Governance, Nominasi dan Remunerasi (GCG-NR), dan Komite Manajemen Risiko serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (*charter*).

Adapun dasar hukum pembentukan organ penunjang Dewan Komisaris mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

To support its supervisory function, the Board of Commissioners (BOC) has 3 (three) Supporting Committees for the BOC, namely the Audit Committee, the Good Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee (GCG-NR), and the Risk Management Committee and supported by the function of the Secretary to the BOC. Each BOC Supporting Committee is chaired by a member of the BOC, and the duties and responsibilities of each Committee are listed in their respective work guidelines (charter).

The legal basis for the formation of the supporting organs for the BOC refers to:

1. State-Owned Enterprises (SOE) Minister's Regulation Number PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dalam setiap Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, setiap anggota diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

Seluruh Organ Pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-12/MBU/2012 di mana Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, maka Sekretaris Komisaris PT INTI (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT INTI (Persero) Nomor KEP-49/DK-INTI/VI/2017 tertanggal 1 Nopember 2017 dan dijabat oleh Suripto.

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, bahan rapat, dan risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris.
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris.
4. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
5. Memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau apabila diminta.
6. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
7. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak luar.
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris

2. *State-Owned Enterprises (SOE) Minister's Regulation Number PER-12/MBU/2012 regarding Supporting Organ of the BOC of State-Owned Enterprises.*

In every Board of Commissioners Supporting Committee's Meeting, each member of the Committee was given the freedom to express their professional opinion. The decision of the meeting is taken based on deliberation and consensus. Everything discussed and decided in the meeting, including dissenting opinions, stated in the Minutes of Meeting, signed by all committee members who were present and known by the Chairman and Vice-Chairman of the Committee, as valid evidence for decisions taken at the meeting.

All the supporting Organs of the Board of Commissioners shall prepare a report to the BOC for each assignment received, accompanied by a recommendation if necessary. The report is signed by the Chairman, Vice-Chairman, and Committee member.

Secretary to the Board of Commissioners

In accordance with Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-12/MBU/2012 that Board of Commissioners can appoint Secretary of Board of Commissioners, so the Secretary of Board of Commissioners of PT INTI (Persero) was appointed by the Decree of BOC of PT PT INTI (Persero) Number KEP-KEP-49/DK-INTI/VI/2017 dated November 1, 2017 and chaired by Suripto.

Secretary of Board of Commissioners has the following tasks:

1. *To prepare meetings, meeting materials and minutes of meetings of the Board of Commissioners.*
2. *To administer Board of Commissioners documents.*
3. *To prepare drafts of Work and Budget Plan and Reports of Board of Commissioners.*
4. *To ensure that the Board of Commissioners complies to regulations and applies Good Corporate Governance (GCG) principles.*
5. *To provide information needed by the Board of Commissioners regularly and/or upon request.*
6. *To coordinate Committee members if needed, to facilitate the tasks of the Board of Commissioners.*
7. *To play the role of liaison officer between the Board of Commissioners and external parties.*
8. *To implement other tasks assigned by the Board of Commissioners.*

Komite Audit

Audit Committee

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris serta kalangan luar dengan berbagai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan. Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi maupun Eksternal Auditor. Dengan demikian, Komite Audit hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Audit yang belum habis masa jabatannya dan pengangkatan anggota Komite Audit yang baru harus mendapat persetujuan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan KEP-01/DEKOM/INTI/IV/2021 tertanggal 2 April 2021 tentang Perpanjangan Anggota Komite Audit PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Komite Audit PT INTI (Persero) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu dari 1 (satu) orang anggota Komisaris Perseroan merangkap menjadi Ketua Komite Audit dan 1 (satu) orang anggota Komite Audit. Susunan Komite Audit sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rahmadi Murwanto sebagai Ketua.
2. Endarjono sebagai Anggota.

Kualifikasi Anggota Komite Audit

- **Ketua Komite Audit**
Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., Ph.D., Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, lahir di Metro 13 Maret 1970, mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) setelah lulus Diploma-III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Lulusan Strata-2 jurusan Akuntansi dari Weatherhead School of Management Case Western Reserve University Amerika Serikat itu pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2016-sekarang. Peraih gelar Akuntan pada tahun 1997 ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 2014, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPPK pada tahun 2011, serta Kepala Subbagian Organisasi Sekretariat BPPK pada tahun 2003.

To further improve their performance, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee consisting of one or more members of the Board of Commissioners and outer circles with a variety of skills and qualifications required. The Audit Committee shall be free from the influence of the Board of Directors and the External Auditors. Thus only the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. Replacement of members of the Audit Committee whose term is not yet expired and appointment of new member of the Audit Committee must be approved by at least 50% of the total number of Commissioners.

The Audit Committee was established by the Decree of Board of Commissioners Number SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 dated October 21, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Company's Audit Committee of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and KEP-01/DEKOM/INTI/IV/2021 dated April 2, 2021 regarding Extension of Member of the Audit Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Audit Committee of PT INTI (Persero) consists of 2 (two) members, namely 1 (one) member of the Board of Commissioners concurrently as Chairman and 1 (one) member of the Audit Committee. The composition of the Audit Committee referred to the decision of the Board of Commissioners are as follows:

1. Rahmadi Murwanto as Chairman.
2. Endarjono as Member.

Qualification of Audit Committee Members

- **Chairman of Audit Committee**
Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., Ph.D.
Indonesian citizen, domiciled in South Tangerang, born in Metro March 13, 1970, started his career at the Ministry of Finance in 1991 at the Financial Education and Training Agency after graduating Diploma-III from the State Accounting College.

A Postgraduate majoring in Accounting from Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, United States of America, has served as Director of the State Finance Polytechnic State Accounting College in 2016-present. The owner of the title of Accountant in 1997 also served as Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency in 2014, Head of Performance Evaluation and Reporting Division of Financial Education and Training Agency in 2011, and Head of the Secretariat Organization Subdivision of the Financial Education and Training Agency in 2003.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- **Anggota Komite Audit**

Eendarjono, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir pada 3 Oktober 1962. Lulus dari pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro pada tahun 1987 dan S2 Manajemen Bisnis Administrasi Teknologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005.

Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur di Perum Produksi Film Negara (2011-2013), Direktur Administrasi dan Keuangan di Perum Produksi Film Negara (2001-2011), Kasubdit Pendukung Jasa Konstruksi di Kementerian Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2000-2001), Kasubdit Perusahaan Manufaktur Strategis di Kementerian Kementerian Pendayagunaan BUMN (2000-2001), dan Kepala Bagian Pendanaan di Badan Pengelola Industri Strategis (1992-1999).

Independensi Anggota Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris di dalam infrastruktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan. Kedudukan Komite Audit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite Audit dijabat oleh salah seorang anggota Komisaris Perseroan. Personil Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit harus tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Perseroan.

Independensi Komite Audit ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Komite Audit yang dijalankan untuk kepentingan Perseroan.

Antar-anggota Komite Audit, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris, serta dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- **Audit Committee Member**

Eendarjono, an Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born on October 3, 1962. Graduated from Bachelor Degree of Accounting at Diponegoro University in 1987 and holds a Masters in Business Administration in Technology at the Bandung Institute of Technology in 2005.

Having work experience as a Director of State Film Production Corporation (2011-2013), Director of Administration and Finance at the State Film Production Corporation (2001-2011), Head of Sub Directorate of Construction Services Support at the Ministry of Investment and Development of State Owned Enterprises (SOEs) (2000-2001), Head of Sub Directorate of Strategic Manufacturing Companies in the Ministry of SOEs Empowerment (2000-2001), and Head of Funding Section at the Strategic Industry Management Agency (1992-1999).

Independence of The Audit Committee Member

Based on the Audit Committee Charter PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), the Audit Committee is a supporting organ to the Board of Commissioners in the *Good Corporate Governance* (GCG) infrastructure supporting that works collectively and is independent both in the execution of its tasks and in reporting. The position of the Audit Committee is subordinate and reporting to the Board of Commissioner.

Chairman of the Audit Committee is held by a member of the Board of Commissioners. The personnel of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS). In performing their duties, members of the audit committee must have no conflict of interest to the Company.

Independence of the Audit Committee is determined to carry out all its duties and responsibilities or relationships with other parties independently without interference from other parties or that are against the laws and regulations and the Articles of Association of the company which can materially interfere with the objectivity and independence of the duties of the Audit Committee for the benefit of the Company.

Between members of the Audit Committee, as well as the Audit Committee with members of the Risk Development and GCG Committee, with the Board of Directors, with the Board of Commissioners and also with the Major, and/or Controlling Shareholders do not have family relations up to the third degree, either according to a straight line or a sideways line including relationships arises because of marriage.

Tugas Komite Audit dan Pelaksanaannya di Tahun 2021

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan lainnya.
2. Menyeleksi dan mengusulkan calon auditor independen dan melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal terhadap jasa auditor independen.
3. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.
5. Melakukan menelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi.
8. Menerima, menelaah, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan, manajemen, atau karyawan.
9. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan Piagam Komite Audit.

Komite Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan jajaran Manajemen mengenai masalah laporan keuangan dan pelaporan, menyangkut kebijakan dan praktik pelaporan akuntansi dan keuangan termasuk adanya perubahan yang signifikan, dasar pertimbangan dari alternatif perlakuan akuntansi yang dipergunakan, standar pelaporan akuntansi, laporan keuangan triwulan maupun tahunan.

Secara berkala, Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern melakukan rapat koordinasi yang membahas antara lain struktur pengendalian intern, laporan keuangan, kebijakan

Tasks of Audit Committee and The Implementation in 2021

Based on the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners in reviewing financial information such as financial reports, projections, and others.
2. Select and propose prospective independent auditors and conduct evaluations to provide initial approval for independent auditor services.
3. Reviewing the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties implementation.
4. Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and the external auditors.
5. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relating to company activities.
6. Report to the Board of Commissioners the various risks that may be faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors.
7. Examining the alleged error in the decision of the Board of Directors meeting.
8. Receive, review, and monitor follow-up complaints relating to the company, management, and employees.
9. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
10. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioner based on the prevailing laws and regulations.
11. Evaluating the effectiveness of the implementation of duties and updating the Audit Committee Charter.

The Audit Committee communicates with the Board of Directors and the Management on the issue of financial statements and reporting, policies and practices regarding accounting and financial reporting, including any significant changes, considerations taken for used alternative accounting treatment, accounting reporting standards, quarterly and annual financial reports.

Periodically, the Audit Committee and Internal Audit Unit hold a coordination meeting which discusses among other things the structure of internal control, financial

akuntansi, laporan hasil audit, kinerja audit, dan lain-lain.

reporting, accounting policies, report the results of audits, performance audits, and others.

Daftar Rekapitulasi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

List of Audit Committee Meeting Recapitulation and Attendance Rate

No.	Materi Rapat <i>Meeting Materials</i>	Jumlah (Kali) <i>Quantity (Times)</i>	Peserta <i>Participant</i>	Tingkat Kehadiran <i>Attendance Rate</i>
1	Pembahasan Laporan Keuangan Bulanan dengan Dewan Komisaris <i>Discussion of Monthly Financial Reports with the Board of Commissioners</i>	12 kali <i>12 times</i>	Rahmadi Murwanto	100%
2	Pembahasan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern Triwulan I sampai dengan IV <i>Discussion on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit in Quarters I to IV</i>	4 kali <i>4 times</i>	Endarjono	100%

No.	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Jabatan <i>Position</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	10 Februari 2021 <i>February 10, 2021</i>	Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan IV 2020 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Supervisory Unit up to Quarter IV 2020</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Rudy Lizwaril	Vice President Satuan Pengawasan Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Lisda Noor Rachmawati	Notulis <i>Note Taker</i>
2	4 Mei 2021 <i>May 4, 2021</i>	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan I 2021 dan Rencana Kegiatan Triwulan II 2021 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit until the first Quarter of 2021 and the Plan of Activities for the Second Quarter of 2021</i> 2. Lain-lain <i>Description of the Internal Audit Unit's audit process flow</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Lisda Noor Rachmawati	Pejabat Sementara Vice President Satuan Pengawas Intern <i>Interim Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor

			Aar Sumiarsa	Pejabat Sementara Manager Rendal Audit <i>Interim Audit Planning and Control Manager</i>
			Febriani Puspa Dewi	Notulis <i>Note Taker</i>
3	20 Agustus 2021 <i>August 20, 2021</i>	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan II 2021 dan Rencana Kegiatan Triwulan III 2021 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit until the Second Quarter of 2021 and the Plan of Activities for the Third Quarter of 2021</i> 2. Laporan Hasil Audit Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) <i>Human Resource Division Audit Results Report</i> 3. Lain-lain <i>Others</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Lisda Noor Rachmawati	Pejabat Sementara Vice President Satuan Pengawas Intern <i>Interim Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Pejabat Sementara Manager Rendal Audit <i>Interim Audit Planning and Control Manager</i>
			Febriani Puspa Dewi	Notulis <i>Note Taker</i>
4	12 November 2021 <i>November 12, 2021</i>	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan III 2021 dan Rencana Kegiatan Triwulan IV 2021 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Supervisory Unit up to Quarter III 2021 and the Activity Plan for Quarter IV 2021</i> 2. Lain-lain <i>Others</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Lisda Noor Rachmawati	Pejabat Sementara Vice President Satuan Pengawas Intern <i>Interim Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Pejabat Sementara Manager Rendal Audit <i>Interim Audit Planning and Control Manager</i>
			Febriani Puspa Dewi	Notulis <i>Note Taker</i>

5	Januari sampai dengan Desember 2021 <i>January until December 2021</i>	Pembahasan Laporan Keuangan Januari sampai dengan Desember 2021 (tiap bulan) <i>Discussion of Financial Statements for January to December 2021 (every month)</i>	Unggul Priyanto	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
			Trisno Hendradi	Komisaris <i>Commissioners</i>
			Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>
			Dian Agustina	Staf Sekretaris Dewan Komisaris <i>Staff Secretary to the Board of Commissioners</i>

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris, selain pembentukan Komite Audit, dibentuk pula Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan kriteria pemilihan calon Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya.

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) diangkat dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-53/DEKOM/INTI/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan susunan sebagai berikut:

In order to assist the Board of Commissioners, in addition to the establishment of the Audit Committee, a Nomination and Remuneration Committee was also formed to determine the criteria for selecting candidates for the Board of Directors and propose the amount of remuneration.

The Nomination and Remuneration Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) was appointed by the Decree of the Board of Commissioners Number SK-53/DEKOM/INTI/10/2020 dated October 21, 2020 with the following composition:

Jabatan <i>Position</i>	Nama <i>Name</i>	Status Rangkap Jabatan <i>Double Position Status</i>
Ketua <i>Chairman</i>	Unggul Priyanto*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Trisno Hendradi*	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>
Anggota <i>Member</i>	Rahmadi Murwanto*	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>
Pembantu Sekretaris <i>Assistant Secretary</i>	Endarjono**	Anggota Komite Audit <i>Member of the Audit Committee</i>

*Informasi mengenai riwayat hidup Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris.

* Information regarding the curriculum vitae of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the profile section of the Board of Commissioners.

** Informasi mengenai riwayat hidup Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian profil Komite Audit.

** Information regarding the curriculum vitae of Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the profile section of the Audit Committee.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of The Nomination and Remuneration Committee

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), KNR adalah organ pendukung Dewan Komisaris di dalam infrastruktur (Good Corporate Governance/GCG) yang bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, kedudukan KNR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Ketua KNR dijabat oleh Komisaris Utama Perseroan. Personil KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KNR harus tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Perseroan.

Independensi KNR ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu obyektivitas dan kemandirian tugas KNR yang dijalankan untuk kepentingan Perseroan.

Antar-anggota KNR dan KNR dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi Perusahaan.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan tolak ukur atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan atau kompetensi anggota Direksi.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat

Based on the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), the Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners in the infrastructure (Good Corporate Governance/GCG) that works collectively and is independent both in carrying out its duties and in reporting, the position of the Nomination and Remuneration Committee is under and responsible to the Board of Commissioners.

The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee is held by the President Commissioner of the Company. The Nomination and Remuneration Committee personnel are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders.

The independence of the Nomination and Remuneration Committee is determined to carry out all its duties and responsibilities or relationships with other parties independently without interference from other parties or contrary to the laws and regulations and the Company's Articles of Association which could materially interfere with the objectivity and independence of the Nomination and Remuneration Committee's duties carried out for the benefit of the Company.

Between Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Nomination and Remuneration Committee with the Board of Directors, and also with the Main and/or Controlling Shareholders, there is no family relationship, including relationships that arise due to marriage.

Members of the Nomination and Remuneration Committee have the following duties and responsibilities:

1. *Related to the Nomination function:*
 - a. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - 1) *The composition of the positions of the members of the Company's Board of Directors.*
 - 2) *Policies and criteria required in the nomination process.*
 - 3) *Performance evaluation policies for members of the Board of Directors.*
 - b. *Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors based on benchmarks or Key Performance Indicator (KPI) that have been prepared as evaluation materials.*
 - c. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors.*
 - d. *Proposing candidates who meet the requirements*



sebagai anggota Direksi sesuai usulan dari *Talent Committee*, yang terdiri dari Top 20% talent Board of Directors minus one (BOD-1) dan Direksi, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS).

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi
 - 3) Besaran atas Remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. Jumlah realisasi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di bawah rencana di dalam program kerja yang sebanyak 4 (empat) kali. Hal itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
2. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.
3. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi nominasi Direksi PT INTI (Persero).
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kinerja Direksi PT INTI (Persero) yang saat ini menjabat berdasarkan tolok ukur atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi atau *Talent Committee* atas BoD-1 yang akan diusulkan sebagai *Nominated Talent* kepada Pemegang Saham.
6. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

as members of the Board of Directors according to the proposal from the *Talent Committee*, consisting of Top 20% talent Board of Directors minus one (BOD-1) and Directors, to the Board of Commissioners to be submitted to shareholders (General Meeting of Shareholders or GMS).

2. Related to the Remuneration function:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding:
 - 1) Remuneration Structure
 - 2) Remuneration Policy
 - 3) Amount of Remuneration
 - b. Assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors.
3. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.

In carrying out its duties and functions throughout 2021 the Nomination and Remuneration Committee has implemented the following activities:

1. The Nomination and Remuneration Committee has held 3 (three) meetings with 100% attendance. The number of realization of the Nomination and Remuneration Committee meetings was below the plan in the work program which was 4 (four) times. This is due to the current conditions of the Covid-19 pandemic that still occurred in Indonesia.
2. Reviewing and provide recommendations to the Board of Commissioners on the organizational structure in accordance with the company's business development.
3. Reviewing and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies and criteria needed to be nominated for the Board of Directors of PT INTI (Persero).
4. Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors of PT INTI (Persero) based on the benchmarks or Key Performance Indicators (KPI) that have been set.
5. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors or Talent Committee on the BoD-1 which will be proposed as *Nominated Talent* to Shareholders.
6. Review and provide recommendations to the Board of Commissioners on the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

No.	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Jabatan <i>Position</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	26 Februari 2021 <i>February 26, 2021</i>	Pembahasan Nominated Talent Direksi PT INTI (Persero) <i>Discussion on the Nominated Talent of the Directors of PT INTI (Persero)</i>	Unggul Priyanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Trisno Hendradi	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Rahmadi Murwanto	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Endarjono	Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>
2	10 Agustus 2021 <i>August 10, 2021</i>	Pembahasan Nominated Talent Direksi PT INTI <i>Discussion on the Nominated Talent of the Directors of PT INTI</i>	Unggul Priyanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Trisno Hendradi	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Rahmadi Murwanto	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Endarjono	Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>



Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Hingga tahun 2021, PT INTI (Persero) belum membentuk Komite Manajemen Risiko.

Until 2021, PT INTI (Persero) has not formed a Risk Management Committee.

Pelatihan Bagi Dewan Komisaris

Training for The Board of Commissioners

Pada tahun 2021 hanya Komisaris Utama yang mengikuti pelatihan. Data pelatihan yang diikuti oleh Komisaris Utama PT INTI (Persero) ditampilkan pada tabel berikut:

Pada tahun 2021 hanya Komisaris Utama yang mengikuti pelatihan tersebut. Data on the training attended by the President Commissioner of PT INTI (Persero) is shown in the following table:

Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Topik <i>Topic</i>	Lokasi <i>Location</i>
Senin, 28 Juni 2021 <i>Monday, June 28, 2021</i>	SRW&Co.	<i>Mastering Star Interview for Talent Selection</i>	Aplikasi Zoom Meeting Meeting ID: 896 4593 6761 Passcode: 822173

Uraian Tentang Direksi

Description on Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan PT INTI (Persero) serta melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi diangkat dalam RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris, atau berdasarkan keputusan RUPS. Pengangkatan Direksi telah melalui proses fit & proper test sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

The Board of Directors is a Company Organ with collective duties and responsibilities for managing PT INTI (Persero) and implementing Good Corporate Governance (GCG) at all organization levels. In carrying out the tasks, the Directors are responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS). Their responsibility to General Meeting of Shareholders (GMS) embodies the accountability of corporate management under Good Corporate Governance (GCG) principles.

The Board of Directors consists of 3 (three) people, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All Directors domiciled in Indonesia. They are inaugurated in GMS, with tenure of each member for 5 (five) years, and can be re-promoted according to GMS' decision.

The Directors' tenure will end when they resign, no longer qualified, pass away, or terminated by the Board of Commissioners, or based on GMS' decision. The Board of Directors' promotions has gone through the fit & proper test process according to the applicable regulations and GCG principles. All members of Board of Directors have adequate integrity, competence, and reputation.

Komposisi Direksi

The Composition of The Board of Directors

Pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota Direksi PT INTI (Persero) yang semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-299/MBU/09/2021 tertanggal 9 September 2021. Komposisi Direksi PT INTI (Persero) diuraikan dalam tabel berikut:

In 2021 there was a change in the nomenclature of positions and the transfer of duties of members of the Board of Directors of PT INTI (Persero) from being Finance Director to Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-299/MBU/09/2021 dated September 9, 2021. The composition of the Board of Directors of PT INTI (Persero) is described in the following table:

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Ratification</i>
1	Otong lip	Direktur Utama <i>President Director</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-223/MBU/10/2019 tanggal/dated 17 Oktober 2019
		Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-161/MBU/07/2019 tanggal/dated 24 Juli 2019
2	Tri Hartono Rianto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-299/MBU/09/2021 tanggal 9 September 2021 dated September 9, 2021
3	Teguh Adi Suryandono	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-292/MBU/12/2017 tanggal/dated 28 Desember 2017

Keberagaman Anggota Direksi

Diversity of The Board of Directors Composition

Perusahaan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi PT INTI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian, serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 untuk Dewan Komisaris dan PER-03/MBU/02/2015 untuk Direksi yang menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

Susunan dan keberagaman komposisi Direksi Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

The Company believes the diversity of expertise, experience, and educational background is indispensable for the effectiveness of the supervisory services of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of PT INTI (Persero) appointed by the General Meeting of Shareholders' resolutions, taking into consideration the needs and complexities of the Company, has considerable composition based on age, educational background, expertise and experience required in the performance of its duties and responsibilities. This is in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-02/MBU/02/2015 for the Board of Commissioners and PER-03/MBU/02/2015 for the Board of Directors stating that the source of the candidate members of the Board of Commissioners and the Board of Directors may come from various institutions and the conditions.

The composition and diversity of the composition of the Company's Board of Directors is reflected in education, work experience, and age, as can be seen in the table below:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Tempat Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Otong Iip	Direktur Utama President Director	Kuningan, 20 Januari 1965 <i>Kuningan, January 20, 1965</i>	Pria <i>Male</i>	- Magister Management <i>Master of Management</i> - Sarjana Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i> - Diploma-3 Ekonomi <i>Diploma of Economics</i>	- Direktur Utama PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra) <i>President Director of PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra)</i> - Komisaris Utama PT PINS Indonesia <i>President Commissioner of PT PINS Indonesia</i> - Komisaris Utama PT Administrasi Medika <i>President Commissioner of PT Administrasi Medika</i> - Komisaris Utama PT Metra Digital Investama <i>President Commissioner of PT Metra Digital Investama</i> - Direktur Utama PT Finnet Indonesia <i>President Director of PT Finnet Indonesia</i> - Komisaris PT Finnet Indonesia <i>Commissioner of PT Finnet Indonesia</i> - Senior General Manager Finance-Billing & Collection Centre Telkom <i>Telkom Senior General Manager Finance-Billing & Collection Center</i> - Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional <i>Finance Director of PT Telekomunikasi Indonesia Internasional</i> - Deputy Senior General Manager Finance Centre <i>Deputy Senior General Manager Finance Center</i> - Office Senior Manager Finance Divisi Regional II Jakarta <i>Senior Manager Regional Finance Division II Jakarta Office</i>
Tri Hartono Rianto	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Jayapura, 4 September 1971 <i>Jayapura, September 4, 1971</i>	Pria <i>Male</i>	- Magister Keuangan dan Akuntansi <i>Master in Finance and Accounting</i> - Profesi Akuntan Negara (Ak), Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant (CPMA) <i>State Accountant Profession (Ak), Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant (CPMA)</i> - Sarjana Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>	- Direktur Keuangan PT Semen Padang <i>Finance Director of PT Semen Padang</i> - Komisaris Utama PT Sepatim Batamtama <i>President Commissioner of PT Sepatim Batamtama</i> - Pembina Yayasan Semen Padang (Rumah Sakit Semen Padang) <i>Trustees of the Semen Padang Foundation (Semen Padang Hospital)</i> - Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Semen Padang <i>Chairman of the Supervisory Board of the Semen Padang Pension Fund</i> - CEO of An Phu Cement Company, Vietnam - Strategic Planning & Procurement Director, Thang Long Cement Company, Vietnam - Marketing & HCM Branch Director Thang Long Cement Company, Vietnam - General Manager, Office of The CEO Bidang Visi & Strategi PT Semen Gresik (Persero) Tbk <i>General Manager, Office of The CEO for Vision & Strategy of PT Semen Gresik (Persero) Tbk</i> - Komisaris Utama PT Industri Kemasan Semen Gresik <i>President Commissioner of PT Semen Gresik Packaging Industry</i>
Teguh Adi Suryandono	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	Malang, 28 Januari 1969 <i>Malang, January 28, 1969</i>	Pria <i>Male</i>	Sarjana Teknik Elektro <i>Bachelor of Electrical Engineering</i>	- Kepala Divisi Corporate Services PT INTI (Persero) <i>Head of the Corporate Services Division PT INTI (Persero)</i> - Komisaris Utama PT INTI Konten Indonesia <i>President Commissioner of PT INTI Konten Indonesia</i> - Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Umum PT INTI (Persero) <i>Head of Information Technology and General Affairs PT INTI (Persero)</i> - Komisaris Utama PT Mitra Graha Inti Utama <i>President Commissioner of PT Mitra Graha Inti Utama</i> - Kepala Divisi Akuntansi PT INTI (Persero) <i>Head of the Accounting Division PT INTI (Persero)</i> - Kepala Divisi Corporate Planning PT INTI (Persero) <i>Head of the Corporate Planning Division, PT INTI (Persero)</i> - Direktur Utama PT INTI Konten Indonesia <i>President Director of PT INTI Konten Indonesia</i> - Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi PT INTI (Persero) <i>Head of Information Technology Systems Division of PT INTI (Persero)</i> - Komisaris Utama PT Inti Konten Indonesia <i>President Commissioner of PT INTI Konten Indonesia</i>



Tugas dan Kewajiban Direksi

Duties and Obligations of Board of Directors

1. Tugas dan Kewajiban Direksi dalam **mengurus Perusahaan** adalah:
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian maksud dan tujuan.
 - c. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - d. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
 - e. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Risalah Rapat Direksi.
 - f. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
 - g. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - h. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen perusahaan lainnya.
 - i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
 - j. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 - k. Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta

1. *Duties and Obligations of Board of Directors in managing the Company* are:
 - a. *Carry out their duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, ensure that the Company exercises its social responsibility and considers the interests of the various stakeholders in accordance with the provisions of the legislation.*
 - b. *Give full energies, thoughts, attention and devotion to duty, obligation and the achievement of the purpose and objectives of the Company.*
 - c. *Comply with the Company's Articles of Association and regulations and implement professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.*
 - d. *Seek and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the purpose and business activities.*
 - e. *Create a list of Shareholders, the Special Register, Minutes of Meeting of the General Meeting of Shareholders (GMS), and Minutes of Meeting of the Board of Directors.*
 - f. *Report to the Company regarding his/her share ownership and/or his family (wife/husband and children) in the Company and other companies, including any amendments.*
 - g. *Create Annual Report as a form of accountability of Company management and the Company's financial documents as mentioned in the Law on Corporate Documents.*
 - h. *Maintain and store the domicile of the Company: Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of the GMS, the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners Meetings and Board of Directors Meetings, the Annual Report and financial documents as well as other company documents.*
 - i. *Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners.*
 - j. *Hold and maintain the Company's accounting and administration in accordance with the standards in force for the Company.*
 - k. *Apply Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously, guided by the applicable GCG regulations, concerning rules and norms of the Company's Articles of Association.*

Anggaran Dasar Perusahaan.

- l. Memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - m. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
 - n. Melakukan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas tersebut.
 - o. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
2. Terkait dengan **Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
- a. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
 - c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
 - d. Menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. Dalam hal ada anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- l. *Ensure that the External Auditors, Internal Auditors and the Audit Committee, and other committees if any, have access to the accounting records, supporting data, and information about the Company, to the extent necessary to perform their duties.*
 - m. *Each board of directors personally takes full responsibility if the concerned makes mistakes or is negligent in performing their duties for the Company's benefit and business.*
 - n. *Divide roles and responsibilities among the Board of Directors, determined by Decree of Directors in the case of the GMS does not select the division of roles.*
 - o. *Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the loss of the Company if such person can prove that:*
 - *The loss is not due to his/her error or negligence.*
 - *The management has been performed in good faith and prudence to the benefit of and in accordance with the Company's purposes and objectives.*
 - *He/she does not have a conflict of interest, whether directly or indirectly, for the management resulting losses.*
 - *He/she has taken action to prevent the continuation of such losses.*
2. *Related to the **Shareholders or General Meeting of Shareholders (GMS)***
- a. *Organize and store the Register of Shareholders and documents relating to the GMS in accordance with laws and regulations.*
 - b. *Develop and submit the Annual Report to the GMS after review by the Board of Commissioners at the latest within a period of five (5) months after the Company fiscal year ends*
 - c. *Give explanations to the GMS regarding the Annual Report.*
 - d. *Prepare an annual report in accordance with the legislation in force, signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted at the GMS. The annual report must be provided in the Company's office no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS held, and available for inspection by the shareholders with a written request. In case that any member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners did not sign the Annual Report, the reason should be written.*
 - e. *Call and organize the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meetings of*



- f. Mengumumkan Laporan Tahunan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas atau nasional di wilayah Republik Indonesia dan dalam satu surat kabar untuk rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, jika dianggap perlu oleh Direksi.
 - g. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
 - h. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham di Kantor Perusahaan dan diberikan secara cuma-cuma jika diminta.
 - i. Membuat risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
 - j. Memberikan salinan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham.
 - k. Meminta persetujuan RUPS jika Perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya.
 - l. Mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Meminta persetujuan RUPS jika Perusahaan ingin menambah besarnya jumlah modal Perseroan. RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - n. Menyampaikan dokumen Perseroan yang diperlukan dalam RUPS.
 - o. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi yang mewakili Pemegang Saham dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
 3. Terkait dengan **Strategi dan Rencana Kerja Perusahaan**
 - a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi, dan budaya perusahaan.
 - b. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari
- Shareholders.
 - f. Publish the Company's Annual Report in 2 (two) daily newspaper in Indonesian language which is published and circulated widely or nationally in the territory of the Republic of Indonesia, and in a newspaper for a planned merger, consolidation and acquisition of the Company no later than 30 (thirty) calendar days before the GMS, if deemed necessary by the Board of Directors.
 - g. Request approval of the GMS to divert or make more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets as debt collateral, in one or more transactions, whether in relation to one another or not.
 - h. Provide materials to the Shareholders General Meeting at the Corporate Office and provided free of charge if requested.
 - i. Make Minutes of GMS which at least contain the time, agenda, participants, notions developed in the GMS, and the decision of the GMS.
 - j. Provide a copy of the Minutes of the GMS to Shareholders.
 - k. Ask for approval of the GMS if the Company intends to buy back shares that have been issued, including their transfer.
 - l. Ask for approval of the GMS to make a collective labor agreement with the employees associated with the employee wages which are not required by or exceed the provisions of the legislation.
 - m. Ask for approval of the GMS if the Company intend to increase the amount of Company capital. GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners for a maximum period of 1 (one) year.
 - n. Deliver Company documents required in the GMS.
 - o. In the voting, members of the Board of Directors representing Shareholders are prohibited from acting on behalf of Shareholders.
 3. Related to **the Company Strategy and Work Plan**
 - a. Set out the corporate vision, mission, goals, strategy and culture.
 - b. Prepare a draft of Company Work and Budget Plan which has been signed by all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners for review and signing before being submitted to the Shareholders. Company Work and Budget Plan draft which has been signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be submitted to the Shareholders no later than 60 (sixty) days

sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- c. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RJPP dan diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum periode RJPP berakhir.
- d. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP.
- e. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.
- f. Menerima, menampung, dan membahas usulan peluang bisnis yang disampaikan oleh karyawan, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris.
- g. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris, usulan peluang bisnis sebagaimana dimaksud butir (f) di atas disertai studi kelayakan untuk dibahas dengan Dewan Komisaris, khususnya untuk peluang bisnis yang apabila ditindaklanjuti oleh Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- h. Membahas isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perseroan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direksi. Apabila, menurut pendapat Direksi, perubahan lingkungan bisnis tersebut berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan Dewan Komisaris atas isu-isu tersebut.

4. Terkait dengan **Sumber Daya Manusia**

- a. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
- b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan karyawan dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan, promosi dan demosi, serta mutasi.
- c. Memastikan penempatan Karyawan sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.
- d. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas rencana promosi pejabat satu level di bawah Direksi.
- e. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan sesuai dengan kompetensi

prior to the relevant fiscal year Company Work and Budget Plan for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS) with regard of the applicable regulations.

- c. Prepare a plan of the Company's Long-Term Plan which is a strategic plan that includes goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, within a period of one (1) year prior to the expiration of the current Company's Long-Term Plan and submitted to the Board of Commissioners no later than 60 (sixty) days before the current Company's Long-Term Plan expires.
- d. Implement and facilitate the long-term goals listed in Company's Long-Term Plan.
- e. Implement and facilitate the short-term targets are listed in the Company Work and Budget Plan through establishing performance targets derived in the work unit and position level in the Company organizational structure.
- f. Accept, accommodate and discuss business opportunities proposals submitted by employees, members of the Board of Directors, atau Board of Commissioners.
- g. Deliver to the Board of Commissioners, the proposed business opportunities referred in point (f) above with a feasibility study to be discussed with the Board of Commissioners, especially for business opportunities that require the approval of the Board of Commissioners when followed-up by the Board of Directors, as set out in the Articles of Association.
- h. Discuss issues of the changing business environment and its problems, which could have an impact on the business and performance of the Company at any time deemed necessary by the Board of Directors. If, in the opinion of the Board of Directors, changes in the business environment have a major impact on the operations and performance of the Company, the Board of Directors convey these issues to the Board of Commissioners to request directions from the Board of Commissioners on these issues.

4. Related to the **Human Resources**

- a. Establish the Company organizational structure complete with details and duties descriptions.
- b. Develop and implement guidelines for human resources management including systems of manpower planning, recruitment, selection, placement of employees and positions within the Company's organizational structure, promotion and demotion as well as transfer.
- c. Ensure placement of employees in accordance with the job specifications within the Company's organizational structure.
- d. Deliver to the Board of Commissioners on promotional plans for officials one level below the Board of Directors.
- e. Ensure the implementation of the education and training of employees in accordance with the job



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- jabatan.
- f. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan.
5. Terkait dengan **Pengelolaan Manajemen Risiko**
Membangun, melaksanakan, dan mengembangkan sistem manajemen risiko Perseroan agar Direksi dalam mengambil setiap keputusan atau tindakan dapat mempertimbangkan risiko usaha secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG).
6. Terkait dengan **Teknologi Informasi**
- Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi kepada Dewan Komisaris.
 - Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perseroan.
7. Terkait dengan **Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pengadaan Barang, dan Pencatatan serta Kualitas**
Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan lainnya, Direksi berkewajiban atas hal-hal berikut:
- Membuat dan melaksanakan kebijakan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - Membuat dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa.
 - Membuat kebijakan mutu serta pelaksanaannya di Perseroan.
8. Terkait dengan **Etika Berusaha dan Anti Korupsi**
- Memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu level di bawah Direksi telah melaporkan harta kekayaan kepada lembaga pemerintah yang berwenang.
 - Melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Terkait dengan **Sistem Pengendalian Internal**
- Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
 - Membangun Sistem Pengendalian Internal sehingga mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya tindakan penyimpangan pada Perseroan.
 - Memberikan arahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan serta melakukan tindak lanjut dan monitoring atas rekomendasi yang diberikan oleh Sistem
- competency.
- f. Implement performance measurement and assessment for work units and positions within the organization objectively and transparently.
5. Related to the **Management of Risk**
Build, implement and develop the Company's risk management system so that the Board of Directors in making any decision or action may consider business risks in an integrated manner which is part of the *Good Corporate Governance* (GCG) program implementation.
6. Related to **Information Technology**
- Establish governance effective information technology.
 - Submit the information technology governance report to the Board of Commissioners.
 - Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions in the Company.
7. Related to **Partnerships and Community Development Program, Procurement, and Recording and Quality**
In carrying out business activities other Company, the Board of Directors liable for the following:
- Create and implement policies of Partnerships and Community Development Program.
 - Create and implement procurement policies and/or services.
 - Create a quality policy and its implementation in the Company.
8. Related to **Business Ethics and Anti-Corruption**
- Ensure that all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Officers of one level below the Board of Directors has reported assets of the authorized government agency.
 - Perform socialization of gratification control program in accordance with applicable laws and regulations.
9. Related to **Internal Control System**
- Establish a policy on effective Internal Control System to secure investments and assets of the Company.
 - Build Internal Control System that is able to direct and guide subordinates in the execution of their duties to achieve the goals and objectives of the organization that has been established, and is able to prevent the occurrence of irregularities in the actions of the Company.
 - Provide direction for implementation of the Company's internal control systems, and perform follow-up and monitoring of the recommendations given by the Internal

- Pengendalian Internal.
- d. Memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan efektif.
 - e. Menyampaikan hasil audit dan laporan kegiatan Sistem Pengendalian Internal kepada Dewan Komisaris.
 - f. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Satuan Pengawas Intern diatur dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

10. Terkait dengan **Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

- a. Mengungkapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.
- b. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta penghasilan yang diterima dari Perseroan, anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok.

11. Terkait Hubungan dengan **Pemangku Kepentingan**

- a. Memastikan terjaminnya hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.
- c. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

12. Terkait dengan **Sistem Akuntansi dan Pembukuan**

- a. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

Control Systems.

- d. *Ensure the company's internal control systems are effective.*
- e. *Deliver the Internal Control Systems audit results and activity reports to the Board of Commissioners.*
- f. *Further elaboration of the duties and functions of the Internal Audit Unit is set in the Internal Audit Charter which has been established by the Decree of the Board of Directors.*

10. Related to **Disclosure and Confidentiality of Information**

- a. *Reveal the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and important information in the Annual Report, Financial Statements, and other information to other parties, according to applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective.*
- b. *Convey information about the identity, the main occupations, and positions of the Board of Commissioners in subsidiary, joint ventures, and/or other companies, including meetings conducted in one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as income received of the Company, its subsidiaries, and/or joint venture, to be published in Company Annual Report.*
- c. *Confidential information obtained while serving as a Member of Board of Directors of the Company shall remain confidential in accordance with the legislation in force.*
- d. *In terms of maintaining the confidentiality of information of the Company, the Board of Directors are required to give priority to the interests of the Company rather than the interests of individuals or groups.*

11. Related **Relationships with Stakeholders**

- a. *Ensure the security of stakeholder rights arising under the laws in force and/or agreements made by the Company with employees, service users, suppliers, and other stakeholders.*
- b. *Ensure that the assets and business locations as well as other Company facilities, comply with legislation relating to health and safety and environmental protection.*
- c. *Provide a work environment which is free from all forms of pressure (harassment) which may arise as a result of differences in character, personal circumstances and cultural background of a person.*

12. Related to Other **Accounting and Bookkeeping**

- a. *Develop Financial Statements by Financial Accounting Standards and submit to the public accountant to audit.*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- b. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
 - c. Memastikan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat, serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.
13. Terkait dengan **Tugas dan Kewajiban Lain**
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. *Develop appropriate accounting system and the Financial Accounting Standards based on the principles of internal control, especially the function of obtaining, recording, storage and supervision.*
 - c. *Ensure accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in Indonesia.*
 - d. *Hold and maintain the Company's accounting and administration to produce an orderly bookkeeping administration, the adequacy of working capital to capital cost efficient, good structure and a solid balance sheet, statements and analysis of timely and accurate financial, and other principles in accordance with the standards in force for a company.*
13. *Related to Other Duties and Obligations*
Run other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association or determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the legislation.

Pembagian Tugas Pokok Dewan Direksi

Division of Main Duties of Board of Directors

1. **Tugas Pokok Direktur Utama** adalah:
 - a. Merencanakan dan menetapkan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan Perseroan serta mengendalikan implementasinya.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses bisnis dan fungsi-fungsi di Perseroan.
 - c. Di samping melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) ayat ini, Direksi juga merencanakan dan menetapkan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang pengembangan bisnis dan produk, pengawasan internal, dan sekretaris perusahaan, serta mengendalikan implementasinya.
 - d. Memimpin dan mengorganisasikan proses bisnis dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud huruf (c) ayat ini.
 - e. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan misalnya karyawan atau serikat pekerja, pemegang saham, komisaris, pemerintah atau regulator, pelanggan, pemasok, kreditor, mitra usaha atau mitra kerja, konsultan, lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga keuangan, masyarakat di lingkungan perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya.
1. **Main Duties of the President Director** are:
 - a. *Plan and define the Company's management directions, strategies and policies and control its implementation.*
 - b. *Lead and coordinate all business processes and functions in the Company.*
 - c. *In addition to the activities referred to in paragraph (a) and (b) above, the Board of Directors also plan and define the direction, strategy and policy of business process management and functions in the field of business and product development, internal control, and corporate secretary, and controls its implementation.*
 - d. *Lead and organize the business processes and functions referred to in item (c) of this paragraph.*
 - e. *Establish and develop good relationships with stakeholders for example employees or labor unions, shareholders, commissioners, government or regulators, customers, suppliers, creditors, business or work partners, consultants, education or training institutions, financial institutions, society in the corporate environments, and other stakeholders.*

2. Tugas Pokok Direktur Keuangan adalah:

- a. Merencanakan dan menetapkan arah, strategi, dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang keuangan Perseroan, pelayanan korporasi yang meliputi fungsi di bidang pengelolaan kualitas dan risiko, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan teknologi informasi, pelayanan umum, dan pengadaan korporasi serta mengendalikan implementasinya.
- b. Memimpin dan mengorganisasikan semua proses bisnis dan fungsi-fungsi yang sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini.
- c. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan misalnya, karyawan atau serikat pekerja, pemegang saham, komisaris, pemerintah atau regulator, pelanggan, pemasok, kreditor, mitra usaha atau mitra kerja, konsultan, lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga keuangan, masyarakat di lingkungan perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya.

3. Tugas Pokok Direktur Bisnis adalah:

- a. Merencanakan dan menetapkan arah, strategi, dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang bisnis strategis, yang meliputi fungsi di bidang pengelolaan account, komersial, engineering, implementasi proyek, service, produksi, pengadaan, dan keuangan divisi terkait bisnis atau *strategic business unit* (SBU), serta mengendalikan implementasinya.
- b. Memimpin dan mengorganisasikan seluruh proses bisnis dan fungsi-fungsi yang sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini.
- c. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan misalnya, karyawan atau serikat pekerja, pemegang saham, komisaris, pemerintah atau regulator, pelanggan, pemasok, kreditor, mitra usaha atau mitra kerja, konsultan, lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga keuangan, masyarakat di lingkungan perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya.

2. Main Duties of the Finance Director are:

- a. Plan and define the direction, strategy and policy of business process management and functions in the field of corporate finance and corporate services, which includes functions in quality and risk management, human capital management, information technology services, general affairs, corporate procurement and control its implementations.
- b. Lead and organize the business processes and functions referred to in item (a) of this paragraph.
- c. Establish and develop good relationships with stakeholders for example employees or labor unions, shareholders, commissioners, government or regulators, customers, suppliers, creditors, business or work partners, consultants, education or training institutions, financial institutions, society in the corporate environments, and other stakeholders.

3. Main Duties of the Business Director are:

- a. Plan and define the direction, strategy and policy of business process management and functions in the field of strategic business, which includes functions in account management, commercial, engineering, project implementation, services, production, procurement and finance in business related division or strategic business units (SBUs) and control its implementations.
- b. Lead and organize the business processes and functions referred to in item (a) of this paragraph.
- c. Establish and develop good relationships with stakeholders for example employees or labor unions, shareholders, commissioners, government or regulators, customers, suppliers, creditors, business or work partners, consultants, education or training institutions, financial institutions, society in the corporate environments, and other stakeholders.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Untuk mengambil segala keputusan yang dipandang perlu, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi

To take any decisions deemed necessary, the Board of Directors holds the Board of Directors Meeting. The decision can also be taken outside the Board of Directors Meeting as long as the Board of Directors agrees on how and materials to be decided.

The Board of Directors can be convened at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Directors, upon written demand of one or more members of the Board of Commissioners, or upon written demand of Shareholders mentioning the things that will be discussed.

All board meetings chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unavailable, Board of Directors Meeting chaired by a member of the

lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.

Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak.

Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Direksi yang hadir dalam rapat.

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah membuat 98 keputusan dalam Rapat Direksi yang menyangkut berbagai aspek seperti bisnis, finansial dan investasi, hukum, dan sumber daya manusia.

Board of Directors appointed by the President Director.

The Board of Directors Meeting is valid and may take binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (a half) the number of members of the Board of Directors.

All decisions taken by the Board of Directors Meeting are through consensus decision-making. If the consensus is not reached, then the decision of the Board of Directors Meeting taken by a majority vote.

In each of the Board of Directors Meeting, minutes of meetings must be made, containing things that are discussed and decided. Minutes of the meeting signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors present in the meeting.

Throughout the year 2021, the Board of Directors has made 98 decisions in the Board of Directors Meeting on various aspects such as business, finance and investment, law, and human resources.

Kehadiran Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Attendance

No.	Nama <i>Name</i>	Jumlah Rapat <i>Number of Meeting</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Note</i>	Persentase <i>Percentage</i>
1	Otong lip	98	95	Sakit Covid	97%
2	Tri Hartono Rianto	98	98	-	100%
3	Teguh Adi Suryandono	98	98	-	100%

Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Keterangan
Selasa, 05 Januari 2021 <i>Tuesday, January 05, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Senin, 11 Januari 2021 <i>Monday, January 11, 2021</i>	Ruang Rapat Akhlak (Lantai 9) <i>Meeting Room AKHLAK (9 Floor)</i>	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 12 Januari 2021 <i>Tuesday, January 12, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 14 Januari 2021 <i>Thursday, January 14, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 832 6090 6117 Password : 169	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 19 Januari 2021 <i>Tuesday, January 19, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989 Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 12 Januari 2021 <i>Tuesday, January 12, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 870 7763 8061 Password : 140	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>

Senin, 25 Januari 2021 <i>Monday, January 25, 2021</i>	Ruang Rapat Akhlak (Lantai 9) <i>Meeting Room AKHLAK (9 Floor)</i>	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 26 Januari 2021 <i>Tuesday, January 26, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989 Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 28 Januari 2021 <i>Thursday, January 28, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 834 5749 5583, Password : 846	Rapat Direksi Terbatas Keuangan Cashflow <i>Cashflow Finance Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 02 Februari 2021 <i>Tuesday, February 02, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 09 Februari 2021 <i>Tuesday, February 09, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 16 Februari 2021 <i>Tuesday, February 16, 2021</i>	Ruang Rapat Akhlak (Lantai 9) <i>Meeting Room AKHLAK (9 Floor)</i>	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 16 Februari 2021 <i>Tuesday, February 16, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Minggu, 21 Februari 2021 <i>Sunday, February 21, 2021</i>	Ruang Rapat Akhlak (Lantai 9) <i>Meeting Room AKHLAK (9 Floor)</i>	Rapat Direksi Terbatas <i>Mobile Point of Sales Nutech</i> <i>Mobile Point of Sales Nutech Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 23 Februari 2021 <i>Tuesday, February 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 23 Februari 2021 <i>Tuesday, February 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 841 4566 9101, Password : 199	Rapat Direksi Terbatas Legal dan Umum <i>Legal and General Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 02 Maret 2021 <i>Tuesday, March 02, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 09 Maret 2021 <i>Tuesday, March 09, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 16 Maret 2021 <i>Tuesday, March 16, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 19 Maret 2021 <i>Friday, March 19, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 842 2416 2988, Password : 546229	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 23 Maret 2021 <i>Tuesday, March 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 25 Maret 2021 <i>Thursday, March 25, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 882 1256 7734, Password : 255	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>

Kamis, 25 Maret 2021 <i>Thursday, March 25, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 811 5930 9242, Password : 148	Rapat Direksi Terbatas Keuangan <i>Financial Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 30 Maret 2021 <i>Tuesday, March 30, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 0839 5922, Password : 123	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 06 April 2021 <i>Tuesday, April 06, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 13 April 2021 <i>Tuesday, April 13, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 16 April 2021 <i>Friday, April 16, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 827 4725 9360, Password : 157	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 20 April 2021 <i>Tuesday, April 20, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 21 April 2021 <i>Wednesday, April 21, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 837 2724 5488, Password : 368	Rapat Direksi Terbatas Pemasaran dan Penjualan <i>Marketing and Sales Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 27 April 2021 <i>Tuesday, April 27, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 29 April 2021 <i>Thursday, April 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 879 5928 7782, Password : 188	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Kamis, 29 April 2021 <i>Thursday, April 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 840 6606 4667, Password : 768	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 04 Mei 2021 <i>Tuesday, May 04, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 11 Mei 2021 <i>Tuesday, May 11, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 18 Mei 2021 <i>Tuesday, May 18, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 21 Mei 2021 <i>Friday, May 21, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 25 Mei 2021 <i>Tuesday, May 25, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 27 Mei 2021 <i>Thursday, May 27, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 874 9319 0265, Password : 507192	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 02 Juni 2021 <i>Wednesday, June 02, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>

Kamis, 10 Juni 2021 <i>Thursday, June 10, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 847 5921 5999, Password : 048309	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Senin, 14 Juni 2021 <i>Monday, June 14, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 837 0103 0264, Password : 381161	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 15 Juni 2021 <i>Tuesday, June 15, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 04 Juni 2021 <i>Friday, June 04, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 22 Juni 2021 <i>Tuesday, June 22, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 25 Juni 2021 <i>Friday, June 25, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 814 7894 1178, Password : 173834	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Senin, 28 Juni 2021 <i>Monday, June 28, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 870 1289 7488, Password : 675224	Rapat Direksi Terbatas Keuangan <i>Financial Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 29 Juni 2021 <i>Tuesday, June 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 06 Juli 2021 <i>Tuesday, July 06, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 06 Juli 2021 <i>Tuesday, July 06, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 07 Juli 2021 <i>Wednesday, July 07, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 847 1556 6950, Password : 543200	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Jumat, 09 Juli 2021 <i>Friday, July 09, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 824 0876 8446, Password : 685412	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 13 Juli 2021 <i>Tuesday, July 13, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 15 Juli 2021 <i>Kamis, 15 Juli 2021</i>	Vicon Zoom ID : 829 5894 5875, Password : 901544	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 21 Juli 2021 <i>Wednesday, July 21, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 27 Juli 2021 <i>Tuesday, July 27, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 28 Juli 2021 <i>Wednesday, July 28, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 868 9295 9854, Password : 869148	Rapat Direksi Terbatas Keuangan <i>Financial Limited Board of Directors Meeting</i>
Kamis, 29 Juli 2021 <i>Thursday, July 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 6540 7266, Password : 575165	Rapat Direksi Terbatas Pajak <i>Tax Limited Board of Directors Meeting</i>

Jumat, 30 Juli 2021 <i>Friday, July 30, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 838 8662 2945, Password : 449760	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 03 Agustus 2021 <i>Tuesday, August 03, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 10 Agustus 2021 <i>Tuesday, August 10, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 12 Agustus 2021 <i>Thursday, August 12, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 858 0468 9635, Password : 832023	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Senin, 16 Agustus 2021 <i>Monday, August 16, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Rabu, 18 Agustus 2021 <i>Tuesday, January 05, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 19 Agustus 2021 <i>Thursday, August 19, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Direksi Terbatas Reward RC <i>Limited Board of Directors Meeting Reward RC</i>
Kamis, 19 Agustus 2021 <i>Thursday, August 19, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 818 1500 1607, Password : 581734	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 24 Agustus 2021 <i>Tuesday, August 24, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 26 Agustus 2021 <i>Thursday, August 26, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 830 8228 9060, Password : 866358)	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Senin, 30 Agustus 2021 <i>Monday, August 30, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 816 4376 6337, Password : 110260	Rapat Direksi Terbatas Keuangan <i>Financial Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 31 Agustus 2021 <i>Tuesday, August 31, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 01 September 2021 <i>Wednesday, September 01, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 897 2304 9493, Password : 529155	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 07 September 2021 <i>Tuesday, September 07, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Senin, 13 September 2021 <i>Tuesday, January 05, 2021</i>	Vc.Zoom, ID : 851 4892 2989, Password : 283358	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Senin, 13 September 2021 <i>Monday, September 13, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 899 1126 2693, Password : 534293	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>

Selasa, 14 September 2021 <i>Tuesday, September 14, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Senin, 20 September 2021 <i>Monday, September 20, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 826 2357 6316, Password : 951891	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Rabu, 22 September 2021 <i>Wednesday, September 22, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 28 September 2021 <i>Tuesday, September 28, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 29 September 2021 <i>Wednesday, September 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 884 6434 8548, Password : 537214	Rapat Direksi Terbatas Keuangan <i>Financial Limited Board of Directors Meeting</i>
Rabu, 29 September 2021 <i>Wednesday, September 29, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 860 2456 1557, Password : 098451	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Jumat, 01 Oktober 2021 <i>Friday, October 01, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 845 3208 7895, Password : 848268	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 05 Oktober 2021 <i>Tuesday, October 05, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 13 Oktober 2021 <i>Wednesday, October 13, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 19 Oktober 2021 <i>Tuesday, October 19, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 27 Oktober 2021 <i>Wednesday, October 27, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 03 November 2021 <i>Wednesday, November 03, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 10 November 2021 <i>Wednesday, November 10, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 17 November 2021 <i>Wednesday, November 17, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 23 November 2021 <i>Tuesday, November 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 23 November 2021 <i>Tuesday, November 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Senin, 06 Desember 2021 <i>Monday, December 06, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 9497 3354, Password : 744456	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>

Selasa, 07 Desember 2021 <i>Tuesday, December 07, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Jumat, 10 Desember 2021 <i>Friday, December 10, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 890 0210 1429, Password : 514357	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Jumat, 10 Desember 2021 <i>Friday, December 10, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 818 9759 7643, Password : 078332	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 14 Desember 2021 <i>Tuesday, December 14, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 22 Desember 2021 <i>Wednesday, December 22, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 23 Desember 2021 <i>Thursday, December 23, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 869 7901 7330, Password : 420693	Rapat Direksi Terbatas Anak Perusahaan <i>Subsidiary Limited Board of Directors Meeting</i>
Jumat, 24 Desember 2021 <i>Friday, December 24, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 834 0351 1606, Password : 793267	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Jumat, 24 Desember 2021 <i>Friday, December 24, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 876 2122 4425, Password : 530396	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Senin, 27 Desember 2021 <i>Monday, December 27, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 871 9984 4250, Password : 839544	Rapat Direksi Terbatas Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Management Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 28 Desember 2021 <i>Tuesday, December 28, 2021</i>	Vicon Zoom ID : 889 7304 5354, Password : 432894	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan, dan saran yang dituangkan dalam risalah rapat.

In order to unify the views and decides an important matter related to the continuity of business and operational of the Company, the Board of Commissioners and Directors schedule a regular meeting in Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This regular meeting organizer is the Board of Commissioners, to discuss various agendas related to work plan, operational, business opportunity, and strategic issues that need approval from the Board of Commissioners.

This meeting is a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and to give response, notes, and advice written in the minutes of meeting.

Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris

The Board of Commissioners and The Board of Directors Joint Meeting Attendance

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Keterangan Note	Persentase Percentage
1	Unggul Priyanto	12	11	Habis masa bakti dan diperpanjang pada Juni 2021. <i>End of service period and extended in June 2021.</i>	92%
2	Trisno Hendradi	12	12	Ditetapkan sebagai Komisaris PT INTI (Persero) melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 sejak 08 Oktober 2020. <i>Appointed as Commissioner of PT INTI (Persero) through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number SK-318/MBU/10/2020 since October 08, 2020.</i>	100%
3	Rahmadi Murwanto	12	12	Ditetapkan sebagai Komisaris PT INTI (Persero) melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 sejak 08 Oktober 2020. <i>Appointed as Commissioner of PT INTI (Persero) through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number SK-318/MBU/10/2020 since October 08, 2020.</i>	100%
4	Otong lip	12	11	Ditetapkan sebagai Direktur Utama PT INTI (Persero) sejak 17 Oktober 2019. <i>Appointed as President Director of PT INTI (Persero) since October 17, 2019.</i>	92%
5	Tri Hartono Rianto	12	12	Masa Jabatan sebagai Direktur Keuangan dimulai pada 24 Juli 2019. <i>His term of office as Finance Director began on July 24, 2019.</i>	100%
6	Teguh Adi Suryandono	12	12	-	100%

No.	Agenda	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Place of Execution
1	Pembahasan Kinerja hingga Desember 2020 <i>Performance Discussion until December 2020</i>	Jumat, 29 Januari 2021 <i>Friday, January 29, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 822 5670 0085, Password : ragab)
2	Pembahasan Kinerja hingga Januari 2021 <i>Performance Discussion until January 2021</i>	Minggu, 21 Februari 2021 <i>Sunday, February 21, 2021</i>	Vicon Zoom (ID: 858 9930 3020, Password: 667)
3	Pembahasan Kinerja hingga Februari 2021 <i>Performance Discussion until February 2021</i>	Minggu, 07 Maret 2021 <i>Sunday, March 07, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 827 5412 1671, Password : 556)
4	Pembahasan Kinerja hingga Maret 2021 <i>Performance Discussion until March 2021</i>	Selasa, 20 April 2021 <i>Tuesday, April 20, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 832 9479 0713, Password : 928)
5	Pembahasan Kinerja hingga April 2021 <i>Performance Discussion until April 2021</i>	Selasa, 25 Mei 2021 <i>Tuesday, May 25, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 869 7701 3097, Password : 488863)
6	Pembahasan Kinerja hingga Mei 2021 <i>Performance Discussion until May 2021</i>	Rabu, 16 Juni 2021 <i>Wednesday, June 16, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 833 9750 4967, Password : 696094)
7	Pembahasan Kinerja hingga Juni 2021 <i>Performance Discussion until June 2021</i>	Kamis, 22 Juli 2021 <i>Thursday, July 22, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 878 2817 7053, Password : 800855)
8	Pembahasan Kinerja hingga Juli 2021 <i>Performance Discussion until July 2021</i>	Rabu, 25 Agustus 2021 <i>Wednesday, August 25, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 854 9774 2234, Password : 553705)
9	Pembahasan Kinerja hingga Agustus 2021 <i>Performance Discussion until August 2021</i>	Selasa, 25 Mei 2021 <i>Tuesday, May 25, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 879 5141 6176, Password : 170304)
10	Pembahasan Kinerja hingga September 2021 <i>Performance Discussion until September 2021</i>	Senin, 25 Oktober 2021 <i>Monday, October 25, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 896 2392 4576, Password : 764782)
11	Pembahasan Kinerja hingga Oktober 2021 <i>Performance Discussion until October 2021</i>	Rabu, 24 November 2021 <i>Wednesday, November 24, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 833 0518 6897, Password : 295736)
12	Pembahasan Kinerja hingga November 2021 <i>Performance Discussion until November 2021</i>	Selasa, 25 Mei 2021 <i>Tuesday, May 25, 2021</i>	Vicon Zoom (ID : 829 9998 4025, Password : 536953)

Pendelegasian Wewenang

Delegation of Authority

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat lainnya di lingkungan Perseroan. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang akan didelegasikan, kompetensi serta tugas dan wewenang orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Pada tahun 2021 terdapat 38 (tiga puluh delapan) kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya dan karyawan Perseroan melalui surat kuasa.

The Board of Directors may delegate authority to the other Board members and other officials of the Company. Delegation of authority includes the duties, responsibilities and authority, and made in writing. Each delegation of authority is done by considering the scope of the work to be delegated, the competence and the duty and authority of people who will receive the delegation of authority.

By 2021 there are 38 (thirty-eight) delegations of authority from a Board of Directors member to another Board members and employees of the Company through a power of attorney.

Pelatihan Bagi Direksi

Training For Board of Directors

Dalam rangka peningkatan kompetensi anggota Direksi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi, maka sepanjang tahun 2021, hanya Direktur Keuangan yang mengikuti program pelatihan dan seminar sebagai berikut:

In order to increase the competence of the members of the Board of Directors, which is intended to improve the professionalism, performance, development potential, and support the execution of duties of the Board of Directors, during 2021 only Finance Director have attended training programs and seminars as follows:

No.	Peserta <i>Attendee</i>	Tanggal <i>Date</i>	Topik <i>Topic</i>
1	Tri Hartono Rianto	09 Februari 2021 <i>February 09, 2021</i>	Financial Accounting Series 1: PSAK 71-72
2	Tri Hartono Rianto	10 April 2021 <i>April 10, 2021</i>	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Accounting and Business Leadership Forum The CFO as The Vital Business Partner
3	Tri Hartono Rianto	20 Februari 2021 <i>February 20, 2021</i>	Pelaporan Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Tax Planning
4	Tri Hartono Rianto	01 Mei 2021 <i>May 01, 2021</i>	Empowering Future Global Woman Leaders
5	Tri Hartono Rianto	09 Juli 2021 <i>July 09, 2021</i>	Business Performance Management "How Organization Define, Assess and Improve The Delivery of Their Business Goals
6	Tri Hartono Rianto	27-28 Agustus 2021 <i>August 27-28, 2021</i>	Management Accountants Against Covid -19 Pandemic: The Role in Catalysing Economic Recovery
7	Tri Hartono Rianto	28 April 2021 <i>April 28, 2021</i>	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021
8	Tri Hartono Rianto	20 Maret 2021 <i>March 20, 2021</i>	Diskusi Reguler Akuntansi Syariah "Akuntansi Dana Wakaf Uang, Apa dan Bagaimana?"

9	Tri Hartono Rianto	27 Maret 2021 March 27, 2021	Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
10	Tri Hartono Rianto	20 Februari 2021 February 20, 2021	Creating Harmonization Between Academician and Business: Management Accountant Roles (New Direction)
11	Tri Hartono Rianto	29 April 2021 April 29, 2021	ASEAN Certified Public Accountant
12	Tri Hartono Rianto	27 Maret 2021 March 27, 2021	(CPA) in Business Community
13	Tri Hartono Rianto	7 Mei 2021 May 07, 2021	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL): Session 1 Ngabuburit ala Akuntan Jawa Barat 2021
14	Tri Hartono Rianto	10 Mei 2021 May 10, 2021	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL): Session 2 Ngabuburit ala Akuntan Jawa Barat 2021
15	Tri Hartono Rianto	11 Mei 2021 May 11, 2021	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL): Session 3 Ngabuburit ala Akuntan Jawa Barat 2021
16	Tri Hartono Rianto	13 Juli 2021 July 13, 2021	ASEAN Certified Public Accountant (CPA) and East of Doing Business in ASEAN Webinar

No.	Indikator <i>Indicator</i>	Satuan <i>Unit</i>	RKAP 2021 <i>CBP 2021</i>		Realisasi 2021 <i>Realization 2021</i>	
			Target <i>Target</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Value</i>	Bobot <i>Weight</i>
Financial				10		0,00
1	Debt to EBITDA	Kali <i>Time</i>	25,5	3	-34,50	0,00
2	Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	Rupiah	1	3	-539,00	0,00
3	Debt to Equity Swap (Telkom)	Rp. Miliar <i>Rp. Billion</i>	-140	2	-	0,00
4	Total Debt (Long Term Debt & Non Productive Debt)	Rp. Miliar <i>Rp. Billion</i>	0	2	-	0,00
Business Model Innovation				40		15,83
1	Penjualan Loan Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) kepada investor atau Asset Settlement <i>Selling Bank Mandiri (BMRI) and Bank Rakyat Indonesia (BBRI) loans to Investors or Asset Settlement</i>	%	100	3,75	-	0,00

2	Penyelesaian Utang-Utang Non-Produktif Vendor <i>Settlement of Non-Productive Vendor Debts</i>	%	30	3,75	3,29	0,41
3	Utang-Utang Lainnya (Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Widya Bhakti INTI) <i>Other Debts (Pension Fund, Social Security Administrator, Widya Bhakti INTI)</i>	%	80	3,75	14,51	0,68
4	Utang Pajak <i>Tax Debt</i>	%	100	3,75	51,02	1,91
5	Lembaga Keuangan Non Bank (PT Hewlett Packard Finance Indonesia) <i>Non Bank Financial Institutions (PT Hewlett Packard Finance Indonesia)</i>	%	30	3,75	2,91	0,36
6	Utang Karyawan dan Pensiun <i>Employee and Pension Payables</i>	%	Reschedule (50% dibayar sisanya dicicil 1 tahun) <i>(50% paid the rest in 1 year installments)</i>	3,75	31,31	2,35
7	Non Core Asset Settlement	Rp. Miliar <i>Rp. Billion</i>	5	3,75	0,07	0,05
8	Working Capital	Rp. Miliar <i>Rp. Billion</i>	268,91	3,75	4,82	0,07
9	Persetujuan atas Mekanisme Budget dan Cash Control dari Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham) <i>Approval of the Budget and Cash Control Mechanism from Shareholders (General Meeting of Shareholders)</i>	Bulan <i>Month</i>	Maret 2021	10	10,00	10,00
4	Utang Pajak <i>Tax Debt</i>	%	100	3,75	51,02	1,91
4	Utang Pajak <i>Tax Debt</i>	%	100	3,75	51,02	1,91
4	Utang Pajak <i>Tax Debt</i>	%	100	3,75	51,02	1,91

Technology Leadership				10	9,00
1	New Market Penetration Telkom Project	Buah	3	4	4,00
2	New Market Penetration Government Project	Buah	2	4	4,00
3	Strategic Initiative	Buah	10	2	1,00
Energize Investment				30	24,00
1	Kerja Sama Operasi Joint Venture	Buah	1	30	24,00
Unleashed Talent				10	3,01
1	Human Resource Efficiency (revenue per karyawan) Human Resource Efficiency (revenue per employee)	Rp Miliar	Rp 2 Miliar	5	1,37
2	Human Resource Allocation Plan	Orang	50 Orang (PP)	5	0,00
Total				100	51,84

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Corporate Health Level

Kinerja Direksi juga dinilai berdasarkan Tingkat Kesehatan Perusahaan yang diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002 tertanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aspek-aspek yang dinilai mencakup:

1. Aspek Keuangan, terdiri dari 8 indikator
2. Aspek Operasional, terdiri dari 2 indikator
3. Aspek Administrasi terdiri dari 4 indikator

The Board of Directors' performance is also appraised based on Corporate Health Level, which are measured based on guidance issued by Minister of State Owned Enterprises (SOEs) through Decree of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Appraisal of Corporate Health Level of State Owned Enterprises (SOEs). Aspects measured comprise:

1. Financial Aspect, consists of 8 indicators
2. Operational Aspect, consists of 2 indicators
3. Administrative Aspect, consists of 4 indicators

No.	Indikator <i>Indicator</i>	Satuan <i>Unit</i>	RKAP 2021 <i>CBP 2021</i>		Realisasi 2021 <i>Realization 2021</i>	
			Target <i>Target</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Value</i>	Bobot <i>Weight</i>
Aspek Keuangan <i>Financial Aspect</i>						
1	Imbalan kepada Pemegang Saham <i>Return on Equity</i>	%	32,6	-	24,79	-
2	Imbalan Investasi <i>Return on Investment</i>	%	6,4	5,0	(4,24)	1,0

3	Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	%	7,9	1,0	5,53	1,0
4	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	%	107,4	3,0	43,87	-
5	Periode Penagihan Piutang <i>Collection Period</i>	Hari <i>Days</i>	89,7	4,5	101,19	4,0
6	Perputaran Persediaan <i>Inventory Turnover</i>	Hari <i>Days</i>	77,0	4,5	142,75	3,5
7	Perputaran Total Aset <i>Total Asset Turnover</i>	Hari <i>Days</i>	139,3	5,0	31,16	2,0
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset <i>Equity to Total Asset</i>	%	(45,7)	-	(44,74)	-
Jumlah Skor Aspek Keuangan <i>Total Financial Aspect Score</i>			-	23,0	-	11,5

Aspek Operasional <i>Operational Aspect</i>						
1	Increasing Order or Contract Booked	%	92,1	5,0	3,9	0,2
2	Order Fulfillment Rate	%	82,3	5,0	72,5	4,4
3	Percentage of Government Contract	%	24,2	5,0	23,6	4,9
Jumlah Skor Aspek Operasional <i>Total Operational Aspect Score</i>			-	15,0	-	9,5

Aspek Administrasi <i>Administration Aspect</i>						
1	Laporan Keuangan Tahunan <i>Annual Financial Report</i>	Bulan <i>Month</i>	Maret 2022 <i>March 2022</i>	3,0	Maret 2022 <i>March 2022</i>	3,0
2	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Company Work and Budget Plan</i>	Bulan <i>Month</i>	Oktober 2021 <i>October 2021</i>	3,0	Oktober 2021 <i>October 2021</i>	3,0
3	Keterlambatan Laporan Manajemen/ Triwulan <i>Management Report/Quarterly Delay</i>	Hari <i>Days</i>	0 Hari <i>0 Days</i>	3,0	0 Hari <i>0 Days</i>	3,0
4	Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <i>Performance of Partnership and Community Development Program</i>					
	• Efektivitas Penyaluran Dana <i>Fund Distribution Effectiveness</i>	%	100,00	3,0	87,31%	2,6
	• Kolektibilitas Pinjaman <i>Loan Collectibility Effectiveness</i>	%	73,00	3,0	71,86%	3,0

Jumlah Aspek Administrasi <i>Total Administration Aspect</i>	-	15,0	-	14,6
Total Skor <i>Total Score</i>	-	53,0	-	35,6
Golongan Tingkat Kesehatan <i>Corporate Health Level Group</i>	Kurang Sehat BBB		Kurang Sehat B	

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul

Criteria For Excellent Performance Appraisal

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan suatu kriteria yang komprehensif untuk mengukur sekaligus sebagai referensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuju pencapaian kinerja unggul. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diadopsi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* dapat meningkatkan daya saing BUMN dengan cara membantu memperbaiki kapasitas dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik, dan berfungsi sebagai alat mengelola kinerja dan memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.

Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan berdasarkan pada 7 (tujuh) kategori penilaian, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Operasi, dan Hasil-Hasil Usaha.

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode atau Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*), atau yang biasa disingkat ADLI. Sementara itu, faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah level, trend, comparison dan integration, atau disingkat LeTCI.

Asesmen terhadap implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT INTI (Persero) dilakukan terakhir kali pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi sejak tahun 2018. Hasil dari asesmen implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT INTI (Persero) tahun 2018 meraih skor 506,50 dimana termasuk dalam kategori kelas kinerja *Good Performance* dan meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai 491,25.

Criteria for Excellent Performance Evaluation is a comprehensive set of criteria to measure as well as to serve as a reference in managing State Owned Enterprises (SOEs) to achieve Excellent Performance. The Criteria for Excellent Performance Evaluation adopted from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence can enhance the competitiveness of State Owned Enterprises (SOEs) by helping to improve the capacity and performance of State Owned Enterprises (SOEs), facilitating communication and sharing of information on best practices, and serving as a tool for managing performance and guiding organizational planning and learning.

Assessment of Criteria for Excellent Performance Evaluation of State Owned Enterprises (SOEs) is based on 7 (seven) assessment categories, namely Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Measurement, Analysis and Management of Knowledge, Focus of Labor, Focus of Operations, and Business Results.

Factors used to assess the process are the Method or System (Approach), Application (Deployment), Learning, and Integration abbreviated as ADLI. Meanwhile, the factors used to evaluate the company's results are level, trend, comparison and integration or abbreviated LeTCI.

The latest assessment for the implementation Excellent Performance Evaluation Criteria was in 2018. This is due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic that has occurred since 2019. The result of the 2018 assessment score for the implementation Excellent Performance Evaluation Criteria PT INTI (Persero) achieved a score of 506.50 which was included in the Good Performance performance class category and increased from the previous year which was 491.25.

Pengungkapan Remunerasi

Disclosure of Remuneration

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tertanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, maka remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) dapat terdiri dari:

1. Gaji atau Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas, dan
4. Tantiem atau Insentif Kinerja

Penetapan Remunerasi yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Remunerasi yang berupa Tantiem atau Insentif Kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Gaji atau Honorarium

Salary or Honorarium

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Gaji atau Honorarium yang ditetapkan oleh Pemegang Saham untuk satu tahun buku sejak Januari tahun berjalan.

Gaji atau Honorarium ditetapkan berdasarkan pedoman internal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor Penyesuaian Inflasi dapat ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN (0% hingga 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia).

Besaran Faktor Jabatan sebagaimana ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : 100%
2. Anggota Direksi : 85% dari Direktur Utama

Referring to the Regulation of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-06/MBU/06/2018 concerning Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, Ministerial Regulation of SOEs Number PER-03/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning regarding the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, the remuneration of the Directors and Board of Commissioners of PT INTI (Persero) may consist of:

1. *Salary or Honorarium*
2. *Allowance*
3. *Facilities, and*
4. *Tantiem or Performance-based Incentives*

Remuneration in the form of Salary or Honorarium, Allowance, and Facilities which are fixed, are determined by considering the business scale, the business complexity, inflation rate, conditions and financial ability of the Company, other relevant factors, and shall not be inconsistent with the laws and regulations.

Determination of Remuneration in the form of variable Tantiem or Performance-based Incentive (merit rating) is carried out by considering the factors achieving the target, the level of health and financial capacity of the Company, and other relevant factors.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are given a Salary or Honorarium determined by the Shareholders for one financial year starting from January of the current year.

Salary or Honorarium is set according to internal guidance of Minister of State Owned Enterprises (SOEs). Inflation Adjustment Factor is set by Secretary of Ministry of SOEs (0% to 50% of the previous year inflation specified by Indonesian Central Bank).

Magnitude of Position Factor is set in the following composition:

1. *President Director : 100%*
2. *Members of the Board of Directors : 85% of the President Director*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

3. Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama

4. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kemampuan Perseroan.

Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi untuk penyehatan, restrukturisasi, atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan penghasilan tambahan di atas gaji berdasarkan keputusan RUPS atau Menteri. Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicators atau KPI) yang berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh anggota Direksi dimaksud. Pencapaian KPI tersebut dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan besaran penghasilan yang wajar berdasarkan capaian target yang dicapai oleh anggota Direksi dimaksud.

Dewan Komisaris PT INTI (Persero) telah mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, maka Faktor Jabatan untuk Sekretaris Dewan Komisaris adalah maksimal 15% dari Direktur Utama.

Pajak atas Gaji atau Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS atau Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Dalam hal RUPS atau Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji atau Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS or Menteri.

Tunjangan

Allowance

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

3. President Commissioner : 45% of the President Director

4. Members of the Board of Commissioners : 90% of the President Commissioner

General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister may determine a different Position Factor, if deemed better reflecting the justice and fairness in the implementation of the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners and, Company ability.

A person who has a special ability assigned to the Board of Directors for restructuring or extraordinary performance improvements to a SOEs may be awarded additional income above the salary based on a GMS or Minister decision. The additional income referred to above is attributed to the expectation of the achievement of Key Performance Indicators (KPI) which contains the annual targets to be achieved by the members of the Board of Directors. The achievement of the KPI is evaluated at the end of each financial year to determine the fair amount of income based on the achievement of the targets achieved by the members of the Board of Directors.

The Board of Commissioners of PT INTI (Persero) has appointed a Secretary of the Board of Commissioners. According to Regulation of Minister of SOEs Number PER-12/MBU/2012, the Position Factor for Secretary of the Board of Commissioners is at maximum 15% of the President Director.

Taxes on Salary or Honorarium are borne by and become expenses of the Company. The amount of Salary or Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the GMS or Minister each year with a validity of the company's fiscal year since January of the current year.

In the case of GMS or Minister does not specify the amount of honorarium of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners for a particular year, then the last honorarium set and enforced by the GMS or Minister will be used.

To the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, allowances may be given, which are adjusted to the Company's financial condition and ability and must not conflict with laws and regulations.

Taxes on Allowance are borne by and become expenses of the Company.

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium.

2. Santunan Purnajabatan

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purnajabatan dalam bentuk Asuransi Purnajabatan, Asuransi Dana Pensiun, atau bentuk lainnya.

Pemberian Santunan Purnajabatan atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut:

1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
2. Premi, iuran, atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
3. Pemilihan program untuk Santunan Purnajabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Pemberian premi, iuran, atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Tunjangan Khusus Dewan Komisaris

Kepada anggota Dewan Komisaris diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan, termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Transportasi

Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi yang besarnya setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Tunjangan Khusus Direksi

Kepada Anggota Dewan Direksi diberikan pula Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Perumahan

Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas diberikan bagi Direksi karena Perseroan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan. Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mengingat PT INTI (Persero) berkedudukan di Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat.

1. Religious Holiday Allowance

To the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, Religious Holiday Allowance may be given. The amount of Religious Holiday Allowance is 1 (one) time of Salary or Honorarium.

2. Post-Service Compensation

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners may be provided with Post-Service Compensation in the form of Post-Service Insurance, Pension Fund Insurance, or other forms.

Provision of Post-Service Compensation or other forms is regulated as follows:

1. Awarded during his tenure (starting from being appointed to stopping).
2. Premiums, contributions, or other relevant terms that can be borne by the Company are a maximum of 25% (twenty five percent) of the Salary or Honorarium in one year which is budgeted in the Company's Work Plan and Budget for each fiscal year.
3. The selection of the program for the Post-Service Compensation is determined by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners after the budget is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. The provision of premiums, contributions, or other relevant terms as intended includes premiums for accident and death insurance.

Allowances for The Board of Commissioners Only

To the members of the Board of Commissioners are also given other allowances which can be in the form of Annual Leave Allowance, Grand Leave Allowance, Housing Allowance, including Utility Fees.

Transportation Allowances

To the members of the Board of Commissioners may be given Transport Allowance which is set for each month at most 20% (twenty percent) of the Salary or Honorarium of each member of the Board of Commissioners concerned.

Allowances for Board of Directors Only

Members of the Board of Directors are also given Housing Allowance including Utility Fees.

Housing Allowance

Housing Allowances including Utility Costs are granted for the Board of Directors because the Company does not provide Official Residences. Housing Allowances are given on a monthly basis amounted Rp 25,000,000.00 (twenty five million rupiah) since PT INTI (Persero) is located in Bandung City, the capital of West Java province.



Fasilitas

Facilities

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

Fasilitas Kesehatan

Perseroan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan.
2. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 - a. Rawat jalan dan obat
 - b. Rawat inap dan obat
 - c. Medical check-up
3. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
4. Medical check-up sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka (3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak diberikan kepada isteri, suami, dan anak.
5. Medical check-up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan

To the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be given Facilities adjusted to the conditions and financial capability and must not conflict with laws and regulations.

Taxes arising from the provision of facilities as mentioned above are borne by and become expenses of the Company.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited to misuse facilities referred above. Shareholders may litigate against BOD or BOC member misusing the Facility.

Health Facilities

The company provides health facilities to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.

Health Facilities mentioned above are granted with the following conditions:

1. *Health Facilities are granted to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and a wife or a husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years, provided that if the child under 25 years old has been married or worked, then the concerned child is not entitled to health facilities.*
2. *Health facilities are given based on domestic health treatment and medical care, which includes:*
 - a. *Outpatient and medicines*
 - b. *Hospitalization and medicines*
 - c. *Medical check-ups*
3. *In case of the treating physician providing referrals for treatment abroad, the provision of Health Facilities can be granted fully or partially by taking Company financial capabilities into account.*
4. *Medical check-ups as referred to in paragraph b number 3) and treatment facilities abroad as referred to in point c are not provided to wives, husbands, and children.*
5. *Medical check-ups are given 1 (one) times each year.*
6. *In case the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners having a concurrent position as a Board of Commissioners member in*

patungan, maka kepada yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kesehatan yaitu dari PT INTI (Persero). Apabila anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, maka hanya diberikan satu fasilitas kesehatan.

Fasilitas Bantuan Hukum

Perseroan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi, dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti sebaliknya.

Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan 1 (satu) jasa kantor pengacara atau konsultan hukum untuk setiap kasus tertentu, yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Penunjukan kantor pengacara atau konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai prosedur pengadaan barang atau jasa yang berlaku.

Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang bersangkutan menggunakan kantor pengacara atau bantuan hukum atas pilihannya sendiri, maka seluruh biaya pengacara atau konsultan hukum, baik yang sudah maupun belum dibayarkan, menjadi beban yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/02/2016, Fasilitas Bantuan Hukum ini tidak berlaku jika penggugat atau tergugat adalah PT INTI (Persero), Negara (negara sebagai badan hukum, lembaga negara, atau lembaga pemerintah), atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Fasilitas Khusus Direksi

Khusus untuk anggota Direksi diberikan fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Kendaraan

Apabila Perseroan mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan mampu, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Medical Facility, which is from PT INTI (Persero). If the Board of Commissioners member is concurrently a member of the Board of Commissioners in another SOE, only one medical facility will be given.

Legal Aid Facility

The Company shall provide the Legal Aid Facility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in case of actions or acts happened for and on behalf of their position related to the Company's purposes and objectives as well as business activities.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners intending to make use of the Legal Aid Facility, shall make a Statement on stamped paper explaining that their position in a particular case is not in an unofficial capacity, and is willing to return the Legal Aid Facility if proven otherwise.

Legal Aid Facility mentioned above are provided in the form of financing of 1 (one) lawyer's or legal consultant office service for each particular case, covering the examination process as witnesses, suspects, and the defendant in court. Appointment of attorney or law consultant is carried out by the Company according to the procedure of procurement of goods or services that applies.

In the event that the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned is declared guilty and sentenced by a decision that has had permanent legal force, or their use a lawyer's or legal consultant office of their choice, then the entire costs of lawyer or legal consultant, either already or have not been paid, will be borne by the concerned.

According to Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-06/MBU/02/2016, the Legal Aid Facility is not valid if the plaintiff or the defendant is PT INTI (Persero), the Country (as legal entity, state institution, or government institution), or other parties that is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister.

Facility for The Board of Directors Only

Exclusively for members of the Board of Directors, the following facilities are provided:

Vehicle Facility

If the Company has a healthy financial condition and is capable, with the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister can provide facilities to the members of the Board of Directors by one unit of official vehicle including maintenance and operating costs.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Dalam hal Perseroan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan anggota Direksi tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada anggota Direksi, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.

Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan.

Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kendaraan.

In case the Company provides Vehicle Facility, and the member of the Board of Directors does not want to use the vehicle, then to that concerned member is not to be given any transportation allowance or other reimbursement costs.

Vehicle specifications and standards as mentioned above is designated by the GMS or Minister.

In the case of a member of the Board of Directors is no longer in office, within 30 (thirty) days after being terminated, the vehicle must be returned to the Company.

In case of a member of Board of Directors having a concurrent position as the member of Board of Commissioners in subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Vehicle Facility.

Tantiem

Tantiem

Perseroan dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dalam pengesahan laporan tahunan, apabila:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Realisasi Tingkat Kesehatan dengan nilai paling rendah yaitu 70. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya.
3. Capaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Index atau KPI) paling rendah sebesar 80%. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
4. Kondisi Perseroan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan yang tengah berada dalam kondisi rugi, atau Perseroan tidak menjadi rugi dari sebelumnya tengah berada dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.

Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan, dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun tersebut. Anggaran Tantiem atau Insentif Kerja tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI yang ditetapkan dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Apabila pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud di atas melebihi anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja dalam RKAP maka

The Company can give Tantiem or Performance-based Incentives to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister in the annual report approval, if:

1. *The opinion issued by the auditor is at least a Qualified Opinion.*
2. *Realization of the Health Level with the lowest score of 70. This achievement does not take into account the burden or profit resulting from the previous actions of the Board of Directors.*
3. *The lowest Key Performance Index (KPI) is 80%. Such achievement does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*
4. *The condition of the Company is not losing more than the previous year for a company that is in a loss condition, or the Company is not at a loss from before being in a profit condition The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*

Tantiem or Performance-based Incentives is a cost burden of the fiscal year concerned, and therefore shall be budgeted specifically within the Company Work Plan and Budget of the concerned year. The Tantiem or Performance-based Incentives budget shall be linked to the KPI targets set in the Company Work Plan and Budget concerned.

If the provision of Tantiem or Performance Incentives as referred to above exceeds the Tantiem or Performance Incentives budget in the Company Work Plan and

kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan. Penetapan anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja tersebut menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Tantiem atau Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian KPI pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa KPI juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan (*agent of development*) yang akan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri secara tersendiri, dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sinergi BUMN
2. Hilirisasi dan kandungan lokal
3. Pembangunan ekonomi daerah terpadu
4. Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai
5. Penugasan Pemerintah

Dengan mempertimbangkan kepantasan, dan/atau kualitas laba yang dibukukan, dan/atau kemampuan keuangan Perseroan, dan/atau faktor-faktor lain yang relevan, RUPS atau Menteri dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari perhitungan atau anggaran.

Komposisi besarnya Tantiem atau Insentif Kinerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Direktur Utama : **100%**
2. Anggota Direksi : **90% dari Direktur Utama**
3. Komisaris Utama : **45% dari Direktur Utama**
4. Anggota Dewan Komisaris : **90% dari Komisaris Utama**

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan, besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem atau Insentif Kinerja dihitung secara proporsional dengan masa jabatan yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan atas Tantiem dan Insentif Kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Gaji atau Honorarium

Salary or Honorarium

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/MBU/2014, Perseroan dapat mengalokasikan biaya operasional sebagai berikut :

Budget, the budget shortfall in question is calculated as a cost in the relevant financial year. The determination of the Tantiem budget or Performance Incentives uses the internal guidelines set by the GMS or the Minister.

Tantiem or Performance Incentives are given proportionally based on the achievements of the KPI in the relevant year, provided that the KPI must also consider the criteria for achieving the implementation of tasks as agents of development which will be determined by the GMS or the Minister separately, by containing the following elements following:

1. SOEs Synergy
2. Downstream and local content
3. Integrated regional economic development
4. Financial independence and value creation
5. Government Assignment

By considering the appropriateness, and/or quality of recorded profits, and/or the financial capability of the Company, and/or other relevant factors, the GMS or the Minister may determine the Tantiem or Performance Incentives that are lower than the calculation or budget.

The composition of the amount of Tantiem or Performance Incentives is determined as follows:

1. President Director : **100%**
2. Members of the Board of Directors : **90% of the President Director**
3. President Commissioner : **45% of the President Director**
4. Members of the Board of Commissioners : **90% of the President Commissioner**

In the event that there are other positions that are not listed in the composition of the Position Factor, the amount of the Position Factor shall be determined by the GMS or the Minister.

In case of the tenure of member of the Board of Directors and the Board of Commissioners member is less than 12 (twelve) months in the concerned fiscal year, the amount of Tantiem or Performance-based Incentive is calculated in proportion to the term of office concerned.

Income Tax on Tantiem and Performance Incentives is borne and borne by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned.

According to Regulation of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-04/MBU/2014, the Company can budget operating expenses as follow :



1. Untuk anggota Direksi

Biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership atau corporate member, dan biaya representasi dalam bentuk corporate credit card.

2. Untuk anggota Dewan Komisaris

Pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

1. For members of the Board of Director

Communication fees, uniforms, membership of professional associations, club membership or corporate members, and the cost of representation in the form of corporate credit card.

2. For members of the Board of Commissioners

Uniforms and professional association membership.

Resume Struktur Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

Resume Salary Structure, Benefits, and Facilities Board of Directors and Board of Commissioners

Gaji Per Tahun <i>Salary Per Year</i>	Tunjangan <i>Allowance</i>	Fasilitas <i>Facilities</i>
Direktur Utama <i>President Director</i> Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama <i>The member of the Board of Directors 85% of President Director</i>	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* <i>Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary*</i> - Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun <i>Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year</i> - Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000,- per bulan <i>Housing Allowance: Rp 25.000.000,- per month</i>	- Fasilitas Kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan <i>Vehicle Facility: 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the condition of the company</i> - Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) <i>Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)</i> - Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (at cost) <i>Legal Aid Facility: at cost</i>
Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama <i>President Commissioner 45% from President Director</i> Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama <i>The member of the Board of Commissioners 90% of President Commissioner</i>	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* <i>Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary*</i> - Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun <i>Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year</i> - Tunjangan Transportasi : 20% dari honorarium per bulan <i>Transportation Allowance: 20% of the honorarium per month</i>	- Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) <i>Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)</i> - Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (at cost) <i>Legal Aid Facility: at cost</i>

**Realisasi Remunerasi
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021**
*Remuneration Realization
of The Board of Directors and The Board of Commissioners
in 2021*
Dewan Komisaris (dalam Rupiah)
Board of Commissioners (in Rupiah)

Honorarium	Tunjangan Allowances	Tunjangan Lainnya Other Allowances	Asuransi Purnajabatan Post-Employment Insurance
1.339.800.000,-	272.160.000,-	0,-	334.950.000,-

Dewan Direksi (dalam Rupiah)
Board of Commissioners (in Rupiah)

Gaji Salary	Tunjangan Allowances	Tunjangan Lainnya Other Allowances	Asuransi Purnajabatan Post-Employment Insurance
2.916.000.000,-	900.000.000,-	0,-	729.000.000,-

Remunerasi Direksi Tahun 2021
The Remuneration of The Board of Directors in 2021

Nama Name	Gaji per Tahun Salary per Year	Tunjangan per Tahun Attendance	Potongan Dinas Service Deductions	Gaji Bersih per Tahun Net Salary per Year	Tantiem Tunjangan Hari Raya Tantiem Religious Holiday Allowance	Jumlah Amount
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Otong lip	1.080.000.000	300.000.000	21.880.000	1.401.880.000	90.000.000	1.491.880.000
Tri Hartono Rianto	918.000.000	300.000.000	18.598.000	1.236.598.000	76.500.000	1.313.098.000
Teguh Adi Suryandono	918.000.000	300.000.000	18.598.000	1.235.280.000	76.500.000	1.313.098.000

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021
The Remuneration of The Board of Directors in 2021

Nama Name	Gaji per Tahun Salary per Year	Tunjangan per Tahun Attendance	Potongan Dinas Service Deductions	Gaji Bersih per Tahun Net Salary per Year	Tantiem Tunjangan Hari Raya Tantiem Religious Holiday Allowance	Jumlah Amount
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Unggul Priyanto	486.000.000	97.200.000	8.145.000	591.345.000	40.500.000	631.845.000
Trisno Hendradi	437.400.000	87.480.000	8.861.400	533.741.400	36.450.000	570.191.400
Rahmadi Murwanto	437.400.000	87.480.000	8.861.400	640.548.000	36.450.000	570.191.400



Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama, dan/atau Pengendali

Affiliation Between Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, and Major and/or Controlling Shareholders

Sesama Anggota Dewan Komisaris, antara Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (pertalian kekeluargaan karena perkawinan). PT INTI (Persero) memastikan hal ini tidak terjadi, baik antar masing-masing anggota Dewan Komisaris atau Direksi, maupun terhadap Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Fellow Members of the Board of Commissioners, between Members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, there is no family relationship to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage (kinship ties due to marriage). PT INTI (Persero) ensures that this does not happen, either between each member of the Board of Commissioners or the Board of Directors, as well as the Major Shareholders and/or Controlling Shareholders.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Penerapan pengelolaan risiko telah dilakukan secara formal sejak diterbitkannya Keputusan Direksi tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko pada 31 Maret 2005 dan dilengkapi dengan Keputusan Direksi yang mengatur Kebijakan Operasional dan Panduan Manajemen Risiko yang diterbitkan pada 12 Oktober 2005.

Dengan kebijakan tersebut maka penerapan pengelolaan risiko Perseroan telah dilakukan secara komprehensif di seluruh fungsi dan area kerja Perseroan, di mana pelaksanaannya senantiasa dikawal oleh sebuah Komite Manajemen Risiko yang dibentuk melalui sebuah Keputusan Direksi.

Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Risiko senantiasa diperbaharui untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan pada perubahan lingkungan internal dan eksternal Perseroan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, maka sejak tahun 2014 Perseroan mengubah Komite Pengelolaan Risiko menjadi sebuah struktur yang lebih permanen dalam struktur organisasi Perseroan.

The implementation of risk management has been carried out formally since the issuance of the Decree of the Board of Directors regarding the General Guidelines for Risk Management on March 31, 2005 and is complemented by the Decree of the Board of Directors governing the Operational Policy and Guidelines for Risk Management which was issued on October 12, 2005.

With this policy, the implementation of the Company's risk management has been carried out comprehensively in all functions and work areas of the Company, where the implementation is always monitored by a Risk Management Committee established through a Board of Directors Decree.

Risk Management Policies and Guidelines are constantly updated for improvement by adjusting to changes in the Company's internal and external environment. Referring to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, since 2014 the Company has changed the Risk Management Committee into a more permanent structure in the Company's organizational structure.



Uraian Tentang Sekretaris Perusahaan

Description on Corporate Secretary

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor KN.020/2018 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), dijelaskan hal-hal berikut mengenai Sekretaris Perusahaan:

Based on the Decision of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Number KN.020/2018 about Implementation Guidelines of Good Corporate Governance, the following is described on the Corporate Secretary:

Fungsi dan Peran

Function and Roles

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan yang:

1. Bertindak sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) untuk berkoordinasi dan memfasilitasi komunikasi antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan, serta risalah rapat Direksi, Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik (*compliance and good governance*), termasuk tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 (3).

Vice President Sekretaris Perusahaan & Perencanaan Strategis Perusahaan dijabat oleh Rizqi Ayunda Pratama, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KD.066/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Juli 2021.

The Company has a Corporate Secretary who:

1. *Acts as liaison officer to coordinate and facilitate communication between the Company with all stakeholders.*
2. *Administers and stores documents of the Company, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register of the Company, and also minutes of meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders (GMS).*
3. *Ensures that the Company complies with the legislation and good governance, including applicable disclosure requirements, and shall regularly provide all relevant information to the Board of Directors and the Board of Commissioners upon request.*

The Corporate Secretary's function is run by a structural organ one level under the Board of Directors, who is appointed by and responsible to the Board of Directors, as regulated in Regulation of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 Article 28 (3).

Vice President Corporate Secretary & Communication is occupied by Rizqi Ayunda Pratama, appointed based on the Decree of the Board of Directors Number KD.066/KP.09/020800/2021 regarding Employee Placement within the Company's Environment effective since July 1, 2021.

Kualifikasi

Qualifications

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan harus mampu berkomunikasi, bekerja dalam tim dan membangun hubungan kerja yang baik, serta mempunyai pemikiran analitis dan konseptual.

Komitmen kepada organisasi, kepedulian pada aturan dan kualitas, serta orientasi pada hasil pencapaian turut menjadi penentu keberhasilan Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

The Corporate Secretary must have adequate academic qualifications to carry out the duties and responsibilities satisfactorily. Other than that, the Corporate Secretary must be able to communicate, work in a team, build a good working relationship, and have analytic and conceptual thinking.

Organizational commitment, concern for order and quality, and achievement orientation are also critical to the corporate secretary's success in performing his/her duties.

Accountability

Accountability

Sekretaris Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu Direksi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan Perseroan meliputi bidang Administrasi Direksi, Hubungan Masyarakat, Program Kemitraan dan Lingkungan (PKBL), Perencanaan & Pengendalian Strategis, serta Pengembangan Bisnis.

Corporate Secretary is formed to support and assist the Board of Directors of the Company in managing and running the Company's activities, including the field of Directors Administration, Public Relations, Partnership and Community Development Program, Strategic Planning & Control, and also Business Development.



Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Rizqi Ayunda Pratama adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Susoh, Nanggroe Aceh Darussalam pada 8 Februari 1989, dan meraih gelar Sarjana Informatika dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2010.

Rizqi Ayunda Pratama mulai bekerja di PT INTI (Persero) pada tahun 2011 sebagai *Software Developer*, beliau pernah berkarir di anak perusahaan PT INTI (Persero),

Rizqi Ayunda Pratama is an Indonesian citizen, born in Susoh, Nanggroe Aceh Darussalam on February 8, 1989, and graduated from Sriwijaya University for a Bachelor of Information Technology degree in 2010.

Rizqi Ayunda Pratama started working at PT INTI (Persero) in 2011 as a Software Developer, he had a career at a subsidiary of PT INTI (Persero), namely PT INTI Konten

**Tata Kelola Perusahaan***Corporate Governance*

yaitu PT INTI Konten Indonesia (INTENS), sebagai Direktur Bisnis pada tahun 2017-2018 dan Direktur Utama pada 2018-2020. Hingga saat ini, beliau menjabat sebagai *Vice President* Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis.

Indonesia (INTENS), as Business Director in 2017-2018 and President Director in 2018-2020. Until now, he served as Vice President Corporate Secretary and Strategic Planning.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2021*Brief Description of The Implementation of The Corporate Secretary's Duties in 2021*

Selama tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, antara lain:

During 2021 the Corporate Secretary has carried out the following activities, among others:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020.
 2. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Manajemen dengan Karyawan sebanyak 1 (satu) kali dan *Focus Group Discussion* (FGD) setiap minggu.
 3. Menyelenggarakan Rapat Direksi bersama seluruh *Vice President* setiap minggu serta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris setiap bulan.
 4. Menyelenggarakan pengesahan penetapan Sasaran Kinerja Unit serta Program Kerja bagi seluruh unit kerja di tahun 2021. Pada tahun 2021, Rapat Dinas tidak diselenggarakan karena kondisi keuangan Perseroan.
 5. Menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) 2020.
 6. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021.
 7. Menerbitkan 11 siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan bisnis PT INTI (Persero).
 8. Memberikan dukungan pengambilan Keputusan Direksi, yaitu 177 keputusan dalam 98 Rapat Direksi sepanjang tahun 2021.
 9. Menyelenggarakan 12 Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021.
 10. Dukungan dokumen *Self-Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2020.
 11. Menindaklanjuti 40 rekomendasi hasil *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2020.
 12. Memberikan dukungan dalam pemasaran, di antaranya penyiapan marketing kit serta berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan bisnis
1. *H1. Held the General Meeting of Shareholder (GMS) regarding Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report.*
 2. *Organizing a Management Communication Forum with Employees 1 (one) time and a Focus Group Discussion (FGD) every week.*
 3. *Organizing Directors Meeting with all Vice Presidents every week and a Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners every month.*
 4. *To ratify the determination of Unit Performance Targets and Work Programs for all work units in 2021. In 2021, the Annual Corporate Meeting was not held due to the Company's financial condition.*
 5. *Prepare the Annual Report 2020.*
 6. *Held the General Meeting of Shareholders (GMS) to ratify the Company Work Plan and Budget 2021.*
 7. *Published 11 press releases related to the performance and business development of PT INTI (Persero).*
 8. *Provide support for the decision making of the Board of Directors, which is 177 decisions in 98 Board of Directors Meetings throughout 2021.*
 9. *Held 12 Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners throughout 2021.*
 10. *Support for the Good Corporate Governance (GCG) Implementation Self-Assessment 2020 document.*
 11. *Following up on 40 recommendations from the assessment results of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2020.*
 12. *Provide support in marketing, including the preparation of marketing kits and various needs related to the Company's business.*

Perusahaan.

13. Mengembangkan materi dan strategi komunikasi korporasi PT INTI (Persero) seperti publikasi laporan keuangan melalui media massa, media sosial, website, dan lain-lain.
14. Mewakili Perseroan dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perseroan terutama terkait keterbukaan informasi (sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID). Pada tahun 2021, PT INTI (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai “Badan Publik Informatif” untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Penghargaan Keterbukaan Informasi 2021 dengan skor sebesar 93,51.
15. Menyiapkan strategi dan mengelola Komunikasi Eksternal dan Internal:
 - a. Pengelolaan Media Internal (laman intranet i-Portal, siaran radio, e-magazine, majalah dinding, dan TV internal).
 - b. Pengelolaan Media Eksternal (website, Portal Publik Kementerian BUMN, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok).
 - c. Penanganan Keprotokoleran Perusahaan.
 - d. Desain dan pembuatan *Marketing Tools*
16. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship PT INTI (Persero) seiring dengan kebijakan Perusahaan.
17. Mengembangkan sarana komunikasi dan kegiatan internal dan eksternal, seperti perayaan ulang tahun perusahaan, silaturahmi purnabakti PT INTI (Persero), halal bihalal, pameran, kunjungan kerja, kunjungan industri, media *gathering*, media visit, *press conference*, dan lainnya.
18. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi di Perusahaan.

Di samping itu, karena pada tahun 2021 Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis juga menjalankan fungsi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil di Perusahaan, maka kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah mengembangkan dan mengimplementasikan Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dan Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil, sebagaimana diuraikan pada Laporan Tahunan PT INTI (Persero) Bab Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil.

13. *Develop materials and corporate communication strategies of PT INTI (Persero) such as publication of financial reports through mass media, social media, websites, and others.*
14. *Representing the Company in relation to stakeholders in communicating the Company's activities, especially related to information disclosure (as Information Management and Documentation Officer). In 2021, PT INTI (Persero) won an award as an "Informative Public Agency" for the category of State-Owned Enterprises (SOEs) at the Information Disclosure Award 2021 with a score of 93.51.*
15. *Prepare strategies and manage External and Internal Communications:*
 - a. *Internal Media Management (i-Portal intranet page, radio streaming, e-magazine, wall magazine, and internal TV)*
 - b. *External Media Management (website, Public Portal, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tiktok).*
 - c. *Handling Company Protocol.*
 - d. *Design and production of Marketing Tools.*
16. *Develop and implement PT INTI (Persero) sponsorship activities in line with Company policies.*
17. *Develop communication facilities and internal and external activities, such as company anniversary celebrations, PT INTI (Persero) retirement gathering, halal bihalal, exhibitions, work visits, industrial visits, media gatherings, media visits, press conferences, and others.*
18. *Implementation of Integrated Management System in the Company.*

In addition, because in 2021 the Corporate Secretary and Strategic Planning Division will also carry out the Responsibility Program Social and Environmental and also Distribution of Micro Small Business Funding Program Funds function in the Company, the activities that have been carried out in 2021 are developing and implementing the Social Responsibility Program and Distribution of Micro Small Business Funding Program Funds, as described in the Annual Report PT INTI (Persero) Chapter of Micro Small Business Funding Program.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Information and Corporate Data

Penyebaran informasi kepada semua pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Selain menerbitkan publikasi Laporan Keuangan Tahunan melalui media massa baik cetak maupun online, Perseroan juga memanfaatkan teknologi informasi dan media lainnya sebagai sarana penyebaran informasi bagi perusahaan, antara lain melalui:

1. Situs internet www.inti.co.id
2. Radio internal
3. Portal internal (intranet) i-Portal
4. Media Sosial Facebook Humas PT INTI
5. Media Sosial Facebook PT INTI Official
6. Media Sosial Twitter @ptintiofficial
7. Media Sosial Instagram @ptintiofficial
8. Media Sosial Tiktok @ptintiofficial
9. Aplikasi PPID PT INTI
10. Website Kementerian BUMN

Dissemination of information to all stakeholders is an important part of increasing the principle of transparency of information internally and externally, which is expected to help maintain and increase the knowledge, understanding, and positive perceptions of stakeholders regarding the policies and activities of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

In addition to publishing the Annual Financial Report through mass media, both print and online, Company also utilizing information technology and other media as a means of disseminating information for the company, including through:

1. Internet Site www.inti.co.id
2. Internal Radio
3. Internal Portal (intranet) i-Portal
4. Social Media Facebook Humas PT INTI
5. Social Media Facebook PT INTI Official
6. Social Media Twitter @ptintiofficial
7. Social Media Instagram @ptintiofficial
8. Social Media Tiktok @ptintiofficial
9. PPID PT INTI Application
10. Website of Ministry of State-Owned Enterprises

Uraian Tentang Audit Internal

Description on Internal Audit

Fungsi Audit Internal PT INTI (Persero) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI pasal 67, 68, dan 69.

Kegiatan pengawasan internal difokuskan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memperkuat Sistem Pengendalian Manajemen. Hal ini merupakan suatu upaya dari fungsi internal audit untuk dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan usaha dan peningkatan akuntabilitas perusahaan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas Perseroan, kegiatan audit dilakukan antara lain melalui evaluasi atas penerapan manajemen risiko, evaluasi atas penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), evaluasi atas kewajaran laporan keuangan, penilaian pengendalian biaya, mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalin kemitraan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, dan Kantor Akuntan Publik), dan instansi terkait lainnya.

The Internal Audit function of PT INTI (Persero) is carried out by the Internal Audit Unit which was established based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) Chapter IV articles 67, 68, and 69.

Internal control activities are focused on efforts to increase corporate accountability and strengthen the Management Control System. This is an effort of the internal audit function to be able to contribute to achieving business success and increasing corporate accountability.

To improve the Company's accountability, audit activities are carried out, among others, through evaluation of the implementation of risk management, evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices, evaluation of the fairness of financial statements, assessment of cost control, encouraging increased compliance with applicable laws and regulations, and establish partnerships with external auditors (Financial Audit Board of the Republic of Indonesia, Financial and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, and Public Accounting Firms), and other relevant agencies.

Penjelasan Tentang Sistem Pengendalian Intern

Description On Internal Control System

Dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diubah pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan bahwa:

1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
2. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern
 - b. Membuat Piagam Pengawasan Intern
3. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

In Article 28 of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (SOEs) it is stated that:

1. *The Board of Directors is required to carry out internal supervision.*
2. *Internal control as referred to in paragraph (1) is carried out by:*
 - a. *Establish an Internal Control Unit*
 - b. *Create an Internal Control Charter*
3. *The Internal Control Unit as referred to in paragraph (2) letter (a), is led by a head who is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners or Supervisory Board.*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

4. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
6. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Dalam Pasal 3 dan 6 Surat Keputusan Direksi KN. 024/2012 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang disahkan pada 24 Desember 2012, menyatakan bahwa:

Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern:

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi perusahaan, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Satuan Pengawasan Intern
4. Karyawan
5. Pihak Ekstern

Pasal 6 tentang Pengendalian Intern oleh Satuan Pengawasan Intern:

"Satuan Pengawasan Intern (SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan audit intern, SPI harus bertindak secara independen dan memiliki jalur pelaporan yang memadai serta memiliki keahlian dalam praktek dan penerapan penilaian risiko."

Pengendalian yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan situasi ekonomi yang dinamis, persaingan yang semakin ketat, pergeseran permintaan pelanggan dan prioritasnya, serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.

Dengan demikian, pengendalian internal mengandung unsur-unsur:

1. Membantu manajemen atau organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan.
2. Suatu proses yang berisikan kegiatan-kegiatan

4. The internal control functions as referred to in paragraph (1) are:

- a. Evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with laws and regulations and company policies.
- b. Examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology, and other activities.

5. The Board of Directors is required to submit periodic reports on the implementation of the internal control function to the Board of Commissioners or Supervisory Board.

6. The Board of Directors is required to maintain and evaluate the quality of the internal control function in the company.

In Article 3 and 6 of the Decree of the Board of Directors KN. 024/2012 concerning the Internal Control System Guidelines adopted on December 24, 2012, stating that:

Article 3 concerning the Scope of the Internal Control System:

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in company organizations, including:

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. Internal Control Unit
4. Employees
5. External Party

Article 6 concerning Internal Control by the Internal Audit Unit:

"The Internal Audit Unit must be able to evaluate and play an active role in increasing the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis in relation to the implementation of the Company's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the company. In conducting internal audits, the Internal Audit Unit must act independently and have adequate reporting lines and have expertise in the practice and application of risk assessments."

Good control enables management to be ready to face changes in the dynamic economic situation, increasingly fierce competition, shifting customer demand and priorities, and restructuring for future progress.

Thus, internal controls contain elements:

1. Assist management or organization in achieving goals.
2. A process that contains company activities.

perusahaan.

3. Dilaksanakan oleh jajaran perusahaan.
4. Dapat memberikan reasonable assurance mengenai efektivitas dan efisiensi operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Disesuaikan dengan struktur organisasi.

Untuk memudahkan proses evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) menggunakan metodologi *framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Sesuai dengan definisi dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh satu entitas Direksi, manajemen, dan personil-personil lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak (*reasonable assurance*) tentang tercapainya tujuan-tujuan yang berkenaan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (*compliance*).

Adapun materi-materi *framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang digunakan, secara garis besar meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan rumusan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Aktifitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan, telah dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi.

3. *Implemented by a range of companies.*

4. *Can provide reasonable assurance regarding operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.*

5. *Adapted to the organizational structure.*

To facilitate the evaluation process of the company's internal control, the Internal Audit uses the *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* methodology. In accordance with the definition of *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, internal control is a process, carried out by an entity of the Board of Directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance about the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

The *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* framework materials used, in general, include:

1. Environmental Control

Based on the *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* formula, that control environment is defined as a set of standards, processes, and structures that provide the basis for implementing internal controls throughout the organization.

2. Control Activities

Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages in the business process, and over the technology environment.

3. Risk Assessment

Risk assessment involves a dynamic and interactive process for identifying and assessing risks towards achieving goals. Risk itself is understood as a possibility that an event will occur and affect the achievement of the entity's objectives.

4. Information and Communication

Information needed by management is relevant and good quality information that comes from internal and external sources, and information used to support the functions of other components of internal control. Information is obtained or generated through a process of communication between internal and external parties that is carried out continuously, repeatedly, and shared.

5. Monitoring

Aktivitas pemantauan menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan.

5. Monitoring

Monitoring activities according to *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) are evaluation activities with several forms, whether those that are sustainable, separate or a combination of both are used to ascertain whether each of the five components of internal control affects the functions in each component, exists and functions. Monitoring activities include the process of assessing the quality of internal control performance over time, and ensuring that everything is carried out as desired and whether it has been adjusted to changes in circumstances.

Pimpinan Unit Audit Internal

Head of Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal perusahaan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Sejak 1 Maret 2021, Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dijabat oleh Lisda Noor Rachmawati. Beliau meniti karir di PT INTI (Persero) sejak tahun 1992. Sebelum menjabat sebagai *Vice President* Satuan Pengawasan Intern (SPI) beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Sistem, Prosedur dan Kebijakan Akuntansi dari Divisi Akuntansi, Manajer Akuntansi Manajemen dari Divisi Keuangan dan Akuntansi, Manajer Evaluasi Kinerja Anak dan Afiliasi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi, serta Manajer Perencanaan dan Pengendalian Audit Divisi Satuan Pengawasan Intern.

The Internal Audit Unit is led by a Head who is responsible to the President Director. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the company's internal mechanism and is approved by the Board of Commissioners.

Since March 1, 2021 Head of Internal Audit Unit is led by Lisda Noor Rachmawati. Lisda Noor Rachmawati pursues his career at PT INTI (Persero) since 1992. Prior to his appointment as Head of Internal Audit Unit, he served on several functions such as Head of System, Procedure and Accounting Policy Division of Accounting Division, Manager of Accounting Management from Finance and Accounting Division, Subsidiaries and Affiliates Performance Evaluation Manager from Finance and Accounting Division, and Audit Planning and Control Manager of Internal Audit Division.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Audit Unit

Lisda Noor Rachmawati adalah Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, dan lahir di Bandung, pada 27 Maret 1970. Lisda Noor Rachmawati menyelesaikan studi Strata-1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung.

Beliau memegang beberapa sertifikasi di bidang akuntansi dan audit antara lain Profesi Akuntansi (Ak), *Chartered Accountant* (CA), *Certified Professional Management Accountant* (CPMA), dan *Professional Internal Audit* (PIA).

Selama berkarir di PT INTI (Persero) sejak tahun 1992, beliau pernah menempati posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Urusan Akuntansi Keuangan *Strategic*

Lisda Noor Rachmawati is an Indonesian citizen, domiciled in Bandung, and born in Bandung, March 27, 1970. Lisda Noor Rachmawati completed her undergraduate studies at the Accounting Department, Faculty of Economics at Padjadjaran University, Bandung.

She holds several certifications in accounting and auditing including Accountant Profession (Ak), *Chartered Accountant* (CA), *Certified Professional Management Accountants* (CPMA), *Certified Public Accountants* (CPA), and *Professional Internal Audit* (PIA).

During her career at PT INTI (Persero) since 1992, she has held several strategic positions, including as Head of Financial Accounting Affairs Infokom Communication

Business Unit (SBU) Infokom Communication Service and Software (ICSS), dan Kepala Urusan Akuntansi Strategic Business Unit (SBU) Jasa Integrasi Teknologi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Rencan Anggaran Biaya Proyek Divisi Manajemen Proyek.

Service and Software (ICSS) Strategic Business Unit (SBU), and Head of Financial Accounting Affairs Technology Integration Services Strategic Business Unit (SBU). She had served as Head of Planning and Control of Project Budgets, Project Management Division.

Lisda juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM), dan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Indonesia (FKSPI).

Lisda is also active in the activities of professional organizations including Institute of Indonesia Chartered Accountants, Indonesian Institute of Management Accountants, and Indonesian Trade Union Communication Forum.

Jumlah dan Kualifikasi Personil Satuan Pengawasan Intern

Number and Qualifications Personnel of The Internal Audit Unit

Jumlah personil Satuan Pengawasan Intern (SPI) tahun 2021 berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

The number of personnel of the Internal Audit Unit in 2021 is 6 (six) with details as follows:

Posisi <i>Position</i>	Jumlah Personil <i>Number of Personnel</i>
Vice President Satuan Pengawasan Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>	1 orang/person
Manajer	1 orang/person
Officer	2 orang/person
Auditor	2 orang/person
Jumlah / Total	6 orang/person

Dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor, PT INTI (Persero) telah melakukan program pelatihan bagi auditor. Program pelatihan atau sharing session yang diikuti oleh auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah sebagai berikut:

In order to increase the competence of auditors, PT INTI (Persero) has conducted training programs for auditors. The training or sharing session programs that were followed by the Internal Audit Unit auditors was as follows:

No.	Jenis Program <i>Program Type</i>	Judul Program <i>Program Title</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Partisipan <i>Participant</i>	Tanggal <i>Date</i>
1	Webinar	Webinar: "Peran SPI dalam Mendukung Perusahaan" Webinar: "The Role of Internal Audit in Supporting Companies"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3 Orang/Person	22 Januari 2021 January 22, 2021
2	Webinar	Webinar: Pengenalan IoT Webinar: "Introduction to IoT"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	26 Februari 2021 February 26, 2021

3	Webinar	Webinar: "Business Model Canvas"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	26 Maret 2021 March 26, 2021
4	Webinar	Webinar: "Business Analytics Insights"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	16 April 2021 April 16, 2021
5	Webinar	Webinar: "BUMN Digital Academy Insights"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	30 April 2021 April 30, 2021
6	Webinar	Webinar: "Metode Penyusunan MAPS" Webinar: "MAPS Preparation Method"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	7 Mei 2021 May 7, 2021
7	Webinar	Webinar: "Digital Disruption Insights"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	28 Mei 2021 May 28, 2021
8	Webinar	Webinar: "Membedah Peluang Pemasaran Produk INTI" Webinar: "Dissecting INTI Product Marketing Opportunities"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3 Orang/Person	11 Juni 2021 June 11, 2021
9	Webinar	Webinar: "Pengenalan Produk INTI" Webinar: "INTI Product Introduction"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3 Orang/Person	25 Juni 2021 June 25, 2021
10	Webinar	Webinar: "Vaksinasi dan Pandemi COVID-19" Webinar: "Vaccinations and the COVID-19 Pandemic"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3 Orang/Person	23 Juli 2021 July 23, 2021
11	Webinar	Webinar: "Transfer Teknologi Oerlikon Skyshiled" Webinar: "Oerlikon Skyshiled Technology Transfer"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	1 Orang/Person	20 Agustus 2021 August 20, 2021
12	Webinar	Webinar: "K3 Penunjang Produktivitas Karyawan" Webinar: "OHS Supporting Employee Productivity"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3 Orang/Person	27 Agustus 2021 August 27, 2021

13	Pelatihan	Pelatihan: "Orientasi Karyawan" xxxxxx	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	1 Orang/Person	September 2021 <i>September 1, 2021</i>
14	Webinar	Webinar: "Finance for Non Finance Manager"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	10 September 2021 <i>September 10, 2021</i>
15	Webinar	Webinar: "Peluang Implementasi IoT di Indonesia" Webinar: "Opportunities for IoT Implementation in Indonesia"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	24 September 2021 <i>September 24, 2021</i>
16	Webinar	Webinar: "5G Use Case Solution"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	8 Oktober 2021 <i>October 8, 2021</i>
17	Webinar	Webinar: "Indonesia Capital Market Introduction"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	15 Oktober 2021 <i>October 15, 2021</i>
18	Webinar	Webinar: "Cyber Security Awareness"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	29 Oktober 2021 <i>October 29, 2021</i>
19	Webinar	Webinar: "Logistics Management Insights"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	14 November 2021 <i>November 14, 2021</i>
20	Webinar	Webinar: "Public Relation Insights"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	27 November 2021 <i>November 27, 2021</i>
21	Webinar	Webinar: "Sertifikasi TKDN Produk/Jasa" Webinar: "Domestic Component Level Certification of Products/Services"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4 Orang/Person	10 Desember 2021 <i>December 10, 2021</i>
22	Webinar	Webinar: "Risk Management in Sharia Banking"	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	5 Orang/Person	17 Desember 2021 <i>December 17, 2021</i>

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Organizational Structure Internal Control Unit

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah unit kerja yang mendukung Direktur Utama dalam melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN. 037/2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tingkat Urusan, struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi sebagai berikut:

Internal Control Unit is a unit that supports the President Director in carrying out an evaluation of the effectiveness of internal control, risk management and corporate governance processes, in accordance with legislation and company policies.

Based on Decree of the Board of Directors Number KN. 037/2020 concerning Corporate Organizational Structure at the Level of Affairs, the organizational structure of Internal Control Unit is as follows:



Tugas Satuan Pengawasan Intern

Tasks of Internal Audit Unit

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Intern atau Piagam Pengawas Intern PT INTI (Persero) yang ditetapkan pada 11 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Internal Audit tasks as stated in the Internal Audit Charter of PT INTI (Persero) which is validated in October 11, 2021 are as follows:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
 2. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
 3. Melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan intern anak perusahaan guna memutuskan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
 4. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
 5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
1. *Planning and carrying out internal audit activities on the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with the laws and regulations and company policies.*
 2. *Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, marketing, human resources, information technology, and other activities.*
 3. *Coordinate with the subsidiary's internal control function to determine the adequacy of audit coverage and the quality of the audit approach.*
 4. *Cooperate with the Audit Committee in carrying out the supervisory function.*
 5. *Communicating directly with the President Director, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.*

Pemenuhan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dilakukan melalui pemberian informasi, konsultasi dan rekomendasi atas aktifitas yang diaudit atau dievaluasi kepada manajemen, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, dalam rangka hal berikut:

1. Meningkatkan kinerja usaha perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Menjaga ketaatan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Menjaga kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan resiko.

Adapun aktifitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang tertuang dalam Piagam Audit Intern atau Piagam Pengawas Intern pada pokoknya meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan audit, baik Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) maupun non-PKAT.
2. Penilaian terhadap kecukupan sistem atau sarana pengendalian intern, ketaatan atau kepatuhan atas ketentuan yang berlaku, kinerja manajemen, pengamanan aset perusahaan, dan pengelolaan risiko.
3. Pengawasan terhadap kegiatan operasional atas fungsi unit kerja.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen serta memberikan informasi konsultasi, dan rekomendasi mengenai hal dimaksud.
5. Memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen dan/atau auditee.
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atas hasil audit yang telah dilaksanakan, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dapat menyampaikan tembusan Laporan Hasil Audit kepada auditee, direktur, dan/atau kepala yang membawahi auditee.

Fulfillment of Internal Audit Unit tasks are carried out through the provision of information, consultation and recommendations on activities to be audited/evaluated to the management, as well as ensuring follow-ups on audit recommendations, in order to:

1. *Improve the performance of the company effectively, efficiently and economically.*
2. *Maintain compliance with the provisions and procedures,*
3. *Maintain clarity of functions, implementation, and accountability for the management of the company, including risk management.*

The Internal Audit Unit activities contained in Internal Audit Charter principally include:

1. *Preparation of audit activity plans, both the Annual Supervision Work Program and non-Annual Supervision Work Program.*
2. *Assessment of the adequacy of the system or tools of internal control, compliance with applicable regulations, management performance, safeguarding company assets, and risk management.*
3. *Supervision of operational activities on the functions of work units.*
4. *Identify matters that require management attention and provide consultation information, and recommendations regarding these matters.*
5. *Ensure that the audit recommendations have been followed up by management and/or auditees.*
6. *Submit a report to the President Director on the results of the audit that has been carried out, and SPI can submit a copy of the Audit Result Report to the auditee, director, and/or head in charge of the auditee.*

Uraian Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2021

Description of The Implementation of The Internal Supervision Unit in 2021

1. Mendampingi Kantor Akuntan Publik dalam penyelesaian general audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan interim audit berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun 2021.
2. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan 2021 sebanyak 6 (enam) buah Program Audit.
1. *Assisting the Public Accounting Firm in completing the general audit of the 2021 Financial Statements and interim audits based on the 2021 Quarterly Financial Statements.*
2. *Carry out inspections based on the 2021 Annual Audit Work Program as many as 6 (six) Audit Programs.*

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Inspection Result Report</i>	Nomor Surat Penugasan <i>Assignment Letter Number</i>	Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Examination Result Report Number</i>	Tanggal Penerbitan Laporan <i>Report Issuance Date</i>
1	Audit atas kegiatan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis <i>Audit of the activities of the Corporate Secretary and Strategic Planning Division</i>	SP.01/ PW.01/010400/2021	01/ PW.03/010400/2021	20 April 2021 <i>April 20, 2021</i>
2	Audit atas kegiatan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis <i>Audit of the activities of the Corporate Secretary and Strategic Planning Division</i>	SP.02/ PW.01/010400/2021	07/ PW.03/010400/2021	29 April 2021 <i>April 29, 2021</i>
3	Audit atas Kegiatan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Audit of the Activities of the Human Resources and General Management Division</i>	SP.03/ PW.01/010400/2021	09/ PW.03/010400/2021	21 Juli 2021 <i>July 21, 2021</i>
4	Audit atas Kegiatan PT INTI Pindad Mitra Sehati (PT IPMS) <i>Audit of PT INTI Pindad Mitra Sehati (PT IPMS) Activities</i>	SP.04/ PW.01/010400/2021	2105/ PW.03/010400/2021	21 September 2021 <i>September 21, 2021</i>
5	Audit atas Kegiatan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Audit of Finance and Accounting Division Activities</i>	SP.05/ PW.01/010400/2021	92/ PW.03/010400/2021	23 November 2021 <i>November 23, 2021</i>
6	Audit atas Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) <i>Audit of Social and Environmental Responsibility Activities</i>	SP.06/ PW.01/010400/2021	107/ PW.03/010400/2021	24 Desember 2021 <i>December 24, 2021</i>

3. Melaksanakan pemeriksaan Non-Program Kerja Audit Tahunan 2021.	3. Carry out inspections of Non-Annual Supervision Work Programs in 2021.
4. Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal Satuan Pengawasan Intern tahun 2021.	4. Monitoring the follow-up on the results of the internal inspection of the Internal Audit Unit in 2021.
5. Melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal tahun 2020.	5. Follow up on the results of external audits in 2020.
6. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.	6. Monitoring the follow-up to the results of the examination of the Public Accountant Office for the 2020 financial year.
7. Melakukan penyesuaian terhadap dokumen	7. Make adjustments to the quality documents of the

kualitas Satuan Pengawasan Intern.

Internal Control Unit.

8. Melaksanakan program pengembangan kompetensi untuk para personil Satuan Pengawasan Intern.

8. *Implement a competency development program for the personnel of the Internal Audit Unit.*

Hasil Tinjauan yang Dilakukan atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada Tahun Buku 2021

Results of The Review Contained on The Implementation of The Internal Control System in The Financial Year 2021

Dalam evaluasi pengendalian internal, Satuan Pengawasan Intern mengacu ke kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner berbasis website sejak 31 Mei 2021 hingga 18 Juni 2021 dapat disampaikan bahwa hasil penilaian atas pengendalian internal perusahaan tahun 2021 adalah 75,74 dengan kategori **"BAIK"**, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

In evaluating internal controls, the Internal Control Unit refers to the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) framework. Based on evaluations conducted through web-based questionnaires since May 31, 2021 until June 18, 2021, it can be stated that the results of the assessment of the company's internal control in 2021 are 75,74 in the "GOOD" category, as shown in the table below:

No.	Evaluasi Pengendalian Internal <i>Internal Control Evaluation</i>	Bobot <i>Weight</i>	Skor <i>Score</i>	Persentase <i>Percentage</i>
I	Lingkungan Pengendalian <i>Controlling Scope</i>	30	20,81	69,38%
1	Integritas dan Nilai Etika <i>Integrity and Ethical Values</i>	8	6,67	80,56%
2	Komitmen terhadap Kompetensi <i>Commitment to Competence</i>	5	3,41	65,87%
3	Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi <i>Management Philosophy and Operation Style</i>	4	3,18	76,79%
4	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	6	3,29	53,04%
5	Tanggung Jawab dan Wewenang <i>Responsibility and Authority</i>	3	2,12	68,25%
6	Praktik Pembinaan Personil <i>Personnel Development Practices</i>	3	2,15	69,31%
II	Aktivitas Pengendalian <i>Controlling Activities</i>	20	14,91	74,54%
1	Pelaksanaan Review <i>Review Implementation</i>	5	3,75	74,97%
2	Pengelolaan Informasi <i>Information Management</i>	7	4,60	69,05%
3	Pengendalian Fisik <i>Physical Controlling</i>	3	2,47	73,99%
4	Pemisahan Tugas dan Fungsi <i>Task and Function Separation</i>	5	4,09	81,81%

III	Penaksiran Risiko <i>Risk Assessment</i>	20	16,13	87,08%
1	Penetapan Tujuan <i>Goal Setting</i>	2	1,85	83,33%
2	Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i>	10	8,65	83,45%
3	Analisis Risiko <i>Risk Analysis</i>	4	2,90	78,41%
4	Mengelola Risiko Akibat Perubahan <i>Managing Risk Due to Changes</i>	4	2,72	78,41%
IV	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	15	12,34	82,23%
1	Informasi <i>Information</i>	7	5,63	81,35%
2	Komunikasi <i>Communication</i>	8	6,70	82,99%
V	Monitoring	15	12,34	82,23%
1	Monitoring	15	11,55	76,98%
Total			75,74	

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa persentase tiga terendah terdapat pada:

1. Sub kategori I.4. Struktur Organisasi, yaitu 53,04%.
2. Sub kategori I.2. Komitmen Terhadap Kompetensi, yaitu 65,87%.
3. Sub kategori I.5. Tanggung Jawab dan Wewenang, yaitu 68,52%.

Hasil Pemeriksaan tahun 2015-2021 yang telah dan dalam proses ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

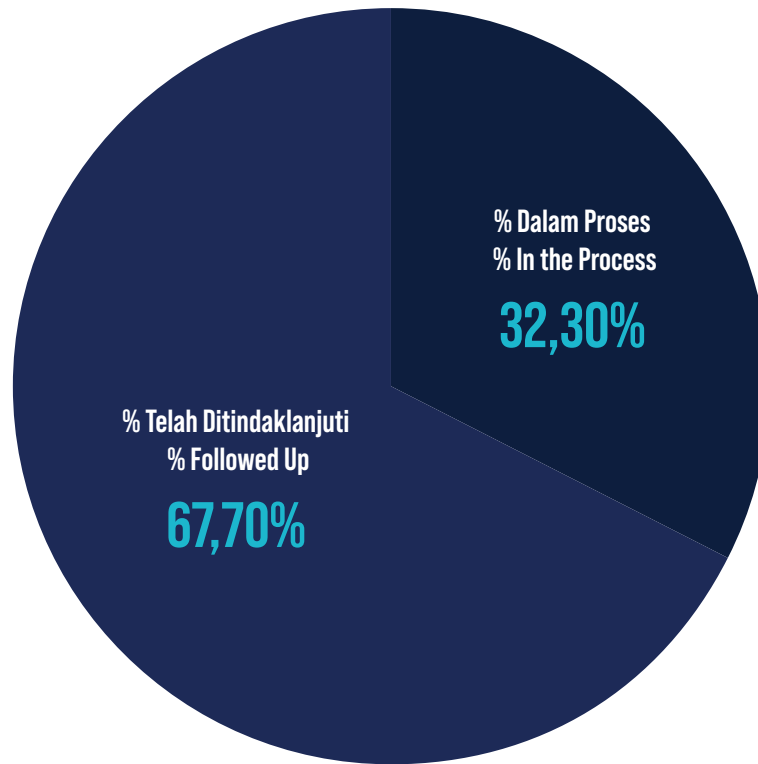
From the table above can be submitted that the three lowest percentages are in:

1. Sub category I.4. Structure Organization, that is 53,04%.
2. Sub category I.2. Commitment to Competence, that is 65,87%.
3. Sub category I.5. Responsibilities and Authorities, that is 68,52%.

Examination results for 2015-2021 that have been and are being followed up in the process are as follows:

Pemeriksaan <i>Examination</i>	Jumlah Rekomendasi <i>Number of Recommendations</i>	Telah Ditindaklanjuti <i>Followed Up</i>	Dalam Proses <i>In the Process</i>	% Telah Ditindaklanjuti <i>% Followed Up</i>
2015	101	97	4	96,04%
2016	61	35	26	57,38%
2017	107	100	7	93,46%
2018	130	103	27	79,23%
2019	123	34	89	27,64%
2020	91	33	58	36,26%
2021	65	57	8	87,69%
Jumlah Total	678	459	219	67,70%

Rekomendasi atas Temuan Audit SPI 2015-2021





Manajemen Risiko

Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa di dalam setiap langkah kegiatan usahanya terdapat sejumlah risiko yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun sebuah kerangka kerja pengendalian risiko, yang sekaligus merupakan bagian dari kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih luas, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan pengelolaan risiko di Perseroan.

Pengelolaan risiko Perseroan ini dibangun dengan maksud menekan setiap dampak risiko sampai tingkat serendah mungkin sehingga setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional dan usaha dapat mengarah pada pencapaian tujuan bisnis Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko

Risk Management Policy

Penerapan pengelolaan risiko telah dilakukan secara formal sejak diterbitkannya Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko tertanggal 31 Maret 2005 dan diperbarui dengan Keputusan Direksi mengenai Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan yang diterbitkan pada 24 Februari 2022. Dengan kebijakan tersebut maka penerapan pengelolaan risiko Perseroan telah dilakukan secara komprehensif di seluruh fungsi dan area kerja Perseroan, di mana pelaksanaannya senantiasa dikawal oleh sebuah Komite Manajemen Risiko yang dibentuk melalui sebuah Keputusan Direksi.

Kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko senantiasa diperbaharui untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan pada perubahan lingkungan internal dan eksternal Perseroan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, maka sejak tahun 2014 Perseroan mengubah komite pengelolaan risiko menjadi sebuah struktur yang lebih permanen dalam struktur organisasi Perseroan.

The company realizes that in every step of its business activities there are a number of risks that need to be addressed. Therefore, the Company has developed a risk control framework, an integral part of a broader framework of Good Corporate Governance (GCG), which guides all stakeholders in implementing risk management in the Company.

The Company's risk management is built with the intention of suppressing any risk impact to the lowest possible level so that any decision making in operational and business activities can lead to the achievement of the Company's business objectives.

The implementation of risk management has been formally established since the issuance of Decree of the Board of Directors which regulates the Risk Management General Guidelines dated March 31, 2005 updated with the Decree of the Board of Directors regarding Guidelines for Risk Management in the Company issued on February 24, 2022. Under the policies, the implementation of risk management has been carried out comprehensively throughout the Company's functions and work areas, where its implementation is always guarded by a Risk Management Committee established through a decree of the Board of Directors.

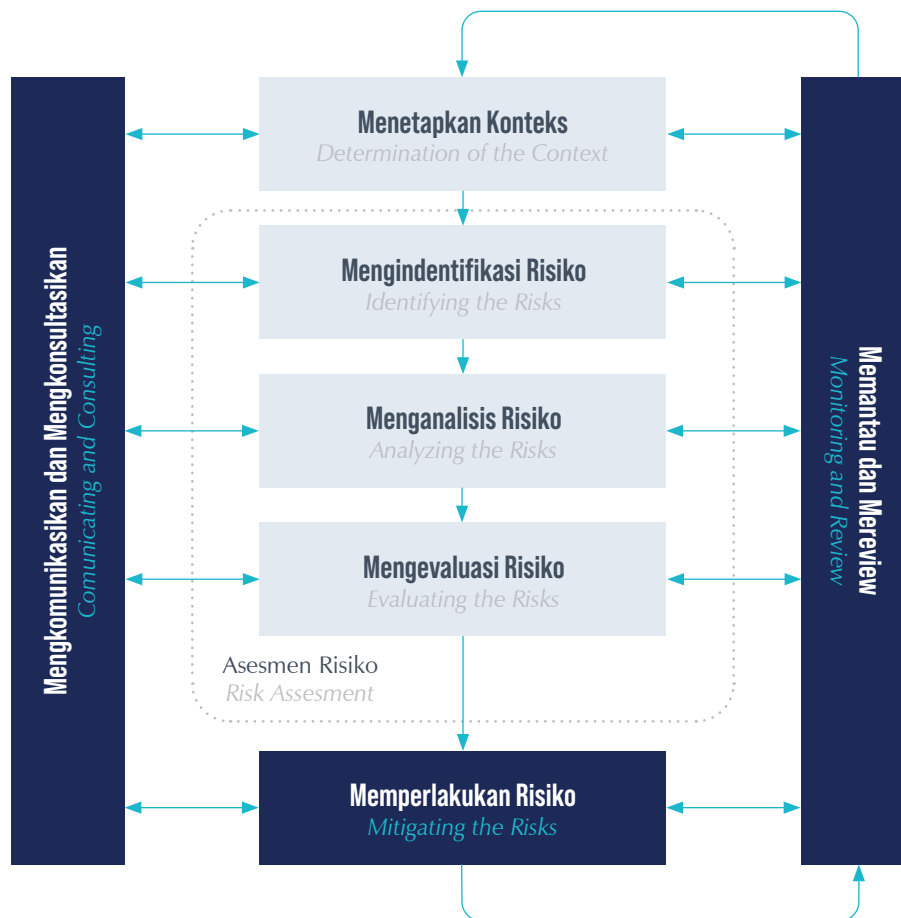
Risk management policies and guidelines are constantly updated for refinement by adjusting to changes in the Company's internal and external environment. Referring to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance to SOEs, then since 2014 the Company changed the risk management committee into a more permanent structure In the organizational structure of the Company.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko

Risk Management Framework

Kerangka kerja pengelolaan risiko Perseroan dibangun dengan berlandaskan ISO 31000:2009 tentang Risk Management-Principles and Guidelines. Penerapan kerangka kerja ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan disertai oleh pembangunan budaya sadar risiko yang diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Budaya Perseroan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang biasa disebut AKHLAK.

The Company's risk management framework is built on ISO 31000: 2009 on Risk Management-Principles and Guidelines. The implementation of this framework is implemented in phases and sustainable manner, accompanied by the development of risk consciousness culture which is integrated as an integral part of the global Corporate Culture, namely trustworthy (amanah), competent (kompeten), harmonious (harmonis), loyal (loyal), adaptive (adaptif), and collaborative (kolaboratif), or what is commonly called AKHLAK.



Secara umum kerangka kerja pengelolaan risiko Perseroan mencakup:

1. **Penetapan Konteks**, yaitu penetapan ruang lingkup pengelolaan risiko yang akan dilakukan.
2. **Penilaian Risiko**, terdiri dari kegiatan:
 - a. **Identifikasi Risiko**, yaitu proses mengenali peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan terjadi dan berakibat mengganggu atau merugikan dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal serta memperhatikan sumber potensi risiko. Hasil

In general, the Company's risk management framework includes:

1. **Determination of the Context**, namely the determination of the scope of risk management to be performed.
2. **Risk Assessment**, consisting of activities:
 - a. **Risk Identification**, which is the process of identifying events that have the possibility of occurring and causing disturbing or disadvantage, by considering internal and external aspects as well as considering the potential sources of risk. Result of this process is the Risk List.

- proses ini adalah Daftar Risiko.
- b. **Analisis Risiko**, yaitu proses menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi dan tingkat akibat atau konsekuensi dari suatu risiko. Hasil proses ini adalah Tingkat Risiko.
 - c. **Evaluasi Risiko**, yaitu proses perbandingan antara tingkat risiko terhadap selera risiko untuk memutuskan apakah menerima risiko atau tidak.
3. **Perlakuan Risiko**, yaitu proses untuk menentukan bagaimana risiko dimitigasi.
 4. **Pemantauan dan Review**, yaitu proses pemantauan risiko, pengevaluasian risiko dan pelaksanaan mitigasinya, serta pengungkapan risiko.
 5. **Konsultasi dan komunikasi** yang dilakukan secara kontinyu dengan stakeholder untuk tindak lanjut dari hasil Manajemen Risiko yang dilakukan.
- b. **Risk Analysis**, which is the process of determining the level of probability or frequency of occurrences and as well the consequence level of the risk. Result of this process is the Risk Level.
 - c. **Risk Evaluation**, which is the process of comparison between the risk level and risk appetite to decide whether to accept the risk or not.
3. **Risk Mitigation**, which is a process to determine how risks are mitigated.
 4. **Monitoring and Review**, which is the process of risk monitoring, risk evaluation and implementation of mitigation, and risk disclosure.
 5. **Continuous consultation and communication** with stakeholders for follow-up of the results of Risk Management conducted.

Penerapan Pengelolaan Risiko

Risk Management Implementation

Implementasi assesmen dan mitigasi risiko telah dijalankan di masing masing divisi yang dibuktikan dengan pengiriman hasil mitigasi yang dilakukan ke Bagian Manajemen Risiko. Dari hasil monitoring dan kajian yang dilakukan terhadap kegiatan asesmen manajemen risiko terhadap divisi menunjukkan bahwa terdapat beberapa profil risiko yang level risikonya turun maupun naik. Mitigasi telah dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil mitigasi yang telah dilaporkan ke Bagian Manajemen Risiko akan dikaji dan dipantau.

Untuk meningkatkan awareness terhadap proses manajemen risiko, telah dilakukan sosialisasi pengelolaan manajemen risiko kepada Risk Representative di setiap divisi yang dilanjutkan dengan evaluasi terhadap pengelolaan manajemen risiko. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi manajemen risiko khusus untuk *information technology risk management*.

Untuk meningkatkan kehandalan manajemen risiko di Perseroan, assesmen dan mitigasi saat ini tidak hanya memandang sisi risiko saja, tapi juga peluang. Dengan adanya assesmen dan mitigasi peluang ini diharapkan perusahaan mampu menangkap peluang-peluang bisnis yang baru dari aktivitasnya selama ini.

Untuk mengetahui cara pengukuran tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko di PT INTI (Persero), maka Bagian Manajemen Risiko mengadakan pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan PT INTI (Persero) dapat melakukan *self assessment maturity level* manajemen risiko.

Implementation of risk assessment and mitigation has been carried out in each division as evidenced by the delivery of the results of mitigation carried out to the Risk Management Section. From the results of monitoring and review conducted on risk management assessment activities on divisions showed that there were several risk profiles whose risk levels fell and rose. Mitigation has been carried out in accordance with the specified time. The mitigation results that have been reported to the Risk Management Section will be reviewed and monitored.

To increase awareness of the risk management process, socialization of risk management to Risk Representatives has been carried out in each Division followed by an evaluation of risk management. In addition, risk management socialization specifically for information technology risk management has also been carried out.

To improve the reliability of risk management in the Company, current assessment and mitigation do not only look at the risk side but also the opportunity. With this assessment and mitigation opportunity, the company is expected to be able to capture new business opportunities from its activities so far.

To find out how to measure the maturity level of the application of risk management at PT INTI (Persero), the Risk Management Section conducts training. With this training, PT INTI (Persero) is expected to be able to conduct a self-assessment of risk management maturity level.

Telah dilakukan penyusunan dan sosialisasi kepada Tim Risk Representative untuk prosedur pengukuran maturity level implementasi manajemen risiko.

Dengan pemahaman yang baik terhadap pengelolaan risiko, unit-unit kerja di Perseroan melakukan pengelolaan risiko terhadap kegiatan operasional dan bisnisnya dalam tahapan-tahapan berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pada tujuan (goal) untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan pendekatan proses untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat pencapaian proses divisi.

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Review dokumen
2. Curah pendapat
3. Workshop yang difasilitasi
4. Diskusi dengan kelompok terpilih
5. Wawancara
6. Pengamatan (observasi)
7. Analisis arus proses bisnis
8. Analisis pohon peristiwa
9. Diagram tulang ikan
10. Penggolongan model risiko bisnis

Analisis Risiko

Dilakukan untuk menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Hasil Analisis Risiko akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko. Suatu kejadian dapat mempunyai dampak yang beragam dan dapat mempengaruhi berbagai macam sasaran divisi.

Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan indikasi umum tingkat kegawatan risiko. Setelah itu melakukan analisis yang lebih spesifik dan secara kuantitatif.

Evaluasi Risiko

Dilakukan untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko dengan membandingkan tingkatan suatu risiko dengan standar atau target tingkatan risiko yang ditentukan sebelumnya, atau kriteria lain yang ditetapkan.

Evaluasi risiko dilakukan dengan terlebih dahulu

The preparation and socialization have been carried out to the Risk Representative Team for procedures for measuring the maturity level of risk management implementation.

With a good understanding of risk management, every unit in the Company has been managing its risks to operational and business activities in the following steps:

Risk Identification

Risk identification is carried out with 2 (two) approaches, those are goal-approach to identify events that can hamper the achievement of the objectives and process-approaches to identify events that may hinder the achievement of the processes in divisions.

The techniques used in identifying Risk are as follows:

1. Document review
2. Brainstroming
3. Facilitated workshop
4. Focus group discussion
5. Interview
6. Observation
7. Analysis the business process flow
8. Analysis tree of events
9. Fish bone diagram
10. Grouping of business risk models

Risk Analysis

Conducted to analyze the source and trigger of the occurrence of risk, its positive and negative impacts, and the possibility of occurrence. Risks are analyzed by determining the impact and likelihood of risk occurring.

Risk Analysis results will be inputed to risk evaluation for decision making process on risk treatment. An event may have diverse impacts and may affect a wide range of division targets.

The analysis can be done quantitatively or qualitatively. Qualitative analysis is done first to obtain a general indication of risk urgency level, and a more specific quantitative analysis is done afterward.

Risk Evaluation

Done to determine risk management priority by comparing the level of a risk to a predetermined standard or target level of risk, or other specified criteria.

Risk evaluation is performed by first understanding the risk



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

memahami kriteria risiko untuk dilanjutkan dengan evaluasi terhadap penyebab dan konsekuensi atas peristiwa risiko yang teridentifikasi. Hasil dari evaluasi risiko adalah menentukan risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas implementasi perlakuan risiko atau daftar prioritas risiko untuk tindakan lebih lanjut.

Mitigasi Risiko

Dilakukan untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko.

Mitigasi Risiko yang akan diberlakukan di Perseroan adalah:

1. Menghindari
2. Menerima
3. Memitigasi atau Dikurangi
4. Transfer

Pemantauan dan Pengkajian

Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan bisnis masih relevan terhadap rencana awal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *likelihood* dan *consequence* suatu *outcome* dapat saja berubah, seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan biaya atas berbagai opsi mitigasi risiko.

Oleh karena itu, pengulangan siklus proses manajemen risiko secara reguler terus dilakukan. Tingkat risiko dan efektivitas tindakan pengendalian dipantau secara bulanan bersamaan dengan proses asesmen risiko dan penyampaian profil manajemen risiko untuk masing-masing divisi atau unit bisnis. Pengkajian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana mitigasi risiko. Divisi yang menangani fungsi manajemen risiko menjadi fasilitator dalam tahapan pengkajian ini. Risiko-risiko yang telah dipaparkan akan dipilih dan disaring untuk mendapatkan daftar yang menjadi perhatian utama Perseroan.

Audit Berbasis Risiko

Penerapan manajemen risiko dari masing-masing divisi, khususnya pengelolaan terhadap risiko yang telah ditetapkan sebagai risiko-risiko terpilih, akan menjadi obyek pemeriksaan oleh fungsi internal auditor dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan pengelolaan risiko di Perseroan telah dilakukan dengan efektif.

Laporan hasil audit penerapan pengelolaan risiko disampaikan kepada Direksi oleh fungsi auditor internal sebagai bagian dari pelaksana pengawasan dan pengendalian intern. Selain itu, dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), laporan

criteria to be followed by an evaluation of the causes and consequences of identified risk events. The outcome of a risk evaluation is to determine which risks require treatment and how priorities for the implementation of risk treatment or risk priority list for further action.

Risk Mitigation

Conducted to select options that can reduce or eliminate the impact and the likelihood of risk occurring.

Risk Mitigation to be applied in the Company are:

1. Avoid
2. Accept
3. Mitigate or Reduce
4. Transfer

Monitoring and Review

Continuous monitoring is conducted to ensure that operational and business activities are still relevant to the original plan. Factors that may affect the likelihood and consequence of an outcome may change, as do the factors affecting the suitability and cost of various risk mitigation options.

Therefore, regular repetition of the risk management process cycle continues. The level of risk and effectiveness of its control are monitored monthly along with the risk assessment process and the identification of risk management profiles for each division or business unit. Assessment is an integral part of risk mitigation plan. Unit that handles the risk management function becomes the facilitator in this stage of assessment. The risks that have been presented will be selected and screened to obtain a list of risks that are of major concern to the Company.

Risk-Based Audit

Implementation of Risk Management of each Division, in particular the management of selected defined risks, shall be the object of examination by the internal auditor in the Annual Audit Work Program. This is done to ensure that the implementation of risk management in the Company has been carried out effectively.

The audit report on the implementation of risk management is submitted to the Board of Directors by internal auditor as part of the internal control and oversight. In addition, as part of Good Corporate Governance (GCG) practises, report on the

hasil penerapan manajemen risiko juga disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui laporan manajemen bulanan dan triwulanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-I/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik.

Upaya Pengelolaan Risiko

Profil risiko yang dihasilkan dari proses asesmen risiko diklasifikasikan sebagai profil risiko dengan tingkat risiko sangat rendah, rendah, moderat, tinggi, dan sangat tinggi.

Sosialisasi pada Risk Representative untuk Identifikasi dan Monitoring Evaluasi Manajemen Risiko target Triwulan IV serta Membuat Konsep Reward & Punishment Risk Management.

Pelaksanaan review risk management di PT INTI (Persero) pada tahun 2021 diuraikan dalam tabel berikut:

implementation of risk management is as well submitted to the Board of Commissioners and Shareholders through monthly and quarterly management report as mandated by Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-I/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation Good Governance of SOEs.

Risk Management Effort

Risk Profile resulting from the risk assessment process is Risk Profile resulting from the risk assessment process is classified as a risk profile with very low, low, moderate, high, and very high.

Socialization to Risk Representatives for Identification and Monitoring of Risk Management Evaluation targets for the Fourth Quarter and also Making the Concept of Reward & Punishment Risk Management.

The implementation of the risk management review at PT INTI (Persero) in 2021 is described in the following table:

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Review Risk Management <i>Risk Management Review</i>				Catatan <i>Notes</i>
		Triwulan 1 <i>Quarter 1</i>	Triwulan 2 <i>Quarter 2</i>	Triwulan 3 <i>Quarter 3</i>	Triwulan 4 <i>Quarter 4</i>	
1	Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis <i>Corporate Secretary and Strategic Planning</i>	√	√	√	√	-
2	Hukum dan Manajemen Risiko <i>Legal and Risk Management</i>	√	√	√	√	-
3	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Control Unit</i>	√	√	√	√	-
4	Keuangan dan Akuntansi <i>Finance and Accounting</i>	√	√	√	√	-
5	Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Human Resource Management and General</i>	√	√	√	√	-
6	Pengadaan dan Mitra Usaha <i>Procurement and Business Partners</i>	×	×	√	√	-
7	Pemasaran dan Penjualan <i>Marketing and Sales</i>	√	√	√	√	-
8	Produksi dan Layanan Terkelola <i>Production and Managed Service</i>	√	√	×	√	-
9	Manajemen Proyek dan Jaminan Kualitas <i>Project Management and Quality Assurance</i>	√	√	√	√	-
10	Pengembangan Produk dan Solusi <i>Product Development and Solutions</i>	√	√	√	√	Sebagian belum dilaporkan terkait nilai sisa dari mitigasi risiko <i>Some have not been reported regarding the residual value of risk mitigation</i>

Keterangan :

√ : Sudah Dilaksanakan/Sudah Mengumpulkan (*Already Done/Already Collected*)
X : Belum Melaporkan (*Not Reported*)



Manajemen Risiko Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021

Risk Management in Company Work Plan and Budget 2021

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan memitigasi risiko baik kegiatan operasional maupun proyek. Mitigasi risiko yang langsung dengan strategi perusahaan di tahun 2021 dituangkan ke dalam Mitigasi Risiko Key Performance Indicator (KPI) sebagai berikut:

In carrying out its business, the company mitigates risks in both operational activities and projects. Risk mitigation that is directly related to the company's strategy in 2021 is stated in the Risk Mitigation Key Performance Indicator (KPI) as follows:

Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i>						Analisis Risiko Saat Ini <i>Current Risk Analysis</i>						Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i>		Analisis Risiko Residual <i>Residual Risk Analysis</i>				
No.	Target Key Performance Indicator (KPI) Targets	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Kategori Risiko <i>Risk Categories</i>	Penyebab Risiko <i>Risk Causes</i>	Dampak Risiko <i>Risk Impact</i>	Efektivitas Kontrol <i>Control Effectiveness</i>	Tingkat Kemungkinan <i>Likelihood Level</i>	Tingkat Dampak <i>Impact Level</i>	Level	(Rendah/Menengah/ Tinggi/Extreme) <i>(Low/Medium/High/Extreme)</i>	Kuantifikasi <i>Quantification</i>	Rencana Penanganan Risiko <i>Risk Description</i>	Target Waktu <i>Target Time</i>	Tingkat Kemungkinan <i>Likelihood Level</i>	Target Tingkat Dampak <i>Impact Level</i>	Level	(Rendah/Menengah/ Tinggi/Extreme) <i>(Low/Medium/High/Extreme)</i>	Kuantifikasi <i>Quantification</i>

Financial & Social																			
1	Debt to EBITDA	Tingginya nilai utang usaha yang belum dapat dilunasi dari margin Perusahaan High debt value that cannot be paid from the company's margin	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	Kesulitan dalam likuiditas Difficulty in liquidity	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan) Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report) 2. Rapat Direksi mingguan membahas performansi mingguan untuk segera mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proyek, sehingga sedari awal dapat dilakukan mitigasi risiko yang tepat. Weekly Board of Directors meeting to discuss weekly performance to immediately identify obstacles that hinder project implementation, so that appropriate risk mitigation can be carried out from the start. 3. Melakukan upaya perolehan investor pendanaan dengan pola yang menguntungkan (seperti contoh: back to back), sehingga dapat mengoptimalkan utang produktif yang akan diperoleh, dengan bunga yang wajar/kompetitif, sehingga dapat menghasilkan EBITDA yang baik. Making efforts to acquire investors with a profitable pattern (such as back to back), so as to optimize the productive debt to be obtained, with reasonable/competitive interest, so as to generate good EBITDA.	Effektif	4	3	Signifikan	Tinggi	-	Pengajuan swap utang dari Telkom ke Pemegang Saham Debt swap proposal from Telkom to shareholders	Setiap Bulan	3	3	Signifikan	Tinggi	-

2	Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	Risiko kerugian atas proyek-proyek yang dijalankan oleh Perusahaan <i>Risk of loss on projects carried out by the company</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Nilai Aset perusahaan berkurang <i>The value of the company's assets is reduced</i>	1. Setiap bulan, perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan) <i>Every month, the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report)</i> 2. Rapat Direksi mingguan membahas performansi mingguan untuk segera mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proyek, sehingga sedari awal dapat dilakukan mitigasi risiko yang tepat. <i>Weekly Board of Directors meeting to discuss weekly performance to immediately identify obstacles that hinder project implementation, so that appropriate risk mitigation can be carried out from the start.</i>	Effective	5	2	Significant	Tinggi <i>High</i>	-	Negosiasi tingkat suku bunga <i>Negotiate interest rate</i>	Setiap triwulan <i>Every quarter</i>	3	2	Medium	Moderate	-
3	Debt to Equity Swap (Telkom)	Tingginya nilai utang usaha yang belum dapat dilunasi dari margin Perusahaan <i>High debt value that cannot be paid from the company's margin</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Beban utang semakin besar <i>Company debt is getting bigger</i>	1. Perusahaan melakukan upaya melakukan pembayaran melalui penyisihan sebagian dari hasil bisnis dengan Telkom. <i>The Company makes efforts to make payments through an allowance of a portion of the business proceeds with Telkom.</i> 2. Melakukan pendekatan dengan Telkom untuk memperoleh pekerjaan lainnya, sehingga pembayaran utang tersebut dapat dilakukan melalui persentase keuntungan yang diperoleh. <i>Approaching with Telkom to get another job so that the debt payment can be made through the percentage of profit earned.</i> 3. Melakukan kajian dan pembahasan kepada PT Telkom terkait dengan arahan kuasa pemegang saham untuk rencana Debt to Equity Swap <i>Conducting study and discuss with PT Telkom regarding direction from the proxy of shareholder for Debt Equity Swap planning</i>	Effective	4	3	Significant	Tinggi <i>High</i>	-	Pengajuan swap utang dari Telkom ke Pemegang Saham <i>Debt swap proposal from Telkom to shareholders</i>	Setiap Bulan <i>Every Month</i>	3	3	Significant	Tinggi <i>High</i>	-

4	Tingginya nilai uang usaha yang belum dapat dilunasi dari margin Perusahaan <i>High debt value that cannot be paid from the company's margin</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Beban utang semakin besar <i>Company debt is getting bigger</i>	Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan <i>(Laporan Manajemen Perusahaan)</i> <i>Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report)</i>	Efektif <i>Effective</i>	4	3	Signifikan <i>Significant</i>	Tinggi <i>High</i>	-	Alokasi dana untuk pembayaran utang <i>Fund allocation for debt repayment</i>	Setiap Bulan <i>Every Month</i>	3	3	Signifikan <i>Significant</i>	Tinggi <i>High</i>	-
Inovasi Bisnis (Loan Settlement) <i>Business Innovation (Loan Settlement)</i>																		
1	Sulit menemukan investor yang tertarik <i>Difficult to find interested investors</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Risiko tidak terjadi pemindahan atau settlement <i>Risk of no transfer or settlement</i>	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). <i>Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report)</i> 2. Perusahaan melakukan pendekatan ke pihak perbankan sebagai kreditor utama Perusahaan, saat ini opsi loan settlement sedang dilakukan proses peninjauan. <i>The company approached the bank as the main creditor of the company, currently the loan settlement option is being explored.</i> 3. Opsi lainnya yang dapat dilakukan adalah asset settlement, namun demikian hal tersebut prosesnya cukup panjang dan penawaran harga diawatirkan tidak sesuai dengan nilai pasar. <i>Another option that can be done is asset settlement, however, this process is quite long and it is feared that the price offer will not match the market value.</i>	Efektif <i>Effective</i>	3	3	Signifikan <i>Significant</i>	Tinggi <i>High</i>	-	1. Strategi perusahaan dengan opsi lainnya adalah asset settlement atas jaminan pinjaman kredit Bank Mandiri (BMR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun demikian, hal tersebut prosesnya cukup panjang dan penawaran harga diawatirkan tidak sesuai dengan nilai pasar. <i>The company's strategy with another option is asset settlement for loan guarantees from Bank Mandiri (BMR) and Bank Rakyat Indonesia (BRI), however, the process is quite long and the bidding price is feared not to match the market value.</i> 2. Perusahaan mengajukan negosiasi nominal pembayaran pokok pinjaman dan mengajukan grace period atas pembayaran pokok pinjaman sesuai dengan kemampuan perusahaan. <i>The company proposes to negotiate the nominal payment of the loan principal, and proposes a grace period for the payment of the loan principal according to the company's ability.</i>	2021	3	2	Medium	Moderate	-

[illegible]

3	Utang-utang lainnya (Dana Pensiun atau DAFN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Widya Bhakti INTI atau WBI)	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	1. Beban Utang Perusahaan semakin besar Company debt is getting bigger 2. Denda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penalties from Social Security Administrator	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report) 2. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh Dana Talangan, diantaranya kepada kuasa Pemegang Saham dan Pemegang Saham. Make efforts to obtain bailout funds, including to the proxies of the Shareholders and Shareholders.	Effektif Effective	4	3	Signifikan Significant	Tinggi High	-	Alokasi dana untuk pembayaran utang Fund allocation for debt repayment	Setiap Bulan Every Month	3	2	Medium	Moderate
4	Utang Pajak Tax Debt	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	1. Denda Pajak Tax penalties 2. Beban Utang Perusahaan semakin besar Company debt is getting bigger 3. Adanya pemblokiran rekening pada rekening milik perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi There is a block on the accounts belonging to the Company the Board of Commissioners, and the Board of Directors.	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report) 2. Perusahaan melakukan cash flow management dari restrukturisasi utang pajak, sehingga sebagian besar utang pajak akan dilunasi dari hasil restrukturisasi tersebut. The company manages cash flow from the restructuring of tax debts, so that most of the tax payables will be paid off from the restructuring.	Effektif Effective	3	3	Signifikan Significant	Tinggi High	-	Mengalokasikan dana setiap bulannya untuk pembayaran pajak Allocate funds every month for tax payments	Perbulan Per month	3	2	Medium	Moderate

Lembaga Keuangan Non Bank (PT Hewlett Packard Finance Indonesia) Non Bank Financial Institutions (PT Hewlett Packard Finance Indonesia)	5	Nilai utang yang cukup besar The value of debt is quite large	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	1. Beban utang Perusahaan semakin besar. Company debt is getting bigger. 2. Adanya gugatan perdata. There is a civil lawsuit.	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report). 2. Melakukan upaya-upaya pendekatan kepada mitra pemasok untuk melakukan restrukturisasi utang dan hair cut nilai utang, dengan masa cicilan selama 4 (empat) tahun. Make efforts to approach supplier partners to restructure debt and hair cut the value of debt, with an installment period of 4 (four) years. 3. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh Dana Talangan, diantaranya kepada kuasa Pemegang Saham dan Pemegang Saham. Make efforts to obtain bailout funds, including to the proxies of the Shareholders and Shareholders.	Effektif Effective	3	4	Significant	Tinggi High	-	1. Mengalokasikan free cash untuk pembayaran pokok pinjaman dari cash proyek yang dikerjakan. Allocate free cash for payment of loan principal from cash projects being worked on. 2. Mengalokasikan sebagian cash in yang berasal dari Penerimaan MBK Grup ataupun Tan Heng Lok. Allocate some of the cash in from MBK Group Receipts or Tan Heng Lok.	Sesuai penerimaan cash in According to cash in receipts	2	3	Medium	Moderate	-
Utang Karyawan & Pensiun Employee and Pension Payables	6	Nilai utang yang cukup besar The value of debt is quite large	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	1. Beban utang Perusahaan semakin besar. Company debt is getting bigger. 2. Semangat kerja karyawan berkurang Reduced employee work ethic. 3. Banyak karyawan yang akan resign. Many employees will resign.	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report). 2. Perusahaan melakukan cash flow management dimana jika dana keuangan tercukupi, akan dialokasikan untuk pelunasan kewajiban-kewajiban kepada karyawan & pensiunan, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan keberlangsungan Perusahaan. The Company manages cash flow which, if sufficient financial funds, will be allocated to pay off obligations to employees & retirees, while taking into account the priorities and sustainability of the Company. 3. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh Dana Talangan, diantaranya kepada kuasa Pemegang Saham dan Pemegang Saham. Make efforts to obtain bailout funds, including to the proxies of the Shareholders and Shareholders.	Effektif Effective	3	4	Significant	Tinggi High	-	Alokasi dana untuk pembayaran utang Allocation of funds for debt repayment	Setiap Bulan Every Month	3	2	Medium	Moderate	-

7	Non Core Asset Settlement	Kinerja Finansial dan Cost of Money dari anak perusahaan yang buruk. <i>Poor financial performance and cost of money subsidiaries.</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Akan menjadi beban perusahaan selama belum terjadi perbaikan. <i>Will be a burden on the company as long as there is no improvement.</i>	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). <i>Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report).</i> 2. Melakukan penjualan persediaan non produktif, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. <i>Conduct sales of non-productive inventories, with reference to applicable regulations by always prioritizing the precautionary principle.</i>	Efektif	3	3	Signifikan	Tinggi	-	Penjualan dengan cara lelang dan menggunakan appraisal <i>Sales by auction and using appraisal</i>	Setiap Bulan <i>Every Month</i>	2	3	Medium	Moderate
8	Working Capital	Suku bunga yang fluktuatif mengakibatkan ketidakpastian perhitungan nilai <i>Fluctuating interest rates have an impact on the uncertainty of calculating the value</i>	Risiko Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting Risk</i>	Controllable	Tidak mendapatkan pinjaman dari Bank <i>Not getting a loan from the bank</i>	1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). <i>Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report).</i> 2. Melakukan restrukturisasi utang bank, sehingga nilai bunga yang efektif berlaku menjadi lebih rendah dari pengenaan semula atau awal. <i>Restructuring bank debt, so that the effective interest rate becomes lower than the original or initial imposition.</i>	Efektif	3	4	Signifikan	Tinggi	-	1. Atas pinjaman eksisting khusus pinjaman non produktif segera dilakukan loan settlement dengan bunga yang lebih baik ataupun asset settlement. <i>For existing loans specifically for non-productive loans, asset settlement or loan settlements with better interest will be immediately carried out.</i> 2. Menyesuaikan tingkat suku bunga pinjaman baik dari lembaga perbankan, lembaga non perbankan ataupun investor dengan profil proyek yang diperoleh oleh perusahaan <i>Adjusting the interest rate on loans from banking institutions, non-banking institutions or investors with the project profile obtained by the company.</i>	Setiap triwulan <i>Every quarter</i>	3	2	Medium	Moderate

Persetujuan atas mekanisme budget dan cash control dari Pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS) Approval of the budget and cash control mechanism from shareholders (General Meeting of Shareholders)																			
Perusahaan memiliki saldo utang yang cukup besar, dengan tingkat pembayaran yang tidak terlalu baik. The company has a fairly large debt balance, with a payment rate that is not very good.	1. Mekanisme yang diajukan belum sesuai dengan keinginan Pemegang Saham; The proposed mechanism is not in accordance with the wishes of the Shareholders	2. Lamanya proses persetujuan Long approval process	Risiko Keuangan dan Akuntansi Financial and Accounting Risk	Controllable	Target waktu tidak tercapai Target time is not reached	1. Menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh unit Keuangan dan Akuntansi Using policies that have been set by the Finance and Accounting unit			2. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait Coordination and communication with related parties			3. Menerapkan kebijakan batas kewenangan terkait dengan kegiatan anggaran Implementing a policy of limiting authority related to budget activities							
						Effective	2	3	Medium	Moderate									
						1. Setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi performansi baik perusahaan maupun anak perusahaan melalui laporan manajemen perusahaan bulanan (Laporan Manajemen Perusahaan). Every month the company evaluates the performance of both the company and its subsidiaries through monthly company management reports (Company Management Report).			2. Melakukan upaya-upaya untuk penjaminan aset Perusahaan untuk memperoleh Kredit Modal Kerja (KMK) dari lembaga keuangan. Make efforts to guarantee the Company's assets to obtain Working Capital Credit from financial institutions.			3. Mencari investor melalui penjaminan proyek-proyek yang sedang dan potensi akan diperoleh oleh Perusahaan, dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Looking for investors through guaranteeing projects that are currently and potential to be obtained by the Company, while still referring to the applicable regulations.			Effective	3	4	Significant	-

Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership																		
1	New Market Penetration Telkom Project	Size dari Telkom yang masih kecil Project size from Telkom which is still small	Risiko Bisnis Business Risk	Controllable	Pencapaian perusahaan berkurang atau tidak tercapai The achievement of the company's income is reduced or not achieved	1. Maintain komunikasi dengan pihak Telkom. Maintain communication with Telkom. 2. Memaksimalkan project dari Telkom untuk mendapatkan project kembali. Maximizing the project from Telkom to get the project back.	Efektif Effective	4	5	Sangat Signifikan Severe	Ekstrem Extreme	-	1. Berpartner dengan Technology Partnership Partner with Technology Partnership 2. Komunikasi antara Senior Leader PT INTI dan PT Telkom untuk menjaga hubungan kerja dari PT INTI dan Telkom Communication between the Senior leaders of PT INTI and PT Telkom to maintain the working relationship of PT INTI and Telkom	3	4	Signifikan Significant	Tinggi High	-
2	New Market Penetration Government Project	Size dari segment government yang masih kecil Project size from Government which is still small	Risiko Bisnis Business Risk	Anggaran Dasar masih belum diandatangani oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (yang akan kepemilikan nyata/ SKN masih belum tercapai/ masih) The primary budget have not yet been agreed by the Ministry of State-Owned Enterprises Uncontrollable	Tidak dapat mengambil porsi di dalam government project Unable to take part in government project	Perubahan Anggaran Dasar Amendment of Primary Budget	Efektif Effective	4	5	Sangat Signifikan Severe	Ekstrem Extreme	-	1. Bernitra dengan perusahaan dan technology owner yang sudah exist di Industri Pertahanan Partnering with companies and technology owners that already exist in the Defense Industry. 2. Mendorong kementerian untuk segera menandatangani Anggaran Dasar PT INTI di kementerian. Encouraging ministers to immediately sign the Primary Budget of PT INTI. 3. Membuat proyek sesuai dengan kompetensi perusahaan. Make a project according to the company's competence. 4. Perpanjangan sertifikasi kompetensi Perusahaan Extend Company competency certification.	3	4	Signifikan Significant	Tinggi High	-

	Setiap Bulan Every Month	3	4	Signifikan Significant	Tinggi High
1. Bermitra dengan perusahaan dan technology owner yang sudah exist di Industri Pertahanan <i>Partnering with companies and technology owners that already exist in the Defense Industry.</i>					
2. Mendorong kementerian untuk segera menandatangani Anggaran Dasar PT INTI di kementerian. <i>Encouraging ministries to immediately sign the Primary Budget of PT INTI.</i>					
3. Membuat proyek sesuai dengan kompetensi perusahaan. <i>Make a project according to the company's competence.</i>					
4. Perpanjangan sertifikasi kompetensi Perusahaan <i>Extend Company competency certification.</i>					

Investasi Investment	1	Joint Venture/Kerja Sama Operasi	Tidak tercapai kesepakatan antara dua belah pihak No agreement was reached between the two parties	Risiko Bisnis Business Risk	Controllable	Risiko tujuan Joint Venture /Kerja Sama Operasi tidak tercapai The risk of the Joint Venture objectives not being achieved	Tim Joint Venture / Kerja Sama Operasi, penyusunan Timeline Joint Venture / Kerja Sama Operasi Joint Venture team, compiling a joint venture timeline	Efektif Effective	4	5	Sangat Signifikan Severe	Ekstrem Extreme	Melakukan komunikasi yang intens dengan pihak yang terkait Intense communication with related parties	Triwulan III - 2021	3	4	Signifikan Significant	Tinggi High	Program turnover PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tidak tercapai. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) turnover program was not achieved. Kapasitas produksi PT NNTI tidak dimanfaatkan. PT NNTI production capacity is not utilized. target keuangan perusahaan jangka panjang tidak tercapai. the company's long-term financial targets are not achieved.
Investasi Investment	1	Joint Venture/Kerja Sama Operasi	Tidak tercapai kesepakatan antara dua belah pihak No agreement was reached between the two parties	Risiko Bisnis Business Risk	Controllable	Risiko tujuan Joint Venture /Kerja Sama Operasi tidak tercapai The risk of the Joint Venture objectives not being achieved	Tim Joint Venture / Kerja Sama Operasi, penyusunan Timeline Joint Venture / Kerja Sama Operasi Joint Venture team, compiling a joint venture timeline	Efektif Effective	4	5	Sangat Signifikan Severe	Ekstrem Extreme	Melakukan komunikasi yang intens dengan pihak yang terkait Intense communication with related parties	Triwulan III - 2021	3	4	Signifikan Significant	Tinggi High	Program turnover PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tidak tercapai. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) turnover program was not achieved. Kapasitas produksi PT NNTI tidak dimanfaatkan. PT NNTI production capacity is not utilized. target keuangan perusahaan jangka panjang tidak tercapai. the company's long-term financial targets are not achieved.

Karyawan Employee	Human Resource Efficiency (revenue per karyawan) (revenue per employee)	Revenue perusahaan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah karyawan. The company's revenue is not in accordance with the number of employees.	Risiko Sumber Daya Manusia Human Resources Risk	Controllable	Risiko beban tenaga kerja di induk berat The risk of labor burden in the parent company is heavy	1. Peningkatan produktivitas karyawan melalui: program pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang marketing, dan penyusunan tim matriks lintas bagian. Increasing employees productivity through: Human Resources development programs, especially in the field of marketing, and the preparation of cross-sectional matrix teams. 2. Job Matrix Job Matrix	Efektif Effective	2	3	Medium	Moderate	-	Evaluasi man power planning setiap bulan. Evaluate man power planning every month.	Setiap Bulan Every Month	3	2	Rendah Low	Rendah Low	-
1																			
2	Human Resource Allocation Plan	Jumlah tenaga kerja yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan tenaga kerja Joint Venture. The number of workers cannot accommodate the needs of Joint Venture workers.	Risiko Sumber Daya Manusia Human Resources Risk	Controllable	Risiko kontribusi karyawan terhadap Joint Venture tidak tercapai. The risk of employee contributions to the Joint Venture (JV) not being achieved.	Saat proses peritisan Joint Venture, menggunakan resource lintas Divisi, untuk memperkaya cross function. Apabila Joint Venture sudah dapat beroperasi, maka dialokasikan resource yang berdedikasi pada Joint Venture tersebut. During the Joint Venture pioneering process, the Company uses resources from across divisions for enrich cross functions. If the Joint Venture is operational, then dedicated resources are allocated to the Joint Venture.	Efektif Effective	3	3	Significant	High	-	Evaluasi man power planning setiap bulan. Evaluate man power planning every month	Setiap Bulan Every Month	3	2	Medium	Moderate	-

Matriks risiko menggambarkan level risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Level risiko perusahaan dapat diperoleh dengan mengalikan nilai kemungkinan dengan nilai konsekuensi.

The risk matrix describes the level of risk that may be faced by the company. The company's risk level can be obtained by multiplying the likelihood value by the consequence value.

		Review Risk Management <i>Risk Management Review</i>				
		Tidak Signifikan <i>Insignificant</i>	Minor	Medium	Signifikan <i>Significant</i>	Sangat Signifikan <i>Severe</i>
Kemungkinan <i>Likelihood</i>	Score	1	2	3	4	5
	5	5 Tinggi <i>High</i>	10 Tinggi <i>High</i>	15 Ekstrem <i>Extreme</i>	20 Ekstrem <i>Extreme</i>	25 Ekstrem <i>Extreme</i>
	4	4 Moderate	8 Tinggi <i>High</i>	12 Tinggi <i>High</i>	16 Ekstrem <i>Extreme</i>	20 Ekstrem <i>Extreme</i>
	3	3 Rendah <i>Low</i>	6 Moderate	9 Tinggi <i>High</i>	12 Ekstrem <i>Extreme</i>	15 Ekstrem <i>Extreme</i>
	2	2 Rendah <i>Low</i>	4 Rendah <i>Low</i>	6 Moderate	8 Tinggi <i>High</i>	10 Ekstrem <i>Extreme</i>
	1	1 Rendah <i>Low</i>	2 Rendah <i>Low</i>	3 Moderate	4 Tinggi <i>High</i>	5 Tinggi <i>High</i>
		Sangat Besar <i>Almost Certain</i>	Besar <i>Likely</i>	Sedang <i>Possible</i>	Kecil <i>Unlikely</i>	Sangat Kecil <i>Rare</i>

Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) untuk analisis risiko pada profil risiko perusahaan 2021 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

The criteria for the likelihood of risk for risk analysis in the 2021 company risk profile are shown in the following table:

		Risk Parameter	
		Probabilitas Probability	Deskripsi Kualitatif Qualitative Description
Tingkat Kemungkinan Likelihood	5 Sangat Besar Almost Certain	Dapat terjadi pada banyak keadaan atau probabilitas 80% < s.d. 100% May occurs in many circumstances or probability 80% < until 100%	Hampir pasti terjadi Almost certainly occur
	4 Besar Likely	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan atau probabilitas 60% < s.d. < 80% Will occurs in many circumstances/probability 60% < until < 80%	Besar kemungkinan terjadi Likely occur
	3 Sedang Possible	Dapat terjadi pada beberapa waktu atau probabilitas 40% < s.d. < 60% Occurs in some time or probability 40% < until < 60%	Dapat terjadi, namun juga tidak 50:50 May occur, but it doesn't 50:50
	2 Kecil Unlikely	Mungkin terjadi pada beberapa waktu atau probabilitas 20% < s.d. < 40% May occur at some time or probability 20% < until < 40%	Kemungkinan Kecil Terjadi Unlikely to occur, but possible
	1 Sangat Kecil Rare	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal atau probabilitas < 20% May occur only in abnormal conditions or probability < 20%	Hampir Tidak Mungkin Terjadi So unlikely to occur



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Kriteria dampak risiko untuk analisis risiko pada profil risiko perusahaan tahun 2021 dijabarkan dalam tabel berikut:

The risk impact criteria for risk analysis on the company's risk profile in 2021 are described in the following table:

No.	Kategori/ Parameter Risiko	Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
1	Keuangan <i>Financial</i>	Kerugian finansial kecil, berdampak tidak signifikan pada tujuan Perusahaan. <i>Minor financial loss, insignificant impact on the Company's objectives.</i>	Kerugian finansial sedang, berdampak pada sebagian kecil tujuan Perusahaan. <i>Medium financial loss, impact on a small part of the Company's objectives.</i>	Kerugian finansial cukup besar, berdampak cukup luas pada tujuan Perusahaan. <i>The financial loss is quite large, have a quite broad impact on the Company's objectives.</i>	Kerugian finansial besar, berdampak luas pada tujuan Perusahaan. <i>The financial loss is large, have a broad impact on the Company's objectives.</i>	Kerugian finansial sangat besar, berdampak sangat luas pada tujuan Perusahaan. <i>Huge financial loss, have a very broad impact on the Company's goals.</i>
2	Deviasi Biaya <i>Cost Deviation</i>	80% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). <i>80% of the Company's Work Plan and Budget.</i>	85% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). <i>85% of the Company's Work Plan and Budget.</i>	90% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). <i>90% of the Company's Work Plan and Budget.</i>	95% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). <i>95% of the Company's Work Plan and Budget.</i>	100% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). <i>100% of the Company's Work Plan and Budget.</i>
3	Deviasi Sasaran Kerja <i>Key Performance Indicator Deviation</i>	Terjadi deviasi yang sangat kecil $80\% < X \leq 100\%$ <i>There is a very small deviation $80\% < X \leq 100\%$</i>	Terjadi deviasi yang kecil $60\% < X \leq 80\%$ <i>There is a small deviation $60\% < X \leq 80\%$</i>	Terjadi deviasi sebesar sekitar setengah dari sasaran $40\% < X \leq 60\%$ <i>There is a deviation of about half of the target $40\% < X \leq 60\%$</i>	Terjadi deviasi besar $20\% < X \leq 40\%$ <i>There is a large deviation $20\% < X \leq 40\%$</i>	Terjadi deviasi sangat besar atau kegagalan total $\leq 20\%$ <i>There is a very large deviation or a complete failure $\leq 20\%$</i>
4	Pelanggaran Prosedur Lingkungan <i>Environmental Procedure Violation</i>	Tidak menimbulkan gangguan yang berarti. <i>Does not cause significant disturbance.</i>	Menimbulkan gangguan yang berarti terhadap lingkungan di dalam area operasi Perusahaan. <i>Causing significant disturbance to the environment within the Company's operational areas.</i>	Menimbulkan gangguan yang berarti terhadap lingkungan di sekitar (di luar) area operasi Perusahaan. <i>Cause significant disturbance to the environment around (outside) the Company's operational area.</i>	Menimbulkan gangguan yang berarti terhadap lingkungan di sekitar area operasi Perusahaan yang mengakibatkan adanya protes atau teguran dari pihak eksternal. <i>Cause significant disturbance to the environment around the operating area Companies that cause protests or warnings from external parties.</i>	Menimbulkan gangguan yang berarti terhadap lingkungan di sekitar area operasi Perusahaan yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum. <i>Cause significant disturbance to the environment around the operating area Companies that cause lawsuits.</i>
5	Penyakit dan Kecelakaan Kerja <i>Disease and Work Accident</i>	Tidak perlu perawatan medis. <i>No medical treatment needed.</i>	Terjadi penyakit atau kecelakaan kerja dan dibutuhkan tindakan. <i>An illness or work accident occurs and action is needed.</i>	Memerlukan perawatan medis. <i>Requires medical treatment.</i>	Memerlukan perawatan medis atas penyakit akibat kerja. <i>Requires medical treatment for occupational diseases.</i>	Kematian <i>Mortality</i>
6	Publisitas Buruk <i>Bad Publicity</i>	Di media lokal yang tidak populer. <i>In local media that is not popular.</i>	Di media lokal yang populer, tetapi bukan merupakan berita besar. <i>In the local media which is popular, but not big news.</i>	Di media lokal yang populer dan merupakan berita besar. <i>In the local media which is popular and is big news.</i>	Di media nasional yang populer, tetapi bukan merupakan berita besar. <i>In the national media which is popular, but not big news.</i>	Di media nasional dan merupakan berita besar. <i>In the national media and is big news.</i>
7	Keluhan Pelanggan <i>Customer Complain</i>	Disampaikan secara lisan dalam jumlah kecil. <i>Delivered orally in small quantities.</i>	Disampaikan secara tertulis. <i>Submitted in writing.</i>	Disampaikan secara lisan atau tertulis dan diikuti dengan penyebaran keluhan tersebut. <i>Delivered orally or in writing and followed by the dissemination of the complaint.</i>	Disampaikan secara lisan atau tertulis dan diikuti dengan tuntutan hukum. <i>Delivered orally or in writing and followed by legal claims.</i>	Disampaikan secara lisan atau tertulis dan diikuti dengan tuntutan hukum dan mengancam operasional perusahaan. <i>Delivered orally or in writing and followed by lawsuits and threatens company operations.</i>

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Information and Communication Technology Governance

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat membantu sistem informasi dalam mengintegrasikan seluruh informasi di PT INTI (Persero) secara konsisten dalam mengolah dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat, cepat, dan transparan untuk bisa membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan proses bisnis dan pengambilan keputusan.

Layanan Teknologi Informasi di Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) domain, yaitu:

1. *General Service* merupakan layanan yang diberikan bersifat umum, rutin, dan dapat dimanfaatkan oleh semua pemilik proses bisnis. Layanan ini antara lain:
 - a. Layanan Akses Local Area Network (LAN), Internet, dan Data Center berupa:
 - Domain Name Services
 - Network Automatic Configuring
 - File Transfer Service
 - Electronic Messaging
 - Network Attached Storage
 - Web Hosting
 - Database Storage/Management
 - Data Security
 - b. Layanan Pemeliharaan Alat Olah Data.
2. *Addressed Service* merupakan layanan yang mengacu pada suatu proses bisnis tertentu dan memiliki spesifikasi dan fungsi yang telah dijelaskan oleh Business Process Owner.
 - a. Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP)
 - b. Perusahaan menggunakan Systems Applications and Products (SAP) sebagai aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) yang telah mengimplementasikan modul-modulnya, yaitu Material Management (MM), Finance and Control (FICO), Sales and Distribution (SD), Human Resources (HR), Project System (PS), dan Production Planning (PP).
 - c. Sistem Informasi non-ERP
 - d. Aplikasi yang dibuat berdasarkan permintaan atau kebutuhan dari user, seperti aplikasi Human Capital Information System (HCIS), Employee Self-Service (ESS), dan i-Portal.

Tahun 2021 telah dilakukan pengembangan, penyempurnaan, serta implementasi layanan information technology (IT) dan juga dokumentasi antara lain:

Utilization of Information Technology (IT) can assist information systems in integrating all information at PT INTI consistently in processing and presenting the required information accurately, quickly, and transparently to be able to assist company management in carrying out business processes and decision making.

Information Technology Services in the Company are divided into 2 (two) domains, namely:

1. *General Service* is a service provided that is general, routine and can be used by all business process owners. These services include:
 - a. Local Area Network (LAN), Internet and Data Center access services in the form of:
 - Domain Name Services
 - Network Automatic Configuring
 - File Transfer Service
 - Electronic Messaging
 - Network Attached Storage
 - Web Hosting
 - Database Storage/Management
 - Data Security
 - b. Data Processing Equipment Maintenance Services.
2. *Addressed Service* is a service that refers to a certain business process and has specifications and functions that have been explained by the Business Process Owner.
 - a. Enterprise Resource Planning (ERP) Information System
 - b. The company uses Systems Applications and Products (SAP) as an Enterprise Resource Planning (ERP) application that has implemented the following modules, Material Management (MM), Finance and Control (FICO), Sales and Distribution (SD), Human Resources (HR), Project System (PS), dan Production Planning (PP).
 - c. Non-ERP Information System
 - d. Applications made based on requests or needs from users, such as Human Capital Information System (HCIS), Employee Self-Service (ESS), and i-Portal applications.

In 2021, the development, improvement, and implementation of information technology (IT) services and documentation have been carried out, including:



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

1. Dukungan Implementasi SAP. 2. Dukungan terhadap Proses Bisnis Perseroan. 3. Penyediaan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi. 4. Penyediaan Layanan Sistem Informasi. 5. Penyediaan Layanan Pengelolaan AOD. 6. <i>Supporting Work From Home (WFH).</i> 7. Dukungan keamanan teknologi atau sistem informasi. 8. Penyusunan draft <i>IT Master Plan 2021-2025.</i>	1. <i>SAP Implementation Support.</i> 2. <i>Support for the Company's Business Process.</i> 3. <i>Provision of Information Technology Infrastructure Services.</i> 4. <i>Provision of Information System Services.</i> 5. <i>Provision of AOD Management Services.</i> 6. <i>Supporting Work From Home (WFH).</i> 7. <i>Technology or information system security support.</i> 8. <i>Preparation of the draft of the IT Master Plan 2021-2025.</i>

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

PT INTI (Persero) telah memiliki berbagai kebijakan dalam Pengelolaan Rantai Pasokan yang menjadi acuan utama semua aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses, dan pengendalian dalam pengadaan yang efektif dan efisien.

Kebijakan terkait mengenai Pengadaan Barang dan Jasa terakhir diperbarui pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KN.11 Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 terkait Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh proses eksisting Pengadaan Barang dan Jasa di PT INTI (Persero) dimulai dari proses sourcing, negosiasi, pembelian, hingga pembayaran barang yang sudah terintegrasi dengan *Systems Applications and Products* (SAP), ditambahkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat pengelolaan rantai pasok di PT INTI (Persero) lebih baik yaitu peraturan mengenai pengadaan elektronik (e-procurement).

Saat ini, proses pengembangan terkait penggunaan sistem e-Procurement masih terus dilakukan oleh PT INTI (Persero) dengan target awal penyelesaian dan penggunaan di tahun 2021. Namun, hal tersebut masih terus disempurnakan pengembangannya hingga saat ini, sehingga pada tahun 2022 dapat digunakan sepenuhnya.

Selain itu, dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, PT INTI (Persero) telah menggunakan ISO 14001:2015 yaitu Standar Internasional tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk menciptakan kinerja operasional yang terbebas dari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

PT INTI (Persero) has various policies in Supply Chain Management which are the main reference for all goods and services procurement activities carried out by considering various aspects and carried out through strategies, planning, processes, and controls in effective and efficient procurement.

The related policy regarding the Procurement of Goods and Services was last updated in 2020 through the Decree of the Board of Directors Number KN.11 of 2020 dated April 23, 2020 regarding Guidelines for the Procurement of Company Goods and Services.

Based on this policy, the entire existing process of Procurement of Goods and Services at PT INTI (Persero) starts from the process of sourcing, negotiating, purchasing, to payment for goods that have been integrated with Systems Applications and Products (SAP), added with other policies that make management supply chain at PT INTI (Persero) is better, namely regulations regarding electronic procurement (e-procurement).

Currently, the development process related to the use of the e-Procurement system is still being carried out by PT INTI (Persero) with an initial target of completion and use in 2021. However, it is still being developed until now, so that in 2022 it can be fully used.

In addition, in the management of the Procurement of Goods and Services, PT INTI (Persero) has used ISO 14001:2015 namely International Standards on Environmental Management Systems and ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management Systems to create operational performance that is free from corruption, collusion, and nepotism for each stage of the process of procuring goods and services.

Kode Etik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Code of Conduct in Procurement of Goods and Services

Standar Etika Perusahaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, yakni:

1. Mengikuti seluruh peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan PT INTI (Persero) pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan PT INTI (Persero) dan

The Company's Ethical Standards in the Procurement of Goods and Services are:

1. *Follow all the regulations for the Procurement of Goods and Services set by PT INTI (Persero) when procuring the goods or services needed.*
2. *Using suppliers who meet the qualifications set by PT INTI (Persero) and are consistently able to meet the*

secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas baik barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan representatif.

3. Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari PT INTI (Persero), terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual, dan pembayaran yang tidak wajar.
4. Kedua belah pihak juga saling melakukan upaya evaluasi guna perbaikan dan hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif.

quality standards of both goods and services at competitive and representative costs.

3. Conduct working relationships only with suppliers who comply with applicable laws and regulations and additional requirements from PT INTI (Persero), especially those related to employment, environment, health and safety, intellectual property rights, and unfair payments.
4. Both parties also make mutual evaluation efforts for improvement and a more harmonious and constructive relationship.

Sistem Electronic Procurement (e-Procurement)

Electronic Procurement System (e-Procurement)

Untuk meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien, khususnya dalam praktik pengadaan barang dan jasa dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka PT INTI (Persero) tengah melakukan pengembangan mengenai sistem e-Procurement yang ditargetkan untuk diimplementasikan pada tahun 2022.

Sistem ini dirancang agar proses pengadaan dapat dengan mudah untuk diakses oleh publik dan pihak yang berencana menjalin kemitraan sebagai penyedia barang dan jasa, dengan hanya mendaftar melalui sistem e-Procurement di website Perseroan.

To improve the quality of effective and efficient performance, especially in the practice of procurement of goods and services and to prevent the occurrence of criminal acts such as corruption, collusion, and nepotism, PT INTI (Persero) is developing an e-Procurement system targeted for implemented in 2022.

This system is designed so that the procurement process can be easily accessed by the public and those who plan to establish partnerships as providers of goods and services, by simply registering through the e-Procurement system on the Company's website.



Panitia Lelang

Auction Committee

Pada proses pengadaan barang dan jasa, khususnya metode pelelangan PT INTI (Persero) memiliki tim Panitia Lelang, di mana panitia ini bersifat independen dan memiliki sikap standar etika dalam menjalankan pekerjaannya.

Panitia Lelang dianjurkan memiliki jumlah anggota yang ganjil karena pengambilan keputusan untuk pemenang ditetapkan minimal 3 orang, di mana di dalamnya terdapat ketua, wakil ketua, dan 2 (dua) anggota panitia. Berikut merupakan fungsi Panitia Lelang :

1. Melaksanakan pembukaan lelang dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran calon mitra yang masuk serta dibuatkan daftar hadir dan berita acara pembukaan lelang.
2. Melakukan evaluasi harga atas penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis berdasarkan kriteria atau tata cara yang ditetapkan.
3. Mengevaluasi proses lelang yang gagal setelah diulang dengan pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
4. Menetapkan urutan calon pemenang dan membuat Berita Acara Pembukaan Lelang, serta membuat rekomendasi untuk melakukan negosiasi.
5. Membuat Laporan Hasil Lelang kepada Pejabat Berwenang.
6. Menjadi narasumber dan memberi masukan jika ada sanggahan dari peserta lelang.

In the process of procuring goods and services, especially the auction method, PT INTI (Persero) has a team of Auction Committee, where this committee is independent and has an attitude of ethical standards in carrying out its work.

The Auction Committee is recommended to have an odd number of members because the decision-making for the winner is determined by at least 3 people, which there is a chairman, a vice-chairman, and 2 (two) committee members. The following are the functions of the Auction Committee:

1. *Carry out the opening of the auction followed by an administrative and technical examination of the bid documents of prospective partners who enter and make a list of attendance and minutes of the auction opening.*
2. *To evaluate the price of bids that meet the administrative and technical requirements based on the criteria or procedures established.*
3. *Evaluate failed bidding process after repeated by auction, direct election, or direct appointment.*
4. *Determine the order of potential winners and make Auction Opening Minutes as well as make recommendations for negotiating.*
5. *Making Auction Result Report to the Authorized Official.*
6. *Become a resource person and provide input if there are objections from bidders.*

Tata Cara Pendaftaran Mitra Kerja PT INTI (Persero)

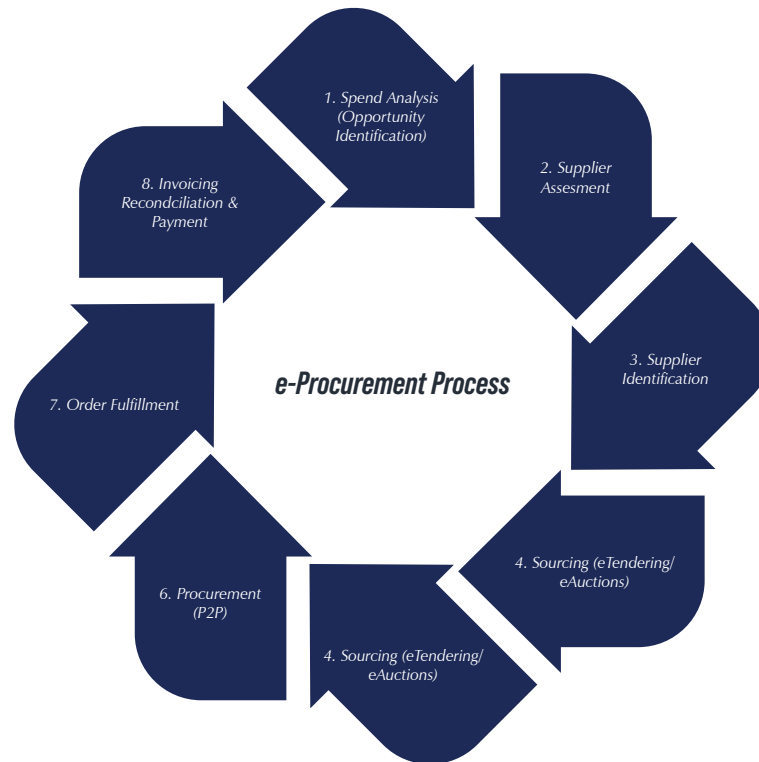
Procedures for Registration of PT INTI (Persero) Work Partners

Tata cara pendaftaran sebagai mitra kerja PT INTI (Persero) dapat dilihat secara langsung pada website Perseroan dengan menghubungi narahubung yang tertera.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di PT INTI (Persero), salah satu metode yang digunakan adalah dengan sistem pemilihan langsung yang sudah dilakukan proses tender terbuka dan *beauty contest* sebelumnya sesuai dengan kebijakan internal Perseroan.

The procedure for registering as a working partner of PT INTI (Persero) can be seen directly on the Company's website by contacting the contact person listed.

In the implementation of the procurement process for goods and services at PT INTI (Persero), one of the methods used is the direct selection system which has been carried out by an open tender process and a beauty contest previously in accordance with the Company's internal policies.



Akuntan Perseroan

Corporate Accountant

PT INTI (Persero) menunjuk Kantor Jasa Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor S-20/DEKOM/INTI/05/2021 dan ditetapkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT INTI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Nomor 1394/PR.04.04/010500/2021 tertanggal 29 Juni 2021.

Audit Fee atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) untuk tahun buku 2021 adalah sebesar Rp338.000.000. Daftar audit fee untuk periode 2013-2021 tertuang dalam tabel berikut:

PT INTI (Persero) assigned the Accountant Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as Public Accountants to audit the Consolidated Financial Statements of PT INTI (Persero) and also Implementation of the company's Micro and Small Business Funding Program for year ended December 31, 2021.

The appointment of this Public Accounting Firm is carried out by the Board of Commissioners based on a letter from the Board of Commissioners Number S-20/DEKOM/INTI/05/2021 and stipulated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) PT INTI (Persero) regarding Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report Number 1394/PR.04.04/010500/2021 dated June 29, 2021.

The Audit Fee for the Consolidated Financial Statements PT INTI (Persero) for the fiscal year 2021 is Rp338.000.000. The list of audit fees for the period 2013-2021 is in the following table:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Jasa Penilai Publik Office of Public Appraisal Service	Audit Fee (Rp)
2013	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Andy Eldes)	255.000.000
2014	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Andy Eldes)	260.000.000
2015	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	250.000.000
2016	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	225.000.000
2017	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	245.000.000
2018	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Soehartono)	330.000.000
2019	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Soehartono)	370.557.000
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	348.000.000
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	338.000.000



Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Policy on Fulfillment of Creditor's Rights

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, PT INTI (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak yang membantu Perseroan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan maupun sebagai sumber pendanaan.

Demi mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan telah berupaya terkait pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya Hak-Hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan. Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan secara internal.
2. Perseroan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perseroan menerima pendanaan yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).
4. Perseroan senantiasa berupaya bahwa pembayaran hutang pokok, bunga, dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu.
5. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.
6. Perseroan menggunakan pendanaan sesuai dengan tujuan yang diperjanjikan.
7. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi.
8. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka, dan tepat waktu tentang penggunaan dana.
9. Perseroan menyampaikan salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kreditur.

As a form of the Company's commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance, PT INTI (Persero) always pays attention to the interests of the parties who help the Company to improve the Company's working capital capabilities and as a source of funding.

In order to realize this commitment, the Company has made efforts related to the fulfillment of Creditor Rights which aims to maintain the fulfillment of Creditor Rights and maintain the trust given by Creditors to the Company. Broadly speaking, the principles of the policy on the fulfillment of Creditor Rights carried out by the Company are as follows:

1. *The Company considers and measures its capabilities internally.*
2. *The Company selects creditors based on the aspect of credibility that can be accounted for.*
3. *The Company receives funding that is tied up through a valid agreement with agreement clause that puts forward the principle of fairness.*
4. *The Company always strives that payment of principal, interest, and loan principal is made on time.*
5. *The Company ensures that the submission of financial statement information to creditors is carried out in a timely, transparent, accurate, and reliable manner.*
6. *The Company uses funding in accordance with the agreed objectives.*
7. *The Company ensures that all requirements in the agreement with the creditor are met.*
8. *The Company provides information in a transparent, accurate, open, and timely manner regarding the use of funds.*
9. *The Company submits a copy of the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association to creditors.*

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, Insan PT INTI (Persero) diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Kreditur sehubungan dengan kerja sama yang terjadi, dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan, serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki Perseroan.
2. Bekerja sama dengan para Kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis.
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama.
4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para Kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak Kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

In establishing a relationship with Creditors, PT INTI (Persero)'s personnel are required to:

1. *Provide complete and accurate information to Creditors in connection with the cooperation that occurs by upholding transparency and clarity and not containing matters of multiple interpretations, while still paying attention to and maintaining confidential or confidential information owned by the Company.*
2. *Cooperating with Creditors who have been selected on the basis of credibility considerations that can be accounted for for the sake of business interests and development.*
3. *Conduct risk and benefit analysis before entering into a cooperation agreement.*
4. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
5. *Committed to fulfill the rights of Creditors in accordance with the agreed agreement including interest payments, repayment of principal, and other rights of creditors in accordance with the provisions of the agreement agreed between the Company and the Creditors and the relevant laws and regulations.*



Bahasan Mengenai Kode Etik

Discussion on Code of Conduct

Untuk mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Direksi dan seluruh karyawan, serta mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka PT INTI (Persero) menetapkan Kebijakan Kode Etik Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KN.010/2019 tertanggal 30 April 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kode Etik ini sejalan dengan *Sarbanes-Oxley Act* (SOA) Section 406.

Kode Etik yang ditetapkan ini dimaksudkan agar menjadi pedoman dan berlaku bagi seluruh insan PT INTI (Persero), yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan, untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan penuh integritas, berlandaskan prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian juga akan tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan.

Isi Kode Etik

Content of Code of Conduct

Kode Etik Perusahaan merupakan nilai dan norma moral yang harus diperhatikan dalam interaksi internal maupun eksternal Perusahaan. Kode Etik Perusahaan terdiri dari Etika Bisnis Perusahaan dan Etika Perilaku Insan PT INTI (Persero).

Etika Bisnis Perusahaan dalam Kebijakan Kode Etik ini merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan segenap para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perseroan.

Etika Bisnis Perusahaan dijabarkan menjadi:

1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam artian setiap insan PT INTI (Persero) harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-

To develop good behavior in accordance with high ethical standards for the corporation, the Board of Directors and all employees, as well as to develop good relationships with external parties on the principles of Good Corporate Governance (GCG), PT INTI (Persero) sets Policy of Code of Conduct based on Directors of Decree Number KN.010/2019 dated April 30, 2019 in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-09/MBU/2012 on Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance. The Code is in line with the Sarbanes-Oxley Act (SOA) Section 406.

Code of Conduct set is intended to be a guideline and applies to all PT INTI (Persero)'s employees, that is all members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and other personnel who directly works for and on behalf of the Company, to ensure that the business of the Company is run with integrity, based on GCG principles and in accordance with the legal provisions and the applicable legislation. Thus also a healthy and comfortable working atmosphere is created within the Company.

KCode of Ethics are moral values and norms that must be considered in the Company's internal and external interactions. Code of Ethics consists of Corporate Business Ethics and Ethical Behavior of PT INTI (Persero) personnel.

Corporate Business Ethics in this Policy of Code of Conduct is a description of how the Company as a business entity should behave ethically and act as its effort to balance the interests of the Company and the interests of all stakeholders in accordance with the principles of GCG and healthy corporate values while maintaining Company profitability.

Corporate Business Ethics are described as follows:

1. *Compliance with Laws and Regulations*, means that every PT INTI (Persero)'s employee should understand and obey legislation which is the key

undangan, merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan PT INTI (Persero).

2. Larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, dengan memperhatikan sejumlah kebijakan berikut:

- a. Kebijakan Pemberian kepada Pihak Ketiga
 - Insan PT INTI (Persero) dilarang memberikan atau menjanjikan hadiah, suap, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara negara, mitra bisnis, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - Segala hal menyangkut pemberian sesuatu pada pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kebijakan Penerimaan Hadiah, Suap, dan Sejenisnya.
 - Insan PT INTI (Persero) dilarang melakukan hal berikut:
 - i. Menerima gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.
 - ii. Meminta gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Penerima gratifikasi yang dianggap suap, wajib melaporkan pada atasan langsung, serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi dimaksud.
 - iv. Memotong atau menerima sebagian jumlah pembayaran pada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

element that must be maintained in any action taken by any PT INTI (Persero)'s employee.

2. *Prohibition of Giving and/or Reception of Gratuities, having regard to the following policies:*

- a. *Granting to Third Parties Policies*
 - *PT INTI (Persero)'s personnel are prohibited from giving or promising gifts, bribes, and its kind, either directly or indirectly to state officials, business partners, and other parties related to the Company, in which the giving is known or reasonably suspected to be used to influence or move these parties to do or to not do something in his position, which is contrary to his obligations.*
 - *All matters concerning the giving to the parties relating to the Company shall refer to the provisions of the applicable legislation, including gratuities provisions referred to in the legislation in the field of Corruption.*
- b. *Policies Receiving Gifts, Bribes, and Its Kind.*
 - *PT INTI (Persero)'s personnel are prohibited to do as follow:*
 - i. *Accept gratification considered bribes received from any party directly or indirectly.*
 - ii. *Ask for gratuity is considered a bribe of any party either directly or indirectly, or by abusing his power to force someone to give something, pay, or do something for themselves that are known or reasonably suspected to be used to influence decision-making or to move in order to perform or not perform something in his position, which is contrary to its obligations, Company Regulations, and existing laws.*
 - iii. *Gratuity recipients considered bribes, shall report to the direct supervisor, at least to head of unit (Manager) within 30 days of receipt of gratuities intended.*
 - iv. *Cut or accept partial payments amount to a third party in return for the performance of duties and obligations.*

- 378

mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

- d. Melaporkan apabila terjadi kecelakaan, luka atau cacat fisik, dan adanya peralatan kerja yang tidak aman, pada pimpinan atau pihak yang ditunjuk untuk hal tersebut.
 - e. Memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya, serta senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.
 - f. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.
 - g. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.
4. Lingkungan kerja yang baik, termasuk tentang privasi, keragaman, praktik hubungan kerja yang adil dan saling menghormati tanpa adanya diskriminasi dan pelecehan, serta tindakan lainnya yang tidak menyenangkan.
 5. Standar Etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan, menjadi pernyataan jaminan Perseroan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kepentingan para pemangku kepentingan yang dijalankan pada hubungan berikut:
 - a. Hubungan dengan Insan PT INTI (Persero), yang diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
 - b. Hubungan dengan Kastemer, yang dilakukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kastemer berdasarkan kejujuran dan integritas. Segala bentuk promosi Perseroan dilakukan secara terukur dan jujur. Pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Kebijakan Kastemer.
 - c. Hubungan dengan Pemasok, yang diatur tersendiri dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.
 - d. Hubungan dengan Kreditur, yang diatur tersendiri dalam Kebijakan Kreditur.
 - e. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, yang diatur tersendiri dalam Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
 - f. Hubungan dengan Pemerintah, selalu didasarkan pada standar etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Hubungan dengan Pemegang Saham:
 - Jaminan Perlindungan bagi Pemegang Saham
Insan PT INTI (Persero) berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pemegang Saham. Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prinsip Jaminan Bagi Pemegang Saham

environment.

- d. *Reported if any event accident, injury or physical disabilities occurs, and their equipment work unsafe, to the leader or the party designated for it.*
 - e. *Committed to create a work environment that is free from danger, and to always preserve the environment.*
 - f. *Understand and comply with all safety procedures that have been established.*
 - g. *Deal with environmental pollution problem effectively and efficiently.*
4. *Good working environment, including privacy, diversity, fair labor practices and a relationship of mutual respect without any discrimination and harassment, and other acts that are not pleasant.*
 5. *Standard Ethics in dealing with stakeholders, become a statement of the Company in order to guarantee the fulfillment the rights and interests of the stakeholders run on the relations of follow:*
 - a. *Relationship with PT INTI (Persero)'s personnel, which is regulated separately in the Collective Labour Agreement.*
 - b. *Relationship with the Customer, which is performed to establish a long term relationship with the customer based on honesty and integrity. All forms of the Company's promotion should be measurable and honest. Its implementation regulated separately in the Customer Policy.*
 - c. *Relationship with Suppliers, regulated separately in the Procurement of Goods and/or Services Company.*
 - d. *Relationship with the Creditor, regulated separately in Creditor Policy.*
 - e. *Relationship with the Community and Neighborhood, regulated separately in the Guidelines for the Management of Partnership Program and Community Development Program.*
 - f. *Relationship with the Government, always based on business ethics standards and existing laws.*
 - g. *Relations with Shareholders*
 - *Guarantees for the Protection of Shareholders*

PT INTI (Persero)'s personnel is committed to continually strive for the Company continuous growth based on mutual business standards to be able to give a maximum contribution to the Shareholders. Relations with Shareholders can be established in compliance with the provisions of legislation.
 - *Shareholders Guarantee Principle*



- i. Setiap Insan PT INTI (Persero) bertanggung jawab untuk melindungi aset Pemegang Saham yang dipercayakan pada Perseroan dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, atau pencurian.
 - ii. Saham-saham berupa dana, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), prototype, produk, ataupun peralatan, hanya dapat digunakan untuk usaha dan tujuan yang disetujui manajemen.
 - iii. Setiap Insan PT INTI (Persero) dilarang menggunakan aset-aset Perseroan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan Perseroan.
 - iv. Setiap Insan PT INTI (Persero) wajib segera memberitahu terjadinya pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan aset Perusahaan pada fungsi general affair/umum atau pihak yang ditunjuk untuk itu.
 - Keakuratan Dokumen-Dokumen Perusahaan
Segala dokumen, catatan-catatan, dan akun-akun harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan sistem internal kontrol Perseroan.
 - Audit dan Investigasi
 - i. Setiap Insan PT INTI (Persero) diharuskan bekerja sama dengan tim pemeriksa dan investigasi yang dilakukan oleh Perseroan, instansi pemeriksa, dan regulator.
 - ii. Seluruh informasi yang diberikan harus benar dan akurat.
 - iii. Seluruh Insan PT INTI (Persero) tidak akan menyembunyikan, mengubah, memusnahkan dokumen atau catatan-catatan sehubungan dengan adanya kegiatan investigasi atau adanya permintaan yang sah untuk hal itu.
 - iv. Setiap Insan PT INTI (Persero) disarankan untuk berkonsultasi dengan fungsi hukum sebelum merespon segala permintaan audit, investigasi atau informasi lain di luar kebiasaan.
 - h. Hubungan dengan Mitra Bisnis, mengedepankan asas manfaat, sinergi, tidak merugikan perusahaan, mematuhi kode etik, transparan, sesuai kontrak, dan memastikan telah memenuhi kebijakan Perseroan.
 - i. Hubungan dengan Pesaing, patuh pada ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berlaku.
 - j. Hubungan dengan Media Massa, senantiasa menyampaikan informasi secara terbuka dan
- i. Each PT INTI (Persero)'s personnel is responsible to protect the Shareholders assets entrusted to the Company from loss, damage, misuse, or theft.
 - ii. Shares in the form of funds, Intellectual Property Rights (IPR), prototype, product, or equipment, may only be used for business and purposes approved by the management.
 - iii. Each PT INTI (Persero)'s personnel is prohibited from using the Company's assets for purposes contrary to the law and violates the Company rules.
 - iv. Each PT INTI (Persero)'s personnel shall immediately notify the occurrence of theft, loss or misuse of company assets to the function of general affairs or other party assigned for it.
 - The accuracy of Company Documents
All documents, records, and accounts must be in accordance with the principles of accounting and internal control systems of the Company.
 - Audit and Investigation
 - i. Each PT INTI (Persero)'s personnel is required to cooperate with the inspection and investigations team conducted by the Company, inspectorate, and regulators.
 - ii. All information provided must be truthful and accurate.
 - iii. All PT INTI (Persero)'s personnel will not hide, alter, destroy documents or records in connection with the activities of the investigation or any valid request for it.
 - iv. Each PT INTI (Persero)'s personnel is advised to consult with legal function before responding to any request of audits, investigations or other information out of the ordinary.
 - f. Relations with Business Partners, promote the principle of benefits, synergy, not detrimental to the company, adhering to code of conduct, transparent, based on the contract, and ensured has meet the Company's policy.
 - g. Relations with Competitors, comply with the provisions on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition regulations.
 - h. Relations with the Mass Media, always convey information openly and responsibly in order

bertanggung jawab dalam rangka membangun citra Perseroan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.

- k. Hubungan dengan Anak Perusahaan, harus dilakukan dengan baik dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

6. Standar Etika Insan, penting bagi Perseroan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam proses pekerjaan. Hal itu mengatur hal berikut:
 - a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan.
 - b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan.
 - c. Perilaku sebagai Rekan Kerja.
 - d. Hak atas Kekayaan Intelektual.

Etika Perilaku Insan PT INTI (Persero) diharapkan menjadi pedoman untuk mengembangkan perilaku yang baik di lingkup eksternal maupun internal. Hal ini dijalankan dengan hal berikut:

1. Komitmen Insan PT INTI (Persero).
2. Menjaga nama baik perusahaan.
3. Menjaga hubungan baik antar insan PT INTI (Persero).
4. Menjaga kerahasiaan perusahaan.
5. Menjaga dan menggunakan aset perusahaan.
6. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
7. Menghindari perilaku asusila, narkoba, obat terlarang, perjudian dan hanya merokok di tempat yang disediakan.
8. Melakukan pencatatan data Perseroan dan penyusunan laporan.
9. Menghindari benturan kepentingan.
10. Jaminan dan batasan tentang aktivitas politik.

to build a positive image of the company while respecting the journalistic code of ethics.

- i. *Relationship with Subsidiaries, must be done in order to build synergies and better image and may improve the the Company performance.*

6. *Individual Ethical Standards, it is important for the Company to regulate ethical behavior in the implementation of daily activities in the work process. It set as follows:*
 - a. *Behaviour as Supervisor Toward Subordinate.*
 - b. *Behaviour as Subordinate Toward Supervisor.*
 - c. *Behaviour as Colleagues.*
 - d. *Intellectual Property Rights.*

Behavior Ethics PT INTI (Persero)'s personnel is expected to be a guideline to develop good behavior in both external and internal sphere. It runs by following:

1. *PT INTI (Persero)'s personnel commitment.*
2. *Keeping Company reputation.*
3. *Keeping good relations among PT INTI (Persero)'s personnel.*
4. *Keeping company confidentiality.*
5. *Maintaining and using company assets.*
6. *Maintaining health and occupational safety, and environment.*
7. *Avoiding immoral behavior, narcotics, drugs, gambling, and smoking.*
8. *Recording Company data and report.*
9. *Avoiding conflict of interest.*
10. *Guarantee and limitation of political activities.*

Ketaatan Pada Kode Etik dan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Perusahaan

Compliance to Code of Conducts and Violation of Company's Code of Conducts

Akses terhadap Kode Etik Perusahaan tersedia melalui web intern yaitu **portal-hukum.inti.net** yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan dan Direksi PT INTI (Persero).

Setiap Insan PT INTI (Persero) dari seluruh tingkatan dan fungsi organisasi wajib mentaati Kode Etik yang telah ditetapkan, dan dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kode Etik. Hal ini ditandai dengan wajibnya seluruh Insan PT INTI (Persero) untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan bukti komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

Setiap Insan PT INTI (Persero) menerima satu salinan Pakta Integritas dan menandatangani bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan, dan kemudian didokumentasikan oleh fungsi yang menangani Good

Access to the Company Code of Conduct is available through internal web portal-hukum.inti.net that can be accessed by all employees and members of the Board of Directors of PT INTI (Persero).

Each PT INTI (Persero)'s personnel from all levels and functions of the organization has to comply with the Code of Ethics that has been defined, and is prohibited from doing things that are contrary to the provisions described in the Code of Conduct Policy. It is characterized by the necessity of the whole personnel of PT INTI (Persero) to sign the Integrity Pact, which is proof of commitment to the Company's Code of Conduct Policy.

Each of PT INTI (Persero)'s personnel receive a copy of the Integrity Pact and signs that he/she has accepted, understood and agrees to abide the Corporate Code of Ethics Policy, and then documented by the function that handles the Good Corporate Governance (GCG) in the



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Corporate Governance (GCG) di Perseroan.

Pelaksanaan Kebijakan Kode Etik Perusahaan merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan PT INTI (Persero). Seluruh atasan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan tersebut.

Insan PT INTI (Persero) dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik melalui mekanisme pelaporan yang berlaku.

Pelaporan dapat disampaikan kepada atasan langsung dari Insan PT INTI (Persero) yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau melalui *Whistle Blowing System*.

Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:

1. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan; dan
2. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.

Direksi menjamin perlindungan terhadap pelapor atas pelaporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan kepada Direksi. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perseroan.

Semua pengaduan yang dilakukan dengan itikad baik akan diselidiki secara adil dan komprehensif dengan dukungan internal dan/atau eksternal yang relevan. Pelanggaran terhadap Kode Etik ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

Atasan langsung dari karyawan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memanggil dan memeriksa yang bersangkutan serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang tertuang dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Bersama. Insan PT INTI (Persero) yang terbukti melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang menyangkut pelanggaran Etika Bisnis Perusahaan atau Etika Perilaku Insan Perseroan oleh Insan PT INTI (Persero) dan afiliasi, Pemegang Saham ataupun Stakeholders PT INTI (Persero).

Company.

Implementation of the Code of Ethics Policy is the commitment and responsibility of all PT INTI (Persero)'s personnel. All superiors are responsible and shall set an example for his subordinates on the application of the Company's Code of Conduct Policy.

INTI (Persero)'s personnel can submit a report on the occurrence of actual or suspected violations of the Code of Conduct through existing reporting mechanisms.

Reporting can be delivered to the direct superior of PT INTI (Persero)'s personnel who is suspected on violating of the Code or through the Whistle Blowing System.

In connection with the reporting, a reporter must:

1. *State clearly the identity of the perpetrator of the violation and the act of violation committed; and*
2. *Mention the identity of the reporter clearly.*

The Board of Directors guarantees the protection of whistleblowers for reporting violations or suspected violations of the Company's Code of Ethics to the Directors. The confidentiality of the report will be guaranteed unless disclosure is needed in the context of conducting an investigation and for the benefit of the Company.

All complaints made in good faith will be investigated fairly and comprehensively with the support of relevant internal and/or external parties. Violations of the Code of Conduct shall be followed up rigorously and consistently.

Direct supervisor of the employee who allegedly committed violations of the Code is obliged to summon and investigate the employee in question, and report the investigation results to the official authorized to punish, in accordance with the provisions of the Disciplinary Punishment contained in Appendix II of the Collective Labor Agreement. PT INTI (Persero)'s personnel convicted of fraud and/or violation shall be penalized in accordance with regulation of the Company and applicable law.

In 2020, there was no violation of the Code of Ethics concerning the violation of the Company's Business Ethics or the Conduct Ethics of the Company by PT INTI (Persero)'s staff and affiliates, Shareholders or Stakeholders of PT INTI (Persero).

Independensi, Benturan Kepentingan, dan Pengungkapan Hubungan Afiliasi

Independency, Conflict of Interest, and Disclosure of Affiliation

TTiap anggota Dewan Komisaris Perseroan dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perseroan maupun hubungan dengan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT INTI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Sampai dengan akhir Desember 2021, PT INTI (Persero) belum menunjuk Komisaris Independen.

Berdasarkan Surat Wakil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas nama Menteri BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada 1 (satu) BUMN. Dalam tahun 2021, tidak ada anggota Dewan Komisaris PT INTI (Persero) yang memiliki jabatan rangkap di BUMN lain.

Untuk menjamin tercapainya independensi dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran di antara beragam kepentingan serta senantiasa terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Untuk meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan, setiap Komisaris dan Direktur diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan saham milik Komisaris, Direktur, dan/atau keluarganya masing-masing pada PT INTI (Persero) maupun perusahaan lain. Daftar kepemilikan saham ini disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan

Each member of the Board of Commissioners of the Company is required to act independently, without any conflict of interest that can interfere with his ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to any party related to the Company and relations with the Board of Directors.

All members of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) act independently and are free from intervention from any party.

Until the end of December 2021, PT INTI (Persero) has not yet appointed Independent Commissioners.

Based on the Letter of Vice Minister of State Owned Enterprises (SOEs) on behalf of the Minister of SOEs Number S-375/MBU.Wk/2011 dated on December 5, 2011 it is stated that the members of Board of Commissioners or Board of Supervisory of SOEs are only allowed to serve as members of Board of Commissioners or Board of Supervisory in 1 (one) SOE. In 2021, no member of Board of Commissioners of PT INTI (Persero) runs double function at other SOE.

To ensure the achievement of independence in carrying out its duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors encourage the creation of an objective climate and work environment and place fairness between various interests and always be free from conflict of interest.

To minimize the occurrence of conflicts of interest, each Commissioner and Director is required to report ownership of shares owned by the Commissioner, Director, and/or their respective families to PT INTI (Persero) and other companies. This list of shareholdings is kept and administered by the Corporate Secretary.

Criteria for affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders include:

1. *Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliation between members of the Board of Directors*



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan akibat pernikahan.

and Major and / or controlling Shareholders.

4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Main Shareholders and / or controllers.

Among members of Board of Commissioners and between members of Board of Commissioners and members of Board of Directors there are no blood relations up to third degree, either according to straight line, or side line, or related by marriage.

Nama Name	Hubungan Keluarga dan/atau Keuangan Family and/or Financial Relations					
	Dewan Direksi Board of Director		Dewan Komisaris Boar of Commissioner		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya /Yes	Tidak /No	Ya /Yes	Tidak /No	Ya /Yes	Tidak /No
Unggul Priyanto		X		X		X
Djoko Agung Hariyadi		X		X		X
Trisno Hendradi		X		X		X
Rahmadi Murwanto		X		X		X
Otong lip		X		X		X
Tri Hartono Rianto		X		X		X
Teguh Adi Suryandono		X		X		X



Anggota Direksi, Komisaris, maupun keluarganya, tidak memiliki Saham di Perusahaan lain.

Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or their families, do not have shares in another company.



Pencegahan Transaksi Orang Dalam

Insider Trading Prevention

Orang Dalam Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan dilarang memperdagangkan informasi Perseroan berdasarkan Informasi atau Fakta Material yang Belum Diungkap.

Definisi Orang Dalam Perusahaan meliputi:

1. Pemegang Saham Utama Perseroan.
2. Dewan Komisaris, Direksi, atau Karyawan Perseroan.
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam.
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam angka (1), (2), dan (3) di atas.

Company Insiders or parties who have special relationships with the Company are prohibited from trading Company information based on Information or Undisclosed Material Facts.

The definition of Company Insider includes:

1. *Major Shareholders of the Company.*
2. *The Board of Commissioners, the Board of Directors, or Employees of the Company.*
3. *An individual who because of his position or profession, or because of his business relationship with the Company, allows that person to obtain Inside Information.*
4. *A party that within the last 6 (six) months is no longer a party as mentioned in points (1), (2), and (3) above.*



Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Perseroan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Perusahaan memiliki ketentuan atau kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.021/2014 tertanggal 12 November 2014. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2021 tertanggal 24 September 2021.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PT INTI (Persero) yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan/atau permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik dan bersih dari korupsi.

Insan PT INTI (Persero) adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan, termasuk karyawan yang ditugaskan di anak perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

Muatan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi antara lain:

- a. Ketentuan gratifikasi yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh diterima.
- b. Fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi adalah fungsi yang menangani Good Corporate Governance (GCG).

Fungsi yang menangani GCG adalah Divisi Hukum, Kualitas, dan Manajemen Risiko melalui Bagian Hukum dan Kepatuhan yang membawahi fungsi perencanaan dan pengendalian GCG.

Mekanisme pelaporan gratifikasi bahwa Insan PT INTI (Persero) yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada keputusan ini agar segera melaporkan kepada Atasan Langsung. Setelah menerima laporan, Atasan Langsung akan meneliti gratifikasi yang diterima tersebut untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima tersebut diklasifikasikan atau dianggap suap atau bukan, sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-

The Company implements a gratification control program in accordance with applicable regulations.

1. *The company has provisions or policies regarding Gratification Control. The Gratification Control Policy has been established by the Decree of the Board of Directors Number KN.021/2014 dated November 12, 2014. In 2021, the Company will update the Guidelines for Gratification Control and it is stipulated by the Decree of the Board of Directors Number KN.016/2021 dated September 24, 2021.*

The Gratification Control Guidelines are the commitments of the Board of Commissioners and the Board of Directors which aim to provide direction and reference for all PT INTI (Persero)'s personnel with regard to receiving, granting, and/or requesting gratification, in order to implement good corporate governance and free from corruption.

PT INTI (Persero)'s personnel are all members of the Board of Commissioners, Directors, and Employees of the Company, including employees assigned to subsidiaries and other agencies, as well as other personnel who directly work for and on behalf of the company.

Contents in the Gratification Control Guidelines include:

- a. *Gratification provisions that explain what may and may not be accepted.*
- b. *The function assigned to manage gratuities is the function that handles Good Corporate Governance (GCG).*

The function that handles GCG is the Legal, Quality, and Risk Management Division through the Legal and Compliance Division which oversees the GCG planning and control function.

The mechanism for reporting gratuities is that PT INTI (Persero) personnel who are aware of a violation of the provisions contained in this decision must immediately report it to their Direct Supervisor. After receiving the report, the Direct Supervisor will examine the gratuity received to determine whether the gratuity received is classified or considered a bribe or not, in accordance with company regulations and applicable laws and regulations, then reports it to the function that

undangan yang berlaku, selanjutnya melaporkannya kepada fungsi yang menangani GCG.

Pemantauan atas pelaksanaan, pada prinsipnya seluruh insan PT INTI (Persero) memiliki kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Secara struktural, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh:

- a. Atasan Langsung atau Unit Kerja Perseroan.
- b. Fungsi Internal Audit Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris sesuai kewenangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero) terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan atau ketentuan Pengendalian Gratifikasi.
3. Perseroan telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi dilakukan melalui pembentukan Divisi Hukum, Kualitas, dan Manajemen Risiko, lewat Bagian Hukum dan Kepatuhan yang membawahi unit kerja Tata Kelola Perusahaan. Hal tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.037/2020 tentang Struktur Organisasi tertanggal 30 Desember 2020.

Telah dibuat pula Laporan Gratifikasi yang ditujukan kepada Direksi, tapi tidak ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direksi menerima kiriman bingkisan hari raya dan telah disalurkan ke panti, namun tidak dibuat surat pemberitahuan atau pelaporan ke KPK.

handles GCG.

Monitoring the implementation, in principle, all PT INTI (Persero) personnel have an obligation to oversee the implementation of this policy. Structurally, supervision of the implementation of this policy is carried out by:

- a. Direct Supervisor or Company Work Unit.*
- b. The function of the Company's Internal Audit and/or the Board of Commissioners in accordance with the authority and the General Meeting of Shareholders (GMS).*

Violations committed by PT INTI (Persero)'s personnel against the provisions stipulated in this Decree, will be subject to sanctions in accordance with company regulations and/or applicable laws and regulations.

- 2. The Company undertakes efforts to improve understanding of Gratification Control policies or stipulations.*
- 3. The Company implements Gratification Control.*

The implementation of Gratification Control is carried out through the establishment of the Legal, Quality, and Risk Management Division, through the Legal and Compliance section which oversees the Corporate Governance work unit. This has been determined by the Decree of the Board of Directors Number KN.037/2020 concerning Organizational Structure dated December 30, 2020.

A Gratification Report has also been made which is addressed to the Board of Directors, but not to the Corruption Eradication Commission. The Board of Directors received holiday gifts and distributed them to the orphanage, but no notification letter or report was made to the the Corruption Eradication Commission.



Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Anti-Bribery Management System

Dalam rangka program penguatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan operasional Perseroan dengan lebih transparan, adil, dan zero tolerance terhadap fraud dan tindakan penyuapan baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, maupun pihak eksternal, PT INTI (Persero) telah memiliki Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) untuk melengkapi kebijakan yang terkait dengan pencegahan penyuapan, yang berpedoman pada standar internasional yaitu SNI ISO 37001:2016.

Dalam rangka membantu Perseroan dalam menerapkan SMAP yang efektif, Perseroan pun telah mengantongi sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, sejak 22 Desember 2020.

Perseroan telah menetapkan kebijakan, membuat dokumen, melakukan sosialisasi, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan menyempurnakannya secara berkesinambungan sejalan dengan persyaratan standar dalam SNI ISO 37001:2016.

In the context of strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and a manifestation of the Company's commitment to running the Company's operations more transparently, fairly, and with zero tolerance for fraud and acts of bribery by the Board of Directors, the Board of Commissioners, employees, and external parties, PT INTI (Persero) already has the Anti-Bribery Management System to complement policies related to bribery prevention, which is guided by international standards, namely SNI ISO 37001:2016.

In order to assist the Company in implementing effective the Anti-Bribery Management System, the Company has also obtained the ISO 37001:2016 certificate on Anti-Bribery Management System, since December 22, 2020.

The Company has established policies, created documents, disseminated, implemented, documented, maintained, and improved them on an ongoing basis in line with the standard requirements in SNI ISO 37001:2016.

Dasar Penerapan SMAP

The Anti-Bribery Management System Application Basics

Implementasi dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT INTI (Persero) dilaksanakan berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
2. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-35/MBU/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN.

Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola Anti Penyuapan di Perseroan dan dirancang untuk

The implementation and implementation of PT INTI (Persero)'s the Anti-Bribery Management System is carried out based on:

1. *Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Actions for Prevention and Eradication of Corruption.*
2. *Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs as the Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention.*
3. *Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-17/S.MBU/02/2020 dated 17 February 2020 regarding ISO 37001 Anti-Bribery Management System Certification in SOEs.*

This Anti-Bribery Management System Standard contains

menerapkan pengendalian yang tepat dalam mendeteksi, mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyuapan sejak awal, mengembangkan dan menumbuhkan budaya anti-penyuapan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, maupun pihak eksternal terkait, serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

the steps needed to manage Anti-Bribery in the Company and is designed to implement appropriate controls in detecting, identifying and reducing potential bribery from the start, developing and fostering an anti-bribery culture for all Directors, Board of Commissioners, employees and related external parties and improve compliance with applicable laws and regulations.

Ruang Lingkup

Scope

Ruang lingkup Kebijakan Penerapan Anti Penyuapan meliputi:

1. Perseroan fokus pada persyaratan pelanggan dengan tetap mengedepankan SMAP tanpa kompromi.
2. Selalu menggalakkan budaya peduli SMAP di Perseroan dan menjadi komitmen bersama bagi seluruh Insan PT INTI (Persero).
3. Kebijakan Anti Penyuapan di Perseroan harus mencakup hal berikut:
 - a. Memadai (*appropriate*) dan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.
 - b. Disempurnakan secara berkesinambungan.
 - c. Menyiapkan kerangka kerja untuk hal berikut:
 - Membuat sasaran Anti Penyuapan di Perseroan.
 - Meninjau kesesuaiannya untuk perbaikan berkelanjutan.
4. Dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua Insan PT INTI (Persero) dan ditinjau ulang untuk kesesuaian berkesinambungan.
5. Tersedia untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan sesuai kebutuhan.

The scope of the Anti-Bribery Implementation Policy includes:

1. *The Company focuses on customer requirements while continuing to prioritize the Anti-Bribery Management System without compromise.*
2. *Always promote the Anti-Bribery Management System care culture in the Company and become a shared commitment for all PT INTI (Persero)'s Personnel.*
3. *The Company's Anti-Bribery Policy must includes the following:*
 - a. *Adequate (appropriate) and in accordance with the vision and mission of the Company.*
 - b. *Continuously perfected.*
 - c. *Set up a framework for the following:*
 - *Establishing Anti-Bribery targets for the Company.*
 - *Reviewing its suitability for continual improvement.*
4. *Communicated and understood by all PT INTI (Persero)'s personnel and reviewed for continuous conformity.*
5. *Available to interested parties as needed.*

Sertifikasi SMAP

The Anti-Bribery Management System Certification

Untuk mendukung Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diimplementasikan di Perusahaan, maka PT INTI (Persero) juga telah mewujudkan komitmen penerapan praktik terbaik atas SMAP tersebut dengan diperolehnya Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 pada 22 Desember 2020.

To support the Anti-Bribery Management System which has been implemented in the Company, PT INTI (Persero) has also realized its commitment to implementing the best practices for the Anti-Bribery Management System by obtaining the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 Certification on December 22, 2020.



Peningkatan Berkelanjutan

Continuous Improvement

Perseroan senantiasa akan mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), menentukan peluang untuk tindakan perbaikan, dan penerapan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku.

PT INTI (Persero) senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran Insan PT INTI (Persero) untuk turut serta dalam mencegah dan menghindari praktik penyuapan sebagai budaya di Perseroan. Antara lain dengan rutin melakukan sosialisasi larangan penerimaan atau pemberian gratifikasi dan anti-suap secara berkala kepada karyawan, surat elektronik di i-Portal PT INTI (Persero), kampanye di media sosial resmi perusahaan, serta himbauan Direktur Utama kepada seluruh karyawan dan juga pemangku kepentingan Perseroan.

The Company will always identify and evaluate the suitability, adequacy, and effectiveness of the Anti-Bribery Management System implementation, determine opportunities for corrective action, and implementation to meet applicable requirements.

PT INTI (Persero) always strives to increase the awareness of PT INTI (Persero)'s personnel to participate in preventing and avoiding bribery practices as a culture in the Company. Among others, by routinely conducting socialization on the prohibition of receiving or giving gratuities and periodic anti-bribery to employees, electronic mail at PT INTI (Persero) i-Portal, campaigns on the company's official social media, as well as the President Director's appeal to all employees and stakeholders. Company.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Management of State Administrators Wealth Reports

Perseroan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

The Company coordinates the Management of State Administrators Wealth Report.

1. Perseroan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Kebijakan kepatuhan dan penyampaian LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KD.83/KP.00/020805/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan.

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.83/KP.00/020805/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan, mengatur:

- a. Mewajibkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Divisi, Kepala atau Deputi *Strategic Business Unit* (SBU), dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi di lingkungan Perseroan untuk menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kepada pejabat yang tidak menyampaikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk memudahkan pelaksanaan pelaporan, ditunjuk unit kerja yang menangani fungsi pelayanan sumber daya manusia sebagai koordinator pengelolaan pelaporan. Namun dalam keputusan tersebut tidak ada muatan yang menerangkan batas waktu penyampaian. Unit kerja yang menangani fungsi pelayanan sumber daya manusia (SDM) ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Laporan dimaksud.

2. Penyelenggara Negara atau Wajib Lapormemahami kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penyebaran email kepada seluruh Wajib LHKPN pada 07 Januari 2021, secara online melalui elkhpn.kpk.go.id. Pelaporan LHKPN dilakukan posisi per 1 Desember 2020. Jumlah yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu sebanyak 32 orang. Wajib LHKPN yang tepat waktu menyampaikan LHKPN Tahun 2020

1. *The company has a policy regarding compliance with state administration assets reporting for the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials one level below the Board of Directors.*

The policy for compliance and submission of the Management of State Administrators Wealth Report is based on the Decree of the Board of Directors Number KD.83/KP.00/020805/2017 dated 9 May 2017 concerning the Determination of Officials who are Required to Submit Assets Reports.

Decree of the Board of Directors Number KD.83/KP.00/020805/2017 dated May 9, 2017 concerning the Determination of Officials who are required to submit assets reports, regulates:

- a. *Requires members of the board of commissioners, the Board of Directors, and Structural Officers at the Level of Division Heads, Strategic Business Unit (SBU)'S Heads or Deputies, and members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors of Subsidiaries and/or Affiliates within the Company to submit the Management of State Administrators Wealth Report in accordance with the laws and regulations.*
- b. *Officials who do not submit are subject to sanctions in accordance with applicable regulations.*
- c. *To facilitate the implementation of reporting, a work unit that handles the function of human resources services is appointed as the coordinator of reporting management. However, in the decision there is no content that explains the deadline for submission. The work unit that handles the Human Resources (HR) service function is appointed as the Coordinator for the Management of the said Report.*

2. *State Administrators or Required Reporting understand the policies or Standard Operating Procedure (SOP) regarding compliance with the reporting of state administrators' assets.*

Email distribution to all mandatory the State Administrators Wealth Report on January 07, 2021, online via elkhpn.kpk.go.id. Reporting of the State Administrators Wealth Report is carried out as of December 1, 2020. The number of people who are required to submit the State Administrators Wealth



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

sebanyak 32 orang atau sebanyak 100%.

3. Perseroan melaksanakan kebijakan atau SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada 14 April 2021, Bagian Pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) telah membuat laporan, yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2020 yang ditujukan pada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Report is 32 people. Mandatory the State Administrators Wealth Report on time submit LHKPN 2020 as many as 32 people or as much as 100%.

3. *The Company implements policies or SOPs regarding compliance with state administration assets reporting. On April 14, 2021, the HR Services Section has made a report, namely the 2020 Report on the Implementation of the Coordinator's Tasks for the State Administrators Wealth Report which is addressed to the Director of Finance and Risk Management.*

Pengungkapan Mengenai *Whistle-Blowing System*

Disclosure of Whistle-Blowing System

Whistle-Blowing System (WBS) adalah saluran untuk menerima pelaporan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan, atau adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan Perseroan.

Prinsip utama dari WBS ini adalah bahwa kegiatan Perseroan harus senantiasa dalam keadaan tertib, bersih dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun (independen), serta bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

WBS harus senantiasa dilaksanakan secara konsekuen sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan dalam pengelolaan aset Perseroan, baik tangible maupun intangible.

Untuk melaksanakan WBS, dibentuk Tim WBS yang pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Direksi. Setiap potensi maupun terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan dapat diungkapkan atau dilaporkan kepada Tim WBS. Tim WBS dan/atau Direksi memutuskan apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut dapat dan/atau terbukti, dan dapat berakibat merugikan kepentingan Perseroan atau tidak, baik secara materiil maupun immateriil, langsung maupun tidak langsung.

Dasar hukum penerapan WBS adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan *Whistle-Blowing System* yang memuat prosedur kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan *Whistle-Blowing System* (WBS), jaminan perlindungan bagi *Whistle-Blower*, tim

The Whistle-Blowing System (WBS) is a channel for receiving reporting, evaluating, and following up on allegations of violations and/or fraud, or the existence of practices that deviate and threaten the interests of the Company.

The main principle of the WBS is that the activities of the Company shall constantly be orderly, clean and independent by any party, and act in accordance with applicable regulations, including but not limited to the Statutes and General Meeting of Shareholders (GMS) decisions, the implementation is done in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

WBS must always be carried out consistently so that it can help improve the overall performance of the Company in the management of Company assets, both tangible and intangible.

To implement the WBS, a WBS Team is formed which is formed through a Decree of the Board of Directors. Any potential or occurrence of violations and/or fraud can be disclosed or reported to the WBS Team. The WBS team and/or the Board of Directors decides whether the abuse and/or fraud can and/or is proven and can result in damaging the interests of the Company, whether materially or immaterial, directly or indirectly.

The legal basis for implementing the WBS is Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number Per-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs juncto Regulation of Minister of SOEs Number Per-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs Number Per-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and Decree of the Secretary of Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators or Parameters for Evaluating and Evaluating GCG Implementation in SOEs.

The Company has also set up a reporting system policy on alleged irregularities in the Decree of BOD Number KN.006/2022 dated March 16, 2022 on Whistle-Blowing Policy System containing the policy procedure, execution, and reporting of Whistle-Blowing System (WBS), guarantees protection for Whistle-Blower, WBS team, and confidentiality. In addition, the Company has provided a



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

WBS, dan kerahasiaan. Selain itu, Perseroan telah menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS berupa Kotak WBS, email gcg_wbs@inti.co.id, nomor Whatsapp, dan SMS Center.

Fraud (kecurangan) dapat terjadi di perusahaan melalui pihak eksternal maupun internal perusahaan. *Fraud* yang dilakukan jajaran Perseroan dapat mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi citra (image) Perseroan yang berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan.

Manajemen PT INTI (Persero) mendorong Insan PT INTI (Persero) berperan aktif untuk mencegah bahkan memberantas dan “memusuhi” *Fraud* secara bersama-sama melalui komitmen bersama bahwa “*Fraud* adalah musuh INTI”.

Wujud keseriusan PT INTI (Persero) dalam memberantas *Fraud* ditunjukkan dengan adanya sarana pelaporan WBS yang digunakan seluruh Insan PT INTI (Persero) untuk melaporkan setiap menemukan dan melihat perbuatan *Fraud* yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero). WBS dirancang sebagai sarana pelaporan yang bersifat *confidential* (rahasia) untuk memudahkan Insan PT INTI (Persero) melaporkan setiap kejadian internal *fraud* tanpa harus merasa takut.

means of communication to support the implementation of policies in the form of Box WBS WBS, gcg_wbs@inti.co.id Email, Whatsapp number, and SMS Center.

Fraud can occur in the Company through internal and external parties of the Company. Fraud committed by the Company employee could result in losses and affect the image of the Company which can have an impact on labor productivity and the Company's overall viability.

The management of PT INTI (Persero) encourages PT INTI (Persero)'s Personnel to have an active role in preventing and even eradicating and fighting against Fraud together through a joint commitment that “Fraud is INTI's enemy”.

The seriousness of PT INTI (Persero) in the fight against fraud is indicated by the reporting facility WBS which is used throughout the PT INTI (Persero)'s personnel to report whenever any Fraud is found and seen committed by PT INTI (Persero)'s personnel. WBS is designed as a means of reporting that is confidential to facilitate PT INTI (Persero)'s personnel to report any internal fraud incident without fear.

Kerja Sama PT INTI (Persero) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

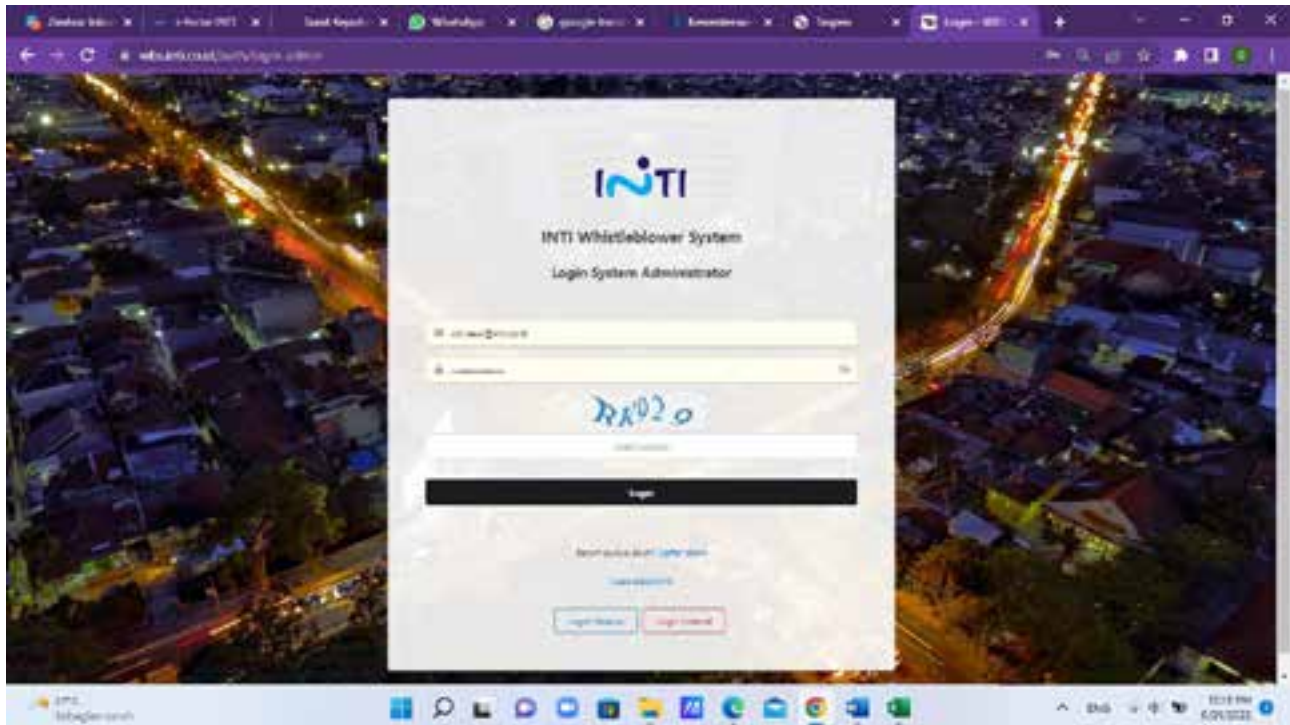
Cooperation With PT INTI (Persero) and The Corruption Eradication Commission Regarding Complaints Handling in The Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption

Pada 2 Maret 2021 Perusahaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perjanjian ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan. Sarana pelaporan yang telah dibuat dapat diakses melalui <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

On March 2, 2021, the Company and the Corruption Eradication Commission have signed a Cooperation Agreement on Handling Complaints in Efforts to Eradication of Corruption Crimes.

This agreement aims to build and improve the effectiveness and efficiency of handling complaints both internally and externally that are integrated in a professional, transparent, and accountable manner by prioritizing confidentiality in the context of optimizing the eradication of corruption within the Company and the provisions of laws and regulations. Reporting facilities that have been made can be accessed via <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.



Tindakan atau Perbuatan yang Dapat Dilaporkan

Action or Devotion That May Be Reported

Tindakan atau perbuatan yang dapat dilaporkan adalah antara lain:

1. Pencurian dan/atau penggelapan asset Perusahaan.
2. Suap/penyuapan dan/atau pemberian atau penerimaan hadiah (Gratifikasi).
3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Benturan Kepentingan.
5. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, hasil ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bentuk Kecurangan lainnya.

Kegiatan yang berkaitan dengan WBS dicatat dan didokumentasikan secara khusus untuk kepentingan tersebut oleh Sekretaris Tim WBS.

Actions or actions that can be reported include:

1. Theft and/or embezzlement of Company assets.
2. Bribery/bribe and/or giving or receiving gifts (Gratification).
3. Corruption, Collusion, and Nepotism.
4. Conflict of Interest.
5. Violations of Company regulations including violations of the Company's Code of Ethics, the results of the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations.
6. Other forms of cheating.

Activities related to the WBS are specifically recorded and documented for this purpose by the WBS Team Secretary.

Prosedur Pelaporan

Reporting Procedure

Laporan *Whistle-Blower*

1. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari internal INTI):
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Jabatan :
 - d. Divisi/Unit Kerja :
2. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari eksternal INTI):
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Perusahaan/Instansi :
 - d. Alamat Perusahaan/Instansi :
 - e. Hubungan dengan PT INTI (Persero) :
3. Penjelasan Singkat tentang Pelanggaran dan Kecurangan:

No.	Jenis Informasi	Uraian
a.	Jenis Pelanggaran dan/atau Kecurangan	
b.	Tempat dan waktu kejadian	
c.	Nama dan Jabatan/Pangkat terlapor	
d.	Proses kejadian	
e.	Menimbulkan kerugian finansial	Ya / Tidak
f.	Besarnya perkiraan kerugian	
g.	Peristiwa yang sama pernah terjadi sebelumnya	Ya / Tidak
	Jika Ya, kapan peristiwa tersebut terjadi	
h.	Saksi atau bukti pendukung agar disebutkan dan dilampirkan	
i.	Pengungkapan identitas pelapor	Keberatan / Tidak
j.	Pernah diungkapkan kepada pihak lain	Ya / Tidak
	Jika Ya, kepada siapa	
k.	Saran/tanggapan dari pihak pada huruf j	
l.	Pernah melaporkan kepada penegak hukum atas Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang diungkapkan pada laporan ini	Ya / Tidak
	Jika Ya, kepada Instansi mana	
		_____ Pelapor

Catatan: Format ini dapat disesuaikan dengan materi laporan

Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor (*Whistle-Blower*) dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Melalui surat yang berisikan uraian pelaporan dan bukti-bukti, yang ditujukan langsung kepada “Ketua Tim WBS” dalam format tertentu, dan dimasukkan ke kotak WBS; atau
2. Melalui surat elektronik yang berisikan uraian pelaporan ke gcg_wbs@inti.co.id ; atau
3. Melalui pesan singkat kepada Ketua Tim WBS (+62 811-2437-770).
4. Melalui website ke <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Guna mendukung cara pelaporan tersebut, Perseroan telah menyediakan 1 (satu) buah “Kotak WBS” yang ditempatkan di Lobby Gedung Kantor Pusat (GKP) sebagai sarana untuk menampung surat pelaporan yang dikirimkan oleh *Whistle-Blower*.

Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor yaitu nama, nomor induk pegawai (NIP), jabatan, dan unit kerja untuk memudahkan tindak lanjut. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas tetap diproses setelah mempertimbangkan kesungguhan isi laporan, kredibilitas, bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi.

Pelaporan yang disampaikan oleh *Whistle-Blower* wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

1. Uraian pelanggaran/kecurangan dan kerugian (apabila dapat ditentukan) yang ditimbulkan dari Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut.
2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan.
3. Lokasi pelanggaran dan/atau kecurangan yang meliputi nama, jabatan, atau unit kerja.
4. Waktu pelanggaran dan/atau kecurangan.
5. Bagaimana pelanggaran dan/atau kecurangan terjadi dan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung, berupa bukti tulisan baik di atas kertas atau dalam bentuk data elektronik yang dapat dibaca, bukti audio (rekaman suara) dan/atau video (rekaman gambar).
6. Apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
7. Apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut pernah terjadi sebelumnya maupun bukti kesaksian.

Apabila pelaporan pelanggaran dan/atau kecurangan

Reporting by Whistle-blowers can be implemented through 3 (three) ways:

1. *Through a letter containing a description of reporting and evidence, which is addressed directly to “WBS Team Leader”, with a particular format, and put into a box of WBS; or*
2. *Via e-mail that contains a description reporting to gcg_wbs@inti.co.id ; or*
3. *Via short message service (SMS) to the Chairman of the WBS (+62 811-2437-770).*
4. *Via web to <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.*

To support the reporting method, the Company has provided 1 (one) “WBS Box” placed in the Lobby of the Central Office Building as a means to accommodate a reporting letter sent by the Whistle-Blower.

Reporting is done by stating the identity of the complainant: name, employee identity number, position, and unit to facilitate follow-up. Reporting delivered without identity will still be processed, however, after considering the sincerity of the report sincerity, credibility, and the evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report.

Reporting done by Whistle-blowers required to provide an early indication of which can be accounted for, includes:

1. *Description of violation and/or fraud that occurs and loss (if can be determined) arising from the violation and/or the fraud.*
2. *Parties involved, that is who should be responsible for violation and/or fraud, including witnesses and parties who benefited or harmed by violation and/or the fraud.*
3. *Violation and/or fraud location, which includes the name, place, units work or function.*
4. *Violation and/or fraud time.*
5. *How the violation and/or fraud occurs and whether there is supporting evidence, in form of written evidence set forth in any form on paper or in the form of electronic data that can be read, audio evidence (sound recording), evidence of video (image recording), or testimonial evidence.*
6. *If the violation and/or fraud is never reported to the other party.*
7. *If the violation and/or fraud is happened before.*

If the reporting of violations and/or fraud filed by a person



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

diajukan oleh orang atau badan hukum atau lembaga di luar Perseroan, maka juga diserahkan bukti-bukti lainnya yaitu:

1. Salinan bukti identitas pelapor; atau
2. Surat Kuasa dari *Whistle-Blower* di luar Perseroan kepada penerima kuasa yang menyatakan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama yang bersangkutan; atau
3. Jika perwakilan *Whistle-Blower* di luar Perseroan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran dan/atau kecurangan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

Jika pelaporan dilakukan melalui surat elektronik atau pesan singkat, bukti-bukti sebagaimana dimaksud dimintakan oleh Tim WBS pada tahap proses Evaluasi Kelayakan.

or legal entity or institution outside the Company, then additionally other evidence shall be submitted, namely:

1. *Copy of proof of identity of the complainant; or*
2. *Power of Attorney from the Whistle-blower outside the Company to the proxy stating authority person to act for and on behalf of the concerned; or*
3. *If the representative of Whistle-Blower outside the Company is an institution or legal entity, they must attach a document stating that the person/party reporting violations and/or fraud is authorized to represent the organization or legal entity.*

If reporting is done through e-mail or short message service (SMS), the evidence referred will be requested by WBS team at the Feasibility Evaluation process.

Jaminan Perlindungan Bagi *Whistle-Blower*

Whistle-Blower Protection Assurance

Whistle-Blower mendapat jaminan perlindungan dari tim *Wistle-Blowing System* (WBS), terhitung sejak laporan diterima sampai dengan laporan tersebut dinyatakan ditutup dan/atau selesainya proses pengungkapan laporan yang disampaikan. Jaminan perlindungan ini bertujuan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari intimidasi, pemerasan, ancaman, dan kekerasan dari seseorang, kelompok, maupun institusi berbadan hukum.

Jaminan perlindungan dapat berupa antara lain:

1. Memperoleh perlindungan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Memberikan pernyataan tanpa tekanan.
3. Mendapat penerjemah (bila perlu).
4. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus.
5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
6. Memperoleh penggantian biaya transportasi (bila ada) sesuai dengan kebutuhan.
7. Mendapat nasihat atau bantuan hukum.

Perseroan juga memberikan perlindungan kepada *Whistle-Blower* yang laporannya terbukti benar atas tindakan sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.

Whistle-blowers receives protection assurance from Wistle-Blowing System (WBS) team, starting from receipt of the report by the WBS team until the report is declared closed and/or the disclosure of the submitted report is completed. The protection assurance given to the Whistle-Blower is intended that he/she can be protected from intimidation, extortion, threats and violence from a person, group or legal entity.

Protection assurance can be, among others:

1. *Protection and freedom from threats associated with the testimony that will be, is being or has been rendered.*
2. *Providing a statement without pressure.*
3. *Obtaining an interpreter (if necessary).*
4. *Getting information from the case progress.*
5. *Obtaining information about court decisions.*
6. *Obtaining reimbursement for transportation costs (if any) as needed.*
7. *Receiving advice or legal assistance.*

The Company also provides protections to the Whistle-blowers whose report is proved to be true, from actions as follows:

1. *Unfair dismissal.*
2. *Demotion of position or rank.*
3. *Note that could harm their personal file record.*

Dalam hal laporan diselesaikan melalui jalur hukum di luar perusahaan, maka jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud tidak berlaku. *Whistle-Blower* akan mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan diberikan kepada *Whistle-Blower* apabila materi laporan yang disampaikan mempengaruhi kepentingan proses bisnis Perseroan secara signifikan. Penghargaan diberikan secara rahasia setelah kasus yang dilaporkan dinyatakan resmi terbukti dan dinyatakan selesai.

If the report resolved through legal recourse outside the Company, the protection assurance referred to herein does not apply. Whistle-blower protection is instead guaranteed in accordance with the applicable legislation.

Award is given to the Whistle-Blower if the submitted report materials affect the Company business process significantly. Awards shall be given in secret after the reported cases have been declared officially as proven and finished.

Evaluasi Kelayakan

Feasibility Evaluation

Pelaporan yang masuk akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pada tahap ini, Tim WBS melakukan pemeriksaan atas adanya Indikasi Awal atau kesesuaian kriteria Pelaporan dan membuat ringkasannya. Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan dari Pelapor jika bukti atau keterangan yang disampaikan sebelumnya dinilai belum cukup. Teknik dan/atau tata cara evaluasi ditetapkan oleh Tim WBS.

Apabila di dalam Pelaporan tersebut terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria Pelaporan dan dapat ditindaklanjuti, maka Tim WBS memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi, yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tim WBS, Direktur Utama dapat memutuskan apakah proses pemeriksaan dihentikan (jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal) atau dilanjutkan ke proses investigasi. Keputusan dituangkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 SKD tentang Kebijakan WBS.

Apabila Direktur Utama memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan, maka Tim WBS akan mendokumentasikan data yang telah diperoleh sebagai arsip. Apabila Direktur Utama memutuskan untuk melanjutkan proses investigasi, maka Tim WBS akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rekomendasi tim WBS ditindaklanjuti oleh:

1. Direksi, jika Terlapor adalah Karyawan.
2. Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah anggota Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, jika Terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris.

Submitted report will be evaluated for feasibility by WBS Team within 14 (fourteen) working days. At this stage, WBS team shall conduct an examination of the Preliminary Indications or the suitability of the Reporting criteria and make a summary. The WBS team may request additional evidence or statements from the Wistle-blower, if the evidence or information submitted previously is considered insufficient. Evaluation techniques and/or procedures shall be determined by WBS Team.

If the Reporting contains Preliminary Indications or complies the reporting criteria and is actionable, then the WBS Team shall provide recommendations to the President Director, which shall be contained in a evaluation report, for appropriate follow-up of evaluation result.

Based on the WBS Team evaluation report, President Director shall decide if the inspection process shall be stopped (if the Preliminary Indications are not qualified), or proceed with investigation. The decision shall be contained in Minutes of Meeting according to the format as described in Appendix 2 of BOD Decree on WBS Policy.

If the President Director decides to stop the inspection process, then the WBS Team shall document the data that has been obtained as archive. If the President Director decides to proceed with the investigation, the WBS team will conduct an investigation according to established procedures.

WBS Team recommendation shall be followed-up by:

1. Board of Directors, if the Reported is an employee.
2. Board of Commissioners, if the Reported is a member of the Board of Directors.
3. General Meeting of Shareholders, if the Reported is a Member of the Board of Commissioners.



Investigasi

Investigation

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 7 Kebijakan WBS, Tim WBS melakukan investigasi lebih lanjut atas Indikasi awal adanya tindak Pelanggaran dan/atau Kecurangan. Pada tahap ini Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait. Teknik dan/atau tata cara investigasi ditetapkan oleh Tim WBS.

Seluruh proses Investigasi atas Pelaporan wajib dibuatkan Berita Acara dan/atau Laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi. Proses Investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas fakta, bukti, analisa, rekomendasi, dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.

Laporan Hasil Investigasi harus disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti nonfisik. Laporan Hasil Investigasi tidak berupa opini atau pendapat, tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil Investigasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan.

Laporan Hasil Investigasi Tim WBS harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima oleh Tim WBS. Laporan kemudian disampaikan dan dipresentasikan oleh Tim WBS kepada Direksi.

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud di atas, Direksi menggunakan Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 Kebijakan WBS dan memutuskan:

1. Menutup permasalahan yang diinvestigasi, jika tidak terbukti benar; atau
2. Memerintahkan kepada atasan langsung Terlapor untuk melakukan proses penjatihan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; jika terbukti terjadi Pelanggaran dan/atau Kecurangan; atau
3. Jika dinilai lebih baik bagi Perusahaan, dapat meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, apabila terbukti terkait dengan tindak pidana;
4. Huruf (b) dan (c) harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang berlaku di Perusahaan.

Based on Decree of President Director as referred in paragraph (6) article 7 of WBS Policy, the WBS team performs further investigation on preliminary indications of Violation and/or Fraud. At this stage, the WBS team may request additional evidence or statements from the involved parties. Techniques and/or procedures shall be determined by WBS Team.

The entire Investigation Process of the Reporting must be made into Minutes of Meeting and/or Report, then signed by the parties involved in the investigation process. The investigation process shall be well documented, so if needed for reconsideration, reviewing of facts, evidence, analysis, recommendations, and also important decisions taken during the process can be easily reviewed.

Report of Investigation shall be accompanied by some supporting evidence, which is physical and non-physical evidence. Report of Investigation shall not represent opinions or views, but in the form of a final conclusion on the investigation results that will be used as a basis for taking action.

Report of Investigation made by the WBS Team must have been completed within a maximum period of 90 (ninety) working days after the decision to conduct investigations received by WBS Team. The report shall then be submitted and presented by WBS Team to the Board of Directors.

Based on the report referred above, the Board of Directors shall use Minutes of Meeting according to the format as described in Appendix 3 of WBS Policy and decide:

1. *To close the investigated problems, if not proven to be true; or*
2. *To order the immediate supervisor of the Reported to perform disciplinary punishment process according to applicable regulations of the Company; if there is evidence of violation and/or fraud; or*
3. *If considered better for the company, to continue to investigators for further proceedings, provided proven to be associated with criminal act;*
4. *Letter (b) and (c) must be determined in accordance with the applicable provisions of Disciplinary Sanctions in the Company.*

Bila hasil investigasi mengindikasikan adanya tindakan kriminal, maka Direksi dapat memutuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim WBS dapat menyampaikan laporan hasil Investigasi secara langsung kepada:

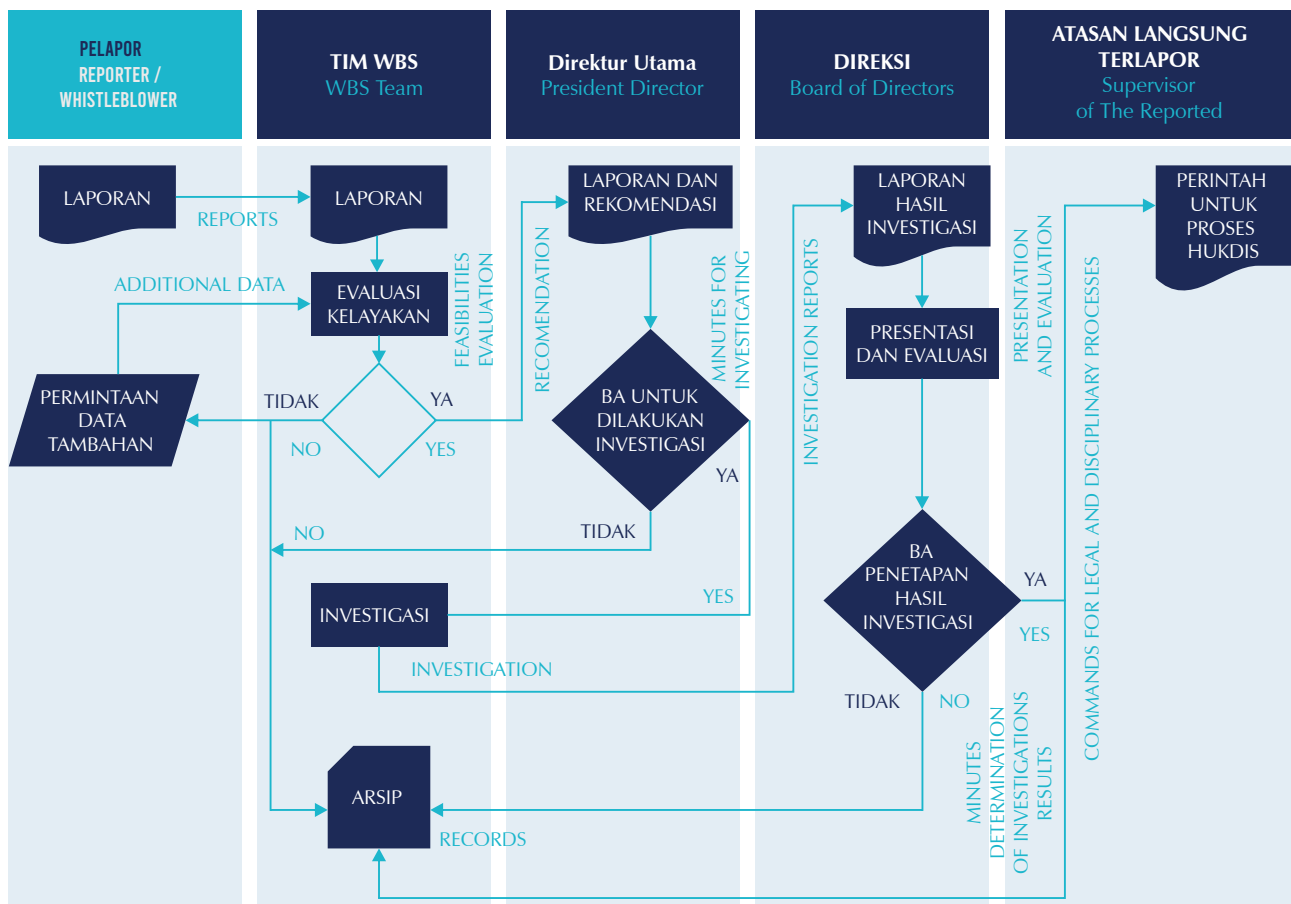
1. Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama jika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Komisaris Utama membuat laporan kepada Dewan Komisaris, setelah terlebih dahulu menugaskan Komite Audit untuk mengkaji ulang hasil investigasi Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.
2. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris.

If the investigation results indicate the existence of a criminal act, then the Board of Directors may decide to follow-up the matter through legal recourse according to law and legislation.

WBS Team submit a report of investigation directly to:

1. The Board of Commissioners through the President Commissioner if there are strong indications of violations and/or fraud committed by members of the Board of Directors. The President Commissioner reports to the Board of Commissioners, after first assigning the Audit Committee to review the results of investigations WBS Team within 14 (fourteen) working days from the receipt of the report.
2. Shareholders or General Meeting of Shareholders if there are strong indications of violations and/or fraud committed by members of the Board of Commissioners.

WBS System Procedures of Report





Pada tahun 2021 tidak terdapat laporan pengaduan melalui saluran WBS terkait adanya dugaan Pelanggaran atau Kecurangan yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero).

In 2021 there were no reports of complaints through the WBS channel related to the alleged Violations or Fraud committed by PT INTI (Persero)'s personnel.



Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan Good Corporate Governance yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penegakan penerapan terhadap WBS akan selalu terus ditingkatkan. Perseroan melakukan evaluasi, pemutakhiran, dan penyempurnaan Kebijakan WBS dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

As an embodiment of effective and good implementation of Good Corporate Governance, the dissemination and enforcement of the application to the Whistleblowing System will always be improved. The company evaluates, updates and refines WBS Policies in order to continually improve in accordance with the development of the Company's business and adapts to the applicable laws and regulations.

Detail laporan yang masuk melalui saluran Whistle-Blowing System (WBS) selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Details of report submitted through Whistle-Blowing System (WBS) during 2021 is as follows:

No.	Uraian Description	Jumlah Laporan Number of Reports
1	Laporan Masuk <i>Submitted Reports</i>	0
2	Tindak Lanjut Pelaporan <i>Report Follow-Ups</i>	
	a. Investigasi Tim WBS <i>WBS Team Investigation</i>	0
	b. Internal Perusahaan <i>Company Internals</i>	0
	c. Eksternal Perusahaan dan Kepolisian <i>Company Externals and Police</i>	0
3	Jenis Kasus yang Dilaporkan <i>Type of Reported Cases</i>	
	a. Kecurangan Internal <i>Internal Fraud</i>	0
	b. Kecurangan Eksternal <i>External Fraud</i>	0
	c. Kegagalan Sistem <i>System failure</i>	0
	d. Kegagalan transaksi dan manajemen operasional <i>Transaction failure and operational management</i>	0
	e. Kegagalan hubungan ketenagakerjaan dan keamanan kerja <i>Labor relations and work security failure</i>	0
	f. Kegagalan praktik bisnis, produk dan hubungan dengan kastemer <i>Business and product practices, customer relationship failure</i>	0
	g. Lain-lain <i>Others</i>	0

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi

Important Matters That are Being Faced

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Pada tahun 2021, Perusahaan merupakan Tergugat 1 dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tan Heng Lok melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 16 September 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Perusahaan digugat terkait penyelesaian utang.

Important matters that are being faced by companies, entities, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners who served during a period of annual report.

In 2021, The Company is a first Defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Tan Heng Lok through Central Jakarta District Court submitted as the case Nomor 561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst on September 16, 2021. The point of lawsuit is the Company get sued regarding debt settlement.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) merupakan konsep luas yang dapat dimaknai dalam berbagai bentuk tergantung pada perusahaan dan industri.

Melalui program CSR, filantropi, dan upaya sukarela, suatu bisnis dapat memberi manfaat bagi masyarakat sambil meningkatkan merk mereka sendiri. Pentingnya program CSR bagi masyarakat, tidak kalah pentingnya bagi Perseroan.

Kegiatan CSR dapat membantu menjalin ikatan yang lebih kuat antara karyawan dan Perseroan. Kegiatan ini dapat meningkatkan moral dan dapat membantu karyawan dan perusahaan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Agar Perseroan bertanggung jawab secara sosial, diawali dengan Perseroan harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pemegang sahamnya. Seringkali, perusahaan yang mengadopsi program CSR telah mengembangkan bisnis mereka ke titik di mana mereka dapat memberikan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, program CSR terutama merupakan strategi perusahaan besar. Selain itu, semakin terlihat dan sukses sebuah perusahaan, semakin besar tanggung jawabnya untuk menetapkan standar perilaku etis bagi rekan-rekan, pesaing, dan industrinya.

PT INTI (Persero) berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada seluruh pihak yang berperan besar dalam langkah Perseroan, yang telah dimiliki dan

Corporate Social Responsibility (CSR) is a broad concept that can be interpreted in various forms depending on the company and industry.

Through CSR programs, philanthropy and volunteer efforts, a business can benefit society while enhancing their own brand. The importance of CSR programs for the community is no less important for the Company.

CSR activities can help build stronger bonds between employees and the Company. These activities can boost morale and can help employees and employers feel more connected to the world around them. In order for the Company to be socially responsible, it begins with the Company being responsible to itself and its shareholders. Often, companies that adopt CSR programs have grown their business to the point where they can give back to society. Thus, CSR programs are primarily a strategy for large companies. In addition, the more visible and successful a company is, the greater its responsibility to set standards of ethical behavior for its peers, competition, and industry.

PT INTI (Persero) is committed to continue to provide the best to all parties who play a major role in the Company's steps, which have been owned and implemented by



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

diterapkan oleh Perseroan dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut terus dipegang teguh dan menjadi hal penting bagi Perseroan sebagai bentuk fokus dan tanggung jawab Perseroan terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan besar dalam upaya mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang saat ini berubah nama menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility atau CSR), yang berfokus pada beberapa pihak pendukung, antara lain lingkungan hidup, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, dan konsumen.

Pelaksanaan program-program CSR yang dilakukan secara efektif, efisien, dan konsisten setiap tahun ini memberikan dampak besar tidak hanya kepada berbagai pihak tersebut, tapi juga menunjang Perseroan mencapai keberlanjutan bisnis di masa kini dan masa mendatang.

the Company from year to year. This commitment continues to be firmly held and becomes important for the Company as a form of the Company's focus and responsibility towards those who have provided great support in the effort to achieve sustainable business growth.

This commitment is realized through the implementation of the Partnership and Community Development Program which is currently changing its name to Corporate Social Responsibility (CSR), which focuses on several supporting parties, including the environment, employment, social community, and consumers.

The implementation of CSR programs that are carried out effectively, efficiently, and consistently every year has had a major impact not only on these various parties, but also supports the Company in achieving business sustainability in the present and in the future.

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Basic Implementation of Corporate Social Responsibility

Landasan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia adalah :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf (e) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 tentang BUMN mengatur BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER.09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, PER.03/MBU/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016, PER-02/MBU/7/2017 tertanggal 5 Juli 2017, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dan Nomor PER-05/MBU/04/2021 tertanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor KN.010/2016 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor

The basis for the implementation of the Partnership and Community Development Program for the Limited Liability (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia is:

1. Law Number 19 of 2003 Article 2 paragraph (1) letter (e), concerning State-Owned Enterprises (SOEs), one of the aims and objectives of establishing SOEs is to actively provide guidance and assistance to entrepreneurs from economically weak groups, cooperatives and the community, Article 88 concerning SOEs stipulates that SOEs may set aside a portion of their net profits for the purposes of fostering small businesses or cooperatives as well as fostering communities around SOEs which are regulated by Ministerial Decree.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER.09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015, PER.03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016, and PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017, concerning the Partnership Program and the Community Development Program of SOEs, and Number PER-05/MBU/04/2021 dated April 8, 2021, concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises
3. Decree of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number KN.010/2016 dated July 1, 2016 concerning Management of the Partnership Program and Community Development Program, which was amended by Decree of the Board of Directors

KN.009/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dan kemudian diubah kembali dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor KN.016/2019 tertanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

4. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2021 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor KN.009/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor KN.002/2019 tertanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

of PT INTI (Persero) Number KN.009/2018 dated July 5, 2018 concerning Guidelines Management of the Partnership Program and Community Development Program, and then amended again by the Decree of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number KN.016/2019 dated January 30, 2019 regarding Guidelines for the Management of Partnership and Community Development Programs.

4. The implementation of the Partnership and Community Development Program 2020 is based on the Decree of the Board of Directors Number KN.009/2018 dated July 5, 2018 concerning Guidelines for the Management of the Partnership and Community Development Program, which was amended by Decree of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number KN.002/2019 dated 30 January 2019 regarding Guidelines for the Management of Partnership and Community Development Programs.

Efektivitas Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil

Fund Distribution Effectiveness of Small Micro Business Funding Program

Tingkat efektifitas penyaluran Program Kemitraan pada tahun 2021 tercatat sebesar 87,31% dengan skor 2, sedangkan Kolektibilitas sebesar 71,86% dengan skor 3. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang semakin meningkat serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Bandung, sehingga beberapa mitra menunda pengajuan pinjaman.

Penyaluran dana bergulir Mitra Binaan atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.255.000.000,- atau 137% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021 sebesar Rp1.650.000.000,-. Dana tersebut disalurkan kepada 43 (empat puluh tiga) Mitra Binaan untuk usaha mikro kecil yang berada di wilayah Bandung dan Jawa Barat.

The effectiveness of the distribution of the Partnership Program in 2021 was recorded at 87.31% with a score of 2, while Collectibility was 71.86% with a score of 3. This is due to the increasing Covid-19 pandemic and the implementation of Enforcement of Restrictions on Community Activities. in the Bandung area, so that some partners delay loan applications.

The distribution of revolving funds of Foster Partners or Micro and Small Enterprises in 2021 is Rp2,255,000,000, - or 137% of the 2021 Work Plan and Budget which is Rp1,650,000,000.-. The funds were distributed to 43 (forty three) Foster Partners for micro and small businesses located in the Bandung and West Java areas.

Efektivitas Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Distribution Effectiveness of Social and Environmental Responsibility Programs

Realisasi penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pilar sosial pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.100.000,- berupa sumbangan renovasi masjid, bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta bantuan untuk penyandang disabilitas yang berada di Bandung dan sekitar lingkungan Perusahaan.

Realisasi penyaluran dana TJSL Pilar Lingkungan tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.000.000,- berupa pembagian bibit tanaman yang disalurkan kepada warga di sekitar Perusahaan.

Sumber dana tersebut berasal dari Perusahaan melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis.

The realization of the distribution of Social and Environmental Responsibility funds for social pillars in 2021 was recorded at Rp7,100,000,- in the form of donations for mosque renovations, assistance to Integrated Service Posts, as well as assistance for persons with disabilities in Bandung and around the Company environment.

The realization of the distribution of the Environmental Pillar Social and Environmental Responsibility funds in 2021 was recorded at Rp3,000,000,- in the form of distribution of plant seeds distributed to residents around the Company.

The source of these funds comes from the Company through the Corporate Secretary and Strategic Planning Division.



Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Scope of Corporate Social Responsibility

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT INTI (Persero) senantiasa memastikan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan dan masyarakat sekitar dalam lingkup sebagai berikut:

1. Prosperity
2. People
3. Planet
4. Partnership
5. Prudence

In carrying out Corporate Social Responsibility, PT INTI (Persero) always ensures a balance of economic, social and environmental performance to achieve sustainability and the surrounding community in the following areas:

1. Prosperity
2. People
3. Planets
4. Partnerships
5. Prudence

Prosperity - Kinerja Operasional Untuk Keberlanjutan Manfaat Ekonomi yang Optimal

Prosperity - Operational Performance for Sustainable Economic Benefits

Lingkup ini terkait dengan kinerja bisnis, operasional, dan keuangan untuk mendukung tercapainya keberlanjutan Perseroan dan mendorong kesinambungan pemberdayaan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan yang berfokus pada hal berikut:

1. Optimalisasi Sumber Daya untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan.
2. Optimalisasi Kinerja Bisnis dan Kemandirian Anak Perusahaan.

PT INTI (Persero) fokus dengan menjaga kinerja bisnis, operasional dan keuangan yang akan memiliki manfaat ekonomi secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

This scope is related to business, operational and financial performance to support the achievement of the Company's sustainability and encourage the sustainability of local community empowerment & environmental sustainability focusing on this follows:

1. Optimization of Resources to Improve Company Performance.
2. Optimization of Subsidiaries' Business Performance and Independence.

PT INTI (Persero) focuses on maintaining business, operational, and financial performance that will have sustainable economic benefits, both directly and indirectly, so that it can contribute to improving the quality of life and welfare of the community.

People - Mendorong Insan INTI Untuk Berkembang

People - Encouraging Core People to Develop

Lingkup ini membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Ketenagakerjaan. Pada 2021, beberapa kebijakan dan program dalam pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di karyawan sebagian besar masih menggunakan aturan seperti tahun sebelumnya, antara lain:

1. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Dalam rangka mendukung langkah strategis Pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 maka PT INTI (Persero) membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KD.043/KP.02.03/021100/2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang dipimpin oleh Direktur Bisnis PT INTI (Persero) selaku Ketua Satuan Tugas dan Direktur Keuangan PT INTI (Persero) yang bertindak sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas ini bertugas untuk merumuskan langkah-langkah aplikatif terkait pencegahan dan penanganan Virus Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Selain itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap implementasi protokol kesehatan Virus Covid-19 di lingkungan Perseroan, serta melakukan koordinasi dan penanganan Virus Covid-19 bagi karyawan, keluarga, mitra kerja, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan jika diperlukan.

2. Penyiapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Sebagai bentuk antisipasi dan implementasi bisnis berkelanjutan di era *the New Normal* sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario *the New Normal* BUMN, maka Perseroan pun merumuskan sejumlah aturan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang dituangkan melalui sejumlah kebijakan berikut:

- a. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.015/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Direksi Nomor KN.009/2020 tentang Kebijakan

This scope discusses Occupational Health and Safety (K3) and Employment. In 2021, most of the policies and programs in preventing and handling the spread of Covid-19 in employees will still use the rules as in the previous year, including:

1. Establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19)

In order to support the Government's strategic steps to deal with the Covid-19 pandemic, PT INTI (Persero) formed a Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) as stated in the Decree of the Board of Directors Number KD.043/KP.02.03/021100/2020 concerning the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19).

The Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) led by the Business Director of PT INTI (Persero) as the Chair of the Task Force and the Finance Director of PT INTI (Persero) who acts as the Deputy Chair of the Task Force is tasked with formulating applicable steps related to the prevention and handling of the Covid-19 Virus in accordance with Government regulations.

In addition, the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) also has the responsibility to carry out strict supervision and evaluation of the implementation of the Covid-19 Virus health protocol within the Company, as well as to coordinate and handle the Covid-19 Virus for employees, families, work partners, and communities around the Company's operational areas if needed.

2. New Habit Adaptation Preparation

As a form of anticipation and implementation of sustainable business in The New Normal era in accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-336/MBU/05/2020 concerning Anticipation of the New Normal SOEs Scenario, the Company also formulated a number of rules for implementing habitual adaptation which is outlined through the following policy:

- a. a. Decree of the Board of Directors Number KN.015/2021 concerning the Third Amendment to the Board of Directors Decree



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Bekerja dari Rumah (Work from Home atau WFH).

- b. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.014/2020 tentang Protokol Interaksi Pelanggan.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.015/2020 tentang Protokol Interaksi Pemasok.
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2020 tentang Protokol Interaksi Mitra Usaha.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.017/2020 tentang Protokol Interaksi Stakeholders Lain.
- f. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.018/2020 tentang Protokol Interaksi Karyawan

Selain itu, Direksi pun menerapkan sejumlah kebijakan seperti Kebijakan Larangan Berpergian, Kebijakan terkait Pelaksanaan *Screening Test*, Tracing and Treatment, Kebijakan *Work from Office* (WFO) Partial, Kebijakan Operasi (membatasi pegawai yang berisiko tinggi), Kebijakan Tamu atau Stakeholders, dan Kebijakan Kegiatan Tatap Muka.

Di penghujung tahun 2021, sehubungan dengan tingkat penyebaran Virus Covid-19 yang mulai melandai, Direksi menerbitkan kebijakan *Work from Office* yang berlaku untuk seluruh karyawan mulai 1 November 2021 dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

3. Pembentukan INTI Covid Ranger

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) juga dibantu oleh Covid Ranger INTI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KD.086/KP.09/021100/2020 tentang Covid Ranger INTI untuk mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi *the New Normal* sekaligus perilaku disiplin sesuai dengan Protokol Penanganan Virus Covid-19.

4. Disinfeksi area kerja dan kompleks perkantoran secara rutin.

Number KN.009/2020 concerning Work from Home or WFH Policy.

- b. Decree of the Board of Directors Number KN.014/2020 concerning Customer Interaction Protocol.
- c. Decree of the Board of Directors Number KN.015/2020 concerning Supplier Interaction Protocol.
- d. Decree of the Board of Directors Number KN.016/2020 concerning Business Partner Interaction Protocol.
- e. Decree of the Board of Directors Number KN.017/2020 concerning Protocol for Interaction of Other Stakeholders.
- f. Decree of the Board of Directors Number KN.018/2020 concerning Employee Interaction Protocol

In addition, the Board of Directors also implements a number of policies such as the Travel Prohibition Policy, Policies related to the Implementation of Screening Tests, Tracing and Treatment, Partial Work from Office (WFO) Policies, Operations Policies (limiting high-risk employees), Guest or Stakeholders Policy, and Face-to-face Activities Policy.

At the end of 2021, due to the slowing rate of the spread of the Covid-19 Virus, the Board of Directors issued a Work from Office policy that applies to all employees starting November 1, 2021, while still being required to apply strict health protocols.

3. Establishment of the INTI Covid Ranger

In carrying out its responsibilities, the Task Force for the Prevention and Handling of the Spread of the Corona Virus (Covid-19) is also assisted by the INTI Covid Ranger which was formed through the Decree of the Board of Directors Number KD.086/KP.09/021100/2020 concerning the INTI Covid Ranger to campaign for the optimism movement. in dealing with the New Normal as well as disciplinary behavior in accordance with the Covid-19 Virus Handling Protocol.

4. Disinfection of work areas and office complexes regularly.

Planet - Komitmen Menjaga Lingkungan Untuk Masa Depan

Planet - Commitment to Protecting The Environment for The Future

Lingkup ini berfokus pada tanggung jawab Perseroan pada pelestarian lingkungan.

PT INTI (Persero) dalam memenuhi setiap pekerjaannya infrastruktur kastamernya, senantiasa memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal tersebut diterapkan seperti pada pekerjaan *Outside Plant* (OSP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan lain-lain.

Selain itu, PT INTI (Persero) melalui Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menyalurkan dana untuk program pelestarian lingkungan berupa sumbangan bibit tanaman untuk warga sekitar lingkungan Perusahaan senilai Rp3.000.000.

This scope focuses on the Company's responsibility for environmental preservation.

PT INTI (Persero) in fulfilling each of its customer infrastructure work, always pays attention to Environmental Impact Analysis. This is applied to the work of Outside Plant (OSP), Solar Power Plant, and others.

In addition, PT INTI (Persero) through the Partnership Program and Community Development Division distributes funds for environmental conservation programs in the form of donations of plant seeds for residents around the Company worth Rp3,000,000.



Partnership - Kerja Sama Saling Menguntungkan

Partnership - Mutual Benefit Cooperation

Lingkup ini memastikan PT INTI (Persero) mempunyai kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi masyarakat, mitra usaha, vendor, pemasok, dan subkontraktor, dengan dilandaskan prinsip saling menguntungkan, adil, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalin, berkolaborasi, dan menjaga kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi dan institusi eksternal.
2. Pemetaan dan pembinaan hubungan baik dengan kastamer.
3. Menerapkan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang juga berlaku bagi pemegang saham, masyarakat, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kerja sama bisnis.
4. Perseroan saat ini tengah mengembangkan Sistem Optimalisasi untuk proses pengadaan barang dan jasa di seluruh unit bisnis.

This scope ensures that PT INTI (Persero) has good cooperation with all stakeholders including the community, business partners, vendors, suppliers, and subcontractors, based on the principles of mutual benefit, fairness, transparency, and integrity. This is realized through the implementation of the following:

1. *Establish, collaborate and maintain strategic partnerships with various external associations and institutions.*
2. *Mapping and building good relations with the customer.*
3. *Implementing the Company's Code of Conduct which also applies to shareholders, the community, business partners, and all stakeholders who engage in business cooperation.*
4. *The Company is currently developing an Optimization System for the procurement of goods and services in all business units.*

Prudence - Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prudence - Creating Good Corporate Governance

Lingkup ini mencakup hal yang dilakukan Perseroan dalam upaya menjunjung tinggi kepatuhan hukum, etika, integritas, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), terutama dalam menjalankan kegiatan operasional, maupun berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Upaya tersebut diterapkan dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Nilai dan Budaya Perusahaan.
2. Project Charter, Management Policy, Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), Standard Operating Procedure (SOP), dan Instruksi Kerja (*Work Instruction* atau WI).
3. Manajemen Risiko.
4. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
5. Kebijakan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. *Whistleblowing System*.

This scope includes what the Company does in an effort to uphold legal compliance, ethics, integrity, and implementation of Good Corporate Governance (GCG), especially in carrying out operational activities, as well as interacting with stakeholders. These efforts are implemented by implementing several things as follows:

1. *Corporate Governance Policy Guidelines, as well as Corporate Values and Culture.*
2. *Project Charter, Management Policy, Code of Conduct, Standard Operating Procedure (SOP), and Work Instruction (WI).*
3. *Risk Management.*
4. *Gratification Control Policy.*
5. *Anti-Bribery Management System Standard Policy.*
6. *Whistleblowing System.*



Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)

Social Responsibility Related to Human Rights

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip utama bagi Perseroan dan berkaitan erat dengan kegiatan operasional. Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM diterapkan Perseroan melalui prinsip non-diskriminasi di tempat kerja dan pengelolaan sumber daya manusia.

Hal ini tercermin dari kebijakan rekrutmen dan pengembangan karier yang adil dan terbuka di Perseroan, dalam rangka mewujudkan keberagaman dan inklusivitas di lingkungan kerja. Seleksi Karyawan pun dilakukan berdasarkan potensi profesional dan kinerjanya, tanpa memandang perbedaan suku, etnis, ras, agama, dan jenis kelamin.

Respect for Human Rights is the main principle for the Company and is closely related to operational activities. Social Responsibility Related to Human Rights is implemented by the Company through the principle of non-discrimination in the workplace and human resource management.

This is reflected in the Company's fair and open recruitment and career development policies, in order to create diversity and inclusiveness in the work environment. Employee selection is also carried out based on professional potential and performance, regardless of ethnicity, ethnicity, race, religion, and gender differences.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Praktik Operasi yang Adil

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operating Practices

PT INTI (Persero) senantiasa berupaya menjalankan operasi usaha yang adil dan transparan serta sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG).

Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan Pedoman Kode Etik sebagai panduan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan pemangku kepentingan eksternal Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Implementasi kode etik untuk operasi usaha yang adil terlihat dari pelaksanaan sistem tata kelola yang baik, diiringi dengan upaya perbaikan yang terus-menerus. Perseroan juga senantiasa memenuhi prinsip akuntabilitas secara efektif dan transparan, juga membuka akses pelaporan melalui *Whistle-Blowing System*.

Di samping itu, Perseroan juga selalu menyertakan tujuan kebijakan bisnis berkelanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan.

PT INTI (Persero) always strives to carry out fair and transparent business operations and in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Therefore, the Company has established a Code of Conduct Guidelines as a guide for all Company employees in interacting with fellow employees and external stakeholders of the Company as part of the implementation of their daily duties and responsibilities.

The implementation of the code of ethics for fair business operations can be seen from the implementation of a good governance system, accompanied by continuous improvement efforts. The Company also consistently fulfills the principle of accountability in an effective and transparent manner, as well as opening access to reporting through the Whistle-Blowing System.

In addition, the Company also always incorporates sustainable business policy objectives into the decision-making process.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Related to The Environment

Perseroan meyakini aspek kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis di masa depan. Oleh karenanya, dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sehari-hari, Perseroan menjamin bahwa seluruh aktivitasnya tidak akan merusak atau mencemari lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan bisnis sebagai industri telekomunikasi, Perseroan menyadari adanya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Perseroan terhadap lingkungan. Untuk menjaga lingkungan hidup maka Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan, dan mengupayakan efisiensi energi.

Komitmen kebijakan ini dituangkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta membekali bisnis Perseroan dengan sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Realisasi penyaluran untuk program pelestarian lingkungan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.000.000 berupa sumbangan bibit tanaman untuk warga sekitar perusahaan.

Pada tahun 2021 Perusahaan tidak mendapatkan sertifikat terkait Lingkungan Hidup.

The Company believes that environmental sustainability is one of the important factors in supporting business continuity in the future. Therefore, in carrying out its business activities and day-to-day operations, the Company guarantees that all of its activities will not damage or pollute the environment as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

In running its business as a telecommunications industry, the Company is aware of the impact of the Company's activities on the environment. To protect the environment, the Company is committed to complying with regulations related to environmental management, preventing environmental pollution, and striving for energy efficiency.

This policy commitment is stated in the Integrated Management System Policy which has been socialized to all employees and has provided the Company's business with ISO 14001:2015 certification on Environmental Management System and ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management System.

The realization of distribution for the environmental conservation program in 2021 was recorded at Rp3,000,000 in the form of donations of plant seeds for residents around the company.

In 2021 the Company did not get a certificate related to the Environment.

Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety

Perseroan senantiasa memandang karyawan sebagai aset yang memiliki peranan besar dalam mendukung keberlangsungan bisnis usaha di masa depan. Berlandaskan pada pandangan tersebut, Perseroan selalu berupaya memenuhi hak seluruh karyawan baik dalam hal kesejahteraan, kesehatan, hingga keselamatan saat bekerja sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan agar tercipta hubungan industrial yang sehat serta seluruh karyawan lebih termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya.

Selain pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia, Perseroan juga melaksanakan peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja. Hal ini mengingat Sumber Daya Manusia merupakan aset penting sekaligus modal utama (human capital) untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Perlindungan dan jaminan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawan sebagai komponen utama Kualitas Lingkungan Kerja, akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan hidup karyawan.

Komitmen Perseroan dalam pengelolaan lingkungan kerja yang baik tercantum dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) Nomor QMS1-LDR05-001 Poin 3 yaitu "Berkomitmen untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan dan Mencegah Kecelakaan Kerja serta Mencegah Penyakit Akibat Kerja".

Untuk memastikan koordinasi dalam bidang keselamatan kerja, Perseroan membentuk Tim Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) melalui Surat Keputusan Direksi dan disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Bandung.

Kompetensi karyawan di bidang K3, khususnya bagi mereka yang memiliki tugas di bidang K3 baik sebagai tugas utama maupun tambahan, terus ditingkatkan pada tahun 2021 melalui pelatihan-pelatihan K3 Kelistrikan.

Untuk menunjang kesehatan karyawan, Perseroan juga menyediakan fasilitas poliklinik yang memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan (kuratif) sekaligus konsultasi untuk pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan (*preventif*).

The Company always views employees as assets that have a major role in supporting business continuity in the future. Based on this view, the Company always strives to fulfill the rights of all employees both in terms of welfare, health, and safety at work as stated in the Company Regulations. This is done by the Company in order to create healthy industrial relations and all employees are more motivated to improve their performance.

In addition to the development of Human Resources, the Company also improves the Quality of the Work Environment. This is because Human Resources is an important asset as well as the main capital (human capital) to achieve the Company's vision and mission.

Protection and assurance of Occupational Health and Safety of employees as the main component of the Quality of the Work Environment, will have an effect on increasing work productivity and employee welfare.

The Company's commitment in managing a good work environment is stated in the Integrated Management System Policy Number QMS1-LDR05-001 Point 3, namely "Committed to Preventing Environmental Pollution and Preventing Work Accidents and Preventing Occupational Diseases".

To ensure coordination in the field of work safety, the Company formed a Committee of Occupational Health and Safety through the Decree of the Board of Directors and was approved by the Head of the Bandung City Transmigration and Manpower Office.

The competence of employees in the field of Occupational Health and Safety, especially for those who have tasks in the field of Occupational Health and Safety both as main and additional tasks, will continue to be improved in 2021 through trainings for Electrical Occupational Health and Safety.

To support employee health, the Company also provides polyclinic facilities that provide outpatient (curative) examination and treatment services as well as consultation for disease prevention and health care (preventive).



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Sepanjang masa pandemi, Perseroan terus menguatkan komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan melalui penerapan protokol kesehatan ketat. Selain itu, Perseroan pun menyediakan sarana kantin sehat untuk memastikan kualitas konsumsi bagi seluruh karyawan PT INTI (Persero).

Tanggung jawab terhadap K3 juga dilakukan melalui pemeriksaan rutin sarana dan prasarana gedung seperti lift, hydrant, dan sarana penunjang keselamatan kerja lainnya. Kegiatan pun difokuskan pada pengecekan rutin sarana evakuasi keselamatan di gedung untuk menjaga agar kondisinya senantiasa siap dan siaga.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3, maka Perseroan pun menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai K3 kepada karyawan, minimal satu tahun sekali. Perseroan juga mengadakan simulasi tanggap darurat bencana, satu tahun sekali, untuk melatih kesiagaan terhadap bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya.

Hal tersebut dilakukan agar setiap orang, baik dari lingkup internal maupun eksternal, yang berada di lingkungan Perseroan wajib mengetahui aspek K3. Oleh karena itu, pada setiap awal penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, Perseroan akan selalu menayangkan video *Safety Induction* sebagai salah satu upaya peningkatan pemahaman K3. Upaya pemahaman pun dilakukan melalui pemasangan tanda dan rambu K3, seperti rambu Dilarang Merokok, tanda Wajib Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), petunjuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tanda Jalur Evakuasi, informasi Arah Parkir, dan lain-lain.

Selain itu, Perseroan pun berkomitmen pada aspek pengendalian dan pengelolaan limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang secara rutin dilakukan untuk menjamin baku mutu dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Perseroan pun menempatkan karyawan sebagai mitra strategis bagi keberlanjutan usaha. Perseroan menjamin kebebasan karyawan untuk berserikat dan bergabung dalam Serikat Pekerja INTI sebagai wadah penghubung karyawan dengan Perseroan, juga sekaligus sarana penyelesaian masalah karyawan.

Lalu, untuk menjembatani kepentingan Perseroan dan kepentingan karyawan, terutama yang terkait kebijakan Sumber Daya Manusia, Perseroan dan Serikat Pekerja INTI menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setiap dua tahun, dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perseroan juga menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui kebijakan rekrutasi, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karier

Throughout the pandemic, the Company continued to strengthen its commitment to maintaining the health and safety of employees through the implementation of strict health protocols. In addition, the Company also provides healthy canteen facilities to ensure quality consumption for all employees of PT INTI (Persero).

Responsibility for Occupational Health and Safety is also carried out through routine inspections of building facilities and infrastructure such as elevators, hydrants, and other work safety supporting facilities. Activities are also focused on routine checking of safety evacuation facilities in buildings to keep them ready and on standby.

To increase understanding and awareness of Occupational Health and Safety, the Company also organizes outreach and socialization regarding Occupational Health and Safety to employees, at least once a year. The Company also conducts disaster emergency response simulations, once a year, to train disaster preparedness such as fires, earthquakes, and other disasters.

This is done so that everyone, both internal and external, who are in the Company's environment must know the Occupational Health and Safety aspect. Therefore, at the beginning of every activity that involves external parties, the Company will always show a Safety Induction video as an effort to increase the understanding of Occupational Health and Safety. Efforts to understand are also carried out through the installation of Occupational Health and Safety signs, such as No-Smoking signs, Mandatory Personal Protective Equipment (PPE) signs, Light Fire Extinguishers instructions, Evacuation Path signs, Parking Direction information, and others.

In addition, the Company is also committed to the aspect of controlling and managing domestic waste and hazardous and toxic waste which is routinely carried out to ensure quality standards and compliance with applicable laws and regulations.

Furthermore, the Company also places employees as strategic partners for business sustainability. The Company guarantees the freedom of employees to associate and join the INTI Labor Union as a forum for connecting employees with the Company, as well as a means of solving employee problems.

Then, to bridge the interests of the Company and the interests of employees, especially those related to Human Resources policies, the Company and the INTI Labor Union prepare a Collective Labor Agreement every two years, and are registered with the Manpower and Transmigration Office.

The Company also applies strict and consistent principles of non-discrimination in the management of Human Resources through policies on recruitment, performance appraisal, remuneration, and professional

yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. Perseroan juga senantiasa mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional Perseroan.

career development regardless of ethnicity, religion, race, class, gender and physical condition. The Company also always prioritizes local workers as the main resource in all of the Company's operational activities.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Corporate Social Responsibility to Consumers

Sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perseroan berkomitmen akan selalu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan menyediakan produk dan/atau layanan yang terjamin aman bagi seluruh Pelanggan.

As a form of compliance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Company is committed to always protecting consumer rights by providing products and/or services that are guaranteed to be safe for all customers.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan secara konsisten melakukan berbagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh Pelanggan telah mendapatkan pelayanan yang prima di mana hal tersebut menjadi salah satu prioritas Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari.

In this regard, the Company consistently carries out various continuous improvement efforts to ensure that all customers receive excellent service, which is one of the Company's priorities in carrying out its daily business activities.

Dalam melakukan analisis dan meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan, maka Perseroan menggunakan dasar sebagai berikut:

In conducting analysis and improving services to customers, the Company uses the following basis:

1. Kemudahan Akses, yaitu ketersediaan atas berbagai informasi yang diperlukan Pelanggan dan kemudahan menghubungi baik melalui telepon, email, dan faksimili kepada unit yang menangani keluhan, alamat kantor, dan website Perseroan.
2. Kompetensi Karyawan yang diukur dari kemampuan dan pengetahuan karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan.
3. Tingkat Keramahan dan Kemampuan Berempati dari karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan.
4. Keandalan Produk atau Layanan, yaitu barang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, kuantitas, dan kualitas secara keseluruhan, serta tingkat layanan yang memenuhi harapan Pelanggan.
5. Respon atas Kebutuhan Pelanggan, yaitu tingkat

1. *Ease of Access, namely the availability of various information needed by the Customer and the ease of contacting either by telephone, email, and facsimile to the unit that handles complaints, the office address, and the Company's website.*
2. *Employee Competence as measured by the ability and knowledge of employees who are directly related to customers.*
3. *The Level of Friendliness and Empathy Ability of employees who deal directly with customers.*
4. *Product or Service Reliability, namely goods produced in accordance with specifications, quantity, and overall quality, as well as service levels that meet customer expectations.*
5. *Response to Customer Needs, namely the level*



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

kesigapan Perseroan dalam menanggapi keluhan dan permintaan Pelanggan.

6. Kecepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti informasi, proses pembayaran, dan penanganan keluhan.
7. Keamanan, yaitu jaminan keamanan dalam menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh Perseroan.
8. Layanan yang Kasat Mata, seperti fasilitas kantor Perseroan, loket pembayaran, penampilan karyawan, berbagai tampilan media dan lembaran promosi, serta hal lainnya yang dapat menciptakan citra baik Perseroan.

of readiness of the Company in responding to customer complaints and requests.

6. *Speed, namely the time needed to follow up on information, process payments, and handle complaints.*
7. *Security, namely security guarantees in using the products or services provided by the Company.*
8. *Visible Services, such as the Company's office facilities, payment counters, employee appearances, various media displays and promotional sheets, as well as other things that can create a good image of the Company.*

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan

Customer Complaint Handling Mechanism

1. Karyawan yang melaksanakan fungsi pemasaran, sales engineering, manajemen proyek, dan operasi harus menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk berkomunikasi dengan Pelanggan, terutama berkaitan dengan hal berikut:
 - a. Informasi Produk melalui internet, brosur, atau media lainnya.
 - b. Pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, perubahan kontrak atau pesanan, saran dan/atau keluhan Pelanggan melalui surat, telepon, e-mail, fax, kunjungan, rapat, dan lain-lain.
2. Mekanisme penerimaan dan penyampaian keluhan Pelanggan di Perseroan dilakukan melalui unit yang ditunjuk untuk menangani keluhan Pelanggan.
3. Penanganan keluhan pelanggan pada prinsipnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penerimaan keluhan atau pengaduan dari setiap malfungsi, gangguan perangkat, atau spesifikasi teknis yang berbeda setelah diserahkan dan dioperasikan oleh pelanggan.
 - b. Pencatatan dan registrasi keluhan dalam daftar keluhan untuk keperluan pengendalian penyelesaian keluhan.
 - c. Pendistribusian keluhan untuk dilakukan penanganan yang tepat kepada unit kerja internal yang memiliki tanggung jawab atau kemampuan dalam menindaklanjuti keluhan yang diterima.
 - d. Monitoring penyelesaian keluhan sesuai dengan standar layanan kualitas yang ditetapkan.

1. *Employees performing marketing, sales engineering, project management, and operations functions must establish and implement effective arrangements for communicating with Customers, particularly with regard to the following:*
 - a. *Product information via the internet, brochures, or other media.*
 - b. *Inquiries, handling contracts or orders, changes to contracts or orders, suggestions and/or complaints from customers by mail, telephone, e-mail, fax, visits, meetings, and others.*
2. *The mechanism for receiving and submitting customer complaints in the Company is carried out through a unit appointed to handle customer complaints.*
3. *Handling of customer complaints in principle is carried out in the following ways:*
 - a. *Receipt of complaints or complaints of any malfunctions, device problems, or different technical specifications after being handed over and operated by the customer.*
 - b. *Recording and registering complaints in the complaint register for the purpose of controlling the resolution of complaints.*
 - c. *Distribution of complaints for proper handling to internal work units that have the responsibility or ability to follow up on complaints received.*
 - d. *Monitoring the resolution of complaints in accordance with the established quality service standards.*

- e. Menutup permasalahan (*closing*) dan menyampaikan kepada Pelanggan tentang penyelesaian atau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan.
- 4. Proses pengaduan keluhan sampai dengan penyelesaian keluhan tersebut diatur tersendiri dalam *Standard Operating Procedure*.

- e. *Closing the problem (closing) and conveying to the Customer about the settlement or follow-up to the complaint submitted.*

- 4. *The complaint process until the settlement of the complaint is regulated separately in the Standard Operating Procedure.*

Landasan Kebijakan

Customer Complaint Handling Mechanism

- 1. Perseroan senantiasa berusaha agar produk yang diserahkan kepada Pelanggan memenuhi harapan Pelanggan, dilakukan dengan layanan yang terbaik, serta senantiasa menghindari kemungkinan timbulnya kerugian pada Pelanggan.
- 2. Perseroan memberikan jaminan berupa perbaikan atau penggantian dengan produk baru dalam hal terjadi kerusakan pada produk yang masih dalam masa garansi.
- 3. Perseroan akan mengganti kerugian yang dialami oleh Pelanggan yang disebabkan oleh produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan atau karyawan, atau kesalahan orang-orang yang bekerja untuk Perseroan dalam implementasi atau penyerahan produk.

Perseroan memberikan layanan purnajual atas produk setelah masa garansi berupa konsultasi teknis produk, perbaikan dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang berbayar.

Realisasi biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan untuk pelayanan purnajual kepada konsumen selama tahun 2021 adalah sebesar Rp1.415.448.511.

- 1. *The Company always strives to ensure that the products delivered to customers meet customer expectations, carried out with the best service, and always avoid the possibility of causing losses to customers.*
- 2. *The Company provides a guarantee in the form of repair or replacement with a new product in the event of damage to the product which is still within the warranty period.*
- 3. *The Company will compensate for the loss suffered by the Customer caused by the product not functioning properly, due to the negligence or fault of the Company or its employees, or the fault of the people who work for the Company in the implementation or delivery of the product.*

The Company provides after-sales services for products after the warranty period in the form of product technical consultation, repair and maintenance, as well as the provision of paid spare parts.

The realization of costs that have been incurred by the Company for after-sales services to consumers during 2021 is Rp1,415,448,511.



Tanggung Jawab Sosial Terhadap Sosial dan Masyarakat

Social Responsibility to Social and Community

Menyadari keberadaan Perseroan sebagai entitas bisnis yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, Perseroan berupaya untuk senantiasa hadir dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, Perseroan secara berkala menyusun program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang sosial dan pengembangan masyarakat yang rutin dijalankan setiap tahunnya, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan.

Tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diimplementasikan dalam bentuk kepedulian, antara lain pelestarian alam, perbaikan sarana ibadah, kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana prasarana, bencana alam, dan pengentasan kemiskinan.

Realisasi penyaluran CSR pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.100.000, di antaranya berupa kegiatan pemberian bantuan ke posyandu, bantuan sarana ibadah, bantuan tambahan modal usaha bagi penyandang Disabilitas dan penyaluran untuk program pelestarian lingkungan. Berikut adalah rincian kegiatan tersebut:

1. PT INTI (Persero) melalui Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan bantuan sumbangan untuk tambahan makanan bergizi bagi balita di tiga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yaitu Posyandu Mawar yang berlokasi di Jalan BKR, Posyandu Aster yang berlokasi di Gang Karyamas, dan Posyandu Cempaka Putih yang berlokasi di Gang Silih Asih dengan total senilai Rp3.600.000,-
2. PT INTI (Persero) melalui Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan membantu renovasi Masjid Al Latif yang berlokasi di Kampung Babakan Dano. Adapun dana bantuan yang diberikan senilai Rp2.000.000.
3. PT INTI (Persero) melalui Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan bantuan tambahan modal usaha bagi penyandang disabilitas di Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia senilai Rp1.500.000.

Recognizing the existence of the Company as a business entity that can not be separated from social life, the Company strives to always be present and provide maximum contribution to the surrounding community.

Therefore, the Company regularly arranges Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities in the social and community development fields which are routinely carried out every year, especially in the fields of education and religion.

Responsibility to the community and the environment can be implemented in the form of care, including nature conservation, repair of religious facilities, public health, education, infrastructure, natural disasters, and poverty alleviation.

The realization of CSR distribution in 2021 was recorded at Rp7,100,000, including providing assistance to posyandu, assistance for worship facilities, and additional business capital assistance for people with disabilities. Following are the details of these activities:

1. PT INTI (Persero) through the Partnership Program and Community Development Division provided donations for additional nutritious food for toddlers at three Integrated Service Post (Pos Pelayanan Terpadu or Posyandu), namely Posyandu Mawar which is located on BKR Street, Posyandu Aster located at Gang Karyamas, and Posyandu Cempaka Putih located at Gang Silih Asih with a total value of Rp3,600,000.
2. PT INTI (Persero) through the Partnership Program and Community Development Division helped renovate the Al Latif Mosque which is located in Babakan Dano Village. The amount of assistance provided is Rp2,000,000.
3. PT INTI (Persero) through the Partnership Program and Community Development Division provided additional business capital assistance for people with disabilities at the Indonesian Disability Inspirational Foundation worth Rp1,500,000.



Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements





**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK /
AND SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Supplementary Information</i>
Lampiran I Informasi Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk		<i>Appendix I Information of Parent Entity's Statement of Financial Position</i>
Lampiran II Informasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk		<i>Appendix II Information of Parent Entity's Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Lampiran III Informasi Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk		<i>Appendix III Information of Parent Entity's Statement of Changes in Equity</i>
Lampiran IV Informasi Laporan Arus Kas Entitas Induk		<i>Appendix IV Information of Parent Entity's Statement of Cash Flows</i>
Lampiran V Pengungkapan Lainnya		<i>Appendix V Other Disclosure</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama/ Name :
Alamat Kantor/ Office Address :

Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain/ Domicile as stated in ID
Card :
Nomor Telepon/ Phone Number :
Jabatan/ Position :
2. Nama/ Name :
Alamat Kantor/ Office Address :

Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain/ Domicile as stated in ID
Card :
Nomor Telepon/ Phone Number :
Jabatan/ Position :
3. Nama/ Name :
Alamat Kantor/ Office Address :

Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain/ Domicile as stated in ID
Card :
Nomor Telepon/ Phone Number :
Jabatan/ Position :

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECMEBER 31, 2021 AND 2020**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

- Otong lip
PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung
- Perum Satwika Permai Blok B2 No. 16
Jatiasih Bekasi
- 021 – 5201501
Direktur Utama/ President Director
- Tri Hartono Rianto
PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung
- Komplek Garuda No. 7A
Kalibata Pancoran Jakarta Selatan
- 022 –5201501
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director
- Teguh Adi Suryandono
PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung
- Jl. Sulaksana Makmur Raya No. 23
Bandung
- 022 –5201501
Direktur Bisnis / Business Director

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp. : (62-22) 5201501
Fax. : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :
Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Kantor Cabang Jakarta :
Gedung Graha Pratama Lt. II
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 15
Tebet Jakarta Selatan 12810

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anak ("Perusahaan"); 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam Perusahaan.	1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries ("the Company"); 2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct; b. The Company's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; and 4. We are responsible for the Company's internal control system and its application.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 1 April 2022 / April 1, 2022

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ On Behalf on the Board of Directors

Direktur Utama /
President Director

Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko / Finance and
Risk Management Director

Direktur Bisnis / Business
Director

Otong lip  
METERAL TEMPEL
00FAGAJX783295358
Tri Hartono Rianto


Teguh Adi Suryandono

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmid

Nomor/Number : 00311/2.1030/AU.1/04/0645-2/1/IV/2022

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan atas suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian yang mengungkapkan bahwa PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) mengalami kerugian dalam tahun 2021 yang menyebabkan meningkatnya ekuitas negatif (defisiensi modal) per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp539 miliar. Lebih lanjut, Catatan 41.a juga mengungkapkan bahwa Perusahaan terkena dampak penurunan ekonomi dalam negeri yang akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana Manajemen untuk tindakan di masa depan dalam menghadapi kondisi di atas telah dijelaskan dalam Catatan 40 dan 41.a. Laporan keuangan konsolidasian terlampir telah disusun dengan menggunakan asumsi bahwa PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of a matter

We draw attention to Note 40 in the consolidated financial statements which discloses that PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) incurred a loss in 2021 which causing an increased in negative equity (capital deficiency) as of December 31, 2021 to become Rp539 billion. Furthermore, Note 41.a also discloses that the Company was affected by the decline in the domestic economy due to the Covid-19 pandemic. These conditions indicates that a material uncertainty exist that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. Management's plan for future actions in responding to the conditions above is described in Notes 40 and 41.a. The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) will continue to operate as going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and other disclosures (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 1 April/ April 1, 2022



00311

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020,

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2021 and 2020

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	4, 35, 37, 38	37,861,408,548	88,012,269,800	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	5, 38			Accounts Receivables
Pihak Berelasi	35	92,286,680,156	26,915,654,857	Related Parties
Pihak Ketiga		10,769,320,201	4,559,606,688	Third Parties
Piutang Lain-lain	6, 38			Other Receivables
Pihak Berelasi	35	1,186,109,386	1,817,546,314	Related Parties
Pihak Ketiga		1,624,306,612	1,638,891,112	Third Parties
Persediaan	7	145,385,174,544	156,618,588,314	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	22.a	8,501,619,037	47,495,472,135	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	8	2,543,978,274	1,510,033,003	Prepaid Expense and Advance
Jumlah Aset Lancar		300,158,596,758	328,568,062,223	Total Current Asset
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap	9	771,110,625,729	773,942,419,323	Fixed Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	10	--	--	Investment in Associates
Investasi pada Instrumen Keuangan	11	--	--	Investment in Financial Instrument
Properti Investasi	12	58,873,131,261	58,897,453,912	Investment Properties
Aset Takberwujud	13	12,920,660,233	13,427,947,769	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	22.d	60,869,299,812	59,786,587,094	Deferred Tax Assets
Aset Hak Guna	14	632,887,805	1,898,663,417	Right of Use Assets
Aset Lain-lain	15	189,550,093	106,075,091	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		904,596,154,933	908,059,146,606	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1,204,754,751,691	1,236,627,208,829	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	16, 37, 38			Accounts Payables
Pihak Berelasi	35	194,938,200,965	216,879,979,996	Related Parties
Pihak Ketiga		150,128,688,532	203,273,083,669	Third Parties
Utang Lain-lain	17, 37			Other Payables
Pihak Berelasi	35	712,487,505	798,507,505	Related Parties
Pihak Ketiga		56,975,718,458	62,159,288,326	Third Parties
Beban Akruai	18, 38	163,052,241,906	69,095,363,668	Accrued Expenses
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:				Current Maturities of Long-Term Liabilities:
Utang Bank	19.a, 38	42,930,924,218	15,513,360,717	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	20, 38	7,779,984,007	5,269,741,043	Financial Institutions Loans
Liabilitas Sewa	21, 38	3,061,026,601	2,401,148,238	Lease Liabilities
Utang Pajak	22.b	29,480,172,189	19,212,508,990	Tax Payables
Provisi Masa Pemeliharaan	23	2,339,339,060	3,911,065,040	Guarantee Period Provision
Pendapatan Diterima di Muka	24, 35	32,852,283,178	29,281,364,237	Unearned Revenue
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		684,251,066,619	627,795,411,429	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang:				Long-Term Liabilities:
Utang Bank	19.a, 38	818,560,569,107	843,560,713,281	Bank Loans
Utang Bunga Bank	19.b, 38	109,533,123,416	68,446,878,789	Accrued Interest Payable
Liabilitas Sewa	21, 38	--	659,878,363	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	25	131,408,949,783	145,641,154,618	Employee Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,059,502,642,306	1,058,308,625,051	Total Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1,743,753,708,925	1,686,104,036,480	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal				Capital Stock - Par Value of
Rp 1.000.000 per Saham				Rp 1,000,000 per Share
Modal Dasar - 1.000.000 Saham				Authorized Capital - 1,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan				The Issued and Fully Paid Capital -
Disetor Penuh 350.000 Saham	26	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000 Shares
Tambahan Modal Disetor		1,229,185,189	1,229,185,189	Additional Paid in Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya		88,494,256,333	88,494,256,333	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		(1,723,459,670,257)	(1,614,495,350,459)	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain		749,139,484,151	729,237,209,857	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable to Owner of
kepada Pemilik Perusahaan		(534,596,744,584)	(445,534,699,080)	the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(4,402,212,650)	(3,942,128,571)	Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		(538,998,957,234)	(449,476,827,651)	TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,204,754,751,691	1,236,627,208,829	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT AND LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 Rp	
PENDAPATAN	27	371,731,416,822	427,246,886,852	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	28	(326,497,334,757)	(399,379,203,937)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		45,234,082,065	27,867,682,915	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	29	(22,983,356,691)	(16,139,311,322)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	30	(62,861,211,731)	(61,912,301,067)	General and Administrative Expenses
Beban Pengembangan	31	(6,646,006,732)	(6,561,050,827)	Development Expenses
Pendapatan Lain-lain	32	24,805,727,822	23,093,456,179	Other Income
Beban Pajak Final		(7,008,749,310)	(3,852,228,896)	Final Tax Expense
Beban Lain-lain	33	(33,888,579,118)	(56,265,318,128)	Other Expenses
RUGI USAHA		(63,348,093,695)	(93,769,071,146)	LOSS FROM OPERATIONS
Beban Keuangan	34	(52,073,131,212)	(63,569,923,481)	Finance Expenses
RUGI SEBELUM PAJAK		(115,421,224,907)	(157,338,994,627)	LOSS BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak	22.c	5,996,821,030	(1,095,218,931)	Tax Benefit (Expenses)
RUGI TAHUN BERJALAN		(109,424,403,877)	(158,434,213,558)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Item that Will Not be Reclassified
Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	25	24,816,382,605	(27,274,793,090)	Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
Pajak Penghasilan Terkait	22.d	(4,914,108,311)	4,869,419,305	Related Income Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		19,902,274,294	(22,405,373,785)	Total Other Comprehensive Income After Tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(89,522,129,583)	(180,839,587,343)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(108,964,319,798)	(153,899,419,999)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(460,084,079)	(4,534,793,559)	Non-Controlling Interest
Jumlah		(109,424,403,877)	(158,434,213,558)	Total
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(89,062,045,504)	(176,304,793,784)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(460,084,079)	(4,534,793,559)	Non-Controlling Interest
Jumlah		(89,522,129,583)	(180,839,587,343)	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Saldo Laba/ Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income		Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest		Total Ekuitas/ Equity	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital Rp	Ditentukan Penggunaan/ Appropriated Rp	Belum Ditentukan Penggunaan/ Unappropriated Rp	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit Plan Rp	Total Rp	Total Rp
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	350,000,000,000	1,229,185,189	88,494,256,333	(1,460,595,930,460)	802,524,611,135	(50,882,027,493)	(269,229,905,296)	(268,637,240,308)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(153,899,419,999)	--	--	(153,899,419,999)	(158,434,213,558)
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(22,405,373,785)	(22,405,373,785)	(22,405,373,785)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	350,000,000,000	1,229,185,189	88,494,256,333	(1,614,495,350,459)	802,524,611,135	(73,287,401,278)	(445,534,699,080)	(449,476,827,651)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(108,964,319,798)	--	--	(108,964,319,798)	(109,424,403,877)
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	19,902,274,294	19,902,274,294	19,902,274,294
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	350,000,000,000	1,229,185,189	88,494,256,333	(1,723,459,670,257)	802,524,611,135	(53,385,126,984)	(534,596,744,584)	(538,998,957,234)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	344,248,451,823	445,144,107,465
Penerimaan Bunga Jasa Giro	264,795,594	226,960,292
Penerimaan Lainnya	34,151,737,028	22,104,440,376
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional	(330,511,949,540)	(341,069,534,980)
Pembayaran kepada Karyawan	(58,981,670,866)	(52,795,681,933)
Pembayaran Beban Pendanaan	(9,238,251,736)	(11,482,703,852)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(31,266,599,111)	(36,876,333,137)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(51,333,486,808)	25,251,254,231
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(530,913,866)	(229,349,847)
Perolehan Aset Takberwujud	(1,084,016,703)	(316,533,217)
Penjualan Aset Tetap	367,000,000	118,000,000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1,247,930,569)	(427,883,064)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Utang Bank	460,843,320	25,611,795,852
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	4,355,000,000	--
Pembayaran Liabilitas Sewa	--	(103,412,427)
Pembayaran Utang Bank	(500,762,334)	(13,830,718,467)
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	(1,885,467,886)	(23,200,909,625)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2,429,613,100	(11,523,244,667)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(50,151,804,277)	13,300,126,500
Keuntungan Selisih Kurs yang Belum Direalisasi	943,025	1,214,060
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	88,012,269,800	74,710,929,240
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	37,861,408,548	88,012,269,800

Tambahan Informasi Terkait Arus Kas Disajikan di Catatan 39

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Received from Customers

Interest Income from Current Account

Other Receipts

Cash Paid to Suppliers

and Operational Expenses

Cash Paid for Employees

Cash Paid for Financing Expenses

Corporate Income Tax Paid

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of Fixed Assets

Purchase of Intangible Assets

Sales of Fixed Assets

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash Received from Bank Loan

Cash Received from Financial

Institution Loan

Payment of Lease Liabilities

Payment for Bank Loan

Payment for Financial

Institution Loan

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Financing Activities

NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS

Unrealized Gain

from Foreign Exchange

CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR

CASH ON HAND AND IN BANKS AT ENDING OF YEAR

Additional Information Related to Cash Flows are Presented in Note 39

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

1. Umum

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemen AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai Bagian dari LPP Postel pada tahun 1968. Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pendirian Perusahaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 1974 tanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-1771/MK/IV/12/1974 tanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat oleh Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., No.322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No.036/MPBUMN/1988, Perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis. Pada tanggal 17 Januari 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 1998 yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola BUMN. Sebagai tindaklanjutnya, pembinaan INTI beralih ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Pada tahun yang sama BPIS beralih status menjadi sebuah holding company dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS dan sepuluh BUMN strategis di bawahnya menjadi anak perusahaan. Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, dimana PT BPIS dibubarkan pada bulan Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2002. Selanjutnya pengelolaan INTI beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No.13 tanggal 8 April 2021 oleh Dr. Yurisa Martanti S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima oleh

1. General

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("The Company") was established as the evolution of cooperation PN Telekomunikasi and Siemens AG in 1966. This cooperation continued in the formation of Factory Telephone and Telegraph (FTT) as part of the LPP Postel in 1968. In 1974, this section was separated from LPP Postel became a Limited Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. The establishment of the Company is based on the Indonesian Government Regulation No.34 of 1974 dated September 23, 1974 on Remittance of Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in Telecommunication Industry Sector and Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 regarding the Stipulation of Capital of the Company. The Articles of Association was made by Notarial Deed in Lieu of Warda Sungkar Alurmei, S.H., No.322 dated December 30, 1974 and approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia No.YF.A.5/273/10 dated August 1, 1975.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprise No.036/M-PBUMN/1988, the Company was put into the Strategic Industry groups. At January 17, 1998 a Government Regulation of the Republic of Indonesia No.12 of 1998 was issued which eliminates the role of the technical department in managing SOEs. As a follow up, INTI's monitoring was switched to the Ministry of State Owned Enterprises Reform. In the same year BPIS switch its status to a holding company under the name of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) PT BPIS and ten strategic SOEs under its monitoring became the subsidiaries. This condition ended in 2002, where PT BPIS dissolved in March 2002 as the Government Regulation No.52 of 2002. Furthermore INTI management reverts back to the Ministry of State Owned Enterprises Reform.

The Company's articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No.13 dated April 8, 2021 of Dr. Yurisa Martanti S.H., M.H., Notary in Jakarta and its notification had been received by the Ministry of

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No.AHU-0022218.AH.01.02
tanggal 13 April 2021.

*Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia No.AHU-0022218.AH.01.02 dated
April 13, 2021.*

Perusahaan berkedudukan di Jawa Barat
dengan kantor pusat berkedudukan di Jl. Moch.
Toha No.77, Bandung, Jawa Barat dan memulai
kegiatan komersialnya pada tanggal
30 Desember 1974.

*The Company is domiciled in West Java, with its
head office located in Jl. Moch. Toha No.77,
Bandung, West Java and commenced its
commercial operations on December 30, 1974.*

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 270
dan 358 orang.

*The number of employees as of December 31,
2021 and 2020 were 270 and 358, respectively.*

Susunan dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut:

*The composition of the Company's Board of
Directors and Commissioners are as follows:*

31 Desember/ December 31, 2021 dan/ and 2020

Dewan komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Unggul Priyanto
Rahmadi Murwanto
Trisno Hendradi

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Direktur Bisnis

Otong lip
Tri Hartono Rianto
Teguh A Suryandono

Board of Directors

President Director
Finance Director and
Risk Management
Business Director

Entitas Anak

PT Inti Pindad Mitra Sejati ("IPMS")

IPMS didirikan berdasarkan akta Notaris No.31
tanggal 26 Juli 2004 dari Nining
Puspitaningtyas, S.H., yang telah mengalami
beberapa kali perubahan dengan perubahan
terakhir melalui Akta Notaris No.20 tanggal
21 Maret 2005 yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-
21806HT.01.01.TH.2005 tanggal 5 Agustus
2005, Tambahan Berita - Negara R.I. No.23
tanggal 20 Maret 2007. Pengumuman dalam
Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas.

Subsidiaries

PT Inti Pindad Mitra Sejati ("IPMS")

*IPMS was established based on Notarial Deed
No.31 dated July 26, 2004 from Nining
Puspitaningtyas, S.H., which have been
changed several times with recent change by
Notarial Deed No.20 dated March 21, 2005
which have been authorized by the decision of
the Ministry of Justice and Human Rights of the
Republic of Indonesia No.C-21806
HT.01.01.TH.2005 dated August 5, 2005,
Supplement to State Gazette of the Republic of
Indonesia No.23 dated March 20, 2007.
Announcement in the the State Gazette of the
Republic of Indonesia is in accordance with the
article 22 (1) Law No.1 year 1995 on Limited
Liability Company.*

Anggaran Dasar IPMS telah mengalami
beberapa kali perubahan, antara lain melalui
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
No.150, tanggal 20 Desember 2021, Notaris
Nining Puspitaningtyas, S.H., dan telah terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No.AHU-0000607.AH.01.11.
Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, dengan

*The Articles of Association of IPMS have been
changed several times, among others by the
Deed of Statement of Shareholders' Resolutions
No. 150, dated December 20, 2021, Notary
Nining Puspitaningtyas, S.H., and has been
registered at the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia
No.AHU-0000607.AH.01.11. Tahun 2022 dated*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

komposisi pada 31 Desember 2021 dan 2020
sebagai berikut:

January 3, 2022, with the composition as of
December 31, 2021 and 2020 as follows:

Modal Saham/ Capital Stock	Lembar Saham/ Shares	Nilai Nominal/ A Par Value (Rp)	Nilai Modal Saham/ Value of Shares (Rp)	%
PT Inti (Persero)	16,800,582	1,000	16,800,582,000	86.15426%
PT Pindad (Persero)	2,700,000	1,000	2,700,000,000	13.84574%
Jumlah/ Total	19,500,582	1,000	19,500,582,000	100.00000%

PT Inti Konten Indonesia ("INTEN")

INTEN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.52 tanggal 11 Mei 2010, dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan surat putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-24412.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INTEN No.3 oleh Notaris Yulia Permata Putri, S.H., M.Kn., tanggal 13 November 2020 yang telah disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0413068.

PT Inti Konten Indonesia ("INTEN")

INTEN was established based on the Incorporation Deed No.52 dated May 11, 2010, by the Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. The Incorporation Deed has been approved through the decision letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-24412.AH.01.01.Tahun 2010, dated May 14, 2010. The articles association of INTEN has been changes several times, recently based on the Declaration Deed of Shareholder INTEN No.3 by Notary Yulia Permata Putri, S.H., M.Kn., dated November 13, 2020 which has been approved through the decision letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0413068.

Modal Saham/ Capital Stock	Lembar Saham/ Shares	Nilai Nominal/ A Par Value (Rp)	Nilai Modal Saham/ Value of Shares (Rp)	%
PT Inti (Persero)	9,999,999	1,000	9,999,999,000	99.99999%
PT Widya Bhakti Inti	1	1,000	1,000	0.00001%
Jumlah/ Total	10,000,000	1,000	10,000,000,000	100.00000%

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan

2.b. Basis of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;

concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021):
Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021):
Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti disebutkan pada Catatan 1.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiary as described in Note 1.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (which transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group losses control, the Group:

- a. *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b. *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. *Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d. *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e. *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- f. *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

2.e. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value, where the changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses, and foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi

or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- *Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - i. *The amount of the loss allowance; and*
 - ii. *The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- *Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi

consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liabilities as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- *Eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- *A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group’s key management personnel.*

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan

Impairment of Financial Assets

The Group recognized expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and

dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required the Group to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.i. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari

2.f. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense on a straight-line method (*straight-line method*).

2.i. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (*significant influence*).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65.
- Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

- If the investment becomes a subsidiary, the Group accounts for its investment in accordance with PSAK 22 and PSAK 65.
- If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.
- When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

2.j. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2.j. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi

Investment properties are measured initially at its cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan

2.k. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

measured at fair value. Gain or loss arises from a change in the fair value of investment property are recognized in profit or loss, in the period in which they arise.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.k. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap berupa tanah, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasi. Nilai wajar tanah biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Fixed assets comprised of land, after the initial recognition are measured using the revaluation model. The fair value of land is usually determined through an assessment based on market evidence conducted by a qualified professional appraiser.

Depreciation is recognized using the straight-line method. Land is recognized at acquisition cost and not depreciated. Estimated useful lives of the assets are as follows:

Golongan	Masa Manfaat/ Useful Life	Categories
Bangunan	20-25 Tahun/ Years	Buildings
Mesin dan Peralatan	10-16 Tahun/ Years	Machinery dan Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	4-5 Tahun/ Years	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	3-5 Tahun/ Years	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	4-5 Tahun/ Years	Data Processing Equipment
Kendaraan	4 Tahun/ Years	Vehicles
Tower	Maksimal Selama Sewa atau Kontrak/ Maximum During Lease or Contract	Tower

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah

Self-constructed fixed assets are presented as part of the property and equipment under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of construction in progress. Cost construction in progress shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.I. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.I. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
 - The Group has the right to operate the asset; or*
 - The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak-guna dan utang sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Utang sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah pengakuan awal utang sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Utang sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residu, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

If the lease transfers ownership of the underlying asset at the end of the lease term or if the cost of acquisition of the asset rights indicates the lessee will exercise the call option, then the right of use asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the property, plant and equipment.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the initial acquisition of a lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

2.m. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the exemption for short term lease; and low value leased asset on a lease by-lease basis.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straightline basis over the lease term.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

2.m. Intangible Assets

Intangible assets is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible assets is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful life

Intangible assets with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Aset Tak Berwujud dengan Umur Manfaat Tidak Terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset tak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

2.n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.o. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Intangible Assets with Indefinite Useful Life

Intangible assets with unlimited useful life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible assets with indefinite life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible assets may be impaired.

2.n. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.o. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. the initial recognition of goodwill; or*
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.p. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan

2.p. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 11/2020 for year 2021 and Labor Law No.13/2003 for year 2020.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a. When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and

- b. Ketika Group mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Program Masa Persiapan Pensiun

Grup memberikan imbalan bagi karyawan tetap yang memasuki usia pensiun. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya konsisten dengan pengukuran liabilitas imbalan pascakerja kecuali untuk keuntungan/kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui pada laba atau rugi.

2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

- Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan

- b. When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Retirement Preparation Advance Program

The Group provide benefits to their permanent employees who at retirement age. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Other Long Term Post-Employment Benefits

The Group provides other long-term employee benefits. The measurement of other long-term employee benefit liabilities is consistent with the measurement of post employment benefit liabilities except for actuarial gain/loss in other long-term employee benefit liability is recognised on profit or loss.

2.q. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

- Identify contracts with customers, with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - The contract has commercial substance
 - It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

- Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
- Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
- Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian

- *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
- *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

Revenue from sales of goods is recognized when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the five indicators of control below:

- *The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.*
- *The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms of the sales contract.*
- *The customer has accepted the goods. Sales of goods may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognized based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau actual tidak signifikan.

- Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
- Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

2.r. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
1 Dolar Amerika Serikat	14,269.01	14,105.01

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual grade and/or quantity are not significant.

- The customer has legal title to the goods.
- The customer has physical possession of the goods.

2.r. Transactions in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The Group's functional currency is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, which middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2021 and 2020 as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.s. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

2.s. Transactions with Related Parties

Related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of that persons family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others;

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan pada Catatan 35.

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- vii. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in Note 35.

3. Pertimbangan Akuntansi Kritis dan Sumber Ketidakpastian Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada

3. Critical Accounting Judgments and Source of Estimation Uncertainty

The preparation of the Group consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of

akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan dalam Catatan 9 dan 13.

Estimasi Penyisihan Persediaan Usang

Penyisihan persediaan usang diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan beban pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang

the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. Carrying amounts of fixed assets and intangible assets are disclosed in Notes 9 and 13.

Estimated Inventory Obsolete

Provision for obsolete is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

Estimated Pension Expenses and Post Employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations and accrued pension expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja dan beban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja dan cadangan dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja serta dana pensiun diungkapkan pada Catatan 25.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk

determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits and pension expenses.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit obligations and other pension fund reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and Additional information and total liabilities and post-employment benefits expenses and include pension funds are disclosed in Note 25.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Pada tanggal pelaporan Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya.

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomi dan bisnis yang memburuk dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 38.

goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions.

Impairment Loss on Receivables

At the reporting date, the Company assesses whether the credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Company considers changes in default risk that occurs over the life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In making this assessment, the Company compares the risk of default at the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available free of charge.

The credit risk of a financial instrument is considered low if the financial instrument has a low risk of default, the borrower has strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and economic and business conditions deteriorate in the long term, but not always, deteriorate capacity. the borrower to meet its contractual cash flow obligations.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosures on fair value are presented in Note 38.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

ii. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan kritis berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.e dan 38.

ii. Critical Judgements in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2.e and 38.

4. Kas dan Bank

4. Cash and Banks

	2021	2020
	Rp	Rp
Kas/ Cash on Hand		
Rupiah	159,907,643	145,866,599
Bank/ Cash in Banks		
Rupiah		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 35):		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,331,806,575	68,546,654,717
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18,202,351,279	16,221,171,865
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	806,820,749	2,751,210,657
PT Bank BRI Syariah Tbk	5,801,520	1,138,053
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,000,000	--
Pihak Ketiga/ Third Parties:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	251,962,079	250,331,851
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	5,804,166	5,804,166
PT Bank Mega Tbk	5,866,828	4,307,208
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3,775,000	4,050,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	2,491,774	--
PT Bank KB Bukopin Syariah	2,000,000	--
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	860,000	900,000
<u>Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar</u>		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 35):		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37,494,963	37,057,246
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23,922,851	24,458,934
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19,543,121	19,318,504
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>37,701,500,905</u>	<u>87,866,403,201</u>
Jumlah/ Total	<u>37,861,408,548</u>	<u>88,012,269,800</u>

Tidak ada saldo kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan.

There are no cash and bank used as collateral.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

5. Piutang Usaha

5. Account Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 35)	96,542,799,197	31,171,773,898
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Less: Allowance for Impairment Losses	(4,256,119,041)	(4,256,119,041)
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ Sub Total Related Parties	92,286,680,156	26,915,654,857
Pihak Ketiga/ Third Parties	228,093,317,590	236,237,090,719
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Less: Allowance for Impairment Losses	(217,323,997,389)	(231,677,484,031)
Sub Jumlah Pihak Ketiga/ Sub Total Third Parties	10,769,320,201	4,559,606,688
Jumlah - Bersih/ Total - Net	103,056,000,357	31,475,261,545

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2021 Rp	2020 Rp	
Belum Jatuh Tempo	--	11,591,123,212	Not yet Due
6 - 12 bulan	91,794,224,326	16,326,516,614	6 - 12 months
12 - 24 bulan	13,485,249,157	3,214,488,022	12 - 24 months
24 - 36 bulan	4,640,449,408	214,834,358,400	24 - 36 months
Lebih dari 36 bulan	214,716,193,896	21,442,378,369	More than 36 months
Sub Jumlah	324,636,116,787	267,408,864,617	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(221,580,116,430)	(235,933,603,072)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	103,056,000,357	31,475,261,545	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment
losses are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	235,933,603,072	236,430,880,269	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 33)	--	2,713,905,243	Addition (Note 33)
Pemulihan (Catatan 32)	(14,353,486,642)	(3,211,182,440)	Recovery (Note 32)
Saldo Akhir	221,580,116,430	235,933,603,072	Ending Balance

Berdasarkan penilaian status dan kualitas kredit
dari piutang, manajemen berpendapat bahwa
cadangan kerugian penurunan nilai tersebut
cukup.

Based on its assessment of the status and
credit quality of the receivables, management
believes that the allowance for impairment
losses is adequate.

Semua piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All accounts receivables are denominated in
Rupiah currency.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020,
piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan
untuk utang bank (Catatan 19).

As of December 31, 2021 and 2020, the
Group's account receivables are used as
collateral for bank loan (Note 19).

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 35)	1,186,109,386	1,817,546,314
Pihak Ketiga/ Third Parties	32,186,072,609	32,200,657,109
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai <i>Less: Allowance for Impairment Losses</i>	(30,561,765,997)	(20,561,765,997)
Sub Jumlah Pihak Ketiga/ Sub Total Third Parties	1,624,306,612	1,638,891,112
Jumlah/ Total	2,810,415,998	3,456,437,426

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

*Movements in the allowance for impairment
losses are as follows:*

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	30,561,765,997	20,561,765,997	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan (Catatan 33)	--	11,861,022,384	<i>Addition (Note 33)</i>
Pemulihan (Catatan 32)	--	(1,861,022,384)	<i>Recovery (Note 32)</i>
Saldo Akhir	30,561,765,997	30,561,765,997	<i>Ending Balance</i>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020,
piutang lain-lain Grup digunakan sebagai
jaminan untuk utang bank (Catatan 19).

*As of December 31, 2021 and 2020, the
Group's other receivables are used as collateral
for bank loan (Note 19).*

7. Persediaan

7. Inventories

	2021 Rp	2020 Rp	
Barang Jadi	68,199,035,453	93,016,087,099	<i>Finished Goods</i>
Persediaan dalam Penyelesaian	44,192,794,848	22,316,890,426	<i>Work in Proses</i>
Barang dalam Perjalanan	43,416,498,946	39,473,879,993	<i>Goods in Transit</i>
Bahan Baku	1,607,403,152	1,387,299,606	<i>Raw Material</i>
Bahan Tambahan	373,449,896	424,431,190	<i>Supplies Material</i>
Kabel Tembaga	1,172,000	--	<i>Copper Cable</i>
Sub Jumlah	157,790,354,295	156,618,588,314	<i>Sub Total</i>
Provisi Kerugian Penurunan Nilai (Catatan 33)	(12,405,179,751)	--	<i>Provision for Impairment Losses (Note 33)</i>
Jumlah	145,385,174,544	156,618,588,314	<i>Total</i>

Persediaan Grup telah diasuransikan kepada
PT BRI Asuransi Indonesia dan PT AXA Mandiri
dengan nilai pertanggungan masing-
masing sebesar Rp145.290.824.058 dan
Rp140.722.580.765 pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020.

*The Group's inventories were insured against
PT BRI Asuransi Indonesia and PT AXA
Mandiri with a total coverage of
Rp145,290,824,058 and Rp140,722,580,765 as
of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

Manajemen berpendapat bahwa seluruh
persediaan pada tanggal 31 Desember 2021
dan 2020 telah diasuransikan secara memadai.

*The management believes that all the
inventories as of December 31, 2021 and 2020
were adequately insured.*

Pada tahun 2021, Grup mencatat
penurunan nilai atas persediaan barang jadi
sebesar Rp12.405.179.751 (Catatan 33)

*In 2021, the Group recorded an impairment of
finished of goods amounting of
Rp12,405,179,751 (Note 33).*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian persediaan.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on inventories is sufficient to cover possible losses on inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, persediaan Grup digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 19).

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's inventories are used as collateral for bank loan (Note 19).

8. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

8. Prepaid Expenses and Advances

	2021 Rp	2020 Rp	
Uang Muka Operasional	1,343,365,331	1,011,903,058	Operational Advances
Biaya Dibayar di Muka	707,000,000	59,287,950	Prepaid Expense
Uang Muka Lainnya	493,612,943	438,841,995	Other Advances
Jumlah	2,543,978,274	1,510,033,003	Total

9. Aset Tetap

9. Fixed Assets

	2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	760,479,136,678	--	--	--	760,479,136,678
Bangunan	47,131,785,017	192,000,000	--	--	47,323,785,017
Mesin dan Peralatan	7,306,479,327	--	--	--	7,306,479,327
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,649,277,606	--	--	(6,425,000)	39,642,852,606
Inventaris Kantor dan Gudang	5,239,493,351	--	--	--	5,239,493,351
Alat Olah Data	7,895,613,616	205,728,636	--	--	8,101,342,252
Kendaraan	1,006,985,786	--	(447,214,600)	--	559,771,186
Tower	1,840,081,533	--	--	--	1,840,081,533
Jumlah	870,548,852,914	397,728,636	(447,214,600)	(6,425,000)	870,492,941,950
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	36,649,816,838	1,769,824,363	--	--	38,419,641,201
Mesin dan Peralatan	5,767,851,519	431,574,761	--	--	6,199,426,280
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,429,307,051	178,342,868	--	(6,425,000)	39,601,224,919
Inventaris Kantor dan Gudang	5,097,702,484	86,761,544	--	--	5,184,464,028
Alat Olah Data	7,251,124,542	326,582,571	--	--	7,577,707,113
Kendaraan	611,014,514	69,877,281	(121,120,621)	--	559,771,174
Tower	1,799,616,643	40,464,863	--	--	1,840,081,506
Jumlah	96,606,433,591	2,903,428,251	(121,120,621)	(6,425,000)	99,382,316,221
Nilai Buku	773,942,419,323				771,110,625,729
					Book Value

	2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	819,240,250,000	--	--	(58,761,113,322)	760,479,136,678
Bangunan	47,297,290,585	316,503,847	--	(482,009,415)	47,131,785,017
Mesin dan Peralatan	7,326,579,327	--	--	(20,100,000)	7,306,479,327
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	40,596,888,006	--	--	(947,610,400)	39,649,277,606
Inventaris Kantor dan Gudang	6,343,970,507	9,446,000	--	(1,113,923,156)	5,239,493,351
Alat Olah Data	9,501,844,378	6,400,000	--	(1,612,630,762)	7,895,613,616
Kendaraan	559,771,186	567,214,600	(120,000,000)	--	1,006,985,786
Tower	1,840,081,533	--	--	--	1,840,081,533
Jumlah	932,706,675,522	899,564,447	(120,000,000)	(62,937,387,055)	870,548,852,914
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	35,211,494,489	1,783,991,175	--	(345,668,826)	36,649,816,838
Mesin dan Peralatan	5,358,404,464	429,547,055	--	(20,100,000)	5,767,851,519
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	40,158,911,952	218,005,499	--	(947,610,400)	39,429,307,051
Inventaris Kantor dan Gudang	6,063,148,908	148,476,732	--	(1,113,923,156)	5,097,702,484
Alat Olah Data	8,615,696,216	248,059,088	--	(1,612,630,762)	7,251,124,542
Kendaraan	559,771,174	61,243,340	(10,000,000)	--	611,014,514
Tower	1,678,222,049	121,394,594	--	--	1,799,616,643
Jumlah	97,645,649,252	3,010,717,483	(10,000,000)	(4,039,933,144)	96,606,433,591
Nilai Buku	835,061,026,270				773,942,419,323
					Book Value

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Pada tahun 2021, Grup telah mereklasifikasi aset tetap berupa alat ukur dan perkakas kerja ke akun aset lain-lain sebesar Rp6.425.000 (Catatan 15).

Pada tahun 2020 Perusahaan mereklasifikasi aset tetap berupa tanah dan bangunan seluas 6.035,63m² dan 2.796,28m² yang berlokasi di Jl. Moh Toha No.77 dan No.225, Bandung ke properti investasi. Sebelum tahun 2020, aset berupa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, namun sejak awal tahun 2020 aset tetap tersebut disewakan kepada pihak ketiga. Tanah dan bangunan tersebut direklasifikasi sesuai dengan nilai buku sisanya per 1 Januari 2020 yaitu masing-masing sebesar Rp58.761.113.322 dan Rp155.620.966 (Catatan 12).

Pada tahun 2020, aset tetap berupa Mesin dan Peralatan, Alat Ukur dan Perkakas Kerja, Inventaris Kantor dan Gudang, beserta Alat Olah Data yang sudah habis nilai bukunya dan tidak digunakan, direklasifikasi ke aset tetap non operasi (Catatan 15).

Nilai pasar tanah dan bangunan Perusahaan berdasarkan laporan penilaian aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Rinaldi Alberth Baroto dan Rekan adalah sebagai berikut:

- Aset tanah dan bangunan kantor, berdasarkan Laporan Penilaian No.00 005/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 tanggal 25 November 2021; dan
- Aset tanah Palasari, berdasarkan Laporan Penilaian No. 00 003/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 tanggal 22 November 2021.

Aset tetap Grup telah diasuransikan kepada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp57.635.024.120 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Aset tetap berupa tanah, bangunan dan mesin tertentu digunakan sebagai jaminan atas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 19).

In 2021, the Group has reclassified fixed assets in the form of measuring tools and instrument of labor to other assets amounting to Rp6,425,000 (Note 15).

In 2020, the Company reclassified fixed assets in the form of land and buildings with an area of 6,035.63sqm and 2,796.28sqm located on Jl. Moh Toha No.77 and No.225, Bandung to investment property. Prior to 2020, the assets in the form of land and buildings were used for the Company's operational activities, however since 2020 these fixed assets have been leased to third parties. The land and buildings were reclassified according to the remaining book value as of January 1, 2020 which amounted to Rp58,761,113,322 and Rp155,620,966, respectively (Note 12).

In 2020, fixed assets in the form of Machinery and Equipment, Measuring Tools and Work Tools, Office and Warehouse Inventories, along with Data Processing Tools that have expired and are not used, will be reclassified to non-operating fixed assets (Note 15).

The market value of land and building based on valuation report of Public Appraisal Service Office Rinaldi Alberth Baroto and Partners are as follows:

- *Land and office building assets, based on the Appraisal Report No.00 005/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 dated November 25, 2021; and*
- *Palasari's land assets, based on the Appraisal Report No. 00 003/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 dated November 22, 2021.*

The Group's fixed assets were insured with PT BRI Asuransi Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with total sum insured amounting to Rp57,635,024,120 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Fixed assets in the form of land, buildings and certain machinery are used as collateral for working capital loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 19).

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 28)	603,751,615	1,663,499,656	Cost of Revenues (Note 28)
Beban Penjualan (Catatan 29)	69,877,279	61,243,340	Selling Expenses (Note 29)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	2,229,799,357	1,285,974,487	General and Administrative Expenses (Note 30)
Jumlah	2,903,428,251	3,010,717,483	Total

Pengurangan aset tetap terdiri dari penghapusan dan penjualan aset tetap sebagai berikut:

Disposal of fixed assets consist of write off and sale of fixed assets as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Harga Jual	367,000,000	118,000,000	Selling Price
Nilai Tercatat	(326,093,979)	(110,000,000)	Carrying Value
Labanya Penghapusan/ Penjualan Aset Tetap (Catatan 32)	40,906,021	8,000,000	Gain on Disposal/ Sale of Fixed Assets (Note 32)

10. Investasi pada Entitas Asosiasi

10. Investment in Associates

31 Desember/ December 31, 2021				
Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Pelepasan Addition/ Deduction Rp	Bagian Laba/Rugi Profit/Loss Portion Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership				
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>				
PT Inti Pisma Internasional	22.00%	78,479,123	--	78,479,123
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>				
<u>Less: Provision for Impairment</u>				
PT Inti Pisma Internasional		(78,479,123)	--	(78,479,123)
Jumlah Kepemilikan Langsung/				
Total Direct Ownership		--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership				
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>				
PT Inti Global Optical Communication	25.00%	6,813,502,678	--	6,813,502,678
PT Internasional Serat Optik	33.00%	1,650,000,000	--	1,650,000,000
PT Mitrahakti Inti Perdana	32.00%	--	--	--
Sub Jumlah/ Sub Total		8,463,502,678	--	8,463,502,678
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>				
<u>Less: Provision for Impairment</u>				
Primer Telecommunication International Ltd		(6,813,502,678)	--	(6,813,502,678)
PT International Serat Optik		(1,650,000,000)	--	(1,650,000,000)
Sub Jumlah/ Sub Total		(8,463,502,678)	--	(8,463,502,678)
Jumlah Kepemilikan Tidak Langsung/				
Total Indirect Ownership		--	--	--
Jumlah/ Total		--	--	--

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

31 Desember/ December 31, 2020					
Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan (Pelepasan)/ Addition (Deduction) Rp	Bagian Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Portion Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership					
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>					
PT Inti Pisma Internasional	22.00%	78,479,123	--	--	78,479,123
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>					
<u>Less: Provision for Impairment</u>					
PT Inti Pisma Internasional		(78,479,123)	--	--	(78,479,123)
Jumlah Kepemilikan Langsung/					
Total Direct Ownership		--	--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership					
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>					
PT Inti Global Optical Communication	25.00%	6,813,502,678	--	--	6,813,502,678
PT Internasional Serat Optik	33.00%	1,650,000,000	--	--	1,650,000,000
PT Mitrahakti Inti Perdana	32.00%	1,203,239,150	--	(1,203,239,150)	--
Sub Jumlah/ Sub Total		9,666,741,828	--	(1,203,239,150)	8,463,502,678
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>					
<u>Less: Provision for Impairment</u>					
PT Inti Global Optical Communication		--	(6,813,502,678)	--	(6,813,502,678)
PT Internasional Serat Optik		(1,650,000,000)	--	--	(1,650,000,000)
Sub Jumlah/ Sub Total		(1,650,000,000)	(6,813,502,678)	--	(8,463,502,678)
Jumlah Kepemilikan Tidak Langsung/					
Total Indirect Ownership		8,016,741,828	(6,813,502,678)	(1,203,239,150)	--
Jumlah/ Total		8,016,741,828			--

Kepemilikan Langsung

PT Inti Pisma Internasional (IPI)

Berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA No.5, tanggal 15 Mei 2007, Perusahaan memiliki Penyertaan pada IPI sebesar Rp1.430.000.000 atau sebesar 22% dari Modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.W7-HT.01.04-8520.

IPI bergerak dalam bidang usaha produksi pesawat telepon tanpa kabel dan perdagangan umum.

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Inti Global Optical Communication (IGOC)

Berdasarkan Akta Notaris Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn. No.4, tanggal 11 Februari 2013, IPMS melakukan Penyertaan pada IGOC sebesar Rp6.600.000.000 atau sebesar 25% dari Modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-6541 AH.01.01.Tahun 2013.

IGOC bergerak dalam bidang usaha jasa ekspor-impor dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi.

Direct Ownership

PT Inti Pisma Internasional (IPI)

Based on the Notarial Deed Erni Rohaini, S.H., MBA No.5, dated May 15, 2007, the Company has Participation in IPI amounting to Rp1,430,000,000 or 22% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.W7-HT.01.04-8520.

IPI is engaged in the production of cordless telephones and general trading.

Indirect Ownership

PT Inti Global Optical Communication (IGOC)

Based on the Notarial Deed Ashari Koeerniawan, S.H., M.Kn. No.4, dated February 11, 2013, IPMS made Participation in IGOC amounting to Rp6,600,000,000 or 25% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No.AHU-6541 AH.01.01.Tahun 2013.

IGOC engaged in the business of export-import services and trading of telecommunication transmission equipment.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

PT Internasional Serat Optik (ISO)

Berdasarkan Akta Notaris Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn. No. 13, tanggal 22 April 2013, IPMS melakukan Penyertaan pada ISO sebesar Rp1.650.000.000 atau sebesar 33% dari Modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-23086.AH.01.01.Tahun 2013.

Maksud dan tujuan ISO adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ISO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Ekspor impor perdagangan peralatan telekomunikasi, antara lain kabel serat *optic*, pabrikasi elektronik.
- Distributor barang dagangan antara lain kabel serat *optic* untuk komunikasi.
- Jasa konsultan teknik bidang telekomunikasi.

PT Mitrabhakti Inti Perdana (MIP)

Berdasarkan Akta Notaris Rasman, S.H., tanggal 23 November 2012, INTEN memiliki Penyertaan pada MIP sebesar Rp783.000.000 atau sebesar 60% dari Modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.10-28058.

MIP bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

Berdasarkan penelaahan investasi pada entitas asosiasi secara individual, manajemen melakukan penurunan nilai karena entitas asosiasi tersebut mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi.

PT Internasional Serat Optik (ISO)

Based on the Notarial Deed Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn No.13, dated April 22, 2013, IPMS made Participation in ISO amounting to Rp1,650,000,000 or 33% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No.AHU-23086.AH.01.01.Tahun 2013.

The purpose and objective of ISO is doing business in a large scale trade. To achieve its goals and objectives, ISO may carry out the following activities:

- Export import trade of telecommunications equipment, including fiber-optic cable, electronic manufacturing.
- Merchandise distributor that includes fiber optic cables for communications.
- Engineering consultancy services in telecommunications.

PT Mitrabhakti Inti Perdana (MIP)

Based on the Notarial Deed Rasman, S.H., dated November 23, 2012, INTEN made Participation in MIP amounting to Rp783,000,000 or 60% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No.AHU-AH.01.10-28058.

MIP is engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

Based on the review of investments in associates individually, management has impaired the value, because the associates incurred a loss and is no longer in operation.

11. Investasi pada Instrumen Keuangan

11. Investments in Financial Instruments

31 Desember/ December 31, 2021 dan/ and 2020			
Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Pelepasan Addition/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership			
<u>Investasi Instrumen Keuangan/</u>			
<u>Investment in Financial Instrument</u>			
PT Maleo Emtiga	30,000,000,000	--	30,000,000,000
PT Smart Telecom	0.19% 24,227,027,000	--	24,227,027,000
PT Bangtelindo	2.65% 250,000,000	--	250,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	54,477,027,000	--	54,477,027,000

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

31 Desember/ December 31, 2021 dan/ and 2020				
Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Pelepasan Addition/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u> <i>Less: Provision for Impairment</i>				
PT Maleo Emtiga	(30,000,000,000)	--	(30,000,000,000)	
PT Smart Telecom	(24,227,027,000)	--	(24,227,027,000)	
PT Bangtelindo	(250,000,000)	--	(250,000,000)	
Sub Jumlah/ Sub Total	(54,477,027,000)	--	(54,477,027,000)	
Jumlah Kepemilikan Langsung/ Total Direct Ownership	--	--	--	
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership				
<u>Investasi Instrumen Keuangan/</u> <i>Investment in Financial Instrument</i>				
Primer Telecommunication International Ltd	9.00%	8,573,601,509	--	8,573,601,509
PT JK Networks	17.00%	850,000,000	--	850,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total		9,423,601,509	--	9,423,601,509
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u> <i>Less: Provision for Impairment</i>				
Primer Telecommunication International Ltd		(8,573,601,509)	--	(8,573,601,509)
PT JK Networks		(850,000,000)	--	(850,000,000)
Sub Jumlah/ Sub Total		(9,423,601,509)	--	(9,423,601,509)
Jumlah Kepemilikan Tidak Langsung/ Total Indirect Ownership		--	--	--
Jumlah/ Total		--	--	--

Kepemilikan Langsung

PT Maleo Emtiga (Maleo)

Berdasarkan surat menteri keuangan No.S-83/MK.016/1997 tanggal 6 Februari 1997, jumlah penyertaan Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

- RUPS tanggal 18 April 1996 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1995, penyertaan Perusahaan adalah sebesar Rp10.000.000.000;
- RUPS tanggal 7 November 1996 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 1997, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp15.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp25.000.000.000;
- RUPS tanggal 4 Maret 1997 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1996, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar 5.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp30.000.000.000.

Direct Ownership

PT Maleo Emtiga (Maleo)

Based on the letter of the minister of finance No.S-83/MK.016/1997 dated February 6, 1997, the Company's total participation was determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) as follows:

- General Meeting of Shareholders on April 18, 1996 concerning Ratification of the Results of Business Activities in 1995, the Company's investment amounting to Rp10,000,000,000;
- General Meeting of Shareholders on November 7, 1996 concerning Ratification of the Company's 1997 Work Plan and Budget, the Company added the investment in shares amounting to Rp15,000,000,000, so that the investment value of the Company became Rp25,000,000,000;
- GMS held on March 4, 1997 concerning Ratification of the Results of Business Activities in 1996, the Company increased the investment in shares amounting to 5,000,000,000, so that the investment value of the Company's shares became Rp30,000,000,000.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo)

Bangtelindo bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

Kepemilikan Tidak Langsung

Premier Telecommunication International Limited (PTI)

PTI berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 dengan berkantor di Shenzhen China dengan pusat manufaktur di Shenzhen dan Bandung.

PTI bergerak dalam bidang perancangan dan integrasi Handset CDMA, GSM/GPRS dilengkapi dengan pengembangan aplikasinya.

PT JK Networks

JK Network bergerak dalam bidang usaha penyedia perlengkapan kabel optik.

Berdasarkan penelaahan investasi pada instrumen keuangan secara individual, manajemen melakukan penurunan nilai karena instrumen keuangan tersebut mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi.

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo)

Bangtelindo engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

Indirect Ownership

Premier Telecommunication Internasional Limited (PTI)

PTI established and operated since 2009 with offices in Shenzhen China with manufacturing center in Shenzhen and Bandung.

PTI is engaged in designing and integrating CDMA, GSM/ GPRS handsets complemented by application development.

PT JK Networks

JK Network is engaged in providing optical cable equipment.

Based on the review of investments in financial instrument individually, management has impaired the value, because the financial instrument incurred a loss and is no longer operational.

12. Properti Investasi

12. Investment Properties

	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	58,761,113,322	--	--	--	58,761,113,322	Land
Bangunan	482,009,415	--	--	--	482,009,415	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,925	--	--	--	2,525,930,925	Right of Use Land
Jumlah	61,769,053,662	--	--	--	61,769,053,662	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	345,668,826	24,322,651	--	--	369,991,477	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,924	--	--	--	2,525,930,924	Right of Use Land
Jumlah	2,871,599,750	24,322,651	--	--	2,895,922,401	Total
Nilai Buku	58,897,453,912				58,873,131,261	Book Value

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	--	--	--	58,761,113,322	58,761,113,322	Land
Bangunan	--	--	--	482,009,415	482,009,415	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,925	--	--	--	2,525,930,925	Right of Use Land
Jumlah	2,525,930,925	--	--	59,243,122,737	61,769,053,662	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	--	19,280,377	--	326,388,449	345,668,826	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,924	--	--	--	2,525,930,924	Right of Use Land
Jumlah	2,525,930,924	19,280,377	--	326,388,449	2,871,599,750	Total
Nilai Buku	1				58,897,453,912	Book Value

Seluruh beban depresiasi atas properti investasi dicatat pada beban administrasi (Catatan 30) masing-masing sebesar Rp24.322.651 dan Rp19.280.377 pada 31 Desember 2021 dan 2020.

All depreciation expense on investment properties are recorded in administrative expense (Note 30) amounting to Rp24.322.651 and Rp19,280,377 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan hak pakai lahan. Pada tahun 2020 Perusahaan mereklasifikasi aset tetap berupa tanah dan bangunan seluas 6.035,63m² dan 2.796,28m² yang berlokasi di Jl. Moh Toha No.77 dan No.225, Bandung ke properti investasi (Catatan 9). Sebelum tahun 2020, aset berupa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, namun sejak awal tahun 2020 aset tetap tersebut disewakan kepada pihak ketiga. Tanah dan bangunan tersebut direklasifikasi sesuai dengan nilai buku sisanya yaitu masing-masing sebesar Rp58.761.113.322 dan Rp155.620.966.

Investment property is land, buildings, and land use rights. In 2020, the Company reclassified fixed assets in the form of land and buildings with an area of 6,035.63sqm and 2,796.28sqm located on Jl. Moh Toha No.77 and No.225, Bandung to investment properties (Note 9). Prior to 2020, the assets in the form of land and buildings were used for the Company's operational activities, however since 2020 these fixed assets have been leased to third parties. The land and buildings were reclassified according to the remaining book value which amounted to Rp58,761,113,322 and Rp155,620,966, respectively.

13. Aset Takberwujud

13. Intangible Assets

	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Produk Pengembangan	15,884,448,594	--	--	--	15,884,448,594	Product Development
Software	22,063,468,639	983,919,984	--	--	23,047,388,623	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
	39,947,917,233	983,919,984	--	--	40,931,837,217	
Aset dalam Pembangunan	11,439,937,589	377,756,675	--	--	11,817,694,264	Assets under Construction
Jumlah	51,387,854,822	1,361,676,659	--	--	52,749,531,481	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Produk Pengembangan	15,272,382,081	319,338,994	--	--	15,591,721,075	Product Development
Software	20,687,524,972	1,549,625,201	--	--	22,237,150,173	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
Jumlah	37,959,907,053	1,868,964,195	--	--	39,828,871,248	Total
Nilai Buku	13,427,947,769				12,920,660,233	Book Value

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Produk Pengembangan	15,884,448,594	--	--	--	15,884,448,594	Product Development
Software	20,979,451,936	1,084,016,703	--	--	22,063,468,639	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
	38,863,900,530	1,084,016,703	--	--	39,947,917,233	
Aset dalam Pembangunan	10,826,168,988	613,768,601	--	--	11,439,937,589	Assets under Construction
Jumlah	49,690,069,518	1,697,785,304	--	--	51,387,854,822	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Produk Pengembangan	14,949,604,480	322,777,601	--	--	15,272,382,081	Product Development
Software	19,692,495,475	995,029,497	--	--	20,687,524,972	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
Jumlah	36,642,099,955	1,317,807,098	--	--	37,959,907,053	Total
Nilai Buku	13,047,969,565				13,427,947,769	Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset dalam penyelesaian terdiri dari ADSB Tahap 2, Smart Level Crossing, Smart Digital Enclosure SCR Insentif, Modular Insentif, Smart Device Radio Sonde Insentif, Smart NTE LVMS, Smart NTE Antena VSAT, Smart Device Santanu Insentif, Smart Device Radar Cuaca Insentif, dan ADSB Insentif dalam pelaksanaan yang mempunyai nilai masing-masing sebesar Rp11.817.694.264 dan Rp11.439.937.589.

As of December 31, 2021 and 2020, construction in progress consists of ADSB Phase 2, Smart Level Crossing, Smart Digital Enclosure SCR Incentives, Incentive Modular, Smart Device Radio Sonde Incentive, Smart NTE LVMS, Smart NTE VSAT Antenna, Smart Device Santanu Incentive, Smart Weather Radar Device Incentives, and ADSB Incentives in progress which have the amount of Rp11,817,694,264 and Rp11,439,937,589, respectively.

Tingkat penyelesaian atas aset dalam penyelesaian adalah berkisar antara 80% sampai 90%. Manajemen memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2022 aset tak berwujud tersebut telah siap digunakan.

Completion rate on assets in progress is between 80% until 90%. Management estimates that in the end of 2022, intangible assets are ready to use.

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Amortization expense for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 28)	319,338,994	319,338,993	Cost of Revenues (Note 28)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	1,549,625,201	998,468,105	General and Administrative Expenses (Note 30)
Jumlah	1,868,964,195	1,317,807,098	Total

14. Aset Hak Guna

14. Right of Use Assets

	31 Desember/ December 31, 2021					
	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Dampak PSAK 73/ Impact of PSAK 73	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Hak Guna						Right of Use
Alat Olah Data	3,164,439,028	--	--	--	3,164,439,028	Data Processing Tools
Jumlah	3,164,439,028	--	--	--	3,164,439,028	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Alat Olah Data	1,265,775,611	--	1,265,775,612	--	2,531,551,223	Data Processing Tools
Jumlah	1,265,775,611	--	1,265,775,612	--	2,531,551,223	Total
Nilai Buku	1,898,663,417				632,887,805	Book Value

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	31 Desember/ December 31, 2020					
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Dampak PSAK 73/ Impact of PSAK 73	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Hak Guna						Right of Use
Alat Olah Data	--	3,164,439,028	--	--	3,164,439,028	Data Processing Tools
Jumlah	--	3,164,439,028	--	--	3,164,439,028	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Alat Olah Data	--	--	1,265,775,611	--	1,265,775,611	Data Processing Tools
Jumlah	--	--	1,265,775,611	--	1,265,775,611	Total
Nilai Buku					1,898,663,417	Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Depreciation expense for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 28)	201,483,387	287,266,740	Cost of Revenues (Note 28)
Beban Penjualan (Catatan 29)	73,654,830	90,347,520	Selling Expenses (Note 29)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	967,119,233	853,896,201	General and Administrative Expenses (Note 30)
Beban Pengembangan (Catatan 31)	23,518,162	34,265,150	Development Expense (Note 31)
Jumlah	1,265,775,612	1,265,775,611	Total

15. Aset Lain-Lain

15. Other Assets

	2021 Rp	2020 Rp	
Aset Tetap Non Operasi			Non Operating Fixed Assets
Alat Olah Data	13,832,308,327	13,832,308,327	Data Processing Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	11,734,927,777	11,728,502,777	Measuring Tools and Instruments of Labor
Mesin dan Peralatan	6,121,467,453	6,121,467,453	Machinery and Equipment
Inventaris Kantor dan Gudang	2,157,771,074	2,157,771,074	Inventory Office and Warehouse
Dikurangi:			Less:
Akumulasi Penyusutan	(33,846,472,041)	(33,840,047,043)	Accumulated Depreciation
Sub Jumlah	2,590	2,588	Sub Total
Persediaan Lainnya			Other Inventories
Persediaan Usang	15,971,691,714	15,971,691,714	Obsolete Inventories
Dikurangi:			Less:
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(15,971,691,714)	(15,971,691,714)	Provision for Impairment Losses
Sub Jumlah	--	--	Sub Total
Deposito Sewa Gedung	189,547,503	106,072,503	Building Rental Deposit
Jumlah	189,550,093	106,075,091	Total

Pada tahun 2021, penambahan aset tetap non operasi adalah reklasifikasi dari aset tetap berupa Alat Ukur dan Perkakas Kerja yang sudah habis nilai bukunya dan tidak digunakan (Catatan 9).

In 2021, the addition of non-operating fixed assets is a reclassification of fixed assets in the form of Measuring Tools and Work Tools that have run out of book value and are not used (Note 9).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan lainnya adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses of other inventories are as follows:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	15,971,691,714	11,115,343,105	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan (Catatan 33)	--	15,971,204,724	<i>Addition (Note 33)</i>
Pemulihan	--	(11,114,856,115)	<i>Recovery</i>
Saldo Akhir	15,971,691,714	15,971,691,714	<i>Ending Balance</i>

Pada tahun 2020, Perusahaan menjual persediaan usangnya senilai Rp11.114.856.115. Pendapatan atas penjualan tersebut dicatat oleh Perusahaan pada pendapatan lain-lain (Catatan 32) sebesar Rp806.014.880.

In 2020, the Company sold its obsolete inventory amounting to Rp11,114,856,115. The revenue from this sales was recorded by the Company in other income (Note 32) amounting to Rp806,014,880.

Pada tahun 2020, Perusahaan menjual aset tetap non operasi sebesar nilai buku Rp84. Pendapatan atas penjualan tersebut dicatat oleh Perusahaan pada pendapatan lain-lain (Catatan 32) sebesar Rp725.690.910.

In 2020, the Company sold its non-operating fixed assets with a book value of Rp84. The revenue from this sales was recorded by the Company in other income (Note 32) amounting to Rp725,690,910.

16. Utang Usaha

16. Trade Payables

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i> (Catatan/ Note 35)	194,938,200,965	216,879,979,996
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	150,128,688,532	203,273,083,669
Jumlah/ Total	345,066,889,497	420,153,063,665

17. Utang Lain-Lain

17. Other Payables

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i> (Catatan/ Note 35)	712,487,505	798,507,505
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	56,975,718,458	62,159,288,326
Jumlah/ Total	57,688,205,963	62,957,795,831

Sebagian besar utang lain-lain pihak ketiga merupakan utang atas tunggakan gaji karyawan.

Most of the other debts from third parties are payable on arrears of employee salaries.

18. Beban Akrua

18. Accrued Expenses

Akun ini merupakan beban akrual terkait operasional dan jasa produksi yang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing nilainya sebesar Rp163.052.241.906 dan Rp69.095.363.668.

This account represents accrual expenses related to the operations and production services which as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp163,052,241,906 and Rp69,095,363,668, respectively.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

19. Utang Bank

19. Bank Loans

19.a. Pokok Pinjaman

19.a. Loan Principal

	2021 Rp	2020 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	561,868,050,325	561,735,460,365
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	276,788,821,001	276,788,821,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19,764,553,818	17,472,305,439
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3,070,068,181	3,077,487,194
	861,491,493,325	859,074,073,998
Dikurangi:		
Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(42,930,924,218)	(15,513,360,717)
Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	818,560,569,107	843,560,713,281

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Less:

Current Maturity

Maturity More than One Year

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "Mandiri"

Pada tanggal 2 September 2020, berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No.CBG.CB5/SPPK.034/2020 Perusahaan memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "Mandiri"

On September 2, 2020, based on the Approval Letter for Credit Extension No.CBG.CB5/SPPK.034/2020, the Company obtained a credit restructuring facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

a. Fasilitas KMK Transaksional 1

Plafon Kredit : Rp97.412.337.879
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit

a. KMK Transactional 1 Facility

Maximum Limit : Rp97,412,337,879
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring

b. Fasilitas KMK Transaksional 2

Plafon Kredit : Rp66.000.000.000
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit

b. KMK Transactional 2 Facility

Maximum Limit : Rp66,000,000,000
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring

c. Fasilitas KMK Post Financing

Plafon Kredit : Rp116.498.799.660
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit

c. KMK Post Financing Facility

Maximum Limit : Rp116,498,799,660
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

d. Fasilitas Non-Cash Loan

Limit Fasilitas : Rp35.000.000.000
Jenis Kredit : Bank Garansi
Jangka Waktu : 1 tahun
Tujuan : Jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan/ retensi.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Aset di Jl. Moch. Toha No.225 (Palasari) yang diikat secara Hak Tanggungan senilai Rp76.970.000.000 (Catatan 9);
- Persediaan dan piutang atas proyek yang dibiayai serta persediaan dan piutang lainnya yang diikat secara Fidusia dengan total *Security Coverage Ratio* sebesar 150% (Catatan 5, 6, dan 7);
- *Escrow Account* yang digunakan untuk menampung hasil pembayaran atas proyek dengan *standing instruction* dan Perusahaan memberikan surat kuasa dalam perjanjian kredit untuk mendebet *Escrow Account* yang digunakan untuk membayar kewajiban dan menurunkan baki debet.
- Agunan bersifat *cross collateral* dengan agunan fasilitas kredit.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan diwajibkan untuk:

- Menjaga *financial covenants net operating cash flow* positif mulai tahun 2024, *leverage* maksimal 600% mulai tahun 2027, dan *EBITDA to I* minimal 1,2 kali mulai tahun 2023.
- Mendahulukan menyelesaikan segala kewajiban kredit di atas kepentingan anak perusahaan.
- Melaporkan progress proyek yang dibiayai setiap 3 bulan dan paling lambat telah diterima 30 hari setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan *inhouse/ unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima 60 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan paling lambat telah diterima pada 180 hari setelah akhir periode pelaporan.
- Mengizinkan untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Perusahaan.
- Memperpanjang perizinan usaha dan penutupan asuransi yang akan jatuh tempo dan menyampaikan salinan/ fotokopi.

d. Non-Cash Loan Facility

Facility Limit : Rp35,000,000,000
Credit Type : Bank Guarantee
Period : 1 year
Purpose : Tender guarantee, implementation guarantee, maintenance/ retention guarantee.

The loan facility is secured by:

- Assets on Jl. Moch. Toha No.225 (Palasari) bound under Mortgage worth Rp76,970,000,000 (Note 9);
- Inventories and receivables from financed projects as well as inventories and other receivables that are tied in Fiduciary basis with a total *Security Coverage Ratio* of 150% (Notes 5, 6, and 7);
- Escrow Account that is used to save the payment results for the project with a standing instruction and the Company provides a power of attorney in the credit agreement to debiting the Escrow Account which is used to pay obligations and reduce the outstanding loan.
- Collateral is cross collateral with credit facility collateral.

As long as the credit has not been paid off, the Company is required to:

- Maintain positive *financial covenants net operating cash flow* starting in 2024, maximum leverage of 600% starting in 2027, and *EBITDA to I* at least 1.2 times starting in 2023.
- Prioritize settling all credit obligations above the interests of the subsidiary.
- Report the progress of the financed project every 3 months and received no later than 30 days after the end of the reporting period.
- Submit an *inhouse/ unaudited financial report* every quarter and it has been received no later than 60 days after the end of the reporting period and the annual audited financial report has been received no later than 180 days after the end of the reporting period.
- Permit to conduct audits of the Company's business and financial activities.
- Extending business licenses and insurance coverage that will be due and submitting copies/ photocopies.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)*

- Menyampaikan salinan/ fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar perseroan setiap ada perubahan.
- Melakukan pengkinian daftar persediaan dan piutang sebagai lampiran Akta Fidusia secara triwulan atas persediaan dan piutang yang dijaminan dan pembaharuan lampiran Fidusia dengan biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan.
- Mandiri berhak mengubah ketentuan dan syarat restrukturisasi kredit apabila terdapat perbedaan signifikan terhadap skema restrukturisasi atau ketentuan kewajiban kredit dari kreditur lain dibandingkan dengan kajian final restrukturisasi dari PT PPA.
- Perusahaan berkewajiban menyampaikan RKAP paling lambat setiap bulan Januari.
- Perusahaan wajib menyediakan dana pada rekening *Debt Service Account* (DSA) minimal sebesar 1 kali tagihan kewajiban kredit.
- Memberitahukan Mandiri dalam tempo paling lambat 1 bulan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, membayar/melunasi utang kepada pemegang saham, membagikan dividen, memperoleh suntikan dana dari pemegang saham.

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan:

- Memindahtangankan barang jaminan.
- Mengikat diri sebagai penjamin utang kecuali yang telah dijaminan terlebih dahulu sebelum tanggal SPPK terbaru.
- Memperoleh fasilitas kredit baru atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya.
- Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan kecuali dalam rangka operasional usaha yang wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp276.788.821.001.

Sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan perjanjian, Perusahaan belum diwajibkan untuk menghitung *financial covenant*.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

Berdasarkan surat No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 tanggal 26 September 2019 Perusahaan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- *Submit a copy/ photocopy of the deed of amendment to the Company's Articles of Association every time there is a change.*
- *Updating the list of inventories and receivables as an attachment to the Fiduciary Deed on a quarterly basis on collateralized inventories and receivables and updating the Fiduciary attachment with costs incurred to be borne by the Company.*
- *Mandiri has the right to change the terms and conditions of credit restructuring if there are significant differences to the restructuring scheme or the terms of the credit obligations of other creditors compared to the final restructuring review from PT PPA.*
- *The Company is obliged to submit a RKAP at the latest every January.*
- *Companies are required to provide funds in a Debt Service Account (DSA) for a minimum of 1 time a loan obligation statement.*
- *Notify Mandiri within 1 month at the latest for changes in the composition of management and shareholders, pay/settle debts to shareholders, distribute dividends, obtain an injection of funds from shareholders.*

As long as the loan has not been paid off, without prior written approval from Mandiri, the Company is not allowed to:

- *Transfer of collateral.*
- *Bind himself as a guarantor of debt, except for those that have been pledged before the latest SPPK date.*
- *Obtaining new credit facilities or other loans from other financial institutions.*
- *Providing loans to subsidiaries except for normal business operations.*

As of December 31, 2021 and 2020, both of these loans amounted to Rp276,788,821,001.

As of December 31, 2021 in accordance with the agreement, the Company has not been required to calculate financial covenants.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

Based on letter No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 dated September 26, 2019, the Company

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit
sebagai berikut:

**a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Co Menurun 1 (KMK
Co Menurun 1)**

Plafon Kredit : Rp550.000.000.000
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : 26 September 2029
Tujuan : *Repackaging outstanding*
fasilitas yang sudah ada di
BRI yang telah digunakan
untuk mengerjakan proyek-
proyek yang didapatkan oleh
Perusahaan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Termin Proyek Cessie;
- Tanah dan bangunan SHGB No.8 luas tanah 45,957m² sebesar Rp638.786 juta (Catatan 9);
- Tanah dan bangunan SHGB No.44, 19 dan 48, luas tanah 79,417m² senilai Rp120.000juta (Catatan 9); dan
- Persediaan senilai Rp95.000.000 (Catatan 7).

**b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Baru
(KMKK Baru)**

Plafon Kredit : Rp100.000.000.000
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : 30 September 2029
Tujuan : Tambahan modal kerja jasa
konstruksi untuk proyek-
proyek yang diperoleh
Perusahaan dari PT Telkom
grup, PT PLN grup, dan
Kementerian, serta telah
mendapatkan persetujuan
dari Divisi Bisnis BUMN 1

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang
sama dengan fasilitas KMK Co menurun 1 (*cross collateral*).

**c. Fasilitas Kredit Modal Kerja Co Menurun 2 (KMK
Co Menurun 2)**

Plafon Kredit : Rp10.000.000.000
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : 26 September 2022

*obtained a restructuring credit facility as
follows:*

**a. Working Capital Credit Facility Co Menurun 1
(KMK Co Menurun 1)**

*Maximum Limit : Rp550,000,000,000
Interest Rate : 6% per annum
Period : September 26, 2029
Purpose : Repackaging the existing
outstanding facility at BRI
that has been used to work
on projects acquired by the
Company.*

The loan facility is secured by:

- *Cessie Project Termin;*
- *Land and building SHGB No.8, land area 45,957sqm amounting to Rp638,786 million (Note 9);*
- *Land and building SHGB No.44, 19 and 48, land area of 79,417sqm worth Rp120,000million (Note 9); and*
- *Inventory of Rp95,000,000 (Note 7).*

**b. Construction Working Capital Credit Facility
Baru (KMKK Baru)**

*Maximum Limit : Rp100,000,000,000
Interest Rate : 6% per annum
Period : September 30, 2029
Purpose : Additional working capital
for construction services
for projects obtained by
the Company from the
PT Telkom group, PT PLN
group and the Ministry,
and has received approval
from the BUMN Business
Division 1*

*This loan facility is secured with the same
collateral as KMK facility Co Menurun 1 (cross
collateral).*

**c. Working Capital Credit Facility Co Menurun 2
(KMK Co Menurun 2)**

*Maximum Limit : Rp10,000,000,000
Interest Rate : 6% per annum
Period : September 26, 2022*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Tujuan : Tambahan modal kerja untuk membiayai kebutuhan perusahaan terkait proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan selain yang dibiayai oleh fasilitas KMKK

Purpose : Additional working capital to finance company needs related to projects undertaken by the Company other than those financed by the KMKK facility

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama dengan fasilitas KMK Co menurun 1 (cross collateral).

This loan facility is secured with the same collateral as KMK facility Co Menurun 1 (cross collateral).

d. Fasilitas Bank Garansi

d. Bank Guarantee Facility

Plafon Kredit : Rp50.000.000.000
Jenis Kredit : *Contingent*
Jangka Waktu : 30 September 2029
Tujuan : Jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan kepabeanaan atas proyek-proyek BUMN dan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan BRI.

*Maximum Limit : Rp50,000,000,000
Credit Type : Contingent
Period : September 30, 2029
Purpose : Tender guarantees, down payment guarantees, implementation guarantees, customs guarantees for BUMN and Government projects that have received BRI approval.*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

As of December 31, 2020, the Company has not used the facility.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

As long as the credit has not been paid off, the Company is not allowed to:

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri;
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya;
- Melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan dari Kementerian yang berwenang;
- Melakukan perubahan bentuk badan hukum dan/ atau bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan dari Kementerian yang berwenang;
- Debitur mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- *Submitted a request for a bankruptcy statement to the Commercial Court to declare the debtor's own bankruptcy;*
- *Selling or releasing immovable property or main assets in running the business;*
- *Conduct a merger, acquisition or consolidation with another company, unless required by applicable laws and/or a decision from the competent Ministry;*
- *Changing the form of a legal entity and/ or business sector that could have material consequences, unless required by the applicable laws and/ or a decree from the competent Ministry;*
- *The debtor binds himself as a guarantor or guarantor of debt or guarantees the company's assets to other parties;*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

- Debitur mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini;
- Debitur memperoleh pinjaman/ kredit baru dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Debitur melakukan perubahan struktur permodalan;
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Debitur dan prinsip *good corporate governance*; dan
- Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan diwajibkan untuk (*Financial Covenant*):

- Perusahaan harus menjaga *net worth* (total modal) bernilai positif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp558.255.788.787 dan Rp561.735.460.365.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan belum memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan. Meskipun demikian, BRI masih memperlakukan pinjaman ini sebagai kredit jangka panjang sesuai perjanjian kredit restrukturisasi dan surat BRI No.B.207.e-CRR/WRR/WRI/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Entitas Anak

PT Inti Pindad Mitra Sejati "IPMS"

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk "BNI"

- Restrukturisasi
IPMS mengajukan perubahan Restrukturisasi Fasilitas Kredit di BNI melalui surat No.085/HK.07/21000/04/2019 tanggal 14 April 2019 dan BNI menyetujui permohonan tersebut melalui surat BNI No.BIN/2.4/127/R tanggal 27 Mei 2019 perihal persetujuan perubahan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- The debtor transfers/ delivers to another party, partly or wholly, of the rights and obligations arising in connection with this Credit Facility;
- Debtors get new loans/ credits from banks or other financial institutions;
- The debtor changes the capital structure;
- Pay off or pay debts to shareholders before debt is paid in BRI first;
- Conducting transactions with a person or party, including but not limited to affiliated companies, in a different way or outside the normal practices and habits or not in accordance with the applicable provisions of the debtor and the principles of good corporate governance; and
- Performing an action that violates any applicable legal provisions and/or regulations.

As long as the credit has not been paid off, the Company is required to (*Financial Covenant*):

- The Company shall maintain a positive net worth (total equity).

As of December 31, 2021 and 2020, both of these loans amounted to Rp558,255,788,787 and Rp561,735,460,365.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has not complied with the ratios and covenants as required. However, BRI still treats this loan as long-term credit in accordance with the restructuring credit agreement and BRI letter No.B.207.e-CRR/WRR/WRI/12/2021 dated December 29, 2021.

Subsidiaries

PT Inti Pindad Mitra Sejati "IPMS"

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk "BNI"

- Restructurisation
IPMS submitted changes to the Credit Facility Restructuring at BNI through letter No.085/HK.07/21000/04/2019 dated April 14, 2019 and BNI approved the request through BNI letter No.BIN/2.4/127/R date May 27, 2019 concerning the approval of changes to the Restructuring of Your Credit Facility with the following provisions:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Fasilitas Pinjaman Kredit:

- Plafond Rp15.908.994.044.
- Bunga 7,32% per tahun.
- Jangka waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2028.

Jaminan:

- Piutang usaha sebesar Rp11.671.060.000 diikat fidusia No.WS-0017966HT.05.01 tanggal 10 November 2009 senilai Rp15.945.954.134 (Catatan 5).
- Persediaan barang sebesar Rp2.088.170.000 diikat fidusia No.W8-0017967HT.05.01.TH.2009 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp6.762.167.624 (Catatan 7).

Berdasarkan surat No.RRC/2/01488/R tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyesuaian Syarat Fasilitas kredit bahwa IPMS tidak memenuhi syarat ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, sehingga terdapat penyesuaian terhadap fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

- Penyesuaian suku bunga fasilitas kredit Kredit Modal Kerja (KMK) menjadi sebesar 7,32% per tahun tanpa *deferred interest*.
- Pembebanan seluruh *outstanding* kewajiban bunga ditangguhkan ke dalam *outstanding* Kredit Modal Kerja (KMK).
- Pembebanan *outstanding* Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) ke dalam *outsanding* Kredit Modal Kerja (KMK).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp19.764.553.818 dan Rp17.472.305.439.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk "BRI"

IPMS memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari BRI, sebagaimana dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit tanggal 30 Maret 2012 dihadapan Notaris Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., No.378, yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir, sebagaimana dalam Surat Penawaran Putusan Kredit, tanggal 16 Juli 2019, No.B.2135/KC-VI/uK/07/2019, yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris Lestari Andayani Uiatmo, S.H., No.22, tanggal 14 Agustus 2019, diantaranya sebagai berikut:

Credit Loan Facility:

- Maximum limit Rp15,908,994,044.
- Interest 7.32% per annum.
- Time period 36 until February 28, 2028.

Collaterals:

- Trade receivables in the amount of Rp11,671,060,000 bound by fiduciary No.WS-0017966HT.05.01 dated November 10, 2009 amounted to Rp15,945,954,134 (Note 5).
- Inventories amounting to Rp2,088,170,000 are bound by fiduciary No.W8-0017967 HT.05.01.TH.2009 dated September 10, 2009 amounting to Rp6,762,167,624 (Note 7).

Based on letter No.RRC/2/01488/R dated December 22, 2020 regarding Adjustment of Credit Facility Terms that IPMS does not meet the requirements of the credit restructuring provisions as stipulated in the credit agreement, so there are adjustments to the credit facility to be as follows:

- Adjustment of the working capital credit facility (KMK) interest rate to be 7.32% per year without deferred interest.
- Charges of all outstanding interest obligations are deferred into the outstanding Working Capital Credit (KMK).
- Charging of outstanding Debt Settlement Agreement (PPH) into the Outsanding Working Capital Credit (KMK).

As of December 31, 2021 and 2020 the outstanding loan is amounted to Rp19,764,553,818 and Rp17,472,305,439, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk "BRI"

IPMS obtained the Construction Working Capital Credit Facility (KMKK) from BRI, as stated in the Credit Opening Agreement dated March 30, 2012 before the Notary Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., No.378, which has been amended several times, most recently, as in the Credit Decision Offer Letter, dated July 16, 2019, No.B.2135/KC-VI/uK/07/2019, as stated in the Deed Notary Lestari Andayani Uiatmo, S.H., No.22, August 14, 2019, among others as follows:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Fasilitas Pinjaman Kredit:

- Plafond Rp4.000.000.000;
- Bunga 9% per tahun; dan
- Jangka waktu 16 bulan terhitung 30 Maret 2019 sampai dengan 30 Juli 2021.

Jaminan:

- Piutang atas proyek IPMS diikat dengan PJ-07 (Pengikatan Jaminan) hingga sejumlah Rp13.710.800.000 (Catatan 5);
- Sertifikat Kontra Garansi dan asuradur BRI, atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRI hingga sejumlah Rp1.000.000.000;
- Mesin Nissei kapasitas 250 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Enggel kapasitas 175 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Enggel kapasitas 150 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Arburg kapasitas 70 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Arburg kapasitas 80 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp3.612.261.538 dan Rp3.479.671.577.

PT Inti Konten Indonesia "INTEN"

PT Bank BRI syariah Tbk

Fasilitas pembiayaan ini diperpanjang sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.681/DIR/INTENS/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Syariah:

- Plafond Rp3.240.000.000.
- Porsi dana 6,94% per tahun.
- Jangka waktu 6 bulan sejak 29 Oktober 2019 sampai dengan 29 April 2020.

Jaminan:

Fidusia tagihan sebesar Rp6.125.000.000 (125% dari plafond) (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp3.070.068.181 dan Rp3.077.487.194.

Credit Loan Facility:

- Maximum limit of Rp4,000,000,000;
- Interest 9% per annum; and
- Time period 16 months from March 30, 2019 to July 30, 2021.

Collaterals:

- Accounts receivable of IPMS's project, bound by PJ-07 (Collateral Binding) of up to Rp13,710,800,000 (Notes 5);
- BRI Guarantee and Counter Certificate for Bank Guarantees issued by BRI up to a total of Rp1,000,000,000;
- Nissei machine capacity of 250 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Enggel engine capacity of 175 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Enggel engine capacity of 150 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Arburg machine capacity of 70 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Arburg machine capacity of 80 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9).

As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding loan is amounted to Rp3,612,261,538 dan Rp3,479,671,577.

PT Inti Konten Indonesia "INTEN"

PT Bank BRI syariah Tbk

This financing facility is extended in accordance with the Funding Principle Approval Letter (SP3) No.681/DIR/INTENS/X/2019 dated October 29, 2019, with the following terms and conditions:

Sharia Loan Facility:

- Maximum limit of Rp3,240,000,000.
- Fund portion 6.94% per annum.
- Time period 6 months from October 29, 2019 to April 29, 2020.

Collaterals:

Fiduciary bills amounting to Rp6,125,000,000 (125% of the ceiling) (Note 5).

As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding loan is amounted to Rp3,070,068,181 and Rp3,077,487,194, respectively.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Sampai dengan laporan ini diterbitkan,
perpanjangan atas utang bank tersebut masih
dalam proses.

As of the issuance of this report, the extension
of the bank loan is still in process.

19.b. Utang Bunga Bank

	2021 Rp	2020 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	74,943,126,246	45,681,915,140
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,589,997,170	22,764,963,649
Jumlah	109,533,123,416	68,446,878,789

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan surat tertanggal 26 September 2019
No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 tentang
penawaran putusan kredit, Perusahaan
mendapatkan fasilitas restrukturisasi bunga
pinjaman yang timbul atas fasilitas pinjaman
pokok. Pembayaran atas bunga bank tersebut
ditangguhkan hingga tahun 2029.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020 saldo utang
bunga BRI masing-masing sebesar
Rp74.943.126.246 dan Rp45.681.915.140.

Besarnya suku bunga restrukturisasi yang
ditetapkan adalah masing-masing sebesar 6%
dan 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020. Dimana tingkat bunga yang
harus dibayarkan adalah sebesar 1% per tahun
dan sisanya ditangguhkan sebesar 5% yang
jatuh tempo pembayarannya pada September
2029.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan surat tertanggal 2 September 2020
No.CBG.CBS/SPPK.034/2020 tentang
penyesuaian ketentuan dan syarat kredit
restrukturisasi Bank Mandiri, Perusahaan
mendapatkan fasilitas restrukturisasi bunga
pinjaman yang timbul atas fasilitas pinjaman
pokok. Pembayaran atas bunga bank tersebut
ditangguhkan hingga tahun 2029.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020 saldo utang
bunga Bank Mandiri masing-masing sebesar
Rp34.589.997.170 dan Rp22.764.963.649.

Besarnya suku bunga restrukturisasi yang
ditetapkan adalah masing-masing sebesar 6%
per tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan
2020. Dimana tingkat bunga yang harus

19.b. Accrued Interest Payable

	2021 Rp	2020 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	74,943,126,246	45,681,915,140
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,589,997,170	22,764,963,649
Total	109,533,123,416	68,446,878,789

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on the letter dated September 26, 2019
No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 concerning the
credit decision offering, the Company obtained
a loan interest restructuring facility that arose
on the principal loan facility. Payment of the
bank interest is deferred until 2029.

As of December 31, 2021 and 2020, the
balance of BRI's interest payable is amounted
to Rp74,943,126,246 and Rp45,681,915,140,
respectively.

The interest rate for restructuring is 6% and
9.75% per annum as of December 31, 2021
and 2020, respectively. Where the interest rate
to be paid is 1% per year and the remaining is
deferred of 5% which payment due in
September 2029.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Based on a letter dated 2 September 2020
No.CBG.CBS/SPPK.034/2020 concerning
adjustments to the terms and conditions of
Bank Mandiri's restructuring credit, the
Company obtained a loan interest restructuring
facility that arose on the principal loan facility.
Payment of the bank interest is deferred until
2029.

As of December 31, 2021 and 2020, the
balance of Bank Mandiri's interest payable is
amounted to Rp34,589,997,170 and
Rp22,764,963,649, respectively.

The interest rate for restructuring is 6% per
annum respectively as of December 31, 2021
and 2020. Where the interest rate to be paid is
1% per year and the remaining is deferred of

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

dibayarkan adalah sebesar 1% per tahun dan sisanya ditangguhkan sebesar 5% yang jatuh tempo pembayarannya pada September 2029.

5% which fall payment due in September 2029.

20. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank

20. Non-Bank Financial Service Institutions

	2021 Rp	2020 Rp
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institutions Loan		
PT Hewlett Packard Finance Indonesia	4,974,984,007	5,269,741,043
PT PPA Finance	2,805,000,000	--
Jumlah/ Total	7,779,984,007	5,269,741,043

PT Hewlett Packard Finance Indonesia

Pada tanggal 22 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Hewlett-Packard Finance Indonesia yang digunakan untuk pembelian persediaan proyek Perusahaan.

PT Hewlett Packard Finance Indonesia

As of April 22, 2019, the Company obtained a loan facility from PT Hewlett-Packard Finance Indonesia which was used to purchase inventory for the Company's project.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 12,56% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 24 bulan.

This loan bears annual interest rate of 12.56% with period of repayment of 24 months.

PT PPA Finance

Pada tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT PPA Finance yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 3 bulan.

PT PPA Finance

As of December 1, 2021, the Company obtained a financing facility from PT PPA Finance which was used for the Company's working capital with an interest rate of 15% per annum with a loan repayment period of 3 months.

21. Liabilitas Sewa

21. Lease Liabilities

Jadwal pembayaran sewa minimum alat olah data berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments of data processing tools required under the Company's outstanding lease agreements as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Kurang dari 1 Tahun	3,228,860,000	2,560,820,000	Less than 1 Year
Antara 1 - 2 Tahun	--	668,040,000	Between 1 - 2 Years
Jumlah	3,228,860,000	3,228,860,000	Total
Dikurangi: Bunga	(167,833,399)	(167,833,399)	Less: Interest
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	3,061,026,601	3,061,026,601	Net Present Value
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	(3,061,026,601)	(2,401,148,238)	Less: Due in One Year Portion
Bagian Jangka Panjang	--	659,878,363	Long Term Portion

Liabilitas sewa tersebut didasarkan atas kontrak sewa berupa alat olah data antara Perusahaan dengan PT Berca Hardayaperkasa No.249/HK.02/020803/2017 tertanggal 7 Juni 2017. Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 6 Juni 2022.

The lease liability is based on the lease contract or data processing equipment between the Company and PT Berca Hardayaperkasa No.249/HK.02/020803/2017 dated June 7, 2017. The term of the agreement is until June 6, 2022.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Perusahaan mencatat beban bunga liabilitas sewa pada beban keuangan (Catatan 34) masing-masing sebesar Rp57.375.663 dan Rp110.223.671 pada 31 Desember 2021 and 2020.

The Company recorded interest expense of lease liabilities under financial expenses (Note 34) amounting to Rp57,375,663 and Rp110,223,671 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

22. Perpajakan

22. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2021 Rp	2020 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	91,527,933	72,327,933
Pasal 28A - 2021	1,950,512,699	--
Pasal 28A - 2020	6,046,500,743	6,046,500,743
Pasal 28A - 2019	--	2,519,234,925
Pajak Pertambahan Nilai	--	34,887,008,946
Sub Jumlah	<u>8,088,541,375</u>	<u>43,525,072,547</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	--	31,168,800
Pasal 28A - 2021	267,449,753	--
Pasal 28A - 2020	--	430,320,102
Pasal 28A - 2019	--	3,504,832,839
Pajak Pertambahan Nilai	145,627,909	4,077,847
Sub Jumlah	<u>413,077,662</u>	<u>3,970,399,588</u>
Jumlah	<u>8,501,619,037</u>	<u>47,495,472,135</u>

The Company
Income Tax:
Article 4(2)
Article 28A - 2021
Article 28A - 2020
Article 28A - 2019
Value Added Tax
Sub Total

Subsidiaries
Income Tax:
Article 4(2)
Article 28A - 2021
Article 28A - 2020
Article 28A - 2019
Value Added Tax
Sub Total

Total

Perusahaan mengajukan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp2.519.234.925 yang disetujui oleh KPP WP Besar Tiga sesuai Keputusan DJP Nomor KEP 00133.PPH/WPJ.19/KP.03/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikompensasikan untuk membayar Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 4 (2) masa Desember 2019.

The The Company submitted an Introduction for 2019 Tax Excess Return in the amount of Rp2,519,234,925 approved by KPP WP Besar Tiga in accordance with DGT Decree Number KEP-00133.PPH/WPJ.19/KP.03/2021 dated October 12, 2021 which is compensated to pay the December 2019 Tax Bill of Income Tax Article 4 (2).

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2021 Rp	2020 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	4,811,021,651	2,640,488,295
Pasal 21	8,264,288,261	4,425,953,261
Pasal 22	4,162,494,636	3,049,241,597
Pasal 23	3,536,759,543	2,749,939,844
Pajak Pertambahan Nilai	3,407,463,004	--
Sub Jumlah	<u>24,182,027,095</u>	<u>12,865,622,997</u>

The Company
Income Tax:
Article 4(2)
Article 21
Article 22
Article 23
Value Added Tax
Sub Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 4 (2)	--	145,804,221	Article 4(2)
Pasal 21	23,179,071	3,358,707	Article 21
Pasal 23	3,601,000	53,425,920	Article 23
Pasal 29	--	--	Article 29
Utang Hasil Pemeriksaan Pajak	--	4,930,788,082	Tax Audit Result Payable
Pajak Pertambahan Nilai	5,271,365,023	1,213,509,063	Value Added Tax
Sub Jumlah	5,298,145,094	6,346,885,993	Sub Total
Jumlah	29,480,172,189	19,212,508,990	Total

c. Manfaat (Beban) Pajak

c. Tax Benefit (Expenses)

	2021 Rp	2020 Rp	
Manfaat (Beban) Pajak			Tax Benefit (Expenses)
<u>Pajak Kini</u>			<u>Current Tax</u>
Perusahaan - Penyesuaian			The Company - Prior Year
Periode Lalu	--	(609,612,828)	Adjustment
<u>Pajak Tangguhan</u>			<u>Deferred Tax</u>
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Tahun Berjalan	(2,259,582,246)	19,906,320,582	Current Year
Penyesuaian Tarif	8,146,418,978	(23,160,403,960)	Rate Adjustment
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Tahun Berjalan	109,984,298	3,315,703,093	Current Year
Penyesuaian Tarif	--	(547,225,818)	Rate Adjustment
Jumlah	5,996,821,030	(1,095,218,931)	Total

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya komersial dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between loss before tax as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Rugi Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(115,421,224,907)	(157,338,994,627)	Loss Before Tax as Consolidated Statements of Comprehensive Income
Dikurang:			Less:
Pajak Final	7,008,749,310	3,244,871,512	Final Income Tax
Rugi Sebelum Pajak Entitas Anak	(1,188,879,140)	(29,771,560,118)	Loss Before Tax of Subsidiaries
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	(7,830,697,788)	(3,624,574,209)	Adjusted with Consolidated Elimination Journal
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	(113,410,397,289)	(127,187,731,812)	Loss Before Income Tax - The Company
Beda Waktu			Timing difference
Amortisasi Aset Tak Berwujud	3,031,996,276	(12,585,103,288)	Amortization of Intangible Assets
Pemulihan Penyisihan Piutang	(14,351,770,642)	(3,167,463,743)	Receivables Recovery
Beban Penurunan Nilai Piutang Lainnya	--	1,861,022,384	Impairment of Other Receivables Expenses
Beban Penurunan Nilai Persediaan	12,405,179,751	15,880,584,396	Impairment of Receivables Inventory
Beban Masa Garansi	(1,571,725,980)	(1,247,973,880)	Warranty Period Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap	136,816,243	53,937,076,596	Depreciation of Fixed Assets
Aset Hak Guna	1,265,775,611	1,162,363,184	Right of Use Assets
Imbalan Pasca Kerja	10,584,177,770	6,440,623,254	Post-Employee Benefits
Jumlah Beda Waktu	11,500,449,029	62,281,128,903	Total Timing Differences
Beda Tetap			Permanent Differences
Alokasi Beban atas Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	26,439,539,239	67,803,927,657	Allocation of Expense Upon Income Subject to Final Tax
Beban yang Tidak Dapat Dibiayakan	26,727,021,474	33,847,990,366	Non-Deductible Expenses
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	(235,023,137)	(208,635,931)	Interest Income and Giro
Pendapatan Sewa	(5,591,713,186)	(7,361,870,991)	Rental Revenue
Pendapatan Jasa Konstruksi	(2,829,860,228)	(70,427,513,446)	Revenue Construction Services
Jumlah Beda Tetap	44,509,964,162	23,653,897,655	Total Permanent Differences

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	
Rugi Fiskal Sebelum Kompensasi Rugi	(57,399,984,098)	(41,252,705,254)	Tax Loss Before Tax Loss Carried Forward
Rugi Fiskal Periode Sebelumnya:			
Rugi Fiskal 2019	(70,907,594,486)	(70,907,594,486)	
Rugi Fiskal 2020	(41,252,705,254)	--	
Akumulasi Rugi Fiskal	(169,560,283,837)	(112,160,299,740)	Tax loss
Beban Pajak Kini dengan Tarif Pajak yang Berlaku			Current Tax Expenses with Applicable Tax Rates
Dikurangi:			Less:
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka			Prepaid Income Tax
Pasal 22	288,358,140	3,108,484,645	Article 22
Pasal 23	1,632,866,243	2,690,216,858	Article 23
Pasal 25	29,288,316	247,799,240	Article 25
Pajak Penghasilan Lebih Bayar	1,950,512,699	6,046,500,743	Overpayment Income Tax

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk tahun pajak 2021. Namun demikian, taksiran penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2021.

As of the date of this financial report the Company has not submitted an Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the 2021 tax year. However, the estimated taxable income mentioned above is the basis for completing the 2021 Annual Corporate Income Tax Return.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, terdapat penurunan tarif pajak penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, serta 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

In accordance with the article 5 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 are State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in Framework for Dealing with Threats Harm National Economy and/or Financial System Stability into Laws, there is reduction of the taxable income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become 22% that applicable to the tax year 2020 and 2021, and 20% for 2022 and thereafter.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan laba rugi komersial dengan dasar pengenaan pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities according to the commercial consolidated statement of profit or loss and the tax bases. Deferred tax assets and liabilities are adjusted with the tax rates in effect in the period when the assets are realized and the liabilities are settled based on the tax rates that have been determined. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credit (Charge) to Profit or Loss	Penyesuaian Tarif Pajak ke Laporan Laba (Rugi)/ Tax Rate Adjustment to Profit of Loss	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged (Credit) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian Tarif Pajak ke Penghasilan Komprehensif/ Tax Rate Adjustment Comprehensive Income	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	The Company
Perusahaan							The Company
Penyisihan Piutang	46,372,410,288	(3,157,389,541)	4,637,241,028	--	--	47,852,261,775	Receivables Allowance
Penyisihan Persediaan	(3,194,338,343)	2,729,139,545	6,688,174,048	--	--	6,222,975,250	Inventories Allowance
Penyisihan Piutang Lain-lain	4,112,353,199	--	820,660,245	--	--	4,933,013,444	Other Receivables Allowance
Penyisihan Penyertaan Saham	10,911,101,225	--	1,091,110,122	--	--	12,002,211,347	Investments Allowance
Penyusutan Aset Tetap	10,332,122,366	30,099,573	1,033,212,237	--	--	11,395,434,176	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1,560,864,283)	667,039,181	(156,086,428)	--	--	(1,049,911,530)	Amortization of Intangible Assets
Amortisasi Masa Garansi	782,213,008	(345,779,716)	78,221,301	--	--	514,654,593	Amortization of Warranty Period
Aset Hak Guna	232,472,637	278,470,634	23,247,264	--	--	534,190,535	Right of Use Assets
Beban Manfaat Karyawan	29,128,230,924	2,328,519,109	2,367,327,230	(5,459,604,173)	545,495,862	28,909,968,952	Employee Benefits Expense
Rugi Fiskal	34,943,251,511	12,627,996,502	(10,267,985,569)	--	--	37,303,262,444	Fiscal Losses
Revaluasi Aset Tanah	(15,260,812,500)	--	1,831,297,500	--	--	(13,429,515,000)	Revaluation of Land Assets
	116,798,140,032	15,158,095,287	8,146,418,978	(5,459,604,173)	545,495,862	135,188,545,986	
Dikurangi: Cadangan Nilai	(65,140,085,497)	(17,417,677,533)	--	--	--	(82,557,763,030)	Less: Allowance Impairment
Subjumlah - Induk	51,658,054,535	(2,259,582,246)	8,146,418,978	(5,459,604,173)	545,495,862	52,630,782,956	Subtotal - Parent
Entitas Anak	8,128,532,558	109,984,298	--	--	--	8,238,516,856	Subsidiaries
Jumlah	59,786,587,093	(2,149,597,948)	8,146,418,978	(5,459,604,173)	545,495,862	60,869,299,812	Total

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credit (Charge) to Profit or Loss	Penyesuaian Tarif Pajak ke Laporan Laba (Rugi)/ Tax Rate Adjustment to Profit of Loss	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged (Credit) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian Tarif Pajak ke Penghasilan Komprehensif/ Tax Rate Adjustment Comprehensive Income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	The Company
Perusahaan							The Company
Penyisihan Piutang	58,757,378,796	(633,492,749)	(11,751,475,759)	--	--	46,372,410,288	Receivables Allowance
Penyisihan Persediaan	2,778,835,776	3,176,116,879	(9,149,290,998)	--	--	(3,194,338,343)	Inventories Allowance
Penyisihan Piutang Lain-lain	5,140,441,499	372,204,477	(1,400,292,777)	--	--	4,112,353,199	Other Receivables Allowance
Penyisihan Penyertaan Saham	3,248,732,359	--	7,662,368,866	--	--	10,911,101,225	Investments Allowance
Penyusutan Aset Tetap	(569,116,192)	10,787,415,319	113,823,239	--	--	10,332,122,366	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Tak Berwujud	1,195,195,469	(2,517,020,658)	(239,039,094)	--	--	(1,560,864,283)	Amortization of Intangible Assets
Amortisasi Masa Garansi	1,289,759,730	(249,594,776)	(257,951,946)	--	--	782,213,008	Amortization of Warranty Period
Aset Hak Guna	--	232,472,637	--	--	--	232,472,637	
Beban Manfaat Karyawan	27,981,434,568	1,288,124,651	(5,010,747,600)	5,454,958,618	(585,539,313)	29,128,230,924	Employee Benefits Expense
Rugi Fiskal	15,638,989,454	22,432,059,948	(3,127,797,891)	--	--	34,943,251,511	Fiscal Losses
Revaluasi Aset Tanah	(15,260,812,500)	--	--	--	--	(15,260,812,500)	Revaluation of Land Assets
Sub Jumlah	100,200,838,959	34,888,285,728	(23,160,403,960)	5,454,958,618	(585,539,313)	116,798,140,033	Sub Total
Dikurangi: Cadangan Nilai	(50,158,120,351)	(14,981,965,146)	--	--	--	(65,140,085,497)	Less: Allowance Impairment
Subjumlah - Induk	50,042,718,608	19,906,320,582	(23,160,403,960)	5,454,958,618	(585,539,313)	51,658,054,536	Subtotal - parent
Entitas Anak	5,360,055,283	3,315,703,093	(547,225,818)	--	--	8,128,532,558	Subsidiaries
Jumlah	55,402,773,890	23,222,023,675	(23,707,629,778)	5,454,958,618	(585,539,313)	59,786,587,094	Total

**e. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)**

Perusahaan

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai masa November 2020 dengan total sebesar Rp19.326.177.778. Perusahaan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 16 Februari 2021.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai masa Maret 2021 dengan total sebesar Rp12.908.731.205. Perusahaan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 18 Mei 2021.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2021 dengan total sebesar Rp1.916.828.045. Perusahaan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 16 November 2021.

**e. Tax Collection Letter and Tax Assessment
Letter**

The Company

In 2021, the Company received a Tax Refund for Value Added Tax of November 2020 totaling Rp19,326,177,778. The Company has received the restitution on February 16, 2021.

In 2021, the Company received a Tax Refund for Value Added Tax of March 2021 totaling Rp12,908,731,205. The Company has received the restitution on May 18, 2020.

In 2021, the Company received a Tax Refund for Value Added Tax of August 2021 totaling Rp1,916,828,045. The Company has received the restitution on November 16, 2021.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

23. Provisi Masa Pemeliharaan

Provisi masa pemeliharaan merupakan cadangan yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya biaya pemeliharaan selama masa garansi. Berdasarkan evaluasi manajemen, pada 31 Desember 2021 dan 2020 cadangan masa garansi ditetapkan sebesar maksimal 2% dari penjualan peralatan yaitu masing-masing sebesar Rp2.339.339.060 dan Rp3.911.065.040.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan tersebut cukup untuk mengantisipasi terjadinya klaim beban garansi dari para pelanggan.

23. Guarantees Period Provision

Guarantees period provision is a reserve that is used to anticipate maintenance costs during the warranty period. Based on management's evaluation, as of December 31, 2021 and 2020 the reserve guarantee period is set at a maximum of 2% of equipment sales each amounting to Rp2,339,339,060 and Rp3,911,065,040, respectively.

Management believes that these reserves are sufficient to anticipate the occurrence of claims for warranty expenses from customers.

24. Pendapatan Diterima di Muka

Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 35)

Pihak Ketiga/ *Third Parties*

Jumlah/ *Total*

Pendapatan diterima dimuka adalah uang muka penjualan yang telah diterima dari pelanggan.

Penyelesaian dan pengiriman barang atas kontrak tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 2022.

24. Unearned Revenues

2021 Rp	2020 Rp
18,175,877,612	16,254,267,910
14,676,405,566	13,027,096,327
32,852,283,178	29,281,364,237

Unearned revenue is sales advances received from customers.

The completion and delivery of goods for these contracts is expected to occur in 2022.

25. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan program pensiun imbalan pasti dan imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020. Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 109 dan 191 orang masing-masing pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, perhitungan imbalan kerja Grup dihitung oleh Indra Katarya Situmeang dan Enny Diah Awal, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

25. Employee Benefit Liabilities

Group provides defined benefit pension plan and post-employment benefits in accordance with the Omnibus Law No. 11/2020 for year 2021 and Labor Law No. 13/2003 for year 2020. Other post-employment and other long-term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to the benefit is 109 and 191 persons on December 31, 2021 and 2020, respectively.

As of December 31, 2021 and 2020, Group's employee benefits is calculated by Enny Diah Awal and Bestama Aktuaria, an independent actuary. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021	2020	
Asumsi Ekonomis			Economic Assumptions
Tingkat Diskonto	7.00%	7.00%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	6.00%	6.00%	Future Salary Increase
Asumsi Demografi			Demographic Assumptions
Pensiun	55 tahun/ years		Retirement
Mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia TMI-2019/ Indonesian Mortality Table TMI-2019		Mortality
Cacat	0,01% dari tabel mortalitas/ 0.01% of mortality table		Disability
Pengunduran Diri	2% usia/ age 18 - 54 tahun/ years		Resignation

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2021				
	Program Pesangon/ Pension Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Obligation	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,279	214,709,746,763	313,277,532,393
Nilai Wajar Aset Program/ Fair Value of Plan Assets	--	--	--	(181,868,582,610)	(181,868,582,610)
Jumlah/ Total	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,279	32,841,164,153	131,408,949,783

	2020				
	Program Pesangon/ Pension Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Obligation	78,727,063,702	239,731,375	13,606,454,885	220,913,706,180	313,486,956,142
Nilai Wajar Aset Program/ Fair Value of Plan Assets	--	--	--	(167,845,801,524)	(167,845,801,524)
Jumlah/ Total	78,727,063,702	239,731,375	13,606,454,885	53,067,904,656	145,641,154,618

Perusahaan menyelenggarakan program dana imbalan pasti untuk sebagian besar karyawan yang memenuhi persyaratan. Aset program Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun Inti dimana perhitungannya mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.KN.018/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Inti yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP13/NB.11/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Imbalan jangka panjang lain merupakan program penghargaan masa kerja karyawan.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, nilai aset program pada Dana Pensiun Inti sebesar Rp140.420.849.071 dan Rp167.845.801.524 memenuhi kriteria aset program secara akuntansi.

The Company has a defined reward plan for most of its employees who meet the requirements. The Company's program assets are managed by the Dana Pensiun Inti where the calculations refer to the Decree of the Company's Directors No.KN.018/2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Dana Pensiun Inti which was approved by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) through the Decree of the OJK Board of Commissioners No.KEP13/NB.11/2018 January 22, 2018.

Another long-term benefit is an employee service reward program.

As of December 31, 2021 and 2020, plan assets in Dana Pensiun Inti amounting to Rp140,420,849,071 and Rp167,845,801,524 meet the criteria of plan assets in accordance with accounting perspectives.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of plan assets were as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Nilai Wajar Aset Program/ <i>Beginning Balance of Fair Value of Plan Asset</i>	167,845,801,524	193,026,932,026
Koreksi Saldo Awal/ <i>Correction on Beginning Balance</i>	(1,573,693,603)	(1,573,693,603)
Bunga Diskonto/ <i>Discount Interest</i>	(4,880,588,148)	(2,653,766,197)
Kontribusi Karyawan/ <i>Contribution from Employee</i>	383,768,120	383,768,120
Pembayaran Imbalan Kerja/ <i>Benefit Paid</i>	(21,372,438,822)	(21,337,438,822)
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program/ <i>Ending Balance of Fair Value of Plan Assets</i>	140,402,849,071	167,845,801,524

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in long term employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

2021					
Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	78,727,063,702	239,731,376	13,606,454,884	53,067,904,656	145,641,154,618
Beban Diakui di Laba Rugi (Catatan 29, 30 dan 31)/ <i>Expense Recognized in Profit Loss (Notes 29, 30 and 31)</i>	7,023,299,919	(31,054,850)	1,265,672,642	4,904,041,338	13,161,959,049
Pembayaran Manfaat (Catatan 29, 30 dan 31)/ <i>Payment of Benefit (Notes 29, 30 and 31)</i>	(1,359,189,185)	--	--	(1,212,901,115)	(2,577,781,279)
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	443,972,389	--	(1,348,165,248)	(23,912,189,746)	(24,816,382,605)
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance at The End of Period</i>	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,278	32,846,855,133	131,408,949,783

2020					
Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	64,059,187,248	329,889,648	23,488,192,325	24,048,469,053	111,925,738,274
Beban Diakui di Laba Rugi (Catatan 29, 30 dan 31)/ <i>Expense Recognized in Profit Loss (Notes 29, 30 and 31)</i>	13,434,227,111	466,728	(8,688,189,126)	3,011,488,539	7,757,993,252
Pembayaran Manfaat (Catatan 29, 30 dan 31)/ <i>Payment of Benefit (Notes 29, 30 and 31)</i>	(704,535,530)	(90,625,000)	(522,209,468)	--	(1,317,369,998)
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	1,938,184,873	--	(671,338,847)	26,007,947,064	27,274,793,090
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance at The End of Period</i>	78,727,063,702	239,731,376	13,606,454,884	53,067,904,656	145,641,154,618

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit liabilities are as follows:

2021					
Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	78,727,063,702	239,731,375	13,606,454,885	220,913,706,180	313,486,956,142
Biaya Bunga/ <i>Interest Expense</i>	5,463,322,838	10,068,718	966,058,297	15,862,696,247	22,302,146,100
Biaya Jasa Kini/ <i>Current Service Cost</i>	1,559,977,081	56,576,747	299,614,345	1,001,646,814	2,917,814,987
Pembayaran Imbalan Kerja/ <i>Payment of Benefit</i>	(1,359,189,185)	--	--	(25,737,395,762)	(27,096,584,947)
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial/ <i>(Gain) Loss Actuary</i>	443,972,389	(97,700,314)	(1,348,165,248)	2,669,093,284	1,667,200,111
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance Period</i>	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,279	214,709,746,763	313,277,532,393

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2020				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal/ Beginning Balance	64,059,187,248	329,889,648	23,488,192,325	216,424,571,328	304,301,840,549
Biaya Bunga/ Interest Expense	4,976,562,478	21,559,186	1,799,728,721	15,843,200,598	22,641,050,983
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	1,847,524,098	126,303,311	907,106,948	1,608,413,505	4,489,347,862
Pembayaran Imbalan Kerja/ Payment of Benefit (Keuntungan) Kerugian Aktuaria/ (Gain) Loss Actuary	(704,535,530)	(90,625,001)	(522,209,468)	(21,337,438,822)	(22,654,808,821)
	1,938,184,873	1,863,459	(671,338,846)	8,374,959,571	9,643,669,057
Saldo pada Akhir Periode/ Ending Balance Period	78,727,063,702	239,731,375	13,606,454,885	220,913,706,180	313,486,956,142

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Component of long term employee benefit expense recognize in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	1,559,977,081	56,576,746	299,614,345	1,001,646,814	2,917,814,986
Biaya Jasa Lalu/ Past Service Cost	--	--	--	--	--
Biaya Bunga/ Interest Cost	5,463,322,838	10,068,718	966,058,297	4,033,160,754	10,472,610,607
Kontribusi Karyawan/ Contribution from the Employee	--	--	--	(130,766,230)	(130,766,230)
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	(97,700,314)	--	--	(97,700,314)
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi/ Expense for the Year Recognized in Profit Loss	7,023,299,919	(31,054,850)	1,265,672,642	4,904,041,338	13,161,959,049
Perubahan Asumsi/ Experience Adjustments	443,972,389	--	(1,348,165,248)	2,669,093,284	1,764,900,425
Perubahan atas Dampak atas Aset di Luar Bunga/ Changes in the Impact on Assets excluding Interest	--	--	--	677,818,926	677,818,926
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	--	--	(27,259,101,956)	(27,259,101,956)
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Amounts Recognized in Other Comprehensive Income	443,972,389	--	(1,348,165,248)	(23,912,189,746)	(24,816,382,605)

	2020				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	1,847,524,098	126,303,311	907,106,948	1,608,413,505	4,489,347,862
Biaya Bunga/ Interest Cost	6,610,140,535	(149,259,228)	(11,395,024,795)	--	(4,934,143,488)
Biaya Jasa Lalu/ Past Service Cost	4,976,562,478	21,559,186	1,799,728,721	1,786,843,154	(383,768,120)
Kontribusi Karyawan/ Contribution from the Employee	--	--	--	(383,768,120)	(383,768,120)
Perubahan atas Dampak atas Aset di Luar Bunga/ Changes in the Impact on Assets excluding Interest	--	7,308,936	--	--	7,308,936
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	(5,445,477)	--	--	(5,445,477)
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi/ Expense for the Year Recognized in Profit Loss	13,434,227,111	466,728	(8,688,189,126)	3,011,488,539	7,757,993,252
Penilaian Kembali Liabilitas (Keuntungan) Kerugian Aktuaria/ (Gain) Loss Actuary	882,061,409	--	190,201,634	1,613,015,367	2,685,278,410
Perubahan Asumsi/ Experience Adjustments	1,056,123,464	--	(861,540,481)	6,761,944,204	6,956,527,187
Perubahan atas Dampak atas Aset di Luar Bunga/ Changes in the Impact on Assets excluding Interest	--	--	--	(650,829,751)	(650,829,751)
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	--	--	18,283,817,244	18,283,817,244
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Amounts Recognized in Other Comprehensive Income	1,938,184,873	--	(671,338,847)	26,007,947,064	27,274,793,090

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits plan gives the Group exposure of interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah yang berlaku pada periode perhitungan. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefits obligation is calculated using the interest rate of government bond applicable at the time of calculation. A decreased in the bond interest rate will increased the plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu asumsi gaji kenaikan di masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the assumption of future salary increase of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible change of the respective assumption occur at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2021 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	2020 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto			Sensitivity Analysis of Discount Rate
Jika Tingkat + 1%	297,422,141,385	296,771,323,929	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	331,323,090,790	332,517,928,352	If Rate - 1%
	2021 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	2020 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji			Sensitivity Analysis of Salary Increase
Jika Tingkat + 1%	315,942,317,648	316,159,030,397	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	310,850,348,173	310,992,550,898	If Rate - 1%

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti adalah sebagai berikut:

Maturity Profile of the Defined Benefit Obligation are as follow:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:			Present Value of Benefits Expected to be Paid in:
- dibawah 1 tahun	265,168,865,531	31,302,396,528	Below 1 year
- 1 - 2 tahun	7,480,374,931	53,862,530,522	- 1 - 2 years
- 2 - 5 tahun	31,004,517,232	25,492,897,652	- 2 - 5 years
- diatas 5 tahun	9,623,774,698	68,061,557,090	Above 5 years

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

26. Modal Saham

Berdasarkan perubahan terakhir keputusan rapat Perusahaan dengan Akta No.40 tanggal 20 Oktober 2020, notaris Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0401202 tanggal 23 Oktober 2020, dijelaskan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 terbagi atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 999.999 lembar saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 35% atau sejumlah 350.000 lembar saham yang terbagi atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 349.999 lembar saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000, dengan komposisi sebagai berikut:

26. Share Capital

Based on the latest changes to the Deed of the Company's Decision Meeting No.40, dated October 20, 2020, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0401202 dated October 23, 2020, it was explained that the Company's authorized capital of Rp1,000,000,000,000 is divided into 1 series A Dwiwarna share and 999,999 series B shares with a normal value of Rp1,000,000 each. From which the subscribed and paid-up capital are 35% or 350,000 shares, consisting of 1 series A Dwiwarna share and 349,999 series B shares, have been issued and paid up with a total nominal value of Rp350,000,000,000, with the following composition:

Pemegang Saham/ Shareholders	31 Desember/ December 2021 dan/ and 2020		
	Lembar Saham/ Shares	Persentase/ Percentage	Nilai Modal Saham/ Value of Shares
Negara Republik Indonesia	350,000	100%	350,000,000,000
Jumlah/ Total	350,000	100%	350,000,000,000

27. Pendapatan

27. Revenues

	2021 Rp	2020 Rp	
Integrator Sistem	111,060,305,383	284,029,928,585	System Integrator
Jasa	151,906,336,902	85,206,919,964	Services
Perakitan	108,400,060,446	44,150,506,520	Assembly
Smart Device	364,714,091	13,833,396,783	Smart Device
Manage Service	--	26,135,000	Manage Services
Jumlah	371,731,416,822	427,246,886,852	Total

28. Beban Pokok Pendapatan

28. Cost of Revenues

	2021 Rp	2020 Rp	
Pemakaian Material	232,528,582,142	303,511,921,985	Usage of Material
Biaya Proyek	50,521,450,779	18,637,975,282	Project Cost
Pemeliharaan dan Perbaikan	15,436,575,400	17,588,863,432	Maintenance and Repairs
Umum	9,734,164,658	12,405,083,093	General
Material Tambahan	7,455,127,929	8,133,921,767	Additional Material
Personil	3,404,228,853	20,627,021,616	Personnel
Jasa Telekomunikasi	2,054,632,332	2,604,057,439	Telecommunication Service
Pengangkutan	1,804,666,932	2,860,754,829	Transportation
Produksi	1,032,593,500	4,173,662,621	Production
Perjalanan Dinas	974,222,697	1,508,754,859	Travel

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	603,751,615	1,663,499,656	Depreciation (Note 9)
Asuransi Produksi dan Proyek	394,075,782	1,263,740,326	Production and Project Insurance
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 13)	319,338,994	319,338,993	Amortization of Intangible Assets (Notes 13)
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	201,483,387	287,266,740	Depreciation of Right of Use Assets (Note 14)
Lainnya	32,439,757	3,793,341,299	Others
Jumlah	326,497,334,757	399,379,203,937	Total

29. Beban Penjualan

29. Selling Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Tenaga Kerja Tidak Langsung	15,439,406,587	10,919,836,068	Indirect Labor
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	5,080,405,330	3,137,739,534	Employee Benefit (Note 26)
Administrasi dan Rumah Tangga	1,009,682,003	708,556,077	Administration and Household
Perbaikan dan Pemeliharaan	451,456,812	336,515,696	Repair and Maintenance
Perjalanan Dinas	446,800,231	650,907,223	Travel
Beban Sewa	229,445,866	168,690,608	Rent Expense
Sertifikasi Produk	76,573,450	10,399,413	Product Certification
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	73,654,830	90,347,520	Depreciation of Right of Use Assets (Note 14)
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	69,877,279	61,243,340	Fixed Assets Depreciation (Note 9)
Uji Coba Lapangan	55,420,873	12,312,820	Field Trial
Kesejahteraan Pegawai	36,110,299	22,283,079	Employee Welfare
Beban Asuransi	11,020,231	20,477,044	Insurance Expense
Lainnya	3,502,900	2,900	Others
Jumlah	22,983,356,691	16,139,311,322	Total

30. Beban Umum dan Administrasi

30. General and Administrative Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Tenaga Kerja Tidak Langsung	44,417,842,555	39,411,427,294	Indirect Labor
Pemeliharaan dan Perbaikan	3,416,494,909	6,479,562,000	Maintenance and Repairs
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	3,069,411,553	1,899,158,139	Employee Benefit (Note 26)
Administrasi dan Rumah Tangga	2,922,637,189	5,062,808,443	Administration and Household
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	2,229,799,357	1,285,974,487	Depreciation of Fixed Assets (Note 9)
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 13)	1,549,625,201	998,468,105	Amortization of Intangible Assets (Note 13)
Asuransi	1,206,784,477	500,479,478	Insurance
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	967,119,233	853,896,201	Depreciation of Right of Use Assets (Note 14)
Administrasi Bank	691,916,658	471,202,122	Bank Administration
Konsultan	599,445,455	2,536,905,818	Consultant
Sewa	541,082,688	841,455,775	Rent
Perjalanan Dinas	312,497,665	330,103,778	Travel
Kesejahteraan Pegawai	295,415,757	330,937,278	Employee Welfare
Seminar dan Pelatihan	171,871,709	159,661,510	Workshop and Training
Kehumasan	133,347,900	169,549,967	Public Relation
Sertifikasi	107,061,000	259,579,500	Certificate
Sumbangan	94,022,079	106,885,717	Donation
Alat Kerja	66,780,695	25,220,078	Work Equipment
Pengurusan dan Perijinan	28,993,000	35,045,000	Arrangement and Licensing
Penyusutan Properti Investasi (Catatan 12)	24,322,651	19,280,377	Depreciation of Investment Properties (Note 12)
Pengangkutan	14,740,000	134,700,000	Transportation
Jumlah	62,861,211,731	61,912,301,067	Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

31. Beban Pengembangan

31. Development Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Tenaga Kerja Tidak Langsung	3,890,314,920	4,572,436,263	Indirect Labor
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	2,434,360,887	1,403,725,581	Employee Benefit (Note 26)
Administrasi dan Rumah Tangga	152,923,762	275,745,221	Administration and Household
Pemeliharaan dan Perbaikan	129,717,867	245,223,973	Maintenance and Repairs
Sertifikasi	12,371,134	21,804,639	Certification
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	23,518,162	34,265,150	Depreciation of Right of Use Assets (Note 14)
Kesejahteraan Pegawai	2,800,000	7,850,000	Employee Welfare
Jumlah	6,646,006,732	6,561,050,827	Total

32. Pendapatan Lain-Lain

32. Other Income

	2021 Rp	2020 Rp	
Pemulihan Nilai Piutang Usaha (Catatan 5)	14,353,486,642	3,211,182,440	Recovery of Account Receivable (Note 5)
Optimalisasi Aset	5,430,458,386	6,336,194,091	Asset Optimization
Selisih Pembayaran Utang Piutang	2,109,392,488	5,716,692,618	Difference in Payment of Payable and Receivable
Denda dan Diskon	634,004,594	263,960,672	Penalty and Discounts
Bunga Jasa Giro	264,795,594	226,960,292	Giro Interest
Laba Penjualan Aset Tetap (Catatan 9)	40,906,021	8,000,000	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 9)
Pemulihan Nilai Piutang Lain-lain (Catatan 6)	--	1,861,022,384	Recovery of Other Receivables (Note 6)
Laba Selisih Kurs	--	119,528,033	Gain on Foreign Exchange
Penjualan Persediaan Usang (Catatan 15)	--	806,014,880	Sales of Deadstock (Note 15)
Penjualan Aset Tetap Non Operasi (Catatan 15)	--	725,690,910	Sales of Non Operating Fixed Assets (Note 15)
Lainnya	1,972,684,097	3,818,209,859	Others
Jumlah	24,805,727,822	23,093,456,179	Total

33. Beban Lain-Lain

33. Other Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pajak	14,521,550,478	5,023,090,711	Tax Expense
Penurunan Nilai Persediaan (Catatan 7)	12,405,179,751	--	Impairment of Inventories (Note 7)
Denda Keterlambatan	4,567,869,311	7,588,821,875	Late Penalty
Rugi Selisih Kurs	152,823,106	--	Bank Administration Expense
Penurunan Nilai Persediaan Usang (Catatan 15)	--	15,971,204,724	Impairment of Obsolete Inventories (Note 15)
Penurunan Nilai Piutang Lainnya (Catatan 6)	--	11,861,022,384	Impairment of Other Receivables (Note 6)
Penurunan Nilai Investasi (Catatan 10)	--	6,813,502,678	Impairment of Investment (Note 10)
Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 5)	--	2,713,905,243	Impairment of Account Receivables (Note 5)
Lainnya	2,241,156,472	6,293,770,513	Others
Jumlah	33,888,579,118	56,265,318,128	Total

34. Beban Keuangan

34. Financial Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pendanaan	52,015,755,549	63,459,699,810	Finance Expense
Beban Bunga Liabilitas Sewa (Catatan 21)	57,375,663	110,223,671	Interest Expense of Lease Liability (Note 21)
Jumlah	52,073,131,212	63,569,923,481	Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

35. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

35. Related Parties Transactions

a. Sifat Pihak Berelasi

a. Nature of Related Parties

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ The Nature of the Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia ("Pemerintah")	Pemegang Saham Akhir/ Ultimate Shareholder	Modal Saham/ Share Capital
PT Inti Krida Eka Jasa	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ Have Control or the Same Controlling	Piutang Lain-lain dan Pendapatan Diterima Dimuka/ Other Receivables and Unearned Revenue
PT Widya Bhakti Inti	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ Have Control or the Same Controlling	Utang Usaha/ Account Payables
PT Inti Bumi Perkasa	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ Have Control or the Same Controlling	Utang Usaha/ Account Payables
PT Mitra Graha Inti Utama	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ Have Control or the Same Controlling	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ Account Receivables, Other Receivables, and Account Payables
PT Inti Global Optical Communication	Entitas Asosiasi/ Associates	Piutang Lain-lain, Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Lain-lain/ Other Receivables, Account Payables Unearned Revenue, and Other Payables
PT Mitrabhakti Inti Perdana	Entitas Asosiasi/ Associates	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ Account Receivables, Other Receivables and Account Payables
Koperasi Inti	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ Have the same key Management Member as the Company/	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, dan Utang Usaha/ Account Receivables, Other Receivables, and Account Payables
Dana Pensiun Inti	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ Have the same key Management Member as the Company/	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha Other Receivables and Account Payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Kas dan Bank, Piutang Usaha, Utang Bank, Utang Bunga Bank, dan Pendapatan Diterima Dimuka/ Cash on Hand and in Banks, Account Receivables, Bank Loans, Accrued Interest Payables, and Unearned Revenue
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Kas dan Bank, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Bank, dan Pendapatan Diterima Dimuka/ Cash on Hand and in Banks, Account Receivables, Other Receivables, Bank Loans, and Unearned Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Kas dan Bank, Utang Bank, Utang Bunga Bank, dan Pendapatan Diterima Dimuka/ Cash on Hand and in Banks, Bank Loans, Accrued Interest Payables, and Unearned Revenue
PT Pindad (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan Diterima Di Muka/ Account Receivables Account Payables and Unearned Revenues
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Piutang Usaha/ Account Receivable
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Piutang Usaha, Utang Usaha, dan Pendapatan Diterima Dimuka/ Account Receivables, Account Payables, and Unearned Revenue
BP3TI Kominfo	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Utang Lain-lain/ Other Payables
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Entities Related with Government	Piutang Usaha/ Account Receivables
LPKL Perusahaan Daerah Air Minum	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/	Utang Usaha/ Account Payables

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ The Nature of the Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
	<i>Entities Related with Government</i>	
Perum LPPNPI - Airnav Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Bank BRI Syariah Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Bank dan Utang Bank/ <i>Cash on Hand and in Bank and Bank Loans</i>
PT Dayamitra Telekomunikasi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Indah Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Infomedia Solusi Humanika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Lain-lain/ <i>Other Receivables</i>
PT Jasaraharja Putera (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Administrasi Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Infomedia Solusi Humanika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Lain-lain/ <i>Other Receivables</i>
SBU DDS PT INTI	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ <i>Have the same key Management Member as the Company/</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Sucofindo (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Telekomunikasi Selular	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan Diterima Dimuka/ <i>Account Receivables and Unearned Revenue</i>
PT Virama Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Indah Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Len Industri (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan Diterima Dimuka/ <i>Unearned Revenue</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Bank/ <i>Cash on Hand and In Banks</i>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

	2021 Rp	2020 Rp	Persentase Terhadap Total Aset (Liabilitas)/ Percentage of Total Assets (Liabilities) %	%
Kas dan Bank/ Cash on Hand and in Banks (Catatan/ Note 4)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,351,349,696	68,565,973,221	1.523	5.545
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18,226,274,130	16,245,630,799	1.513	1.314
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	844,315,712	2,788,267,903	0.070	0.225
PT Bank BRI Syariah Tbk	5,801,520	1,138,053	0.000	0.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,000,000	--	0.000	0.000
Jumlah/ Total	37,428,741,058	87,601,009,976	3.107	7.084
Piutang Usaha/ Account Receivables (Catatan/ Note 5)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	84,966,461,420	9,649,599,749	7.053	0.697
PT Telkom Akses	5,520,303,440	9,376,804,500	0.458	0.677
PT Mitrahakti Inti Perdana	2,273,040,000	3,184,050,100	0.189	0.230
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,661,360,424	5,234,801,091	0.138	0.378
Perum LPPNPI - Airnav Indonesia	764,831,999	113,226,050	0.063	0.008
PT Pindad (Persero)	470,975,000	587,195,872	0.039	0.042
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	401,185,500	1,215,713,636	0.033	0.088
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	292,727,273	--	0.024	--
PT Mitra Graha Inti Utama	100,000,000	100,000,000	0.008	0.007
PT Telekomunikasi Selular	65,720,741	35,976,375	0.005	0.003
PT Virama Karya (Persero)	9,233,400	9,233,400	0.001	0.001
PT Angkasa Pura II (Persero)	8,500,000	--	0.001	--
PT Administrasi Medika	8,460,000	--	0.001	--
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM	--	801,466,125	--	0.058
PT Dayamitra Telekomunikasi	--	678,837,500	--	0.049
Koperasi Inti	--	177,369,500	--	0.013
Jumlah	96,542,799,197	31,171,773,898	8.013	2.250
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Less: Allowance for Impairment Losses	(4,256,119,041)	(4,256,119,041)	(0.353)	(0.307)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	92,286,680,156	26,915,654,857	7.660	1.943
Piutang Lain-lain/ Other Receivable (Catatan/ Note 6)				
PT Inti Global Optical Communication	452,892,571	370,320,000	0.037	0.030
PT Infomedia Solusi Humanika	492,259,680	492,259,680	0.040	0.040
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	144,000,000	144,000,000	0.012	0.012
Dana Pensiun Inti	65,834,175	42,796,874	0.005	0.003
Koperasi Inti	8,834,760	8,834,760	0.001	0.001
PT Inti Krida Eka Jasa	6,435,000	6,435,000	0.001	0.001
PT Mitra Graha Inti Utama	15,853,200	--	0.001	--
PT Mitrahakti Inti Perdana	--	752,900,000	--	0.061
Jumlah - Bersih/ Total - Net	1,186,109,386	1,817,546,314	0.096	0.147
Utang Usaha/ Account Payables (Catatan/ Note 16)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	146,852,888,271	146,883,850,974	8.710	8.711
PT Inti Global Optical Communication	15,502,121,220	25,570,455,780	0.919	1.517
PT Widya Bhakti Inti	9,505,878,556	9,663,116,816	0.564	0.573
Koperasi INTI	6,933,718,416	6,744,990,965	0.411	0.400
PT Inti Bumi Perkasa	5,755,502,152	7,279,996,880	0.341	0.432
PT Pos Logistik Indonesia	2,701,001,291	2,749,419,154	0.160	0.163
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2,480,000,000	2,584,000,000	0.147	0.153
PT Mitrahakti Inti Perdana	1,355,403,025	1,199,489,958	0.080	0.071
SBU DDS PT INTI	1,306,208,306	--	--	--
PT Mitra Graha Inti Utama	878,957,453	950,735,349	0.052	0.056
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	588,000,000	588,000,000	0.035	0.035
PT Pindad (Persero)	382,791,443	405,541,846	0.023	0.024
PT Surveyor Indonesia (Persero)	240,517,750	240,517,750	0.014	0.014
PT Indah Karya (Persero)	176,425,000	176,425,000	0.010	0.010
PT Sucofindo (Persero)	100,345,000	1,750,000	0.006	0.000
PT Jasaraharja Putera (Persero)	97,711,888	97,711,888	0.006	0.006
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	39,004,276	39,004,276	0.002	0.002
PT Len Industri (Persero)	28,779,300	--	--	--
LPKL Perusahaan Daerah Air Minum	10,040,000	10,040,000	0.001	0.001
PT Pos Indonesia (Persero)	1,811,618	1,811,618	0.000	0.000
PT Indonesia Comnets Plus	1,096,000	--	0.000	--
Dana Pensiun Inti	--	11,674,136,942	--	0.692
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	18,984,800	--	0.001
Jumlah - Bersih/ Total - Net	194,938,200,965	216,879,979,996	11.48	12.86

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	Persentase Terhadap Total Aset (Liabilitas)/ Percentage of Total Assets (Liabilities) %	%
Utang Bank/ Bank Loans (Catatan/ Note 19)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	561,868,050,325	561,735,460,365	32.222	33.316
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	276,788,821,001	276,788,821,000	15.873	16.416
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19,764,553,818	17,472,305,439	1.133	1.036
PT BRI Syariah Tbk	3,070,068,181	3,077,487,194	0.176	0.183
Jumlah - Bersih/ Total - Net	861,491,493,325	859,074,073,998	49.404	50.950
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Payable (Catatan/ Note 19)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	74,943,126,246	45,681,915,140	4.445	2.709
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,589,997,170	22,764,963,649	2.051	1.350
Jumlah - Bersih/ Total - Net	109,533,123,416	68,446,878,789	6.496	4.059
Utang Lain-lain/ Other Payable (Catatan/ Note 17)				
PT Inti Global Optical Communication	712,487,505	712,487,505	0.041	0.042
BP3TI Kominfo	--	86,020,000	--	0.005
Jumlah - Bersih/ Total - Net	712,487,505	798,507,505	0.041	0.047
Pendapatan Diterima Dimuka/ Unearned Revenues (Catatan/ Note 24)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	16,837,501,499	13,364,630,516	0.999	0.793
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1,309,876,113	1,934,065,590	0.078	0.115
PT Pindad (Persero)	28,500,000	--	0.002	--
PT Telekomunikasi Selular	--	250,000,000	--	0.015
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	246,125,000	--	0.015
PT Inti Global Optical Communication	--	225,596,804	--	0.013
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	188,000,000	--	0.011
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	40,000,000	--	0.002
PT Inti Krida Eka Jasa	--	5,850,000	--	0.000
Jumlah - Bersih/ Total - Net	18,175,877,612	16,254,267,910	1.078	0.964

36. Perikatan

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)

- Berdasarkan kontrak No. K.TEL.005482/HK.810/OPS-10060000/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perusahaan melakukan kerjasama pengadaan jasa *Refurbished Network Terminal Equipment* Indihome Segmen Consumer tahap-3 dengan Telkom senilai Rp11.664.650.000 belum termasuk PPN. Kontrak tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian dengan Telkom nomor K.TEL.002564/HK.810/OPS-10000000/2021 dalam rangka pengadaan dan pemasangan *Outside Plan Fiber Optic (OSP-FO) "Node-B"* Wilayah Usaha Telekomunikasi Riau Daratan dan Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp110.401.504.574 belum termasuk PPN.

36. Agreements

PT Telekom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)

- Based on contract No. K.TEL.005482/HK.810/OPS-10060000/2021 dated August 31, 2021, the Company entered into a partnership for the procurement of *Refurbished Network Terminal Equipment* Indihome for the Consumer Segment phase-3 with Telkom for Rp. 11,664,650,000, excluding VAT. The contract is valid until December 31, 2021.
- On May 19, 2021, the Company signed an Agreement with Telkom no. K.TEL.002564/HK.810/OPS-10000000/2021 for the procurement and installation of *Outside Plan Fiber Optic (OSP-FO) "Node-B"* Telecommunications Business Areas Riau Mainland and Palembang with a contract value of Rp110,401,504,574 excluding VAT.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(BRI)**

Pada tanggal 9 November 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian dengan BRI dalam rangka Pengadaan dan pengiriman *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk unit kerja BRI sebanyak 423 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp11.759.400.000 sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(BRI)**

On November 9, 2021, the Company signed an Agreement with BRI for the procurement and delivery of *Uninterruptible Power Supply* (UPS) for 423 BRI work units with a contract value of Rp11,759,400,000 including VAT and applicable taxes.

37. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

37. Assets and Liabilities in Foreign Currencies

	2021		2020		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Mata Uang Rupiah/ IDR	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Mata Uang Rupiah/ IDR	
Aset					Asset
Kas dan Bank					Cash on Hand and in Banks
Dolar Amerika Serikat	5,673.90	80,960,935	5,730.92	80,834,684	United States Dollar
Liabilitas					Liabilities
Utang Usaha					Account Payables
Dolar Amerika Serikat	222,340.88	3,172,584,243	1,186,350.60	16,733,481,209	United States Dollar
Jumlah - Net Liabilitas		(3,091,623,308)		(16,652,646,525)	Total - Net Liabilities

38. Manajemen Risiko Keuangan dan Modal

38. Financial and Capital Risks Managements

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Grup telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi

a. Financial Risk Management Policy

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk. The Group define those risks as follows:

- Credit risk is possibility that a customer will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Group will incur loss.
- Liquidity risk is the risk of the Group's inability to pay its liabilities at maturity. Currently, the Group expects to pay all liabilities at due date.
- Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

To manage these risks effectively, the Group's Directors have approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Group's overall objectives, a financial risk management program that focuses on minimizing potential losses that adversely affect

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko likuiditas Grup selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai. Manajemen juga melakukan perencanaan setiap bulan dan pemantauan yang ketat terhadap realisasi serta saldo kas secara rutin; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya dan uang jaminan. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

the Group's financial performance. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Group.

The main guidelines for this policy are as follows:

- *In managing liquidity risk, the Group always maintains and provides adequate amounts of cash and cash equivalents. Management also conducts monthly planning and close monitoring of cash realization and balances on a regular basis; and*
- *All financial risk management activities are carried out prudently, consistently and in accordance with best market practices.*

i. Credit Risk

The Group's credit risk is inherent in cash and cash equivalents, trade receivables, other current financial assets, other non current financial assets and security deposits. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy. The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risks. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	2021 Rp	2020 Rp	
Kas dan Bank	37,861,408,548	88,012,269,800	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	103,056,000,357	31,475,261,545	Account Receivables
Piutang Lainnya	2,810,415,998	3,456,437,426	Other Receivables
Jumlah	143,727,824,903	122,943,968,771	Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

ii. Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan bank (Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

ii. Liquidity Risk

Currently, the Group expect able to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash on hand and in bank equivalents (Note 4) which are sufficient to meet liquidity requirements.

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

	31 Desember/ December 31, 2021			
	< 1 Tahun/ Years Rp	1-5 Tahun/ Years Rp	> 5 Tahun/ Years Rp	Total Rp
Utang Usaha/ Account Payables	345,066,889,497	--	--	345,066,889,497
Beban Akrua/ Accrued Expenses	163,052,241,906	--	--	163,052,241,906
Utang Bank/ Bank Loan	42,930,924,218	818,560,569,107	--	861,491,493,325
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	3,061,026,601	--	--	3,061,026,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loan	7,779,984,007	--	--	7,779,984,007
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Payables	--	--	109,533,123,416	109,533,123,416
Utang Lain-lain/ Other Payables	57,688,205,963	--	--	57,688,205,963
Jumlah	619,579,272,192	818,560,569,107	109,533,123,416	1,547,672,964,715

	31 Desember/ December 31, 2020			
	< 1 Tahun/ Years Rp	1-5 Tahun/ Years Rp	> 5 Tahun/ Years Rp	Total Rp
Utang Usaha/ Account Payables	420,153,063,665	--	--	420,153,063,665
Beban Akrua/ Accrued Expenses	69,095,363,668	--	--	69,095,363,668
Utang Bank/ Bank Loans	15,513,360,717	228,991,117,555	614,569,595,726	859,074,073,998
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	2,401,148,238	659,878,363	--	3,061,026,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loans	5,269,741,043	--	--	5,269,741,043
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Payables	--	--	68,446,878,789	68,446,878,789
Utang Lain-lain/ Other Payables	62,957,795,831	--	--	62,957,795,831
Jumlah	638,348,268,993	229,650,995,918	683,016,474,515	1,488,057,943,595

iii. Risiko Mata Uang

Grup secara signifikan terekspos risiko mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) karena sebagian besar pembelian material dalam mata uang USD. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

iii. Currency Risk

The Group is significantly exposed to currency risk in United States Dollars (USD) due to the majority of material purchases denominated in USD. There was no currency hedging activity as of December 31, 2021 and 2020.

The Group manages its exposure to foreign currencies by periodically monitoring movements in foreign currency exchange rates so that it can take necessary actions.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan jenis mata uang disajikan pada Catatan 37.

Asset and liabilities in foreign currency as of December 31, 2021 dan 2020 by currency represented in Note 37.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The following table shows the sensitivity of possible changes in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies with other variable assumptions, the impact on profit before tax expense is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Dampak Terhadap Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Impact on Profit Before Income Tax Expense		
Kenaikan/ Increase (1%)	(32,535,452)	(168,143,159)
Penurunan/ Decrease (-1%)	32,535,452	168,143,159

b. Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp
Aset Keuangan/ Financial Assets				
Kas dan Bank/ Cash on Hand and in Banks	37,861,408,548	37,861,408,548	88,012,269,800	88,012,269,800
Piutang Usaha/ Account Receivables	103,056,000,357	103,056,000,357	31,475,261,545	31,475,261,545
Piutang Lain-lain/ Other Receivables	2,810,415,998	2,810,415,998	3,456,437,426	3,456,437,426
Jumlah/ Total	143,727,824,903	143,727,824,903	122,943,968,771	122,943,968,771
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities				
Utang Usaha/ Account Payables	345,066,889,497	345,066,889,497	420,153,063,665	420,153,063,665
Beban Akrua/ Accrued Expenses	163,052,241,906	163,052,241,906	69,095,363,668	69,095,363,668
Utang Bank/ Bank Loans	861,491,493,325	861,491,493,325	859,074,073,998	859,074,073,998
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	3,061,026,601	3,061,026,601	3,061,026,601	3,061,026,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loans	7,779,984,007	7,779,984,007	5,269,741,043	5,269,741,043
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Payables	109,533,123,416	109,533,123,416	68,446,878,789	68,446,878,789
Utang Lain-lain/ Other Payables	57,688,205,963	57,688,205,963	62,957,795,831	62,957,795,831
Jumlah/ Total	1,547,672,964,715	1,547,672,964,715	1,488,057,943,595	1,488,057,943,595

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk

c. Capital Management

The Group's objective when managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, so the entity can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. In order to manage the capital

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

structure, the Group may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase / decrease the amount of debt.

39. Rekonsiliasi Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

39. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Liabilities

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below detail changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
		Penambahan/ Additional Rp	Pembayaran/ Payment Rp			
Utang Bank	859,074,073,998	460,843,320	(500,762,334)	2,457,338,341	861,491,493,325	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	5,269,741,043	4,355,000,000	(1,885,467,886)	40,710,850	7,779,984,007	Financial Institutions Loan Non-Bank
Liabilitas Sewa	3,061,026,601	--	--	--	3,061,026,601	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	867,404,841,642	4,815,843,320	(2,386,230,220)	2,498,049,191	872,332,503,933	Total Liabilities from Financing Activities

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
		Penambahan/ Additional Rp	Pembayaran/ Payment Rp			
Utang Bank	847,292,996,613	25,611,795,852	(13,830,718,467)	--	859,074,073,998	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	28,470,650,668	--	(23,200,909,625)	--	5,269,741,043	Financial Institutions Loan Non-Bank
Liabilitas Sewa	--	--	(103,412,427)	3,164,439,028	3,061,026,601	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	875,763,647,281	25,611,795,852	(37,135,040,519)	3,164,439,028	867,404,841,642	Total Liabilities from Financing Activities

Transaksi Non Kas

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Non Cash Transaction

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities:

	2021 Rp	2020 Rp	
Penambahan Aset Tetap dari Utang Lainnya	--	447,185,230	Increase Fixed Assets from Other Payables
Penambahan Aset Tetap dari Utang Usaha	314,000,000	--	Increase Fixed Assets from Account Payables
Pembelian Aset Takberwujud dari Utang Lainnya	1,361,676,659	1,084,016,703	Purchase of Intangible Assets from Other Payables
Penambahan Utang Bank melalui Bunga	2,457,338,341	--	Increase in Bank Loan through Interest
Penambahan Utang Non-Bank melalui Bunga	40,710,850	--	Increase in Non-Bank Loan through Interest

40. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan dari Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Dalam tahun buku 2021 Grup mengalami rugi sebesar Rp109.424.403.877 dan mencatat kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp89.522.129.583. Hal ini menyebabkan defisiensi modal per tanggal 31 Desember 2021 meningkat menjadi Rp538.998.957.234. Untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, Grup telah mempersiapkan rencana usaha untuk tahun-tahun mendatang. Manajemen Grup telah menyusun rencana sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan proyek konstruksi maupun kantor;
2. Menginisiasi 6 (enam) skema bisnis dengan memaksimalkan potensi sinergi BUMN, antara lain dengan PT Pindad dan PT Telkom, yang diharapkan dapat mendorong bisnis Grup dengan skema-skema kerjasama yang bersifat *recurring*;
3. Memfokuskan pada penyelesaian utang usaha, utang lainnya yang didalamnya termasuk utang kepada karyawan, dan utang kepada lembaga keuangan non-bank yang totalnya sebesar Rp410.535.079.467 (Catatan 16, 17, dan 20);
4. Utang bank dan utang bunga masing-masing senilai Rp861.491.493.325 (Catatan 19.a) dan Rp109.533.123.416 (Catatan 19.b) diselesaikan melalui proses restrukturisasi yang sudah berjalan, dengan sumber dana dari rencana bisnis Grup. Sedangkan utang kepada vendor akan diselesaikan melalui dua strategi penyelesaian, untuk utang non Telkom akan diselesaikan dengan sumber dana dari dana talangan, piutang, penjualan ATNO, sumber yang sama untuk menyelesaikan utang pada karyawan, lembaga keuangan non-bank. Sementara utang vendor kepada PT Telkom sebesar Rp146.852.888.271 akan diselesaikan melalui *debt equity swap*.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut di atas dan dukungan yang terus menerus dari pemegang saham dapat secara efektif meningkatkan kinerjanya dan Grup dapat terus berkembang serta beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dengan masa mendatang.

40. Going Concern

The consolidated financial statements have been prepared assuming the Company has the ability to sustain business as a going concern.

In year 2020 the Group incurred a loss of Rp109,424,403,877 and recorded a comprehensive loss for the year amounting to Rp89,522,129,583. This causing the capital deficiency as of December 31, 2021 increased to become Rp538,998,957,234. To sustain the Group going concern, the Group has prepared business plan for the coming years. The Group's Management set up plans as follows:

- 1. Adoption of strict health protocols, in both construction project and office environments;*
- 2. Initiating 6 (six) business schemes by maximizing the synergy potential of SOEs, including with PT Pindad and PT Telkom, which is expected to boost the Group's business with recurring cooperation schemes;*
- 3. Focusing on the settlement of trade payables, other debts which include debts to employees, and debt to non-bank financial institutions amounting to Rp410,535,079,467 (Notes 16, 17, and 20);*
- 4. Bank's loans and interest loan of Rp861,491,493,325 (Note 19.a) and Rp109,533,123,416 (Note 19.b), respectively, will be settled through the ongoing restructuring process, with the source of funds from the Group's business plan. Meanwhile, payable to vendors will be settled through two settlement strategies, non-Telkom debt will be settled with sources of funds from bailout funds, receivables, ATNO sales, the same source to settle debts to employees, non-bank financial institutions, while vendor payables to PT Telkom amounting to Rp146,852,888,271 will be settled through debt equity swap.*

Management believes that the above steps and continuous support from the shareholders can effectively improve the performance and the Group can continue to grow its business and operates in the future on going concern basis.

41. Peristiwa Penting Lainnya dan Kontinjensi

a. Penilaian Wabah Virus Corona

Pada awal tahun 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun pada bulan Juni 2021 terjadi lonjakan kasus Covid 19 dengan varian Delta yang mengakibatkan diterbitkan aturan pembatasan mobilitas di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Manajemen Grup menyatakan bahwa per tanggal posisi keuangan Grup mengalami dampak pada aspek keuangan dikarenakan Perusahaan memiliki utang usaha dalam bentuk mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun kedepan. Grup mengalami dampak yang cukup signifikan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan yang mencakup:

1. Kegagalan perolehan kontrak yang diakibatkan oleh penundaan/pembatalan dari pihak pelanggan;
2. Penurunan pendapatan akibat dari aktivitas implementasi yang terhambat;
3. Mundurnya penyelesaian kontrak diakibatkan aktivitas impor yang terganggu; dan
4. Perusahaan kehilangan beberapa kesempatan di proyek-proyek besar seperti *E-Voting*, PLTS, dan Konkrit, terutama proyek yang berasal dari dana APBN mengalami penundaan dan bahkan hingga pembatalan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut diatas, Manajemen Grup telah menyusun langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan ulang Target Kontrak dan Penjualan disesuaikan dengan *opportunity* untuk perusahaan setelah Covid-19;
2. Fokus pada segmen dan portofolio, meningkatkan produktivitas dan kontribusi margin, ketidakpastian/risiko kecil, pengelolaan biaya dan penyelesaian restrukturisasi utang;

41. Other Significant Events and Contingencies

a. *Corona Virus Outbreak Assessment*

In early 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Decree No. 14 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. However, in June 2021 there was a rise in Covid-19 cases with the Delta variant which resulted in the issuance of mobility restrictions in various area in Indonesia. This led to a decline in the domestic economy, which was marked by, among other things, the weakening of the rupiah exchange rate and the decline in the process of securities in the capital market.

The Group's management stated that the financial position of the Group had an impact on the financial aspect because the Company had trade payables in foreign currency (United States Dollar) which would mature in the next 1 year. The Group's business has experienced significant impacts up to the date of issuance of the financial statements which include:

- 1. Failure to obtain contracts due to delays/ cancellations on the part of the customer;*
- 2. Decreased in income due to hampered implementation activities;*
- 3. Delay in contract settlement caused by disrupted import activities; and*
- 4. The Company lost several opportunities in big projects such as E-Voting, PLTS and Konkrit, especially projects originating from APBN funds which experienced delays and even up to cancellation.*

In dealing with the aforementioned conditions, Group Management has formulated steps to deal with these problems, among others, are as follows:

- 1. Rearrange Contract and Sales Targets according to opportunities for companies after Covid-19;*
- 2. Focus on segments and portfolios, increasing productivity and contributing margin, low uncertainty/risk, cost management and debt restructuring settlement;*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

3. Melakukan efisiensi biaya usaha yang ditargetkan hingga sebesar 16,24% penurunan biaya variabel dengan cara <i>multi-sourcing</i> dan kontrol yang ketat atas pengerjaan proyek; dan 4. Memaksimalkan pendapatan dari perolehan <i>cash-in</i> atas optimalisasi aset perusahaan. b. Perusahaan merupakan Tergugat 1 dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tan Heng Lok melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara No.561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 16 September 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Perusahaan digugat terkait penyelesaian utang. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan.	3. Performing targeted business cost efficiency of up to 16.24% reduction in variable costs by means of multi-sourcing and tight control over project work; and 4. Maximizing revenue from the acquisition of cash-in for optimizing company assets. <i>The Company is a first Defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Tan Heng Lok through Central Jakarta District Court submitted as the case No.561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst on September 16, 2021. The point of lawsuit is the Company get sued regarding debt settlement.</i> <i>Until the issuance of this report, this case is still in the court process.</i>

42. Informasi Keuangan Tersendiri Perusahaan

42. Financial Information of the Company

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, informasi keuangan tambahan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk menganalisa hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Industri Telekomunikasi (Persero) (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I – Lampiran IV) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

The Company published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial statements of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Parent Entity) which account for investment in Subsidiaries using the cost method, and have been prepared in order that the parent entity's result of operations can be analyzed. The supplementary financial information of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Parent Entity) (Attachment I – Attachment IV) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries.

43. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

43. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

Amendments to the standard that are effective for periods beginning on or after April 1, 2021 are:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

- PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021.

Amendment and improvement to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;
- Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;
- PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;
- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020*

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**44. Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan
Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2021 untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2022.

**44. Responsibility for Consolidated Financial
Statements**

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements ended December 31, 2021 to be published on April 1, 2022.

LAMPIRAN I

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

APPENDIX I

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	32,909,960,738	86,087,192,691	Cash and Cash in Banks
Piutang Usaha			Accounts Receivable
Pihak Berelasi	113,845,117,698	43,119,164,815	Related Parties
Pihak Ketiga	7,403,155,439	4,379,751,198	Third Parties
Piutang Lainnya			Other Receivables
Pihak Berelasi	5,043,699,315	4,734,684,315	Related Parties
Pihak Ketiga	829,304,915	819,289,415	Third Parties
Persediaan	142,196,635,438	155,038,952,558	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka	8,088,541,375	43,525,072,547	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka & Uang Muka	707,000,000	59,287,950	Prepaid Expense & Advance
Jumlah Aset Lancar	311,023,414,918	337,763,395,489	Total Current Asset
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap	766,097,402,673	767,887,719,355	Fixed Assets
Investasi pada Entitas Anak	26,800,582,000	26,800,582,000	Investment in Subsidiaries
Properti Investasi	62,890,099,901	62,914,422,552	Investment Property
Aset Tak Berwujud	12,920,660,232	13,427,947,768	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	52,630,782,956	51,658,054,536	Deferred Tax Assets
Aset Hak Guna	632,887,805	1,898,663,417	Right of Use Assets
Aset Lain-lain	186,550,072	103,075,070	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	922,158,965,639	924,690,464,698	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1,233,182,380,557	1,262,453,860,187	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Accounts Payables
Pihak Berelasi	195,961,371,777	212,217,300,014	Related Parties
Pihak Ketiga	144,747,772,523	197,699,719,935	Third Parties
Utang Lainnya	46,306,171,219	51,318,758,139	Other Payables
Biaya yang Masih Harus Dibayar	156,653,453,852	63,486,143,491	Accrued Expenses
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:			Current Maturities of Long-Term Liabilities:
Utang Bank	19,055,677,470	11,527,838,735	Bank Loan
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	7,779,984,007	5,269,741,043	Financial Institutions Loan
Liabilitas Sewa	3,061,026,601	2,401,148,238	Lease Liabilities
Utang Pajak	24,182,027,095	12,865,622,997	Tax Payables
Provisi Masa Pemeliharaan	2,339,339,060	3,911,065,040	Guarantee Period Provision
Pendapatan Diterima di Muka	28,188,794,901	27,894,796,934	Unearned Revenue
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	628,275,618,505	588,592,134,566	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang:			Long-Term Liabilities:
Utang Bank	815,988,932,318	823,516,771,053	Bank Loan
Utang Bunga Bank	109,533,123,416	68,446,878,789	Accrued Interest Payable
Liabilitas Sewa	--	659,878,363	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	131,408,949,783	145,641,154,618	Employee Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,056,931,005,517	1,038,264,682,823	Total Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1,685,206,624,022	1,626,856,817,389	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal			Capital Stock - Par Value of
Rp 1.000.000 (Rupiah Penuh) per Saham			Rp 1,000,000 (Full Rupiah) per Share
Modal Dasar - 1.000.000 Saham			Authorized Capital - 1,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan			The Issued and Fully Paid Capital -
Disetor Penuh 350.000 Saham	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000 Shares
Saldo Laba			Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	79,471,118,142	79,471,118,142	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	(1,630,634,845,758)	(1,523,111,285,201)	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya			Other Equity Components
Revaluasi Aset Tetap	802,524,611,135	802,524,611,135	Fixed Assets Revaluations
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(53,385,126,984)	(73,287,401,278)	Remeasurements of Defined Benefits Plan
JUMLAH EKUITAS	(452,024,243,465)	(364,402,957,202)	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,233,182,380,557	1,262,453,860,187	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN II

APPENDIX II

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

	2021 Rp	2020 Rp
PENDAPATAN	311,142,888,287	396,199,899,220
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(271,786,296,971)	(371,869,034,677)
LABA BRUTO	39,356,591,316	24,330,864,543
Beban Pemasaran	(21,102,916,237)	(14,444,263,520)
Beban Umum dan Administrasi	(60,489,454,706)	(56,042,693,488)
Beban Pengembangan	(6,646,006,732)	(6,561,050,827)
Pendapatan Lain-lain	23,416,162,543	21,723,842,701
Beban Pajak Final	(6,200,238,732)	(3,244,871,512)
Beban Lain-lain	(31,306,198,349)	(31,765,571,606)
Total Beban Usaha	(102,328,652,213)	(90,334,608,252)
RUGI USAHA	(62,972,060,897)	(66,003,743,709)
Beban Keuangan	(50,438,336,392)	(61,183,988,103)
RUGI SEBELUM PAJAK	(113,410,397,289)	(127,187,731,812)
Manfaat (Beban) Pajak	5,886,836,732	(3,863,696,206)
RUGI SETELAH PAJAK	(107,523,560,557)	(131,051,428,018)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	19,902,274,294	(22,405,373,785)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(87,621,286,263)	(153,456,801,803)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)**

**STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

REVENUE
COST OF REVENUE
GROSS PROFIT
Selling Expenses
General and Administrative Expenses
Development Expenses
Other Income
Final Tax Expense
Other Expenses
Total Operating Expenses
OPERATING LOSS
Financial Charges
LOSS BEFORE TAX
Tax Benefit (Expense)
LOSS AFTER TAX
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Item that Will Not be Reclassified
Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LAMPIRAN III

APPENDIX III

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid in Capital Rp	Saldo Laba/ Retained Earnings			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components Rp	Total Ekuitas/ Equity Rp
		Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Rp			
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,392,059,857,183)		751,642,583,642	(210,946,155,399)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(131,051,428,018)	--	--	(131,051,428,018)
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(22,405,373,785)	(22,405,373,785)	(22,405,373,785)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,523,111,285,201)		729,237,209,857	(364,402,957,202)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(107,523,560,557)	--	--	(107,523,560,557)
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	19,902,274,294	19,902,274,294	19,902,274,294
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,630,634,845,758)		749,139,484,151	(452,024,243,465)

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Loss for The Year

Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020

Loss for The Year

Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021

LAMPIRAN IV

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

APPENDIX IV

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	281,098,497,496	400,557,143,334
Penerimaan Bunga Jasa Giro	235,023,137	208,635,931
Penerimaan Lainnya	34,151,737,028	22,104,440,376
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional	(275,954,015,719)	(299,637,567,915)
Pembayaran Kepada Karyawan	(55,114,680,959)	(48,902,893,632)
Pembayaran Beban Pendanaan	(9,195,880,252)	(10,828,533,763)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(30,868,387,173)	(34,766,335,833)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(55,647,706,442)	28,734,888,498
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	--	(93,503,847)
Perolehan Aset Takberwujud	--	(316,533,217)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	--	(410,037,064)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Utang Bank	460,843,320	25,239,448,986
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	4,355,000,000	--
Pembayaran Liabilitas Sewa	--	(103,412,427)
Pembayaran Utang Bank	(460,843,320)	(13,552,375,633)
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	(1,885,467,886)	(23,200,909,625)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2,469,532,114	(11,617,248,699)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(53,178,174,328)	16,707,602,735
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi	942,375	1,214,060
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	86,087,192,691	69,378,375,896
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	32,909,960,738	86,087,192,691

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Received from Customers
Interest Income from Current Account
Other Receipts
Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses
Cash Paid for Employees
Cash Paid for Financing Expenses
Corporate Income Tax Paid

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of Fixed Assets
Repayment for Product Development

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash Received from Bank Loan
Cash Received from Financial Institution Loan
Payment of Lease Liabilities
Repayment for Bank Loan
Payment for Financial Institution Loan

Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Financing Activities

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Profit (Loss) From Foreign Exchange Unrealized

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF YEAR**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)**

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)**

OTHER DISCLOSURE

For The Years Ended

December 31, 2021 and 2020

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows of parent entity is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Investasi pada Entitas Anak

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Perusahaan diungkapkan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Investment in Subsidiaries

Information regarding the Company's subsidiaries is disclosed in Note of the consolidated financial statements.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 investasi pada entitas anak dicatat pada nilai perolehan sebagai berikut:

On December 31, 2021 and 2020 investment in subsidiaries stated at cost as follows:

Investasi pada entitas anak

Investments in subsidiaries

Nama Entitas/ Entity Name	31 Desember/ December 31, 2021 dan/ and 2020			
	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan (Pelepasan)/ Addition (Deduction) Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
PT Inti Pindad Mitra Sejati	86.15426%	16,800,582,000	--	16,800,582,000
PT Inti Konten Indonesia	99.99999%	10,000,000,000	--	10,000,000,000



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	:	Ujang Krisno
Alamat Kantor	:	Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Batik Agung No. 19 Sukaluyu / Bandung
Nomor Telepon	:	NIP.199309071
Jabatan	:	022-5201501 Manager
2. Nama	:	Wagiyati
Alamat Kantor	:	Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Komp. GBA 2 Blok D2 No. 10 Bandung
Nomor Telepon	:	NIP.202103003
Jabatan	:	022-5201501 Wakil Ketua

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PUMK PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero);
- Laporan keuangan PUMK telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK – ETAP);
- Semua informasi dalam laporan keuangan PUMK telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PUMK tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam PUMK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandung, 1 April 2022
Atas Nama dan Mewakili Pengurus Unit PUMK

Ketua

Wakil Ketua

Ujang Krisno

Wagiyati



**RSM**

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00324/2.1030/AU.2/12/0645-2/1/IV/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab pengelola atas laporan keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

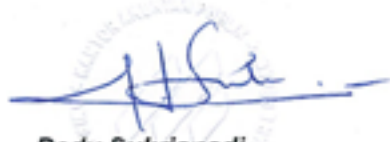
Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta hasil aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal lain

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menyajikan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (laporan PKBL) tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagai informasi komparatif atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (laporan PUMK) tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak menyajikan kembali laporan PKBL untuk menyesuaikan transaksi dan saldo terkait Program Bina Lingkungan, dan sebagai akibatnya, laporan PUMK ini belum tentu dapat diperbandingkan dengan laporan PKBL tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 1 April 2022



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	326.700.530	142.175.624
Piutang Pinjaman Mitra Binaan <i>(Setelah dikurangi penyisihan piutang mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.308.312.443 dan Rp1.363.102.600)</i>	4	3.579.495.077	3.483.590.994
Total Aset Lancar		3.906.195.607	3.625.766.618
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	5	--	--
Aset Lain-lain	6	--	--
Aset Tetap Tidak Berfungsi		28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai		(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah		4.316.437.323	4.373.379.656
Akumulasi Penurunan Nilai		(4.316.437.323)	(4.373.379.656)
Total Aset Tidak Lancar		--	--
TOTAL ASET		3.906.195.607	3.625.766.618
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Lain-lain	7	135.922.648	136.832.648
TOTAL LIABILITAS		135.922.648	136.832.648
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	3.770.272.959	3.488.933.970
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		3.906.195.607	3.625.766.618

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN	9		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		147.692.944	135.771.383
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro		7.280.735	3.300.259
Pemulihan Penyisihan Piutang		54.790.157	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah		56.942.333	39.742.167
Lainnya		22.058.300	5.188.640
TOTAL PENDAPATAN		288.764.469	184.002.449
BEBAN LAINNYA	4, 10		
Beban Administrasi dan Umum		4.176.647	2.379.730
Beban Penyisihan Piutang	4, 10	--	558.710.308
Beban Lain-lain		3.248.833	--
TOTAL BEBAN		7.425.480	561.090.038
SURPLUS (DEFISIT)		281.338.989	(377.087.589)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		281.338.989	(377.087.589)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
	Rp	Rp
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.488.933.970	3.866.021.559
Surplus (Defisit)	281.338.989	(377.087.589)
Saldo Akhir	3.770.272.959	3.488.933.970
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	3.770.272.959	3.488.933.970

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENERIMAAN KAS DARI:		
Penerimaan Pinjaman dari Mitra Binaan	2.267.959.574	2.018.042.706
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	147.692.944	135.771.383
Penerimaan yang Belum Teridentifikasi	--	6.200.000
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	7.280.735	3.300.259
Pendapatan Lainnya	21.678.300	5.670.000
SUB TOTAL	2.444.611.553	2.168.984.348
PENGELUARAN KAS UNTUK:		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(2.255.000.000)	(2.120.000.000)
Pengembalian Kelebihan Angsuran	(910.000)	(1.440.480)
Beban Administrasi dan Umum	(4.176.647)	(2.379.730)
SUB TOTAL	(2.260.086.647)	(2.123.820.210)
KAS NETO YANG DITERIMA DARI		
AKTIVITAS OPERASI	184.524.906	45.164.138
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	184.524.906	45.164.138
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	142.175.624	97.011.486
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	326.700.530	142.175.624

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Informasi Umum

1.1 Pendirian dan Informasi Umum

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("PUMK") merupakan program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang mengemban misi pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi tersebut bentuk partisipasi Perusahaan dilakukan melalui PUMK. Dengan PUMK diharapkan peran aktif BUMN dapat memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan, serta dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali oleh PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 semua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL (dahulu PKBL) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, dibentuk pada tanggal 28 Juli 2008 berdiri sebagai bagian tersendiri dalam Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar dapat secara mandiri mampu mengembangkan serta berkiprah sejalan dengan tujuan BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Perusahaan menyelenggarakan Program PUMK dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan Direktur Utama. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi Perusahaan. Unit kerja khusus ini berlokasi di Jalan Mohammad Toha No. 77 Bandung dan wilayah kerjanya meliputi kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Barat.

Hingga laporan ini diterbitkan, Surat Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Program TJSL 2021 masih dalam proses penyusunan. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KN.009/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI No. KN.002/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

1.2 Kegiatan Utama

Program PUMK dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dan bantuan kegiatan lainnya. BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Program Pendanaan UMK pada pokoknya dilakukan dalam bentuk pinjaman pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.036/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan dan KD. 257/KP.09/021100/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penempatan Ulang Karyawan Di Lingkungan Perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), susunan pengurus PKBL (atau TJSL) adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Direktur Utama	Otong lip	Otong lip
Divisi Sekper dan Renstra Bangbis	Rizqi Ayunda Pratama	Gde Pandit Andika Wicaksono
Bagian PKBL (atau TJSL)	Ujang Krisno	Uus Lukman
Senior Officer	Ahmad Santosa B.	Dedi Suhendi
	Wagiyati A. Iskan	Wagiyati A. Iskan

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2019) ISAK 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba." yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012 yang berlaku bagi PUMK yang berada di bawah naungan BUMN Pembina.

Laporan keuangan Program PUMK, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

b Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah saldo kas dan saldo rekening bank PUMK Perusahaan untuk membiayai kegiatan PUMK Perusahaan.

c Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL (atau TJSL) kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan, yaitu pokok piutang Mitra Binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER - 05/MBU/04/2021, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Pinjaman kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu keterlambatan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

e Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

f Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

Sesuai PER 05.MBU/04/2021, modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan :

- a. prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud padapasal 12 ayat (2); atau
- b. prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

g Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- 2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- 3) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 4) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika:

- 1) Dilepaskan, atau
- 2) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut

Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Metode Penyusutan</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Inventaris dan peralatan	Garis lurus	25%

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

h Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan terdiri dari: aset tetap tidak berfungsi dan piutang bermasalah-bersih.

Aset Tetap Tidak Berfungsi

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain direklasifikasi menjadi aset tetap tidak produktif dan diturunkan nilainya sama dengan Rp1 (satu rupiah).

Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

i Penurunan Nilai

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PUMK maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Aset Lainnya

Manajemen harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, manajemen harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Juga mengindikasikan bahwa manajemen harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode penyusutan (amortisasi) untuk aset.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikasi adanya kemungkinan penurunan nilai aset, dipengaruhi:

1) Sumber informasi eksternal

- Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
- Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual.
- Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya.

2) Sumber informasi internal

- Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas.
- Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas

j Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

k Pendapatan

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Alokasi bagian laba dari BUMN pembina adalah alokasi dari BUMN pembina atas penyisihan laba setelah pajak BUMN pembina yang ditetapkan oleh RUPS/RPB untuk Unit PKBL (atau TJSL). Diakui pada saat RUPS/RPB telah menyetujui laporan keuangan BUMN pembina dan menetapkan besarnya alokasi laba untuk Unit PKBL (atau TJSL).

Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL (atau TJSL) Lain

Penerimaan pelimpahan dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lain adalah jumlah dana yang diterima dari Unit PKBL (atau TJSL) BUMN lain tanpa kewajiban untuk mengembalikan untuk disalurkan kepada mitra binaan. Diakui pada saat diterimanya dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Penggantian Beban Operasional

Penggantian beban operasional adalah penerimaan dana dari BUMN pembina atas penggantian beban operasional Unit PKBL (atau TJSL) yang melebihi batas pagu yang telah ditetapkan. Diakui pada saat diterima penggantian beban operasional.

Sumbangan

Sumbangan adalah sejumlah dana atau barang yang diterima dari pihak di luar Unit PKBL (atau TJSL) tanpa adanya imbalan prestasi, selain penerimaan pelimpahan dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lainnya. Contohnya adalah dana dari BUMN pembina untuk Program PUMK ketika BUMN Pembina mengalami kerugian atau ketika tidak ada pembagian laba. Diakui pada saat dana atau barang diterima oleh Unit PKBL (atau TJSL).

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan, diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya, diakui secara akrual.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya "Piutang Bermasalah Dihapus - Diterima Kembali", diakui pada saat diterima.

I Beban

Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana Unit PKBL (atau TJSL) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program kemitraan.

Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran dana pembinaan kemitraan. Dana pembinaan kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan.

Pelimpahan Dana ke Unit PKBL (atau TJSL) Lain

Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain adalah penyaluran dana kepada Unit PKBL (atau TJSL) lain, tanpa kewajiban untuk mengembalikannya, untuk disalurkan kepada mitra binaan. Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain diakui pada saat terjadi penyerahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan ke Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Beban meliputi beban pembinaan, umum dan administrasi, pemeliharaan, dan beban serta pengeluaran lainnya.

Beban diakui pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit PKBL (atau TJSL). Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit PKBL (atau TJSL).

3. Kas dan Bank

	2021	2020
	Rp	Rp
Kas	4.687.041	2.053.920
Rekening Giro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	213.381.865	35.093.891
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	108.631.624	105.027.813
Total	326.700.530	142.175.624

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

	2021 Rp	2020 Rp
Piutang Mitra Binaan	4.887.807.520	4.846.693.594
Penyisihan Penurunan	(1.308.312.443)	(1.363.102.600)
Jumlah Piutang Mitra Binaan-Bersih	3.579.495.077	3.483.590.994

Kolektibilitas piutang mitra binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Lancar	3.266.914.000	3.000.648.902
Kurang lancar	261.722.880	463.856.000
Diragukan	196.467.900	300.093.714
Macet	1.162.702.740	1.082.094.978
Jumlah	4.887.807.520	4.846.693.594

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman per 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

2021			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	3.266.914.000	3,17%	103.616.481
Kurang lancar	261.722.880	8,21%	21.497.763
Diragukan	196.467.900	10,43%	20.495.459
Macet	1.162.702.740	100,00%	1.162.702.740
Total	4.887.807.520		1.308.312.443

2020			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	3.000.648.902	4,72%	141.637.631
Kurang lancar	463.856.000	12,19%	56.544.046
Diragukan	300.093.714	27,60%	82.825.945
Macet	1.082.094.978	100,00%	1.082.094.978
Total	4.846.693.594		1.363.102.600

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	1.363.102.600	804.392.292
Beban (Pemulihan) Penyisihan Piutang	(54.790.157)	558.710.308
Saldo Akhir	1.308.312.443	1.363.102.600

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Aset Tetap

	2021			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Inventaris dan				
Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris dan				
Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Nilai Buku	--			--
	2020			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Inventaris dan				
Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris dan				
Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Nilai Buku	--			--

6. Aset Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp
Aset Tetap Tidak Berfungsi	28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai Aset Tetap Tidak Berfungsi	(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah	4.316.437.323	4.373.379.656
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bermasalah	(4.316.437.323)	(4.373.379.656)
Total	--	--
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman		
	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	4.373.379.656	4.413.121.823
Pemulihan (Catatan 9)	(56.942.333)	(39.742.167)
Saldo Akhir	4.316.437.323	4.373.379.656

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap tidak berfungsi inventaris dan peralatan kantor yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar nilai perolehannya.

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan.

Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program PKBL (atau TJSL) BUMN.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. Utang Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp
Angsuran Belum Teridentifikasi	132.847.588	132.847.588
Kelebihan Pembayaran Angsuran	3.075.060	3.985.060
Total	135.922.648	136.832.648

8. Aset Neto

	2021 Rp	2020 Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.488.933.970	3.866.021.559
Surplus (Defisit)	281.338.989	(377.087.589)
Saldo Akhir	3.770.272.959	3.488.933.970
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	3.770.272.959	3.488.933.970

9. Pendapatan

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	147.692.944	135.771.383
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	7.280.735	3.300.259
Pendapatan Lain-lain :		
Pemulihan Penyisihan Piutang	54.790.157	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah (Catatan 6)	56.942.333	39.742.167
Lainnya	22.058.300	5.188.640
Total	288.764.469	184.002.449

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pengakuan/akrualisasi pendapatan jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

10. Beban

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Administrasi dan Umum	4.176.647	2.379.730
Beban Lain-lain	3.248.833	--
Beban Penyisihan Piutang	--	558.710.308
Total	7.425.480	561.090.038

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. Informasi Tambahan**Kinerja Program Kemitraan**

Penilaian kinerja PKBL (atau TJSL) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup program kemitraan dengan indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman kerja dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga.

	2021	2020
	Rp	Rp
Dana yang Disalurkan		
Pinjaman Kemitraan	2.255.000.000	2.120.000.000
Total Penyaluran Dana	2.255.000.000	2.120.000.000

Tabel penilaian tingkat penyerapan dana pinjaman kemitraan:

Tingkat Penyerapan (%)	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}} \times 100\%$			

Perhitungan efektivitas penyaluran sebagai berikut:

	2021	2020
Jumlah Dana yang Disalurkan	2.255.000.000	2.120.000.000
Jumlah Dana yang Tersedia	2.581.700.530	2.262.175.624
Hasil	87,35	93,72
Skor	2	3

2) Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Indikator lain dalam penilaian kinerja PUMK yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman).

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%), dan macet (0%).

	2021		Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Rp
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	
Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman			
Lancar	3.266.914.000	1,00	3.266.914.000
Kurang lancar	261.722.880	0,75	196.292.160
Ragu-ragu	196.467.900	0,25	49.116.975
Macet	1.162.702.740	--	--
	4.887.807.520		3.512.323.135

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2020		Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Rp
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	
Lancar	3.000.648.902	1,00	3.000.648.902
Kurang lancar	463.856.000	0,75	347.892.000
Ragu-ragu	300.093.714	0,25	75.023.429
Macet	1.082.094.978	--	--
	4.846.693.594		3.423.564.331

Tabel penilaian:

Tingkat Penyerapan (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Rata - Rata Tertimbang Kolektabilitas Pinjaman}}{\text{Saldo Pinjaman yang di Salurkan Sampai Akhir Periode}} \times 100\%$			

	2021	2020
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman	3.512.323.135	3.423.564.331
Saldo pinjaman yang disalurkan sampai dengan akhir periode	4.887.807.520	4.846.693.594
Hasil	71,86	70,64
Skor	3	3

3) Variabel Utama Pelaksanaan PUMK

Laporan utama pelaksanaan PUMK menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2021 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Dana Tersedia:	Program Kemitraan
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	142.175.624
2	Alokasi laba dari BUMN pembina	--
3	Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	2.267.959.574
4	Pengembalian dana dari BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
5	Pendapatan jasa administrasi pinjaman	147.692.944
6	Pendapatan lain	21.678.300
7	Jasa giro	7.280.735
8	Kelebihan pembayaran angsuran	(910.000)
9	Angsuran yang belum teridentifikasi	--
10	Biaya operasional	(4.176.647)
11	Dana tersedia (Jumlah 1 s.d 9)	2.581.700.530
	Penyaluran dana dan biaya operasional	
12	Penyaluran pinjaman kepada mitra	(2.255.000.000)
13	Penyaluran melalui BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
14	Penyaluran hibah/dana pembinaan	--
15	Penyaluran dana bina lingkungan	--
16	Penyaluran dana bina lingkungan BUMN peduli	--
17	Penyaluran dana pembinaan kemitraan	--
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (Jumlah 11 s.d 17)	(2.255.000.000)
	Dana Tersedia per 31 Desember 2021 (10-18)	326.700.530

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4) Realisasi Akumulasi Penyaluran Pendanaan UMK

Laporan realisasi akumulasi penyaluran PUMK berdasarkan jenis bantuan yang disalurkan menyajikan informasi realisasi penyaluran PUMK sampai dengan tahun 2021 dan 2020. Mulai tahun 2021 Pendanaan UMK diambil dari anggaran perusahaan dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Sampai dengan Tahun 2020	Penyaluran Tahun 2021	Sampai dengan Tahun 2021
Bantuan korban bencana alam	112.592.935	--	112.592.935
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	143.394.500	--	143.394.500
Bantuan peningkatan kesehatan	288.029.011	5.100.000	293.129.011
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	445.296.800	--	445.296.800
Bantuan sarana ibadah	340.602.307	2.000.000	342.602.307
Bantuan pelestarian alam	130.602.307	3.000.000	133.602.307
Pengentasan kemiskinan	849.500	--	849.500
Sub Jumlah	1.461.367.360	10.100.000	1.471.467.360
BL BUMN Peduli	526.332.252	--	526.332.252
Total	1.987.699.612	10.100.000	1.997.799.612

5) Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan

Laporan realisasi akumulasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran program kemitraan sampai dengan tahun 2021 dan 2020 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Realisasi Sampai Dengan Tahun 2021	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5		
Sektor Industri	123	3.051.541.040	6	295.000.000	129	3.346.541.040
Sektor Perdagangan	381	9.252.965.134	20	1.075.000.000	401	10.327.965.134
Sektor Pertanian/Perkebunan	17	480.373.000	3	180.000.000	20	660.373.000
Sektor Perikanan/Peternakan	73	1.364.696.060	5	215.000.000	78	1.579.696.060
Sektor Usaha Jasa	45	1.469.185.000	9	490.000.000	54	1.959.185.000
Sektor Usaha Lainnya	4	80.666.000	--	--	4	80.666.000
Dana Pembinaan Kemitraan	22	10.127.000	--	--	22	10.127.000
Total	665	15.709.553.234	43	2.255.000.000	708	17.964.553.234

6) Rencana dan Realisasi Penyaluran Program Kemitraan

Laporan rencana dan realisasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi prosentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran program kemitraan tahun 2021 dan 2020 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi 2020	Rencana 2021	Realisasi 2021	Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persentase Dibandingkan Dengan Rencana
	Rp	Rp	Rp	Persentase Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Rupiah
Sektor Industri	460.000.000	317.500.000	295.000.000	69%	93%
Sektor Perdagangan	1.145.000.000	1.100.000.000	1.075.000.000	96%	98%
Sektor Pertanian/Perkebunan	110.000.000	60.000.000	180.000.000	0%	300%
Sektor Perikanan/Peternakan	85.000.000	90.000.000	215.000.000	106%	239%
Sektor Usaha Jasa	320.000.000	82.500.000	490.000.000	26%	594%
Total	2.120.000.000	1.650.000.000	2.255.000.000	78%	137%

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7) Posisi Piutang Program Kemitraan

Laporan posisi piutang program kemitraan berdasarkan sektor mitra binaan menyajikan informasi prosentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
Sektor Industri	16	531.343.500	2	27.437.500	4	38.995.380	23	212.341.620	45	810.118.000
Sektor Perdagangan	59	1.662.216.500	10	171.944.380	4	64.026.000	63	692.629.980	136	2.590.816.860
Sektor Pertanian/Perkebunan	7	261.041.500	-	-	-	0	2	20.449.000	9	281.490.500
Sektor Perikanan/Peternakan	14	352.491.500	1	37.491.000	1	4.503.520	18	200.758.140	34	595.244.160
Sektor Usaha Jasa	13	459.821.000	1	24.850.000	3	88.943.000	3	20.858.000	20	594.472.000
Sektor Usaha Lainnya							1	15.666.000	1	15.666.000
Total	109	3.266.914.000	14	261.722.880	12	196.467.900	110	1.162.702.740	245	4.887.807.520

12. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku Sampai Dengan Tahun Buku

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e, tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER.09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, PER.03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER.05/MBU/04/2021 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

13. Tanggung Jawab Pengurus Unit PKBL (atau TJSL) atas Laporan Keuangan

Pengurus Unit PKBL (atau TJSL) bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi oleh Pengurus untuk terbit pada tanggal 1 April 2022.

Nomor : S-30/DEKOM/INTI/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris PT INTI (Persero) Tahun 2021

6 Juni 2022

Kepada Yth.**Menteri Badan Usaha Milik Negara**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110

Menunjuk Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Pasal 15 Point b. ayat (13) Anggaran Dasar PT INTI (Persero), bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri BUMN kami ucapkan terima kasih.

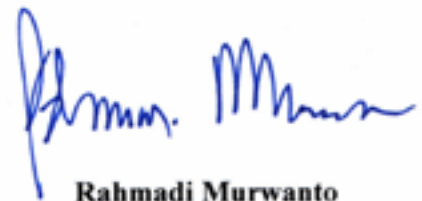
**DEWAN KOMISARIS
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO),**



Trisno Hendradi
(Komisaris)



Unggul Privanto
Komisaris Utama



Rahmadi Murwanto
(Komisaris)

Tembusan Yth,

1. Wakil Menteri BUMN II;
2. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media;
3. Direktur Utama PT PPA (Persero);
4. Direksi PT INTI (Persero).

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp : (62-22) 5201501 (10 Saluran)
Fax : (62-22) 5202444
E-mail: info@inti.co.id

Kantor Cabang Jakarta :
Gedung Menara MTH, Lt. 7
Suite 706-707
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 23
Tebet - Jakarta Selatan 12830
Telp. (62-21) 22833799



Trusted Partner

LAPORAN PENGAWASAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
Jl. Moch. Toha No. 77 - Bandung 40253

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik, meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, pemberian nasihat kepada Direksi, memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 66 ayat (2) huruf e, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan. Atas kewajiban tersebut, berikut disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.

II. Organisasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-318/MBU/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-188/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Unggul Priyanto	: Komisaris Utama
Trisno Hendradi	: Komisaris
Rahmadi Murwanto	: Komisaris

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan sekaligus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN No.KEP 017/MBU/2013 tanggal 2 April 2013, telah dibentuk:

- a. Komite Audit sesuai surat keputusan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) Nomor: SK-01/Dekom/INTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dan Nomor: SK-54/Dekom/INTI/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Rahmadi Murwanto	: Ketua Komite Audit
Endarjono	: Anggota Komite Audit

- b. Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai surat keputusan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) Nomor: SK-53/Dekom/INTI/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Ketua	: Unggul Priyanto (Komisaris Utama)
Sekretaris	: Trisno Hendradi (Komisaris)
Anggota	: Rahmadi Murwanto (Komisaris)
Permbantu Sekretaris	: Endarjono (Anggota Komite Audit)

Selain itu, Dewan Komisaris PT INTI (Persero) juga dibantu oleh Kesekretariatan Dewan Komisaris, di mana sesuai Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-176/SMBU/09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang usulan penggantian Sekretaris Dewan Komisaris PT INTI, maka sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-49/DK-INTI/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris, susunan Kesekretariatan Dewan Komisaris terdiri dari:

Suripto	: Sekretaris Dewan Komisaris
Dian Agustina	: Staf Sekretaris Dewan Komisaris

III. Tugas dan Kewajiban

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris diantaranya adalah pengawasan terhadap persetujuan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan menjaga agar Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Selain bentuk-bentuk pengawasan tersebut, Dewan Komisaris harus melakukan pemantauan dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan oleh Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP serta menyampaikan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
6. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya;
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
10. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bertujuan untuk menjaga kepentingan Perseroan dan untuk memastikan pelaksanaan tugas Direksi telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta Perseroan dikelola untuk menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik. Tugas yang dilaksanakan meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan dilakukan melalui evaluasi atas Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan serta informasi lainnya, baik melalui pembahasan internal Dewan Komisaris maupun pembahasan bersama Direksi Perseroan. Selain melalui pertemuan rutin, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan cara memberi penugasan khusus kepada Komite Audit untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan tertentu yang cukup penting. Hasil pendalaman Komite Audit tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Rapat Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan.

Secara lebih detail, aktivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan

Setiap pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Dewan Komisaris Internal maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditindaklanjuti dengan pemberian saran atau nasihat kepada Direksi. Selama tahun 2021, nasihat atau saran yang terpenting, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan dan operasional perusahaan:
 - 1) Dampak dari Covid 19, perusahaan mengalami penurunan pendapatan terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari APBN, untuk itu agar dapat dicarikan solusi dalam memperoleh proyek-proyek yang bersumber di luar Pemerintah.
 - 2) Sehubungan dengan capaian kinerja tahun 2021 khususnya Pendapatan yang masih jauh dari target yang ditetapkan, maka Direksi diminta agar mengusulkan revisi terhadap RKAP tahun 2021, sehingga dapat ditetapkan target yang realistis untuk dicapai pada akhir tahun 2021.
 - 3) Agar ditingkatkan secara terus menerus upaya penagihan piutang khususnya piutang yang lama tidak tertagih (macet) khususnya yang nilainya material, seperti piutang kepada PT Mitra Buana Komputindo (MBK) Group. Sekiranya dimungkinkan agar dilakukan langkah-langkah extra ordinary seperti tuntutan hukum dan/atau pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada yang bersangkutan.
 - 4) Dalam mengatasi kesulitan modal kerja, agar terus diupayakan memperoleh sumber-sumber pendanaan lain di luar perbankan, seperti dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan/atau mitra-mitra pendanaan yang lain.
 - 5) Agar program restrukturisasi perusahaan yang telah disusun dilaksanakan secara konsisten dengan bantuan dari Kementerian BUMN dan PT PPA.
 - 6) Agar terus dilakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa-masa yang lalu dapat dihindari.
- b. Berkaitan dengan Pengembangan Perusahaan:
 - 1) Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi terkait rencana Direksi dalam melakukan Kerjasama melalui sinergi BUMN maupun dengan pihak ke 3.
 - 2) Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja PT INTI untuk mendapatkan informasi atas jalannya perusahaan.
- c. Berkaitan dengan pengembangan Anak Perusahaan:
 - 1) Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat memacu kinerja Anak Perusahaan.
 - 2) Dewan Komisaris menyarankan agar jalannya pengelolaan dan pengembangan Anak Perusahaan dilakukan pengawasan yang baik.

d. Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKAP Tahun 2022, Dewan Komisaris merekomendasikan hal-hal, berikut:

- 1) Agar diupayakan perolehan kontrak-kontrak dengan prioritas pada kontrak yang bersifat '*recurring*' untuk menjamin perolehan pendapatan dapat tercapai dan 'merata' pada tahun 2022.
- 2) Untuk mendukung pencapaian laba tahun 2021, agar diupayakan pendapatan yang berasal dari proyek dengan margin yang relatif tinggi, modal kerja yang mampu disediakan perusahaan dan/atau pengendalian biaya.
- 3) Mencermati kondisi likuiditas perusahaan yang belum menggembirakan, dalam pembiayaan kegiatan perusahaan, agar terus diupayakan diversifikasi sumber pembiayaan, khususnya dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan/atau dari mitra usaha yang lain dengan *cost of fund* yang wajar.
- 4) Agar ditingkatkan secara terus menerus upaya penagihan piutang khususnya piutang yang lama tidak tertagih (macet) yang nilainya material, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan.
- 5) Restrukturisasi perusahaan berupa restrukturisasi bisnis, keuangan/hutang dan optimalisasi aset serta divestasi saham anak perusahaan agar dilaksanakan secara cepat dan konsisten, sehingga turnaround perusahaan menjadi BUMN yang berkinerja baik dapat segera tercapai.
- 6) Dengan adanya penurunan kinerja perusahaan saat ini, agar diantisipasi adanya pegawai usia produktif yang mengundurkan diri, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu operasional perusahaan.
- 7) Agar ditingkatkan upaya mitigasi resiko dalam melaksanakan proyek/kontrak, sehingga kerugian dan denda yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Kelemahan pengelolaan tender dan kontrak pada tahun-tahun sebelumnya agar dijadikan pelajaran untuk tidak diulang pada masa yang akan datang.
- 8) Agar selalu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam seluruh aspek pengelolaan bisnis perusahaan
- 9) Agar dilakukan tindak lanjut terhadap Keputusan dan Arahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Temuan hasil audit baik internal maupun eksternal.
- 10) Anak/cucu/perusahaan afiliasi yang sudah meningkat kinerjanya untuk dipertahankan, dan juga mencari potensi-potensi kontrak yang dapat meningkatkan kinerja, sedangkan bagi yang masih rendah kinerjanya untuk di ambil upaya-upaya/mitigasi dini agar tidak membebani induk

2. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

a. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan;

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat-rapat untuk melakukan telaah atas Laporan Berkala dan Laporan Manajemen Tahunan dan sekaligus sebagai bahan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan perusahaan, serta pemberian nasihat kepada Direksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pelaksanaan telaah secara triwulanan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2021 pada tanggal 20 April 2021;
 - 2) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan II/2021 pada tanggal 22 Juli 2021;
 - 3) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2021 pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Berdasarkan hasil telaah terhadap Laporan Manajemen Berkala maupun Laporan Manajemen Tahunan, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan Pemegang Saham, melalui :
- 1) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) nomor: S-20/Dekom/INTI/IV/2020 tanggal 26 April 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero);
 - 2) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) nomor: S-47/DEKOM/INTI/09/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan II Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
 - 3) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) nomor: S-56/DEKOM/INTI/11/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2021 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

b. Menandatangani Laporan Tahunan

Sebagai pelaksanaan kewajiban UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 67 ayat (1), seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2021 (*Audited*).

c. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan

Dewan Komisaris telah memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan tahun 2020 sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor: S-20/DEKOM/INTI/05/202 tanggal 31 Mei 2021 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

3. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

Untuk memandu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagai bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

4. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS

Dewan Komisaris mengusulkan RUPS agar menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” untuk melakukan General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan TJSL Tahun Buku 2022, dengan pertimbangan sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham No. S-26/DEKOM/INTI/5/2022 tanggal 26 Mei 2022 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) dan Anak Perusahaan serta Pengelolaan Program TJSL Tahun Buku 2022

5. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya;

Dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan pembahasan atas kinerja berkala bulanan, berdasarkan laporan kinerja bulanan. Direksi memaparkan presentasi kinerja bulanan, beserta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris. Dalam rapat, Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan kepada Direksi. Direksi menjawab langsung pertanyaan tersebut dan menyajikan data pendukungnya. Terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, setelah dilakukan pembahasan dalam rapat, ditindaklanjuti dengan adanya surat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, dalam kondisi pandemi dan untuk menghindari penularan Covid-19 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat baik Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selain secara fisik juga melalui *Zoom Teleconference*. Selain itu juga Dewan Komisaris menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN terkait RUPS Laporan Tahunan 2020, RKAP Tahun 2021 dan Monitoring Kinerja Keuangan BUMN, serta sosialisasi mengenai Peraturan Menteri BUMN.

Dalam kegiatan rapat rutinitas Dewan Komisaris, realisasi kehadiran selama Tahun 2021 secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase	Keterangan
Unngul Priyanto	Komisaris Utama	22	83%	Habis masa bakti pada Maret 2021, dan diperpanjang bulan Juni 2021
Trisno Hendradi	Komisaris	24	100%	
Rahmadi Murwanto	Komisaris	24	100%	

6. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi diantara anggota Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Secara internal, dalam pelaksanaan pengawasan kinerja manajemen, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan telaah atas laporan kinerja yang kemudian mengundang Komite Audit untuk membahas bersama berdasarkan hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja berkala, melakukan analisis, serta menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Dewan Komisaris juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana salah satu tugasnya menetapkan kriteria pemilihan calon Direksi, mengusulkan *nominated talent* (BoD-1) dan mengusulkan besaran remunerasi Direksi.

7. Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2021.

Gambaran kinerja tahun 2021 setelah dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, adalah sebagai berikut:

URAIAN	2020	2021		% Audit 2021 Thd	
	AUDIT	RKAP	AUDIT	Audit 2020	RKAP 2021
Penjualan	427,247	706,704	371,731	87.01	52.60
Beban Pokok Penjualan	(399,379)	(607,660)	(326,497)	81.75	53.73
Laba (Rugi) Kotor	27,868	99,045	45,234	162.32	45.67
EBITDA	81,082	34,759	(50,538)	(62.33)	(145.39)
Beban Usaha	(121,637)	(99,678)	(108,582)	89.27	108.93
Rugi Usaha	(93,769)	(633)	(63,348)	67.56	10,001.25
Beban Pendaan	(63,570)	(83,259)	(52,073)	81.91	62.54
Laba (Rugi) sebelum Pajak	(157,339)	(83,892)	(115,421)	73.36	137.58
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(158,434)	(84,112)	(109,424)	69.07	130.09
Aset Lancar	328,568	456,182	300,159	91.35	65.80
Total Hutang	1,686,104	888,076	1,743,754	103.42	196.35
Ekuitas	(449,477)	(324,165)	(538,999)	119.92	166.27
Total Aset	1,236,627	563,912	1,204,755	97.42	213.64
Arus Kas Awal	74,711	47,660	88,012	117.80	184.67
Arus Kas Akhir	88,012	33,615	37,861	43.02	112.63
Total Investasi	2,076	22,254	1,759	84.75	7.91
Skor Tingkat Kesehatan	38,2 (KS)	53,0 (KS)	35,6 (KS)		

(Rp juta)

- a. Secara umum realisasi kinerja tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP, namun lebih baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 khususnya dalam upaya mengurangi kerugian..
- b. Realisasi pendapatan tahun 2021 hanya mencapai 52,6% dari RKAP dan 87,0% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sedangkan Beban Pokok Penjualan mencapai 53,7% dari RKAP dan 81,8% dari realisasi tahun 2020.
- c. Realisasi Laba Kotor sebesar Rp. 45,23 miliar meningkat sangat tajam (62,3%) dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp. 27,87 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi pada tahun 2021 berhasil mendapatkan order dengan tingkat margin yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- d. Total Aset per 31 Desember 2021 ditutup dengan saldo sebesar Rp. 1.204,76 miliar dengan total liabilitas sebesar Rp 1.743,75 (144,74%) dan **total ekuitas sebesar negatif Rp. 538,99 miliar (-44,74%)**. Total Aset menurun terus dari tahun-tahun sebelumnya dan negatif Ekuitas juga semakin besar diakibatkan Akumulasi Kerugian yang semakin meningkat.
- e. Modal Kerja Bersih (Aset Lancar – Liabilitas Jangka Pendek) perusahaan per 31 Desember 2021 negatif sebesar Rp. 384,09 miliar, menurun dibandingkan realisasi 31 Desember 2020 negatif sebesar Rp. 299,23 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan aktiva lancar dan peningkatan liabilitas jangka pendek.
- f. Keterbatasan likuiditas khususnya saldo Kas dan Setara Kas saat ini berakibat kepada :
 - a. **Penundaan pembayaran kepada vendor yang cukup berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan.**
 - b. **Pembayaran Gaji kepada karyawan**
 - c. **Penundaan pembayaran pajak**
- g. Realisasi Investasi tahun 2021 sebesar Rp. 1,76 miliar, mengalami penurunan 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2020. Realisasi Investasi terdiri dari Bangunan dan Emplasemen Rp 192 juta, alat olah data Rp. 205,73 juta, Aset Dalam Pembangunan sebesar Rp 377,76 juta, dan Lisensi Software SAP, Merk dan HAKI Rp 983,83 juta.
- h. Key Performance Indicator's (KPI) Tahun 2021 tercapai dengan nilai skor sebesar 47,52 atau terjadi penurunan terhadap target RKAP 2021 yang ditetapkan skor 100,00, hal ini terutama disebabkan penurunan yang sangat tajam pada indikator Nilai Sosial Ekonomi untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi dan Pengembangan Karyawan.

8. Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2021

No.	Program Kerja	Keterangan	Rencana		Realisasi	
			KPI	Bobot (%)	KPI	Bobot (%)
1	2	3	5	6	7	8
I. Aspek Pengawasan dan Pengarahan				50,00		50,00
1.	Riview/analisis kinerja perusahaan		4 kali	10,00	4 kali	10,00
2.	Rapat Dewan Komisaris	Tidak termasuk keikutsertaan Dekom dalam rapat dengan Pemegang Saham				
a.	Jumlah Rapat Gabungan dengan Direksi		12 kali	5,00	12 kali	5,00
b.	Jumlah Rapat Internal		12 kali	5,00	12 kali	5,00
c.	Kehadiran Rapat		100 %	5,00	100 %	5,00
3.	Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern, kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, kebijakan tentang sistem teknologi informasi, kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan pelayanan, kebijakan PKBL dan CSR, penyampaian laporan kepada para pemegang saham beserta pelaksanaannya secara lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis		4 Dokumen	7,50	4 Dokumen	7,50
4.	Melakukan Monitoring atas tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal dan melakukan pengawasan efektifitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal	Komite Audit	2 kali	7,50	2 kali	7,50
5.	Monitoring dan evaluasi Pabrik	Prioritas sektor pemasaran	2 kali	5,00	2 kali	5,00
6.	Melakukan pengawasan dan kajian atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga dan melakukan pemantauan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik		2 kali	5,00	2 kali	5,00
II. Aspek Pelaporan				35,00		35,00
1.	Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan	Akhir tahun	1 kali	5,00	1 kali	5,00
2.	Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS		2 kali	20,00	2 kali	20,00
3.	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris		1 kali	10,00	1 kali	10,00
III. Aspek Dinamis				15,00		10,00
1.	Peningkatan kompetensi/kapasitas/pelatihan		1 kali	5,00	- kali	-
2.	Melakukan penunjukan /Penentuan calon KAP dan anggarannya		1 kali	5,00	1 kali	5,00
3.	Melakukan pembahasan transaksi atau tindakan yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai Anggaran Dasar		7 hari kerja	1,25	7 hari kerja	1,25
4.	Melakukan telaah dan atau persetujuan atas rancangan KAP yang diajukan oleh Direksi dan/atau melakukan telaah dan/atau persetujuan atas rancangan RJPP		1 kali	1,25	1 kali	1,25
5.	Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris		14 hari kerja	1,25	14 hari kerja	1,25
6.	Melakukan telaah dan /atau pengusulan remunerasi Direksi		1 kali	1,25	1 kali	1,25
TOTAL I S/D III				100,00		95,00

BAB III PENUTUP

Dari pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, selama periode tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi, memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance (GCG), serta memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui rapat-rapat yang intensif, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, rapat internal Komisaris, rapat gabungan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kunjungan ke lokasi Pabrik/Aset yang dipandang perlu, serta memaksimalkan tugas dan fungsi Komite Audit.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021.

DEWAN KOMISARIS PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO),



Unggul Privanto
(Komisaris Utama)



Rahmadi Murwanto
(Komisaris)



Trisno Hendradi
(Komisaris)

Nomor : S-29/DEKOM/INTI/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)/PT INTI**

Kepada Yth.

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta 10110

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Komisaris telah membahas dengan Direksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, maka bersama ini kami sampaikan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Hasil Audit

Atas penyajian Laporan Keuangan PT INTI (Persero) Tahun Buku 2021, KAP "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" memberikan opini **"Wajar dalam semua hal yang material"**. Penekanan atas suatu hal diberikan pada kerugian tahun 2021 yang menyebabkan meningkatnya ekuitas negatif (defisiensi modal) per 11 Desember 2021 menjadi Rp. 539 miliar. Disamping itu perusahaan juga terkena dampak penurunan perekonomian dalam negeri akibat pandemi covid-19, sehingga mengindikasikan adanya ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

b. Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan

URAIAN	2020		2021		% Audit 2021 Tbd	
	AUDIT	RKAP	AUDIT	AUDIT	Audit 2020	RKAP 2021
Penjualan	427,247	706,704	371,731		87.01	52.60
Beban Pokok Penjualan	(399,379)	(607,660)	(326,497)		81.75	53.73
Laba (Rugi) Kotor	27,868	99,045	45,234		162.32	45.67
EBITDA	81,082	34,759	(50,538)		(62.33)	(145.39)
Beban Usaha	(121,637)	(99,678)	(108,582)		89.27	108.93
Rugi Usaha	(93,769)	(633)	(63,348)		67.56	10,001.25
Beban Pendaan	(63,570)	(83,259)	(52,073)		81.91	62.54
Laba (Rugi) sebelum Pajak	(157,339)	(83,892)	(115,421)		73.36	137.58
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(158,434)	(84,112)	(109,424)		69.07	130.09
Aset Lancar	328,568	456,182	300,159		91.35	65.80
Total Hutang	1,686,104	888,076	1,743,754		103.42	196.35
Ekuitas	(449,477)	(324,165)	(538,999)		119.92	166.27
Total Aset	1,236,627	563,912	1,204,755		97.42	213.64
Arus Kas Awal	74,711	47,660	88,012		117.80	184.67
Arus Kas Akhir	88,012	33,615	37,861		43.02	112.63
Total Investasi	2,076	22,254	1,759		84.75	7.91
Skor Tingkat Kesehatan	38,2 (KS)	53,0 (KS)	35,6 (KS)			

1. Permasalahan . . ./2

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp : (62-22) 5201501 (10 Saluran)
Fax : (62-22) 5202444
E-mail: info@inti.co.id

Kantor Cabang Jakarta :
Gedung Menara MTH, Lt. 7
Suite 706-707
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 23
Tebet - Jakarta Selatan 12830
Telp. (62-21) 22833799

1. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan sepanjang tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kesulitan menyediakan modal kerja guna menunjang operasional perusahaan. Hal ini disebabkan restrukturisasi keuangan berupa penyelesaian utang dan optimalisasi aset yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi.
2. Secara umum realisasi kinerja tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP, namun lebih baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 khususnya dalam upaya mengurangi kerugian.
3. Realisasi pendapatan tahun 2021 hanya mencapai 52,6% dari RKAP dan 87,0% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sedangkan Beban Pokok Penjualan mencapai 53,7% dari RKAP dan 81,8% dari realisasi tahun 2020.
4. Realisasi Beban Usaha dan Beban Pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp 160,65 miliar (terdiri dari beban usaha Rp 108,58 miliar dan beban pendanaan Rp 52,07 miliar) menurun cukup besar (13,26%) dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp. 184,21 miliar (beban usaha Rp 121,64 miliar dan beban pendanaan Rp 63,57 miliar). Penurunan beban usaha disebabkan perusahaan berhasil melakukan upaya pengendalian biaya, sedangkan beban pendanaan menurun karena adanya restrukturisasi utang dari perbankan.
5. Realisasi Laba Kotor sebesar Rp. 45,23 miliar meningkat sangat tajam (62,3%) dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp. 27,87 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi pada tahun 2021 berhasil mendapatkan order dengan tingkat margin yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
6. Total Aset per 31 Desember 2021 ditutup dengan saldo sebesar Rp. 1.204,76 miliar dengan total liabilitas sebesar Rp 1.743,75 (144,74%) dan total ekuitas sebesar negatif Rp. 538,99 miliar (-44,74%). Total Aset menurun terus dari tahun-tahun sebelumnya dan negatif Ekuitas juga semakin besar diakibatkan Akumulasi Kerugian yang semakin meningkat.
7. Modal Kerja Bersih (Aset Lancar – Liabilitas Jangka Pendek) perusahaan per 31 Desember 2021 negatif sebesar Rp. 384,09 miliar, menurun dibandingkan realisasi 31 Desember 2020 negatif sebesar Rp. 299,23 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan aktiva lancar dan peningkatan liabilitas jangka pendek.
8. Keterbatasan likuiditas khususnya saldo Kas dan Setoran Kas saat ini berakibat kepada :
 - Penundaan pembayaran kepada vendor yang cukup berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan.
 - Pembayaran Gaji kepada karyawan
 - Penundaan pembayaran pajak
9. Skor tingkat kesehatan perusahaan tahun 2021 sebesar 35,6 (Kurang Sehat - B) menurun dibandingkan tahun 2020 yang 38,2 (Kurang Sehat - B)
10. Realisasi Investasi tahun 2021 sebesar Rp. 1,76 miliar, mengalami penurunan 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2020. Realisasi Investasi terdiri dari Bangunan dan Emplasemen Rp 192 juta, alat olah data Rp. 205,73 juta, Aset Dalam Pembangunan sebesar Rp 377,76 juta, dan Lisensi Software SAP, Merk dan HAKI Rp 983,83 juta.
11. Key Performance Indicator's (KPI) Tahun 2021 tercapai dengan nilai skor sebesar 47,52 atau terjadi penurunan terhadap target RKAP 2021 yang ditetapkan skor 100,00, hal ini terutama disebabkan penurunan yang sangat tajam pada indikator Nilai Sosial Ekonomi untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi dan Pengembangan Karyawan.

- c. Saran dan pendapat untuk dijadikan perhatian dan *corrective action* Direksi untuk lebih meningkatkan kinerja, antara lain sebagai berikut :
1. Direksi agar segera menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana yang tertera dalam Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan" serta menuntaskan temuan-temuan BPK RI yang masih dalam proses penyelesaian.
 2. Upaya Direksi untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan mempersiapkan program kerja untuk tahun-tahun mendatang agar dijalankan sesuai perkembangan bisnis yang ada.
 3. Restrukturisasi perusahaan khususnya berkaitan dengan optimalisasi aset, penyelesaian utang masa lalu, penyediaan tambahan modal kerja dan dana talangan agar terus diupayakan dengan bantuan dari Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan/atau PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA)
 4. Agar perusahaan selalu menerapkan kebijakan akuntansi secara benar dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
 5. Agar diupayakan terus perolehan kontrak-kontrak dengan prioritas pada kontrak dengan margin yang tinggi, modal kerja yang mampu disediakan perusahaan dan perputaran yang cepat
 6. Pendapatan yang berasal dari kontrak yang bersifat '*recurring*' agar terus ditingkatkan untuk menjamin perolehan pendapatan dan margin dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
 7. Agar selalu dilakukan antisipasi terhadap ketersediaan saldo Kas untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak seperti pembayaran kepada pemasok, pajak dan karyawan.
 8. Mencermati kondisi likuiditas perusahaan yang belum menggembirakan, dalam pembiayaan kegiatan perusahaan, ke depan agar dijajagi diversifikasi sumber pembiayaan di luar perbankan, dan mitra usaha yang lain serta dengan pola/mekanisme pembiayaan baru yang dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Agar diupayakan terus penagihan terhadap piutang macet yang berpotensi untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Dalam hal situasi memungkinkan, dapat dilakukan langkah-langkah hukum supaya menimbulkan efek jera bagi para debitur.
 10. Penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berpedoman pada prinsip membantu usaha kecil serta kelancaran pengembalian pinjaman. Oleh karena itu sasaran pembinaan diutamakan pada komunitas di sekitar wilayah unit kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memperkuat hubungan sosial.
- d. Terhadap kinerja laporan perusahaan sampai dengan 31 Desember 2021, Dewan Komisaris merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 PT INTI (Persero) serta Laporan program TJSL PT INTI (Persero) Tahun Buku 2021.
 2. RUPS agar memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitted and discharge*) dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.

- 3 RUPS agar menetapkan penghasilan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, sebagaimana Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan terakhir dengan perubahan Nomor: Per-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017.
3. RUPS agar menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" untuk melakukan *General Audit* Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan TJSL Tahun Buku 2022, dengan pertimbangan sebagaimana telah kami sampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham No. S-26/DEKOM/INTI/5/2022 tanggal 26 Mei 2022 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) dan Anak Perusahaan serta Pengelolaan Program TJSL Tahun Buku 2022.

Demikian kami sampaikan tanggapan dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan RUPS dalam Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 serta Laporan program TJSL PT INTI (Persero) Tahun Buku 2021.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**Dewan Komisaris
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)**



Unggul Privanto
Komisaris Utama



Trisno Hendradi
Komisaris



Rahmadi Murwanto
Komisaris

Tembusan Yth,

1. Wakil Menteri BUMN II;
2. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media;
3. Direktur Utama PT PPA (Persero);
4. Direksi PT INTI (Persero).



PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Headquarters

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253
Tlp : (022) 5201501
Fax : (022) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Jakarta Branch Office

Gedung Graha Pratama Lantai 11
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 15, Tebet
Jakarta Selatan 12810

Production Facilities

Jl. Moch. Toha No. 225 Bandung
Tlp : (022) 5206510